



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) BUPATI BINTAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN**

2016

**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2017**



KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas taufiq dan hidayah- Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bintan Akhir Tahun Anggaran 2016 ini dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan. Hal ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Tahun 2016 merupakan masa transisional, dimana Gubernur Kepulauan Riau melantik Bupati dan Wakil Bupati Bintan untuk periode Tahun 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016, maka sesuai kebutuhan disusunlah RPJMD Tahun 2016-2021. LKPJ Tahun 2016 merupakan LKPJ tahun pertama dalam masa RPJMD Tahun 2016-2021. LKPJ Tahun 2016 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2015 yang dijabarkan dari RPJMD Tahun 2010-2015, sedangkan target kinerjanya diukur berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021. LKPJ Tahun Anggaran 2016 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan pembantuan, dan urusan umum pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016, banyak hasil pembangunan yang telah dicapai, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Berkenaan dengan itu, rekomendasi hasil pembahasan DPRD akan menjadi masukan untuk perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2015.

Demikian LKPJ Tahun 2016 kami sampaikan. akhirnya semoga Allah SWT, senantiasa meridhoi kerja keras kita semua.

Terima Kasih
Bintan Buyu, Maret 2017
BUPATI BINTAN

APRI SUJADI

The background of the page features a series of overlapping, wavy, translucent blue and white bands that create a sense of depth and movement, primarily concentrated on the left side and bottom.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	viii
Daftar Gambar	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
A. Dasar Hukum	I-2
B. Gambaran Umum	I-4
1. Kondisi Geografis Daerah	I-4
2. Gambaran Demografis	I-6
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	I-9
4. Penanggulangan Kemiskinan	I-14
5. Perkembangan Ekonomi	I-15
6. Potensi Unggulan Daerah	I-16
7. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	I-18
8. Tingkat Kestabilan Harga (Inflasi)	I-22
 BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	 II-1
1. Visi dan Misi	II-1
2. Arah Kebijakan Daerah	II-17
3. Prioritas Pembangunan Daerah	II-41
 BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	 III-1
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	III-2
a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	III-2
b. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	III-3
c. Permasalahan dan Solusi	III-5
2. Pengelolaan Belanja Daerah	III-6
a. Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja Daerah	III-6
b. Target dan Realisasi Belanja Daerah	III-31
c. Permasalahan dan Solusi	III-33
3. Pengelolaan Pembiayaan	III-34
a. Kebijakan Umum Pembiayaan	III-34
b. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah	III-35
c. Permasalahan dan Solusi	III-36
 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	 IV-1
1. Urusan Wajib	IV-1
1. Pendidikan	IV-1
2. Kesehatan	IV-33
3. Lingkungan Hidup	IV-159
4. Pekerjaan Umum	IV-192
5. Penataan Ruang	IV-205

6. Perencanaan Pembangunan	IV-210
7. Perumahan	IV-221
8. Kepemudaan dan Olahraga	IV-242
9. Penanaman Modal	IV-245
10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	IV-257
11. Kependudukan dan Catatan Sipil	IV-265
12. Ketenagakerjaan	IV-271
13. Ketahanan Pangan	IV-284
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-291
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	IV-299
16. Perhubungan	IV-306
17. Komunikasi dan Informatika	IV-318
18. Pertanahan	IV-321
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	IV-324
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.	IV-332
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-367
22. Sosial	IV-377
23. Kebudayaan	IV-398
24. Statistik	IV-403
25. Kearsipan	IV-406
26. Perpustakaan	IV-408
2. Urusan Pilihan	IV-412
1. Pariwisata	IV-412
2. Kelautan dan Perikanan	IV-423
3. Pertanian	IV-430
4. Kehutanan	IV-463
5. Energi dan Sumber Daya Mineral	IV-471
6. Industri	IV-488
7. Perdagangan	IV-492
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	V-1
1. Tugas Pembantuan yang Diterima	V-1
a. Dasar Hukum	V-2
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	V-4
c. Instansi Penerima Tugas	V-4
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	VI-1
1. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	VI-1
2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah	VI-3
3. Pembinaan Batas Wilayah	VI-6
4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	VI-9
5. Pengelolaan Kawasan Khusus	VI-24
6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	VI-37
BAB VII PENUTUP	VII-1

The background of the page features a series of overlapping, wavy, translucent blue and white bands that create a sense of depth and movement, primarily concentrated on the left side and bottom.

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

TABEL	URAIAN	Hal
Tabel 1.1	: Jumlah penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Bintan, Tahun 2016	I-6
Tabel 1.2	: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Dependency Rasio di Kabupaten Bintan, Tahun 2015-2016	I-7
Tabel 1.3	: Perkembangan IPM Kabupaten Bintan Tahun 2015-2016	I-10
Tabel 1.4	: Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2016	I-11
Tabel 1.5	: Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2016	I-13
Tabel 1.6	: Pendapatan Riil Perkapita Masyarakat Kabupaten Bintan, Tahun 2015-2016	I-13
Tabel 1.7	: Proporsi Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan, Tahun 2015-2016	I-15
Tabel 1.8	: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015-2016	I-19
Tabel 1.9	: Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015-2016	I-20
Tabel 1.10	: Laju Pertumbuhan Persektor Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2016	I-21
Tabel 1.11	: Laju Inflasi (IHK) Kabupaten Bintan (berdasarkan IHK Kota Tanjungpinang) Tahun 2015-2016	I-22
Tabel 3.1	: Target Penerimaan Daerah Tahun 2015-2016	III-3
Tabel 3.2	: Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015-2016 (dalam rupiah)	III-4
Tabel 3.3	: Realisasi pendapatan asli daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2016 (dalam rupiah)	III-5
Tabel 3.4	: Alokasi anggaran belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2016	III-8
Tabel 3.5	: Prosentase Alokasi Anggaran Belanja berdasarkan bagian belanja APBD tahun 2016	III-12
Tabel 3.6	: Kebijakan program dan kegiatan belanja APBD tahun 2016 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan	III-14
Tabel 3.7	: Anggaran belanja pelayanan dasar tahun 2016Tahun 2011-2015	III-30
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI BINTAN TAHUN 2016		Hal. iv

Tabel 3.8	: Anggaran dan Realisasi belanja APBD tahun 2016 (dalam rupiah)	III-32
Tabel 3.9	: Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 (dalam rupiah)	III-35
Tabel 4.1	: Penyaluran BOSNAS untuk tingkat SD Tahun 2015 s/d 2016	IV-8
Tabel 4.2	: Penyaluran BOSNAS untuk tingkat SMP Tahun 2015 s/d 2016	IV-8
Tabel 4.3	: Perkembangan Pemantauan Kualitas Air dan Udara di Kabupaten Bintan Tahun 2016	IV-166
Tabel 4.4	: Rekapitulasi Pelayan Pemanfaatan Ruang Dan Pengendaliannya TA. 2016	IV-208
Tabel 4.5	: Perkembangan PMA dan PMDN s/d Tahun 2016	IV-248
Tabel 4.6	: Perkembangan Investasi Daerah PMA di Kabupaten Bintan Tahun 2016	IV-248
Tabel 4.7	: Perkembangan Investasi Daerah PMDN di Kabupaten Bintan Tahun 2016	IV-249
Tabel 4.8	: Perkembangan Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bintan Tahun 2015 s/d 2016	IV-249
Tabel 4.9	: Jenis Perizinan dan Jumlah yang dikeluarkan oleh BPMPD Tahun 2016	IV-252
Tabel 4.10	: Jumlah Koperasi di Kabupaten Bintan Tahun 2016	IV-257
Tabel 4.11	: Jumlah Kecelakaan Kerja di Kabupaten Bintan dari Tahun 2015-2016	IV-277
Tabel 4.12	: Penyelesaian PHI dan PHK di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2016	IV-280
Tabel 4.13	: Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan berdasarkan Upah Minimum Tahun 2015-2016	IV-281
Tabel 4.14	: Daftar Partai dan Jumlah Kursi di DPRD Kabupaten Bintan Periode 2016 – 2019	IV-328
Tabel 4.15	: Daftar penyebaran Rumah Ibadah di Kabupaten Bintan	IV-330
Tabel 4.16	: Jumlah Wajib Pajak yang di Tagih UPT Gunung Kijang	IV-409
Tabel 4.17	: pematkhiran piutang pbb p2	IV-410
Tabel 4.18	: Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Kabupaten Bintan	IV-435
Tabel 4.19	: Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah dari Tahun 2006-2016	IV-348
Tabel 4.20	: Jumlah Paket Pembangunan Fisik Tahun Anggaran 2016	IV-350
Tabel 4.21	: Lokasi dan Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Tahun Anggaran 2016	IV-353

Tabel 4.22	: Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016	IV-357
Tabel 4.23	: Komponen Penilaian SAKIP	IV-361
Tabel 4.24	: Kategori dan Penilaian Angka	IV-363
Tabel 4.25	: Hasil evaluasi SAKIP terhadap SKPD dan Kategori Penilaian	IV-364
Tabel 4.26	: Jumlah PNS yang melaporkan LP2P	IV-364
Tabel 4.27	: Daftar Jumlah dan Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bintan Tahun 2016	IV-383
Tabel 4.28	: Komponen PKH Tahun 2016	IV-384
Tabel 4.29	: Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bantuan yang dibayarkan pada Tahun 2016	IV-385
Tabel 4.30	: Jenis dan jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2016	IV-387
Tabel 4.31	: Daftar Jumlah dan Jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Di Kabupaten Bintan Tahun 2016	IV-387
Tabel 4.32	: Penilaian KUBE Perdesaan Berprestasi	IV-439
Tabel 4.33	: Penilaian KUBE Perkotaan Berprestasi	IV-439
Tabel 4.34	: Penilaian Pendamping Berprestasi	IV-439
Tabel 4.35	: Daftar Alokasi dan Sasaran Bantuan RS RTLH di Kabupaten Bintan Tahun 2016	IV-391
Tabel 4.36	: Data Sanggar Yang Di Bina	IV-398
Tabel 4.37	: Cagar Budaya di Kabupaten Bintan	IV-400
Tabel 4.38	: Daftar Objek Wisata Per Kecamatan	IV-412
Tabel 4.39	: PDRB Sektor Pariwisata	IV-413
Tabel 4.40	: Daftar Desa Wisata di Kabupaten Bintan	IV-414
Tabel 4.41	: Daftar Desa Wisata di Kabupaten Bintan	IV-414
Tabel 4.42	: Kunjungan wisatawan	IV-415
Tabel 4.43	: Realisasi penebusan pupuk bersubsidi Kabupaten Bintan per-Kecamatan tahun 2016	IV-432
Tabel 4.44	: Kelompok Tani Penerima Bibit Karet Unggul Sumber Kebun Entrys Kabupaten Bintan	IV-455
Tabel 4.45	: Kegiatan Pelatihan Petani Dan Petugas Okulasi	IV-456
Tabel 4.46	: Potensi Pengembangan Perkebunan Kabupaten Bintan Tahun 2016	IV-458
Tabel 4.47	: Kerusakan Kawasan Hutan Lindung Sungai Jago tahun 2016	IV-468
Tabel 4.48	: Rasio Elektrifikasi Listrik Desa di Kab. Bintan Tahun 2016	IV-482
Tabel 4.49	: Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Bintan Tahun 2016	IV-485

Tabel 4.50	: Neraca Listrik Kabupaten Bintan Tahun 2016	IV-485
Tabel 4.51	: Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik	IV-486
Tabel 4.52	: Jumlah Ikm Aktif Di Kabupaten Bintan Tahun 2016	IV-490
Tabel 5.1	: pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016	V-17
Tabel 5.2	: Realisasi Sumber Pendanaan Tugas Pembantuan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016	V-22
Tabel 6.1	: Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bintan Tahun 2016	VI-11
Tabel 6.2	: Jumlah Pegawai pada SATPOL PP Kabupaten Bintan Tahun 2016	VI-38
Tabel 6.3	: Data Efisiensi Pelelangan/Seleksi Melalui Lpse Kabupaten Bintan	VI-48

The background of the page features a series of overlapping, wavy, translucent blue and white bands that create a sense of depth and movement, primarily concentrated on the left side and bottom.

DAFTAR GRAFIK/ GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SLB/Paket A 2011-2016	IV-2
Grafik 4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SLB/Paket A 2011-2016.	IV-3
Grafik 4.3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs 2011-2016	IV-3
Grafik 4.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs 2011-2016	IV-4
Grafik 4.5	Pemantauan Kualitas Air, Udara, Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Bintan	IV-166
Grafik 4.6	Jumlah Pelaku Usaha (UMKM) Kabupaten Bintan Tahun 2015-2016	IV-260
Grafik 4.7	Jumlah Tenaga Kerja Umkm Kabupaten Bintan Tahun 2015-2016	IV-261
Grafik 4.8	Jumlah Tenaga Kerja Umkm Kabupaten Bintan Tahun 2015-2016	IV-276
Grafik 4.9	Perbandingan UMP dengan UMK Bintan Tahun 2011-2016	IV-281
Grafik 4.10	Jumlah Taman Bacaan / Perpustakaan di Kabupaten Bintan	IV-498
Grafik 4.11	Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan dari Tahun 2015 s.d 2016	IV-501
Grafik 4.12	Perkembangan Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah dari Tahun 2015 s.d. 2016	IV-501
Grafik 4.13	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Tahun 2016	IV-576
Grafik 4.14	Rasio Elektrifikasi Kabupaten Bintan Tahun 2015 – 2016	IV-577

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administratif Kabupaten Bintan	I-5
Gambar 4.1	Tingkat Keterisian Data SIPD Kabupaten Bintan Tahun 2016	IV-494
Gambar 4.2	Rapat penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi	IV-524
Gambar 4.3	Pembinaan Tanaman Sayuran Dataran rendah di Bintan	IV-524
Gambar 4.4	Penyebaran bibit alpukat yang disebarakan ke petani	IV-528
Gambar 4.5	Petani Mendapatkan Bantuan Bibit Salak Sari Intan untuk dikembangkan sekaligus sebagai penangkar	IV-529
Gambar 4.6	Pemeriksaan rutin kesehatan ternak sapi di Bintan	IV-537
Gambar 4.7	Pembibitan karet okulasi di Kebun Entrys Kabupaten Bintan	IV-544
Gambar 4.8	Penyerahan bibit karet okulasi hasil Kebun Entrys Kabupaten Bintan Kepada Petani	IV-548
Gambar 4.9	Serangan hama dan penyakit pada tanaman karet	IV-550
Gambar 4.10	Serangan hama dan penyakit pada buah / tanaman kakao	IV-551
Gambar 4.11	Serangan hama dan penyakit pada tanaman kelapa	IV-551
Gambar 4.12	Pemasangan Plang Himbauan Menjaga dan Melestarikan Hutan di Kabupaten Bintan	IV-555
Gambar 4.13	Penanaman Pohon yang dilaksanakan Oleh Dinas Pertanian bersama Instansi Lain dilingkungan Kantor Bupati Bintan	IV-556
Gambar 6.1	Peta Rencana Alokasi Lahan PT. BAI di Kawasan FTZ Galang Batang	VI-33

The background of the page features a series of overlapping, wavy, translucent blue and white bands that create a sense of depth and movement, primarily concentrated on the left side and bottom.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; pasal 69 ayat (1) menegaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Riangkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; pasal 70 ayat (4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir; Pasal 71 ayat (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Ayat (2) Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara prinsip LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat yang direpresentasikan oleh DPRD, sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bintan Akhir Tahun Anggaran 2016 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2016–2021 yang merupakan pedoman operasional pembangunan, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin keterkaitan

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian, serta evaluasi bagi pelaksanaan pembangunan dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, LKPJ Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai: (i) Kebijakan Umum Anggaran (KUA); (ii) Pengelolaan Keuangan Daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; (iii) Penyelenggaraan urusan Desentralisasi; (iv) penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan (v) Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

1.2 Dasar Hukum

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bintan Akhir Tahun Anggaran 2016 secara umum memberikan gambaran pelaksanaan program / kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada 2016 yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bintan Akhir Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Bintan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 36);

1.3 Gambaran Umum

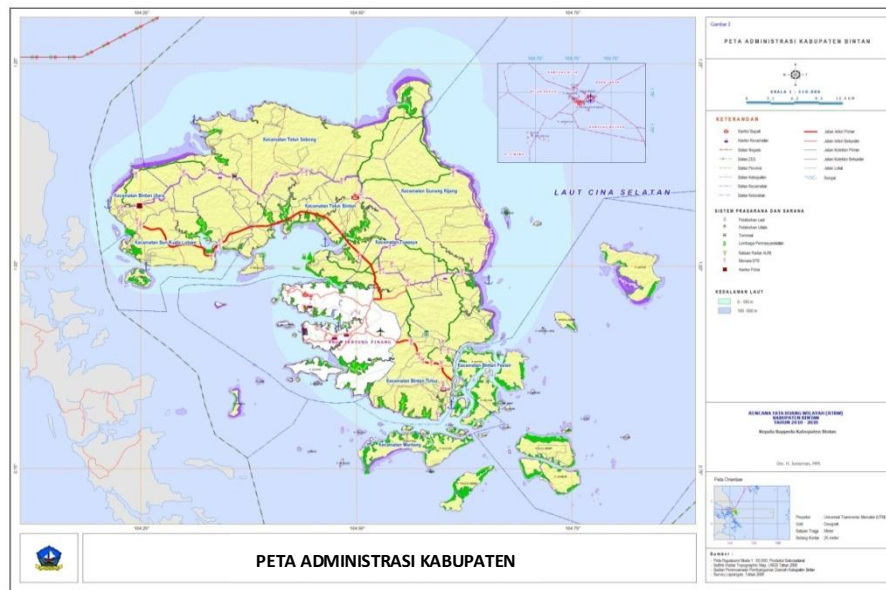
1.3.1 Kondisi Geografis Daerah

a. Batas Administrasi

Kabupaten Bintan secara geografis terletak antara 0°06'17"-1°34'52" Lintang Utara dan 104°12'47" Bujur Timur di sebelah Barat-108°02'27" Bujur Timur di sebelah Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Natuna, Anambas dan Malaysia.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga.
- Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.
- Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 1.1 : Peta Administratif Kabupaten Bintan



Sumber : BPPPD Kabupaten Bintan Tahun 2017

b. Luas Wilayah

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan seluruhnya mencapai 87.717,84 Km², luas daratannya hanya 1,50% atau sebesar 1.319,51 Km² saja dan luas lautnya 86.398,33 Km² (98,50%). Kecamatan terluas daratannya adalah Kecamatan Gunung Kijang dengan luas 503,12 Km² dan Kecamatan terkecil adalah Tambelan yaitu 169,42 Km². Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa.

c. Topografi

Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama Paparan kontinental yang disebut Paparan Sunda. Morfologi pulau Bintan tidak memiliki perbedaan

ketinggian yang menyolok yaitu antara 0-350 meter dari muka laut. Penonjolan puncak-puncak bukit antara lain Gunung Bintang 348 meter, Gunung Bintang Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian dibawah 100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir kearah Utara dan Selatan dengan pola sub-paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub-radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar. Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintang beriklim tropis. Pada tahun 2016 di wilayah Kabupaten Bintang temperatur rata-rata terendah sebesar 19⁰ celcius dan tertinggi rata-rata sebesar 33,6⁰ celcius dengan kelembaban nisbi rata-rata tercatat sekitar 83%. Kecepatan arah angin rata-rata 18km/jam dengan arah angin bervariasi.

1.3.2 Gambaran Demografis

a. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Bintang berdasarkan estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintang tahun 2016 berjumlah sebesar 154.584 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 79.576 jiwa (51,48%) dan penduduk perempuan sebesar 75.008 jiwa (48,52%). Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan (*sex ratio*) sebesar 106,09. Artinya setiap 100 perempuan berbanding dengan 106 penduduk laki-laki, jumlah penduduk laki-laki 2.95% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Persentase ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kecamatan yang terpadat penduduknya masih tercatat kecamatan Bintang Timur dengan jumlah penduduk tertinggi 42.374 jiwa (27,41%), sedangkan yang terendah adalah dikecamatan Mantang sebanyak 4.232 jiwa (2,74%).

Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Bintang Tahun 2016

Kecamatan	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Teluk Bintang	5.137	4.568	9.705
Bintang Utara	11.494	11.530	23.024

Teluk Seborg	9.212	8.187	17.399
Seri Kuala Lobam	8.667	10.488	19.155
Bintan Timur	21.950	20.424	42.374
Gunung Kijang	7.105	5.938	13.043
Mantang	2.299	1.933	4.232
Bintan Pesisir	4.744	3.952	8.696
Toapaya	6.193	5.359	11.552
Tambelan	2.775	2.629	5.404
KABUPATEN BINTAN	79.576	75.008	154.584

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2017

Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Dependency Rasio di Kabupaten Bintan, Tahun 2015-2016

No	Kelompok Umur	Tahun	
		2015	2016*
1.	0-4	16.518	16.651
2.	5-9	16.769	16.934
3.	10-14	14.291	14.465
4.	15-19	10.301	10.419
5.	20-24	10.684	10.748
6.	25-29	15.373	15.477
7.	30-34	16.178	16.294
8.	35-39	14.068	14.189
9.	40-44	11.282	11.401
10.	45-49	8.570	8.685
11.	50-54	6.050	6.145
12.	55-59	4.503	4.578
13.	60-64	3.336	3.394
14.	65-69	2.339	2.385
15.	70-74	1.473	1.504
16.	75+	1.285	1.315
Jumlah		153.020	154.584
Dependency Rasio		52,49	52,56

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2017

* : Data Sangat Sementara

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun

menunjukkan angka yang fluktuatif. LPP rata-rata tahun 2010 - 2015 adalah sebesar 1.56 per tahun, sedangkan pada tahun 2016 LPP Kabupaten Bintan diestimasi 1,02% menurun dibanding tahun 2015 yaitu 1,26% yang diperkirakan berbanding lurus dengan meningkatnya capaian kegiatan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bintan.

Sedangkan Angka beban ketergantungan (***Dependency Ratio***) atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) Kabupaten Bintan pada tahun 2015 mencapai 52.49 dan terus menunjukkan peningkatan pada tahun 2016 yang diestimasi sebesar 52,56. Artinya bahwa pada tahun 2015, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bintan menanggung sekitar 52 penduduk usia belum/tidak produktif.

b. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan salah satu komponen yang esensial dalam proses pembangunan. jumlah tenaga kerja beserta komposisinya terus mengalami perubahan seiring dengan dinamisnya perkembangan jumlah penduduk. Salah satu masalah yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bintan adalah tidak seimbangnya antara pertumbuhan tenaga kerja dengan kesempatan kerja yang mengakibatkan terjadinya pengangguran. Pada tahun 2016 angka pengangguran di Kabupaten Bintan diestimasi 6,98%. Namun berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Bintan untuk menekan tingkat pengangguran. Berbagai upaya tersebut diarahkan melalui pendekatan pembangunan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (***production-centered development***)

1.3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) serta merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salahsatu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2014 BPS Indonesia mengubah metodologi perhitungan IPM, hal ini dikarenakan beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Selain itu PDB perkapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; secara teknis penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam perhitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah pada suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi yang lain. Dengan perhitungan IPM metode baru maka indikator yang digunakan lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik. Dengan adanya data rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi, PNB menggantikan PDB juga lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Bintan diestimasi 72,34 poin meningkat dari tahun 2015 yaitu 71,92 poin.

Tabel 1.3 : Perkembangan IPM Kabupaten Bintan Tahun 2015-2016

No	Tahun	IPM
1	2015	71,92
2	2016*)	72,34

Sumber : BP3D Kabupaten Bintan, Tahun 2017

*) : Data Estimasi

Walaupun IPM di Kabupaten Bintan sudah tergolong tinggi, namun Kabupaten Bintan masih berpotensi untuk meningkatkan angka IPM melalui berbagai usaha secara simultan, baik melalui pendekatan sektoral pendidikan, kesehatan dan ekonomi, maupun secara terintegrasi melalui anggaran pemerintah, swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha, atau kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya dapat meningkatkan capaian IPM menjadi sangat tinggi.

a. Pendidikan

Tolok ukur bidang pendidikan adalah indikator mutu pendidikan yang dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut terdiri atas angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Angka partisipasi kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu atau dengan kata lain APK tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK yang tinggi menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Sedangkan angka partisipasi murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut, dengan kata lain APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya.

Dari hasil evaluasi kinerja Wajib Belajar Dikdas 9 tahun serta berdasarkan estimasi BP3D Kabupaten Bintan diketahui bahwa tahun 2015 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD yaitu 98,98% meningkat menjadi 99,28% pada tahun 2016. Artinya pada tahun 2016 ada sebanyak 99,28% penduduk yang berusia 7-12 tahun telah tertampung di SD. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan SD pada tahun 2015 yaitu 107,52 menjadi 107,15% pada tahun 2016. Hal ini membuktikan bahwa jumlah murid SD yang dapat ditampung pada sekolah-sekolah SD yang ada sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, namun demikian masih banyak murid SD yang berumur kurang atau melebihi usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan SD. Untuk APK jenjang SMP/MTs tahun 2015 adalah 95,70% sedangkan pada tahun 2016 yaitu 98,24%. Untuk APM SMP/MTs pada tahun 2015 yaitu 87,96% sedangkan 2016 yaitu 94,42%.

Jika dilihat berdasarkan komponennya, peningkatan capaian angka IPM Kabupaten Bintan semakin baik. Menurut data hasil olahan BP3D Kabupaten Bintan pada tahun 2015 harapan lama sekolah 11,97 tahun diestimasi meningkat menjadi 12,16 tahun pada tahun 2016. Sedangkan rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia diatas 25 tahun di Kabupaten Bintan pada tahun 2015 yaitu 8,36 tahun dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 8,42 hal ini menunjukkan penurunan angka *drop out* dari tahun ke tahun sehingga mampu menunjang pencapaian rata-rata lama sekolah yang terus mengalami peningkatan.

Tabel 1.4 : Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2016

No	Tahun	Harapan lama sekolah (tahun)	Rata-Rata lama sekolah (tahun)
1.	2015	11,80	8,30
2.	2016*)	11,97	8,36

Sumber : BP3D Kabupaten Bintan, 2017

*) : Data Estimasi

Berbagai pencapaian di bidang pendidikan tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan diantaranya dengan meneruskan implementasi kebijakan penyelenggaraan **Bantuan Operasonal Sekolah (BOS)**

pemerataan pendidikan melalui bantuan kepada siswa kurang mampu, serta melakukan pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Bintan juga memberikan perhatian penting terhadap guru melalui peningkatan kualitas serta kesejahteraan guru.

b. Kesehatan

Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bintan pada tahun 2015 adalah 69,99 tahun dan menurut data hasil olahan BP3D Kabupaten Bintan AHH diestimasi meningkat menjadi 70,01 tahun pada tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya secara komprehensif serta telah melakukan koordinasi lintas sektoral secara intensif dalam rangka mewujudkan perbaikan bidang kesehatan dengan capaian utama Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kesehatan (IK). Angka Harapan Hidup (AHH) dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Pemerintah Kabupaten Bintan masih berusaha keras untuk menekan Angka Kematian Bayi maupun Angka Kematian Ibu saat melahirkan setiap tahunnya dalam rangka membantu mendorong Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup diyakini memiliki hubungan berbanding terbalik terhadap kemiskinan. Peningkatan Angka Harapan Hidup dipercaya mampu menekan bahkan mengurangi angka kemiskinan. Intervensi pemerintah melalui berbagai kebijakan untuk memperbaiki kondisi kesehatan diharapkan mampu berdampak pada meningkatnya produktivitas golongan miskin, kesehatan yang lebih baik dan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Terkait dengan usaha peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Bintan sangat proaktif dalam mendukung implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional. Perkembangan positif ini sangat mempengaruhi angka Indeks Kesehatan (IK) Kabupaten Bintan.

Tabel 1.5 : Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2016

No	Tahun	Angka Harapan Hidup
1.	2015	69,99
2.	2016*)	70,01

Sumber : BP3D Kabupaten Bintan, 2017

*) : Data Estimasi

c. Daya Beli

Berdasarkan estimasi Badan Penelitian, Pengembangan Statistik Evaluasi dan Perencanaan Kabupaten Bintan pencapaian daya beli (*Purchasing Power Parity*) masyarakat Kabupaten Bintan yang diukur dengan pendapatan riil perkapita/tahun menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 pendapatan riil perkapita mencapai sebesar Rp13.596.240,- meningkat menjadi sebesar Rp13.753.640,- pada tahun 2016. Peningkatan Pendapatan Riil Perkapita Kabupaten Bintan yang meningkat juga menggambarkan Daya Beli masyarakat Kabupaten Bintan yang meningkat. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh kinerja makro dan mikro ekonomi. Hal ini tercermin dari besaran pencapaian pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali.

Tabel 1.6 : Pendapatan Riil Perkapita Masyarakat Kabupaten Bintan, Tahun 2015-2016

No	Tahun	Pendapatan Riil Perkapita (Ribu Rp)
1	2015	13.596,24
2	2016*)	13.753,64

Sumber : BP3D Kabupaten Bintan, 2017

*) : Data Estimasi

Pada umumnya indikator-indikator IPM berkembang secara *steady*, namun pendapatan penduduk dan daya beli sangat dipengaruhi oleh kinerja perekonomian. Perekonomian yang kondusif akan memungkinkan terciptanya iklim ekonomi yang prospektif. Iklim perekonomian yang kondusif diharapkan akan membuka kesempatan kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatannya yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Tingkat kondusifitas perekonomian sangat sensitif

terhadap perkembangan perkembangan harga (*inflasi*). Inflasi tinggi akan dapat memberi dampak secara langsung menurunkan daya beli masyarakat. Pengendalian laju inflasi dipercaya akan sangat berdampak dalam menjaga dan menumbuhkan daya beli masyarakat. Mengantisipasi kebijakan makro ekonomi nasional yang mungkin mengalami perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat maka pemerintah daerah Kabupaten Bintan telah melaksanakan program Peningkatan Ketahanan Masyarakat, serta program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dan program lainnya sehingga kebutuhan dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan tertinggal dapat terpenuhi dalam rangka mendukung peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Bintan.

1.3.4 Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Bintan sangat komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan memberantas kemiskinan seperti yang telah dicanangkan melalui deklarasi milenium atau yang lebih dikenal dengan Millenium Development Goals (MDGs).

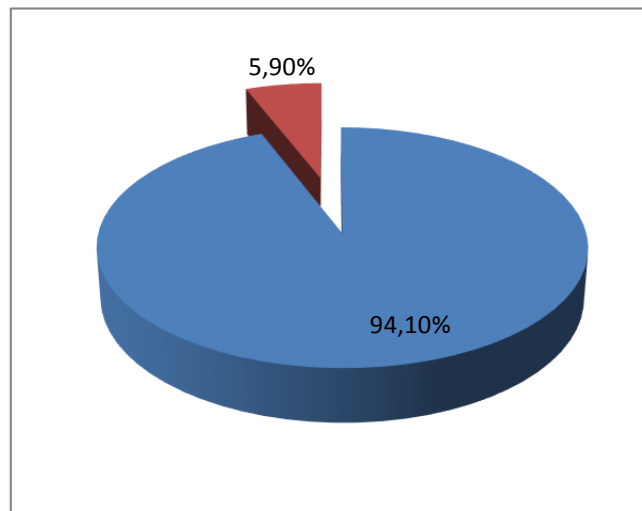
Dari 8 tujuan MDGs yang disepakati kewajiban pemerintah daerah hanya memiliki 7 tujuan MDGs yakni menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya dan memastikan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan pencapaian tujuan membangun kemitraan global untuk pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pencapaian target MDGs tersebut telah diimplementasikan dengan cara mengintegrasikannya ke dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dari berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan telah menunjukkan manfaat (*outcome*) cukup positif dalam menekan angka

kemiskinan pada tahun 2016 angka kemiskinan di Kabupaten Bintan diestimasi menjadi 5,90% dari kondisi tahun sebelumnya yaitu 6,07%.

Tabel 1.7 : Proporsi Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan, Tahun 2015-2016

Tahun	Persentase Penduduk Miskin
2015	6,07
2016*)	5,90



Sumber : BP3D Kabupaten Bintan, Tahun 2017
*) : Data Estimasi

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Provinsi Kepulauan Riau maupaun Pemerintah Pusat terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui program-program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; (4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

1.3.5 Perkembangan Ekonomi

Salah satu indikator kinerja pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi pemerintahan daerah dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut, serta usaha dalam

mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Beberapa indikator pencapaian pembangunan ekonomi adalah: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan tingkat inflasi. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan yaitu Industri, Pariwisata dan Pertanian, dengan uraian sebagai berikut :

1.3.6 Potensi Unggulan Daerah

Salah satu stimulan peningkatan potensi unggulan daerah Kabupaten Bintan adalah dengan ditetapkannya Kabupaten Bintan sebagai salah satu Kawasan *Free Trade Zone*. Pembentukan *Free Trade Zone* di Kabupaten Bintan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Adapun daerah yang termasuk dalam *Free Trade Zone* Bintan adalah kawasan Bintan Utara dengan liputan wilayah hampir setengah Pulau Bintan. Terdapat 5 lokasi lain yang berupa *enclave* yaitu kawasan Anak Lobam, kawasan Maritim Bintan Timur, kawasan Galang Batang, kawasan Galang Batang, kawasan Senggarang dan kawasan Industri Dompok Barat. Dengan adanya pemekaran wilayah, maka Kota Tanjungpinang menjadi suatu wilayah administratif yang berdiri sendiri. Dalam hal ini kawasan Senggarang dan kawasan industri Dompok Barat termasuk ke dalam *Free Trade Zone* Bintan wilayah kota Tanjungpinang. Kawasan Industri Lobam termasuk dalam lingkup Kawasan Bintan Bagian Utara.

Free Trade Zone Bintan dengan luas 62.017,20 Ha tersebut saat ini 23.000 Ha merupakan kawasan wisata internasional Lagoi yang dikelola sendiri oleh Penanam Modal Asing dengan *core* wisata pantai dan golf. Sedangkan seluas 4.000 Ha merupakan kawasan industri Lobam.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Batam, Bintan dan Karimun maka kawasan *Free Trade Zone* Batam Bintan Karimun mencakup 26 Kecamatan yang 7 kecamatan diantaranya termasuk sebagian wilayah Kabupaten Bintan.

Adapun Struktur Ruang Kawasan *Free Trade Zone Bintan* terdiri dari sistem pusat kegiatan (PK) Primer yaitu:

1. Pusat Kegiatan Berorientasi Ekspor, yaitu kawasan industri Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang, Kawasan Industri Lobam di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kawasan Maritim Bintan Timur di Kecamatan Bintan Timur. Fungsi utama Pusat Kegiatan Berorientasi Ekspor ini adalah pengembangan industri skala besar. Sedangkan fungsi pendukungnya sebagai simpul transportasi, pemukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal.
2. Pusat Kegiatan Pariwisata Mancanegara dan Domestik, yaitu Kawasan Wisata Internasional Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong, Kawasan Wisata Penghujan-Kuala Sempang di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kawasan Wisata Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Kawasan Wisata Sakera di Kecamatan Bintan Utara. Fungsi utama Pusat Kegiatan Pariwisata Mancanegara dan Domestik ini adalah pengembangan kepariwisataan. Sedangkan fungsi pendukungnya sebagai pemukiman dan simpul transportasi penumpang.
3. Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa, yaitu Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan, dan Pusat Kegiatan Perdagangan dan jasa tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara. Fungsi utama Pusat Kegiatan Perdagangan dan jasa ini adalah perdagangan dan jasa internasional. Sedangkan fungsi pendukungnya adalah pemukiman, simpul transportasi penumpang dan wisata belanja.
4. Pusat Kegiatan Transportasi Laut, yakni pelabuhan Bandar Seri Udana dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Bandar Seri Bentan di Kecamatan teluk Bintan, dan Pelabuhan Kijang di Kecamatan Bintan Timur. Fungsi Utama Pusat Kegiatan Transportasi Laut ini adalah pertransportasian. Sedangkan fungsi pendukungnya adalah pelayanan perpindahan penumpang dan barang.

5. Pusat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan Negara, yakni Mentigi di Kecamatan Bintan Utara, Gunung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong, dan Tanjung Berakit dan Tanjung Sading di Kecamatan Teluk Sebong. Fungsi utama Pusat Kegiatan Kegiatan Pertahanan dan Keamanan Negara ini adalah pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan fungsi pendukungnya adalah menjaaga kedaulatan KNRI yang meliputi pertahanan dan keamanan laut serta udara.
6. Pusat Kegiatan Kesehatan, Kawasan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan, dan Kawasan Perkotaan Tanjung Uban dan Kawasan Seri Kuala Lobam di Kecamatan Bintan Utara. Fungsi utama Pusat Kegiatan Kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan berkualitas internasional. Sedangkan fungsi pendukungnya penyediaan pelayanan perkotaan.

Kabupaten Bintan masih mengandalkan sektor industri pengolahan masih sebagai penyumbang PDRB terbesar pada 5 tahun terakhir dengan kontribusi mencapai 39,56%. *Spill over effect* pembangunan Singapura dan Malaysia yang merupakan kutub utama pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara telah berimbas pada perkembangan Industri di Kabupaten Bintan sebagai pendukung sektor industri Singapura. Sedangkan sub sektor Pariwisata dan jasa merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar di Kabupaten Bintan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 PAD dari sub sektor pariwisata mencapai Rp99,35 Milyar atau mencapai 50,39% dari total realisasi PAD Kabupaten Bintan tahun 2016.

1.3.7 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Berdasarkan hasil olahan data maka PDRB Kabupaten Bintan pada tahun 2016 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 diestimasi sebesar Rp.12,48 trilyun,- meningkat dari tahun 2015 yaitu Rp.12,21 trilyun,- yang diukur dari tujuh belas sektor lapangan usaha yaitu:

Tabel 1.8 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015-2016

No.	Lapangan Usaha	2015	2016*)
SEKTOR PRIMER		2.436.582,46	2.111.174,41
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	737.313,71	780.752,40
2	Pertambangan dan Penggalian	1.699.268,76	1.330.422,02
SEKTOR SEKUNDER		6.607.379,14	6.997.473,15
3	Industri Pengolahan	4.686.352,08	4.936.062,06
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15.743,87	16.440,93
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.575,09	8.093,11
6	Konstruksi	1.897.708,09	2.036.877,05
SEKTOR TERSIER		3.174.688,63	3.369.661,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.115.420,97	1.189.190,60
8	Transportasi dan Pergudangan	267.113,42	287.510,81
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	634.467,81	650.934,42
10	Informasi dan Komunikasi	176.120,20	187.123,34
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	204.642,47	222.180,50
12	Real Estate	136.573,99	146.493,92
13	Jasa Perusahaan	123,10	128,81
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	277.043,16	298.550,26
15	Jasa Pendidikan	226.126,81	242.284,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	114.342,07	121.813,75
17	Jasa lainnya	22.714,63	23.451,13
PDRB BERLAKU		12.218.650,24	12.487.309,53

Sumber : BP3D Kabupaten Bintan, Tahun 2017

*) :Data Estimasi

Sektor-sektor yang memiliki nilai kontribusi besar terhadap PDRB adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 39,56%, sektor konstruksi 15,68%, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,66%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,53% serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,22%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.9 : Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015-2016

	Lapangan Usaha	2015	2016*)
Sektor Primer		19,94	16,92
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,03	6,26
2	Pertambangan dan Penggalian	13,91	10,66
Sektor Sekunder		54,08	56,08
3	Industri Pengolahan	38,35	39,56
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06
6	Konstruksi	15,53	16,32
Sektor Tersier		25,98	27,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,13	9,53
8	Transportasi dan Pergudangan	2,19	2,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,19	5,22
10	Informasi dan Komunikasi	1,44	1,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,67	1,78
12	Real Estate	1,12	1,17
13	Jasa Perusahaan	0,00	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,27	2,39
15	Jasa Pendidikan	1,85	1,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94	0,98
17	Jasa lainnya	0,19	0,19
PDRB BERLAKU		100.00	100.00

Sumber : BP3D Kabupaten Bintan, Tahun 2017

*) : Data Estimasi

Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil digunakan PDRB Harga Konstan. PDRB Harga Konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih yaitu tahun 2010. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diukur dari kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga

konstan pada tahun 2016 mengalami perlambatan dari tahun 2015. Pada tahun 2015 LPE Kabupaten Bintan adalah 6,42% mengalami perlambatan pada tahun 2016 menjadi 5,30%. Penurunan LPE di Kabupten Bintan pada tahun 2016 disinyalir sebagai imbas dari kondisi makro perekonomian di tingkat regional, nasional serta dunia masih labil dan fluktuatif, pelarangan ekspor bahan mentah pertambangan menurunkan aktifitas pertambangan yang turut berimbas pada pertumbuhan sektor Pertambangan dan Penggalian. Fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan pemerintah berdasarkan harga pasar memberikan dampak pada ketidakpastian harga pasar, kenaikan Tarif Dasar Listrik, isu stabilitas ekonomi nasional melalui paket-paket kebijakan yang diambil ditingkat pusat juga mempengaruhi belanja publik.

Tabel 1.10 : Laju Pertumbuhan Persektor Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2016

	Lapangan Usaha	2015	2016*)
Sektor Primer		-0,43	-5,31
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,04	6,91
2	Pertambangan dan Penggalian	-7,81	-11,26
Sektor Sekunder		8.33	6.61
3	Industri Pengolahan	7,25	6,92
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,15	4,43
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,76	6,84
6	Konstruksi	9,26	9,64
Sektor Tersier		9,24	7,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,41	7,97
8	Transportasi dan Pergudangan	9,69	8,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,17	8,93
10	Informasi dan Komunikasi	6,07	6,25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,30	8,57
12	Real Estate	7,02	7,26
13	Jasa Perusahaan	3,81	4,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	7,63	7,76

	Jaminan Sosial Wajib		
15	Jasa Pendidikan	6,26	6,86
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,23	6,53
17	Jasa lainnya	3,87	3,24
	LPE	6,42	5,30

Sumber : BP3D Kabupaten Bintan, Tahun 2017

*) : Data Estimasi

1.3.8 Tingkat Kestabilan Harga (Inflasi)

Tingkat kestabilan harga (inflasi) juga merupakan salah satu ukuran kinerja perekonomian Pemerintah Daerah dalam mengendalikan gejolak harga terutama untuk komoditi yang strategis yang diukur dengan mengukur **Indeks Harga Konsumen (IHK)**.

Tabel 1.11 : Laju Inflasi (IHK) Kabupaten Bintan (berdasarkan IHK Kota Tanjungpinang) Tahun 2015-2016

No	Kebutuhan Pokok	2015	2016
1.	Bahan Makanan	5,65	4,99
2.	Makanan Jadi	6,76	5,56
3.	Perumahan	1,24	2,45
4.	Sandang	5,73	3,26
5.	Kesehatan	3,52	4,67
6.	Pendidikan	1,48	2,12
7.	Transport	-6,21	-2,40
	IHK	2,46	3,06

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2017

IHK Kabupaten Bintan mengacu pada IHK Kota Tanjungpinang dimana secara umum pada tahun 2016 IHK Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu dari 2,46% meningkat menjadi 3,06%. Dari tujuh komponen pembentuk inflasi tiga diantaranya mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu komponen bahan makanan, makanan jadi dan sandang. Komponen sandang mengalami penurunan yang sangat

signifikan yaitu -2,47%. inflasi yang terjadi pada tahun 2016 tergolong terkendali, hal ini merupakan salah satu bukti nyata kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam usaha pengendalian harga pasar dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

1.4 Sistematika

Sistematika Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Bintang Akhir Tahun Anggaran 2016 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Sistematika tersebut memuat laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kepada urusan wajib dan urusan pilihan yang terdiri dari 7 (tujuh) bab yang secara rinci tersusun sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

Berisi tentang dasar hukum, gambaran umum daerah, gambaran umum demografis dan kondisi ekonomi meliputi potensi unggulandaerah dan pertumbuhan ekonomi/PDRB, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB. II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Berisi tentang visi dan misi, strategi dan arah kebijakan daerah (sesuai RPJMD tahun 2016-2021) dan prioritas daerah sesuai dengan RKPD.

BAB.III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berisi tentang pengelolaan pendapatan dan belanja daerah meliputi kebijakan umum, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, target dan realisasi pendapatan serta permasalahan dan solusi.

BAB. IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berisi tentang urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi program dan kegiatan, realisasi, permasalahan dan solusi.

BAB. V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Menguraikan tentang tugas pembantuan yang diterima terdiri dari dasar hukum, instansi pemberi tugas pembantuan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan, program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya, sumber dan jumlah anggaran serta permasalahan dan solusi.

BAB. VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Menguraikan tentang kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah meliputi kebijakan dan kegiatan, realisasi, permasalahan dan solusi. Selain itu pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB.VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok, sebagai ringkasan eksekutif atas rangkaian kegiatan dan hasil yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Bintan.



BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2005-2025

1. Visi Jangka Panjang

Visi jangka panjang pembangunan Kabupaten Bintan adalah **"BINTAN GEMILANG 2025" Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata dan Kebudayaan**. Yaitu membangun manusia secara utuh sehingga mencapai derajat sejahtera lahir maupun batin. Hal ini juga didasarkan proyeksi masa depan Kabupaten Bintan dimana kunci pokok pembangunan ke depan adalah pembangunan seluruh aspek kehidupan yang menyempurnakan karakter dan taraf hidup masyarakat menuju sejahtera.

2. Misi Jangka Panjang

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi kelautan dan pariwisata secara berkelanjutan sebagai daya dukung dan daya ungkit pembangunan daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah guna menunjang peningkatan perekonomian daerah;
- 4) Mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang peduli terhadap kualitas pelayanan masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip penatausahaan pemerintahan yang baik **(good governance)**;
- 5) Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu yang Agung dengan tetap bersandar kepada nilai-nilai agama sehingga tercipta

- hubungan kekerabatan yang harmonis dan iklim yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- 6) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan secara komprehensif:
 - 7) Meningkatkan daya saing daerah dalam skala nasional dan internasional

2.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BINTAN

Dengan telah terpilih dan dilantiknya Bupati Bintan dan Wakil Bupati Bintan masa bakti tahun 2016-2021, yakni pada tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-230 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.21-231 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau, maka melekat kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan

program Bupati Bintang yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintang Tahun 2016-2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintang Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan RPJM Provinsi Kepulauan Riau, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka yang bersifat indikatif yang dibiayai oleh APBD dan sumber dana lainnya yang dapat diperoleh dari APBD Provinsi, APBN maupun sektor swasta. RPJMD tetap memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RAPBD, penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, sebagai tolok ukur kinerja Kepala Daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagaimana diketahui pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (2005-2010), Tahap II (2010-2015), Tahap III (2016-2021), Tahap IV (2021-2025).

1. Visi Jangka Menengah

Visi Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera Melalui Pencapaian Bintan Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)”**. Adapun penjelasan visi tersebut berdasarkan kata kunci adalah sebagai berikut :

Madani : (1) Masyarakat yang beradab dan agamis; (2) menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; (3) masyarakat yang demokratis; (4) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (5) Program-program pembangunan berbasis masyarakat Madani merupakan perwujudan dari masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, taken for granted. Masyarakat madani adalah konsep yang dibentuk dari proses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus.

Sejahtera : (1) Kesehatan; (2) Pendidikan (3) Daya beli; Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera

yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Bintan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi daerah lainnya.

Bintan Gemilang 2025 **Gerakan Melangkah Maju** di Bidang : (1) Kelautan; (2)Pariwisata; (3) Kebudayaan, memiliki arti “Gerakan Melangkah Maju”, gerakan yang dimaksud merupakan gerakan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk lebih maju yang melibatkan secara aktif seluruh pihak di kabupaten Bintan dengan jangka waktu target capaian sampai tahun 2025. Pembangunan dikembangkan sesuai potensi dan keunggulan kabupaten Bintan, yaitu sektor kelautan dan pariwisata sebagai core dan sekaligus sebagai driver activity. Serta dengan melestarikan dan memajukan seluruh hasil kegiatan dan penciptaan akal budi masyarakat seperti kesenian, dan adat istiadat dengan bersandar pada Budaya Melayu.

2. Misi Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditentukan 8 (delapan) Misi pembangunan 2016-2021 yang akan dicapai yaitu:

- 1) Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan.
- 2) Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata.
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global.
- 5) Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat.

- 6) Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan.
- 7) Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan
- 8) Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3. Tujuan Jangka Menengah

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

- 1) Misi Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan dengan tujuan :
 - a. Terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan yang sesuai dengan tata ruang.
 - b. Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan Kelautan.
- 2) Misi Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.
 - b. Meningkatkan sarana prasarana pengairan untuk mengurangi resiko bencana.
 - c. Meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana wilayah perbatasan.
- 3) Misi Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dengan tujuan :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**) dan demokratis.
 - b. Meningkatkan kinerja perencanaan Pembangunan.
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparaturnya terhadap hukum dan wawasan kebangsaan.
- 4) Misi Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global dengan tujuan :
- a. Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing.
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas.
 - c. Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing serta terpenuhi hak dan perlindungannya.
- 5) Misi Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat dengan tujuan :
- a. Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu.
 - b. Peningkatan kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Bintan.
- 6) Misi Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan dengan tujuan :
- a. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
 - c. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa.
- 7) Misi Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan dengan tujuan Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga.

- 8) Misi Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - b. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh desa dan kelurahan.
 - c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

4. Sasaran Jangka Menengah

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

- 1) Misi Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya realisasi investasi dan pelayanan perijinan.
 - b. Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda penataan Ruang.
 - c. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
 - d. Meningkatnya pengembangan usaha dan industri pariwisata melalui kemitraan dan pembinaan BUMD.
 - e. Meningkatnya jumlah produksi perikanan.
 - f. Berkembangnya industri pengolahan dan terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok.
- 2) Misi Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata dengan sasaran :
 - a. Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi **(konektivitas)** antar pulau.

- b. Pengembangan dan pemantapan jaringan dan prasarana transportasi.
 - c. Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi, air bersih/minum.
 - d. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan dikawasan perkotaan dan perdesaan.
 - e. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan pengairan.
 - f. Meratanya pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan.
- 3) Misi Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dengan sasaran :
- a. Meningkatnya kemampuan, profesionalitas dan etos kerja aparatur pemerintah.
 - b. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah.
 - c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah.
 - d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
 - e. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
 - f. Meningkatnya kualitas pelayanan public.
 - g. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum.
 - h. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan politik dan wawasan kebangsaan.
- 4) Misi Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global dengan sasaran :
- a. Meningkatnya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu.

- b. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (SD/MI/SLB/Paket).
 - c. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu, anak dan lansia serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
 - d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan serta ketersediaan obat dan alat kesehatan.
 - e. Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin serta pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat.
 - f. Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera.
 - g. Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja, serta perlindungan terhadap tenaga kerja.
 - h. Meningkatnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
- 5) Misi Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat dengan sasaran :
- a. Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah.
 - b. Terwujudnya toleransi antar umat beragama.
 - c. Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing- masing.
- 6) Misi Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan dengan sasaran :
- a. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
 - b. Menurunnya persentase penduduk miskin.

- c. Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - e. Meningkatnya pengelolaan pembangunan oleh pemerintah desa.
- 7) Misi Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan dengan sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Generasi Muda dan Olah Raga.
- 8) Misi Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan sasaran :
- a. Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan.
 - b. Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas Peternak.
 - c. Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah.
 - d. Meningkatnya kebersihan lingkungan serta upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.
 - e. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola.

2.3 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 - 2021

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

1. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan, yaitu:
 - a. Meningkatkan Kerjasama Investasi di Kabupaten Bintan
 - b. Optimalisasi Pelayanan Perijinan
 - c. Peningkatan Mekanisme dan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Perencanaan Penataan Ruang
 - d. Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Untuk Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Yang Efisien, Berkelanjutan dan Konsisten
 - e. Memberdayakan Potensi Masyarakat Lokal Serta Optimalisasi Potensi Ekonomi Lokal dibidang Pariwisata
 - f. Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Pariwisata
 - g. Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif Melalui Peningkatan Cluster Yang Aktif
 - h. Mengembangkan Pengelolaan Aset dan Peluang di Bidang Kelautan dan Pariwisata
 - i. Meningkatkan Produksi Hasil Perikanan Budidaya dan Tangkap
 - j. Mendorong Tumbuhnya Industri Pengolahan
 - k. Menjaga Stabilitas Harga Dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok

- 2) Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata, yaitu :
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, dan pengembangan sistem manajemen transportasi.
 - b. Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan melalui pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatan kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah
 - c. Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih di lingkungan permukiman serta meningkatkan rumah tinggal bersanitasi

- d. Rehabilitasi kawasan kumuh melalui penataan lingkungan
 - e. Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan pengairan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pengelolaan sarana prasarana pengairan
 - f. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perbatasan
- 3) Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati, yaitu :
- a. Menata sistem seleksi pejabat dari sistem tertutup menjadi sistem seleksi terbuka secara bertahap
 - b. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah
 - c. Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah daerah
 - d. Meningkatkan penataan kebijakan bidang perekonomian, kualitas pelayanan informasi publik, administrasi pembangunan dan pembinaan Pemerintahan Daerah bawahan
 - e. Mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas
 - f. mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
 - g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk legislasi daerah
 - h. Memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, serta pembinaan pengelolaan keuangan Daerah
 - i. Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel
 - j. Mewujudkan integrasi/ konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan
 - k. Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah

- l. Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
 - m. Meningkatkan kualitas aparatur serta sarana prasarana pendukung
 - n. Meningkatkan jumlah jaringan sistem kependudukan di seluruh kecamatan
 - o. Meningkatkan pelayanan di bidang kearsipan dan perpustakaan
 - p. Meningkatkan cakupan penegakan peraturan daerah dan perkara
 - q. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik serta wawasan kebangsaan
- 4) Strategi untuk mencapai misi : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global, yaitu :
- a. Meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini untuk pembangunan berkelanjutan
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Kabupaten Bintan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu
 - c. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan, kualitas dan kepastian Pendidikan Dasar 9 Tahun
 - d. Peningkatan profesionalisme, kualitas serta akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan melalui pengutan sistem uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa
 - e. Peningkatan Upaya Kesehatan masyarakat melalui Puskesmas serta melaksanakan bina gizi dan kesehatan bagi ibu dan anak
 - f. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar, kefarmasian dan pengawasan obat dan makanan melalui jaringan SIK online
 - g. Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin
 - h. Peningkatan pemberdayaan desa / kelurahan dan CSR dari perusahaan untuk program kesehatan serta promosi kesehatan kepada masyarakat

- i. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB
 - j. Peningkatan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga
 - k. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha, dan penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi.
 - l. Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja
- 5) Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat, yaitu :
- a. Memberdayakan lembaga-lembaga adat terutama adat melayu untuk melestarikan nilai- nilai budaya melayu dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Meningkatkan kerukunan umat bergama.
 - c. Pengembangan pendidikan agama di masyarakat dan sekolah
- 6) Strategi untuk mencapai misi : Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan, yaitu:
- a. Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.
 - b. Memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangunan yang inklusif.
 - c. Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

- d. Memperkuat Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi masyarakat dan Peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat
 - e. Mengembangkan kelembagaan ekonomi pedesaan dan aparatur desa
- 7) Strategi untuk mencapai misi : Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan, yaitu :
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga
 - b. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan diperguruan
- 8) Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yaitu :
- a. Peningkatan produktivitas perkebunan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan
 - b. Peningkatan produktivitas Pertanian Tanaman Pangan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan
 - c. Peningkatan produktivitas Pertanian Tanaman Hortikultura ramah lingkungan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan
 - d. Peningkatan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan
 - e. Peningkatan produktivitas peternakan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok peternak secara berkelanjutan

- f. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok.
- g. Meningkatkan kualitas lingkungan yang menyeluruh melalui Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- h. Meningkatkan/ Mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan pengelolaan tempat pemakaman umum

2. Arah Kebijakan Daerah

- 1) Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Pertama : Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan, adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kerjasama investasi di tingkat lokal, regional maupun nasional dengan menjaga investasi yang sudah ada serta melalui promosi
 - b. Perbaikan kualitas pelayanan perijinan dengan menyederhanakan proses birokrasi
 - c. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang mengacu pada instrumen tata ruang
 - e. Pembangunan Destinasi wisata dengan memberdayakan potensi ekonomi maupun kebudayaan lokal
 - f. Promosi dan Pemasaran wisata melalui penyelenggaraan even berskala nasional maupun internasional
 - g. Fasilitasi terbentuknya forum kerjasama antar usaha pariwisata
 - h. Mengembangkan pola-pola kemitraan industri pariwisata lintas sektor

- i. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta peningkatan jumlah wirausaha baru
 - j. Melakukan revitalisasi terhadap BUMD dengan difokuskan pada bidang kelautan dan pariwisata
 - k. Peningkatan produksi perikanan budidaya
 - l. Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat
 - m. Memberdayakan koperasi dan UMKM serta pemberian insentif untuk mendorong tumbuhnya Industri pengolahan
 - n. Meningkatkan volume operasi pasar serta pengawasan barang beredar
- 2) Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Kedua: Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata, adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi dengan fokus jalan dan jembatan.
 - c. Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih serta peningkatan rumah tinggal bersanitasi melalui pembangunan jaringan air bersih serta peningkatan kualitas lingkungan perumahan yang bersanitasi
 - d. Peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan terhadap rumah tidak layak huni
 - e. Peningkatan kualitas jaringan pengairan dengan melakukan normalisasi saluran / sungai serta pembangunan drainase jalan
 - f. Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana di daerah perbatasan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat
- 3) Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Ketiga: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik **(good**

governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati, adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pegawai dan pejabat pemerintah Daerah
- b. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pembangunan
- c. Mewajibkan kepada semua SKPD untuk menyusun SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan tentang hukum maupun bantuan hukum
- e. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait tentang kebijakan bidang perekonomian, kualitas pelayanan informasi publik, administrasi pembangunan dan pembinaan Pemerintahan Daerah bawahan
- f. Peningkatan pemantauan kualitas dan daya dukung lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan pasca bencana
- g. Membangun harmonisasi antara legislatif dan eksekutif melalui peningkatan kualitas produk legislasi daerah
- h. Peningkatan intensifikasi pajak, retribusi daerah dan pemanfaatan asset daerah dalam peningkatan pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- i. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa
- j. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif
- k. Mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan

- l. Menjabarkan perencanaan pembangunan yang ada di tingkat yang lebih tinggi ke dalam perencanaan pembangunan di bawahnya
 - m. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah dengan melibatkan semua instansi terkait sesuai dengan SOP
 - n. Melakukan pengembangan kapasitas terhadap aparatur yang melakukan pelayanan publik serta mengoptimalkan fungsi sarana prasarana pendukung
 - o. Peningkatan akurasi data informasi kependudukan, Catatan Sipil melalui pembangunan sistem informasi kependudukan yang berkualitas
 - p. Meningkatkan kepemilikan akte kelahiran dan KTP-el dengan menyederhanakan birokrasi
 - q. Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku serta peningkatan SDM pengelola kearsipan dan pustaka
 - r. Meningkatkan pemeliharaan kamtrantibmas dan pembinaan potensi ketahanan dan perlindungan masyarakat
 - s. Membekali masyarakat tentang wawasan kebangsaan, serta meningkatkan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
- 4) Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global, adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik PAUD yang merata di Kecamatan
 - b. Melaksanakan wajib belajar 9 Tahun dengan cara melanjutkan upaya gratis biaya sekolah dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat menengah
 - c. Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun untuk menuntaskan buta aksara dengan memperluas akses pendidikan yang berkualitas melalui penyediaan layanan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan

- d. Meningkatkan kualifikasi akademik, sertifikasi guru dan tenaga kependidikan dengan perbaikan desain program keselarasan disiplin ilmu
 - e. Meningkatkan Pembinaan Upaya Kesehatan masyarakat dan bina gizi ibu dan anak
 - f. Peningkatan usaha pelayanan kesehatan lansia
 - g. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta usaha penyehatan lingkungan
 - h. Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan melalui peningkatan SDM kesehatan dan melengkapi ketersediaan data dan informasi kesehatan
 - i. Meningkatkan Akses dan Mutu Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
 - j. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Peserta JKN dengan mempermudah pengurusan administrasi
 - k. Meningkatkan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan kepada Masyarakat
 - l. Meningkatkan Kelestarian dan kemandirian peserta KB
 - m. Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga
 - n. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja diutamakan untuk para pemuda Bintan yang belum bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
 - o. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang harmonis
- 5) Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Kelima : Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat, adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kegiatan budaya, penyelenggaraan Festival Seni Budaya, serta Cagar Budaya

- b. Peningkatan kualitas pemahaman, pengamalan dan Kerukunan Umat Beragama melalui Komunikasi Lintas Agama
 - c. Pelaksanaan kegiatan keagamaan dimasyarakat dan sekolah-sekolah dan pembangunan rumah tahfiz di setiap kecamatan
- 6) Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keenam : Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan, adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta Peningkatan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok marjinal.
 - b. Peningkatan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
 - c. Peningkatan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
 - d. Penguatan Kelembagaan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta peningkatan keswadayaan masyarakat
 - e. Pengembangan data dan informasi pedesaan, pengembangan lembaga ekonomi desa serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- 7) Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Ketujuh : Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan, adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kualitas generasi muda dan olahraga
 - b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga
- 8) Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Kedelapan : Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu tanaman pangan melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c. Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu tanaman hortikultura ramah lingkungan melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- d. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana pertanian melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu ternak berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha peternakan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- f. Peningkatan cadangan pangan, pemantauan harga, distribusi dan keamanan pangan, serta penganekaragaman konsumsi pangan secara merata di seluruh wilayah.
- g. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup.
- h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah

- i. Pengelolaan ruang terbuka hijau dan tempat pemakaman umum dengan memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan.

3. Program

Untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah menetapkan program pembangunan menurut urusan, yaitu:

- 1) Program untuk mencapai Misi Kesatu : Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan adalah sebagai berikut:

a. Urusan Penanaman Modal

- 1) Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi
- 2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 3) Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
- 4) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- 5) Program Pelayanan Perizinan Non Investasi

b. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program Perencanaan Tata Ruang
- 2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

c. Urusan Pariwisata

- 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Usaha dan Industri Pariwisata
- 4) Program Pengembangan Kemitraan

d. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Program Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM
- 2) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

e. Penunjang Urusan Pemerintahan

Program Pembinaan BUMD

f. Urusan Kelautan dan Perikanan

- 1) Program pengembangan budidaya perikanan
- 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 3) Program pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan
- 4) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

g. Urusan Perindustrian

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

h. Urusan Perdagangan

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
- 2) Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

- 2) Program untuk mencapai Misi Kedua : Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata, adalah sebagai berikut:

a. Urusan Perhubungan

- 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 3) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi
- 5) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 6) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- 7) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

b. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 2) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 3) Program Peningkatan Perencanaan Teknis

- 4) Program Pengembangan Sarana prasarana Perumahan dan Permukiman
- 5) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya
- 6) Program Pengendalian Banjir
- 7) Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan

c. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- 1) Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah
- 2) Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

d. Penunjang Urusan Pemerintahan

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

- 3) Program untuk mencapai Misi Ketiga : Mewujudkan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (**good governance**) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati, adalah sebagai berikut:

a. Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1) Program Pendidikan Kedinasan
- 2) Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah
- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 4) Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan
- 5) Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah
- 7) Program Pengelolaan Administrasi Wilayah Perbatasan
- 8) Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah

- 9) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
- 10) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 11) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 12) Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
- 13) Program Pembinaan BUMD
- 14) Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah
- 15) Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan
- 16) Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan
- 17) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 18) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 19) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 20) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 21) Program Manajemen Aset Daerah
- 22) Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah
- 23) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
- 24) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
- 25) Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
- 26) Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan

b. Urusan Pertanahan

- 1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- 2) Program Pembinaan Pertanahan

c. Urusan Komunikasi dan Informatika

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan

d. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Daerah
- 2) Program Pengendalain Banjir

e. Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan
- 3) Program perencanaan pembangunan ekonomi
- 4) Program perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan
- 6) Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

f. Urusan Statistik

- 1) Program Pengembangan Data dan Informasi
- 2) Program Penelitian Perencanaan Pembangunan

g. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

h. Urusan Kearsipan

- 1) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- 2) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- 3) Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah

i. Urusan Perpustakaan

- 1) Program Pengembangan Perpustakaan
- 2) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

j. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- 1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 2) Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3) Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 4) Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP

- 5) Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat
 - 6) Program Penanggulangan Bencana
 - 7) Program Mitigasi Bencana
- 4) Program untuk mencapai Misi Keempat : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global, adalah sebagai berikut :

a. Urusan Pendidikan

- 1) Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak
- 2) Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)
- 3) Program Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan
- 4) Program Non Formal
- 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

b. Penunjang Urusan Pemerintahan

Program Perencanaan Sosial Budaya

c. Urusan Kesehatan

- 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- 4) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- 5) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 6) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 7) Program Pengawasan Obat dan Makanan
- 8) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- 9) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

d. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Program Keluarga Berencana
- 2) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

e. Urusan Tenaga Kerja

- 1) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

- 2) Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - 3) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 5) Program untuk mencapai Misi Kelima : Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat, adalah sebagai berikut :

a. Urusan Kebudayaan

- 1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

b. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

c. Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1) Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan
- 2) Program Pembinaan Keagamaan
- 3) Program Pembinaan Kesejahteraan Rakyat

- 6) Program untuk mencapai Misi Keenam : Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan, adalah sebagai berikut :

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 2) Program Perlindungan Anak

b. Urusan Sosial

- 1) Program Pemberdayaan Sosial
- 2) Program Penanggulangan Kemiskinan
- 3) Program Rehabilitasi Sosial
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

c. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
- 2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- 3) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- 4) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

d. Penunjang Urusan Pemerintahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan

- 7) Program untuk mencapai Misi Ketujuh : Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan, adalah sebagai berikut :

- Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Program Peningkatan peran serta Kepemudaan
- 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
- 3) Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga

- 8) Program untuk mencapai Misi Kedelapan : Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, adalah sebagai berikut :

a. Urusan Pertanian

- 1) Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
- 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Pangan
- 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu hasil Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan
- 4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- 5) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

b. Urusan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

c. Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup
- 3) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 5) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan

d. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum
- 2) Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum
- 3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

4. Indikator

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Indikator kinerja tersebut meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara rinci sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2016
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
1)	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,4
2)	Laju Inflasi	%	2 – 3
3)	Indeks Gini	%	0,30
4)	Persentase penduduk miskin	%	5,6
5)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73
B	Aspek Pelayanan Umum		
1.	Pendidikan		
6)	Persentase taman bacaan/ perpustakaan Kelurahan, Desa dan Sekolah yang aktif	%	20
7)	APK PAUD 0-6 Tahun		57,73
8)	Rasio guru murid PAUD	Guru	1 : 08
9)	APM SD/MI/SLB/Paket A	%	95,21
10)	APK SD/MI/SLB/Paket A	%	104,79
11)	APM SMP/MTs/Paket B	%	77,3
12)	APK SMP/MTs/Paket B	%	122,7
13)	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9
14)	Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,63
15)	Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	52,52
2.	Kesehatan		
16)	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	%	0
17)	Presentase balita gizi buruk	%	0,35
18)	Kasus Kematian Bayi		39
19)	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB).		990
20)	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (PN)	%	96,4
21)	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	%	98

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2016
22)	Jumlah kasus kematian ibu		7
23)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	%	72
24)	Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	%	92
25)	Persentase penurunan kasus Penyakit yang dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu	%	35
26)	Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1.000 penduduk	Kecamatan	10
27)	Jumlah Kecamatan endemis Filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%	Kecamatan	2
28)	Persentase Kecamatan dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk	%	33
29)	Persentase Kecamatan dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (sucess rate) minimal 85%	%	81
30)	Persentase angka kasus HIV yang diobati.	%	90
31)	Persentase Kecamatan yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui program MTBS	%	53
32)	Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun	%	6,9
33)	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM	Desa/ Kelurahan	19
34)	Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	%	82
35)	Persentase penduduk yang melaksanakan STOP BABS	%	78
36)	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	Desa/ Kelurahan	9
37)	Jumlah Kecamatan yang memiliki 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Kecamatan	1
38)	Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan	Puskesmas	5
39)	Jumlah Puskesmas yang memiliki Jaringan SIK Online	Puskesmas	5
40)	Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	70

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2016
41)	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	13
42)	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui JKN	Jiwa	5.000
43)	Persentase Desa Memanfaatkan Dana Desa 10% untuk UKBM	%	6
44)	Persentase Desa Siaga Aktif	%	100
45)	Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSRnya untuk Program Kesehatan	Usaha	2
46)	Persentase Desa yang melaksanakan PHBS	%	47
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
47)	Jumlah dokumen tata ruang dan turunannya yang diperdakan / diperbupkan	Perda	1
48)	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang	%	75
49)	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	%	1,442
50)	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan	Km	29,095
51)	Persentase kawasan pemukiman yang tertata (6.176,36 Ha)	%	8
52)	Persentase drainase jalan yang Terbangun	%	8,662
53)	Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	M2	218.000
54)	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk		1.17
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
55)	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	73,02
56)	Jumlah Sambungan Rumah (SR) perdesaan yang terpasang	SR	654
57)	Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perkotaan yang terpasang	SR	177
58)	Jumlah Luas Kawasan Kumuh Perkotaan (98,01 Ha)	Ha	18,01
5.	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,		

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2016
	Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
59)	Jumlah BUMD yang beroperasi	Bumd	2
60)	Jumlah sarana dan prasarana di wilayah perbatasan	Unit	2 unit
61)	Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti pendidikan kedinasan	%	0,76
62)	Persentase penempatan Aparatur sesuai kompetensi	%	62
63)	Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	Peringkat	10 besar
64)	Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa yang sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2015		0 Desa
65)	Persentase rekomendasi temuan eksternal (BPK) yang ditindak lanjuti	%	90
66)	Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori CC	SKPD	10
67)	Persentase SKPD yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan	%	80
68)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	%	20
69)	Persentase OPD yang memiliki capaian kinerja baik	%	60
70)	Persentase Indikator yang telah mencapai SPM	%	0
71)	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan		60,50 (Nilai B)
72)	Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan	%	100%
73)	Presentase Nilai turun harga yang menyebabkan inflasi	%	(4±1)
74)	Kontribusi BUMD terhadap PAD	%	2.84 M
75)	Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan Sumber Pendanaan DAK dan APBN	%	77,63%
76)	Web site milik pemerintah daerah	Situs	22 Website
77)	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	60
78)	Persentase unit pelayanan pemerintahan		

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2016
	(Kecamatan/Desa) yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer	%	70
79)	Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	%	10 besar
80)	Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar		WTP
81)	Persentase keakuratan data neraca aset	%	70%
82)	Target Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah	Milyar	875/171
83)	Persentase Desa yang menyampaikan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku	%	84
84)	Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan	%	65
85)	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	%	19,64
86)	Rasio Petugas Linmas	%	95.73
87)	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pendidikan pengetahuan keagamaan	Orang	3500 org
6.	Sosial		
88)	Persentase penduduk miskin	%	6
89)	Persentase rumah tangga miskin yang ditangani	%	51.12
90)	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	814
91)	Persentase pekerja social dan tenaga kerja kesejahteraan social yang komperen/terlatih (terkait tenaga kerja)	%	23,62
92)	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	40.28
B	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar		
7.	Tenaga kerja		
93)	Tingkat pengangguran terbuka		6,7
94)	Presentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	68
95)	Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan	%	70

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2016
96)	Tingkat pengangguran terbuka		6,7
97)	Presentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	68
98)	Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan	%	70
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak		
99)	Indeks Pembangunan Gender	%	60.9
9.	Pangan		
100)	Stabilitas harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	95
101)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	95
102)	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100
103)	Jumlah Lokasi Rawan Pangan	Lokasi	9
104)	Ketersediaan pangan utama	Kg/Pdd/Th	1,805
10.	Lingkungan hidup		
105)	Jumlah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang disusun	SLHD	7
106)	Jumlah kelompok masyarakat bersama Pemda yang terlibat dalam melaksanakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Kelompok	8
107)	Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R	%	2
108)	Persentase penanganan sampah	%	50
109)	Persentase sampah yang dikelola	%	30
11.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
110)	Persentase penduduk ber KTP-el dari jumlah penduduk wajib KTP-el	%	93
111)	Persentase bayi berakte kelahiran per Bayi Lahir	%	77
12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
112)	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam program pembangunan	%	55

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2016
113)	Persentase Kenaikan PADes	%	10
114)	Persentase Desa yang menyampaikan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku	%	84
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
115)	Cakupan peserta KB aktif	%	77,8
116)	Angka pertumbuhan penduduk	Kk	2.01
117)	Jumlah keluarga yang terlayani oleh kader Catur Bina		589
14.	Perhubungan		
118)	Jumlah Pulau yang tercakupi jaringan Transportasi	Pulau	8
119)	Jumlah pengujian kendaraan bermotor wajib uji (KIR)		2200
120)	Persentase wilayah yang tercakupi jaringan operator selular	%	95
15.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
121)	Persentase Pelaku Usaha yang terlatih	%	25
122)	Persentase koperasi aktif	Koperasi	55
16.	Penanaman Modal		
123)	Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) juta USD	Juta USD	1,251
124)	Lama proses perijinan	Hari	3-14 hari
125)	Jumlah perijinan non investasi yang dapat diproses dalam satu tahun	Ijin	375
126)	Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) juta USD	Juta USD	1,251
17.	Kepemudaan dan olah raga		
127)	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	60
128)	Jumlah pemuda yang mandiri dan berdaya saing	Orang	48
129)	Jumlah prestasi olah raga yang diraih	Prestasi	33
18.	Kebudayaan		

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2016
130)	Jumlah grup kesenian (yang dibina)	Grup	35
131)	Jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara	Cagar	14
19.	Kearsipan		
132)	Pengelolaan arsip secara baku	%	20
C	Urusan Pemerintahan Pilihan		
20.	Kelautan dan Perikanan		
133)	Produksi perikanan budidaya	Ton	1.798,43
134)	Jumlah sarana dan prasarana budidaya perikanan	Unit/ Kantong/Ha	2/450/130
135)	Persentase kelompok nelayan yang aktif	%	50
136)	Persentase Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) aktif	%	50
137)	Persentase UMKM perikanan yang aktif	%	50
21.	Pariwisata		
138)	Meningkatnya jumlah desa wisata	Desa	5
139)	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Wisatawan	550.000
140)	Jumlah jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Usaha Pariwisata	23
22.	Pertanian		
141)	Capaian produksi tanaman sayuran (Ton)	Ton	20.400
142)	Capaian produksi tanaman buah-buahan (Ton)	Ton	12.000
143)	Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (Jalan usaha tani dan jalan produksi) (Km)	Km	-
144)	Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber air (Unit)	Unit	-
145)	Jumlah Produksi Daging dan Telur (Ton)	Ton	4.360
23.	Perdagangan		
146)	Persentase tertib ukur terhadap UTTP	%	n/a
147)	Persentase ketersediaan barang kebutuhan	%	100

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2016
	pokok bagi masyarakat		
148)	Persentase Fasilitas Pasar yang memadai	%	15
24.	Perindustrian		
149)	Persentase IKM bersertifikasi mutu produk	%	45
C	Aspek Daya Saing		
150)	Nilai tukar petani	%	101,1
151)	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	%	1,442
152)	Jumlah Pulau yang tercakupi jaringan Transportasi	Pulau	8
153)	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang	%	75
154)	Lama proses perijinan	Hari	3-14 hari
155)	Jumlah jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Usaha Pariwisata	23

2.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah maka prioritas pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis;
4. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (***good governance***), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM;

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan;
6. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender;
7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (**Sustainable Development**).



BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2016, disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Bintan yaitu meningkatkan efektifitas dan optimalitas pengelolaan keuangan daerah. Realisasi kebijakan tersebut dilakukan melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah, program peningkatan pengembangan sistem perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja, dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Dalam hal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 senantiasa dianut sistem kehati-hatian dalam mengalokasikan dana. Kehati-hatian ini senantiasa dijaga agar program-program yang telah direncanakan tetap terpadu.

APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 1.039.418.423.677,78
2. Belanja	<u>Rp. 917.815.017.993,00</u>
Defisit	<u>Rp. 121.603.405.684,78</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 16.830.008.474,98
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. -</u>
	<u>Rp. 16.830.008.474,98</u>

3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intenfikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Guna memenuhi pencapaian target penerimaan pendapatan daerah, tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, baik itu menyangkut upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi dan beberapa kegiatan lainnya, diantaranya:

- 1) Melaksanakan penataan pengelolaan maupun potensi komponen pendapatan;
- 2) Pendataan pada tempat-tempat usaha wajib pajak untuk meyakini omzet yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- 3) Melaksanakan pendataan administrasi pajak dan retribusi daerah;
- 4) Pembinaan wajib pajak yang meliputi cara pengisian SPTPD yang baik dan benar, kewajiban membayar pajak secara periodik, perhitungan omzet yang kena pajak;
- 5) Pemeriksaan wajib pajak pada wajib pajak yang menghitung sendiri (MPS) dan dilakukan secara rutin;
- 6) Sosialisasi peraturan perpajakan daerah;
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi pengelolaan pungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan;
- 8) Melakukan monitoring atas pendapatan daerah secara periodik untuk dilakukan evaluasi dan merumuskan rencana tindaknya;
- 9) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi dalam rangka perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU);
- 10) Melaksanakan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi tentang penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;

- 11) Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait agar kegiatan operasional dapat berlangsung dengan efektif baik secara horizontal maupun vertikal antar level pemerintahan serta kalangan profesi yang memiliki pengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan daerah;

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2016 terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 11,89% dari tahun anggaran yang lalu. Peningkatan tersebut terdiri dari gabungan atas peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 4,64%, dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 32,70% dan lain -lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar -43.14% dibandingkan target penerimaan tahun 2015.

Adapun target penerimaan daerah tahun 2015 dan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1: Target Penerimaan Daerah Tahun 2015-2016

NO	KOMPONEN	TARGET		%
		2015	2016	
1	Pendapatan Asli Daerah	176.628.479.855,00	184.817.770.453,00	104,64
	Pajak Daerah	135.368.000.000,00	146.773.823.382,00	108,43
	Retribusi Daerah	9.442.000.000,00	9.992.000.000,00	105,83
	Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.888.801.932,00	10.692.052.842,00	98,19
	Lain-lain PAD yang Sah	20.929.677.923,00	17.359.894.229,00	82,94
2	Dana Perimbangan	528.653.805.619,00	701.536.541.636,00	132,70
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	173.897.638.619,00	105.142.149.624,00	60,46
	Dana Alokasi Umum	290.035.577.000,00	417.255.952.412,00	143,86
	Dana Alokasi Khusus	64.720.590.000,00	179.138.439.600,00	276,79
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	176.651.988.622,00	100.448.445.719,00	56,86
	Jumlah	881.934.274.136,00	986.802.757.808,00	111,89

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2017

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan daerah tahun 2015, maka realisasi pendapatan daerah tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 33,15%. Realisasi tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar 6,27%, dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 45,72%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 20,11%. Adapun Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 : Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015-2016 (dalam rupiah)

NO	KOMPONEN	REALISASI		%
		2015	2016	
1	Pendapatan Asli Daerah	185.523.317.169,12	197.155.920.187,78	106,27
	Pajak Daerah	137.520.270.491,77	155.011.140.937,06	112,72
	Retribusi Daerah	9.081.792.543,00	10.106.267.431,00	111,28
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13.411.204.438,00	10.692.052.842,00	79,72
	Lain-lain PAD yang Sah	25.510.049.696,35	21.346.458.977,72	83,68
2	Dana Perimbangan	497.680.184.131,00	725.210.317.432,00	145,72
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	142.922.557.131,00	128.286.424.582,00	89,76
	Dana Alokasi Umum	290.035.577.000,00	449.835.609.000,00	155,10
	Dana Alokasi Khusus	64.722.050.000,00	147.088.283.850,00	227,26
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	97.455.866.381,00	117.052.186.058,00	120,11
	Jumlah	780.659.367.681,12	1.039.418.423.677,78	133,15

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2017

Untuk mengetahui penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 : Realisasi pendapatan asli daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2016 (dalam rupiah)

NO	SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH		SELISIH LEBIH/(KURANG)
		TARGET	REALISASI	
1	DPPKD	174.975.770.453,00	187.084.065.996,78	12.108.295.543,78
2	DINAS KESEHATAN	250.000.000,00	186.280.500,00	(63.719.500,00)
3	BPMPD	5.950.000.000,00	6.332.746.741,00	382.746.741,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	3.542.000.000,00	3.346.411.950,00	(195.588.050,00)
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	100.000.000,00	202.840.000,00	102.840.000,00
6	BAPPEDA	-	3.575.000,00	3.575.000,00
	Total	184.817.770.453,00	197.155.920.187,78	12.338.149.734,78

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2017

Dengan melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa perolehan paling tinggi baik jumlah rupiah maupun prosentase pencapaian target adalah perolehan dari pendapatan yang dikelola oleh DPPKD, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3. Pemasalahan dan Solusi

Permasalahan-permasalahan pendapatan daerah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bintan pada saat ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum tersedianya secara keseluruhan prosedur hukum yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Terdapat beberapa jenis pungutan pada sektor retribusi daerah yang belum dapat diberdayakan, hal ini disebabkan tidak tersediaanya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Tidak terkonsentrasinya wajib pajak dan wajib retribusi yang disebabkan karena letak geografis Kabupaten Bintan yang cukup luas, sehingga terdapat hambatan dalam mensosialisasikan Perda-Perda pungutan oleh dinas dan instansi terkait, sehingga berakibat

pada kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya.

Adapun solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka penggalan potensi pendapatan daerah.
- 3) Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
- 4) Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara intensif.

3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka pada tahun 2016 kebijakan yang dilaksanakan melalui peningkatan belanja prioritas untuk:

- 1) Peningkatkan aksesabilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpendapatan rendah;

- 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat usaha ekonomi lemah seperti pedagang, usaha kecil dan menengah, petani, serta nelayan;
- 3) Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sanitasi, air bersih, serta listrik di wilayah kantong-kantong kemiskinan, desa-desa dan pulau terpencil;
- 4) Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kinerja aparatur pemerintah daerah khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

Keempat prioritas di atas menjadi sasaran utama dalam pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2016. Disamping prioritas tersebut pemerintah daerah juga memperhatikan beberapa prioritas yang perlu menjadi perhatian daerah sejalan dengan prioritas nasional, prioritas dimaksud adalah:

- a. penanggulangan kemiskinan;
- b. Peningkatan ketahanan pangan;
- c. perbaikan iklim investasi dan iklim usaha;
- d. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- e. pembangunan daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik;
- f. Pengembangan kebudayaan, kualitas dan inovasi teknologi;

Berbagai prioritas tersebut merupakan upaya untuk mengarahkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD tahun 2011-2015 serta RKPD tahun 2016 yang selanjutnya diformulasikan kedalam Kebijakan Umum APBD.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka

mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Arah dan kebijakan umum belanja daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dari sisi perencanaan belanja, ditunjukkan dari alokasi belanja berdasarkan bidang urusan pemerintahan maupun kelompok belanja.

Tabel 3.4 : Alokasi anggaran belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

URAIAN	TAHUN 2016	
	ANGGARAN (Rp)	%
URUSAN WAJIB	966.087.734.231,00	96,60
PENDIDIKAN	227.172.155.388,00	22,72
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	222.540.478.388,00	
Dinas Pekerjaan Umum	4.631.677.000,00	
KESEHATAN	112.993.198.955	11,30
Dinas Kesehatan	89.165.744.633,00	
Rumah Sakit Umum Daerah	23.337.804.322,00	
Dinas Pekerjaan Umum	489.650.000,00	
PEKERJAAN UMUM	172.470.431.036,00	17,25
Dinas Pekerjaan Umum	172.470.431.036,00	
PERUMAHAN RAKYAT	20.874.741.600,00	2,09
Dinas Pekerjaan Umum	20.874.741.600,00	
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	14.437.568.575,00	1,44
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.437.568.575,00	

URAIAN	TAHUN 2016	
	ANGGARAN (Rp)	%
PERHUBUNGAN	12.294.712.041,00	1,23
Dinas Perhubungan	12.294.712.041,00	
LINGKUNGAN HIDUP	26.791.917.602,00	2,68
Badan Lingkungan Hidup	6.007.666.997,00	
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	20.784.250.605,00	
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5.505.398.790,00	0,55
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.505.398.790,00	
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	452.356.570,00	0,05
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	452.356.570,00	
SOSIAL	7.837.659.916,00	0,78
Dinas Sosial	7.837.659.916,00	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.508.619.900,00	0,15
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	1.508.619.900,00	
KETENAGAKERJAAN	6.704.451.111,00	0,67
Dinas Tenaga Kerja	6.704.451.111,00	
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.624.158.032,00	0,66
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	6.624.158.032,00	
PENANAMAN MODAL	6.299.936.286,00	0,63
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	6.299.936.286,00	
KEBUDAYAAN	7.014.574.900,00	
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.014.574.900,00	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	27.561.284.957,00	2,76
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.950.946.646,00	
Satuan Polisi Pamong Praja	15.031.666.450,00	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.578.671.861,00	
PEMUDA DAN OLAHRAGA	995.765.800,00	0,10

URAIAN	TAHUN 2016	
	ANGGARAN (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	995.765.800,00	
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	291.980.496.503,00	29,20
DPRD	7.987.671.000,00	
Kepala Daerah dan Wakil	796.550.000,00	
Sekretariat Daerah	58.831.251.077,00	
Sekretariat DPRD	22.254.187.548,00	
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	138.929.823.843,00	
Badan Kepegawaian Daerah	10.256.319.004,00	
Inspektorat Daerah	6.074.473.456,00	
Kecamatan Bintan Timur	7.641.257.550,00	
Kecamatan Gunung Kijang	4.663.012.150,00	
Kecamatan Teluk Bintan	4.277.597.850,00	
Kecamatan Bintan Utara	6.998.446.650,00	
Kecamatan Teluk Sebong	4.282.667.550,00	
Kecamatan Tambelan	3.422.045.450,00	
Kecamatan Seri Kuala Lobam	4.316.869.100,00	
Kecamatan Toapaya	4.678.919.800,00	
Kecamatan Bintan Pesisir	3.028.263.125,00	
Kecamatan Mantang	3.541.141.350,00	
KETAHANAN PANGAN	6.877.050.104,00	0,69
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	6.877.050.104,00	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.365.935.765,00	
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	7.365.935.765,00	
KEARSIPAN	2.325.320.400,00	0,23
Kantor Perpustakaan dan Arsip	2.325.320.400,00	
URUSAN PILIHAN	33.990.203.694,00	3,40

URAIAN	TAHUN 2016	
	ANGGARAN (Rp)	%
PERTANIAN	7.576.313.128,00	0,76
Dinas Pertanian dan Kehutanan	7.576.313.128,00	
KEHUTANAN	1.437.995.500,00	0,14
Dinas Pertanian dan Kehutanan	1.437.995.500,00	
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.868.782.633,00	0,79
Dinas Pertambangan dan Energi	7.868.782.633,00	
PARIWISATA	5.876.334.021,00	0,59
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.876.334.021,00	
KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.247.978.412,00	1,02
Dinas Kelautan dan Perikanan	10.247.978.412,00	
PERDAGANGAN	982.800.000,00	0,10
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	982.800.000,00	
JUMLAH	1.000.077.937.925,00	100,00

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan,
Tahun 2017

Pengalokasian Belanja Daerah Tahun 2016 terdiri atas:

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Pengalokasian belanja pegawai mengalami peningkatan, kebijakan ini lebih disebabkan karena penambahan jumlah pegawai dan perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dengan memberikan insentif ataupun tambahan penghasilan atas beban kerjanya.

Terhadap komponen belanja bunga tidak dialokasikan anggaran tersebut pada tahun 2016, sedangkan untuk bantuan sosial dan hibah pemerintah daerah mengambil kebijakan tetap mengalokasikan anggarannya hal ini diupayakan guna memberikan perhatian kepada masyarakat kurang mampu atas beban ekonomi yang terus bertambah akibat kenaikan harga-harga serta perbaikan strata sosial dalam masyarakat.

Untuk belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan hal ini diupayakan guna membantu proses demokratisasi dan otonomi pemerintahan desa yang mana pada tahun yang bersangkutan sebagian desa mengalami pergantian kepemimpinannya dan telah mulai dilaksanakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Sedangkan pada belanja tidak terduga pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran sesuai dengan kondisi dan pengembalian pendapatan tahun-tahun sebelumnya.

b. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honoraum/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Tabel 3.5: Prosentase Alokasi Anggaran Belanja berdasarkan bagian belanja APBD tahun 2016

URAIAN	PERSENTASE TERHADAP TOTAL		%
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	
Pendidikan	188.371.132.625,00	38.801.022.763,00	22,72
Kesehatan	46.092.920.350,00	66.900.278.605,00	11,30
Pekerjaan Umum	5.965.721.325,00	166.504.709.711,00	17,25
Perumahan Rakyat	0,00	20.874.741.600,00	2,09

URAIAN	PERSENTASE TERHADAP TOTAL		%
Perencanaan Pembangunan	4.672.745.750,00	9.764.822.825,00	1,44
Perhubungan	4.966.455.750,00	7.328.256.291,00	1,23
Lingkungan Hidup	5.791.395.150,00	21.000.522.452,00	2,68
Kependudukan dan Catatan Sipil	3.351.085.200,00	2.154.313.590,00	0,55
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	1.508.619.900,00	0,15
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,00	452.356.570,00	0,05
Sosial	2.125.237.950,00	5.712.421.966,00	0,78
Ketenagakerjaan	3.012.757.100,00	3.691.694.011,00	0,67
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3.829.097.200,00	2.795.060.832,00	0,66
Penanaman Modal	3.098.020.875,00	3.201.915.411,00	0,63
Kebudayaan	3.374.600.900,00	3.639.974.000,00	0,70
Kepemudaan dan Olahraga	0,00	995.765.800,00	0,10
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	19.579.228.875,00	7.982.056.082,00	2,76
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian	176.011.041.039,00	115.969.455.194,00	29,20
Ketahanan Pangan	3.978.118.375,00	2.898.931.729,00	0,69
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.827.541.950,00	4.538.393.815,00	0,74
Kearsipan	1.134.991.100,00	1.190.329.300,00	0,23
Pertanian	4.683.463.000,00	2.892.850.128,00	0,76
Kehutanan	0,00	1.437.995.500,00	0,14
Energi dan Sumber Daya Mineral	2.959.881.800,00	4.908.900.833,00	0,79
Pariwisata	0,00	5.876.334.021,00	0,59

URAIAN	PERSENTASE TERHADAP TOTAL		%
Kelautan dan Perikanan	5.054.314.600,00	5.193.663.812,00	1,02
Perdagangan	0,00	982.800.000,00	0,10
Jumlah	490.879.751.184,00	509.198.186.741,00	100,00

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2017

Alokasi tersebut di atas dapat dilihat dari kebijakan belanja dari urusan pemerintahan daerah dan satuan kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan.

Tabel 3.6: Kebijakan program dan kegiatan belanja APBD tahun 2016 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan

KODE	URAIAN
1.	Urusan Wajib
1.01.	Pendidikan
1.01.01.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini
16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
17.	Program Pendidikan Menengah
20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
22.	Program Pelayanan Kepemudaan
23.	Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain
24.	Program Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Tinggi Penunjang Sektor – Sektor Unggulan
25.	Program Kejar Paket
29.	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

1.02.	Kesehatan
1.02.01.	Dinas Kesehatan
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
20.	Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Keluarga
33.	Program Pengendalian Penyakit
34.	Program Penyehatan Lingkungan
35.	Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
36.	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin
37.	Program Kefarmasian dan alat kesehatan
38.	Program Pengawasan dan Pembinaan Peredaran sediaan farmasi dan Makanan
39.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
40.	Program Manajemen Kesehatan
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapastan Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
35.	Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
37.	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
40.	Program Manajemen Kesehatan

1.03.	
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
18.	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
21.	Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman
22.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman
23.	Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain
27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
28.	Program Pengendalian Banjir
32.	Program Pembangunan Drainase dan Gorong – gorong Jalan
33.	Program Peningkatan Kapasitas Bidang Kepekerjaan Umum
34.	Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum/Sosial
35.	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah
37.	Program Peningkatan Perencanaan Teknis
1.06.	Perencanaan Pembangunan
1.06.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15.	Program Pengembangan Data/Informasi
21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
28.	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
31.	Program Inventarisasi Sumber Daya Alam
32.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan
35.	Program Perencanaan Tata Ruang
36.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.07.	Perhubungan
1.07.01.	Dinas Perhubungan
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
21.	Program Peningkatan Perencanaan Teknis dan Kebijakan Bidang Perhubungan
23.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
25.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi
1.08.	Lingkungan Hidup
1.08.01.	Badan Lingkungan Hidup
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
26.	Program Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
27.	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08.04.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Pemakaman
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
25.	Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum
31.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1.10.	Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.01.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.	Program Pengawasan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
1.13.	Sosial
1.13.01.	Dinas Sosial

01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
22.	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
23.	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan sosial
24.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
29.	Program Mitigasi Bencana
1.14.	Tenaga Kerja
1.14.01.	Dinas Tenaga Kerja
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16.	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
17.	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
18.	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
19.	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
1.15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.15.01.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM
20.	Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
20.	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
21.	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
22.	Program Peningkatan Wirausaha dan UKM
1.16.	Penanaman Modal
1.16.01.	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi
16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
19.	Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi
20.	Program Pelayanan Perizinan Non Investasi
1.17.	Kebudayaan
1.17.01.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
19.	Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya, Seni dan perfilman

20.	Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata
21.	Program Kesejahteraan, Kepurbakalaan dan Permuseuman
23.	Program Peningkatan Informasi Pasar Pariwisata
1.19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negri
1.19.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
26.	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
27.	Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama
1.19.03.	Satuan Polisi Pamong Praja
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
24.	Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong Praja
25.	Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat
1.19.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur

05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
32.	Program Penanggulangan Bencana
33.	Program Mitigasi Bencana
1.20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1.20.03.	Sekretariat DPRD
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
26.	Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan
1.20.04.	Sekretaris Daerah
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
18.	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
52.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
63.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan
69.	Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan
70.	Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah

76.	Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
77.	Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan
78.	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
80.	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah
81.	Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama
83.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat
1.20.05.	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah
18.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
39.	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah
57.	Program Manajemen Aset Daerah
1.20.06	Badan Kepegawaian Daerah
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28.	Program Pendidikan Kedinasan
30.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
50.	Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah
1.20.07.	Inspektorat Daerah

01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.	Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan eksternal
51.	Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah
52.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
1.20.09.	Kecamatan Bintang Timur
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
53.	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
54.	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.10.	Kecamatan Gunung Kijang
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
53.	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
54.	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.11.	Kecamatan Teluk Bintang
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
53.	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
54.	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.12.	Kecamatan Bintang Utara
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
53.	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
54.	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.13.	Kecamatan Teluk Sebong
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
53.	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
54.	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.14.	Kecamatan Tambelan
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
53.	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
54.	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.15.	Kecamatan Sri Kuala Lobam
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
53.	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
54.	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.16.	Kecamatan Toapaya
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
53.	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
54.	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.17.	Kecamatan Bintang Pesisir
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
53.	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
54.	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

1.20.18.	Kecamatan Mantang
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
53.	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
54.	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.21	Ketahanan Pangan
1.21.01	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
08.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
09.	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
10.	Program Pengembangan dan Penyuluhan Petani dan Nelayan
11.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1.22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.22.01.	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.	Program Keluarga Berencana
17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
20.	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

25.	Program Ketahanan Pemberdayaan Keluarga
1.24.	Kearsipan
1.24.01.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.	Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah
21.	Program Pengembangan Perpustakaan
2.	Urusan Pilihan
2.01.	Pertanian
2.01.01.	Dinas Pertanian dan Kehutanan
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21.	Program Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
21.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
22.	Program Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya Hutan
22.	Program Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
25.	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Holtikultura Berkelanjutan
26.	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat Utuh dan Halal
27.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
28.	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

32.	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)
2.03.	Energi dan Sumber Daya Mineral
2.03.01.	Dinas Pertambangan dan Energi
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
18.	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Umum dan Sumber Daya Mineral
19.	Program Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar dan Gas Bumi
2.05.	Kelautan dan Perikanan
2.05.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
21.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
29.	Program Peningkatan daya saing produk perikanan
31.	Program Pengelolaan sumber daya laut , pesisir dan pulau-pulau kecil
33.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budi Daya
34.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2017

Tabel 3.7: Anggaran belanja pelayanan dasar tahun 2016

URAIAN	TAHUN 2016	%
Pendidikan	227.172.155.388,00	22,72
Dinas Pendidikan	222.540.478.388,00	
Dinas Pekerjaan Umum	4.631.677.000,00	
Kesehatan	112.993.198.955,00	11,30
Dinas Kesehatan	89.165.744.633,00	
RSUD	23.337.804.322,00	
Dinas Pekerjaan Umum	489.650.000,00	
Pekerjaan Umum	172.470.431.036,00	17,25
Dinas Pekerjaan Umum	172.470.431.036,00	
Perumahan	20.874.741.600,00	2,09
Dinas Pekerjaan Umum	20.874.741.600,00	
Lingkungan Hidup	26.791.917.602,00	2,68
Badan Lingkungan Hidup	6.007.666.997,00	
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	20.784.250.605,00	
Kependudukan dan Catatan Sipil	5.505.398.790,00	0,55
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.505.398.790,00	
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	452.356.570,00	0,05
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB	452.356.570,00	
Sosial	7.837.659.916,00	0,78
Dinas Sosial	7.837.659.916,00	
Ketenagakerjaan	6.704.451.111,00	0,67

URAIAN	TAHUN 2016	%
Dinas Tenaga Kerja	6.704.451.111,00	
Koperasi dan Usaha Kecil	6.624.158.032,00	0,66
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	6.624.158.032,00	
Pemuda dan Olahraga	995.765.800,00	0,10
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	995.765.800,00	
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	27.561.284.957,00	2,76
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat	4.950.946.646,00	
Kantor Satpol PP	15.031.666.450,00	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.578.671.861,00	
JUMLAH	615.983.519.757,00	61,61

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2017

Dari program kegiatan tersebut diketahui bahwa program yang termasuk pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2016 penganggarnya telah mencapai **61,61%** dari total anggaran.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Target anggaran belanja daerah tahun anggaran 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, bahwa belanja daerah sebesar Rp.1.000.077.937.925,00 mengalami penurunan sebesar 0,36% dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi realisasi belanja berdasarkan laporan realisasi anggaran 2016 (unaudited) adalah sebesar Rp.916.869.651.162,00.

Dengan demikian perbandingan antara target anggaran belanja dan realisasi belanja menunjukkan penyerapan APBD tahun anggaran 2016 sebesar 91,68%.

Tabel 3.8 : Anggaran dan Realisasi belanja APBD tahun 2016 (dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Tidak Langsung	490,879,751,184.00	448,703,500,525.00	91.41
5.1.1	Belanja Pegawai	401,838,919,850.00	370,910,947,748.00	92.30
5.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0.00
5.1.4	Belanja Hibah	8,294,720,000.00	7,367,920,000.00	88.83
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6,219,900,000.00	3,431,893,281.00	55.18
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	72,526,211,334.00	66,647,921,196.00	91.89
5.1.8	Belanja tidak terduga	2,000,000,000.00	344,818,300.00	17.24
5.2	Belanja Langsung	509,198,186,741.00	468,166,150,637.00	91.94
5.2.1	Belanja Pegawai	87,493,672,733.00	76,831,093,618.00	87.81
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	199,769,864,649.00	179,993,183,471.00	90.10
5.2.3	Belanja Modal	221,934,649,359.00	211,341,873,548.00	95.23
	Jumlah Belanja	1,000,077,937,925.00	916,869,651,162.00	91.68

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2017

3. Pemasalahan dan Solusi

Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam kebijakan umum APBD diharapkan tetap konsisten dengan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang ada dan senantiasa dinamis dalam rangka mengakomodir dinamika masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2016 adalah:

1. Dengan diberlakukannya pengelolaan keuangan yang terdesentralisasi di setiap SKPD maka dituntut kesiapan sumber daya manusia untuk melaksanakan anggaran pada setiap SKPD.
2. Regulasi atau peraturan dari pusat yang satu sama lainnya saling tidak sinkron akan dapat menimbulkan pemahaman yang multitafsir terutama dengan aparat pemeriksa. Solusi yang ditempuh adalah dengan senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan dilakukannya pendampingan oleh pihak berkompeten.
3. Sistem dan prosedur yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bintan masih perlu perbaikan-perbaikan untuk masa yang akan datang terhadap pengelolaan keuangan baik dari segi perencanaan, penatausahaan maupun pelaporan. Kondisi ini mengingat masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, solusinya yang dapat diberikan adalah:

1. Penatausahaan penyediaan informasi sebagai bahan dasar perencanaan anggaran belanja dengan meningkatkan pendataan dan kemampuan penyusunan database.

2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan daerah dengan pelaksanaan asistensi, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, workshop dan sosialisasi berkaitan dengan penganggaran.
3. Meningkatkan koordinasi dalam bentuk forum diskusi dan studi banding dengan daerah lain untuk berbagi pengalaman dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
4. Penyempurnaan peraturan dan regulasi daerah tentang tata pengelolaan keuangan daerah.

3.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Umum Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan neto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dimaksud untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah.

Arah kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2014 dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran dan membiayai program yang direncanakan pada tahun 2016 melalui peningkatan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas, serta digunakan untuk penyertaan modal dalam usaha-usaha produktif yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Realisasi SILPA merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 16.830.008.474,98,00 (setelah audit/audited).

Tabel 3.9: Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	Penerimaan Pembiayaan		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	13.275.180.117,00	16.830.008.474,98
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	13.275.180.117,00	16.830.008.474,98
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-
	Pembiayaan Neto	13.275.180.117,00	16.830.008.474,98

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2017

3. Permasalahan dan Solusi

Dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2015 sebesar Rp.16.830.008.474,98 maka SILPA tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 693,74% atau menjadi Rp.133.587.734.970,30 (*unaudited*). Peningkatan jumlah SILPA tersebut disebabkan karna pencapaian over target PAD 106,68%, bagi hasil pajak dan bukan pajak yang mencapai 122,01% dan dana bagi hasil pajak dari provinsi yang mencapai 123,32%. Disamping itu penyerapan belanja tahun 2016 hanya mencapai 91,68%. Dari SILPA tersebut digunakan untuk menutup defisit belanja atas pendapatan pada APBD murni tahun anggaran 2016 yang mencapai Rp. 77.475.967.754,00 dan selanjutnya dan menambah belanja pada APBD Perubahan 2017.

Solusi atas permasalahan pembiayaan tersebut akan dilakukan optimalisasi penggunaan dana dan sebagai bahan pengkajian yang lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan SILPA yang tidak hanya untuk menutupi defisit anggaran namun juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan manajemen kas/investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang bagi kepentingan pembangunan Kabupaten Bintan.

Sebagai gambaran, optimalisasi penggunaan SILPA berupa Manajemen Kas yaitu menempatkan sebagian dana Kas Daerah ke beberapa Bank dalam simpanan deposito bulanan. Pada tahun 2016 pendapatan berupa deposito tersebut mencapai Rp.9.562.484.165,84 atau mencapai 136,61% dari targetnya sebesar Rp. 7.000.000.000,00.



BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

4.1.1. URUSAN PENDIDIKAN

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keempat** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Pendidikan** adalah sebagai berikut :

1. Persentase taman bacaan/perpustakaan Kelurahan, Desa dan Sekolah yang aktif;

Sampai dengan tahun 2016 taman bacaan/perpustakaan yang ada dan tersebar diseluruh Kabupaten Bintan berjumlah 35 unit. dan semua taman bacaan tersebut aktif melaksanakan pelayanan dibidang perpustakaan jadi untuk angka Persentase taman bacaan/perpustakaan Kelurahan, Desa dan Sekolah yang aktif mencapai **100%**.

2. APK PAUD 0-6;

Pada tahun 2016 target APK PAUD 0-6 Tahun sebesar 57.73 persen, untuk capain kinerja Dinas Pendidikan Kabupten Bintan pada indikator ini sebesar 25,92 persen*). Angka APK PAUD 0-6 tahun ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah seluruh siswa pada jenjang PAUD (TK/RA/PAUD) 6.100 siswa dengan jumlah penduduk 0-6 tahun sebanyak 23.531 orang.

(*) data penduduk dari BPS masih estimasi)

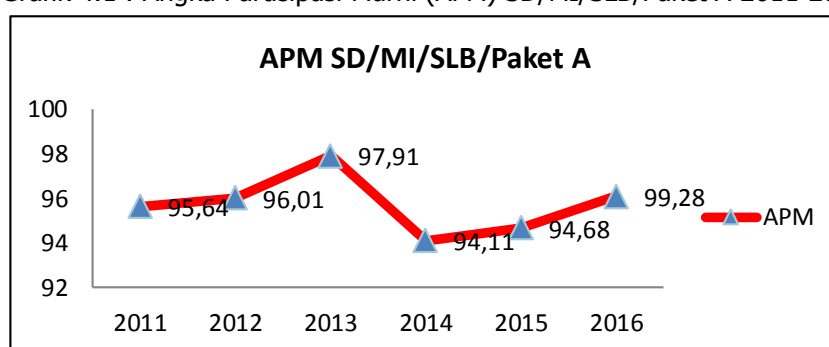
3. Rasio guru murid PAUD;

Pada tahun 2016 indicator Rasio guru murid PAUD mencapai 1:8, ini berarti 1 orang melayani/mengajar sebanyak 8 orang murid per kelas. Angka ini sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 1:8.

4. **APM SD/MI/SLB/Paket A**

Pada tahun 2016 capaian kinerja indikator **APM SD/MI/SLB/Paket A** sebesar **99,28 persen*)**. Angka ini didapat dari perbandingan antara jumlah siswa usia 7-12 tahun sebesar 18.296 siswa dengan jumlah penduduk bintang usia 7-12 tahun sebesar 19.039 orang. Ini berarti masih ada sekitar 743 orang usia 7-12 yang masih belum mengenyam jenjang pendidikan setara Sekolah Dasar. Namun capaian ini sudah melawati target RPJM yang sudah ditetapkan. Untuk perkembangan angka APM SD/MI/SLB/Paket A 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut. (*) data penduduk dari BPS masih estimasi)

Grafik 4.1 : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SLB/Paket A 2011-2016

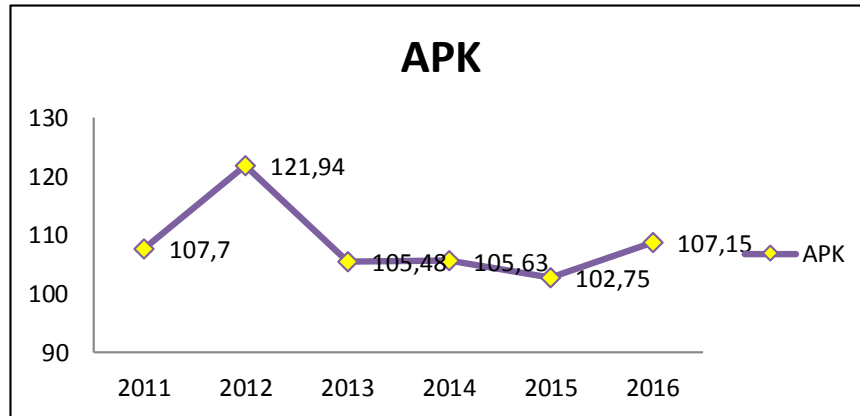


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang/BPPPD Tahun 2017 (data diolah)

5. **APK SD/MI/SLB/Paket A**

Pada tahun capaian kinerja untuk indikator **APK SD/MI/SLB/ Paket A** sebesar **107,15 persen*)**. Angka ini dihitung dari perbandingan antara jumlah keseluruhan di jenjang SD sebanyak 19.907 siswa dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 19.039 orang. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa masih banyak anak usia dibawah 7 tahun dan diatas 12 tahun yang sudah atau masih bersekeloah di jenjang SD yaitu sebanyak 868 siswa. Untuk perkembangan APK SD/MI/SLB/Paket A 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut. (*)data penduduk dari BPS masih estimasi)

Grafik 4.2 : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SLB/Paket A 2011-2016

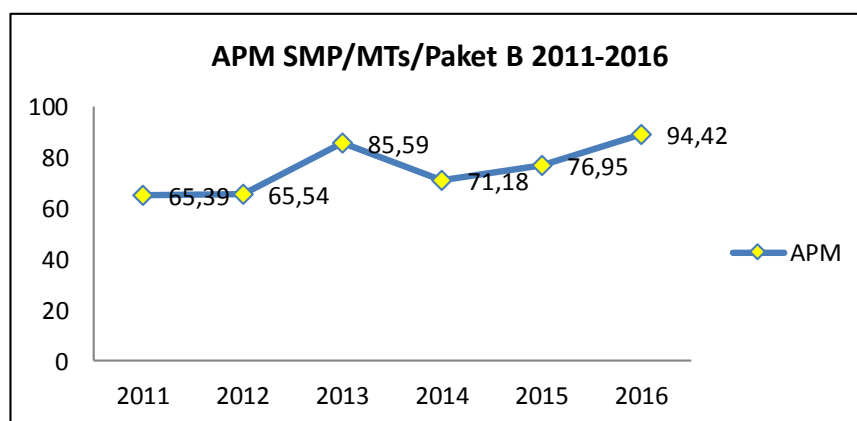


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan/BPPPD Tahun 2017 (data diolah)

6. APM SMP/MTs/Paket B

Pada tahun 2016 capaian kinerja untuk indikator **APM SMP/MTs/Paket-B** sebesar **94,42** persen*). Angka ini didapat dari perbandingan antara jumlah siswa usia 13-15 tahun sebesar 6.760 siswa dengan jumlah penduduk bintang usia 13-15 tahun sebesar 7.586 orang. Ini berarti masih ada sekitar 826 orang usia 13-15 tahun yang masih belum mengenyam jenjang pendidikan setara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Namun capaian ini sudah melawati target RPJM yang sudah ditetapkan. Untuk perkembangan angka APM SMP/MTs/Paket-B 5 tahun terakhir dapat dilihat pada garfik berikut. (*)data penduduk dari BPS masih estimasi)

Grafik 4.3 : Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs 2011-2016

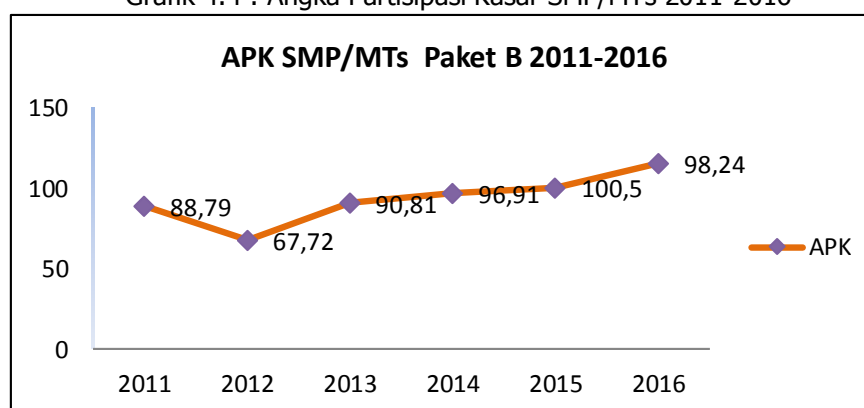


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan/BPPPD Tahun 2017 (data diolah)

7. APK SMP/MTs/Paket B

Pada tahun capaian kinerja untuk indikator **APK SMP/MTs/Paket-B** adalah **98,24** persen*). Angka ini dihitung dari perbandingan antara jumlah keseluruhan di jenjang SMP/MTs/Paket-B sebanyak 7.813 siswa dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 7.586 orang. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa masih banyak anak usia dibawah 13 tahun dan diatas 15 tahun yang sudah atau masih bersekolah di jenjang SLTP yaitu sebanyak 227 siswa. Untuk perkembangan APK SMP/MTs/Paket-B 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut. (*) data penduduk dari BPS masih estimasi)

Grafik 4.4 : Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs 2011-2016



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan/BPPPD Tahun 2017 (data diolah)

8. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Pada tahun 2016 target **Angka Rata-rata Lama Sekolah** sebesar **8,42** tahun*), untuk capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan adalah 8,28 tahun sama dengan capaian pada tahun 2015. Ini berarti bahwa rata-rata anak-anak di Kabupaten Bintan sudah menamatkan SD dan melanjutkan ke jenjang SLTP. (*)masih data lama, data BPS masih proses perhitungan)

9. Angka Melek Huruf (AMH)

Pada tahun 2016 target **Angka Melek Huruf (AMH)** sebesar 99.63 persen, untuk capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan adalah 98.09 persen sama dengan capaian pada tahun 2015. Angka Melek Huruf ini adalah persentase usia 15-44 tahun yang dapat membaca dan menulis. Dari persentase diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia 15-44 tahun

sebesar 78.779 orang dan yang dapat membaca dan menulis sebanyak 77.274 orang namun masih ada sekitar 1.505 orang atau 1.54 persen yang masih belum dapat membaca dan menulis. **(*)masih data lama, data BPS masih proses perhitungan)**

10. **Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)**

Pada tahun 2016 target untuk indikator **Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)** adalah 52.52 persen, dari indikator ini capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan adalah 16.92 persen sama dengan capaian kinerja tahun 2015. Namun capaian kinerja ini masih dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bintan, disebabkan karena untuk tahun 2016 Uji Kompetensi Guru (UKG) tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) **Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan** melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.375.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.369.794.973,- atau 97,40%. Outcome Program ini adalah terwujudnya pelayanan pendidikan Anak Usia Dini yang bermutu, murah dan merata disetiap kecamatan. Secara lebih spesifik, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) dan Pos PAUD, dan jalur informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Dasar Pendidik PAUD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.126.600.000 dengan realisasi Rp.125.030.840 atau 98,76%. Output kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan, keahlian, keterampilan dasar dan sikap pendidik PAUD sebanyak 40 orang

(2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD (DAK Non Fisik)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.69.000.000 dengan realisasi Rp.69.000.000 atau 100%. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah dalam menunjang proses pembelajaran

(3) Pendukung DAK PAUD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000 dari realisasi sebesar Rp.27.623.775 atau 92,08%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan pembinaan bagi lembaga-lembaga penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOP) PAUD. Output kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring penggunaan dana sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan.

(4) Pelatihan Mitra PAUD dan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.148.170.358 dari atau 98,78%. Output dari kegiatan ini adalah terjalinnya kemitraan PAUD dan Bunda PAUD serta meningkatnya pengetahuan Bunda PAUD tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini.

2) **Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan** melalui 3 (Tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.438.035.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.432.429.651,- atau 99,05%. Outcome program ini adalah Terlaksananya percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, baik melalui jalur formal maupun non formal, yang mencakup SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A serta SMP, MTs, dan Paket B, sehingga seluruh anak usia 7–15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dititikberatkan pada (1) peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar terutama melalui penjangkaran anak-anak yang belum pernah sekolah pada jenjang SD termasuk SDLB/MI/Paket A dan peningkatan angka melanjutkan lulusan SD termasuk SDLB/MI/Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat, (2) mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta dengan meningkatkan kualitas pendidikan; dan (3) penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

- (1) **Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000 dengan realisasi Rp.39.989.000 atau 99,97%.

Oupout Kegiatan adalah meningkatnya pengendalian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dijenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP melalui sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyaluran dana BOSNAS dengan sasaran, 92 SD dan 28 SMP.

❖ **Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS)**

- a. Pelaksanaan BOSNAS Sekolah Dasar (SD) telah dilaksanakan dari tahun 2005 hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 dana BOSNAS telah disalurkan kepada 96 SD dengan total siswa yang menerima lebih kurang 18.715 siswa. Dengan masing-masing siswa mendapatkan Rp.800.000/siswa dengan total dana BOSNAS Rp.14.208.200.000.

Tabel 4.1. Penyaluran BOSNAS untuk tingkat SD Tahun 2015 s/d 2016

TAHUN	SD					TOTAL (Rp)
	TW I	TW II	TW III	TW IV	PER SISWA (Rp)	
2015	18.084	18.350	18.189	18.391	800.000	14.602.800.000
2016	18.258	18.715	18.403	15.665	800.000	14.208.200.000

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan 2017

- b. Sedangkan untuk SMP pada tahu 2016, dana BOSNAS telah disalurkan kepada 30 SMPN dengan jumlah total siswa yang menerima lebih kurang 7.020 siswa. Masing-masing siswa mendapatkan Rp. 1.000.000/siswa dengan jumlah dana BOSNAS Rp. 6.732.750.000

Tabel 4.2. Penyaluran BOSNAS untuk tingkat SMP Tahun 2015 s/d 2016

TAHUN	SMP					TOTAL (Rp)
	TW I	TW II	TW III	TW IV	PER SISWA (Rp)	

2015	6.605	6.599	6.582	7.175	1.000.000	6.740.250.000
2016	6.849	7.020	6.958	6.104	1.000.000	6.732.750.000

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan 2017

(2) **Try Out Ujian Sekolah Dan Pelaksanaan Ujian Sekolah tingkat SD/MI Se-Kab Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.199.340.000 dengan realisasi Rp.196.266.304 atau 98,46%. Output Kegiatan ini adalah terlaksananya try out ujian nasional siswa kelas 6 sebanyak 2.702 siswa SD/MI dengan capaian kelulusan 99.98%.

(3) **Try Out dan Pelaksanaan UN (Ujian Nasional) SMP/MTs**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.198.695.000 dengan realisasi Rp.196.174.347 atau 98,73%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya try out dan ujian nasional yang diikuti sebanyak 2.282 siswa kelas 9 di 27 SMP dan 8 MTs tahun pelajaran 2015/2016 dengan kelulusan SMP/MTs 99.75%.

Capaian kinerja tahun 2016 untuk program ini adalah :

- a. **Angka Putus Sekolah SD/SMP**, capaian untuk indikator ini adalah 0.13%. Angka ini sudah melebihi target dari yang ditetapkan sebesar 0.2%. ini menunjukkan anak putus sekolah untuk jenjang SD/SMP di Kabupaten Bintan sudah semakin kecil, dari data yang dihitung tercatat 14 siswa Sekolah Dasar yang putus sekolah dari total jumlah siswa 17.348, dan 16 siswa Sekolah Menengah Pertama yang putus dari total jumlah siswa 6.102.
- b. Pada tahun 2016 target **Rasio APM perempuan laki-laki** di SD sebesar 99.7 persen*), untuk capain kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan adalah, 100.78 persen. Angka ini dihitung dari perbandinang antara APM anak perempuan

sebesar 96.48 persen dengan APM anak laki-laki 95.74 persen pada jenjang SD. Angka ini menunjukkan jumlah anak perempuan usia 7-12 tahun lebih banyak yang bersekolah pada jenjang SD daripada anak laki-laki usia 7-12 tahun. (*) data penduduk dari BPS masih estimasi)

- c. Pada tahun 2016 target **Rasio APM Perempuan Laki-Laki** di SMP sebesar 100.78 persen*), untuk capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan adalah, 106.65 persen. Angka ini dihitung dari perbandingan antara APM anak perempuan sebesar 92.13 persen dengan APM anak laki-laki 86.39 persen pada jenjang SMP. Angka ini menunjukkan jumlah anak perempuan usia 13-15 tahun lebih banyak yang bersekolah pada jenjang SMP daripada anak laki-laki usia 13-15 tahun. (*)data penduduk dari BPS masih estimasi)

3) **Program Pendidikan Menengah**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.267.736.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.265.799.015,- atau 99,19%. *Outcome* program ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pendidikan Menengah yang bermutu dan bersandar Nasional di setiap kecamatan. Program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama secara signifikan sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun kejuruan dan pendidikan non-formal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional dan Pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat SMA/MA/SMK Tahun Pelajaran 2015/2016**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.247.736.800 dan realisasi Rp.245.983.715 atau 99,29%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya try out untuk siswa kelas 12 tahun pelajaran 2015/2016 dan terpenuhinya orientasi hasil ujian untuk 1.541 siswa kelas 12 SMA/MA/SMK Tahun Pelajaran 2015/2016. Tahun 2015 tingkat kelulusan di Kabupaten Bintan mencapai 100% untuk tingkat SMA/MA dan 100% untuk tingkat SMK.

(2) **Administrasi dan Verifikasi Data Siswa Miskin Beasiswa Kurang Mampu Jenjang SLTA**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.20.000.000 dengan realisasi Rp.19.815.300 atau 99,07%. Output kegiatan ini adalah terverifikasinya 1.039 orang jumlah yang akan diberikan bantuan/beasiswa baik melalui APBD.

4) **Program Peningkatan Mutu pendidikan dan Tenaga kependidikan**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan** melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.096.320.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.088.739.288 atau 98,83%. Outcome Program ini adalah meningkatkan mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pembekalan (PPGJ) bagi peserta Sertifikasi Guru**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.70.271.000 dan realisasi Rp.66.531.400 atau 94,68%. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi tentang perubahan-perubahan dalam proses penetapan dan pendaftaran bagi peserta didik tahun 2016 sebanyak 100 orang. Sedangkan Output adalah terpenuhinya kelulusan seleksi sebanyak 65 orang yang memenuhi standar kualifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.

(2) **Update Data Pendidikan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000 dengan realisasi Rp.49.293.750 atau 98,59%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan pendidikan untuk jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK se Kabuapten Bintan. Hasil kegiatan ini adalah pencetakan sebuah dokumen profil pendidikan sebanyak 10 buku.

Pembiayaan Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.73.049.000 dan realisasi keuangan Rp.72.999.199 atau 99,93 %. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian khususnya dalam penilaian angka kredit bagi guru dan kepala sekolah yang diusulkan dalam kenaikan pangkat, terdapat 99 orang yang telah diterbitkan SK kenaikan pangkatnya periode April 2016 dari 107 yang diajukan dan Oktober 2016 sebanyak 136 orang dari 147 yang diajukan kenaikan pangkat.

(3) **Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000 dan realisasi sebesar Rp.50.000.000 atau 100%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan Komite Sekolah tentang tugas dan fungsinya yang diikuti sebanyak 60 orang melalui Lokakarya Komite Sekolah.

(4) **Informasi Pendidikan Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.50.000.000 dan realisasi sebesar Rp.50.000.000 atau 100%. Output Kegiatan ini adalah terpenuhinya penyeberluasan informasi bidang pendidikan melalui publikasi media cetak, gallery foto, banner, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan di Kabupaten Bintan secara merata baik perkotaan maupun pedesaan.

(5) **Workshop Pelatihan TIM BOS NASIONAL Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.733.000.000 dan realisasi sebesar Rp.730.640.009 atau 99.68%. *Output* dari kegiatan adalah meningkatnya Pengelolaan BOSNAS yang baik, baik dalam penggunaan dan pertanggung jawaban sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2016.

(6) **Workshop Penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Pengawas Sekolah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.70.000.000 dan realisasi sebesar Rp.69.274.930 atau 98.96%. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pengawas sekolah dalam

menyusukan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan pangkat.

Capaian kinerja tahun 2016 untuk program ini antara lain:

- a. **Persentase guru TK bersertifikat profesi pada tahun 2016** mencapai 14.5% atau naik 1.3% dari tahun 2015. Angka ini menunjukkan masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan sebesar 17.6% atau 82.39%. Ini disebabkan oleh masih sedikitnya pendidik Taman Kanak-kanak (TK) yang memiliki kualifikasi Strata-1 yang merupakan persyaratan wajib untuk mengikuti Sertifikasi Pendidik. Selain itu, tingginya standar kelulusan Uji Kompetensi Guru yaitu dengan nilai 80 juga merupakan penyebab pendidik TK banyak yang tidak lulus untuk mengikuti proses Sertifikasi Guru.
- b. **Persentase guru SD bersertifikat profesi** pada tahun 2016 baru mencapai 44.1%, masih ada disparitas sekitar 5.1% untuk mencapai target 49.2% yang ditetapkan. Masih rendahnya capaian ini disebabkan beberapa faktor yaitu 1). masih adanya pendidik Sekolah Dasar yang belum Strata-1, ini ditandai dengan masih ada sekitar 289 dari 1.294 pendidik Sekolah Dasar yang berkualifikasi dibawah Strata-1. Ini merupakan kendala bagi seorang pendidik untuk mengikuti proses Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG), dimana untuk mengikuti PLPG seorang pendidikan wajib berkualifikasi minimal Strata-1. 2). Masih rendahnya kualitas kelulusan Uji Kompetensi Guru (UKG), hal ini ditandai dengan masih banyak pendidik yang memiliki nilai rata-rata UKG dibawah 80.00 yang merupakan nilai rata-rata kelulusan.

- c. **Persentase guru SMP bersertifikat profesi** pada tahun 2016 baru mencapai 41.2%, masih ada disparitas sekitar 22.3% untuk mencapai target 63.5% yang ditetapkan. Rendahnya capaian ini disebabkan faktor yaitu masih rendahnya kualitas kelulusan Uji Kompetensi Guru (UKG), hal ini ditandai dengan masih banyak pendidik yang memiliki nilai rata-rata UKG dibawah 80.00 yang merupakan nilai rata-rata kelulusan.
- d. **Persentase Pengawas bersertifikat profesi** pada tahun 2016 mencapai 100%, angka ini menunjukkan bahwa seluruh pengawas sekolah Dinas Pendidikan sudah bersertifikasi profesi, angka capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2015 dan sudah memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan.
- e. **Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV**, capaian pada tahun 2016 sebesar 81.58% atau masih sekitar 1.5% untuk mencapai target 83.1%. hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan masih ada guru di Kabupaten Bintan masih berkualifikasi dibawah S1, terutama untuk jenjang SD. Untuk jenjang SD masih ada sekitar 22.33% yang belum S1 sedangkan untuk SMP 8.67%. Ini disebabkan kurangnya biaya untuk meningkatkan kualifikasi dan usia rata-rata guru SD 50 tahun keatas yang lebih fokus memasuki masa pensiun sehingga kurang memikirkan kualifikasi pendidikan.

5) **Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan** melalui 26 (duapuluh enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.12.347.076.680,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.11.751.423.905 atau 87,17%. Outcome program ini adalah

terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan dan pada disetiap satuan pendidikan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pengadaan/sewa mobilitas bus sekolah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.3.768.728.000 dan Realisasi Keuangan Rp.3.724.988.790 atau 98,84%. Output Kegiatan ini adalah tersedianya sarana transportasi darat sebanyak 19 unit bus, untuk transportasi siswa sekolah di Kecamatan Bintan Timur, Toapaya, Teluk Bintan, Bintan Utara, Gunung Kijang, Seri Kuala Lobam dan Teluk Sebong, Bintan Pesisir, Tambelan.

(2) **Sewa Alat Transportasi Angkutan Laut Sekolah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.1.703.220.000 dan Realisasi Keuangan Rp.1.638.787.000 atau 96,22%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana transportasi yang aman dan nyaman bagi siswa menuju sekolah. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana transportasi yang aman dan nyaman menuju sekolah sebanyak 22 unit pompong bagi siswa-siswa yang tinggal daerah hinterland dengan rincian Kecamatan Mantang 10 unit, Kecamatan Bintan Pesisir 9 unit, Kecamatan Tambelan 1 unit, dan Kecamatan Teluk Bintan 1 unit.

(3) **Pengadaan Buku Rapor SD dan SMP**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.202.512.000 dan realisasi Rp.199.722.000 atau 98,62% dengan realisasi fisik kegiatan 100%. Output Kegiatan ini tersedianya buku laporan hasil belajar siswa untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2006 dengan rincian 1.700

eksemplar buku untuk siswa SD dan 1.000 eksemplar untuk siswa SMP.

(4) **Penyediaan Pemondokan Mahasiswa**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dari pagu anggaran Rp.203.500.000 dan Realisasi Keuangan Rp.180.570.970 atau 88,73%. Output Kegiatan ini adalah tersedianya sarana tempat tinggal atau pemondokan bagi mahasiswa-mahasiswa dari Kabupaten Bintan yang melanjutkan pendidikan di Padang, Pekanbaru, Semarang, Bandung dan Yogyakarta, Tanjungpinang.

(5) **Pendukung DAK SD**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.279.300.000 dan realisasi Rp.254.074.300 atau 90,97% dengan capaian fisik pekerjaan 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan dan pengawasan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan . Hasil Kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Alokasi Khusus untuk SD Negeri Se Kabupaten Bintan.

(6) **Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.735.000.000 dan realisasi Rp.735.000.000 atau 100% dan realisasi fisik kegiatan 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Ruang Kelas Baru untuk SD Negeri di Kabupaten Bintan. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya Ruang Kelas Baru untuk siswa SD Negeri di Kabupaten Bintan sebanyak 5

ruang kelas baru dengan rincian SDN 006 Bintang Timur 2 Unit, SDN 011 Bintang Timur 3 Unit.

(7) **Pengadaan Meubeler / peralatan sekolah SDIT An Nahl dan SMPIT Bahtera Insani**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.52.876.000 dan Realisasi Keuangan Rp.11.900.000 atau 22,51%. Kegiatan ini direncanakan untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) An-Nahl yang berlokasi di Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT Bahtera Insani) yang berlokasi di Kecamatan Bintang Utara, dan Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintang sudah melakukan survei lapangan dan cek lokasi, namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 kegiatan ini tidak dilanjutkan pelaksanaannya.

(8) **Pengadaan Meubeler Meja dan kursi SD Kabupaten Bintang**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.148.900.000 dan Realisasi Keuangan Rp.142.293.800 atau 95,56% dengan realisasi fisik kegiatan 100%. Output kegiatan adalah terpenuhinya sarana sekolah berupa meja dan kursi bagi siswa-siswi untuk lebih fokus dalam belajar mengajar Output Kegiatan ini adalah tersedianya tersedianya meja sebanyak 180 unit dan kursi sebanyak 360 unit bagi siswa.

(9) **Pembangunan Paving Blok dan Pemasangan Rolling Door SDN 004 Bintang Utara**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.297.600.000 dengan realisasi keuangan Rp.297.420.000 dan realisasi fisik kegiatan 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana sekolah berupa pembangunan paving blok

sebagai lapangan upacara dan tempat bermain siswa yang bebas banjir serta pemasangan rolling door yang berfungsi sebagai partisi ruangan kelas yang bisa digunakan untuk multifungsi kegiatan sekolah.

(10) Pemasangan Paving BLok SDN 006

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.79.280.000 dengan realisasi keuangan Rp.78.765.825 atau 99.35% dan realisasi fisik kegiatan 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya halaman sekolah yang rapi, asri dan bebas dari genangan air.

(11) Pengadaan Infocus SD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.216.850.000 dengan realisasi keuangan Rp.216.250.000 atau 99.72% dan realisasi fisik kegiatan 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas multimedia sebagai penunjang pendidikan dalam proses belajar mengajar sebanyak 24 unit.

(12) Pengadaan alat permainan anak-anak Dalam dan Luar

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.198.000.000 dengan realisasi Rp.196.465.443 atau 99.22%. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana permainan edukatif luar dan dalam untuk TK, KB, dan SPS, dengan rincian 5 TK, 6 PAUD dan 2 SPS.

(13) Pembangunan RKB TK Arlica

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.199.400.000 dengan realisasi 198.659.292 atau 99.63%. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana ruang belajar bagi peserta didik sebanyak 1 unit.

(14) Rehab Kantor dan Partisi Majelis Guru SMP 13 Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.599.080.000 dengan realisasi Rp.516.887.160 atau 86.28% dan realisasi fisik kegiatan 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas kantor dan majelis guru yang nyaman dan memadai serta meningkatnya profesionalitas para pendidik dan tenaga kependidikan.

(15) Pembangunan Kantor Guru / Majelis Guru SDN 018 Bintan Timur

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.197.480.000 dengan realisasi Rp.197.310.939 atau 99.91% dan realisasi fisik kegiatan 100%. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana berupa 1 unit ruang majelis guru yang akan meningkatkan kinerja serta profesionalitas para pendidik SDN 018 Bintan Timur.

(16) Pengadaan Laptop SD kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.493.169.400 dengan realisasi keuangan Rp.474.072.000 atau 96.13% dan realisasi fisik kegiatan 100%. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebanyak 50 unit bagi guru dalam menyusun materi dan bahan ajar serta sebagai penunjang pendidikan dalam proses belajar mengajar.

(17) Pembuatan Pagar dan Pintu Sekolah SD 005 Teluk Sebong

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.198.920.000 dengan realisasi keuangan Rp.198.861.925 atau 99.88% dan realisasi fisik kegiatan 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan pagar sekolah sebagai sarana keamanan bagi siswa dan guru serta menambah estetika keindahan bangunan sekolah agar terlihat lebih asri.

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya keamanan bagi siswa dan guru.

(18) **Pembangunan pagar SMAN 4 Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.136.610.000 dengan realisasi Keuangan Rp.136.233.029 atau 99.72%. Output dari kegiatan ini adalah terbangun pagar beton sepanjang 552 M2 dan pagar besi 110 M2.

(19) **Pembangunan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bintim**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.360.000.000 dengan realisasi Keuangan Rp.342.630.000 atau 95.18% dan realisasi fisik kegiatan 100%. Output terlaksananya pembangunan kantor UPTD yang lebih representatif. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya pelayanan maksimal administrasi perkantoran UPTD Kecamatan Bintan Timur kepada masyarakat.

(20) **Pengadaan Alat Belajar dan mengajar TPQ Nurul Iman**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.50.000.000, namun kegiatan ini **batal** dilaksanakan karena terbentur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

(21) **Penyediaan Sarana dan Prasarana TK Islam Terpadu**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.149.400.000 dengan realisasi Keuangan Rp.148.463.762 atau 99.37%. *Output* dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan dalam mendukung proses belajar mengajar (terbangunnya 1 unit ruang kelas baru).

(22) **Rehabilitasi Ruang Kelas SD (DAK)**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.675.000.000 dan realisasi Rp.675.000.000 atau 100%

dengan realisasi fisik kegiatan 100%. Ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas ruang kelas yang memadai bagi siswa dalam proses belajar mengajar untuk SDN di Kabupaten Bintan. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya rehabilitasi ruang kelas beserta meubiler untuk Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bintan sebanyak 15 ruang kelas dengan rincian SDN 003 Teluk Bintan 3 ruang kelas, SDN 005 Gunung Kijang 2 ruang kelas, SDN 005 Toapaya 3 ruang kelas, SDN 001 Bintan Utara 3 ruang kelas, SDN 002 Seri Kuala Lobam 4 ruang kelas.

(23) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 1 Unit SD An-Nahl

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.198.800.000 dan Realisasi Keuangan Rp.7.800.000 atau 3.92%. Kegiatan ini direncanakan untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) An-Nahl yang berlokasi di Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan sudah melakukan survei lapangan dan cek lokasi, namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 kegiatan ini **tidak dilanjutkan** pelaksanaannya.

(24) Pengadaan Alat Pendidikan SDN Bintan (DAK)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.957.490.000 dan Realisasi Keuangan Rp.933.862.760 atau 97.53% dan realisasi fisik kegiatan 100%. Output kegiatan ini tersedianya fasilitas penunjang pendidikan, dan Output kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas penunjang pendidikan berupa koleksi perpustakaan, Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Alat Olahraga/Penjas. Fasilitas pendidikan ini diperuntukkan bagi sekolah se Kabupaten Bintan dengan rincian 9 sekolah yang mendapatkan koleksi perpustakaan, 9

sekolah yang mendapatkan alat teknologi informasi dan komunikasi dan 7 sekolah yang mendapatkan alat olahraga/penjas.

(25) Pembangunan RKB SDN 004 Toapaya (DAK Lanjutan)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekolah secara swakelola melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp.180.961.280 dan realisasi Rp.180.961.280 dan atau 100% dan realisasi fisik kegiatan 100%. Kegiatan ini merupakan pekerjaan lanjutan dari pembangunan ruang kelas baru pada tahun 2015 dari sumber Dana Alokasi Khusus yang terdiri 2 lantai namun hanya dapat diselesaikan 70% fisik pekerjaan pada akhir tahun 2015, sehingga dilanjutkan pada tahun 2016 dengan sisa pekerjaan 30%. Output Kegiatan ini adalah terpenuhinya Ruang Kelas Baru untuk siswa SD Negeri di Kabupaten Bintan sebanyak 2 unit.

(26) Konsultan Pengawas DAK

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.65.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.64.623.900 atau 99.42%. Pada dasarnya kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tahun 2015 dengan realisasi fisik 100%, namun disebabkan keterbatasan waktu dalam pengajuan pencairan dana maka mengalami tunda bayar sehingga baru bisa dilaksanakan pada tahun 2016. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengawasan pembangunan prasarana sekolah.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Masih kurangnya untuk beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten dan masih banyaknya ruang belajar yang rusak berat, sedang maupun ringan.

- b. Masih kurangnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memiliki ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA yang merupakan syarat utama Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan
- c. Ketersediaan meja dan kursi baik siswa maupun guru pada jenjang Sekolah Dasar masih sangat minim, begitu juga dengan kebutuhan MCK.
- d. Ketersediaan bahan bacaan perpustakaan dan buku referensi masih sangat minim.

2) Solusi

- Perlu penambahan ruang kelas baru, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pertemuan dan gudang.
- Perlu penambahan meja dan kursi siswa beserta guru, serta penambahan dan perbaikan MCK.
- Perlu adanya penambahan bahan bacaan perpustakaan untuk guru dan siswa begitu juga buku referensi untuk guru.

6) Program Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan/ Pendidikan Tinggi Penunjang Sektor - sektor Unggulan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,- atau 100%. *Outcome* program ini adalah meningkatnya mutu pendidikan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah **Penyediaan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi** kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.30.000.000 dan Realisasi Keuangan Rp.30.000.000 atau 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya putra-putri daerah Kabupaten Bintan yang, namun yang terealisasi hanya 2 orang yaitu untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Negeri Padang dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- per siswa.

7) **Program Kejar Paket**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,- atau 100%. Outcome program ini adalah terwujudnya pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan program pendidikan non formal. Dengan usaha memberikan layanan pendidikan baik untuk laki-laki maupun perempuan sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan bervariasi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah **Monitoring Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, Paket B dan Paket C**. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.40.000.000 dan realisasi Rp.40.000.000 atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk monitoring Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan. Output Kegiatan adalah terlaksananya pemantauan dan pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) di 5 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang melaksanakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, 11 Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Paket B dan 13 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lembaga Paket C.

a. **Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

- a. Kurangnya pengembangan Life Skill untuk warga belajar agar kualitas lulusan dari Paket A,B dan C setara dengan sekolah Formal.
- b. Tidak adanya tutor tetap yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan khususnya pada matapelajaran IPA dan Bahasa Inggris.
- c. Usaha peningkatan kemampuan tutor yang tidak merata.
- d. Belum tersedianya ruang belajar oleh sebagian besar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- e. Jumlah modul dan bahan ajar yang sangat minim.

2) Solusi

- a. Perlu diadakannya kegiatan Life Skill untuk mendukung kecakapan dan kemampuan individu agar lebih kompetitif.
- b. Melakukan perekrutan tenaga tutor tetap yang memiliki latar belakang yang sesuai dengan disiplin ilmu dan diberikan insentif oleh Pemerintah Daerah.
- c. Peningkatan kemampuan tutor melalui Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tutor Paket bagi yang belum pernah mengikuti.
- d. Penekanan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menerima bantuan dari dana APBN untuk menyediakan ruang belajar yang memadai.
- e. Penambahan modul dan bahan ajar sebagai bahan pengayaan materi dalam proses pembelajaran.

PU (Urusan Pendidikan)

Urusan Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan** dalam rangka pencapaian indikator kinerja daerah sesuai dengan

yang tertuang di dalam RPJMD 2016 – 2021. Untuk mencapai indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

8) **Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum** dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di sekolah. Total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.4.631.477.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.469.729.800 atau 96,5 %. Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kapasitas penyediaan dan pemberdayaan sekolah dan prasarana pendidikan lain.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pembangunan Pagar SD dan SMP**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.788.150.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.785.043.657,00 atau sebesar 99,606%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Pagar Sekolah dengan hasil Output Tersedianya Bangunan Pagar Sekolah untuk Keamanan Siswa.

Untuk mencapai Output tersebut dilaksanakan 4 (empat) paket pekerjaan sebagai berikut :

1.1 Pembangunan Pagar SD 005 Desa Penaga Kec. Teluk Bintang (126 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp.179.852.725,00

1.2 Pembangunan Pagar SDN 005 Cikolek Kec. Toapaya (107 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp. 152.790.151,00

1.3 Pembangunan Pagar SD 003 Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang (126 M') dengan nilai terkontrak sebesar Rp.179.892.442,00

1.4 Pembangunan Pagar SMP Kec. Tambelan (90 M') dengan nilai terkontrak sebesar Rp. 169.869.209,00.

(2) **Pembangunan Ruang Kelas Baru SD dan SMP**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.386.700.000,- dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.382.326.650,- atau sebesar 98,869 %. Adapun Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SD dengan *Output* Tersedianya Bangunan Ruang Kelas Baru SD.

Untuk mencapai Output tersebut dilaksanakan 1 (satu) paket pekerjaan sebagai berikut :

2.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 06 Gin Kecil Desa Numbing Kec. Bintang Pesisir (2 Lokal, 7 M x 6 M) dengan nilai terkontrak sebesar Rp. 323.350.707,00.

(3) **Pembangunan Paving Blok Halaman SD dan SMP**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp.1.286.000.000,00,- realisasi sebesar Rp.1.283.982.573,00,- atau sebesar 99,843 %. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Paving Blok Halaman Sekolah dengan hasil Output Tersedianya Bangunan Paving Blok Halaman Sekolah.

Untuk mencapai Output tersebut dilaksanakan 8(delapan) paket pekerjaan sebagai berikut :

3.1 Pembangunan semenisasi Jalan Masuk dan Paving Blok Halaman Upacara SDN 003 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintang Utara (343 M2) dengan nilai terkontrak sebesar Rp. 179.690.466,00

- 3.2 Pembangunan Paving Blok Halaman Sekolah SMPN 12 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara (458 M2) dengan nilai terkontrak sebesar Rp. 147.390.597,00,-
- 3.3 Pembangunan Paving Blok Halaman SDN. 006 Lome Kec. Toapaya (528 M2) dengan nilai terkontrak sebesar Rp. 172.835.575,00,-
- 3.4 Pembangunan Paving Blok Halaman SD 01 Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya (559 M2) dengan nilai terkontrak sebesar Rp. 179.835.525,00,-
- 3.5 Pembangunan Paving Block Halaman SD 009 Km. 18 Kel.Gunung Lengkuas Kec.Bintan Timur (359 M2) dengan nilai terkontrak sebesar Rp. 115.466.244,00,-
- 3.6 Pembangunan Paving Block Lapangan Upacara SMP 4 Kijang Kec.Bintan Timur (559 M2) dengan nilai terkontrak sebesar Rp. 179.725.336,00,-
- 3.7 Pembangunan Paving Block Halaman SMP 3 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (450 M2) dengan nilai terkontrak sebesar Rp. 144.663.375,00,-
- 3.8 Pembangunan Paving Block Halaman SD. 02 Jalan Wisata Bahari KM. 29 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang (124 M2) dengan nilai terkontrak sebesar Rp. 39.823.225,00,-

(4) Rehabilitasi Ruang Kelas

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.430.000.000,00,- realisasi sebesar Rp.429.118.916,00,- atau sebesar 99,754%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar dengan hasil Output Tersedianya Bangunan Ruang Kelas Belajar Yang Memadai.

Untuk mencapai Output tersebut dilaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

4.1 Rehab RKB SMP N 13 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintang Utara (1 Paket) dengan nilai terkontrak sebesar Rp. 383.900.491,00,-

(5) **Pembangunan Mushala SD/SMP/SMA,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.650.000,00,- dan realisasi sebesar Rp.200.130.294,00,- atau sebesar 99,741 %. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Ruang Mushala SMA/SMK dengan hasil Output Tersedianya Bangunan Mushala SMA/SMK. Untuk mencapai Output tersebut dilaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

5.1 Pembangunan Mushollah SMU Kec.Tambelan (1 Paket) dengan nilai terkontrak sebesar Rp.151.862.574,00,-

(6) **Pembangunan Batu Miring SD dan SMP**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.971.500.000,00,- dan realisasi sebesar Rp.832.290.359,00,- atau sebesar 85,671%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Batu Miring SD dan SMP dengan hasil Output Tersedianya Bangunan Batu Miring SD dan SMP. Untuk mencapai Output tersebut dilaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

6.1 Pembangunan Batu Miring SMPN 12 Bintang Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintang Utara (230 M x 2 M) dengan nilai terkontrak sebesar Rp.535.811.816,00,-

6.2 Pembangunan Batu Miring Penahan Tanah Belakang Sekolah SMPN 16 Bintang Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam (41 M x 4 M) dengan nilai terkontrak sebesar Rp.202.020.893,00,-

(7) **Pembangunan Sarana Air Bersih,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.410.000.000,00,- dan realisasi sebesar Rp.398.436.277,00,- atau sebesar 97,180%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Bersih Sekolah dengan hasil Output Tersedianya Bangunan Sarana Air Bersih Sekolah. Untuk mencapai Output tersebut dilaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

7.1 Pembangunan Sarana air bersih dan WC SMA 2 Toapaya Kec. Toapaya (1 Paket) dengan nilai terkontrak sebesar Rp. 293.822.488,00,-

7.2 Pembangunan Sarana air bersih SD. 02 Tambelan Kec. Tambelan (1 Paket) dengan nilai terkontrak sebesar Rp. 37.100.349,00,-

(8) **Pembangunan Pustaka SD/SMP,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.650.000,00,- dan realisasi sebesar Rp.150.381.614,00,- atau sebesar 99,822%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Ruang Perpustakaan dengan hasil Output Tersedianya Bangunan Ruang Perpustakaan. Untuk mencapai Output tersebut dilaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

8.1 Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 018 Desa Batu Licin Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintang Timur (1 Unit) dengan nilai terkontrak sebesar Rp. 127.890.004,00,-

b. **Permasalahan Dan Solusi**

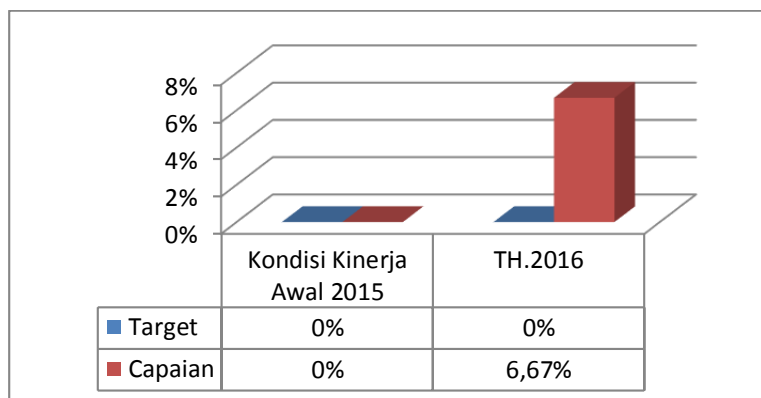
Pada pelaksanaan kegiatan yang ada dalam program ini secara umum tidak terdapat permasalahan yang serius, dari 8 (delapan) kegiatan yang ada pada program ini, hanya 1 (satu) kegiatan yaitu

kegiatan pembangunan pustaka SD/SMP yang mengalami keterlambatan pada saat penyelesaian pekerjaan. Dengan adanya permasalahan tersebut, pihak pelaksana telah menerima denda sesuai dengan jumlah hari keterlambatan. Sedangkan denda yang dibayarkan akan masuk ke kas daerah. Solusi tersebut diambil guna menyelesaikan permasalahan keterlambatan yang terjadi di lapangan.

4.1.2. URUSAN KESEHATAN

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keempat** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Kesehatan** adalah sebagai berikut :

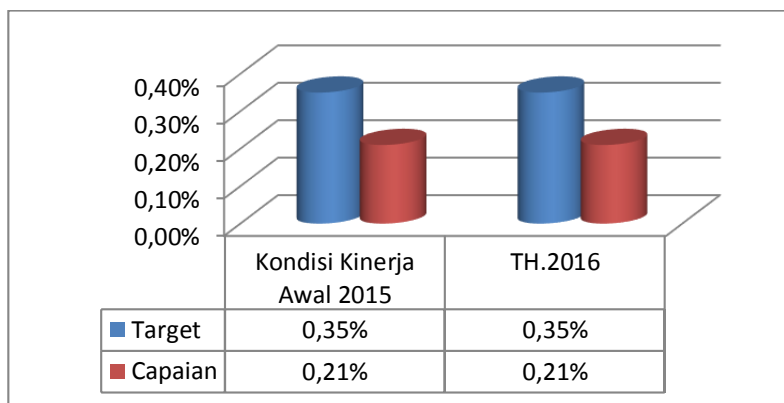
1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar



Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar merupakan indikator kinerja baru dalam Indikator Capaian Program Pembangunan. Untuk tahun 2016, Puskesmas yang telah menyelenggarakan sebanyak 1 puskesmas atau 6,67% yaitu Puskemas Kawal yang juga melaksanakan proses akreditasi puskesmas. Pelaksanaan kesehatan kerja dasar merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas. Puskesmas Kawal telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kerangka Acuan Kerja, pemetaan ruangan dan manajemen kesehatan kerja, dengan sasaran tenaga medis puskesmas, pengunjung dan masyarakat.

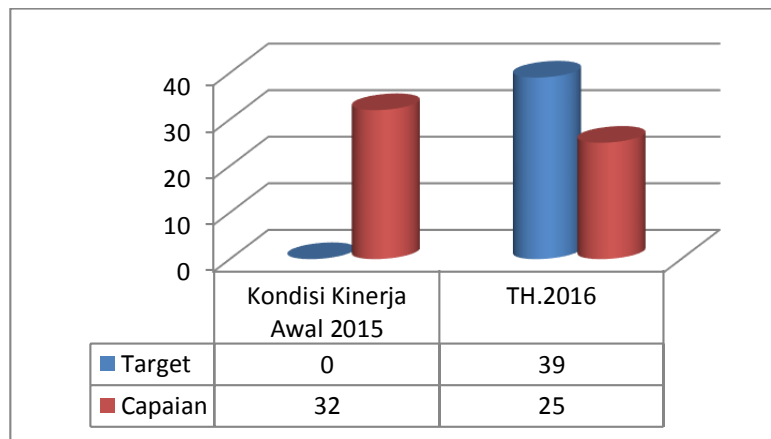
2. Persentase Balita Gizi Buruk



Sumber : Seksi Gizi Kesehatan Masyarakat Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Pengertian balita gizi buruk adalah balita sangat kurus dengan indeks berat badan menurut panjang badan (BB/TB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang merupakan padanan istilah **severely wasted** (sangat kurus) dengan ambang batas antropometri < -3 SD. Prevalensi kasus balita gizi buruk di Kabupaten Bintan tahun 2016 adalah **0,21 % (25 kasus)**. Angka ini lebih rendah dibanding angka gizi buruk provinsi dan nasional tahun 2013 (Risikesdas 2013) dimana angka gizi buruk provinsi Kepri 3.2 % (PSG 2015) dan angka gizi buruk nasional 5,3% (Risikesdas 2013),sedangkan target nasional adalah dibawah 1%. Kasus gizi buruk yang ditemukan adalah non klinis dan sebagian besar disebabkan kurangnya asupan gizi karena faktor pola asuh anak dan kemiskinan. Seluruh Kasus balita gizi buruk yang ditemukan setiap tahunnya dilaksanakan perawatan (100%) sesuai dengan kasus yang ditemukan, baik rawat inap maupun rawat jalan. Pemantauan dan perawatan kasus gizi buruk yang ditemukan tahun 2015 sebanyak 25 kasus telah sesuai dengan tatalaksana anak gizi buruk oleh Tim Asuhan Gizi Puskesmas khususnya puskesmas perawatan yang telah dilatih. Balita gizi buruk juga diberikan makanan tambahan pemulihan serta multi vitamin serta pembinaan gizi anak kepada keluarga balita.

3. Jumlah Kasus Kematian Bayi

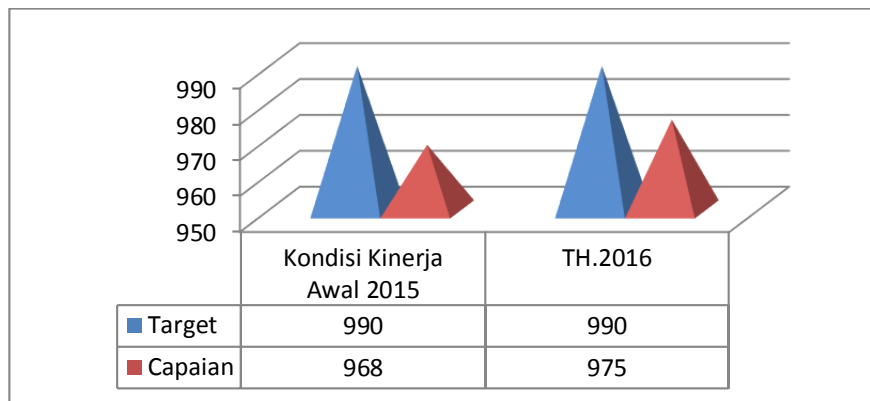


Sumber : Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Bintan tahun 2016 sebanyak 25 kasus. Dari 25 Kasus kematian Bayi di Kabupaten Bintan terjadi di UPTD Puskesmas Mantang 2 orang, UPTD Puskesmas Kelong 2 orang, Puskesmas Numbing 2, UPTD Puskesmas Sei Lekop 2 orang, UPTD Puskesmas Kawal 4 orang, UPTD Puskesmas Toapaya 2 orang, UPTD Puskesmas Sri Bintan 4 orang, UPTD Puskesmas Teluk Sebung 1 orang, UPTD Puskesmas Tanjung Uban 3 orang, UPTD Puskesmas Kuala Sempang 1 orang, UPTD Puskesmas Teluk Sasah 3 orang, UPTD Berakit 1 orang. Bila ditelusuri dari penyebab kematian Bayi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : BBLR 4 Kasus, Asfiksia 5 Kasus, Kelainan Kongenital 1 kasus dan lain-lain sebanyak 16 kasus.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi tersebut adalah :Pelatihan ICATT MTBS, melalui pelatihan ini, komplikasi yang terjadi pada bayi dapat terdeteksi sedini mungkin, sehingga tatalaksana kasus komplikasi dapat segera ditangani.

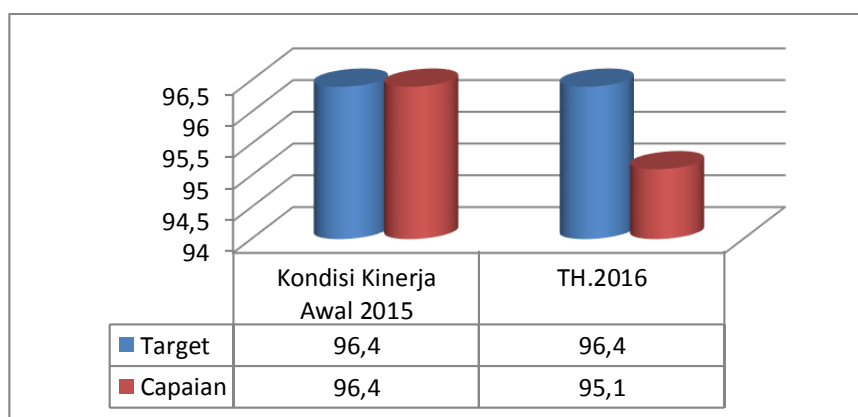
4. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)



Sumber : Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Angka kelangsungan Hidup bayi di Kabupaten Bintan tahun 2016 yaitu 975, bila dibanding tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 7 yaitu : 968 (2015). Penurunan angka kelangsungan hidup bayi sangat dipengaruhi oleh Angka Kematian Bayi (AKB), makin kecil persentase AKB semakin tinggi angka kelangsungan hidup bayi. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Angka Kelangsungan Hidup Bayi antara lain dengan meningkatkan kompetensi Bidan dalam memberikan Asuhan Kebidanan mulai dari masa kehamilan sampai masa persalinan melalui pelatihan dan meningkatkan pelayanan kesehatan bayi dan program lain yang mendukung.

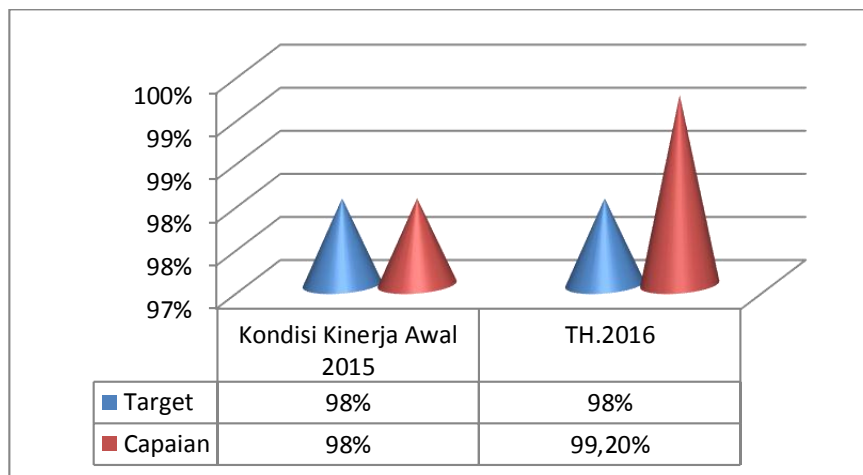
5. Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (PN)



Sumber : Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Persentase Pertolongan Persalinan oleh tenaga Kesehatan (Linakes) di Kabupaten Bintan tahun 2016 sebesar 95,1 persen dari 3.038 persalinan. Persentase Linakes tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4,4 persen dari tahun 2015, dan target RPJMD tahun 2016 sebesar 96,4 persen belum tercapai. Upaya untuk meningkatkan cakupan Pn terus dilakukan dengan memberikan hasil evaluasi dan feedback melalui pertemuan review program serta bimbingan teknis dan monitoring ke Puskesmas, khususnya pada daerah yang memiliki capaian rendah agar dapat meningkatkan cakupan. Dalam upaya peningkatan cakupan PN tersebut seksi KIA melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu : (1) Peningkatan cakupan Pn dan Kf melalui Kemitraan Bidan dan Dukun serta Rumah Tunggu Kelahiran, (2) Penguatan Manajemen dan Jejaring Rujukan di tingkat Kabupaten melalui Manual Rujukan yang ditandatangani oleh Bupati Bintan, (3) Pembentukan Tim AMP tingkat Kabupaten Bintan, (4) Peningkatan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor kesehatan untuk peningkatan cakupan Pn dan Kf di Fasilitas Kesehatan, (5) Peningkatan kerjasama dengan organisasi profesi, (6) Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi bagi bidan koordinator di Kecamatan dan Desa.

6. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF)

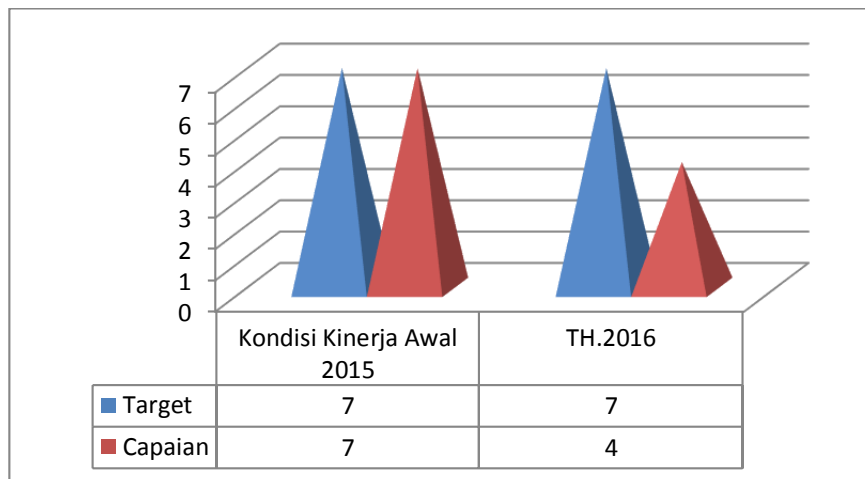


Sumber : Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bintan tahun 2016 sebesar 99,2 persen atau 3015 dari 3.038 persalinan. Dengan target

kinerja yang ditetapkan sebesar 98%, maka capaian untuk tahun 2016 telah diatas target tersebut. Hal ini merupakan tantangan untuk dapat bertahan bahkan lebih baik di tahun-tahun yang akan datang.

7. Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan



Sumber : Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Jumlah Kasus Kematian ibu tahun 2016 berjumlah 4 kasus, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan kasus. Angka tersebut lebih rendah dari target RPJMD 2016 yaitu 7 Kasus atau < 200 per 100.000 KH dan target MDG's 2016 yaitu 102 per 100.000 KH.

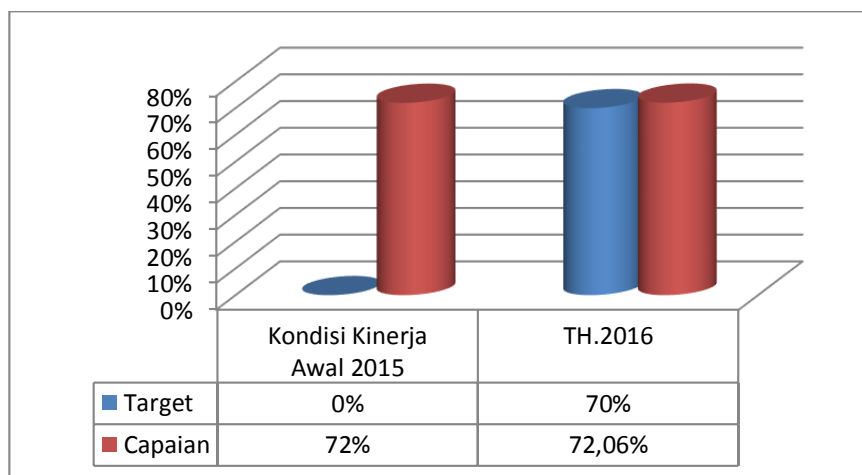
Dari 4 Kasus kematian Ibu di Kabupaten Bintan terjadi tersebar di beberapa wilayah kerja UPTD Puskesmas, antara lain; 1 orang di UPTD Puskesmas Kijang, 1 orang di UPTD Puskesmas Toapaya, 1 orang di UPTD Puskesmas Teluk Sasah dan 1 orang di UPTD Puskesmas Kuala Sempang.

Bila ditelusuri dari penyebab kematian ibu dapat digambarkan sebagai berikut : (a) Penyebab Langsung yaitu: Haemoragik Post Partum 3 kasus, (b) Penyebab tak langsung yaitu: Dengan decomp Post sectio cecaria, semua penanganan dan kematian terjadi di pelayanan kesehatan lanjutan yaitu : 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi di Tanjung Uban dan 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi di Tanjungpinang.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu tersebut adalah : (a) Melakukan audit maternal melalui pengkajian dan

menganalisa seluruh kasus kematian maternal oleh Tim AMP bekerjasama dengan dokter Spesialis Obstetri Gyneocology, (b) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam P4K, (c) Meningkatkan kompetensi bidan dalam memberikan Asuhan Kebidanan melalui pendidikan dan pelathan serta seminar, dan (d) Pemberian Makanan Tambahan ibu hamil berupa biscuit dan susu Ibu hamil.

8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

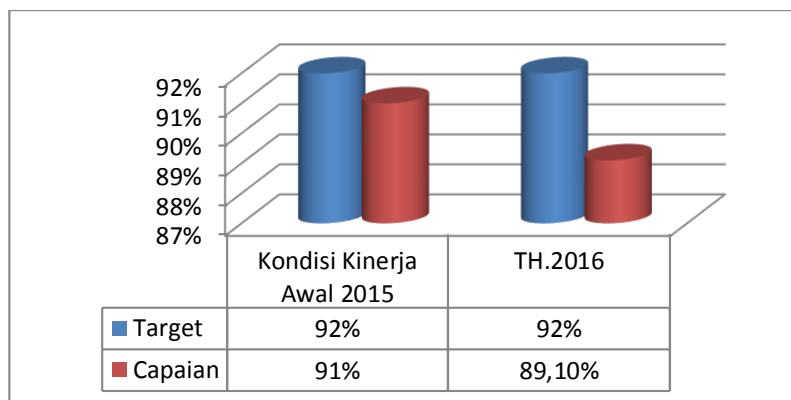


Sumber: Seksi Usila dan Remaja Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Tingginya usia harapan hidup mmenunjukkan semakin baiknya kualitas kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Sejalan dengan tingginya usia harapan hidup juga menyebabkan semakin tinggi pula jumlah populasi penduduk usia lanjut (usila). Maka keberadaan para lanjut usia diupayakan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan, baik di puskesmas maupun di posyandu/kelompok usia lanjut dalam meningkatkan kualitas hidup. Cakupan persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan usia lanjut mencapai 100%. Sedangkan cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut Kabupaten Bintan tahun 2016 sebesar 72,06% atau 6.619 jiwa, meningkat jika dibandingkan dengan cakupan pada tahun 2015 yang sebesar 70,03% atau 6.406 jiwa dan sudah mencapat target RPJMD 2016-2021 sebesar 72%. Oleh karena itu pelayanan kesehatan bagi warga usia lanjut masih perlu ditingkatkan lagi dengan

meningkatkan peran aktif posyandu lansia secara optimal dan adanya koordinasi dan peran masyarakat serta lintas sektor terkait dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan terhadap lansia.

9. Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini Yang Direspon



Sumber : Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

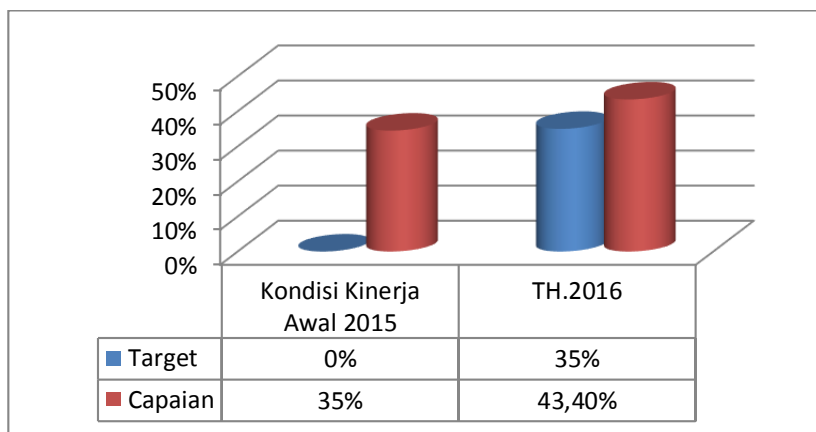
Persentase sinyal kewaspadaan dini yang di respon(ketepatan laporan) pada tahun 2016 (52 minggu) di Kabupaten Bintan adalah 89,1 % menurun bila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan ada beberapa puskesmas yang tidak mengirimkan sms laporan tidak tepat waktu, namun kelengkapan laporan di kabupaten bintan telah mencapai 97,5%. Sinyal kewaspadaan dini penyakit dapat dilihat menggunakan aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau EWARS (Early Warning Alert Respons System) berbasis website yang memanfaatkan teknologi dalam pencatatan, pelaporan dan pengolahan data berbasis elektronik, sistem ini memberikan peringatan dini kepada pengelola program (Kabupaten/Propinsi/ Pusat) untuk dilakukan verifikasi peringatan dini dan respon sebagai upaya mencegah/mengurangi jumlah kematian.

Pemanfaatan SKDR berbasis Web yaitu :

- Petugas Puskesmas mengirimkan SMS setiap hari Senin ke SMS Center di Pusat
- Petugas Puskesmas yang bertugas mengirimkan laporan mingguan harus mendaftarkan nomor telp HP yang akan digunakan ke SMS Center

- Kabupaten/Propinsi/Pusat melakukan verifikasi peringatan dini penyakit melalui aplikasi online
- Kabupaten/Propinsi/Pusat menggunakan format yang sudah standar dalam umpan balik
- Terdapat 23 penyakit yang dapat di deteksi dalam sistem SKDR yaitu diare akut, malaria konfirmasi, tersangka demam dengue, pneumonia, diare berdarah atau disentri,tersangka demam tifoid, sindrom jaundis akut, tersangka chikungunya, tersangka flu burung pada manusia, tersangka campak, tersangka difteri, tersangka pertussis, afp (lumpuh layuh mendadak), kasus gigitan hewan penular rabies, tersangka antraks, tersangka leptospirosis, tersangka kolera, klaster penyakit yang tidak lazim, tersangka meningitis/ensefalitis, tersangka tetanus neonatorum tersangka tetanus, ili (influenza like illness), tersangka HFMD.

10. Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)



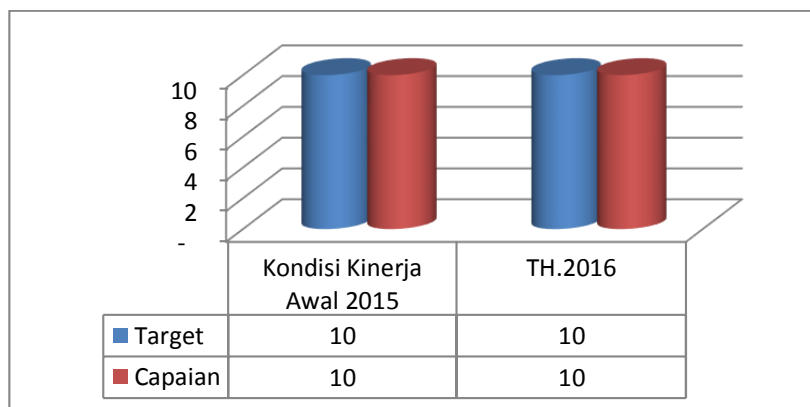
Sumber : Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) pada tahun 2016 meningkat menjadi 43,40% bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang lalu, hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara pemberian imunisasi dengan penurunan angka kasus penyakit yang dapat dicegah dengan Iunisasi. Pengembangan Imunisasi dalam rangka pencegahan

penularan terhadap Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yaitu, tuberculosis, difteri, pertusis, campak, polio, tetanus serta hepatitis B. Dengan upaya imunisasi pula, kita sudah dapat menekan penyakit polio dan sejak tahun 1995 tidak ditemukan lagi virus polio liar di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya global untuk membasmi polio di dunia dengan Program Eradikasi Polio (ERAPO). Penyakit lain yang sudah dapat ditekan sehingga perlu ditingkatkan programnya adalah tetanus maternal dan neonatal serta campak. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa program imunisasi kedalam penyelenggaraan yang bermutu dan efisien. Upaya tersebut didukung dengan kemajuan yang pesat dalam bidang penemuan vaksin baru (Rotavirus, Japanese encephalitis, Pneumococcus, Dengue fever dan lain-lain) serta penggabungan beberapa jenis vaksin sebagai vaksin kombinasi yaitu DPT-HB-Hib.

Dikabupaten Bintan kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu penyakit campak klinis berjumlah 30 kasus dan yang telah dikonfirmasi laboratorium berjumlah 18 kasus namun hasil pemeriksaan belum diterima dari Litbangkes Kementerian Kesehatan RI.

11. Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1.000 penduduk



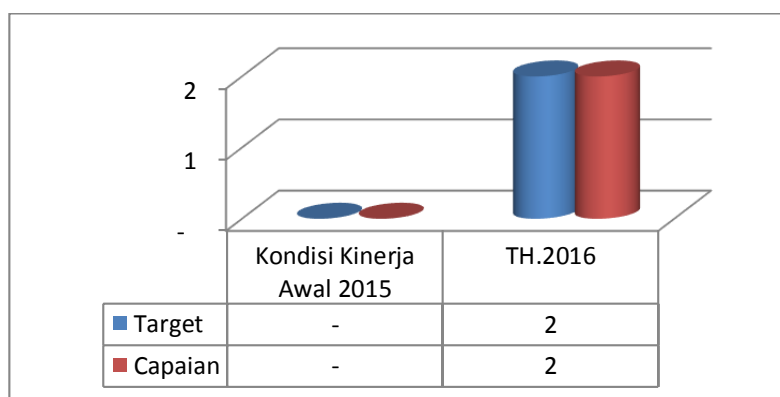
Sumber : Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Grafik di atas menunjukkan bahwa seluruh Kecamatan di Kabupaten Bintan yang berjumlah 10 Kecamatan, telah berada pada angka API (Annual Parasite Inciden) < 1 Per 1000 Penduduk. Dengan demikian menunjukkan bahwa angka API

Kabupaten Bintan sudah di bawah target Nasional (API <1‰). Beberapa upaya pengendalian telah dilakukan antara lain: 1) Meningkatkan akses layanan yang bermutu, 2) Penemuan dini dan pengobatan sesuai standar, 3) Pencegahan dan pengendalian vektor dan risiko secara terpadu, 4) Penguatan kemitraan, 5) Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, 6) Pemanfaatan informasi strategis untuk pengembangan program, 7) Penguatan promosi, advokasi dan mobilisasi sosial, 8) Mendorong komitmen pemerintah daerah dan Pusat.

12. Jumlah Kecamatan endemis Filariasis berhasil menurunkan angka mikrofiliria menjadi < 1%

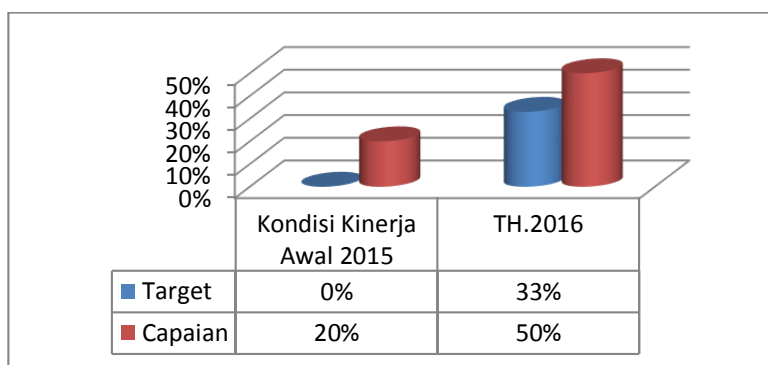
Berdasarkan Grafik diatas menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan SDJ (Survei Darah Jari) pada tahun 2016 di 2 (dua) Kecamatan endemis Filariasis di Kabupaten Bintan, yaitu Kec. Teluk Bintan dan Kec. Sri Kuala Lobam telah menunjukkan angka microfilaria < 1%, dan tidak ditemukan lagi penderita baru Filariasis.



Sumber : Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan POMP Filariasis, yang merupakan tahun ke IV pelaksanaan Pemberian Obat Masal Pencegahan Filariasis di Kabupaten Bintan dengan capaian sebesar 76,62% dari jumlah penduduk atau 76.625 jiwa yang mendapatkan obat filariasis. Cakupan pelaksanaan kegiatan POMP Filariasis di Kabupaten Bintan pada tahun 2016 telah memenuhi target standar pelaksanaan POMP Filariasis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebesar 65% dari Jumlah Penduduk.

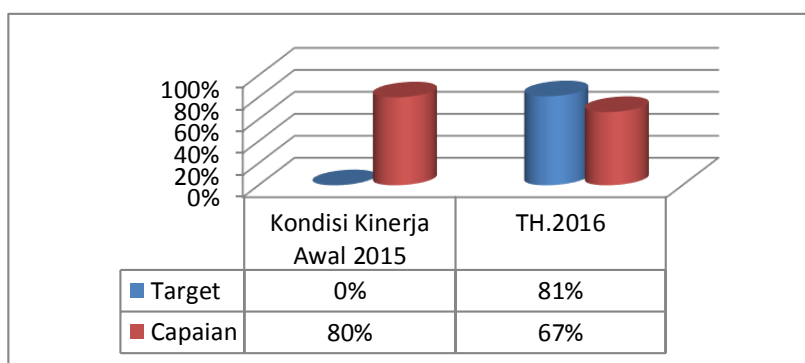
13. Persentase Kecamatan dengan IR DBD <49 per 100.000 penduduk.



Sumber : Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Berdasarkan grafik diatas, persentase Kecamatan di Kabupaten Bintan yang memiliki IR (Inciden Rate) DBD < 49 per 100.000 penduduk yaitu sebesar 50% atau 5 Kecamatan dari 10 Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Bintan. Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit DBD telah dilakukan beberapa upaya pengendalian penyakit DBD, dimulai dengan Penyelidikan Epidemiologi (PE) setelah adanya laporan kasus dari Rumah Sakit/Puskesmas. Kemudian dilakukan pengasapan (Fogging Focus) dan abatesasi massal dengan radius ± 100 meter dari tempat tinggal kasus. Selain itu lebih mengoptimalkan kegiatan PSN dengan 3 M Plus secara serentak serta menjaga kebersihan lingkungan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

14. Persentase Kecamatan dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (succes rate) minimal 85%

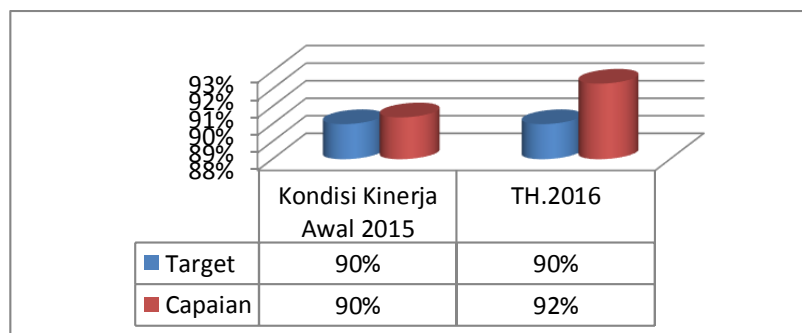


Sumber : Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa dari 10 Kecamatan di Kabupaten Bintan terdapat 9 Kecamatan yang sarana pelayanan kesehatan diwilayah Kecamatan tersebut telah melaksanakan Pengobatan TB paru BTA

positif. Dari 9 Kecamatan yang melaksanakan pengobatan TB Paru BTA positif terdapat 6 Kecamatan dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA positif (success rate) minimal 85%, yaitu sebesar 67%. Sukses Rate di Kabupaten Bintan Tahun 2015 yaitu 94%, dimana dari 100 kasus pasien BTA Positif Baru yang ditemukan 94 orang diantaranya dinyatakan sembuh dan pengobatan lengkap. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pasien yang meninggal (2 orang), gagal pengobatan (1 orang) dan pindah pengobatan (1 orang). Seluruh kasus TB Paru yang ditemukan 100% sudah dilakukan pengobatan sesuai dengan rekomendasi WHO yaitu menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan setiap penderita diawasi/dipantau oleh seorang Pengawas Menelan Obat (PMO). Adapun sebaran Indikator Sukses Rate Kasus dari 100 kasus TB Paru BTA Positif yang ditemukan dinyatakan sembuh sebanyak 94 orang yaitu UPTD Puskesmas Kijang 13 orang, UPTD Puskesmas Kelong 3 orang, UPTD Puskesmas Toapaya 9 orang, UPTD Puskesmas Kawal 4 orang, UPTD Puskesmas Teluk Bintan 2 orang, UPTD Teluk Sebung 4 orang, UPTD Tanjung Uban 5 orang, UPTD Teluk Sasah 7 orang, UPTD Tambelan 3 orang, UPTD Sri Bintan 1 orang, UPTD Berakit 1 orang, UPTD Kuala Sempang 2 orang, UPTD Sei Lekop 2 orang, RSUD Tg. Uban Provinsi Kepri 6 orang, dan RSUD Bintan 28 orang.

15. Persentase angka kasus HIV yang diobati



Sumber : Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

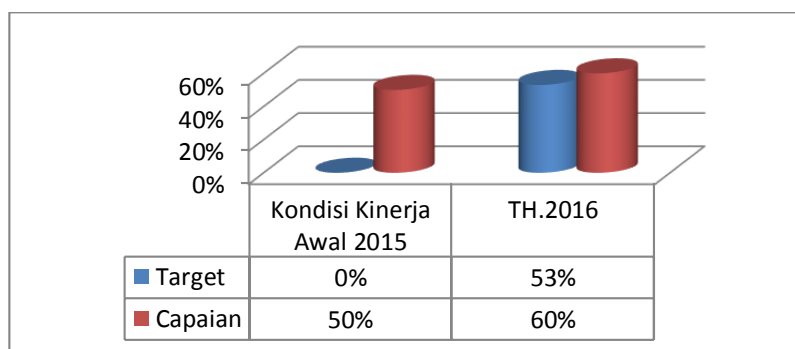
Berdasarkan grafik diatas jumlah penemuan kasus HIV dikabupaten Bintan pada tahun 2016 sama dengan jumlah penemuan kasus pada tahun 2015 yang lalu yaitu sebanyak 52 kasus. Namun jumlah kasus yang diobati mengalami peningkatan dimana jika pada tahun 2015 dari 52 kasus yang ditemukan hanya 47

orang yang diobati, sedangkan pada tahun 2016 dari 52 kasus yang ditemukan, 48 yang diantaranya telah diobati.

Hasil temuan penderita HIV/AIDS di Kabupaten Bintan selama tahun 2016 yang tercatat di Klinik CST Edelwais RSUD Tg. Uban dan Klinik CST Kemuning RSUD Tanjungpinang di temukan 25 kasus HIV, angka penemuan kasus ini meningkat jika dibandingkan dengan penemuan kasus HIV tahun 2015 yang berjumlah 24 kasus HIV baru. Adapun sebaran kasus HIV tahun 2016 di Kabupaten Bintan berdasarkan tingkat usia yaitu usia 5-14 tahun (1 orang), 20-24 tahun (9 orang), 25-49 tahun (15 orang).

Sedangkan hasil temuan penderita AIDS sebanyak 27 kasus . Angka penemuan kasus ini menurun jika dibandingkan dengan penemuan kasus HIV tahun 2015 yang berjumlah 28 kasus AIDS baru dengan sebaran kasus berdasarkan tingkat usia yaitu : usia 20-24 tahun (7 orang), 25-49 tahun (18 orang), > 50 tahun (1 orang). Sedangkan jumlah kematian yang di akibatkan oleh AIDS selama tahun 2016 adalah sebanyak 2 kasus. Seluruh kasus yang ditemukan telah dilakukan Voluntary Counseling dan Testing (VCT), dan setiap OHDA didampingi oleh Manejer Kasus (MK) sehingga memperoleh Care Supporting and Treatment (CST). Selain itu juga dalam penanganan ODHA dan OHIDA telah dilakukan kerjasama lintas program dan sektor termasuk LSM, KPA Bintan.

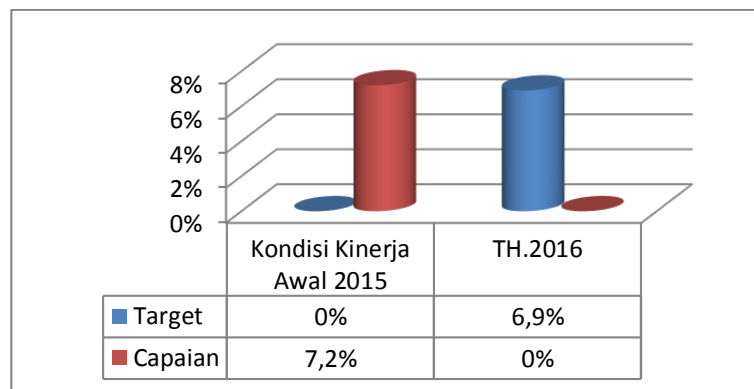
16. Persentase Kecamatan yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui program MTBS



Sumber : Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Berdasarkan grafik diatas, persentase Kecamatan di Kabupaten Bintan yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui program MTBS yaitu sebesar 60% atau 6 Kecamatan dari 10 Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Bintan. Selama tahun 2016 jumlah penemuan kasus pneumoni balita sebanyak 32 orang angka ini masih jauh dibawah target kabupaten yaitu sebanyak 1511 orang, hanya sebagian puskesmas yang melaporkan adanya penemuan kasus seperti puskesmas Tanjung Uban 6 kasus, Puskesmas Toapaya 1 kasus, Puskesmas Teluk Bintan 5 kasus, Puskesmas Kawal 3 kasus, Puskesmas Kelong 1 kasus, Puskesmas Teluk Sasah 1 kasus, puskesmas Sei.Lekop 14 kasus, dan RSUD 1 Kasus yg berasal dari Kijang sedangkan puskesmas lainnya belum melaporkan adanya kasus pneumoni pada balita. Selama tahun 2016 tidak ada laporan kematian balita yang disebabkan oleh pneumonia.

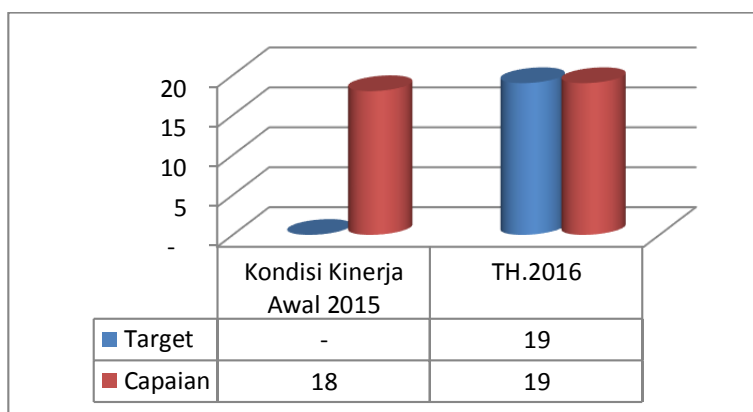
17. Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun



Sumber : Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Pada grafik Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun, pada tahun 2016 menunjukkan nilai 0% hal tersebut disebabkan pada saat laporan ini dibuat data menyangkut hasil survei yang dilaksanakan oleh seksi yang bersangkutan belum dapat diterima, dikarenakan pengolahan data hasil survei merokok pada usia ≤ 18 tahun yang dilakukan pada setiap Puskesmas di wilayah Kabupaten Bintan belum selesai.

18. Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM



Sumber : Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

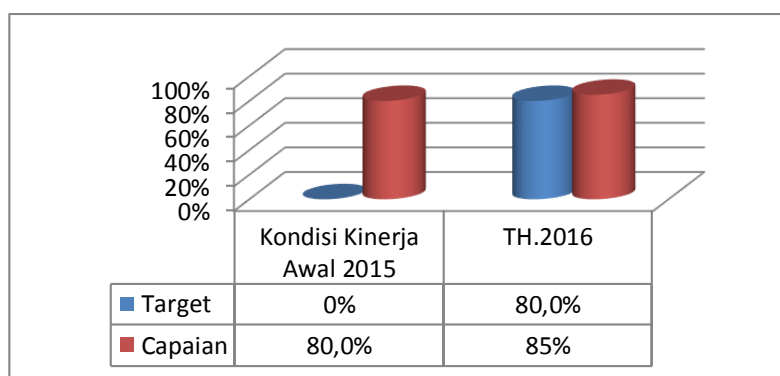
Dari grafik diatas terlihat jumlah Desa/ Kelurahan yang telah melaksanakan STBM di wilayah kabupaten Bintan sebanyak 19 Desa/ Kelurahan, hal tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD 2016-2021. Sesuai dengan Permenkes nomor 03 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Indikator bahwa suatu Desa/Kelurahan dikatakan telah melaksanakan STBM adalah Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat (termasuk di sekolah), Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar, ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat, ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat & ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total, di Kabupaten Bintan pada tahun 2016 sebanyak 19 desa/ kelurahan yang telah menyatakan sebagai Desa/ Kelurahan ODF (Open Defecation Free)/ Bebas Buang Air Besar Sembarangan telah dilaksanakan proses verifikasi Desa/ Kel. ODF yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan atas laporan yang telah disampaikan dan melakukan kunjungan lapangan oleh tim Verifikasi Desa/ Kelurahan ODF, hasil kunjungan lapangan oleh tim verifikasi tersebut tetuang pada Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan yang telah di unggah pada website STBM Nasional yaitu stbm-indonesia.org, pada website tersebut dapat dilihat cakupan kepemilikan jamban

sehat dan Desa/ Kelurahan yang telah ODF. Teknik pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi STBM dilakukan dengan cara :

- 1) Sanitarian Puskesmas mengirimkan data ke layanan pesan singkat (sms) server di Kementerian Kesehatan, SMS yang masuk di server akan diverifikasi oleh sistem berdasarkan riwayat data sebelumnya, apabila sistem menemukan kesalahan/meragukan, sistem akan mengirim SMS kepada sanitarian untuk klarifikasi, namun sebaliknya data akan dikirim ke website server.
- 2) Petugas pemantauan di kabupaten akan masuk ke menu (control panel) kabupaten melalui situs STBM, dan masuk pada menu isi data. Sistem akan mengenali data desa/kelurahan yang terhubung dengan database pengirim berdasarkan wilayah kerjanya sebagai penanggung jawab pemantauan.
- 3) Data dari dua cara perekaman sistem pemantauan akan disimpan dalam database server melalui situs dan melalui SMS akan dilakukan sinkronisasi dalam dua database utama yaitu data dasar dan data kemajuan.

Di samping pemantauan dan evaluasi sebagaimana diuraikan di atas dalam pelaksanaan STBM dilakukan pula verifikasi terhadap desa/kelurahan STBM untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam menyelenggarakan STBM.

19. Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

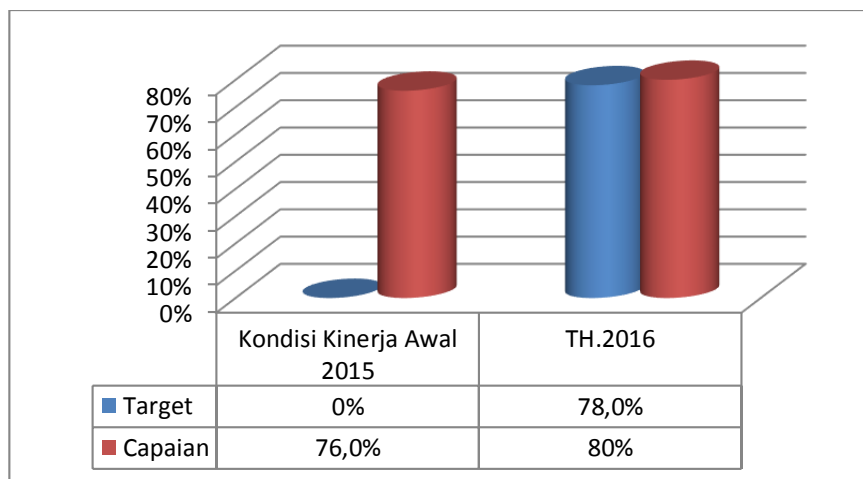


Sumber : Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Persentase tempat-tempat umum sehat Kabupaten Bintan tahun 2016 dari 619 TTU yang di bina terdapat 526 TTU yang sehat atau sekitar 85%, hal tersebut telah melampaui capaian target yang telah ditetapkan pada RPJMD 2016-2021

yaitu sebesar 80%. Peningkatan persentase TTU Sehat karena sebagian besar bangunan/TTU yang ada merupakan milik Pemerintah Daerah yang sudah memiliki sarana sanitasi dasar yang memadai dan memenuhi syarat, seperti: ketersediaan air bersih, jamban sehat dan tempat sampah. Hal ini menunjukkan bahwa target TTU Sehat sesuai RPJMD Kabupaten Bintan sebesar 82% sudah tercapai. Pada tahun 2016 di Kabupaten Bintan terdapat 619 TTU yang dibina, terdiri dari; 58 unit sarana kesehatan, 124 unit sarana pendidikan, 295 unit sarana ibadah, 98 unit perkantoran dan 44 unit hotel/resort. Pada umumnya permasalahan yang terdapat sarana dan fasilitas umum, yaitu; penyediaan air bersih, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL). Alternatif penyelesaiannya adalah peningkatan sarana dan fasilitas laboratorium kesehatan, seperti; penambahan alat spectrophotometer untuk pemeriksaan kualitas air minum yang lengkap yaitu pemeriksaan fisik, kimia, bakteriologi dan radioaktif serta bangunan khusus untuk laboratorium kesehatan lingkungan.

20. Persentase penduduk yang melaksanakan STOP BABS

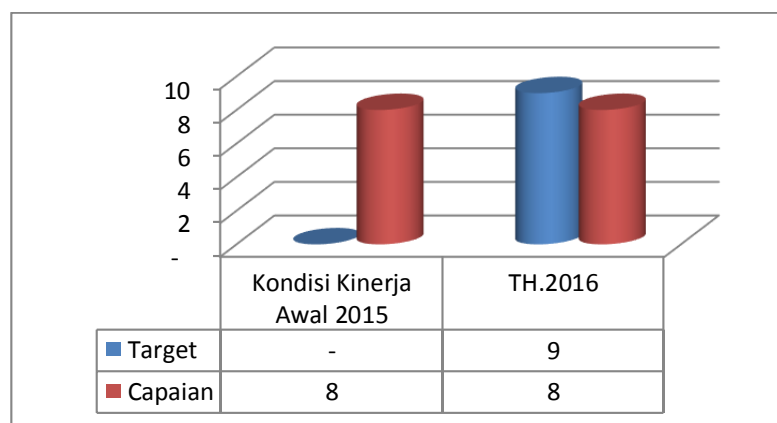


Sumber : Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Persentase penduduk yang melaksanakan Stop BABS/ menggunakan jamban sehat di Kabupaten Bintan mengalami peningkatan dari tahun 2015 cakupan pengguna jamban sehat sebesar 108. 231 jiwa (76,5%) dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 113.182 jiwa (80%), sedangkan 2.211 rumah tangga belum

menggunakan jamban sehat, hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat Bintan tinggal di daerah pesisir pantai ataupun di perkebunan. Tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan jamban sehat semakin tinggi, hal ini sejalan dengan dicanangkannya Program STBM di Kabupaten Bintan melalui Instruksi Bupati Bintan Nomor 2 tahun 2011 tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), untuk pelaksanaannya masih memprioritaskan pada Pilar 1 yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan dan telah dilaksanakannya kegiatan pemucuan terhadap kelompok masyarakat/ komunitas oleh petugas dari Dinas Kesehatan beserta petugas sanitasi puskesmas di masing-masing wilayah kerjanya untuk merubah perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan menjadi buang air besar di jamban sehat, serta ditunjang dengan adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan peningkatan kualitas jamban bagi masyarakat yang telah berubah perilaku dan bersedia membangun jamban sederhana untuk ditingkatkan menjadi jamban sehat. Pada tahun 2014 telah terbangun 2.395 unit jamban hasil swadaya masyarakat.

21. Jumlah Desa/ Kelurahan Yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat

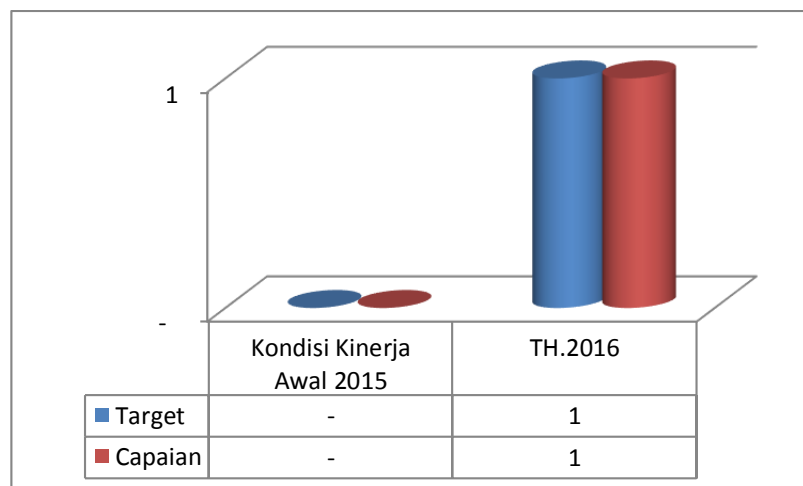


Sumber : Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa pencapaian target Jumlah Desa/ Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat pada tahun 2016 belum tercapai, Desa/ Kelurahan di Kab. Bintan yang telah menyelenggarakan tatanan kawasan sehat baru 8 Desa/ kelurahan. Kawasan sehat merupakan

kondisi yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah, pada tahun 2015 di Kabupaten Bintan telah melaksanakan 2 tatanan dalam mendukung kawasan sehat yaitu Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum dan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten sehat di 6 (enam) desa/ Kelurahan di 6 wilayah Kecamatan dan mendapatkan penghargaan Swastisaba pada tingkat Padapa oleh Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, pada tahun 2016 telah diupayakan untuk melaksanakan tambahan 2 tatanan yaitu Kawasan Pertambangan Sehat dan Kawasan Pariwisata Sehat di 8 (delapan) desa/ kelurahan untuk menuju penghargaan Swastisaba pada tingkat Wiwerda pada tahun 2017 yang minimal harus mencakup 4 tatanan dengan cakupan per kecamatan 61-70% dengan indikator pokok : Wajib belajar 9 tahun, Angka melek huruf, pendapatan perkapita domestic, Angka kematian bayi per 1000 kh, Angka kematian balita per 1000 kh, Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kh, Adanya Data Potensi Daerah, & Program jaminan sosial bagi masyarakat miskin

22. Jumlah Kecamatan yang memiliki 1 (satu) Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

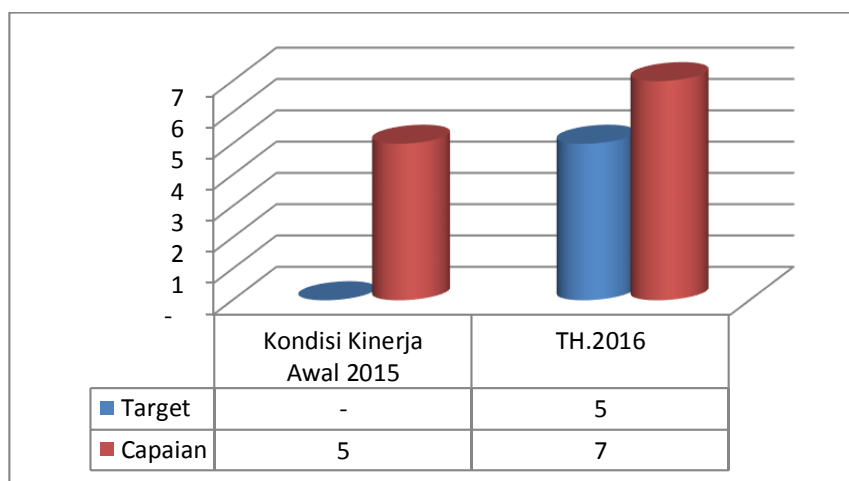


Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan, dimana 1 kecamatan yang memiliki puskesmas terakreditasi yaitu UPTD Puskesmas Kawal yang terletak di Kecamatan Gunung Kijang. Target pada tahun 2016 adalah 1 puskesmas yang terakreditasi sehingga dapat dikatakan capaian kegiatan telah tercapai 100%.

Pelaksanaan survey akreditasi di Puskesmas Kawal yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2016, oleh Komite standarisasi dan akreditasi Puskesmas Kementerian Kesehatan RI berlangsung lancar. Direncanakan pada tahun 2017 akan dilaksanakan kembali survei atau penilaian akreditasi Puskesmas di 3 Puskesmas di Kabupaten Bintan, yaitu Puskesmas Tg.Uban, Puskesmas Teluk Sasah, dan Puskesmas Teluk Sebong.

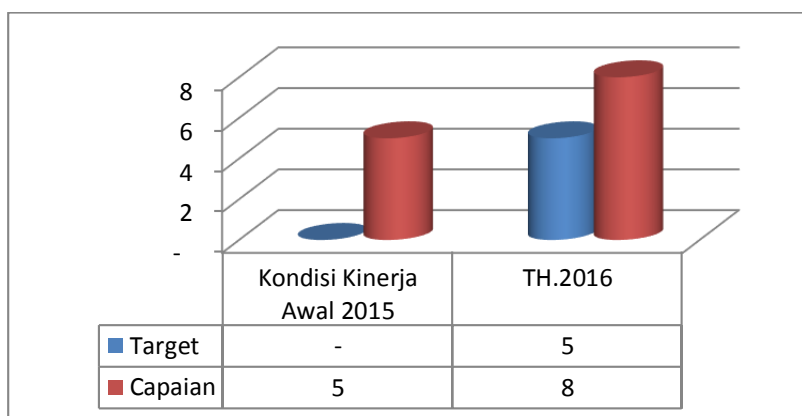
23. Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan



Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa belum semua Puskesmas di wilayah Kabupaten Bintan yang memenuhi standar yaitu memiliki 5 jenis ketenagaan sesuai dengan target RPJMD 2016-2021 Kab. Bintan dan Renstra Kemenkes RI. Di Kabupaten Bintan baru terdapat **7 Puskesmas** saja yang telah memiliki 5 jenis tenaga yang wajib ada di puskesmas, 5 jenis tenaga kesehatan yang wajib ada yaitu : (1) Tenaga Kesehatan Masyarakat, (2) Tenaga Kesehatan Lingkungan, (3) Tenaga Kefarmasian, (4) Tenaga Gizi, (5) Tenaga Analis Laboratorium.

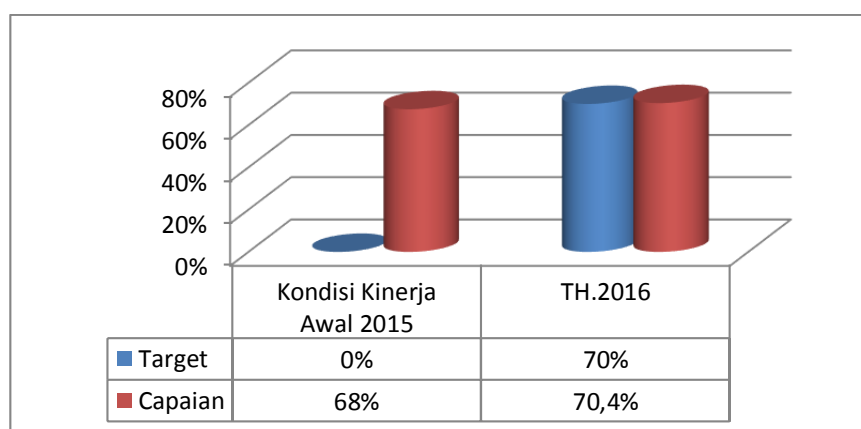
24. Jumlah Puskesmas yang memiliki jaringan SIK Online



Sumber : Subbag Penyusunan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Berdasarkan grafik diatas terdapat 8 Puskesmas yang telah memiliki jaringan SIK online dari 15 Puskemas yang ada di Kabupaten Bintan. Dengan angka diatas bila dibandingkan dengan target capaian indikator kinerja di tahun 2016 yaitu 5 Puskesmas, maka capaian indikator Jumlah Puskesmas yang memiliki jaringan SIK Online telah tercapai 100%. Permasalahan yang masih menghambat pelaksanaan kegiatan SIK di Puskesmas yaitu, masih terbatasnya kemampuan aplikasi program SIK yang telah ada untuk memenuhi kebutuhan informasi data kesehatan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu masih dibutuhkan pengembangan sistem aplikasi SIK yang ada agar dapat menjawab semua kebutuhan menyangkut informasi kesehatan.

25. Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas

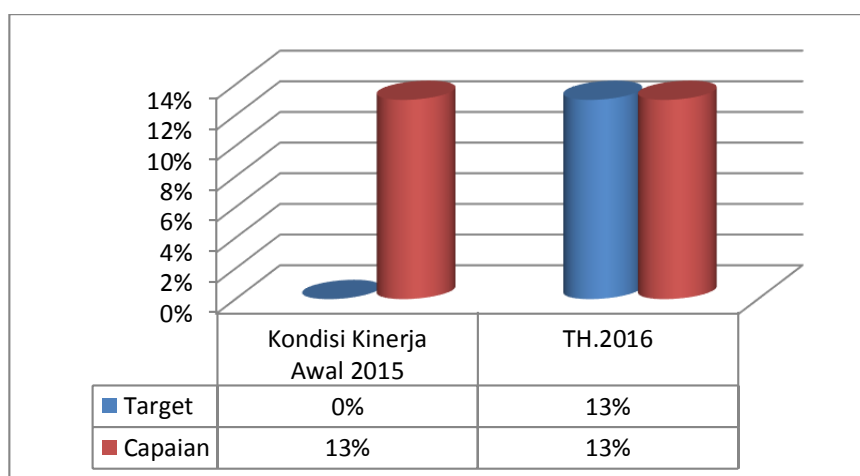


Sumber : Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Pencapaian indikator kinerja Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas tahun 2016 adalah sebesar 70.04% dan telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2016 (sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2016-2021) yaitu 70%.

Definisi operasional dari indikator kinerja Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas adalah tersedianya obat dan vaksin indicator di Puskesmas untuk program pelayanan kesehatan dasar. Pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator. Obat-obat yang dipilih sebagai obat indicator merupakan obat pendukung program kesehatan ibu, kesehatan anak, penanggulangan penyakit serta obat pelayanan kesehatan dasar yang banyak digunakan dan terdapat di dalam Formularium Nasional.

26. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar



Sumber : Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Pencapaian indikator kinerja Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar adalah 13% atau tercapai 100% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2016-2021. Definisi operasional indikator kinerja Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar adalah puskesmas yang melaksanakan pemberian informasi obat dan konseling yang terdokumentasi dan

dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Penetapan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar adalah puskesmas yang telah melaksanakan pemberian informasi obat dan konseling yang terdokumentasi dan dilakukan oleh tenaga kefarmasian terhadap jumlah total puskesmas pada tahun berjalan. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Adanya standar pelayanan kefarmasian di puskesmas bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian;
- b. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan
- c. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).

Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas meliputi :

- a. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan pelaporan dan pengarsipan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan)
- b. Pelayanan farmasi klinik (pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat, konseling, visite, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat serta evaluasi penggunaan obat)

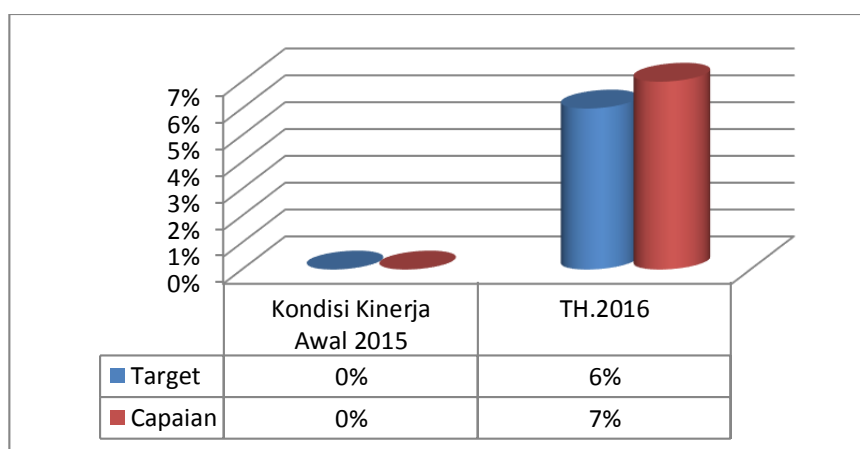
Tercapainya target indikator kinerja dimungkinkan karena base line yang digunakan adalah keadaan riil dari tenaga kefarmasian yang ada dibandingkan dengan pelayanan kefarmasian yang harus dipenuhi sesuai dengan rumus perhitungan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI yaitu hanya 2 puskesmas dengan tenaga kefarmasian (Apoteker) yang melaksanakan PIO dan konseling yang terdokumentasi dibandingkan dengan 15 puskesmas yang ada di Kabupaten

Bintan. Tapi hal ini akan menjadi kendala dalam pencapaian indikator kinerja tahun 2017 bila tenaga kefarmasian yang berada di puskesmas tidak mendapat penambahan.

27. Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima bantuan Iuran (PBI) melalui JKN

Pada tahun 2016 sebanyak 4.420 Jiwa yang sebelumnya ditargetkan pada tahun 2016 ini sebanyak 5.000 jiwa menjadi peserta PBI.

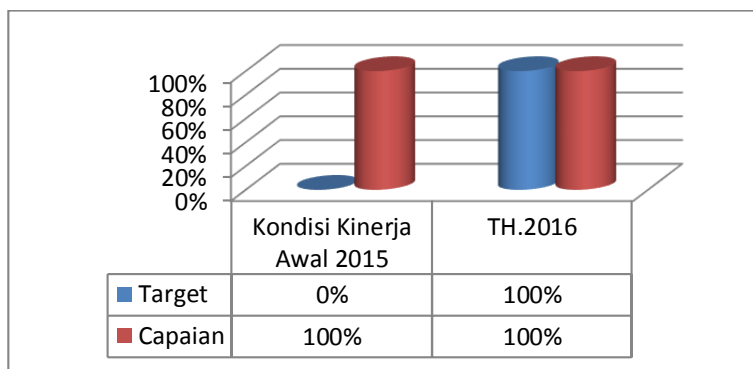
28. Persentase Desa Memanfaatkan Dana Desa 10% untuk UKBM



Sumber: Seksi UKBM

Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM telah mencapai target yaitu 7% dikarenakan optimalnya sosialisasi terkait alokasi Dana Desa ke masyarakat dan lintas sektor terkait khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB selaku pembuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Aparatur Desa.

29. Persentase Desa Siaga Aktif



Sumber: Seksi UKBM

Berdasarkan grafik diatas target yang harus dicapai pada tahun 2016 adalah 100% desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bintan telah menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Untuk Kabupaten Bintan pada tahun 2016, 100% dari desa dan kelurahan yang ada telah menjadi desa siaga aktif sejak mulai dicanangkan karena telah terpenuhinya seluruh kriteria untuk menjadi desa dan kelurahan siaga aktif.

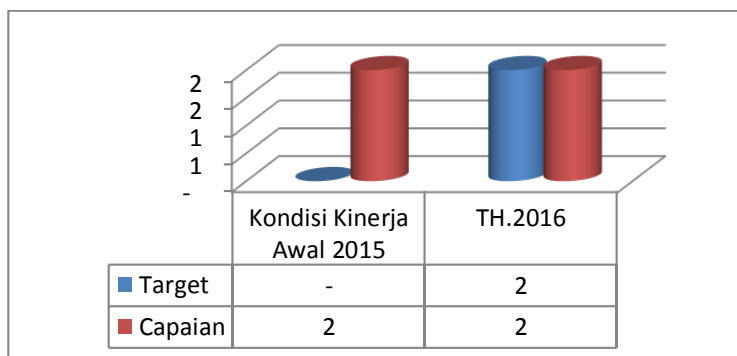
Desa dan kelurahan Siaga Aktif merupakan pengembangan dari Desa Siaga, yaitu Desa atau Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), atau sarana kesehatan lainnya.
- b. Penduduknya mengembangkan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaduratan kesehatan dan penanggulangan bencana,

serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota.

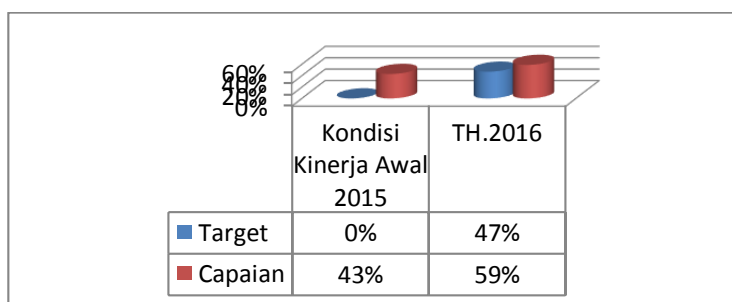
30. Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSRnya untuk Program Kesehatan 2 unit Usaha;



Sumber: Seksi Promosi Kesehatan

Jumlah Dunia Usaha yang memanfaatkan CSR untuk Program Kesehatan. mulai dilaksanakan pada tahun 2016. Jumlah dunia usaha yang menyalurkan dana CSR untuk program kesehatan telah mencapai target yaitu 2 perusahaan dikarenakan optimalnya sosialisasi Dinas Kesehatan ke pihak swasta pemberi bantuan antara lain PT. BRC dan PT. Pertamina. PT BRC memberi bantuan fogger sebanyak 20 unit ke Puskesmas Teluk Sebong pada awal tahun 2016, sedangkan PT Pertamina memberikan bantuan alat kebersihan kepada Pokjanal Desa Siaga Kelurahan Tanjung Uban Utara.

31. Persentase Desa Yang Melaksanakan PHBS



Sumber: Seksi Promosi Kesehatan

Persentase Desa/Kelurahan rumah tangga yang ber-PHBS tahun 2016 sebanyak 30 Desa/Kelurahan atau sebesar 59%. Persentase ini naik dari tahun 2015, walaupun telah memenuhi target yang ditetapkan pada RPJMD 2016-2021, hasil survei rumah tangga ber PHBS tahun 2016 masih belum mampu memenuhi nilai yang diharapkan pada 10 indikator PHBS, masih terdapat 2 indikator PHBS yang nilainya masih rendah yaitu Perilaku Merokok di dalam rumah dan Pemberian ASI eksklusif. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan indikator dan peningkatan pemahaman tentang PHBS oleh koordinator dan petugas yang memantau dilapangan serta peningkatan jumlah rumah tangga yang dipantau. Hasil survey PHBS dari 32705 RT, 11.330 diantaranya merokok di dalam rumah (34,5%), tidak memberi ASI eksklusif (56,9%) dari 4116 RT.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

DINAS KESEHATAN

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan** melalui 43 (empatpuluh tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.505.722.762,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.418.546.237,- atau 94,21%. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Operasional UPTD Puskesmas Kijang dan Jaringannya dilaksanakan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.154.369.500,- realisasi sebesar Rp.128.952.771,- atau 83,54%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD

Puskesmas Kijang dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, surat kabar, Bahan Bakar Minyak (BBM), alat tulis kantor.

(2) **Operasional UPTD Puskesmas Kelong dan Jaringannya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.181.369.500,- realisasi sebesar Rp.180.942.375,- atau 99,76%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Kelong dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, cetak, penggandaan.

(3) **Kegiatan Operasional UPTD Puskesmas Mantang dan Jaringannya**

dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.188.781.000,- realisasi sebesar Rp.187.278.625,- atau 99.2%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Mantang dan Jaringannya berupa : pembayaran honorarium panitia pelaksanaan kegiatan, listrik, telepon/internet, air, cetak, penggandaan.

(4) **Operasional UPTD Puskesmas Toapaya dan Jaringannya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.136.783.800,- realisasi sebesar Rp.134.331.850,- atau 98.21%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Toapaya dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, pajak kendaraan dinas, cetak, penggandaan.

(5) **Operasional UPTD Puskesmas Kawal dan Jaringannya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.156.949.000,- realisasi sebesar Rp.145.632.430,- atau 92,79%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan

kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Kawal dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, pajak kendaraan dinas, cetak, penggandaan, bahan bakar minyak.

(6) **UPTD Operasional Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringannya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.148.422.000,- realisasi sebesar Rp.140.886.304,- atau 94,92%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, bahan bakar minyak, cetak, penggandaan, jasa TV kabel.

(7) **Operasional Puskesmas Teluk Sebong dan Jaringannya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.369.800,- realisasi sebesar Rp.146.588.990,- atau 97,49%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Teluk Sebong dan Jaringannya berupa : pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan, listrik, telepon/internet, air, bahan bakar minyak, cetak, penggandaan, majalah, pajak kendaran dinas.

(8) **Operasional UPTD Puskesmas Teluk Sasah dan Jaringannya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.111.983.800,- realisasi sebesar Rp.105.362.485,- atau 94,09%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Teluk Sasah dan Jaringannya berupa : pembayaran

listrik, telepon/internet, air, pembelian alat tulis kantor, bahan bakar minyak.

(9) **Operasional UPTD Puskesmas Tanjung Uban dan Jaringannya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.263.149.000,- realisasi sebesar Rp.260.904.300,- atau 99,15%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Tanjung Uban dan Jaringannya berupa : pembelian alat tulis kantor, bahan bakar minyak dan gas, cetak, penggandaan.

(10) **Operasional UPTD Puskesmas Tambelan dan Jaringannya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.209.697.750,- realisasi sebesar Rp.209.449.122,- atau 99,88%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Tambelan dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, jasa TV kabel.

(11) **Operasional UPTD Puskesmas Berakit dan Jaringannya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.126.164.000,- realisasi sebesar Rp.122.084.869,- atau 96,77%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional Puskesmas Berakit dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, majalah.

(12) **Operasional UPTD Puskesmas Sri Bintan dan Jaringannya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.135.808.800,- realisasi sebesar Rp.134.400.650,- atau

98,96%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Sri Bintan dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, pembelian komputer, lemari, AC.

(13) Operasional UPTD Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.813.000,- realisasi sebesar Rp.46.934.300,- atau 40,53%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air.

(14) Operasional UPTD Puskesmas Sei. Lekop dan Jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.119.473.000,- realisasi sebesar Rp.110.015.260,- atau 92,08%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Sei Lekop dan Jaringannya berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, majalah, air.

(15) Operasional UPTD Puskesmas Numbing dan Jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.253.449.000,- realisasi sebesar Rp.253.023.925,- atau 99,83%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPTD Puskesmas Numbing dan Jaringannya berupa : pembayaran internet, sewa mobilitas air, air.

(16) Operasional UPT Gudang Farmasi dan jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.304.715.000,- realisasi sebesar Rp.260.467.350,- atau 85,48%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan operasional UPT Gudang Farmasi berupa : pembayaran listrik, telepon/internet, air, majalah, paket pengiriman, pembelian alat tulis kantor.

(17) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (P3K)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.211.990,- realisasi sebesar Rp.107.378.000,- atau 97,43%. Output kegiatan berupa terlaksananya pelayanan P3K di acara-acara tingkat Kecamatan, Kabupaten, Nasional dan Internasional.

(18) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Kijang dan Jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.208.704.956,- realisasi sebesar Rp.207.742.300,- atau 99,54%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di Puskesmas Kijang dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP, uang saku dan transportasi PNS dan Non PNS. Tersedianya alat tulis kantor, alat kebersihan, cetak, penggandaan dan souvenir.

(19) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Kelong dan Jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.209.526.800,- realisasi sebesar Rp.208.293.500,- atau 99,41%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di Puskesmas Kelong dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP, insentif jaga medis/paramedis. Selain itu juga telah disediakan sewa sarana mobilitas air untuk perjalanan dokter ke Mapur.

(20) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Mantang dan Jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.206.959.297,- realisasi sebesar Rp.196.480.200,- atau 94,94%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di Puskesmas Mantang dan Jaringannya pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah disediakan insentif jaga, sewa sarana mobilitas air.

(21) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Toapaya dan Jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.165.262.724,- realisasi sebesar Rp.163.118.000,- atau

98,7%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Toapaya dan Jaringan nya pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP.

(22) **Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Kawal dan Jaringan nya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.188.307.320,- realisasi sebesar Rp.185.915.000,- atau 98,73%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Kawal dan Jaringan nya pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah disediakan insentif jaga, bahan bakar minyak.

(23) **Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringan nya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.170.482.364,- realisasi sebesar Rp.170.402.000,- atau 99,95%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringan nya pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah disediakan insentif jaga, sewa sarana mobilitas air.

(24) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Teluk Sebong dan Jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.132.869.868,- realisasi sebesar Rp.131.935.000,- atau 99,3%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Teluk Sebong dan Jaringannya pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah disediakan insentif jaga medis/paramedis.

(25) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Teluk Sasah dan Jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.136.281.934,- realisasi sebesar Rp.133.324.000,- atau 97,83%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di Puskesmas Teluk Sasah dan Jaringannya berupa : honorarium pelaksana kegiatan, insentif jaga.

(26) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Tanjung Uban dan Jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.179.737.120,- realisasi sebesar Rp.178.356.050,- atau 99,23%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD

Puskesmas Tanjung Uban dan Jaringannya pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga, pembelian bahan keperluan dapur, makan minum pasien.

(27) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Tambelan dan Jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.252.844.370,- realisasi sebesar Rp.161.134.850,- atau 63,73%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Tambelan dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga.

(28) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Berakit dan Jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.165.231.475,- realisasi sebesar Rp.152.393.500,- atau 92,23%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Berakit dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga.

(29) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Sri Bintang dan Jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp162.436.578,- realisasi sebesar Rp.161.162.392,- atau 99,22%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Sri Bintang dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif jaga bagi medis/paramedis.

(30) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.142.977.168- realisasi sebesar Rp.142.934.000,- atau 99,97%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga.

(31) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Sei. Lekop dan Jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.151.473.334,- realisasi sebesar Rp.88.653.475,- atau 58,53%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan

kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Sei Lekop dan Jaringan nya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga.

(32) **Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Numbing dan Jaringan nya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.184.310.000,- realisasi sebesar Rp.161.493.190,- atau 87,62%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Numbing dan Jaringan nya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga dan sewa mobilitas air.

(33) **Pembinaan pemeriksaan upaya kesehatan kerja**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan, dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 35.674.648,- dengan realisasi kegiatan sebesar Rp 30.274.100,- atau 84,86% dari pagu anggaran kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi :

- 1) Bimbingan Teknis ke Puskesmas, Klinik Perusahaan dan Pos UKK. Pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan di alokasikan sebesar Rp 23.037.000,- (dua puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah). Alokasi tersebut terserap seluruhnya sehingga persentase realisasinya adalah 100%.

2) Pertemuan Review dan Evaluasi. Belanja dalam rangka pelaksanaan pertemuan review dan evaluasi kegiatan meliputi belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan, uang saku peserta, transportasi peserta, seminar kit, cetak, penggandaan dan belanja makanan dan minuman kegiatan yang secara total dialokasikan sebesar Rp11.216.000,- (sebelas juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 5.815.600,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) atau 51,85% dari alokasi yang telah di anggarkan. Penyerapan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pertemuan review dan evaluasi kegiatan sebesar 51,85% di karenakan kegiatan pertemuan telah dilaksanakan sebelum Perubahan APBD Kabupaten Bintan.

(34) Pembinaan Penerapan Standarisasi, Akreditasi dan Mutu Pelayanan Puskesmas Rawat Inap.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan, dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 49.336.164,- dengan realisasi sebesar Rp.47.975.340,- atau 97,24% dari pagu anggaran. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi :

- 1) Pembinaan untuk 7 (tujuh) Puskesmas dengan status Puskesmas Rawat Inap, Pelaksanaan pembinaan ke Puskesmas di alokasikan sebesar Rp 18.145.000,- dengan realisasi sebesar Rp 18.055.000,- (delapan belas juta lima puluh lima ribu rupiah) atau 99,5% dari pagu.
- 2) Konsultasi ke kementerian RI / Kaji Banding, Pelaksanaannya berupa kaji banding ke puskesmas yang telah terakreditasi dengan alokasi sebesar Rp 15.985.164,- dengan Realisasi

pelaksanaannya sebesar Rp 14.714.700,- atau 92,05% dari pagu.

- 3) Pertemuan Review dan Evaluasi. Belanja dalam rangka pelaksanaan pertemuan review dan evaluasi kegiatan meliputi belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan, uang saku peserta, transportasi peserta, seminar kit, cetak, penggandaan dan belanja makanan dan minuman kegiatan yang secara total dialokasikan sebesar Rp.13.706.000,- dengan realisasi sebesar Rp 13.705.640,- atau 99,62% dari alokasi yang telah di anggarkan.

(35) Pembinaan Penerapan Standarisasi, Akreditasi dan Mutu Pelayanan Puskesmas Rawat Jalan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan, dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.56.130.000,- dengan realisasi kegiatan ini pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.54.340.210,- atau 96,88% dari pagu anggaran. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

- 1) Pembinaan ke 8 Puskesmas dengan status Puskesmas Rawat Jalan. Pelaksanaan pembinaan ke Puskesmas di alokasikan sebesar Rp.26.405.000,- dengan realisasi sebesar Rp.26.350.000,- atau sebesar 99,79% dari pagu.
- 2) Konsultasi ke kementerian RI / Kaji Banding. Pelaksanaannya berupa kaji banding ke puskesmas yang telah terakreditasi dengan alokasi sebesar Rp 12.000.000,- dengan realisasi pelaksanaannya sebesar Rp.10.305.500,- atau sebesar 85.88% dari pagu.
- 3) Pertemuan Review dan Evaluasi. Belanja dalam rangka pelaksanaan pertemuan review dan evaluasi kegiatan

meliputi belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan, uang saku peserta, transportasi peserta, seminar kit, cetak, penggandaan dan belanja makanan dan minuman kegiatan yang secara total dialokasikan sebesar Rp.16.225.000,- dengan realisasi sebesar Rp 16.164.710,- atau 99,62% dari alokasi yang telah di anggarkan.

(36) Kegiatan Peningkatan mutu dan akses pelayanan bagi keluarga rawan (perkesmas)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.456.275,- realisasi sebesar Rp.40.455.700,- atau 99,99%. Output kegiatan adalah tercapainya cakupan perkesmas di Kabupaten Bintan pada 150 keluarga dengan 4 kali kunjungan per keluarga. Kegiatan dilaksanakan melalui bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi kegiatan Perkesmas di Puskesmas.

(37) Kegiatan Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional/ komplementer alternative

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.138.865,- realisasi sebesar Rp.37.105.100,- atau 99,91%. Output kegiatan adalah terbinanya pelayanan kesehatan swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui pertemuan peningkatan kapasitas pengelola program Puskesmas yang diikuti oleh 15 pemegang program selama 1 (satu) hari.

(38) Kegiatan pembentukan keluarga donor sukarela

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.192.800.000,- realisasi sebesar Rp.186.171.700,- atau 96,56%. Output kegiatan ini adalah terbentuknya keluarga donor darah sukarela di Kabupaten Bintan sebanyak 900 keluarga, melalui pelaksanaan; (a) Sosialisasi tentang manfaat

mendonor di Desa/Kelurahan (b) Pendataan golongan darah pada masyarakat di Desa/Kelurahan dan (c) Penjaringan donor darah.

(39) **Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.475.000,- realisasi sebesar Rp.14.951.309,- atau 69,62%. Output kegiatan ini adalah telah terlaksananya bakti sosial berupa pengobatan gratis di beberapa Desa/Kelurahan di Kabupaten Bintan.

(40) **Operasional Rumah Singgah Pemkab Bintan di Kalimantan Barat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.179.084.000,- realisasi sebesar Rp.168.360.570,- atau 94,01%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan rumah singgah melalui operasional rumah singgah Pemkab Bintan di Kalimantan Barat berupa: tersedianya listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), perawatan rumah singgah.

(41) **Operasional Rumah Singgah Pemkab Bintan di Jakarta**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.223.336.000,- realisasi sebesar Rp.216.576.370,- atau 96,97%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan rumah singgah melalui operasional rumah singgah Pemkab Bintan di Jakarta berupa: tersedianya listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), perawatan rumah singgah.

(42) **Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik).**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana DAK Non Fisik yang alokasi anggarannya adalah sebesar Rp.85.274.000,-

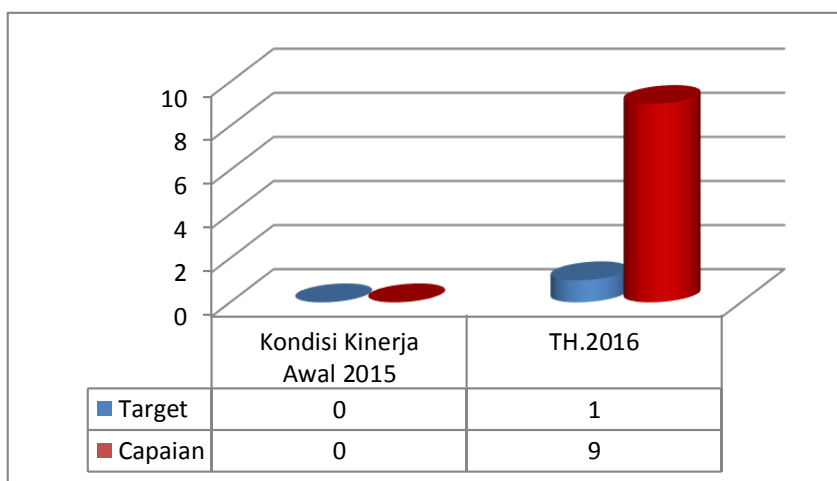
dengan realisasi anggaran pada tahun tersebut sebesar Rp.84.907.908,- atau 99,57% dari pagu yang di sediakan.

(43) **Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)**

- 1) Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Bintan Tahun 2016 berjumlah Rp.3.390.591.000 yang terdiri dari 3.220.500.000 (Tiga milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Puskesmas dan 170.091.000 untuk manajemen di Dinas Kesehatan. Realisasi keuangan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Bintan Tahun 2016 sebesar Rp.3.124.881.172 (93%).
- 2) **Manajemen**, Lokakarya mini dilaksanakan setiap bulan dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian program dan Pencatatan dan pelaporan untuk pertanggungjawaban kegiatan.

Capaian kinerja tahun 2016 untuk program ini antara lain:

1. Jumlah Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk

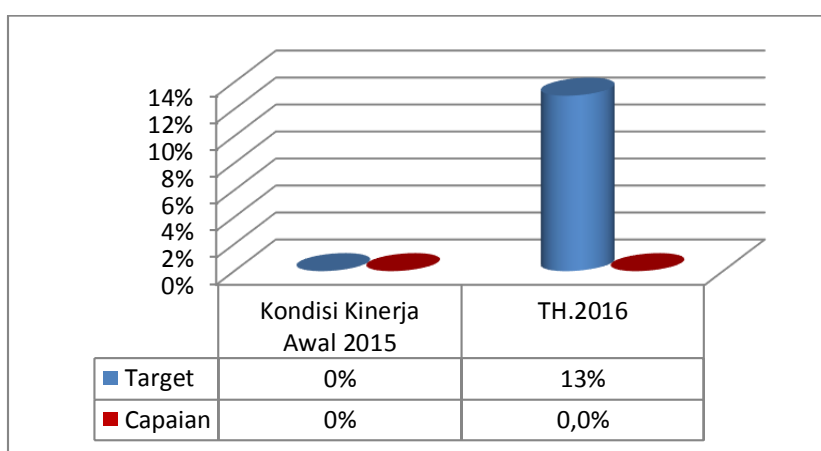


Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar

Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang ada di wilayah Kabupaten Bintan adalah sebanyak 9 Pos UKK. Pos UKK yang ada terdiri dari 4 kelompok nelayan, 2 Pos yang berlokasi di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang dan 2 pos UKK di Desa Berakit

Kecamatan Teluk Sebong, 1 Kelompok Peternak berlokasi di Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong dan 4 kelompok petani yang terdiri dari 1 Pos di Kelurahan Toapaya Kecamatan Toapaya, 1 pos di Sri Bintan, 1 pos di Bintan Buyu dan 1 Pos di Bintan Utara Tanjung Uban. Dengan jumlah pos UKK yang ada saat ini artinya telah memenuhi target yang telah di tetapkan.

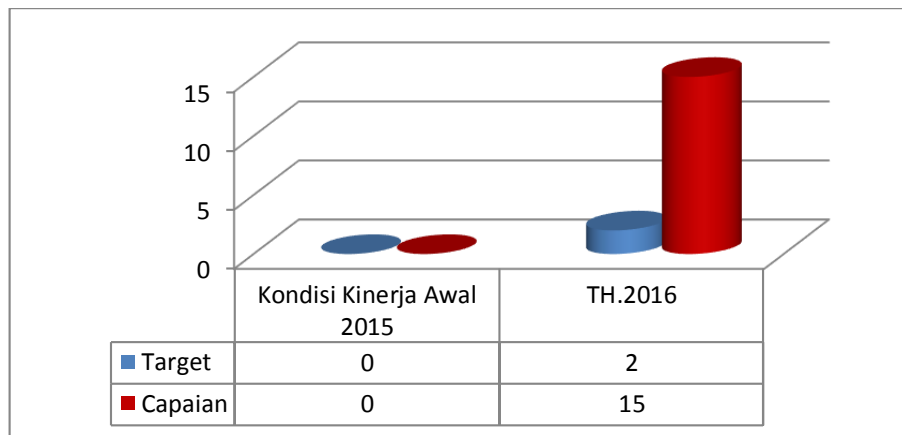
2. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional dan komplementer



Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar

Sampai dengan akhir tahun 2016, belum ada Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan tradisional dan komplementer. Hal ini dikarenakan belum adanya Poli Pengobatan Tradisional/ Komplementer dipuskesmas. Sedangkan pelatihan terhadap petugas puskesmas untuk menangani pengobatan tradisional/komplementer baru selesai dilaksanakan untuk dua petus puskesmas yaitu Puskesmas Kijang dan Puskesmas Tanjung Uban.

3. Jumlah Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)



Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar

Kegiatan Perkesmas ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan. Tahun 2016, seluruh 15 puskesmas yang ada di Kabupaten Bintan telah melaksanakan/menerapkan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) tersebut.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Pelaksanaan pembinaan dan pemeriksaan upaya kesehatan kerja belum optimal, beberapa Puskesmas belum menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja/K3.
- Masih minimnya pelaksanaan pembinaan tentang upaya kesehatan kerja yang ada di beberapa klinik perusahaan.
- Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan kesehatan di Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) karena sebagian besar kader belum mendapatkan pelatihan.
- Pelaksanaan pelayanan pasien Rawat Inap belum optimal
- Beberapa Puskesmas Rawat Inap belum melengkapi Standar Prosedur Operational (SPO).

- f. Puskesmas belum melengkapi data keluarga rawan yang rentan terhadap masalah kesehatan.
- g. Belum semua klinik pengobatan tradisional terdata

2) Solusi

- a. Melaksanakan pembinaan upaya kesehatan kerja di Puskesmas agar menerapkan Manajemen K3 secara berkesinambungan sehingga Pelayanan Pos UKK dapat berjalan optimal.
- b. Pembuatan SPO sesuai dengan standar pelayanan sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan yang baik
- c. Melaksanakan koordinasi dengan dokter keluarga dan klinik pengobatan tradisional dalam pengumpulan data

2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.144.445.732,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.126.702.350,- atau 98,45%. Outcome dari program ini adalah Meningkatnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.753.985.260,- dengan realisasi sebesar Rp.739.445.550,- atau 98,07%. Output kegiatan ini adalah telah dilaksanakannya; pemutaran film kesehatan (media audio visual) pada masyarakat umum dan institusi pendidikan sebanyak 16 kali di 10 Kecamatan, dengan berbagai judul film seperti warung sehat, bahaya rokok, PHBS, Aku Bangga Aku

Tahu (HIV-AIDS), Kesehatan Ibu dan Anak, dan lain-lain. Selain itu promosi dan informasi sadar hidup sehat, telah dipasang 100 lembar spanduk (media cetak) dan 2.000 lembar leaflet, pemutaran radio spot (media massa elektronik/RRI) sebanyak 120 kali penyiaran, 4 kali dialog interaktif dan 400 lembar.

(2) **Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan UKS**

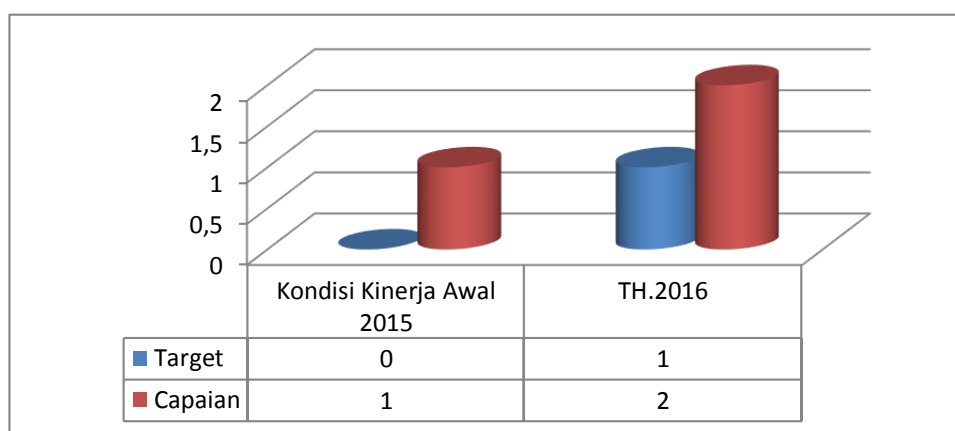
Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.213.238.168,- realisasi sebesar Rp.211.914.850,- atau 99,38%. Output kegiatan adalah cakupan penjangkaran kesehatan SD/MI dari 108 SD/MI adalah 3.546 siswa kelas 1 (100 persen), cakupan penjangkaran sekolah lanjutan dari 57 sekolah lanjutan adalah siswa kelas VII dan siswa kelas X, yaitu: 4.693 orang yang terjaring 3.833 (81.67 persen). Pemeriksaan kesehatan berkala siswa kelas II dan kelas VI SD sasarannya 17.618 orang, yang diperiksa 16.451 orang (93.38 persen), Pelatihan dokter kecil 737 murid dari 17.618 (4.18 persen), Pembekalan Pramuka Saka Bakti Husada (SBH) menghasilkan 42 orang yang mendapatkan Tanda Kecakapan Khusus (TKK) dari 194 anggota (21.65%).

(3) **Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.177.222.304,- realisasi sebesar Rp.175.341.950,- atau 98.94%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya tahapan desa siaga di Kabupaten Bintan, sehingga jumlah tahapan desa siaga Kabupaten Bintan sampai dengan akhir tahun 2016 dengan rincian : tidak ada lagi desa dengan tahapan pratama, 7 Desa/Kelurahan tahapan madya (13,7%), 17 Desa/ Kelurahan tahapan purnama (33,3%), 27 Desa/Kelurahan tahapan mandiri (53%).

Capaian indikator pembangunan untuk program ini adalah :

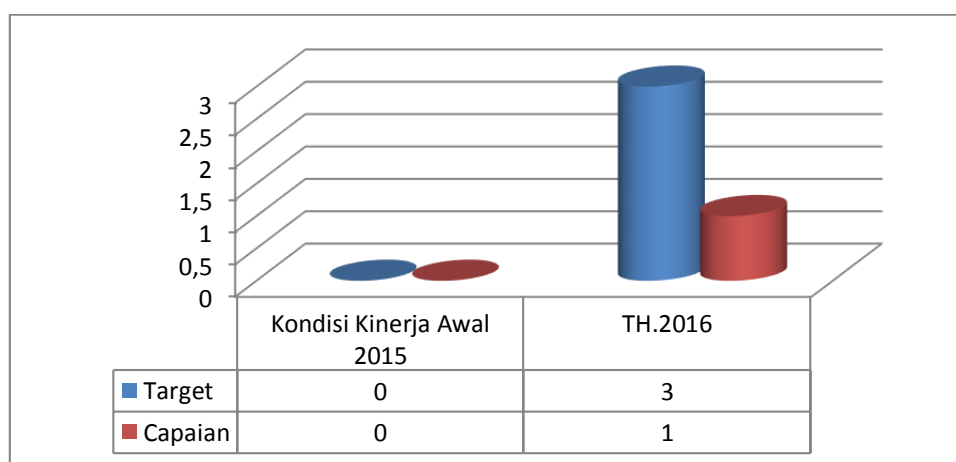
1. Jumlah Kebijakan Publik Yang Berwawasan Kesehatan



Sumber : Seksi Promosi Kesehatan

Berdasarkan grafik diatas terlihat hingga tahun 2016 telah dibuat 2 Kebijakan Publik yang berwawasan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, yaitu tentang Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) dan SK Tim Pembina Desa Siaga. Walaupun kebijakan publik yang berwawasan kesehatan yang dibuat telah melebihi target namun keberlanjutan regulasi dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang tercantum di dalam Perda.

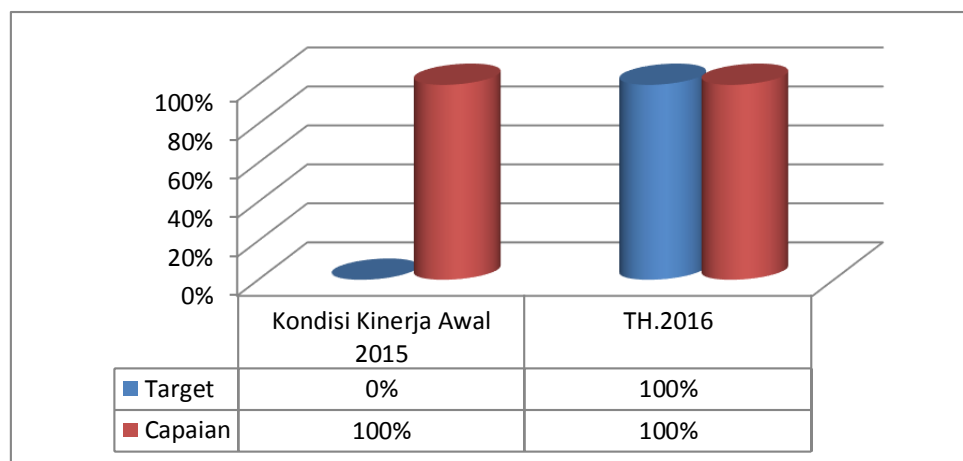
2. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Memanfaatkan Sumber Dayanya Untuk Mendukung Kesehatan



Sumber : Seksi UKBM

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan baru 1 organisasi yaitu Fatayat NU, dikarenakan adanya MOU antara Kemenkes RI dengan Fatayat NU Pusat sebagai mitra dalam pengembangan strategi promosi kesehatan. Dalam rangka peningkatan capaian indikator kinerja dimaksud di kemudian hari maka sangat dibutuhkan komitmen yang kuat dan advokasi yang intens dari Dinas Kesehatan serta perangkat daerah lainnya dengan Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bintan agar dapat membantu pengembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bintan.

3. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat



Persentase Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di tahun 2016 mencapai 100 persen. Hal ini dikarenakan penjaringan murid baru SD dan setingkat termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dengan target 100 persen. Jumlah SD dan setingkat yang menjadi sasaran kegiatan penjaringan di Kabupaten Bintan sebanyak 108 sekolah di 15 wilayah kerja Puskesmas, baik sekolah negeri maupun swasta.

Secara umum terjadinya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan murid Sd dan setingkat penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala di Kabupaten Bintan Tahun 2016 disebabkan karena meningkatnya kesadaran petugas untuk melakukan koordinasi dan lintas program dan lintas sektor terkait serta pendayagunaan tenaga kesehatan di Puskesmas Pembantu, Polindes dan peranserta dokter keluarga dalam kegiatan UKS.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Sarana/alat bantu penyuluhan (media audio visual) di tingkat Kabupaten maupun Puskesmas masih kurang, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- b. Kurang tersedianya film penyuluhan kesehatan yang sesuai dengan karakteristik dan budaya masyarakat setempat.
- c. Masih kurangnya tenaga ahli promosi kesehatan baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas.
- d. Masih ada beberapa Desa yang sulit di jangkau karena geografis dan akses menuju desa tersebut masih sulit.
- e. Masyarakat kurang peduli terhadap upaya promotif dan preventif dalam meningkatkan kesehatannya sendiri dan keluarga menuju tingkat sehat wellbeing.

2) Solusi

- a. Pengusulan pemenuhan kebutuhan audio visual,
- b. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam penyediaan VCD film maupun softcopy film yang memuat informasi kesehatan terbaru,
- c. Bimbingan teknis terhadap petugas promosi kesehatan di tingkat Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes,

- d. Pengusulan kendaraan operasional promosi kesehatan lengkap dengan alat bantu audio visual,
- e. Bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK, Desa Siaga dan Kader Kesehatan untuk mengumpulkan masyarakat apabila ada kegiatan penyuluhan dan pemberian informasi kesehatan/pemutaran film,
- f. Pelatihan tenaga promosi kesehatan di tingkat Puskesmas tentang teknik dan metode promosi kesehatan.

3) **Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Keluarga**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui 10 (sepuluh) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.4.803.477.720,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.841.876.421,- atau 79,98%. Outcome Meningkatnya Gizi dan Kesehatan Keluarga.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.586.710,- dengan realisasi sebesar Rp.46.460.370,- atau 99,73%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya surveilans gizi serta tersedianya data informasi masalah gizi masyarakat melalui pelaksanaan pertemuan surveilan gizi, penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi bagi seluruh tenaga pelaksana gizi Puskesmas, kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi data gizi, bimbingan teknis dan pelatihan pemetaan gizi bagi TPG, serta monitoring dan evaluasi. Output pemetaan yang dilakukan ditemukan jumlah balita kurang gizi sebanyak 297 balita.

(2) **Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A (KVA) dan Kekurangan Zat Gizi mikro lainnya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.381.558.951,- dan realisasi sebesar Rp.381.301.450,- atau 99.93 %. Output kegiatan ini adalah tersedianya PMT pemulihan bagi balita kurang gizi berupa susu sebanyak 4864 kotak untuk sasaran seluruh balita kurang gizi. Dilaksanakan juga kegiatan bimbingan teknis program, monitoring PMT serta konsultasi program gizi ke Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

(3) **Kegiatan Revitalisasi Operasional Posyandu dan Pengembangan TOGA/UPGK**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.111.657.000,- realisasi sebesar Rp.2.105.248.375,- atau 99,7%. Output kegiatan adalah terdistribusinya honor kader posyandu untuk 162 posyandu masing-masing 9 kader per posyandu untuk 12 bulan. Didistribusikannya seragam kader posyandu dan Pembina posyandu tingkat kabupaten dan desa. Terlaksananya pertemuan review program posyandu . Terlaksananya pembinaan teknis monitoring dan evaluasi program posyandu serta konsultasi program ke Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

(4) **Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.480.870.828,- dengan realisasi sebesar Rp.473.635.920,-; atau 98,5%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP), pertemuan evaluasi persalinan oleh tenaga kesehatan melalui P4K dan kemitraan

dukun, pertemuan evaluasi Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), pertemuan review kesehatan ibu dan anak dan tersedianya buku KIA sebagai alat untuk memantau kesehatan tumbuh kembang janin mulai dari kandungan, bayi lahir sampai anak berusia 5 tahun.

(5) **Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Anak (Bayi)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.301.153; dengan realisasi sebesar Rp.300.950.950,- atau 99,93%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pertemuan Tata Laksana kasus kekerasan terhadap anak, kegiatan orientasi kelas ibu balita, kegiatan Sosialisasi Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), Prosedur Tetap (Protap) pelayanan kesehatan anak dan pertemuan review program anak.

(6) **Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Usia Lanjut (Usila)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.144.360.123,- dengan realisasi sebesar Rp.144.095.600,- atau 99,82% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi program usila sebanyak 1 kali, terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi kesehatan intelegensia usia lanjut pada tenaga kesehatan di puskesmas yang diikuti oleh 30 peserta terdiri dari 15 orang pengelola program usila dan 15 orang dokter umum di 15 Puskesmas se-Kabupaten Bintan, dalam upaya meningkatkan jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun posyandu.

(7) **Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Remaja,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.188.872.731; dengan realisasi sebesar Rp 187.781.250;

atau 99.42%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan review program remaja bagi tenaga kesehatan dan terlaksananya kegiatan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi bagi siswa dan siswi SMP/SMA Sederajat se-Kabupaten Bintan.

(8) **Kegiatan peningkatan pembinaan pelayanan kesehatan reproduksi (pelayanan medik KB)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.937.661,- dengan realisasi sebesar Rp.32.784.500,- atau 72,96%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya review program KB untuk meningkatkan cakupan KB yang diikuti oleh pengelola program dan Bidan Koordinator.

(9) **Kegiatan Jaminan Persalinan Normal (DAK Non Fisik)**

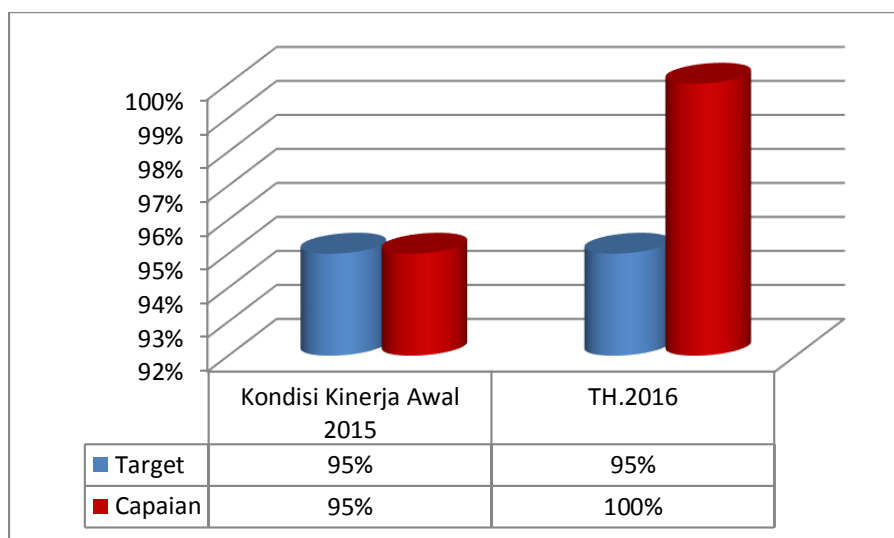
Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.1.097.275.000,- dengan realisasi sebesar Rp.294.528.636,- atau 27,29%. Dengan kegiatan RTK, terdiri dari sewa rumah tunggu kelahiran, makanan dan minuman asien beserta pendamping, mobilitas air digunakan untuk merujuk pasien dari pulau mentebung ke Puskesmas Tambelan dan dari puskesmas tambellan ke RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang dan Rumah Sakit Dr. Soedarso Pontianak Kalimantan Barat, serta bimbingan teknis dan monitoring.

(10) **Kegiatan Peningkatan Kesehatan ibu dan Anak di Daerah Terpencil**

Kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan IBI Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.205.000; dengan realisasi sebesar Rp.24.156.870,- atau 99,8%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya penyuluhan kesehatan ibu hamil di wilayah Kabupaten Bintan dan pertemuan ilmiah tahunan bidan di Jakarta.

Capaian kinerja tahun 2016 untuk program ini antara lain:

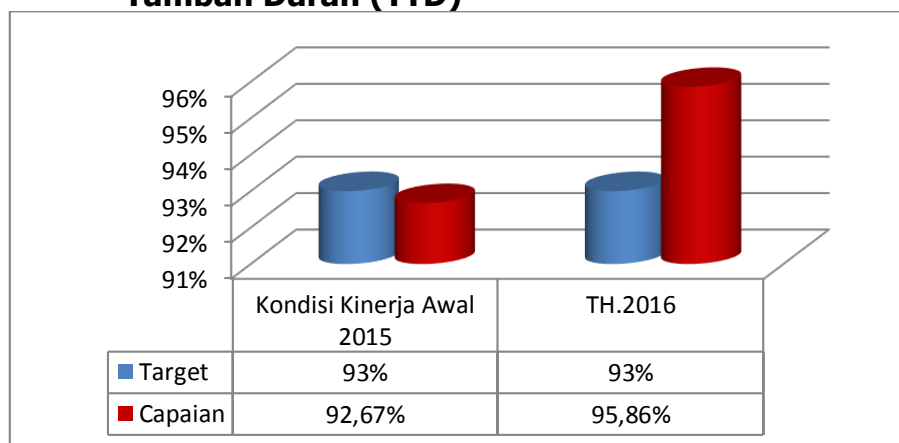
1. **Persentase Ibu hamil Kurang Energi Protein (KEP) yang mendapat makanan tambahan.**



Sumber : Seksi Gizi Masyarakat

Persentase ibu hamil Kurang Energi Protein (KEP) yang mendapatkan makanan tambahan (PMT) merupakan salah satu indikator pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. Ibu hamil KEP berisiko terhadap kematian ibu hamil/melahirkan, BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), bayi stunting dan kematian bayi. Jumlah hamil KEP di Kabupaten Bintan tahun 2016 sebanyak 135 bumil dan seluruhnya (100%) diberikan makanan tambahan berupa biskuit ibu hamil dan susu ibu hamil.

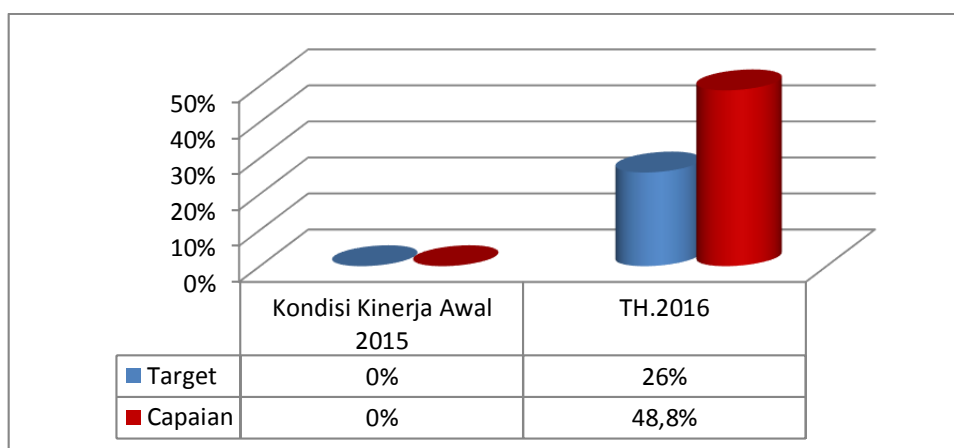
2. **Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)**



Sumber : Seksi Gizi Masyarakat

Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada ibu hamil merupakan salah satu indikator kinerja pembinaan gizi masyarakat. Pemberian TTD pada ibu hamil bertujuan untuk mencegah ibu hamil anemia dan mengurangi risiko kematian ibu melahirkan, kematian bayi BBLR dan kurang gizi. Dari tabel dan grafik diatas menggambarkan bahwa cakupan ibu hamil mendapat TTD tahun 2016 telah mencapai target dan terjadi peningkatan dibanding tahun 2015 yaitu dari 92.67% menjadi 95,86%.

3. **Presentasi Bayi kurang dai 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif.**

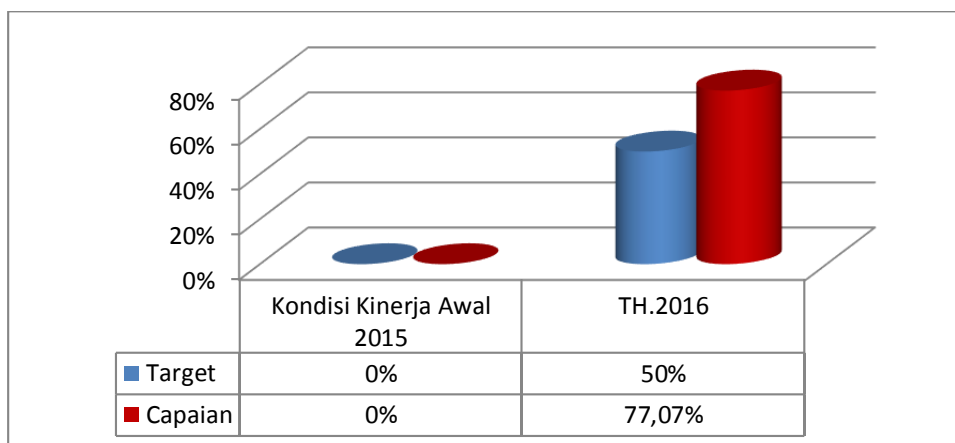


Sumber : Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan KB

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekskluiif adalah bayi hanya diberikan ASI saja tambah makanan/minuman tambahan lainnya sampai usia 6 bulan. Setelah 6 bulan bayi diberikan makanan pendamping ASI. ASI tetap diteruskan sampai bayi usia 24 bulan. Cakupan bayi 0-6 bulan yang masih ASI eksklusif di Kabupaten Bintan tahun 2016 sebesar 43,7%, meningkat dibanding tahun 2015 (45,14%) . Artinya lebih dari 50% ibu telah memberikan makanan tambahan selain ASI kepada bayi sebelum berusia 6 bulan. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu tentang pemberian makanan yang baik dan tepat untuk anaknya,

kurangnya dukungan keluarga, faktor kebudayaan dan mitos lama yang masih dipercaya serta maraknya iklan susu formula. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang ASI Eksklusif perlu upaya meningkatkan promosi dan penyuluhan tentang ASI Eksklusif secara terus menerus kepada masyarakat.

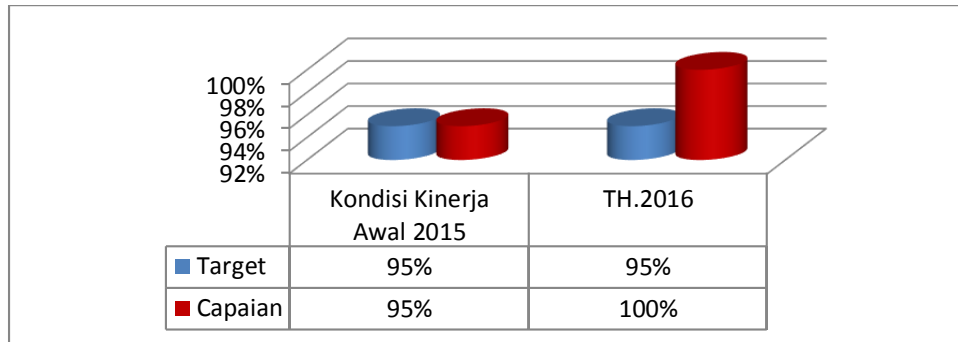
4. **Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)**



Sumber : Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan KB

Inisiasi Menyusu dini (IMD) merupakan suatu salah satu kunci keberhasilan ASI Eksklusif. IMD adalah meletakkan bayi di dada ibu minimal selama satu jam segera setelah dilahirkan agar bayi menemukan puting ibu dan mulai proses menyusui. Dari Jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Bintan tahun 2016 sebesar 3.027 bayi, 77,07% persen telah melaksanakan IMD. Persentase tersebut melebihi target tahun 2016 sebesar 50%. Hal tersebut dapat tercapai dikarekan kesadaran ibu terhadap anjuran dari tenaga kesehatan yang membantu proses persalinan ibuk tersebut.

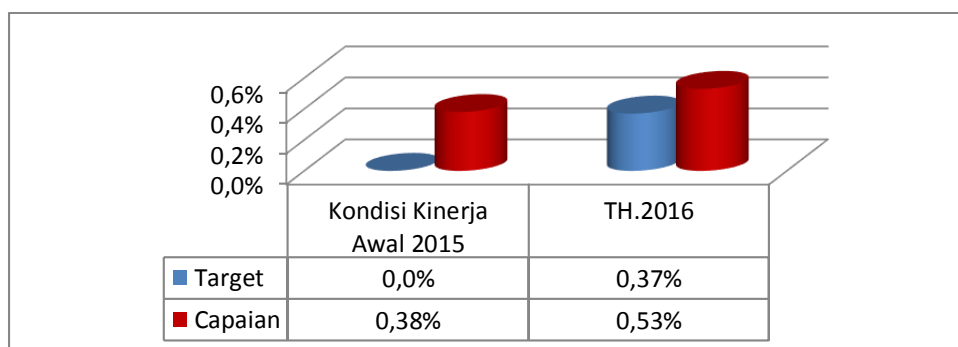
5. **Presentase Baduta (bayi Dua Tahun) Kurus yang mendapatkan Makanan Tambahan.**



Sumber : Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan KB

Baduta (bawah dua tahun) adalah anak usia 6 – 24 bulan, usia ini adalah merupakan usia emas dimana sangat mempengaruhi terhadap kesehatan dan kualitas anak selanjutnya. Perlu dilakukan pembinaan gizi dan intervensi gizi secara intensif antara lain dengan pemberian makanan tambahan pada anak yang bermasalah gizi yaitu baduta kurus. PMT diberikan dalam bentuk biskuit MP-ASI dan susu. Jumlah Baduta kurus tahun 2016 adalah 62 orang, seluruh baduta diberikan pembinaan gizi serta PMT pemulihan berupa biskuit MP-ASI DAN susu. Untuk mempertahankan dan meningkatkan cakupan dan kualitas PMT balita kurus, perlu terus menerus melakukan penyediaan bahan PMT serta pengawasan dan pembinaan gizi di masyarakat.

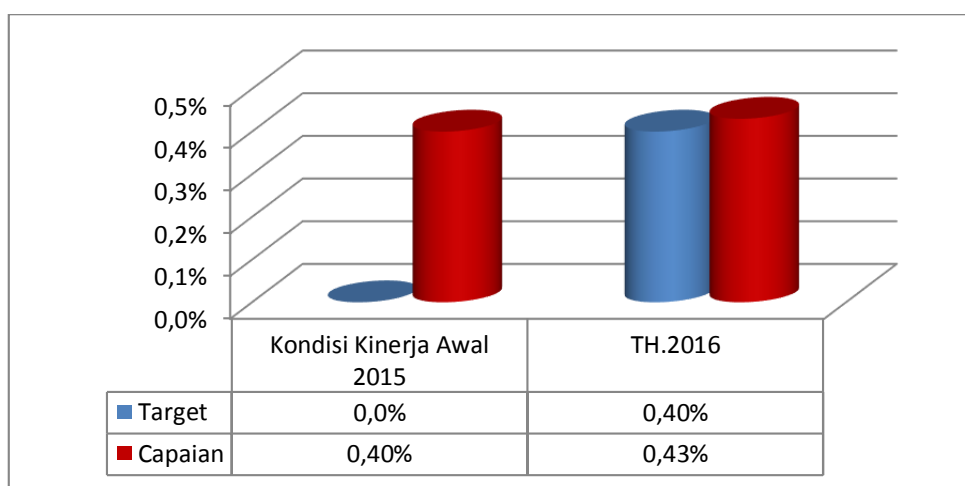
6. **Persentase Anemia Ibu Hamil**



Sumber : Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan KB

Ibu hamil Anemia adalah ibu hamil dengan anemia berat dengan kadar Hb < 8 g/dl. Ibu hamil yang mengalami anemia sangat berpengaruh terhadap keselamatan ibu melahirkan, serta kesehatan dan kualitas bayi yang dilahirkan. Dari grafik diatas presentase ibu hamil anemia di Kabupaten Bintan masih dibawah target Nasional, namun untuk capaian di Kabupaten Bintan ternyata ada peningkatan tahun 2016 dari 0,38% menjadi 0,53%. Untuk itu perlu ditingkatkan pembinaan kesehatan ibu hamil , gizi ibu hamil serta pemberian Tablet Tambah Darah (TTD).

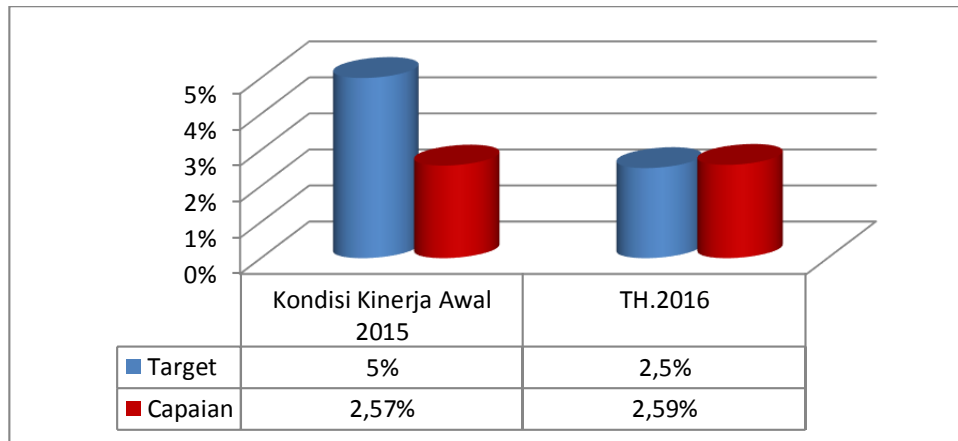
7. Presentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)



Sumber : Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan KB

Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 grm. Bayi BBLR berdampak permalahan gizi anak selanjutnya. Bayi yang lahir dengan BBLR menandakan permasalahan gizi ibu sewaktu hamil dan sebelum hamil. Jumlah bayi BBLR tahun 2016 sebanyak 13 orang. Kalau dibandingkan Angka BBLR di Kabupaten Bintan masih jauh dibawah angka target nasional 8%. Untuk mencegah BBLR perlu upaya peningkatan pembinaan kesehatan dan gizi ibu hamil, serta gizi calon ibu hamil (remaja putri).

8. Presentase Balita Gizi Kurang



Sumber : Seksi Gizi Masyarakat

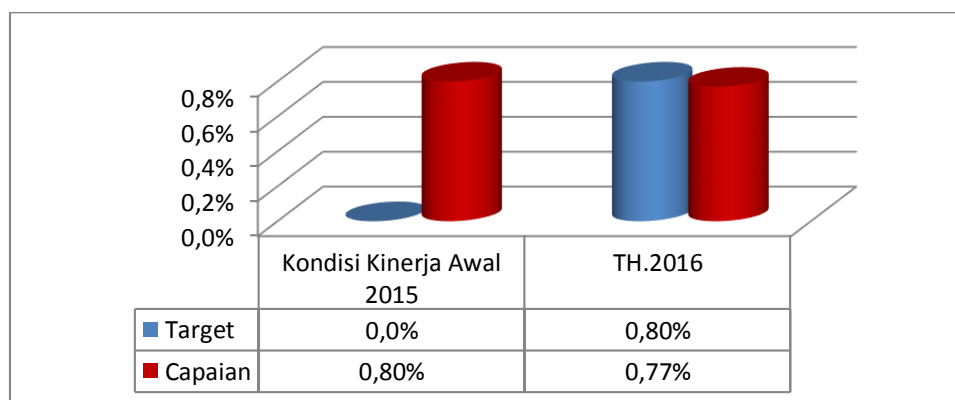
Balita kurang gizi adalah balita (0-59 bulan) balita dengan status gizi yang didasarkan pada pengukuran antropometri dengan indeks berat badan menurut umur (BB/U) ambang batas < -3 SD sampai dengan < -2 SD. Prevalensi balita kurang gizi di Kabupaten Bintan tahun 2016 sebesar 2,59 % (305 balita). Angka tersebut telah mencapai target kinerja Kabupaten yaitu $< 5\%$ dan cukup rendah jika dibandingkan dengan angka kurang gizi provinsi (16,35% data PSG 2015) dan nasional (19,9% data Riskesdas 2013), namun ada sedikit peningkatan pada tahun 2016 dari 2,57% tahun 2015 menjadi 2,59% ,yaitu dari 297 balita menjadi 305 balita.

Target nasional balita kurang gizi sesuai RPJMN 2016 adalah 17% . Kalau dilihat trend prevalensi kurang gizi Kabupaten Bintan tahun 2010 s/d 2016, angka tertinggi pada tahun 2010 yaitu 8,8% menurun sampai dengan tahun 2012, ada peningkatan pada tahun 2013 dan terjadi penurunan tahun 2014 dan 2015 dan sedikit meningkat pada tahun 2016. Adanya kenaikan karena semakin meningkatnya kinerja surveilans gizi yaitu melalui penjaringan status gizi balita terutama pada bulan penimbangan balita di posyandu.

Terjadinya peningkatan jumlah balita kurang gizi pada tahun 2016 juga disebabkan kurangnya asupan gizi anak akibat pola asuh gizi yang salah dan faktor lainnya karena kurangnya kemampuan daya beli /kemiskinan. Jumlah balita kurang gizi terbanyak ditemukan di wilayah puskesmas Teluk sasah 42 balita dan terendah puskesmas Kelong yaitu 3 balita. Seluruh balita kurang gizi yang ditemukan telah diberi penanggulangan gizi serta bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berupa susu dan multivitamin melalui anggaran APBD Kabupaten Bintan dan Anggaran Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau diikuti dengan Pemantauan status gizi balita dilaksanakan rutin setiap bulan serta penyuluhan kepada ibu balita di posyandu.

Untuk mencegah meningkatnya jumlah balita kurang gizi, perlu ditingkatkan pembinaan gizi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan gizi seperti Pedoman Gizi Seimbang (PGS),Pemberian Makanan Bagi Anak (PMBA), Pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), ASI Eksklusif, MP-ASI, Pemberian PMT dan suplement gizi. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak dilaksanakan rutin setiap bulan melalui posyandu.

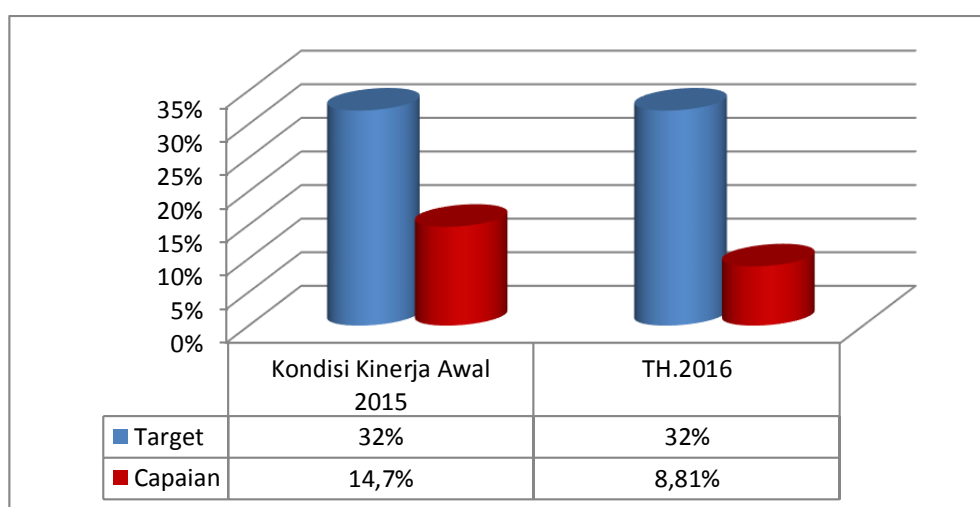
9. **Pesentase Balita Wasting (Kurus)**



Sumber : Seksi Gizi Masyarakat

Balita Kurus adalah anak usia 0-59 bulan dengan BB/PB atau BB/TB pada kisaran -3 SD sampai dengan <-2 SD). Balita kurus merupakan salah satu indikator kekurangan gizi kronis pada balita terkait dengan asupan gizi sekarang dan masa lalu. Dari 11.746 Bayi, 0,77% diantaranya merupakan bayi kurus. Angka ini menurun dari pada angka tahun lalu sebesar 80%, sekaligus target tahun 2016.

10. Persentase Baduta Stunted (Pendek)

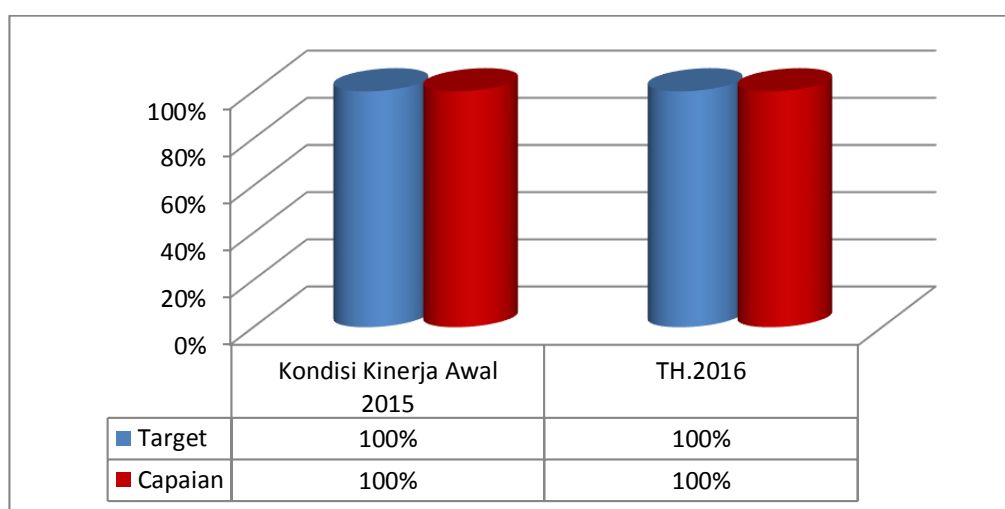


Sumber : Seksi Gizi Masyarakat

Pengertian balita pendek adalah status gizi balita yang didasarkan pada standar antropometri dengan indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunted (pendek) dan severely stunted (sangat pendek) dengan ambang batas -2 SD sampai dengan -3 SD. Angka Presentase balita stunting di Kabupaten Bintan tahun 2016 berdasarkan pengukuran balita di posyandu adalah 8,81 % dan telah sesuai dengan target kabupaten dan nasional yaitu 32%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan presentase balita stunting provinsi 26.3% dan nasional 37,2%, (Riskesdas 2013). Terjadi penurunan presentase balita stunting tahun 2016. Data balita stunting di Kabupaten Bintan yang tersedia mulai tahun 2013 yang dilaksanakan pada kegiatan bulan penimbangan balita. Untuk

mendukung kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita melalui kegiatan posyandu, telah dilengkapi alat ukur panjang badan dan tinggi badan balita (Lengthboard dan Microtois) disetiap posyandu. Demikian juga dilaksanakan pembinaan rutin, pelatihan penyegaran kader, workshop kader posyandu, kualitas kader posyandu lebih baik, dengan dibekali ilmu/ keterampilan tentang pengelolaan posyandu dan cara pengukuran antropometri balita.

11. Presentase Balita Gizi Buruk yang Dirawat



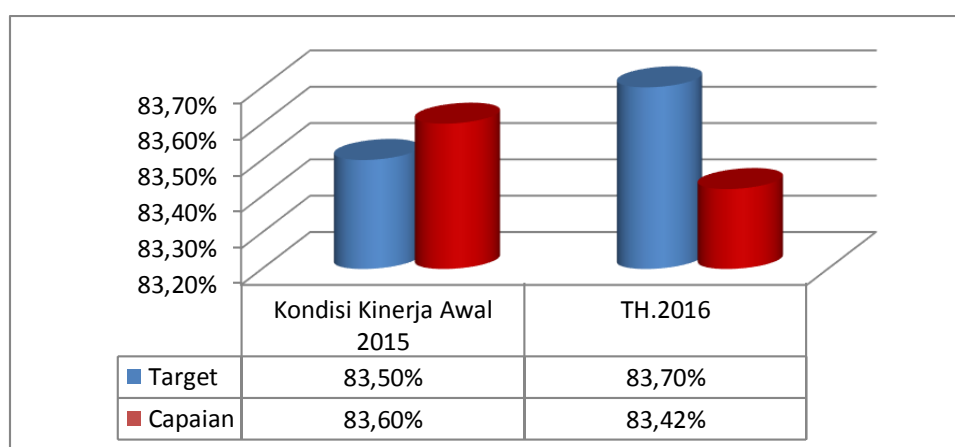
Sumber : Seksi Gizi Masyarakat

Pengertian balita gizi buruk adalah balita sangat kurus yang didasarkan pada indeks berat badan menurut panjang badan (BB/TB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang merupakan padanan istilah severely wasted (sangat kurus) dengan ambang batas antropometri < -3 SD. Prevalensi kasus balita gizi buruk di Kabupaten Bintan tahun 2016 adalah 0,21 % (25 kasus). Angka ini lebih rendah dibanding angka gizi buruk provinsi dan nasional tahun 2013 (Riskesdas 2013) dimana angka gizi buruk provinsi Kepri 3.2 % (PSG 2015) dan angka gizi buruk nasional 5,3% (Riskesdas 2013), sedangkan target nasional adalah dibawah 1% . Kalau dilihat trend prevalensi gizi buruk Kabupaten Bintan tahun terakhir terlihat peningkatan sampai tahun 2013 dan

penurunan pada tahun 2014 ,2015 dan angka yang tetap sama tahun 2015 dan tahun 2016. Kasus gizi buruk yang ditemukan adalah non klinis dan sebagian besar disebabkan kurangnya asupan gizi karena faktor pola asuh anak dan kemiskinan.

Seluruh Kasus balita gizi buruk yang ditemukan setiap tahunnya dilaksanakan perawatan (100%) sesuai dengan kasus yang ditemukan, baik rawat inap maupun rawat jalan.

12. Presentase Balita Ditimbang Berat Badannya.

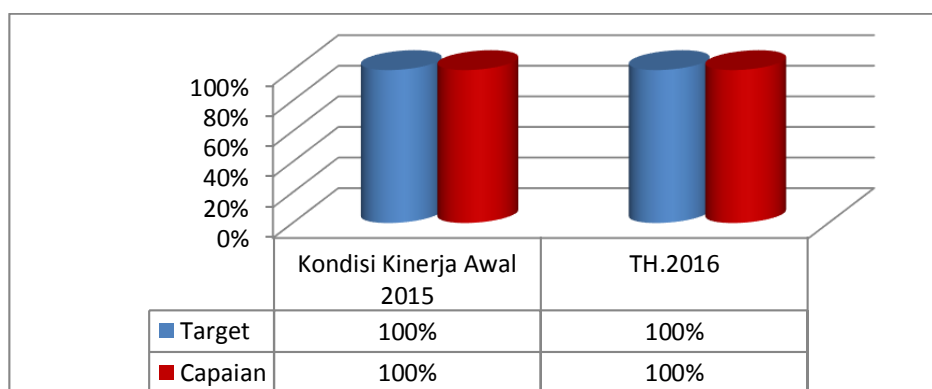


Sumber : Seksi Gizi Masyarakat

Cakupan penimbangan balita di Kabupaten Bintan tahun 2016 yaitu 83,42% hampir mencapai target (85%). Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di posyandu merupakan sarana mendidik ibu balita tentang gizi -kesehatan, dan sebagai upaya deteksi dan intervensi gangguan pertumbuhan. Penimbangan anak di posyandu juga merupakan entry point kegiatan pelayanan kesehatan seperti imunisasi, pemberian Vitamin A, penanggulangan diare serta kegiatan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK). Trend cakupan balita ditimbang lima tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2013 dan 2014. Meningkatnya partisipasi masyarakat ke posyandu antara lain didukung oleh meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan kesehatan khususnya ibu dan balita serta

dukungan berbagai program dan lintas sektor terkait. Dengan adanya Instruksi Bupati tentang kegiatan bulan penimbangan balita bahwa pada bulan April dan November seluruh balita ditimbang di Posyandu, sangat mendukung peningkatan cakupan kunjungan posyandu. Demikian juga pada bulan Vitamin A Februari dan Agustus kunjungan ke posyandu lebih tinggi. Disediakkannya dana bantuan honor kader setiap bulannya sebanyak 9 kader perposyandu (1458 kader), disediakan logistik posyandu mendukung meningkatnya peran kader dalam kegiatan posyandu. Terjadinya sedikit penurunan cakupan kunjungan ke posyandu pada tahun 2016 dari 83,7% menjadi 83,42%, dipengaruhi antara lain menurunnya minat keluarga/ibu balita menimbang anak di posyandu, tidak disediakan biaya operasional posyandu serta kurangnya dukungan dari lintas sektor terkait.

13. **Presentase Pemberian Makanan Pendamping ASI untuk anak 6-24 bulan Keluarga Miskin**

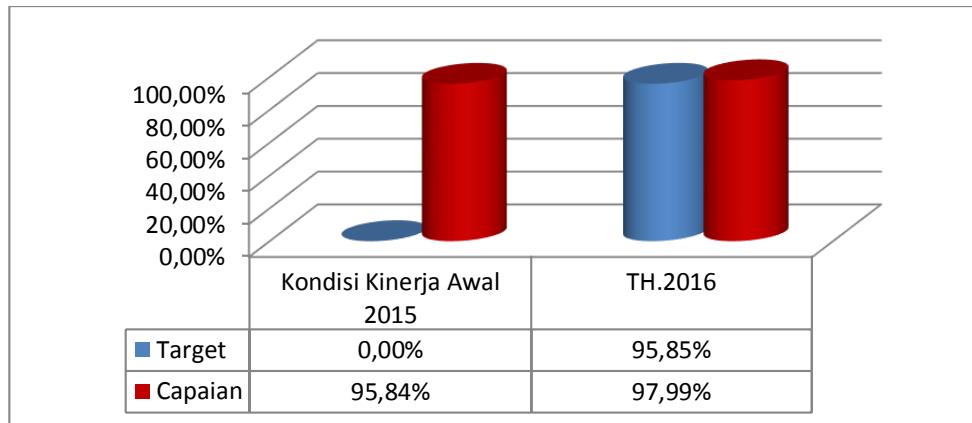


Sumber : Seksi Gizi Masyarakat

Pengadaan MP-ASI didukung oleh adanya bantuan program pengentasan kemiskinan Kabupaten Bintan dan alokasi dari pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Cakupan pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) bagi baduta dari keluarga miskin di Kabupaten Bintan telah mencapai target 100%, sasaran seluruh anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin

prioritas yang menderita kurang gizi telah diberikan MP-ASI berupa biskuit . Pemberian Makanan Tambahan PMT berupa susu juga diberikan yang diprioritaskan untuk balita kurang gizi.

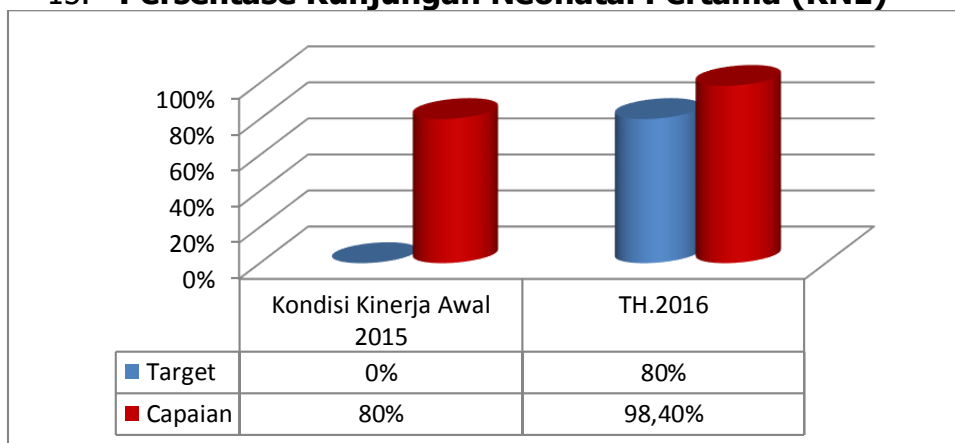
14. **Presentase Balita Dapat Vitamin A Dosis Tinggi (200.000 IU)**



Sumber : Seksi Gizi Masyarakat

Vitamin A dosis tinggi merupakan salah satu intervensi gizi balita untuk mencegah gangguan penglihatan serta meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu pertumbuhan anak, Dosis vitamin A dosis tinggi yang diberikan yaitu 100.000 IU untuk bayi usia 6-12 bulan sebanyak 1 kapsul, dan 200.000 IU pada balita usia 1 – 5 tahun sebanyak 1 kapsul setiap 6 bulan, Pemberian kapsul vitamin A ini dijadwalkan setiap bulan Februari dan Agustus di Posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya. Dari grafik diatas terlihat cakupan pemberian vitamin A dosis tinggi pada balita di Kabupaten Bintan pada tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015. Hal tersebut karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk kesehatan balita, bulan Vitamin A Februari dan Agustus telah dikenal oleh masyarakat. Pada bulan vitamin A ini kunjungan ke posyandu lebih tinggi dibanding bulan-bulan lainnya. Pencapaian target pemberian vitamin A ini perlu dipertahankan dan diingkatkan terus dengan menjaga ketersediaan logistik serta mempertahankan dan meningkatkan kunjungan ke posyandu serta pembinaan dan monitoring program.

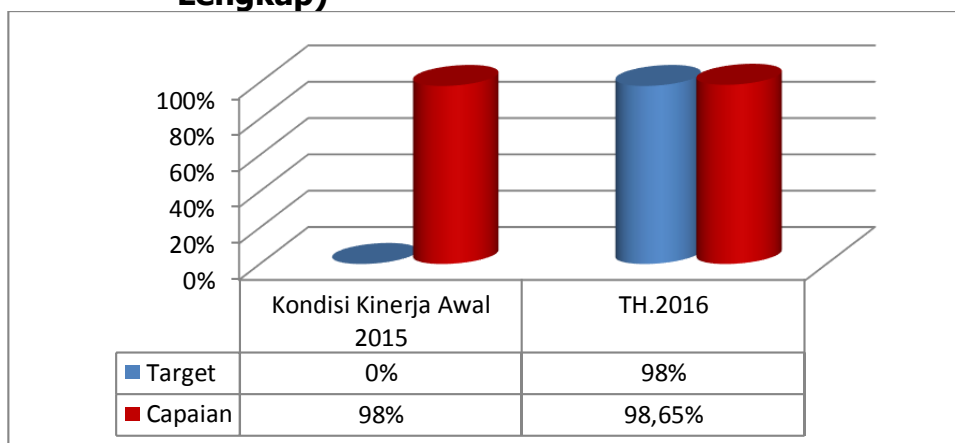
15. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)



Sumber : Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan KB

Kunjungan Neonatal hari ke 1 (KN1) adalah jumlah neonatus umur \geq 24 jam – 2 hari yang kontak dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan neonatal sesuai dengan standar. Presentase KN1 untuk tahun 2016 sebesar 95,61% melebihi target sebesar 80%, yang juga merupakan capaian tahun 2015.

16. Persentase Kunjungan Neonatal 0 – 28 hari (KN Lengkap)

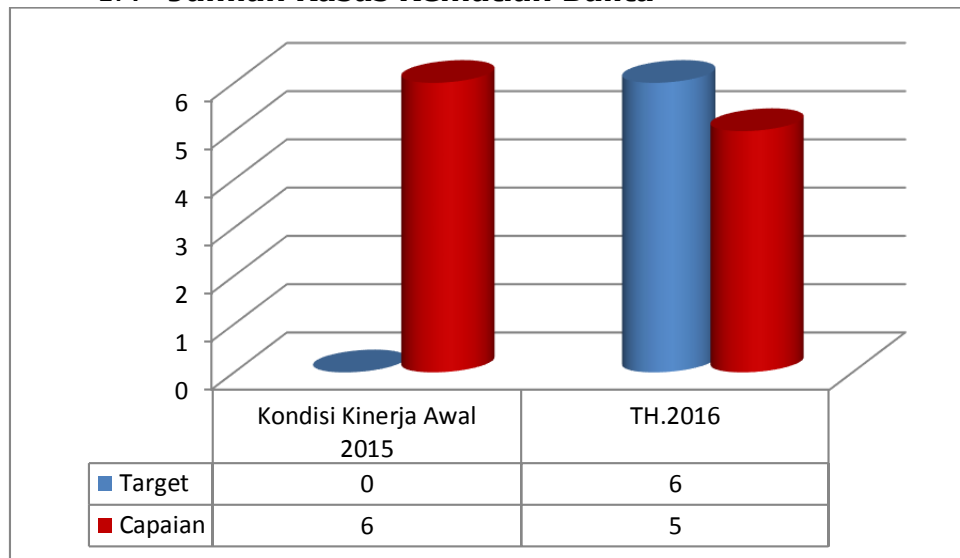


Sumber : Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan KB

Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) adalah jumlah neonatal yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 kali yaitu KN1 (24 jam-2hari), KN2 (3-7hari) dan KN3 (8-28hari). Presentase KN Lengkap Kabupaten Bintan tahun 2016 sebesar 98,65% atau

melebihi dari target yaitu 98% yang juga merupakan capaian tahun 2015.

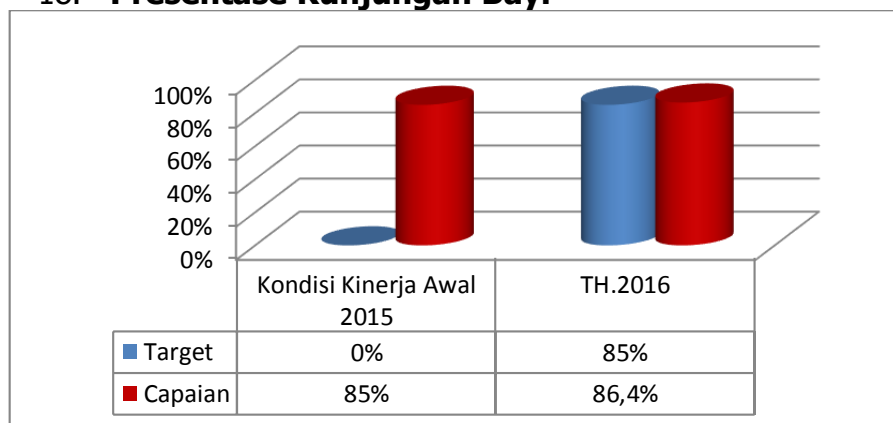
17. Jumlah Kasus Kematian Balita



Sumber : Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan KB

Jumlah Kasus Kematian Balita di Kabupaten Bintan tahun 2016 sebesar 1,6 per 1.000 Kelahiran Hidup (5 kasus), bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan yaitu : 1,31 per 1.000 KH (2012) dan 2,63 per 1000 KH (2013), Angka tersebut telah sesuai target RPJMD 2016 yaitu 3 per 1.000 KH. Dari 5 Kasus Kematian Balita di Kabupaten Bintan terjadi di UPTD Puskesmas Toapaya 1 orang, UPTD Puskesmas Tambelan 4 orang, bila ditelusuri dari penyebab kematian anak balita tersebut tersebut adalah sebagai berikut : DBD 1 Kasus, Dehidrasi berat 1 kasus, Sepsis 1 kasus dan lain-lain 2 kasus. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi tersebut adalah : (a) Memantapkan pelaksanaan kelas ibu Balita dan SDIDTK, dan (c) Kampanye ASI eksklusif.

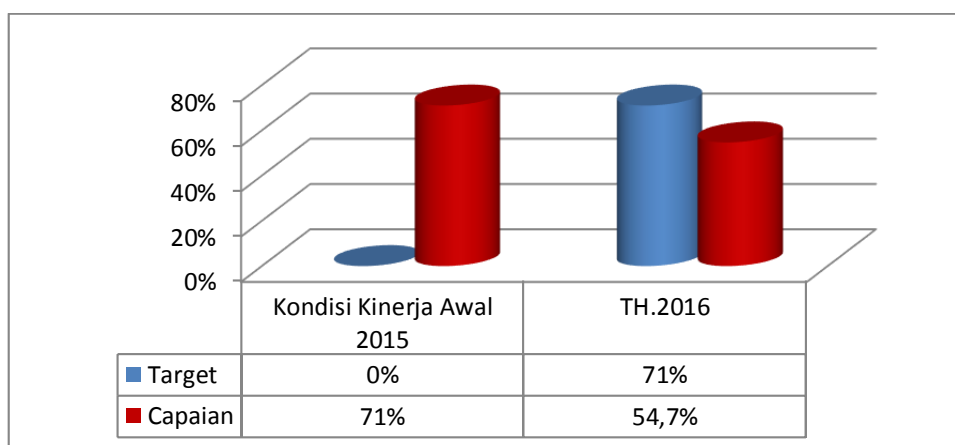
18. Presentase Kunjungan Bayi



Sumber : Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan KB

Cakupan kunjungan Bayi di Kabupaten Bintan pada tahun 2016 sebesar 86,4 persen, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 85,75 persen, sedangkan target cakupan kunjungan bayi dalam RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2016 adalah 85 persen (Nasional sebesar 60 persen) dengan demikian bahwa target cakupan kunjungan bayi tercapai. Peningkatan ini disebabkan karena indikator SDIDDTK salah satunya, dengan memaksimalkan kohort dan semua puskesmas mempunyai SDM yang mampu dalam pelaksanaan SDIDDTK sehingga indikator-indikator dalam cakupan kunjungan bayi dapat tercapai dengan pelayanan kesehatan sudah memenuhi pelayanan kesehatan bayi yaitu minimal bayi mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 4 kali yaitu 1 kali pada usia 29 hari sampai dengan 2 bulan, 1 kali pada usia 3 bulan, 1 kali pada usia 6 - 8 bulan, dan 1 kali pada usia 9 - 11 bulan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan bayi tersebut antara lain melalui sweeping atau kunjungan rumah dan memaksimalkan pelayanan di Posyandu dan kelas ibu balita.

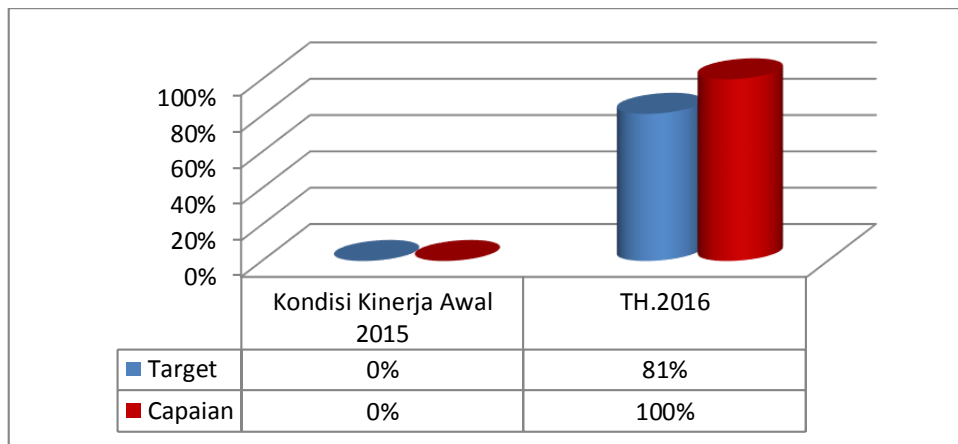
19. Presentase Kunjungan Balita



Sumber : Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan KB

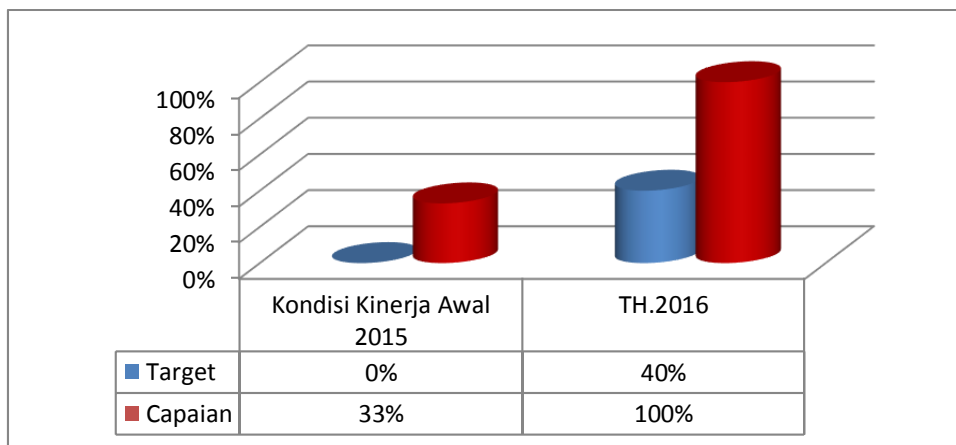
Presentase pelayanan anak Balita (sebanyak 8 kali) di Kabupaten Bintan tahun 2016 yaitu 54,7 persen, bila dibanding tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 16,4 persen yaitu : 71 persen dari 2015, pencapaian cakupan ini turun disebabkan karena pelaksanaan program Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) belum maksimal, belum melibatkan Posyandu dan PAUD serta memperoleh pemantauan pertumbuhan 8 (delapan) kali, pemantauan perkembangan minimal 2 (dua) kali dan mendapat 2 (dua) kali vitamin A. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengoptimalkan Program Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) di Posyandu dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

20. Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Neonatal Sesuai Standar



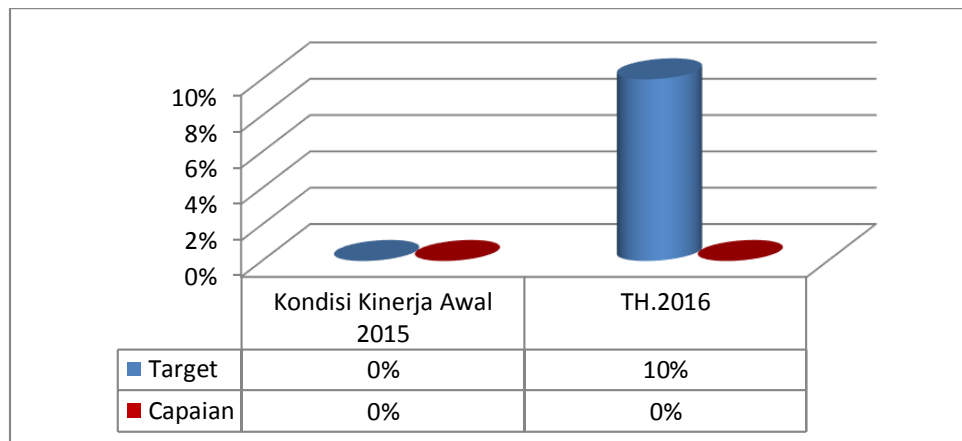
Sumber : Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Pelayanan KB

21. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan Kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10.



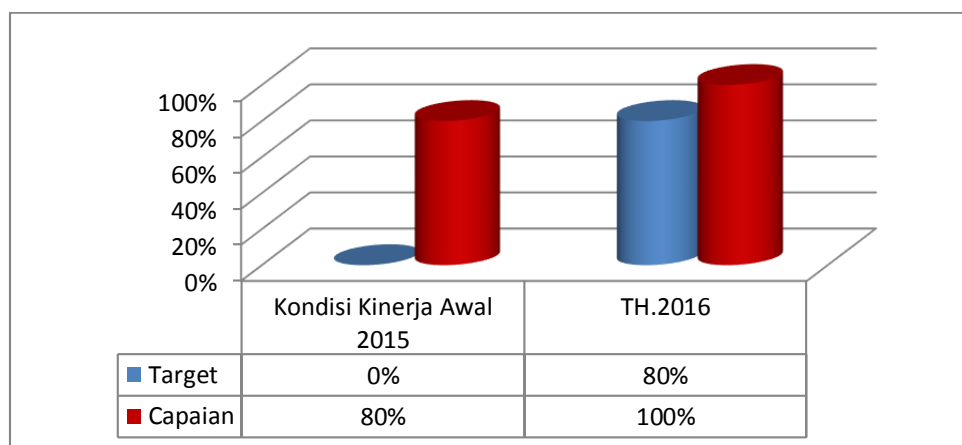
Presentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 adalah 100% atau seluruh Puskesmas yang berjumlah 15 Puskesmas atau naik dari capaian tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan karena semua puskesmas telah mengikuti Pelatihan Penjaringan, serta adanya kerja sama antara puskesmas, sekolah dan orang tua murid.

22. Persentase Remaja Puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)



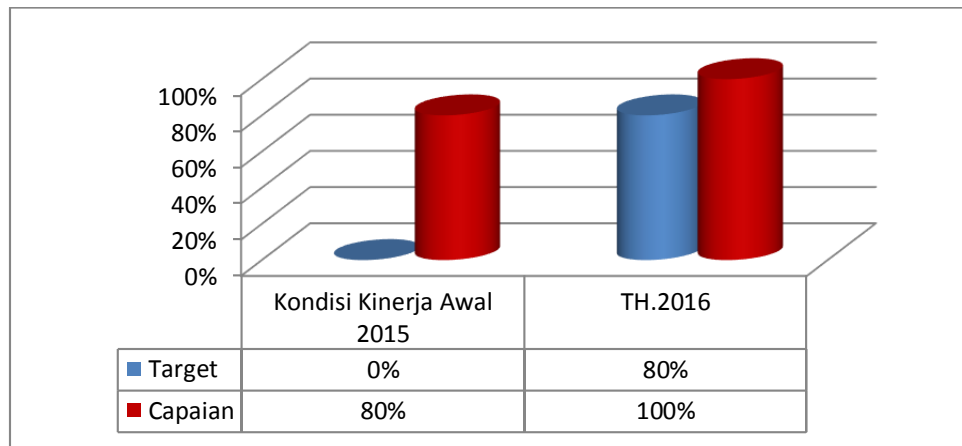
Untuk indikator Persentase remaja puteri yang mendapat tablet tambah darah pada tahun 2016 belum mencapai target 10%. Pemberian tablet tambah darah telah dilakukan oleh petugas gizi puskesmas, tetapi belum dilaksanakan pencatatan data oleh puskesmas terhadap kelompok umur remaja puteri yang mendapatkan tablet tambah darah tersebut.

23. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Kelas Ibu Hamil



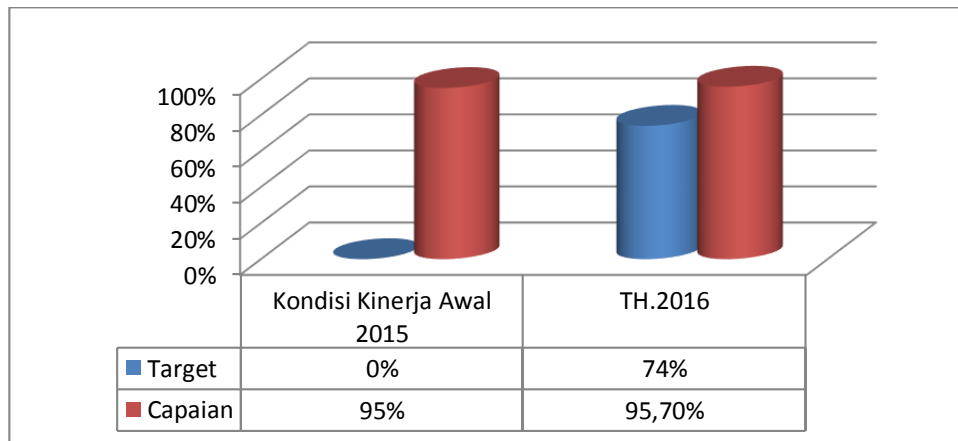
Untuk indikator puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil, capaian untuk tahun 2016 adalah 100%. Hal tersebut berarti semua puskesmas di Kabupaten Bintan yang berjumlah 15 Puskesmas telah melaksanakannya.

24. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)



Untuk indikator puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil, capaian untuk tahun 2016 adalah 100%. Hal tersebut berarti semua puskesmas di Kabupaten Bintan yang berjumlah 15 Puskesmas telah melaksanakannya.

25. Persentase ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) dengan pelayanan 10 T

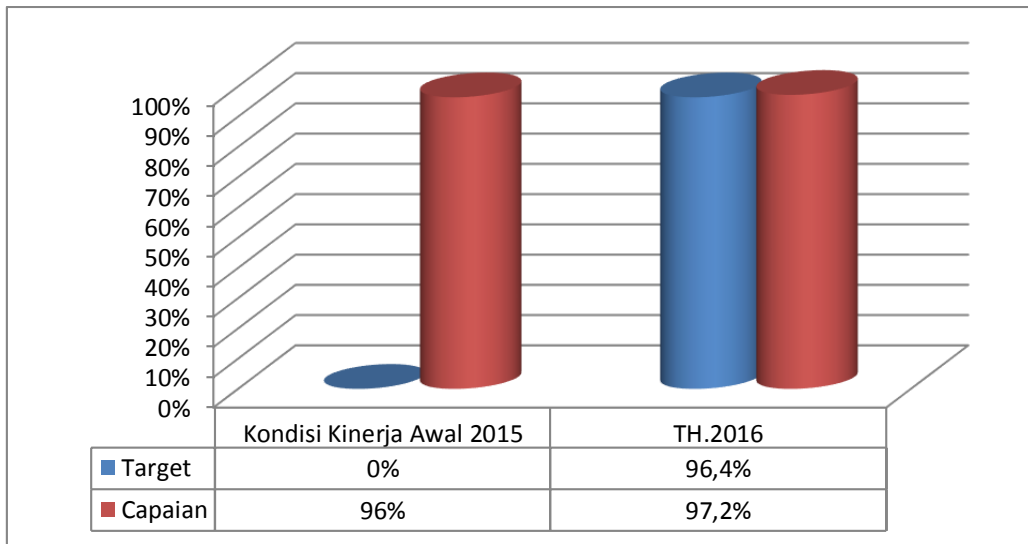


Berdasarkan pencatatan kartu Kohort Kunjungan ibu hamil, Cakupan Kunjungan Ibu Hamil 4 kali (K4) di Kabupaten Bintan tahun 2016 sebesar 95.7 persen dari 3.178 Ibu Hamil, jika dibanding capaian K4 tahun sebelumnya angka ini mengalami kenaikan, yaitu 95,4 persen (2015), angka ini diatas target RPJMD yaitu 74 persen.

Indikator diatas memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan klien dalam memeriksakan kehamilannya minimal empat kali ke tenaga kesehatan sudah tercapai memenuhi standart, adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan memenuhi standart pelayanan adalah sebagai berikut : Pemeriksaan tekanan darah, berat badan, status gizi, status imunisasi TT, tinggi fundus uteri, letak janin, pemeriksaan laboratorium sederhana (Hb, protein urine, golongan darah, Pemberian buku KIA, Fe 90 tablet, imunisasi TT sesuai status, penanganan kasus sesuai kompetensi, rujukan dan konseling efektif tentang persiapan persalinan dan pencegahan komplikasi, pengenalan tanda bahaya, perbaikan gizi ibu hamil, penyuluhan tentang inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif, KB pasca persalinan. Selain standar tersebut pelayanan antenatal harus dilaksanakan sesuai dengan SPM minimal 1 kali pada trimester I, 1 kali pada trimester II, dan 2 kali pada trimester III. Dengan memeriksakan kehamilan minimal 4 kali ke tenaga kesehatan diharapkan adanya kelainan kehamilan dapat dideteksi secara dini dan ditangani termasuk rujukannya. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian K4 mengoptimalkan pelaksanaan kelas ibu hamil, Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam peningkatan pelayanan antenatal terpadu seperti dengan bidang P2PL untuk pemeriksaan HIV dan malaria bagi ibu hamil, peningkatan kerjasama dengan organisasi IBI melalui pemeriksaan ibu hamil dan golongan darah, pembinaan dukun bayi, sedangkan upaya yang akan terus dilakukan adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kader posyandu, perangkat desa dan masyarakat dengan mengintensifkan P4K dengan stiker dan penggunaan buku KIA, meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku ibu hamil melauai kelas ibu hamil, meningkatkan kualitas

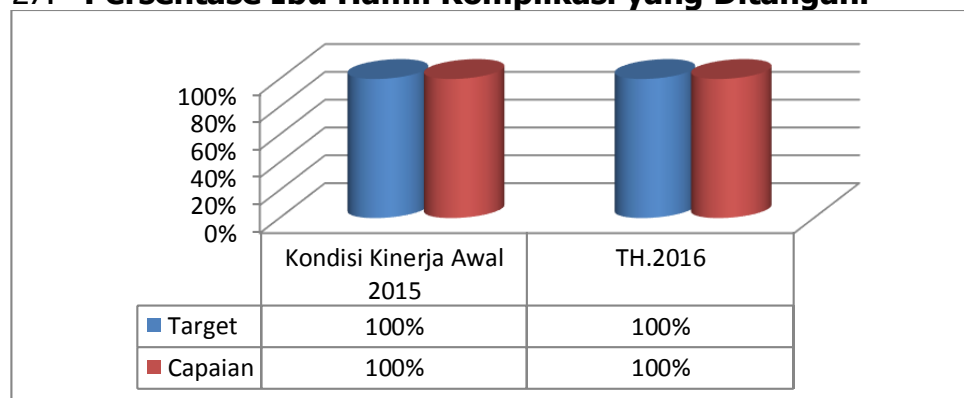
pelayanan antenatal care melalui ANC terpadu dengan bagian laboratorium, gizi dan program yang terkait.

26. Persentase Kunjungan Ibu Nifas Lengkap



Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF.3) di Kabupaten Bintan tahun 2016 sebesar 97,2 persen, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi peningkatan yaitu : 95,1 persen (2015), Angka tersebut sudah melampaui target tahun 2016 yaitu 96,4%. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan KF3 tersebut dengan aktif melakukan kunjungan pasca salin, baik persalinan Nakes maupun persalinan non Nakes.

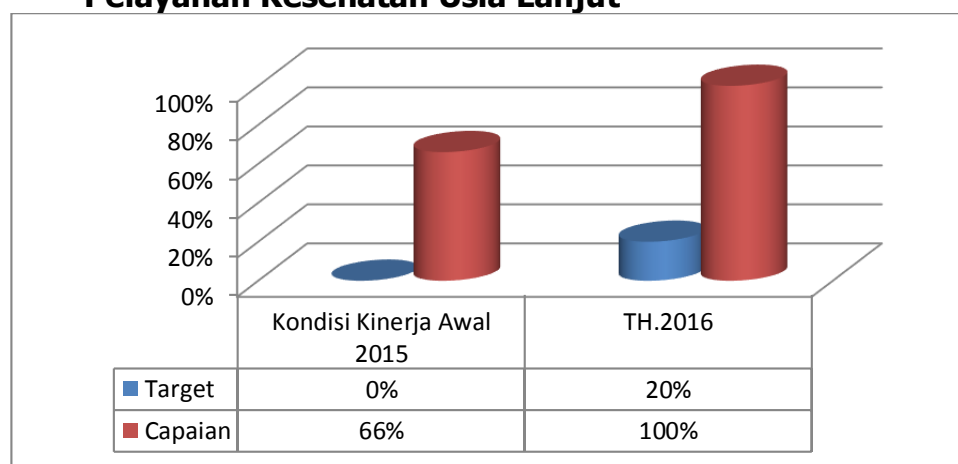
27. Persentase Ibu Hamil Komplikasi yang Ditangani



Tahun 2016, neonatal dengan komplikasi yang ditemui sebanyak 316 bayi dan semua Neonatal (100%) yang mengalami komplikasi

diberikan penanganan sesuai standart dan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai seperti Puskesmas perawatan dan Rumah Sakit. Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan penjangkaran atau mendeteksi ibu hamil yang mempunyai resiko sedini mungkin, Meningkatkan kompetensi tenaga Kesehatan terutama penolong persalinan (Bidan) melalui bimbingan teknis dan pelatihan.

28. **Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut**



Sumber : Seksi Usila dan Remaja Tahun 2016

Berdasarkan grafik diatas persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia lanjut pada tahun 2016 yaitu sebanyak 15 Puskesmas atau 100%, hal tersebut sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan tahun 2015 dimana hanya 10 Puskesmas atau 66% saja yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia lanjut. Walaupun telah seluruh Puskesmas di Kabupaten Bintan telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia lanjut, namun jika dinilai dari kualitas, dan intensitas pelaksanaan kegiatan dimaksud masih belum maksimal. Kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan lansia dilakukan di Posyandu maupun di Puskesmas. Kegiatan meliputi pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan gizi, senam usila,

pemeriksaan kesehatan, pembinaan mental dan rekreasi serta kegiatan lainnya. Untuk meningkatkan atau memaksimalkan pelayanan kesehatan usia lanjut maka sangat diperlukan kerjasama lintas program dan profesi seperti, dokter, perawat, bidan, analis laboratorium, dan apoteker dalam melakukan penyuluhan baik di dalam gedung maupun diluar gedung.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Akses untuk mendapatkan informasi kesehatan reproduksi bagi remaja banyak yang tertutup
- b. Masih adanya kasus balita gizi buruk dan balita kurang gizi baru setiap tahunnya dengan prevalensi tetap dan cenderung meningkat.
- c. Masih kurangnya partisipasi masyarakat membawa balita rutin ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balitanya.
- d. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Pemberian Makanan Bayi seperti Anak, ASI eksklusif dan MP-ASI.
- e. Masih ditemukannya kekeliruan dalam penimbangan dan pengukuran balita oleh kader posyandu serta pencatatan dan pelaporan data baik oleh kader Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas.
- f. Sebagian besar Puskesmas tidak mempunyai ahli gizi.
- g. Pemanfaatan dana Jampersal belum maksimal karena terbatasnya jenis kegiatan yang dapat diakomodir dengan dana tersebut sesuai juknis DAK non Fisik.
- h. Tidak aktifnya Tim PONED yang sudah ada dikerenakan personil tim tidak lengkap
- i. Sarana dan prasarana Polindes yang tidak memadai sebagai tempat pertolongan persalinan dan pemasangan MKJP

- j. Kurangnya kompetensi bidan desa dalam melakukan pelayanan kebidanan terutama bidan keluarga
- k. Rendahnya minat PUS untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang
- l. Tidak adanya keluarga yang mendampingi Lansia untuk mengikuti kegiatan Posyandu setiap bulan
- m. Belum semua Puskesmas dan sekolah memiliki tenaga terlatih PKPR dan konselor sebaya

2) Solusi

- a. Melakukan kampanye dan penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja dengan Film Film/Video Komunitas. Strategi ini kedepannya perlu ditingkatkan mengingat Output yang didapatkan cukup efektif karena remaja cenderung akan lebih merespon dan tertarik untuk belajar tentang kesehatan reproduksi nya melalui media film dan video.
- b. Pemberian pengetahuan dasar kesehatan reproduksi kepada remaja agar mereka mempunyai kesehatan reproduksi yang baik. Pengetahuan yang diberikan antara lain terkait:
 - Tumbuh kembang remaja: perubahan fisik/psikis pada remaja, masa subur, anemi dan kesehatan reproduksi
 - Kehamilan dan melahirkan: usia ideal untuk hamil, bahaya hamil pada usia muda, berbagai aspek kehamilan tak diinginkan (KTD) dan abortus
 - Pendidikan seks bagi remaja: pengertian seks, perilaku seksual, akibat pendidikan seks dan keragaman seks
 - Penyakit menular seksual dan HIV/AIDS
 - Kekerasan seksual dan bagaimana menghindarinya
 - Bahaya narkoba dan miras pada kesehatan reproduksi
 - Pengaruh sosial dan media terhadap perilaku seksual

- c. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan balita gizi buruk melalui pembinaan gizi secara terus menerus, pemberian PMT pemulihan dan perawatan khusus gizi buruk
- d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana, pemahaman program dan pembinaan yang berkesinambungan kepada kader, masyarakat dan sector terkait
- e. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan kader dan petugas dalam mendukung surveilans gizi agar tersedia data yang akurat
- f. Merencanakan pendidikan dan pelatihan PONEK untuk melengkapi personil yang kosong
- g. Melakukan penyuluhan ke Pasangan Usia Subur (PUS)/Wanita Usia Subur (WUS) tentang KB tentang MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)
- h. Meningkatkan kompetensi bidan di desa melalui pelatihan penanganan persalinan dan seminar
- i. Memberikan informasi tentang kesehatan lansia bagi keluarga dan masyarakat dilingkungan lansia berada sehingga mampu mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan lansia
- j. Meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan dan pembinaan bagi kader Posyandu Lansia untuk memantau dan menilai kemajuan lansia setiap bulan
- k. Melaksanakan pelatihan pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) bagi tenaga kesehatan di Puskesmas dan Konselor sebaya di setiap SMP dan SMA sederajat

4) **Program Pengendalian Penyakit**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui 10 (sepuluh) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar

Rp.930.479.984,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.928.699.786,- atau 99,81%. Outcome Meningkatnya Pengendalian Penyakit.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.503.654,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.86.434.875,- atau 99,92%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB penyakit melalui penyelidikan epidemiologi < 24 jam, terlaksananya evaluasi **EWARS (Early Warning Alert Response System)**, tersedianya operasional surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB.

(2) **Peningkatan Imunisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.356.650,- dengan realisasi sebesar Rp95.281.650,- atau 99,92%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya imunisasi dasar lengkap melalui evaluasi program imunisasi meliputi koordinasi BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah), pendataan bayi dan balita, sosialisasi penggunaan dan perawatan cold chain.

(3) **Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit TBC**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.098.980,- dengan realisasi sebesar Rp.65.048.210,- atau 99,92%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Penanggulangan Penyakit Menular TBC di 10 Kecamatan di Kabupaten Bintan dan 15 Puskesmas, 2 Rumah Sakit dan 1 Lapas dengan melakukan penjarangan suspek TB baik di dalam

maupun di luar gedung, Meningkatkan jejaring internal tiap unit pelayanan kesehatan maupun jejaring eksternal antara UPK dengan melibatkan petugas pustu, polindes, kader, PKK, tokoh masyarakat, klinik swasta maupun DPS yang ada di wilayah Kabupaten Bintan, melakukan survey kontak serumah terhadap setiap penderita TB BTA Postif, pengembangan Kemitraan dan jejaring internal maupun jejaring eksternal, khususnya ke Lapas, Rumah Sakit Tanjung Uban dan Rumah Sakit Bintan melalui penandatanganan MoU/Nota Kesefahaman tentang penerapan strategi DOTS di UPK tersebut, melakukan skrining TB pada setiap WBP baru, melakukan sosialisasi dan AKMS TB ke tingkat desa dengan melibatkan anggota TNI yang telah mendapatkan pelatihan sebagai kader TB serta dengan mendekatkan akses layanan pengobatan TB ke masyarakat dengan menempatkan OAT di unit pelayanan kesehatan yang dekat dengan domisili atau tempat tinggal pasien TB, setiap pasien TB di dampingi oleh PMO dimana PMO tersebut dipilih sendiri oleh pasien dan disetujui oleh petugas kesehatan, skrining HIV pada setiap pasien TB juga dilakukan mengingat TB merupakan infeksi oportunistik terbesar bagi ODHA, begitu juga sebaliknya semua ODHA dilakukan kaji status TB.

(4) **Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit DBD**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.299.984; dengan realisasi sebesar Rp.149.959.500; atau 99,77%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya penyelidikan epidemiologi pada 372 kasus, terlaksananya fogging focus (pengasapan) di 372 titik, terlaksananya abatesasi secara berkala oleh para Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

(5) **Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Diare**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.488.743; dengan realisasi sebesar Rp.35.413.400; atau 99,79%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi diare, terlaksananya bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi program penanggulangan dan pemberantasan penyakit diare pada 15 pengelola program Diare.

(6) **Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Pneumonia**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.611.663; dengan realisasi sebesar Rp.38.283.525; atau 99,15%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi penyakit pneumonia dan terlaksananya evaluasi program penanggulangan dan pemberantasan penyakit pneumonia oleh 15 pengelola program pneumonia.

(7) **Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Klinik Infeksi Menular Seksual (IMS)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.92.176.631; dengan realisasi sebesar Rp.92.150.300; atau 99,97%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan kesehatan di klinik IMS maupun Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) dan mobile Voluntary Counselling and Testing (VCT).

(8) **Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Malaria**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.395.877; dengan realisasi sebesar Rp.200.317.701; atau 99,96%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya Mass Fever Survey (MFS), terlaksananya Mass Blood Survey (MBS), terlaksananya penyemprotan rumah dan larvaciding,

tersedianya bahan kimia fcam untuk pencegahan penyakit malaria.

(9) **Partisipasi Komisi penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS**

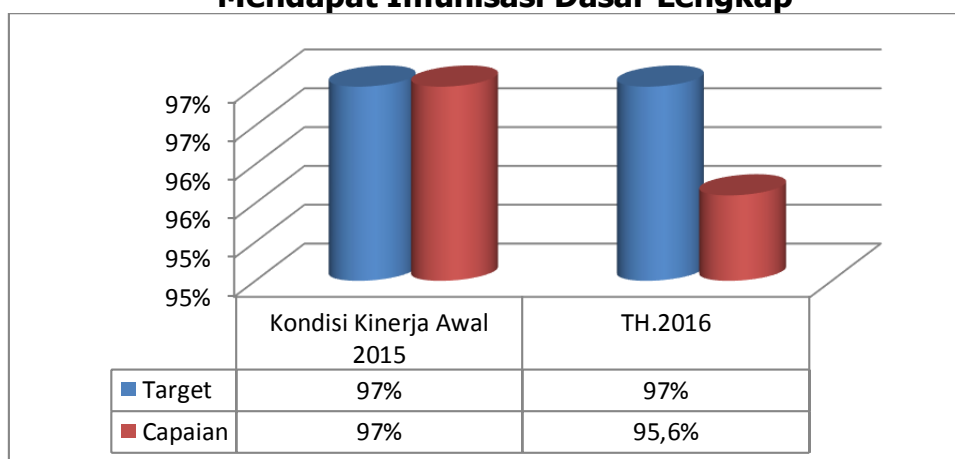
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.123.319.082; dengan realisasi sebesar Rp.123.206.225; atau 99,91%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya operasional KPAD, terlaksananya sosialisasi HIV AIDS bagi kelompok nelayan, terlaksananya sosialisasi HIV AIDS di daerah berisiko dan terlaksananya kampanye hari AIDS sedunia.

(10) **Penanggulangan Pemberantasan Penyakit Filariasis**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.228.720; dengan realisasi sebesar Rp.42.604.400; atau 98.56%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian obat massal pencegahan (POMP) penyakit Filariasis bagi 76.625 jiwa atau berkisar 76.62% di 10 kecamatan.

Capaian kinerja tahun 2016 untuk program ini antara lain :

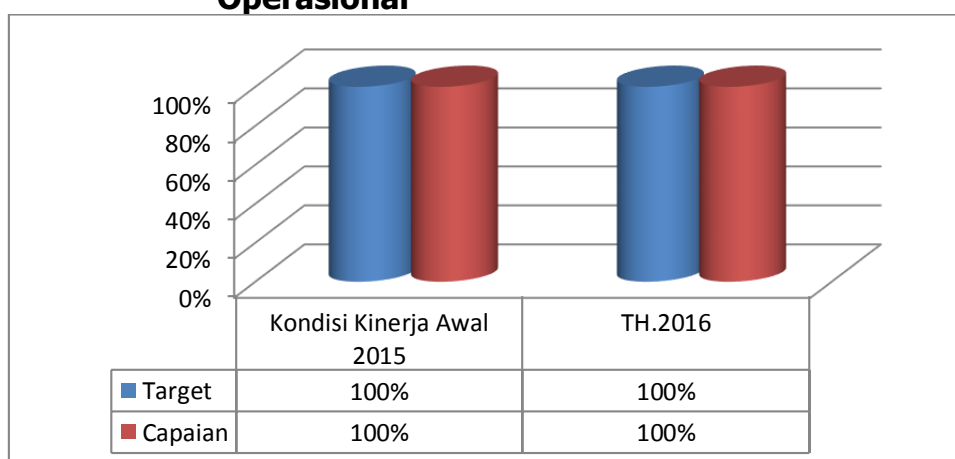
1. **Persentase Anak Usia 0 Sampai 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap**



Sumber : Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

Imunisasi merupakan salah satu tindakan terbukti sangat cost effective (murah), karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi kejadian sakit, cacat, dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Dalam Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi dan pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Penyelenggaraan imunisasi tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.42 Tahun 2013. Program imunisasi mewajibkan setiap bayi (usia 0-11 bulan) mendapatkan imunisasi dasar lengkap (IDL) yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-Hib, 4 dosis polio tetes dan 1 dosis campak. Capaian anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap (IDL). Berdasarkan grafik diatas pencapaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) secara Kabupaten belum tercapai (< 97%) hal ini dikarenakan ada beberapa bayi yang pindah sebelum imunisasinya lengkap dan juga ada bayi yang belum lengkap Imunisasinya. Sedangkan apabila berdasarkan target dari propinsi dan Nasional capaian IDL Kabupaten Bintan telah mencapai target (>91,5%)

2. **Persentase Hasil Pemeriksaan Haji (3) Bulan Sebelum Operasional**

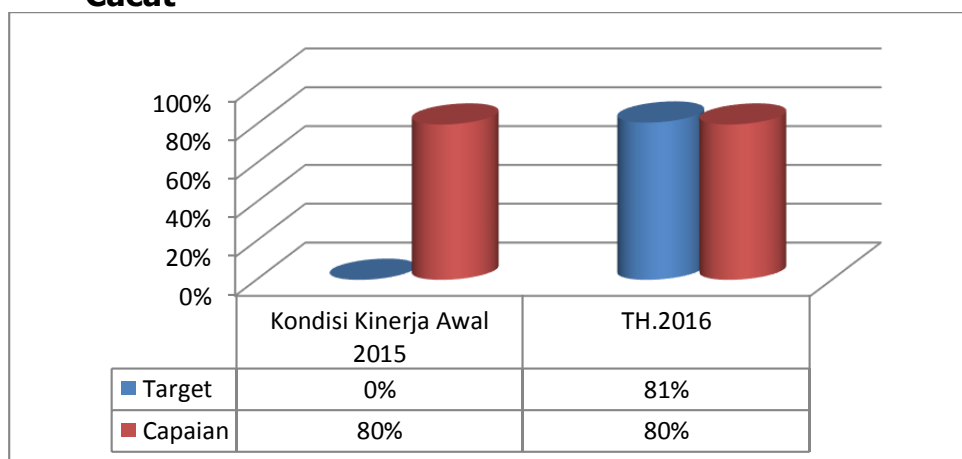


Sumber : Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

Ibadah haji mensyaratkan kesanggupan (Istitho'ah) kesehatan secara fisik dan jiwa, selain ekonomi dan ilmu. Untuk memenuhi ketentuan syar'i dimaksud, perlu upaya pembinaan kesehatan secara dini, intensif dan berkesinambungan. Karenanya, pemeriksaan kesehatan diperlukan sebagai alat untuk mengetahui kondisi kesehatan jemaah haji. Apakah dalam keadaan sehat, sakit atau memiliki keterbatasan. Setiap jemaah yang memenuhi syarat juga diberikan imunisasi Meningitis meningokokus serta imunisasi Influenza untuk mencegah penularan Meningitis dan Flu Baru A H1N1 karena ancaman penularan masih sangat tinggi.

Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji dilaksanakan pada 2 tahap di rumah sakit atau puskesmas yang memenuhi persyaratan. Di Kabupaten Bintan, pemeriksaan kesehatan akan dilaksanakan di puskesmas Tanjung Uban dan Puskesmas Kijang. Jemaah Calon Haji Kabupaten Bintan pada Tahun 2016 berjumlah 34 orang dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan yaitu pemeriksaan tahap awal bulan Februari dan Pemeriksaan Lanjutan beserta pemberian vaksin meningitis dan influenza pada bulan Juli tahun 2016

3. **Persentase Cakupan Penemuan Kasus Baru Kusta Tanpa Cacat**



Sumber : Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

Persentase Cakupan penemuan Kasus Baru Kusta tanpa Cacat pada tahun 2016 sebesar 80% nilai tersebut sama dengan tahun 2015 yang lalu, besarnya Persentase Cakupan penemuan Kasus Baru Kusta tanpa Cacat disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pengobatan sangat tinggi disamping seringnya dilakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sehingga masyarakat mengerti dan memahami tanda dan gejala penyakit kusta, penderita yang ditemukan diobati sesuai dengan tipe kustanya yaitu tipe PB lamanya pengobatan selama 6 bulan dan tipe MB diobati selama 12 bulan, jika penderita kusta yang ditemukan dan diobati secara dini hal ini bisa mencegah terjadinya kecacatan, baik cacat tingkat 1 maupun cacat tingkat 2. Sedangkan pada tahun 2015 – 2016 penderita masih tetap ditemukan dan diobati.

b. **Permasalahan dan Solusi**

1) **Permasalahan**

- a. Belum semuanya Puskesmas menggunakan cold chain vaksin yang standart sebagaimana di rekomendasikan oleh WHO yaitu buka atas
- b. Penetapan sasaran menggunakan data estimasi sehingga data sasaran cukup tinggi berbanding data sebenarnya (data riil)
- c. Pemborosan penggunaan salah satu antigen (vaksin) dalam kegiatan Posyandu
- d. Pelaksanaan sosialisasi POMP filariasis masih belum maksimal terbatasnya anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan
- e. Terdapat informasi yang masih keliru tentang DBD dan penanggulangannya
- f. Adanya perbedaan persepsi definisi operasional (DO) pneumoni di Puskesmas

- g. Perubahan iklim yang tidak terkendali dan mobilitas penduduk yang tinggi dari dan ke daerah endemis
- h. Rendahnya pemahaman petugas di Puskesmas tentang tatalaksana diare

2) **Solusi**

- a. Penyediaan cold chain untuk Puskesmas sesuai dengan rekomendasi WHO yaitu buka atas
- b. Permintaan vaksin dihitung sesuai kebutuhan (sasaran) Posyandu untuk menghindari pemborosan dalam penggunaan vaksin
- c. Penggunaan data riil dalam menetapkan sasaran untuk meminimalkan kesenjangan data sasaran
- d. Peningkatan Anggaran khususnya bagi pelaksanaan kegiatan POMP Filariasis.
- e. Mengintensifkan sosialisasi agar masyarakat mendapat informasi yang menyeluruh tentang DBD dan cara penanggulangannya
- f. Persamaan persepsi definisi operasional (DO) pneumoni dengan pihak-pihak terkait (dokter, pengelola program, petugas poli/ yang sudah dilatih MTBS) dalam rapat bulanan
- g. Perlu adanya pengawasan dan intervensi terhadap tempat yang berpotensi menjadi perindukan nyamuk malaria
- h. Perlunya penyegaran bagi pengelola program diare di Puskesmas tentang tata laksana kasus diare.

5) **Program Penyehatan Lingkungan**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.256.904.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.239.704.270,- atau 93,30%. Outcome Meningkatnya Pengendalian Penyakit.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Peningkatan Upaya Penyehatan Lingkungan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi Rp.39.987.487,- realisasi sebesar Rp.37.240.180,- atau 93,13%. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan pada tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten Bintan sebanyak 670 buah, terdiri dari; 174 buah rumah makan/restoran, 57 buah jasa boga, 40 buah depot air minum isi ulang, 399 buah makanan jajanan. Sedangkan 137 tempat pengelolaan makanan tidak memenuhi syarat kesehatan karena sebagian besar TPM belum memiliki sarana sanitasi dasar layak, seperti; ketersediaan air bersih untuk cuci tangan, ketersediaan tempat sampah dan ketersediaan toilet/WC.

(2) Peningkatan Dan Pemantapan Penyelenggaraan Akselerasi Desa Sehat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi Rp.95.891.491,- realisasi sebesar Rp.95.559.090,- atau 99,65%. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah terbangunnya sarana air minum berupa sumur gali sejumlah 8 (delapan) unit yang tersebar di 3 kelurahan dan 1 desa yaitu; Kelurahan Toapaya Asri 2 unit, Kelurahan Kawal 2 unit dan Kelurahan Tembeling 2 unit serta Desa Air Klubi 2 unit.

(3) Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

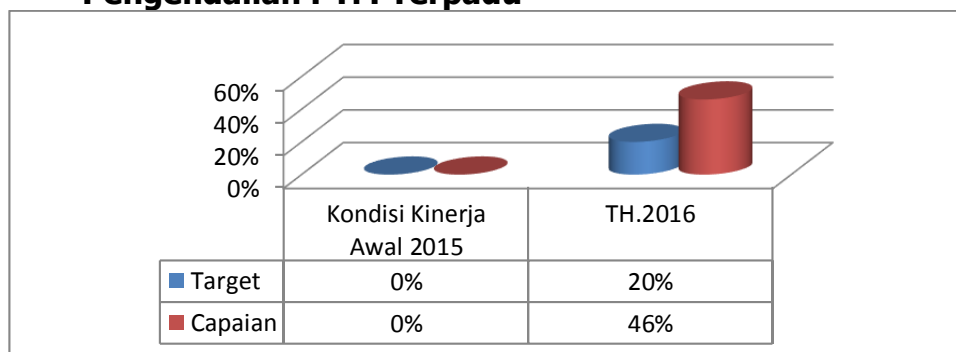
Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi Rp.77.155.555,- realisasi sebesar Rp.63.731.180,- atau sebesar 82,6%. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah sebanyak 19 desa/ kelurahan di Kabupaten Bintan yang telah menyatakan sebagai Desa/ Kelurahan ODF (Open Defecation Free)/ Bebas Buang Air Besar

Sembarangan, dan telah dilaksanakan proses verifikasi Desa/ Kel. ODF yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan atas laporan yang telah disampaikan serta melakukan kunjungan lapangan oleh tim Verifikasi Desa/ Kelurahan ODF.

(4) **Pembinaan Teknik Tempat Prngelolaan Makanan Dan Minuman**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.870.167,- realisasi sebesar Rp.43.173.820,- atau 98,41%. Output pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2016, jumlah tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten Bintan sebanyak 670 buah, terdiri dari; 174 buah rumah makan/restoran, 57 buah jasa boga, 40 buah depot air minum isi ulang, 399 buah makanan jajanan. Sedangkan 137 tempat pengelolaan makanan tidak memenuhi syarat kesehatan karena sebagian besar TPM belum memiliki sarana sanitasi dasar layak, seperti; ketersediaan air bersih untuk cuci tangan, ketersediaan tempat sampah dan ketersediaan toilet/WC. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan melalui pertemuan sosialisasi hygiene dan sanitasi bagi penanggungjawab dan penjamah makanan pada rumah makan/restoran, jasa boga dan depot air minum isi ulang.

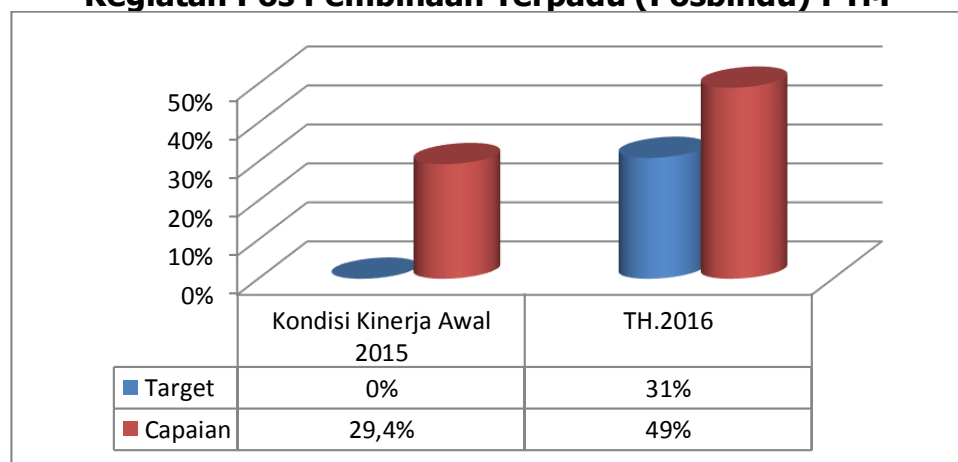
1. **Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu**



Sumber : Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dapat melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin dan periodic. Faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) meliputi merokok, konsumsi minuman beralkohol, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, obesitas stress, hipertensi, hiperglikemi, hiperkolesterol serta menindak lanjuti secara dini faktor risiko yang ditemukan melalui konseling kesehatan dan segera merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Posbindu terdiri dari posbindu dasar dan posbindu utama. Di Kabupaten Bintan puskesmas yang telah membentuk posbindu PTM dari 15 puskesmas hanya 7 puskesmas (46%) yang telah membentuk posbindu yaitu : Puskesmas Kijang, Puskesmas Mantang, Puskesmas Kelong, Puskesmas Toapaya, Puskesmas Kawal, Puskesmas Teluk Bintan, Puskesmas Kuala Sempang.

2. **Persentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM**

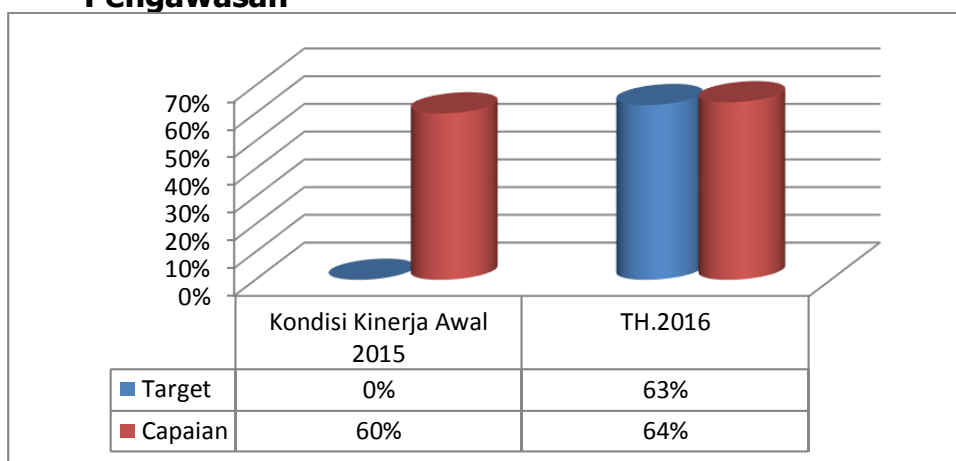


Sumber : Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dapat melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin dan periodic. Faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) meliputi merokok, konsumsi minuman beralkohol, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, obesitas stress, hipertensi, hiperglikemi, hiperkolesterol serta menindak

lanjuti secara dini factor risiko yang ditemukan melalui konseling kesehatan dan segera merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Posbindu terdiri dari posbindu dasar dan posbindu utama. Di Kabupaten Bintan puskesmas yang telah membentuk posbindu PTM dari 51 desa yang telah memiliki posbindu berjumlah 25 desa (49%).

3. **Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan Pengawasan**

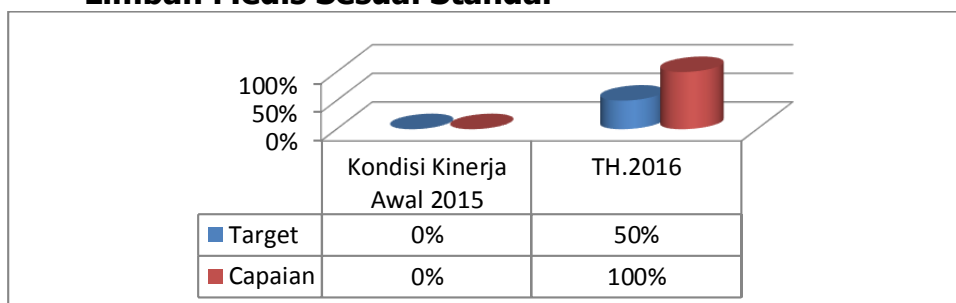


Sumber : Seksi Penyehatan Lingkungan

Persentase penduduk yang menggunakan air bersih terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat untuk menggunakan air bersih/ minum tinggi dan sejalan dengan pelaksanaan program pembangunan sarana air bersih/minum terutama untuk daerah yang rawan air dan penyakit yang ditimbulkan oleh penggunaan air minum, melalui sumber pendanaan pembangunan air bersih/ minum yang berasal dari dana APBN dan APBD Kabupaten/Provinsi. Pada tahun 2016 penduduk yang menggunakan akses air bersih berjumlah 134.802 jiwa yang terdiri dari 20.845 unit sarana sumur gali terlindung dengan jumlah pengguna 98.837 jiwa (73%), 28 unit jaringan perpipaan (PDAM dan BP-SPAM) dengan pengguna 35.965 jiwa (26,6%). Sebagian besar penduduk masih menggunakan air bersih yang bersumber dari Sumur Gali (SGL) yang tidak memenuhi syarat kesehatan sesuai

dengan Permenkes Nomor 461 Tahun 1990 Tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih, antara lain: fisik meliputi warna, kekeruhan, bau, mikrobiologi meliputi coliform dan total coliform dan kimia meliputi kadar magnesium, besi, aluminium, nitrat/nitrit, arsenic dan lain-lain, maka dari itu perlu dilakukan pengawasan kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat, bentuk kegiatan pengawasan meliputi Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dan uji Petik Sampel air minum, dari total sarana air bersih/minum yaitu 19.921 unit 64% telah dilakukan pengawasan yaitu sebesar 12.749 unit.

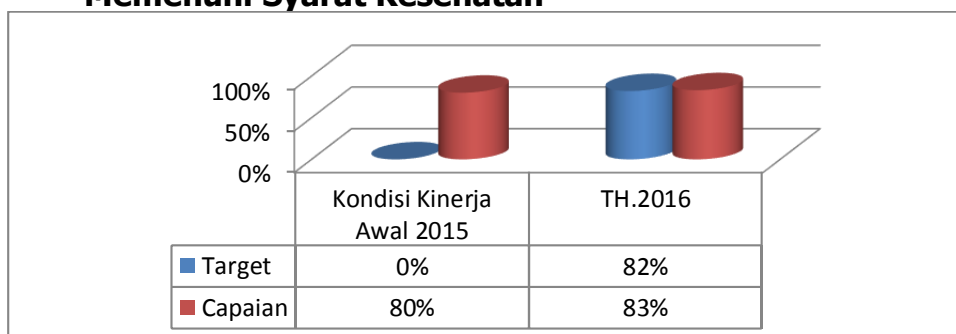
4. **Persentase Rumah Sakit Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar**



Sumber : Seksi Penyehatan Lingkungan

Kabupaten Bintan memiliki 1 Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan yang diresmikan pada tahun 2012 dan untuk pengelolaan limbah padat dibakar dengan menggunakan incenerator dengan kondisi yang baik dan untuk pengelolaan limbah cair dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan tenaga operator 1 orang.

5. **Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (Tpm) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan**



Sumber : Seksi Penyehatan Lingkungan

Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Kabupaten Bintan tahun 2016 dari 807 buah terdapat 670 TPM yang memenuhi syarat kesehatan atau sekitar 83 persen. Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi persyaratan mengalami peningkatan, hal ini disebabkan tingkat kesadaran penanggung jawab dan pengelola rumah makan/restoran dan jasa boga semakin meningkat serta pembinaan secara berkala dilakukan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. Pada tahun 2016, jumlah tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten Bintan sebanyak 670 buah, terdiri dari; 174 buah rumah makan/restoran, 57 buah jasa boga, 40 buah depot air minum isi ulang, 399 buah makanan jajanan. Sedangkan 137 tempat pengelolaan makanan tidak memenuhi syarat kesehatan karena sebagian besar TPM belum memiliki sarana sanitasi dasar layak, seperti; ketersediaan air bersih untuk cuci tangan, ketersediaan tempat sampah dan ketersediaan toilet/WC. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan melalui pertemuan sosialisasi hygiene dan sanitasi bagi penanggungjawab dan penjamah makanan pada rumah makan/restoran, jasa boga dan depot air minum isi ulang.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Masih banyaknya rumah penduduk yang masih berupa bangunan semi permanen yang dibangun di pesisir pantai dan tidak membuat sarana pembuangan limbah rumah tangga/ sarana sanitasi dasar, kurang tersedianya sarana air minum masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan, serta tingkat kepadatan penghuni rumah.
- b. Masih adanya masyarakat yang berperilaku buang air besar sembarangan yaitu di kebun atau parit, dan pada umumnya

masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai masih menggunakan jamban sederhana (cemplung) yang tidak memenuhi syarat kesehatan karena kotoran/ tinja langsung dibuang ke laut, seperti jamban di atas laut, jarak jamban dengan septictank dekat dengan sumber air minum, hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;

- c. Pada umumnya dapur pengolahan makanan tidak memenuhi syarat kesehatan
- d. Pemeriksaan kesehatan karyawan minimal 6 bulan sekali belum dilaksanakan
- e. Kondisi sanitasi yang masih kurang baik, seperti : masih terdapatnya sampah berserakan di beberapa TPM
- f. Masih adanya TPM yang belum memiliki sarana sanitasi dasar/ kurang memenuhi syarat kesehatan seperti ketersediaan Jamban Sehat dan Tempat Cuci Tangan
- g. Personal Hygiene yang masih kurang
- h. Penggunaan perlengkapan kerja saat mengolah makanan seperti : masker, celemek, penutup kepala, sarung tangan masih belum dilaksanakan
- i. Tempat-Tempat Umum (TTU) sehat sarana dan fasilitas sanitasi masih kurang, seperti :
 - Penyediaan air bersih
 - Tempat Pembuangan Sementara/Tempat Sampah
 - Sarana pembuangan Air Limbah (SPAL)
- j. Penyakit-penyakit berbasis lingkungan seperti : Diare, Hepatitis A, keracunan makanan belum bisa ditangani sepenuhnya karena kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kurang, terbatasnya

laboratorium Dinas Kesehatan Kab. Bintan, sehingga bila ada peningkatan kasus sampel harus dirujuk ke BTKL Batam;

- k. Masih banyaknya rumah tangga yang menggunakan air bersih yang bersumber dari Sumur Gali (SGL) yang tidak memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Permenkes 461 tahun 1990 tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih, diantara : SGL yang bercincin dan tidak terlindung, SGL yang dekat septictank dan pembuangan limbah rumah tangga;

2) Solusi

- a. Pengusulan perencanaan dokumen UPL/UKL di APBD murni sehingga memberi keleluasaan kepada konsultan untuk menyiapkan dokumen ini
- b. Koordinasi intensif dengan instansi terkait tentang survey sejenis (Environment Health Risk Assessment/EHRA) dengan sasaran sanitasi dasar
- c. Dibutuhkannya pengadaan peralatan Sanitasi Test Kit, sebagai penunjang pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Tempat-tempat Umum.
- d. Perlunya penyebaran informasi terhadap masyarakat tentang rumah sehat, jamban sehat, tempat pengolahan makanan & minuman sehat, tempat-tempat umum sehat, air minum sehat serta dampak yang ditimbulkan seperti penyakit-penyakit Diare, Hepatitis A, Typus, DBD dan Malaria, seperti: Penyuluhan langsung terhadap kelompok masyarakat, Penyebaran leaflett & brosur dan Radiospot, artikel pada koran dan sebagainya
- e. Perlunya penambahan stimulan jamban sehat, rumah sehat, tempat pengolahan makanan & minuman sehat, tempat-tempat umum sehat supaya masyarakat bisa mencontoh terhadap sarana yang memenuhi syarat kesehatan

- f. Perlunya peningkatan sarana dan fasilitas laboratorium kesehatan lingkungan, seperti : penambahan alat Spectrofotometer untuk pemeriksaan kualitas air minum yang lengkap yaitu pemeriksaan fisik, kimia, bakteriologi dan radioaktif serta bangunan khusus untuk laboratorium kesehatan lingkungan
- g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas sanitasi puskesmas baik melalui pelatihan maupun peningkatan pendidikan;

6) Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.4.247.126.073,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.955.279.085,- atau 93,13%. Outcome dari program ini adalah meningkatnya Jangkauan Pelayanan Kesehatan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.816.455.373,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.754.824.985,- atau 96,61%. Output pelaksanaan kegiatan ini tersedianya sarana prasarana di 15 Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan berupa terlaksananya pekerjaan Perencanaan Rehab Pustu dan Polindes beserta pelaksanaan dan pengawasannya, tersedianya mebel untuk 15 Puskesmas.

(2) **Dana Alokasi Khusus (DAK) Pelayanan Kesehatan Dasar**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.430.670.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.200.454.100,- atau 90,53%. merupakan kegiatan yang bersumber dari 2 jenis pendanaan yaitu APBN untuk kegiatan utama berupa dana transfer dari Pusat ke Kas Daerah dan APBD sebagai pendamping. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pekerjaan pembuatan 2 unit Puskesmas Keliling Air bagi Puskesmas Mantang dan Puskesmas Numbing.

(3) **Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Sri Bintan dan Jaringannya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.262.177.183,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.190.148.494,- atau 72,53%. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan kesehatan peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Sri Bintan dan jaringannya (Pustu/Polindes). Pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, obat-obatan, bahan kimia, bahan medis habis pakai, dan alat kedokteran umum.

(4) **Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Berakit dan Jaringannya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.67.166.000,- atau 73,17%. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, obat-obatan, bahan medis habis pakai dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk 2.000 jiwa peserta

JKN di wilayah kerja Puskesmas Berakit dan Jaringannya (Pustu/Polindes).

(5) **Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Mantang dan Jaringannya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.175.794.852,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.166.834.744,- atau 94,9%. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, obat-obatan, bahan medis habis pakai dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk 1.578 jiwa peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Mantang dan Jaringannya (Pustu/Polindes).

(6) **Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Kelong dan Jaringannya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.336.096.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.277.034.232,- atau 82,43%. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, bahan bakar minyak, obat-obatan, bahan medis habis pakai dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk 2.372 jiwa peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Kelong dan Jaringannya (Pustu/Polindes).

(7) **Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Tambelan dan Jaringannya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.302.202.928,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.204.829.500,- atau 67,78%. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium

insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, obat-obatan, bahan kimia, meubelair dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk 3.600 peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Tambelan dan Jaringannya (Pustu/Polindes).

(8) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Toapaya dan Jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.362.120.827,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.312.784.070,- atau 86,38%. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, tabung gas, obat-obatan, bahan kimia, bahan medis habis pakai dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk 3.735 jiwa peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Toapaya dan Jaringannya (Pustu/Polindes).

(9) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringannya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.196.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.183.397.844,- atau 93.57%. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, obat-obatan, bahan medis habis pakai dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk 1.687 jiwa peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringannya (Pustu/Polindes).

(10) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Sei. Lekop dan Jaringannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.252.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.220.400.537,- atau 87,46%. Output pelaksanaan

kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, bahan medis habis pakai dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk 3.500 jiwa peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Sei. Lekop dan Jaringannya (Pustu/Polindes).

(11) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya**

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.214.830.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.214.803.160,- atau 99,99%. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, bahan kimia, bahan medis habis pakai dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk 2.063 jiwa peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya (Pustu/Polindes).

(12) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Sri Bintang dan Jaringannya**

dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.550.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.800.000,- atau 46,22%. Kegiatan ini ditujukan bagi persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Sri Bintang dan Jaringannya. Output kegiatan ini adalah pembayaran honorarium insentif petugas dan pendamping PNS dan Non PNS.

(13) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Berakit dan Jaringannya**

dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%. Kegiatan ini ditujukan bagi 35 persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Berakit dan Jaringannya. Anggaran tidak dicairkan

karena pada tahun 2016 semua Ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Berakit dan Jaringannya merupakan peserta KBS dan dengan biaya mandiri.

- (14) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Mantang dan Jaringannya** dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.067.000,- atau 84,45%. Kegiatan ini ditujukan bagi persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Mantang dan Jaringannya. Output kegiatan ini adalah pembayaran honorarium insentif petugas dan pendamping PNS dan Non PNS.
- (15) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Kelong dan Jaringannya** dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.350.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.650.000,- atau 31,12%. Kegiatan ini ditujukan bagi persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Kelong dan Jaringannya. Output kegiatan ini adalah pembayaran honorarium insentif petugas dan pendamping PNS dan Non PNS.
- (16) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Tambelan dan Jaringannya** dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.37.829.000,- atau 35,03%. Kegiatan ini ditujukan bagi 60 persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Tambelan dan Jaringannya. Output kegiatan ini adalah tersedianya bahan bakar minyak dan meubelair.

- (17) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Toapaya dan Jaringannya** dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.26.175.000,- atau 42,73%. Kegiatan ini ditujukan bagi persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Toapaya. Output kegiatan ini adalah pembayaran honorarium insentif petugas.
- (18) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringannya** dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.150.000,- atau 79,44%. Kegiatan ini ditujukan bagi persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Teluk Bintan. Output kegiatan ini adalah pembayaran honorarium insentif petugas.
- (19) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Sei. Lekop dan Jaringannya** dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Lekop dan Jaringannya. Anggaran tidak dicairkan karena pada tahun 2016 semua Ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Sei. Lekop dan Jaringannya merupakan peserta KBS dan dengan biaya mandiri.
- (20) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya** dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.800.000,- atau 98%. Kegiatan ini ditujukan bagi persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Kuala

Sempang. Output kegiatan ini adalah pembayaran honorarium insentif petugas.

- (21) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BLUD Unit Kerja Puskesmas Kawal** dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.779.048.182,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.768.051.962,- atau 98,59%. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya obat-obatan, bahan kimia, bahan medis habis pakai dan terlaksananya bimbingan teknis Penyusunan Laporan Keuangan BLUD berbasis Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akutansi Keuangan (SAK).
- (22) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BLUD Unit Kerja Puskesmas Teluk Sasah** dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.548.004.196,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.525.244.916,- atau 95.85%. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah pemberian jasa pelayanan untuk pns dan non pns. Tersedianya meubelair, alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, terlaksananya operasional BLUD, tersedianya obat-obatan, bahan kimia, bahan medis, alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi dan terlaksananya 1 kegiatan bimbingan teknis Penyusunan Laporan Keuangan BLUD berbasis Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akutansi Keuangan (SAK).
- (23) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BLUD Unit Kerja Puskesmas Kijang** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.361.837.515,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.164.847.502,- atau 85,53%. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah pemberian jasa pelayanan untuk pns dan non pns. Tersedianya meubelair, alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, terlaksananya operasional BLUD dan

terlaksananya 1 kegiatan bimbingan teknis Penyusunan Laporan Keuangan BLUD berbasis Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akutansi Keuangan (SAK).

- (24) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BLUD Unit Kerja Puskesmas Tanjung Uban** dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.010.942.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.943.514.195,- atau 95,33%. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah pemberian jasa transaksi keuangan, panitia pelaksanaan kegiatan dan uang transportasi PNS. Pembayaran listrik, telepon, surat kabar, internet, cetak dan penggandaan. Tersedianya obat-obatan, bahan kimia, bahan medis, alat tulis kantor, lemari, air conditioner, personal computer, operasional BLUD dan 1 bimbingan teknis tentang Penyusunan Laporan Keuangan BLUD berbasis Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akutansi Keuangan (SAK).
- (25) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar di PPK-BLUD Unit Kerja Puskesmas Teluk Sebong** dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.879.301.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.857.508.875,- atau 97,52%. Output pelaksanaan kegiatan ini adalah pemberian jasa transaksi keuangan, panitia pelaksanaan kegiatan dan uang transportasi PNS. Pembayaran listrik, telepon, surat kabar, internet, cetak dan penggandaan, service, perawatan gedung kantor. Tersedianya obat-obatan, bahan kimia, bahan medis, alat tulis kantor, lemari, dan operasional BLUD.

b. Permasalahan dan Solusi

Belum adanya peraturan daerah tentang mekanisme pencairan dana operasional JKN yang lebih rinci dan spesifik. Solusinya adalah

menyusun peraturan daerah atau perbub tentang mekanisme pencairan dana operasional JKN.

7) Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.3.356.400.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.045.470.777,- atau 90,74%. Outcome Meningkatnya Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin

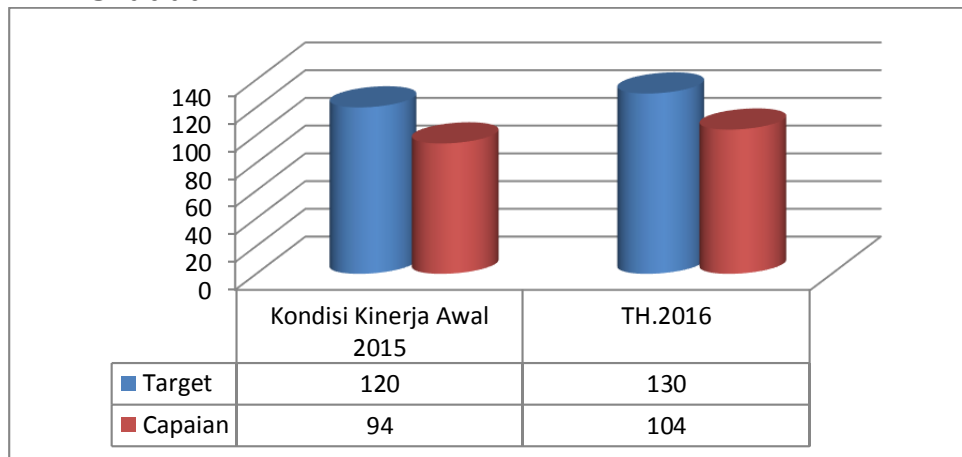
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

Kegiatan Peningkatan Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.3.356.400.000,- realisasi Rp.3.045.470.777,- atau 90,74%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya cakupan pelayanan Kesehatan bagi pasien masyarakat miskin Kabupaten Bintan tahun 2016 sebesar 4.782 kunjungan dan jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui JKN sebanyak 4.420 Jiwa. Verifikasi dan validasi data penduduk miskin oleh Dinas Sosial untuk peserta BPJS PBI tidak mencapai target disebabkan data dari Kecamatan belum masuk semua. Pada Tahun 2016 meningkat dibandingkan dari tahun 2015 bukan berarti masyarakat miskin meningkat tetapi verifikasi dan validasi data kemiskinan sudah lebih baik.

Capaian kinerja tahun 2016 untuk program ini antara lain:

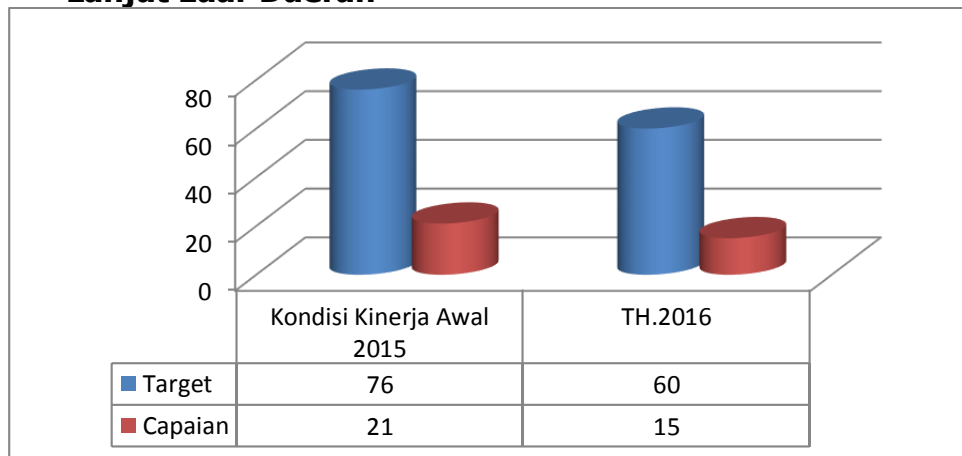
1. Jumlah Kunjungan Peserta KN Di FKTP Per 1000 Penduduk



Sumber : Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Kunjungan peserta JKN di FKTP tidak mencapai target karena pencatatan kunjungan hanya meliputi kunjungan sakit, seharusnya kunjungan sehat juga dicatat, seperti UKS, Posyandu, Kunjungan Rumah dan Konseling. Pada Tahun 2016 meningkat dibandingkan dari tahun 2015 karena targetnya meningkat, namun belum mencapai target karena belum dilakukan pencatatan kunjungan sehat.

2. Jumlah Rujukan Ke Fasilitas Kesehatan Rencana Tindak Lanjut Luar Daerah



Sumber : Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Jumlah rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Luar daerah tidak mencapai target karena pencatatan hanya pasien yang dirujuk dengan pendamping perawat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. Pasien yang berangkat sendiri tidak melapor ke Dinas Kesehatan. Pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah rujukan dibandingkan 2015, namun penurunan tersebut sangat baik berarti pasien dengan tingkat komplikasi tinggi sudah dapat ditangani dalam daerah dengan adanya RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Verifikasi dan validasi data penduduk miskin oleh Dinas Sosial untuk peserta BPJS PBI tidak mencapai target disebabkan data dari Kecamatan belum masuk semua
- b. Permasalahan lain adanya peserta yang ganda, artinya premi peserta PBI dibayar APBN maupun APBD, hal ini disebabkan data peserta PBI APBN tidak dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2) Solusi

Perlu adanya Koordinasi dan Komunikasi yang efektif dan berkesinambungan antara pihak terkait seperti; Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS, Disdukcapil, serta Camat menyangkut data peserta BPJS PBI, baik peserta baru maupun peserta lama, sehingga tidak terjadi lagi menyangkut masalah-masalah verifikasi dan validasi data serta masalah administrasi.

8) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui 5 (lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.13.348.032.591,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.12.249.165.833,-

atau 91,77%. Outcome Meningkatnya Kapasitas Kefarmasian Alat Kesehatan

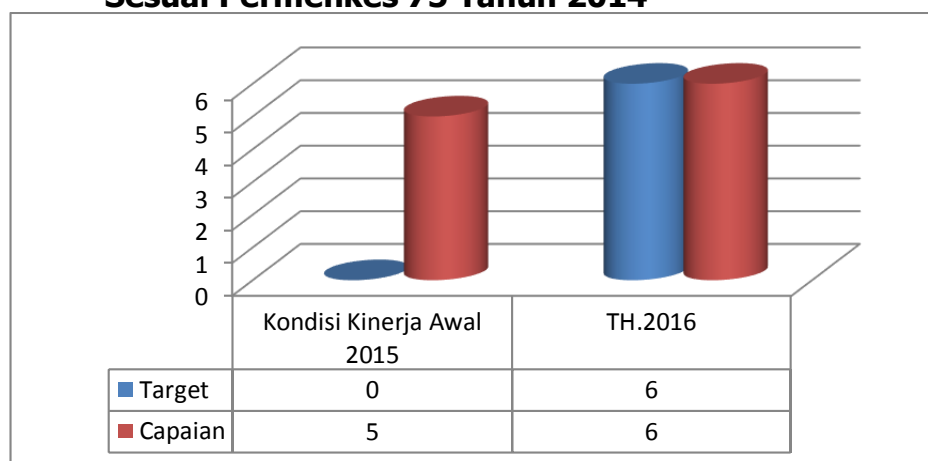
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

- (1) **Kegiatan Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan** dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.1.471.249.700 Realisasi sebesar Rp.1.260.918.080 atau 85,70%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Bintan melalui penyediaan obat dilakukan melalui mekanisme lelang sederhana sebanyak 48 item obat.
- (2) **Kegiatan Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan (DAK BINFAR)** dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.3.001.632.000 Realisasi sebesar Rp.2.253.393.670,- atau 75,07%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Bintan melalui penyediaan obat dilakukan mekanisme e-purchasing menggunakan katalog elektronik sebanyak 249 item obat dengan distributor sebanyak 50 perusahaan.
- (3) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian** dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.186.515.600 dan realisasi sebesar Rp.184.153.060 atau 98,73%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi pekerjaan kefarmasian berupa pengelolaan obat, pelayanan farmasi klinik dan peningkatan kapasitas kefarmasian serta kegiatan verifikasi dan pemusnahan obat rusak dan kadaluwarsa.

- (4) **Kegiatan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes** dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.629.527.991 dan realisasi sebesar Rp.601.612.239,- atau 95,57%. Output kegiatan ini adalah tersedianya alat kesehatan untuk Puskesmas dan jaringan diwilayah Kabupaten Bintan, yang meliputi belanja alat kedokteran Umum, dan alat kebidanan dan kedokteran kandungan.
- (5) **Kegiatan pengadaan alat kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes (DAK)** dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.059.107.300,- dan realisasi sebesar Rp.7.949.088.784,- atau 98,63%. Output kegiatan ini adalah tersedianya alat kesehatan untuk Puskesmas dan jaringan diwilayah Kabupaten Bintan, yang meliputi belanja alat laboratorium Kesehatan, alat kedokteran Umum, alat kedokteran gigi dan alat kebidanan dan kedokteran kandungan.

1. Jumlah Puskesmas Yang Memiliki 70% Alat Kesehatan Sesuai Permenkes 75 Tahun 2014



Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat kesehatan Masyarakat, yang biasa disingkat Puskesmas, merupakan dasar dan pedoman utama dalam pemenuhan standarisasi serta

penyelenggaraan puskesmas. Didalam Permenkes tersebut salah satunya memuat tentang standarisasi peralatan yang wajib ada atau dimiliki oleh Puskesmas di suatu daerah.

Berdasarkan hal tersebut sesuai grafik diatas terlihat bahwa dari 15 Puskesmas di Kabupaten Bintan hanya baru 6 Puskesmas yang mampu memenuhi 70% peralatan kesehatan sesuai standar pada tahun 2016, yang sebelumnya pada tahun 2015 terdapat 5 Puskesmas yang peralatan kesehatannya 70% sesuai standar Permenkes. Banyak faktor penghambat dalam pemenuhan peralatan kesehatan di Puskesmas agar sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Permenkes 75 tahun 2014 tersebut, antara lain :

- Tidak tersedianya jenis peralatan kesehatan untuk Puskesmas tersebut di E-Katalog LKPP sebagai mekanisme e-purchasing yang telah ditetapkan pemerintah dalam pengadaan alat kesehatan.
- Terbatasnya anggaran daerah untuk pengadaan peralatan kesehatan.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a. Sulitnya pencapaian target dikarenakan dari obat indikator yang digunakan dalam menghitung indikator kinerja adalah obat program dimana ketersediaannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI yaitu sebagai berikut :

- Program kesehatan ibu : Magnesium sulfat 20% injeksi dan Metilergometrin maleat 0.200 mg injeksi
- Program penanggulangan penyakit : Albendazole tablet

b. Belum terpenuhinya tenaga kefarmasian sesuai PP Nomor 51 Tahun 2009 'Setiap pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yaitu apoteker dan dibantu dengan tenaga teknis kefarmasian (D3 dan Asisten Apoteker), kondisi

sekarang hanya 2 Apoteker sebagai pengelola obat di puskesmas.

- c. Kurangnya pelatihan tentang pelayanan kefarmasian yang komprehensif bagi pengelola obat.
- d. Kurangnya pelatihan terpadu antara tenaga kefarmasian, tenaga medis dan kepala puskesmas sebagai pemegang kebijakan di puskesmas mengenai penggunaan obat rasional
- e. Belum diakomodirnya sebagian besar kebutuhan alat kesehatan yang terdiri alat laboratorium, alat kedokteran umum dan kandungan dan lain-lain dalam pengadaan e-catalog sehingga memerlukan pelelangan.

2) Solusi

- a. Dari permasalahan tersebut di atas maka untuk menjamin ketersediaan obat di puskesmas khususnya obat program kesehatan ibu dan penanggulangan penyakit maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan akan mengadakan obat-obat tersebut dengan jumlah terbatas mengingat obat program masih menjadi tanggungjawab Kementerian Kesehatan RI dalam pemenuhannya. Penyiapan ketersediaan oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan obat yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan.
- b. Perlunya rasionalisasi kuantitas tenaga kefarmasian sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2009
- c. Perlunya pelatihan secara komprehensif dan berkelanjutan mengenai pelayanan kefarmasian untuk tenaga kefarmasian sehingga meningkatkan kompetensi tenaga kefarmasian
- d. Mengidentifikasi kebutuhan alat kesehatan sesuai dengan e-catalog

9) **Program Pengawasan dan Pembinaan Persediaan Farmasi Pada Sarana Distribusi**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.129.614.243,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.122.829.408,- atau 94,77%. Outcome Meningkatnya Produsen dan Konsumen yang Bergerak di Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman.

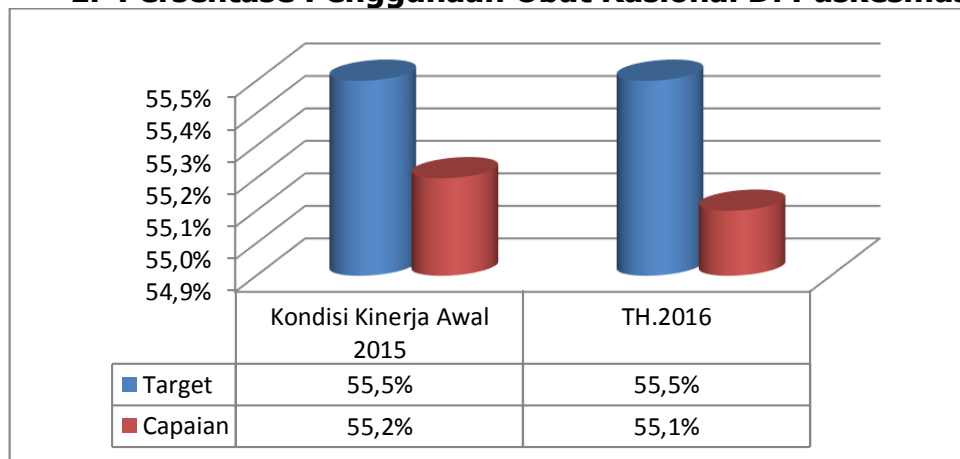
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Peningkatan pengawasan dan pembinaan peredaran sediaan farmasi pada sarana distribusi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.008.243,- dengan realisasi sebesar Rp.33.477.608,- atau 83,68%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan pembinaan sediaan farmasi dan makanan pada 89 sarana yaitu 2 Rumah Sakit, 14 Apotek, 24 Toko Obat, 43 swalayan/toko kelontong, 4 Penyedia Industri Rumah Tangga (PIRT) dan 2 produsen Air Minum Dalam Kemasan. Serta melakukan pemeriksaan pengelola Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam rangka pemberian rekomendasi sertifikasi produk pangan industri rumah tangga terkait dengan Program Pengentasan Kemiskinan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Kegiatan Peningkatan SDM Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.606.000,- dengan realisasi sebesar Rp.89.351.800,- atau 99,72%. Output kegiatan ini adalah terselenggaranya pertemuan penyuluhan keamanan pangan bagi (pemilik/ penanggungjawab) industri

rumah tangga pangan untuk mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan sebagai persyaratan pengurusan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Selain itu terselenggaranya pertemuan pengelola obat.

1. Persentase Penggunaan Obat Rasional Di Puskesmas



Sumber : Seksi Farmamin

Pencapaian indikator kinerja Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan Kabupaten Bintan pada tahun 2016 sebesar 55.51% dan telah melampaui target indikator kinerja Kabupaten Bintan tahun 2016 yaitu sebesar 55.5% (100.01%) sesuai dengan target yang ditetapkan RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2016-2020.

Definisi operasional Indikator kinerja Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan adalah tercapainya penggunaan obat secara rasional di sarana pelayanan kesehatan dengan melalui pemantauan indikator persepsian untuk 3 Diagnosis penyakit yaitu ISPA Non-Pneumonia, Diare Non-Spesifik dan Myalgia. Dasar pemilihan ketiga Diagnosis tersebut adalah :

1. Termasuk 10 penyakit terbanyak
2. Diagnosis dapat ditegakkan oleh petugas tanpa memerlukan pemeriksaan penunjang;
3. Pedoman terapi untuk ketiga Diagnosis jelas;
4. Tidak memerlukan antibiotika/injeksi;
5. Selama ini ketiganya dianggap potensial untuk diterapi secara tidak rasional.

Adapun Pemantauan indikator persepsian terhadap 3 Diagnosis tersebut dilihat dari:

1. Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non-Pneumonia
2. Penggunaan Antibiotik pada Diare Non-Spesifik
3. Penggunaan Injeksi pada Myalgia

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Kurangnya tenaga kefarmasian di tingkat Puskesmas baik secara kuantitas maupun kualitas, serta terbatasnya jaringan telekomunikasi yang tersedia dalam penerapan aplikasi berbasis Internet.

2) Solusi

- a. Penetapan standar kebutuhan tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan sesegera mungkin
- b. Advokasi kepada pemangku kepentingan yaitu instansi terkait atas kebutuhan apoteker di fasyankes dasar segera terpenuhi agar tercapai pelayanan kefarmasian yang baik;
- c. Meningkatkan kualitas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang sudah ada di Puskesmas, melalui pelatihan mengenai cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik
- d. Penyiapan aplikasi PIO yang lebih aplikatif dan terupdate secara kontinyu dan dilengkapi dengan tautan situs-situs yang

berkaitan dengan penyedia informasi obat yang dapat dipercaya sehingga dapat menjadi sumber untuk mempercepat dalam memperoleh informasi obat yang akurat dan dibutuhkan untuk melengkapi Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional (FORNAS) dalam rangka mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

10) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.463.216.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.443.593.900,- atau 95,76%. Outcome Meningkatnya Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.336.480.600,- realisasi sebesar Rp.332.936.000,- atau 98,95%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan SDM tenaga kesehatan dalam memberikan pertolongan kegawatdarutan melalui pendidikan dan pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) yang diikuti sebanyak 51 Peserta dengan mengutamakan perawat lulusan SPK serta panitia Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
- (2) Kegiatan Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.45.603.500,- realisasi sebesar Rp.35.000.000,- atau 76,75%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan

dan kapasitas bidan dalam melaksanakan pelayanan dengan mengirimkan bidan PNS sebanyak 14 org untuk mengikuti pelatihan MU (Midwifery Update) yang diadakan oleh IBI Kab Bintan.

- (3) Kegiatan Sertifikasi Pelatihan SDM Kesehatan dilaksanakan oleh dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.81.132.800,- realisasi sebesar Rp.75.657.900,- atau 93,25%. Output kegiatan ini terselenggaranya penilaian angka kredit bagi 120 pemangku jabatan fungsional.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Masih terdapat tenaga paramedic (perawat) yang belum memiliki sertifikat BTCLS atau habis masa berlakunya
- b. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Bintan yang memiliki kompetensi di Bidang Geographic Information System (GIS) yang berguna untuk pemetaan surveillance, pemetaan informasi gizi, pemetaan penyakit, dan lainnya. Serta kurangnya kompetensi Fungsional Kesehatan untuk perhitungan Angka Kredit Rumpun Jabatan Fungsional Kesehatan.
- c. Belum adanya tenaga untuk perencana pelatihan yang memiliki sertifikat Manager of Trainer (MOT), Training of Trainer (TOT), dan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akreditasi Pelatihan sehingga sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan tidak terakreditasi sehingga tidak dapat menjadi dasar untuk kenaikan pangkat.

2) Solusi

- a. Mengidentifikasi tenaga paramedic (perawat) yang belum mengikuti BTCL atau masa berlakunya sertifikat BTCLS telah

habis untuk disertakan pada pelatihan dan pendidikan BTCLS tahun berikutnya

- b. Merencanakan Pelatihan GIS dan Pelatihan Kredit Poin bagi tim penilai Angka Kredit Rumpun Jabatan Fungsional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
- c. Mengusulkan tenaga kesehatan untuk diikuti sebagai peserta pelatihan Manager of Trainer (MOT), Training of Trainer (TOT), dan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) sehingga sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan terakreditasi dan dapat digunakan menjadi dasar untuk kenaikan pangkat.

11) **Program Manajemen Kesehatan**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.636.903.870,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.620.559.130,- atau 97,43%. Outcome Meningkatnya manajemen & kebijakan pembangunan kesehatan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

- (1) Kegiatan Penyusunan evaluasi MDGs dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.936.144,- realisasi sebesar Rp.67.706.355,- atau 99,66%. Output kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi 18 indikator capaian SPM bidang kesehatan dalam 1 laporan/buku. Pada tahun 2016 seluruh indikator capaian tersebut telah terpenuhi. Terlaksananya pertemuan evaluasi MDG's dan Standar Pelayanan Minimal bersama pengelola program di dinas kesehatan tentang

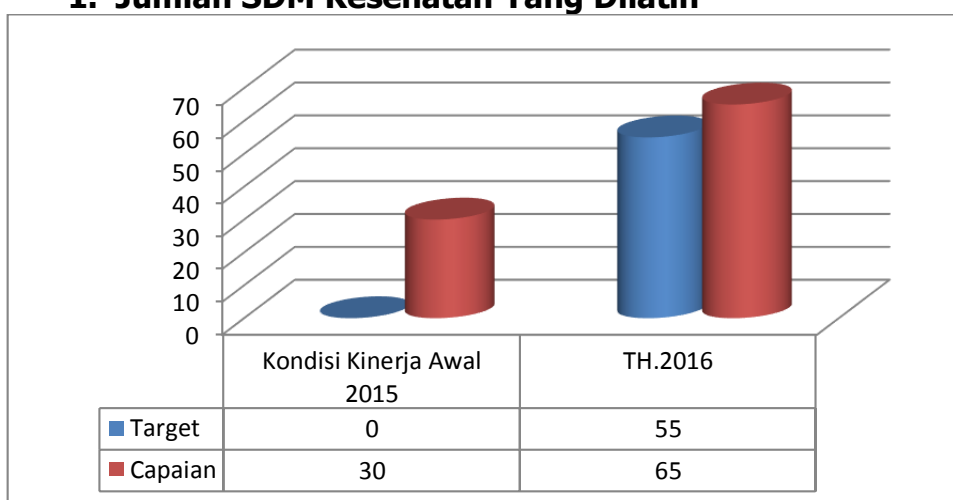
percepatan pencapaian MDGs yang terangkum dalam 1 Laporan MDGS tahun 2015.

- (2) Kegiatan penyusunan Profil Kesehatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.753.812,- realisasi sebesar Rp.82.475.545,- atau 99,66%. Output kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi hasil pembangunan kesehatan yang komprehensif melalui penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2015, yang memuat visualisasi data kesehatan dan fasilitasi data kesehatan. Selain itu juga terlaksananya sinkronisasi data pembangunan di bidang kesehatan yang melibatkan 15 Puskesmas dan pengelola program kesehatan di Dinas Kesehatan.
- (3) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.307.915.000,- realisasi sebesar Rp.293.795.230,- atau 95,41%. Output kegiatan ini adalah tersedianya data/informasi kesehatan yang akurat melalui Pengadaan jaringan SIK berbasis Intra Net di 3 Puskesmas yaitu Puskesmas Kuala Sempang, Puskesmas Sri Bintan, dan Puskesmas Teluk Sasah, serta tersedianya peralatan pendukung Sistem Informasi Kesehatan.
- (4) Kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.178.298.914,- realisasi sebesar Rp.176.582.000,- atau 99,04%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman terhadap isu-isu kesehatan yang terjadi serta alternatif penyelesaiannya dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kegiatan dilaksanakan melalui rapat kerja kesehatan daerah dengan materi pembahasan pencapaian RPJMD Kabupaten Bintan di bidang kesehatan. Adapun narasumber rakerkesda ini dari

BAPPEDA Kabupaten Bintan, Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dan Dinas Kesehatan. Rakerkesda dilaksanakan selama 3 hari diikuti 50 peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan sebanyak 22 orang dan UPTD Puskesmas sebanyak 28 orang. Output rakerkesda tersebut adalah pemaparan dan penyusunan indikator capaian RPJMD dan Restra untuk periode tahun 2016-2021.

Capaian kinerja tahun 2016 untuk program ini antara lain:

1. Jumlah SDM Kesehatan Yang Dilatih



Sumber : Subbag Penyusunan Program

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa adanya peningkatan jumlah SDM Kesehatan yang dilatih pada tahun 2016 sebanyak 65 orang, sedangkan pada tahun 2015 jumlah SDM Kesehatan yang dilatih sebanyak 55 orang. Jenis pelatihan yang diberikan pada tahun 2016 meliputi pelatihan BTCLS (Basic Trauma Cardiac Life Support) bagi tenaga perawat dan pelatihan MU (Midwife Update) bagi tenaga bidan. Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dimaksud Dinas Kesehatan Bintan berkerjasama dengan beberapa Instansi dan organisasi profesi seperti Bapelkes Batam dan IBI (Ikatan Bidan Indonesia)

b. **Permasalahan dan Solusi**

1) **Permasalahan**

- a. Ketepatan waktu penyampaian data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan SPM, MDG's dan profil kesehatan belum terpenuhi karena wilayah kerja Kabupaten Bintan yang cukup luas serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
- b. Belum tersedianya SIK yang terintegrasi (online)
- c. Masih terbatasnya anggaran untuk memaksimalkan aplikasi SIK.

2) **Solusi**

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- b. Membangun Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi (online) yang dapat mengolah data serta menyediakan informasi kesehatan yang evidence based dan akurat

RSUD

12) **Program Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program ini dilaksanakan oleh **Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.4.500.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.025.608.637,- atau 89,45%. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Peningkatan Pelayanan Kesehatan oleh BLUD RSUD Kabupaten Bintan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.500.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.025.608.637,- atau 89,45%, Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sehingga meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.

1) **BOR Rumah Sakit, tahun 2016 mencapai 27,50**

Rendahnya nilai indikator pelayanan RS (BOR) menunjukkan pemakaian tempat tidur yang jarang hal ini disebabkan oleh karena RS sedang dalam proses pindah ke gedung baru, Belum maksimalnya evaluasi terhadap pengelolaan unit perawatan dan terbatasnya pelayanan penunjang yang ada di RS serta belum maksimalnya dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk sistem rujukan untuk RSUD Kabupaten Bintan sebagai pusat rujukan di Kabupaten Bintan

2) **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2016 tercatat sebesar 73,12 poin**

Hal ini diakibatkan karena masih kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan pengaduan, Kurangnya kedisiplinan petugas pelayanan dalam hal menjamin kemudahan prosedur sehingga waktu pelayanan bisa lebih efektif dan efisien, Kurangnya pelatihan teknis untuk tenaga kesehatan dan manajemen

13) **Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan**

Program ini dilaksanakan oleh **Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.3.848.130.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.782.180.204,- atau 98,45%. Outcome dari program ini adalah Meningkatnya Jangkauan Pelayanan Masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bintan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.848.130.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.782.180.204,- atau 98,20%, Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Alat-alat Kesehatan/Kedokteran Umum sehingga meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.

14) **Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan**

Program ini dilaksanakan oleh **Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.400.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 380.400.121,- atau 95,10%. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Kefarmasian dan Alat Kesehatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.400.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.380.400.121,- atau 95,10%, Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Obat-obatan, Bahan Medis habis pakai dan Bahan Kimia sehingga meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.

- **Terselenggaranya Standarisasi dan Akreditasi Rumah Sakit oleh KARS**, untuk saat ini masih proses persiapan dan penyusunan dokumen akreditasi rumah sakit

15) **Program Manajemen Kesehatan**

Program ini dilaksanakan oleh **Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.561.477.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.530.569.130,- atau 98,99%. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Manajemen Kesehatan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pengembangan Manajemen Database Pasien Rumah Sakit

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.20.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.19.822.000,- atau 99,11%, Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Pengembangan Manajemen Database Pasien Rumah Sakit sehingga terpenuhinya Pengembangan Manajemen Database Pasien Rumah Sakit dan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.

(2) **Penyusunan Profil Kesehatan dilaksanakan**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.19.744.295,- atau 98,87%, Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Penyusunan Profil Kesehatan Rumah Sakit sehingga terpenuhinya dokumen Profil Kesehatan dan meningkatnya informasi kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.

Capaian kinerja tahun 2016 untuk program ini adalah :

- **Peningkatan Kelas/Type Rumah Sakit**

Capaian untuk tahun 2016 masih Rumah Sakit Kelas/Type D dan sedang proses peningkatan ke Rumah Sakit Type C

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program Kefarmasian dan Alat Kesehatan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

Secara keseluruhan program kerja tahun 2016 dapat dilaksanakan tanpa kendala yang berarti dan berjalan sesuai rencana.

PU (Urusan Kesehatan)

Urusan **Kesehatan** merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan dalam rangka pencapaian indikator kinerja daerah sesuai dengan yang tertuang di dalam RPJMD 2016 – 2021. Untuk mencapai indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan. Total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.489.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.487.737.845,00 atau 99,609 %. Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kapasitas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kabupaten Bintan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Output dari program ini adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program

(1) Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.489.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.487.737.845,00 atau 99,609%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan ,peningkatan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Untuk mencapai Output tersebut dilaksanakan pekerjaan sebanyak 3 (tiga) paket sebagai berikut :

- 1.2 Pembangunan Pagar Polindes Tanjung Permai Kel. Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam (58 M x 1,5 M) dengan nilai terkontrak sebesar Rp. 149.854.778,00,-
- 1.3 Pembangunan Batu Miring Posyandu Jalan Cendrawasih VII Blok B Kel. Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam (90M x 1M) dengan nilai terkontrak sebesar Rp.149.680.673,00,-
- 1.4 Rehab Posyandu Jalan Kamboja Cikolek Kec. Toapaya (1 Paket) dengan nilai terkontrak sebesar Rp.119.342.284,00,-

b. Permasalahan Dan Solusi

Pada pelaksanaan kegiatan yang ada dalam program ini secara umum tidak terdapat permasalahan. Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Output kegiatan yang ingin dicapai.

4.1.3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kedelapan** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Lingkungan Hidup** adalah sebagai berikut :

1. **Jumlah status lingkungan hidup daerah (SLHD) yang disusun mencapai 7 (tujuh) SLHD**; status yang dimaksud adalah data : 1)Sumber daya alam, 2)Bencana Alam, 3)Demografi, 4)Demografi Sosial, 5)Sosial Ekonomi, 6)Sumber Pencemaran dan 7) Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dicapai melalui Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan lingkungan Hidup dengan kegiatan Informasi Bidang Lingkungan. Tanggal 14 September 2016 **Kabupaten Bintan menerima penghargaan sebagai Nominator Tahap Kedua Nirwasita Tantra Award 2016. Nirwasita Tantra adalah penghargaan dari Pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.** Penghargaan Nirwasita Tantra dinilai berdasarkan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), yaitu Dokumen yang menyatakan kondisi, permasalahan, dan kebijakan dan/atau program yang ditetapkan dan diterapkan oleh Daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.
2. **Jumlah kelompok masyarakat bersama PEMDA yang terlibat dalam melaksanakan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dari 8 target sudah terealisasi 8 kelompok 100% (amat baik) yaitu dengan telah terbentuknya kelompok masyarakat bersama PEMDA yang terlibat dalam melaksanakan 3R (reduce, reuse, recycle) di dua kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Sebong. Dicapai**

melalui program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan melalui kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yang tercatat hanya 6 kelompok

3. **Persentase volume pengurangan sampah melalui 3 R mencapai 8%** sesuai dengan target. Pengurangan volume ini lebih baik dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar 7%.

4. **Persentase penanganan sampah 89%; (DKPP);**

Penanganan sampah di Kabupaten Bintan masih belum mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu sekitar 89 % dari jumlah timbunan sampah masyarakat di Kabupaten Bintan.

5. **Persentase sampah yang dikelola 60 %;**

Sampah yang dapat dikelola oleh DKPP Kabupaten Bintan pada tahun 2016 sebesar 60%. Pengelolaan ini tidak meningkat signifikan dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar 50% dibanding dengan jumlah volume produksi sampah di Kabupaten Bintan.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.191.623.980,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.175.767.405,- atau 91,73%. Outcome Program ini adalah meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

a. Pelaksanaan Program

(1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan,

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi Anggaran Sebesar Rp.72.016.000,- dan realisasi anggaran Rp.68.362.865,- atau 94.93%. Output kegiatan ini adalah Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di 3 lokasi yaitu di Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Bintan Timur, bertujuan pembinaan masyarakat dalam mengolah sampah dapat ditingkatkan, melalui pemilahan, daur ulang dan pakai ulang 3 R, sehingga volume sampah residu dapat berkurang, masyarakat dapat menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian dan kebersihan terhadap lingkungan, pengetahuan masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah organik dan sampah an organik semakin bertambah, masyarakat dapat mengetahui tatacara membuat kompos yang baik, masyarakat dapat mengetahui system kerja bank sampah dan dapat membentuk kelompok masyarakat yang peduli lingkungan. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2012 dan sampai tahun 2015 jumlah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan telah mencapai 6 kelompok. Untuk target capaian sasaran didalam RPJMD Pembentukan Kelompok Pengelolaan Persampahan pada Tahun 2016 ditargetkan 2 kelompok telah terpenuhi yaitu 1 kelompok di Kecamatan Bintan Utara dan 1 Kelompok di Kecamatan Teluk Sebong

(2) Promosi Gerakan Bintan Bersih

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.059.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.105.796.040, atau 91.96%. Output kegiatan adalah Terwujudnya Gerakan

Bintan Bersih di Kabupaten Bintan dan telah memperoleh **Penghargaan Adipura untuk Kategori Kota Kecil dari Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016**. Pada tanggal 5 Juni 2016 Penghargaan Adipura Kategori Kota Kecil diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Siak. Pelaksanaan Program ditujukan untuk mendukung pelaksanaan keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bintan Melalui Kecamatan Bintan Timur dalam Program Adipura Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Untuk Program Adipura, dilaksanakan upaya-upaya pembinaan dan sosialisasi tentang kebersihan dan pengelolaan sampah di tingkat RT/RW, Dasa Wisma, PKK, pertokoan, perkantoran Sekolah, penataan kembali operasional bank sampah dan rumah kompos Capaian kegiatannya Terlaksanannya Promosi Gerakan Bintan Bersih di Masyarakat Kabupaten Bintan. Capaian kegiatan ialah keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam Program Adipura 2016, dengan meraih Penghargaan Adipura, meningkatnya peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pengurangan volume sampah melalui pengolahan sampah skala rumah tangga dengan system takakura, meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan persampahan di kabupaten Bintan dan terciptanya lingkungan pemukiman dan pertokoan yang bersih dan sehat di Kecamatan Bintan Timur. Untuk target RPJMD, memperoleh penghargaan ADIPURA telah terpenuhi.

(3) **Kegiatan Penilaian Kecamatan. Kelurahan dan Desa Terbersih**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi Anggaran Rp.4.548.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.608.500,- atau 35.36.%. kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. sedangkan anggaran yang terpakai adalah untuk persiapan pelaksanaan kegiatan

b. Permasalahan dan Solusi

Secara umum Pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan tidak terdapat permasalahan, maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Namun pada kegiatan Sosialisasi dan Promosi Gerakan Bintan Bersih, Mengingat kegiatan ini merupakan pendukung pelaksanaan Program Nasional, sehingga perubahan yang terjadi ditingkat pusat sulit diakomodir pada kegiatan. Bentuk – bentuk Promosi masih awam dan belum dikemas secara menarik. Solusinya, agar lebih meningkatkan intensitas koordinasi dengan tingkat pusat dan perlu dicarikan bentuk-bentuk promosi yang lebih menarik sehingga lebih efektif keberOutputan program di masyarakat

2) **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.120.456.416,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.102.809.650,- atau 85,35%. Outcome Program ini adalah Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pengendalian dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam (SDA)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.641.816, realisasi anggaran sebesar Rp.35.115.100,- atau 75.29%. Output kegiatan ini adalah terakomodirnya dan terkendalinya peran serta masyarakat melalui pos pengaduan BLH Kabupaten Bintan, tercatat pada tahun 2016 dari 6 kasus pencemaran lingkungan yang ada baik kasus yang di laporkan/pengaduan masyarakat maupun laporan pengaduan oleh perusahaan akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup sudah dapat di tindak lanjuti seluruhnya (100%). Capaian kinerja tahun 2016 untuk program ini adalah : **Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti** realisasinya 100% dicapai melalui program pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup dengan kegiatan pengendalian dan penegakan hukum bidang sumber daya alam (SDA). Sebanyak 6 pengaduan yang masuk yang ditindak lanjuti sebanyak 6.

(2) Kegiatan pengendalian lingkungan hidup yang di laksanakan dengan alokasi anggaran Rp.73.814.600, realisai anggaran sebesar Rp67.694.550,- atau 91.71%. Output kegiatan ini terkendalinya dan terlaksananya perizinan lingkungan, dokumen lingkungan yang telah selesai sebanyak Amdal/Addendum 2 dokumen, UKL-UPL 12 dokumen dan SPPL 73 Dokumen.

b. Permasalahan dan Solusi

Masih rendahnya kesadaran pengusaha industri/pemrakarsa kegiatan/badan usaha dalam mengelola lingkungan dan penyampaian pelaporan, sehingga perlu memperkuat pengawasan di bidang lingkungan hidup dan melaksanakan penegakan hukum di bidang lingkungan.

3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 65.226.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.64.037.430,- atau 98,18%. Outcome Program ini adalah meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. Pelaksanaan Program

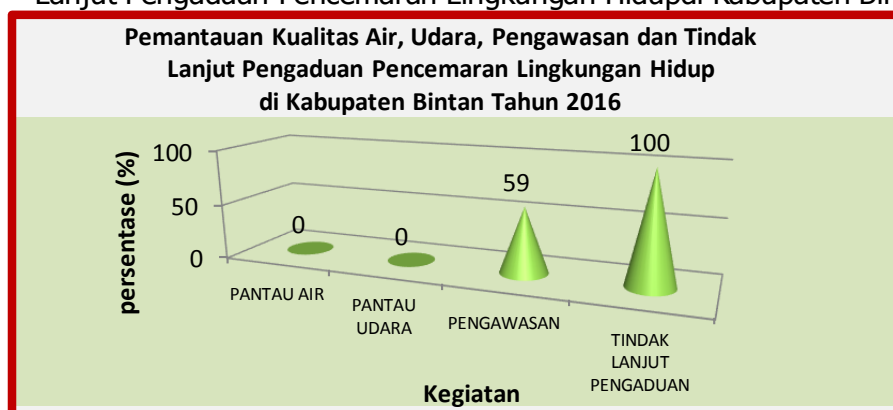
(1) Informasi Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi Anggaran Rp.65.226.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.64.037.430,- atau 98.18%. Output kegiatan ini telah tersedianya data Informasi Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan melalui penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Dari hasil Pendataan yang telah dilakukan terdapat 7 status Lingkungan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Yaitu : Sumber Daya Alam, Bencana alam, Demografi, Demografi Sosial, Sosial Ekonomi, Sumber Pencemaran dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

Tabel 4.3 Perkembangan Pemantauan Kualitas Air dan Udara di Kabupaten Bintan Tahun 2016

No	Tahun	Air (%)	Udara (%)	Pengawasan (%)	Tindak lanjut pengaduan (%)
1.	2016	-	-	59	100

Grafik 4.5 : Pemantauan Kualitas Air, Udara, Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Bintan



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2017

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4) Program Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.266.005.751,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 128.868.100,- atau 48,45%. Outcome Program ini adalah meningkatnya program pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pemantauan Kualitas Lingkungan yang**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi Anggaran Rp.119.779.200,- realisasi anggaran sebesar Rp.9.670.900,- atau 8,07%. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena perubahan metoda pelaksanaan kegiatan dari menggunakan pihak ketiga di rubah menjadi metoda swakelola dengan menggunakan tenaga ahli dari laboratorium yang telah terakreditasi dan pihak Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) tidak dapat melaksanakan kegiatan karena waktu melaksanakan kegiatan pemantauan tidak memungkinkan lagi.

1. **Jumlah titik sampel pemantauan kualitas air belum ada realisasi** karena kegiatan yang mendukung indikator ini belum berjalan.

2. **Jumlah titik sampel lokasi pemantauan kualitas udara(yang bergerak dan tidak bergerak)** belum ada realisasi karena kegiatan untuk mendukung indikator ini belum berjalan

(2) **Pengawasan Lingkungan Hidup Reguler**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.146.226.551,- realisasi anggaran sebesar Rp.119.197.200,- atau 81.52 %. Output kegiatan Pengawasan Lingkungan Hidup reguler dilakukan pada usaha dan/atau kegiatan yang beroperasi di Kabupaten Bintan meliputi sektor industri, perhotelan dan pariwisata, kesehatan, listrik dan migas, pertambangan dan perkebunan. Pengawasan dilaksanakan dalam rangka mengetahui tingkat ketaatan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam melakukan pengelolaan B3 dan limbah B3 dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah PP

No.74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun PP No.101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, untuk mengetahui tingkat ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki (AMDAL atau UKL-UPL) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan mengacu kepada Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mengetahui komitmen para stakeholder dalam upaya pelestarian lingkungan. Kegiatan Pengawasan Lingkungan Hidup Reguler dilaksanakan pada 15 perusahaan Industri, 12 Perhotelan dan Pariwisata, 2 Rumah Sakit, 6 Perusahaan Listrik dan Migas, 4 Perusahaan Tambang dan 2 Perkebunan. Adapun Perusahaan yang telah memiliki izin TPS limbah B3 adalah 15 Perusahaan yaitu 9 Perusahaan Industri dikawasan BIE Lobam, 3 Migas, 2 Tambang, 1 Industri. Disarankan untuk kedepannya seluruh usaha dan/ kegiatan di Kabupaten Bintan sudah memiliki TPS limbah B3 sehingga pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan lebih baik. capaian kinerja tahun 2016 untuk program ini adalah : **Jumlah usaha/kegiatan yang mendapat pengawasan kinerja penataan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dari tabel diatas dapat dilihat capaiannya 118 %(amat baik) dari target yang ditetapkan 50** usaha yang mendapat pengawasan kinerja penataan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup realisasinya 59 perusahaan yang meliputi 5 sektor kesehatan (RSUD Bintan, Puskesmas Kijang, Klinik Yakespen, RSUP Busung dan Puskesmas Teluk Bintan) 1 sektor pelabuhan (PT. Pelindo) 1 sektor air minum (PT.PDAM Tirta Kepri Kijang)

18 sektor industri (PT. Bintan Offshore, PT. Honowell Indonesia, PT. Sanden Electronics Bintan, PT. Is Premier Container Bintan, PT. Cedar Accessories, PT. A and One Precision Engineering, PT. Centrotec Jit Bintan, PT. Pepperlfuchs Bintan, PT. Singatac Bintan, PT. Esco Bintan, PT. Kijang Indah Lestari, CV. Kencana Prima Recyling, PT. Yoshikawa Electronic Bintan, PT. CCI Bintan, PT. AMC Bintan, PT. Pertama Precision Bintan, PT. Meitech Eka Bintan, PT. Philty Bintang Jaya), 21 sektor pariwisata dan perhotelan (PT. Bintan Agro Resort, PT. Cabana Resort, Sahid Bintan Hotel, PT. BBH Invesment/The sanchaya, PT. Strareast Sejahtera Group/swiss Bel In. PT. Pelangi Bintan Indah/treasure Bay, PT. Alam Indah Bintan,/Nirwarna Garden, PT. Bintan Lagoon Resort, PT. Starlux Depelopment Indonesia/JN 9, PT. Club Med, PT. Ria Bintan, PT. Lagoi Bintan Pasifik /Lagoi Bay Villas, PT. Bukit Lagoi Villa/Alila Vilas, PT. Strareas Sejahtera Group/Bintan Market, The Haven, PT. Bintan Hotel/Bayan Tree &Angsana, PT. Tropical Ameehhyst/laguna golf, Condotel Cassia Bintan, PT. Bukit Raya Bintan/De Villa Bintan, Bintan Villa, PT. Mutiara Bintan Discovery), 2 sektor tambang pasir (Tripanorama Setia, PT. Gunung Mario Legaligo), 6 sektor Migas (PLTMG Kijang, PT. Pertamina TBBM Kijang, PT. Capital Turbin Indonesia, PT. Pertamina TBBM Tanjung Uban, PT. Pertamina Depot LPG Tanjung Uban, PT. Indunsuri), 2 sektor tambang granit (PT. Mitra Investindo, PT. Bintan Nusa Multi), 3 sektor perkebunan (PT. Tirta Madu Gunung Kijang, PT. Tirta Madu Tuapaya, PT. Pulau Bintan Jaya), Dicapai melalui program Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pengawasan Lingkungan Hidup Reguler.

b. **Permasalahan dan solusi**

Minimnya SDM sebagai analis laboratorium lingkungan maupun peralatan untuk pengujian pencemaran untuk mendukung kegiatan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan pengaduan masyarakat, solusinya melalui penambahan SDM bidang analisis laboratorium lingkungan untuk mendukung kegiatan pokok yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.

5) **Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan** melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.117.866.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.827.660.587,- atau 74,04%. Outcome Program ini adalah meningkatnya program pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Adiwiyata**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.102.266.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.102.023.119 atau 99.77%. Output kegiatan ini terbentuknya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dengan terpilihnya 3 sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten yakni : SDN No.03 Bintan Utara, SDN No.04 Bintan Utara dan SDS Tunas Bangsa; 4 sekolah adiwiyata Tingkat Provinsi yaitu : SMAN 4 Bintan, SDN 01 Seri Kuala Lobam, SDN 002 Gunung Kijang, SDN 009 Bintan Timur; 4 (empat) Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional yaitu SMA 3 Bintan, SDN 017 Bintan Timur, SMPN 1 Bintan dan SMPN 3

Bintan yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pendidikan dan Budaya RI di gedung Manggala Wana Bakti di Jakarta pada tgl 13 Desember 2016.

(2) **Pendukung DAK**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.82.848.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.82.600.968,- atau 99,71%. Output kegiatan ini adalah terfasilitasinya operasional kegiatan DAK-LH yang terdiri dari 4 kegiatan yaitu kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Program Bank Sampah, kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah, Pengolahan Sampah, Bank Sampah dan Sarana Pendukungnya dan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup.

(3) **Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Program Bank Sampah (DAK)**

Kegiatan ini yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.293.931.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.281.375.000,- atau 95,73%. Output kegiatan ini adalah pengadaan 5 unit mesin pencacah sampah dan 5 unit kendaraan roda tiga yang diberikan kepada sekolah yang mendapat Adiwiyata Nasional sebagai sarana operasional bank sampah sekolah.

(4) **Pengadaan Sistem Informasi lingkungan Hidup Daerah (DAK)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.98.175.000,- atau 98,17%. Output kegiatan ini adalah pengadaan jaringan LAN untuk Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.

(5) **Pengolahan Sampah, Bank Sampah dan Sarana Pendukungnya (DAK)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.283.522.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.25.886.000,- atau 9,13 % Output kegiatan ini adalah pengadaan 2 unit alat timbangan dan belanja jasa konsultan perencanaan. Pembangunan 2 unit bangunan Bank Sampah tidak dapat dilaksanakan karena terkendala masalah pengadaan lahan yang belum clean and clear. Lahan tersedia pada akhir September 2016 sehingga pembuatan dokumen perencanaan dapat terlaksana (pembuatan dokumen selesai awal November 2016) sementara bangunan fisik tidak terlaksana akibat jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik yang tidak memungkinkan jika dimulai setelah diterbitkan dokumen perencanaan, diperkirakan pembangunan rumah bank sampah memakan waktu 2,5 bulan.

(6) **Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (DAK)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.255.299.000,- realisasi anggran sebesar Rp.237.600.000,- atau 93,7%. Output kegiatan ini adalah pengadaan alat penguji kualitas lingkungan portable yang terdiri dari Portable PH Meter, Portable DO Meter, Portable Multiparameter dan Portable Combusion Gas dan Emmision Analyzer

b. **Permasalahan dan Solusinya**

Permasalahan pada kegiatan Pengolahan Sampah, Bank Sampah dan Sarana Pendukungnya adalah tidak cukup waktu untuk pelaksanaan pembangunan bank sampah sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

DKPP

6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan** melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.9.026.635.000,- dan realisasi sebesar Rp.8.453.150.149 atau 93,65%. Outcome dari program ini adalah meningkatnya kapasitas pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan,

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.046.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp.943.999.120,- atau 90,19%. Didalam kegiatan ini, segala kebutuhan satgas kebersihan akan terpenuhi baik peralatan kerja, bak sampah, pakaian kerja, pengadaan kendaraan (truk sampah) dan peralatan-peralatan lainnya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pengelolaan kebersihan di Kabupaten Bintan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Output dari kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan pada tahun 2016 adalah tersedianya sarana kerja satgas untuk operasional kegiatan persampahan, antara lain: kantong plastik sampah 2000 buah, racun rumput 450 liter, pakaian kerja 338 stel, mesin rumput 10 unit, bak amrol 10 unit, 50 unit tong sampah terpilah 4 warna, dan pemeliharaan TPS 34 unit. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana persampahan. Dengan adanya pengadaan sarana dan prasarana persampahan yang dilakukan

melalui kegiatan ini, maka diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan kepada masyarakat terkait tentang kebersihan lingkungan. Hal ini disebabkan pelayanan yang dilakukan sangat membutuhkan sarana prasarana kebersihan tersebut diatas, dan ditandai dengan peningkatan persentase penanganan sampah dari 88 % pada tahun 2015 menjadi 89 % pada tahun 2016 dan persentase sampah yang dikelola dari 50% pada tahun 2015 menjadi 60 % pada tahun 2016. Selain itu juga telah terjadi kenaikan angka pembangunan TPS dari 62 unit pada tahun 2014 menjadi 66 unit pada tahun 2016.

(2) **Peningkatan Kebersihan Jalan-jalan Umum dan Lingkungan Umum**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.457.825.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.016.155.609,- atau 94,08%. Kegiatan ini berfungsi untuk menyelenggarakan pelaksanaan manajemen terhadap satgas kebersihan tersebut didalamnya adalah pembayaran gaji (upah) satgas kebersihan dan operasional yang dapat menunjang kebutuhan pelayanan kebersihan di Kabupaten Bintan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pengelolaan kebersihan di Kabupaten Bintan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan dan pengembangan kebersihan di Kecamatan, sedangkan hasil (Outcomes) yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya kebersihan lingkungan Kecamatan di Kabupaten Bintan. Hal ini ditandai dengan **peningkatan persentase penanganan sampah dari 88 % pada tahun 2015 menjadi 89 % pada tahun 2016 dan persentase sampah yang dikelola dari 50% pada tahun 2015 menjadi 60%**

pada tahun 2016. Di Kabupaten Bintan dengan luas daratan 1.613,51 Km² hanya memiliki 276 orang satgas kebersihan, 10 orang satgas taman dan 10 orang satgas di TPA Sei. Enam. Dengan demikian jumlah satgas kebersihan di DKPP Kabupaten Bintan adalah sebanyak 276 orang pada tahun 2015 yang melayani kebersihan lingkungan 10 kecamatan di Kabupaten Bintan.

(3) Operasional dan Pengelolaan TPA Sei Enam

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.502.090.000,- dengan realisasi sebesar Rp.475.153.120,- atau 94,64%. Kegiatan Operasional dan Pengelolaan TPA dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional TPA Sei. Enam mulai dari gaji (upah) satgas, service kendaraan alat berat, pemeliharaan Pos Jaga, Pengadaan Pakaian Kerja satgas, dan Pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan di TPA Sei. Enam. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya operasional dan pengelolaan TPA Sei. Enam antara lain: upah 10 orang satgas, pemeliharaan alat berat, pemeliharaan pos jaga, bakteri, pemasangan kanstin, 1 unit Rumah Pemilah Sampah, 1 unit pencacah plastik, 1 unit sumur pantau dan instalasi, 1 unit belt conveyor, dan peningkatan pembangunan Rumah Pemilah Sampah (Bak, Tanjakan, dan drainase). Sedangkan hasil (Outcome) yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya operasional dan pengelolaan TPA Sei Enam. Keberadaan TPA Sei. Enam juga diharapkan meningkatkan persentase penanganan sampah dan sampah yang dikelola di Kabupaten Bintan.

(4) Peningkatan pelayanan UPTD Kebersihan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.842.300,- atau

99,12%. Kegiatan Peningkatan pelayanan UPTD Kebersihan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk kebutuhan operasional UPTD Kebersihan di Tanjung Uban selama 1 tahun. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya operasional UPTD Kebersihan Tanjung Uban selama 1 tahun. Sedangkan hasil (Outcome) yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya operasional UPTD Kebersihan Tanjung Uban.

Rencana pengembangan sistem persampahan di Kabupaten Bintan diarahkan dikelola secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat terutama diarahkan untuk membuat bak-bak sampah baik yang dilakukan secara individual maupun secara kelompok, dan pengangkutan sampah dari bak-bak sampah melalui gerobak sampah yang disediakan ke lokasi tempat pembuangan sementara (TPS). Dalam hal ini pengadaan bak amrol dan penempatannya juga dapat diperhitungkan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Rencana pelayanan pengelolaan sampah tersebut untuk melayani sampah-sampah dari rumah tangga, kawasan komersil seperti pasar dan pertokoan, perkantoran, serta pusat pemerintahan. Sedangkan sistem pengolahan persampahan untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh sistem pelayanan ini, diarahkan penanganannya dilakukan melalui pengolahan secara individu atau secara komunal setempat, melalui cara pengomposan maupun melakukan 3R (reduce, reuse, recycle) dengan menggunakan sistem Bank Sampah. Dengan sistem pengelolaan persampahan seperti ini diharapkan dapat dihindari terjadinya masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran lingkungan, timbulnya genangan, gangguan estetika dan penyebaran penyakit. Beberapa program yang akan dikembangkan dalam pengembangan sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Bintan, yaitu:

- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bintan.
- Pendataan Bank Sampah yang telah dikembangkan oleh instansi terkait.
- Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan, dan telah dioperasikan seluas 5 hektar di Kecamatan Bintan Timur sedangkan 5 Hektar untuk wilayah Kecamatan Bagian Utara.

No.	Tahun	Indeks
1	2016	89%
2	2015	88%

Penanganan sampah di Kabupaten Bintan ditandai dengan pelayanan pengangkutan sampah dari seluruh TPS di Kabupaten Bintan untuk dibawa ke TPA Sei Enam untuk Kecamatan Bintan Timur dan TPA/lahan pertanian milik warga yang terdekat untuk Kabupaten Bintan wilayah utara. Penanganan sampah di Kabupaten Bintan masih belum mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu sekitar 89% dari jumlah timbunan sampah masyarakat di Kabupaten Bintan. Penanganan sampah belum sepenuhnya sesuai dengan target di rentra SKPD karena beberapa hal antara lain:

1. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan kebersihan seperti TPS permanen, TPST, Rumah Kompos dan TPA.
2. Sulitnya mendapatkan lahan atau lokasi guna ditempatkan TPS permanen atau amrol dan TPA dikarenakan kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya

sarana dan prasarana tersebut dalam pengelolaan persampahan yang aman terhadap lingkungan.

3. Banyak lahan-lahan kosong yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat di Kabupaten Bintan.
4. Budaya masyarakat di Kabupaten Bintan yang masih membakar sampah dan menimbun sampah di lingkungan rumah masing-masing dikarenakan jarak yang jauh dengan TPS.

No.	Tahun	Indeks
1	2016	60%
2	2015	50%

Persentase sampah yang dikelola oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan ditandai dengan jumlah sampah yang masuk ke TPA sebagai sarana prasarana pengelolaan persampahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dibandingkan sampah yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Bintan. Dengan demikian sampah yang dapat dikelola oleh DKPP Kabupaten Bintan pada tahun 2016 belum berbeda jauh terhadap pengelolaan sampah di tahun 2015 yaitu hanya sebesar 60 %. Kendala yang dialami dalam pengelolaan sampah, antara lain:

1. Kurangnya armada pengangkutan sampah sehingga terdapat wilayah – wilayah kecamatan di Kabupaten Bintan yang masih belum terlayani dalam hal pengangkutan sampahnya.
2. Belum adanya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah di Kabupaten Bintan wilayah utara yang meliputi Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Bintan Utara.

No.	Tahun	Indeks
1	2016	20%
2	2015	14%

Persentase volume pengurangan sampah melalui 3R ditandai dengan banyaknya jumlah sampah yang sudah dikelola oleh masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembentukan kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan khususnya terhadap sampah. Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang peduli lingkungan tersebut dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan. Oleh karena itu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan hanya melakukan pendataan sekunder terhadap data yang dihasilkan dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan tersebut. Adapun kelompok masyarakat yang peduli lingkungan hidup di Kabupaten Bintan telah dibentuk sebanyak 6 kelompok yaitu Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Tambelan dan Kecamatan Bintan Utara. Dan dimasing-masing Kelompok Masyarakat terdapat bagian khusus yang menangani persampahan melalui sistem 3R yang dikenal dengan Bank Sampah. Bank Sampah yang telah aktif melakukan aktifitas pengelolaan sampah yaitu di Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Bintan Timur sebanyak ± 14 unit. Dari keseluruhan Bank Sampah yang ada di Kabupaten Bintan diperoleh data sekunder jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat adalah sebanyak sekitar 21.000 Kg (21 ton) selama setahun. Bila dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah, maka diperoleh persentase volume pengurangan sampah melalui 3R di Kabupaten Bintan sekitar 20 %. Adapun yang menjadi kendala terhadap proses 3R di Kabupaten Bintan, antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap fungsi dan keberadaan Bank Sampah di Kabupaten Bintan sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti tentang arti pentingnya 3R didalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar.
2. Kurangnya dukungan anggaran karena adanya keterbatasan kemampuan anggaran daerah Kabupaten Bintan dalam mendukung operasional Bank Sampah.

No.	Tahun	Indeks
1	2016	124
2	2015	117

Kabupaten Bintan memiliki luas areal daratan 1.319,51 km² dengan sepuluh kecamatan. Persampahan menjadi salah satu masalah utama dikarenakan belum adanya suatu sistem pengelolaan yang terpadu. Adapun sarana dan prasarana persampahan yang telah disediakan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan, antara lain : TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sejumlah 66 unit (35 unit berada di Kijang Kec. Bintan Timur, 5 unit berada di Kawal Kec. Gunung Kijang, 12 unit berada di Tanjung Uban Kec. Bintan Utara, 2 unit berada di Kec. Teluk Bintan, 2 unit berada di Kec. Teluk Sebong, dan 3 unit berada di Kec. Seri Kuala Lobam, 3 unit di Kel. Sei. Lekop dan 4 unit di Kelurahan Kijang Kota di Kecamatan Bintan Timur). Truk pengangkut sampah (terdiri atas Dump truck sampah sejumlah 20 unit, Motor kaisar sampah sejumlah 12 unit, sampan sampah sejumlah 1 unit), Gerobak sampah, dan sarana pendukung lain untuk pengelolaan sampah. Menurut hasil perhitungan terhadap jumlah timbulan sampah maka diperoleh jumlah TPS yang dibutuhkan di Kabupaten Bintan adalah sebanyak 124 unit, namun sampai dengan tahun 2016 hanya terdapat 66 unit TPS (termasuk amrol) di Kabupaten Bintan. Bila

dibandingkan dengan jumlah TPS pada tahun 2015 terjadi peningkatan beberapa unit dikarenakan adanya penambahan pengadaan TPS permanen dan bak amrol di Kabupaten Bintan. Kendala yang dialami dalam pengadaan TPS di Kabupaten Bintan, antara lain:

1. Adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam penganggaran TPS.
2. Adanya penolakan masyarakat terhadap lokasi penempatan TPS maupun amrol yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sehingga sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk mencari lokasi penempatan TPS tersebut.

b. **Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

- a. Kurangnya Truk Sampah untuk pengangkutan sampah
- b. Kurangnya fasilitas pengolah sampah dan lindi di TPA Sei. Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.
- c. Kurangnya satgas kebersihan
- d. Belum adanya TPA di Bintan Bagian Utara.

2) Solusi

- a. Dilakukan penambahan anggaran untuk pengadaan truk sampah dan operasionalnya.
- b. Dilakukan penambahan anggaran untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan lindi di TPA Sei. Enam agar

pengolahan dan pengelolaan sampah di TPA Sei. Enam dapat berjalan optimal.

- c. Dilakukan penambahan satgas kebersihan beserta operasional dan perlengkapan kerjanya agar pelayanan kebersihan di Kabupaten Bintan dapat berjalan lebih optimal.
- d. Dilakukan penganggaran untuk survey, pengadaan lahan, studi kelayakan, studi Amdal dan sebagainya terhadap pengadaan lahan TPA Bintan Bagian Utara.

7) **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.3.100.750.000,- dan realisasi sebesar Rp.3.071.849.818 atau 99,07%. Outcome dari program ini adalah meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pembangunan/Pemeliharaan Taman Pemakaman Umum (TPU),**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.670.170.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.654.379.608,- atau 99,05%. Penataan Pemakaman sebagai mana tugas pokok dan fungsi nya adalah melaksanakan perencanaan dan pembangunan serta penataan TPU di Kabupaten Bintan agar dapat terlihat lebih tertata dengan baik dan indah. Output yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya sarana dan prasarana areal TPU

antara lain: pemeliharaan TPU di Kabupaten Bintan, pemeliharaan pagar TPU Kecamatan Toapaya dan Kec. Gunung Kijang, Pembangunan Pagar Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Sri Kuala Lobam dan Kecamatan Toapaya. Sedangkan hasil (Outcomes) dari kegiatan tersebut adalah tersedianya sarana dan prasarana areal TPU di Kabupaten Bintan. Dengan luas TPU se-Kabupaten Bintan 996.823 M², maka diperoleh rasio tempat pemakaman di Kabupaten Bintan sebesar 115 m² per 1000 orang penduduk. Dengan demikian kebutuhan lahan untuk TPU sangat tinggi baik pemakaman muslim dan pemakaman non muslim.

(2) **Pembangunan dan Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau.**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.110.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.095.474.521,- atau 98,69%. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau merupakan kegiatan yang mengadakan pembangunan Taman Kota, Pulau Jalan beserta sarana dan prasarananya (Kursi Taman, Taman Bermain, Pagar, Pot Bunga dan Bunga). Pembangunan Taman Kota ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bintan dalam memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau sebagai penyeimbang dari lajunya aktifitas kegiatan pembangunan di bidang ekonomi dan perindustrian di Kabupaten Bintan dan sebagai media sosialisasi antar warga masyarakat di Kabupaten Bintan. Hal ini sesuai dengan landasan pembangunan yang berkelanjutan (**sustainable development**). Output dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pertamanan (pupuk, bibit, obat dan sarana pembibitan tanaman) dan terlaksananya pembangunan taman kota,

sebagai berikut : bahan obat-obatan pertanian, pupuk dan kompos, sarana pembibitan tanaman, tanah hitam dan pohon pelindung, perawatan sarana dan prasarana Taman Kota se-Kabupaten Bintan, pakaian kerja lapangan 7 pasang, Revisi DED Taman Kota Kec. SKL dan Sakera, Taman di depan kantor camat Teluk Bintan, Taman di Mantang, Taman dan Semenisasi di Simpang Pertigaan Gunung Lengkuas dan Kijang Kota, Taman di Pulau Pucung Desa Malang Rapat, Kec. Gunung Kijang, pot bunga besar (100 buah), pot bunga sedang (50 buah), kursi taman di pantai Malang Rapat (75 unit). Sedangkan hasil (Outcomes) yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau selama 1 tahun. Dengan demikian sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Bintan telah membangun Ruang Terbuka Hijau seluas 218.000 m², yang terdiri dari Taman Kota, Mini Zoo, pulau Jalan dan Taman-taman lainnya.

(3) **Operasional dan Pengelolaan Kebun Binatang Kijang**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.320.530.000,- dengan realisasi sebesar Rp.317.610.250,- atau 99,09%. Kegiatan Operasional dan Pengelolaan Kebun Binatang Kijang ini dalam bentuk kebutuhan operasional pemeliharaan binatang dan pemeliharaan fasilitas Mini Zoo Kijang Kota. Output yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah tersedianya operasional dan pengelolaan kebun binatang Kijang sebagai berikut peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan obat-obatan hewan, vitamin, pakan hewan, Pemeliharaan sarana dan prasarana Kebun Binatang (Mini Zoo) Kijang, pemeliharaan kandang kebun binatang, pemeliharaan alat-alat permainan. Hasil (Outcomes) dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan kebun binatang

Kijang. Kebun Binatang Mini Zoo Kijang Kota juga termasuk didalam Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan yang harus dipelihara dan mendapat perhatian dalam hal pemeliharaan binatang dan fasilitas yang ada didalamnya.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem perkotaan. RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka. RTH meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan pemukiman, taman gedung perkantoran dan gedung komersial, lapangan olah raga, pemakaman umum, sepadan sungai, pantai dan kawasan jalur hijau.

Untuk sarana ruang terbuka hijau di Kabupaten Bintan yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri dari 3 (tiga) Taman umum besar yang berada di Kijang Kota seluas 7, 4 ha, Taman Sakera seluas 2 ha dan Taman Seri Kuala Lobam seluas 3 ha. Serta beberapa taman kecil berupa pulau-pulau jalan yang tersebar di kecamatan Kabupaten Bintan, Ruang Terbuka Hijau juga berada di fasilitas sosial dan fasilitas umum diantaranya taman dan parkir gedung olah raga, taman mesjid raya dan lapangan olah raga. Agregat / hasil yang telah dicapai pada TA 2016 dan 5 (lima) tahun terakhir adalah :

No.	Tahun	Indeks
1	2016	218.000 m ²
2	2015	192.801 m ²

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2016 adalah:

1. Taman Kota Sakera (Kp. Bugis)Kec. Bintan Utara : 20.200 M²

2. Taman Kota Sekilo Kecamatan Seri Kuala Lobam : 30.000 M²
3. Taman Kota Kijang Kota Kec. Bintan Timur : 74.000 M²
4. Pulau-pulau jalan di Kabupaten Bintan : 21.890 M²
5. Taman Lain-lain : 71.910 M²

Sehingga total luas RTH yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan adalah sebesar 218.000 M². Dengan demikian persentase luas RTH yang dikelola terhadap luas yang ditargetkan di renstra SKPD tahun 2016 (218.000 M²) yaitu sebesar 133,89 persen. Terjadi peningkatan dari luas RTH di tahun 2016 disebabkan oleh adanya penambahan pembangunan pulau-pulau jalan di beberapa lokasi di Kabupaten Bintan.

No.	Tahun	Indeks
1	2016	115
2	2015	115

Sementara ini pemakaman umum yang ada di Kabupaten Bintan ada beberapa pemakaman yang berada di 7 Kecamatan, namun sampai saat ini belum dikelola oleh pemerintah daerah dengan total luas makam 996.823M². Telah terjadi penurunan daya dukung lahan pemakaman TPU karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah penggunaan lahan pemakaman di setiap tahunnya, sedangkan lahan pemakaman tetap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sangat dibutuhkan adanya penambahan lahan pemakaman di Kabupaten Bintan.

a. Permasalahan dan Saksi

1) Permasalahan

- a. Belum adanya database atau perencanaan pembangunan taman dan pulau jalan yang akan dibangun di Kabupaten Bintan

- b. Belum adanya database atau perencanaan pembangunan dan kebutuhan TPU yang akan dibangun di Kabupaten Bintan.
- c. Kurangnya lahan untuk hewan-hewan yang ada di Mini zoo Kijang Kota

2) Solusi

- a. Dilakukan penganggaran untuk adanya database atau perencanaan pembangunan taman dan pulau jalan yang akan dibangun di Kabupaten Bintan.
- b. Dilakukan penganggaran untuk adanya database atau perencanaan pembangunan dan kebutuhan TPU yang akan dibangun di Kabupaten Bintan.
- c. Dilakukan penambahan lahan untuk fasilitas pemeliharaan binatang di Mini Zoo Kijang Kota.

8) Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.2.380.640.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.301.632.715,- atau 96,68%. Outcome dari program ini adalah meningkatnya penerangan jalan atau fasilitas umum.

Pelaksanaan program terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain :

a. Pelaksanaan Program

1) Pemeliharaan Lampu Jalan / Fasilitas Umum

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.574.320.000,- dengan realisasi sebesar Rp.562.976.018,- atau 98,02%. Kegiatan Pemeliharaan Lampu Jalan / Fasilitas Umum ini

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan seluruh lampu-lampu tersebut agar selalu dapat berfungsi dengan baik. Output yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah terpeliharanya lampu jalan / fasilitas umum sebagai berikut : Pemeliharaan Lampu Jalan se-Kabupaten Bintan (668 buah), Pemeliharaan Lampu Jalan 4 ornament di Kec. Bintim 3 unit, Kec. Binut 3 unit, Kec. Teluk Sebong 1 unit, Kec. Teluk Bintan 1 unit dan Kec. Gunung Kijang 2 unit, Kec. Toapaya 1 unit, Pemeliharaan Lampu Jalan Antik (8 buah) di kawasan ibukota pemerintahan, dan lampu jalan ornament antik se-Kabupaten Bintan (7 buah), pemeliharaan lampu jalan antik Relief Antam Kijang, Pemeliharaan Lampu Hias Sp. Gesek Kec. Toapaya, Lampu Taman Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang. Hasil (Outcomes) dari kegiatan ini adalah meningkatnya penerangan jalan umum / fasilitas umum di Kabupaten Bintan. Adapun data jumlah pengadaan titik lampu sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 1.978 titik lampu. Dan jumlah tersebut menjadi target pemeliharaan selama tahun 2016. Pemeliharaan lampu jalan hanya dilakukan pada lampu jalan yang sudah mengalami kerusakan. Selama tahun 2015 diperoleh data bahwa pemeliharaan lampu jalan dilakukan pada 668 unit lampu jalan. Dengan demikian maka dapat diperoleh persentase pemeliharaan lampu jalan sebesar 43,44 % dari 1.978 unit lampu jalan yang ada.

2) Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan Dan Fasilitas Umum

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.806.320.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.709.105.459,- atau 94,62%. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan dan Fasilitas Umum ini dibutuhkan untuk melakukan perencanaan dan pembangunan serta pemasangan fasilitas PJU di jalan umum maupun untuk fasilitas umum di Kabupaten Bintan. Output yang diperoleh dari

kegiatan tersebut adalah terlaksananya pengadaan dan pemasangan lampu jalan / fasilitas umum sebagai berikut : Adapun banyaknya pengadaan Lampu Jalan yang telah disediakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 1.978 unit lampu jalan yaitu 509 buah lampu di Kec. Bintan Timur, 374 buah lampu di Kec. Gunung Kijang, 334 buah lampu di Kec. Bintan Utara, 224 buah lampu di Kec. Teluk Bintan, 115 buah lampu di Kec. Toapaya, 132 buah lampu di Kec. Seri Kuala Lobam, 41 buah lampu di Kec. Mantang, 145 buah lampu di Kec. Teluk Sebong, 41 buah lampu di Kec. Bintan Pesisir dan 63 buah lampu di Kec. Tambelan. Hasil (Outcomes) yang diperoleh adalah meningkatnya penerangan jalan / fasilitas umum. Pada tahun 2016, telah dilakukan pembangunan PJU di Kabupaten Bintan sebanyak 362 unit. Dengan demikian sampai dengan tahun 2016, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan telah membangun PJU sebanyak 1.978 unit di Kabupaten Bintan.

Penerangan Jalan umum merupakan suatu pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat. Penerangan Jalan Umum meliputi jalan-jalan protokol, jalan gang perumahan, jalan perkantoran, tempat wisata atau lampu taman. Penerangan Jalan Umum telah menyebar Kecamatan pada Kabupaten Bintan. Adapun banyaknya pengadaan Lampu Jalan yang telah disediakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 1.978 unit lampu jalan yaitu 509 buah lampu di Kec. Bintan Timur, 374 buah lampu di Kec. Gunung Kijang, 334 buah lampu di Kec. Bintan Utara, 224 buah lampu di Kec. Teluk Bintan, 115 buah lampu di Kec. Toapaya, 132 buah lampu di Kec. Seri Kuala Lobam, 41 buah lampu di Kec. Mantang, 145 buah lampu di Kec. Teluk Sebong, 41 buah lampu di Kec. Bintan Pesisir dan 63 buah lampu di Kec. Tambelan.

No.	Tahun	Indeks
1	2016	1.978 Unit
2	2015	1.616 unit

Adapun data pengadaan titik lampu di seluruh kecamatan di Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 1.616 unit yang terdiri dari:

1. Kecamatan Bintan Timur : 509 unit.
2. Kecamatan Gunung Kijang : 374 unit.
3. Kecamatan Bintan Utara : 334 unit.
4. Kecamatan Teluk Bintan : 224 unit.
5. Kecamatan Toapaya : 115 unit.
6. Kecamatan Seri Kuala Lobam : 132 unit.
7. Kecamatan Mantang : 41 unit.
8. Kecamatan Teluk Sebong : 145 unit.
9. Kecamatan Bintan Pesisir : 41 unit.
10. Kecamatan Tambelan : 63 unit.

Sehingga total titik lampu jalan yang telah dipasang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sampai dengan dengan tahun 2016 adalah sebanyak 1.978 unit. Dengan demikian persentase titik lampu yang terpasang di Kabupaten Bintan bila dibandingkan dengan target renstra SKPD maka diperoleh persentase sebesar 43,44 %. Dan bila dibandingkan dengan data tahun 2015 maka terjadi penambahan sebanyak 362 unit.

No.	Tahun	Indeks
1	2016	43,44%
2	2015	43,44 %

Adapun data jumlah pengadaan titik lampu sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 1.978 titik lampu. Dan jumlah tersebut menjadi target

pemeliharaan selama tahun 2016. Pemeliharaan lampu jalan hanya dilakukan pada lampu jalan yang sudah mengalami kerusakan. Selama tahun 2016 diperoleh data bahwa pemeliharaan lampu jalan dilakukan pada 668 unit lampu jalan. Dengan demikian maka dapat diperoleh persentase pemeliharaan lampu jalan sebesar 43,44 persen dari 1.978 unit lampu jalan yang ada. Sedangkan bila dibandingkan dengan target pemeliharaan di rentsra SKPD tahun 2016 (30%) maka dapat diperoleh peningkatan persentase yaitu sebesar 13,44 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan anggaran dan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bintan terhadap pelayanan Penerangan Jalan Umum dengan tetap menjaga kondisi lampu yang ada agar tetap hidup dengan kondisi baik.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Sering tertunda atau keterlambatan membayar tagihan PJU sehingga lampu jalan sering dilaporkan mati (tidak hidup).
- b. Banyaknya PJU yang dilaporkan tidak hidup karena adanya kerusakan dan disambar petir.

2) Solusi

- a. Koordinasi dengan DPPKD Kabupaten Bintan untuk lebih tepat waktu dalam pembayaran tagihan PJU di Kabupaten Bintan.
- b. Dilakukan perbaikan terhadap PJU yang rusak melalui kegiatan pemeliharaan PJU.

4.1.4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kedua dan Ketiga** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Pekerjaan Umum** adalah sebagai berikut :

1. Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna);

Adalah kondisi ruas jalan sedang sampai dengan baik, dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas. Bidang Bina Marga menargetkan 1,442% peningkatan menjaga kondisi jalan menjadi mantap sempurna setiap tahunnya sampai dengan tahun 2021. Total panjang yang dibangun sampai dengan 2021 adalah 543,76% jadi targett kondisi jalan mantap sempurna setiap tahunnya sampai dengan 2021 sama dengan 784 M pertahun.

2. Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan;

Sedangkan untuk kondisi existing jalan yang dibangun dan terpelihara sebesar 531,76 km. Ditahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan / peningkatan jalan sebesar 29,095 km. Adapaun realisasi pembangunan / peningkatan jalan di tahun 2016 sebesar 38,270 km atau sebesar 131,53 % dari rencana.

3. Persentase drainase jalan yang terbangun; Kondisi existing persentase drainase jalan yang terbangun sampai tahun 2015 adalah sebesar 8,662%. Ditahun 2016 target penanganan yang rencanakan sebesar 8,66% dengan realisasi sebesar 8,27 % atau sebesar 95,47% dari yang telah direncanakan.

4. Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola 218.000 m²;

No.	Tahun	Indeks
1	2016	218.000 m ²
2	2015	192.801 m ²

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2016 adalah:

1. Taman Kota Sakera (Kp. Bugis) Kec. Bintan Utara: 20.200 M²
2. Taman Kota Sekilo Kecamatan Seri Kuala Lobam : 30.000 M²
3. Taman Kota Kijang Kota Kec. Bintan Timur : 74.000 M²
4. Pulau-pulau jalan di Kabupaten Bintan : 21.890 M²
5. Taman Lain-lain : 71.910 M²

Sehingga total luas RTH yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan adalah sebesar 218.000 M². Dengan demikian persentase luas RTH yang dikelola terhadap luas yang ditargetkan di renstra SKPD tahun 2016 (218.000 M²) yaitu sebesar 133,89 persen. Terjadi peningkatan dari luas RTH di tahun 2016 disebabkan oleh adanya penambahan pembangunan pulau-pulau jalan di beberapa lokasi di Kabupaten Bintan.

5. Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk 115 poin;

No.	Tahun	Indeks
1	2016	115
2	2015	115

Sementara ini pemakaman umum yang ada di Kabupaten Bintan ada beberapa pemakaman yang berada di 7 Kecamatan, namun sampai saat ini belum dikelola oleh pemerintah daerah dengan total luas makam 996.823 M². Telah terjadi penurunan daya dukung lahan pemakaman TPU karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah penggunaan lahan pemakaman di setiap tahunnya, sedangkan lahan pemakaman tetap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sangat dibutuhkan adanya penambahan lahan pemakaman di Kabupaten Bintan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum** dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.131.532.577.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.126.970.665.245,00 atau 96,532 %. Outcome dari program ini adalah meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan.

kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembangunan Jalan,

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.25.240.997.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.24.621.287.828,00 atau 97,545 %. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan/ pengaspalan, peningkatan jalan dengan hasil Output tersediannya prasarana jalan, menambah kapasitas jalan dan jembatan serta memperlancar arus transportasi darat. Untuk mencapai hasil Output tersebut dilaksanakan 11 (sebelas) paket pekerjaan sebagai berikut :

- 1.1 Pembangunan/Pengaspalan Jalan Bukit Balau Desa Berakit Kec. Teluk Sebong (1 Km x 5 M) dengan nilai terkontrak sebesar Rp. 3.687.747.085,00,-
- 1.2 Pembangunan/Pengaspalan Jalan Jengkol KM. 19 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya (1 Km x 4 M) dengan nilai terkontrak sebesar Rp.3.196.237.743,00,-

- 1.3 Pembangunan/Pengaspalan Jalan Berdikari 1 RT. 01/RW. 01 Cikolek Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya (1 Km x 5 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.613.549.247,00,-
- 1.4 Pembangunan/Pengaspalan Jalan Sinjang - Jalan Kencana Kp. Sinjang RT. 04 s/d RT. 03 Desa Toapaya Kec. Toapaya (1,5 Km x 4 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.059.578.264,00,-
- 1.5 Pembukaan Akses Jalan Mekar Sari Lome Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya (425 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.853.706,00,-
- 1.6 Pembukaan Akses Jalan Lingkar Angsana Menuju Gg. Boyan RT. 2 RW. 1 Desa Toapaya Kec. Toapaya (400 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 188.756.000,00,-
- 1.7 Peningkatan/Pengaspalan Jalan KM. 17 LP - Kp. Banjar Lama Kec. Bintan Timur (750 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.864.554.583,00,-
- 1.8 Pembangunan/ Pengaspalan Jalan Kamboja RT I RW I Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang (1 Km x 4 M)
- 1.9 Pembangunan/Pengaspalan Jalan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Bintan (600 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.751.543.143,00,-
- 1.10 Pembangunan/Pengaspalan Jalan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Bintan (600 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.078.097.587,00,-
- 1.11 Pembangunan Badan Jalan SDN. 006 Pulau Ladi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan (400 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 640.257.000,00,-

(2) **Pembangunan Prasarana Transportasi Pedesaan (DAK - REGULER),**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.776.910.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.767.002.972,00 atau 98,725 %. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya peningkatan dan pengaspalan jalan dengan hasil Output tersedianya prasarana jalan, menambah kapasitas jalan serta memperlancar arus transportasi darat. Untuk mencapai hasil Output tersebut dilaksanakan 1 (satu) paket pekerjaan sebagai berikut :

2.1 Peningkatan/Pengaspalan Jalan Kp. Banse (Lanjutan) Desa Penaga Kec. Teluk Bintan (270 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 722.287.972,00,-

(3) **Pembangunan Prasarana Transportasi Pedesaan (DAK - AFFIRMASI)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.4.906.505.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.871.471.086,00,- atau 99,286 %. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembangunan dan pengaspalan jalan dengan hasil Output tersedianya prasarana jalan, menambah kapasitas jalan serta memperlancar arus transportasi darat. Untuk mencapai hasil Output tersebut dilaksanakan 2 (dua) pekerjaan sebagai berikut:

3.1 Peningkatan Jalan Raya Pulau Tambelan Kec. Tambelan (Lanjutan) (1,25 Km) dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.963.700.965,00

3.2 Pembangunan/Pengaspalan Jalan Kel. Kota Baru - Kp. Beringin Kec. Teluk Sebong (500 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.637.236.121,00,-

(4) Pembangunan Infrastruktur Jalan (DAK - AFFIRMASI)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.787.984.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.787.908.999,00,- atau 99,997 %. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembangunan dan pengaspalan jalan dengan hasil Output tersedianya prasarana jalan, menambah kapasitas jalan serta memperlancar arus transportasi darat. Untuk mencapai hasil Output tersebut dilaksanakan 1 (satu) pekerjaan sebagai berikut :

4.1 Pembangunan/Pengaspalan Jalan Kp. Banjar Lama RT. 03/RW. 04 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang (700 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.609.351.999,00,-

(5) Pembangunan Infrastruktur Jalan (DAK - IPD)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.57.249.151.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.57.170.303.370,00,- atau 99,862 %. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembangunan infrastruktur jalan (DAK-IPD) dengan hasil Output tersedianya prasarana jalan, menambah kapasitas jalan serta memperlancar arus transportasi darat. Untuk mencapai hasil Output tersebut dilaksanakan 8 (delapan) paket pekerjaan sebagai berikut :

5.1 Pembangunan/Pengaspalan Jalan Sumber Karya RT. 15 Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya (2 Km) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.768.999.999,00,-

5.2 Pembangunan/Pengaspalan Jalan Kemalai - Lintas Barat Kec. Teluk Bintan (2 Km) dengan nilai kontrak sebesar Rp.6.918.999.999,00,-

- 5.3 Pembangunan/Pengaspalan Jalan Nuri - Kawasan Pusat Pemerintahan Bandar Seri Bentan Kec. Teluk Bintan (2 Km) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.273.740.858,00,-
- 5.4 Peningkatan/Overlay Jalan Sp. Tugu Antam - Mini Zoo - Kolong Enam - Lengkuas Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (3 Km) dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.597.915.598,00,00,-
- 5.5 Pembangunan/Peningkatan Jalan Cikolek - Kawal Kec. Toapaya dan Kec. Gunung Kijang (4,8 Km) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 17.088.972.785,00,-
- 5.6 Pembangunan/Peningkatan Jalan Musi Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (2,5 Km) dengan nilai kontrak sebesar Rp.6.371.114.881,00,-
- 5.7 Pembangunan/Peningkatan Jalan Pasar Baru - Tanjung Permai Kec. Bintan Utara (2 Km) dengan nilai kontrak sebesar Rp.6.347.244.316,00,-
- 5.8 Pembangunan Jembatan Cikolek - Kawal Kec. Gunung Kijang (10 M x 9 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.132.698.434,00,-

(6) Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAK - TAMBAHAN)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.40.300.000.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.36.495.759.325,00,- atau 90,560%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembangunan jalan dengan hasil Output tersedianya prasarana jalan, menambah kapasitas jalan serta memperlancar arus transportasi darat. Untuk mencapai hasil Output tersebut dilaksanakan 4 (empat) paket pekerjaan sebagai berikut :

- 5.1 Pembangunan Jalan Lintas Barat Lanjutan (Ruas 1) Kab. Bintan (Tahap 1) (1,2 Km) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.617.941.803,00,-
- 5.2 Pembangunan Jalan Lintas Barat Lanjutan (Ruas 2) Kab. Bintan (Tahap 1) (1 Km) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.846.491.085,00,-
- 5.3 Pembangunan Jalan Lintas Barat Lanjutan (Ruas 3) Kab. Bintan (Tahap 1) (2,3 Km) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.156.391.904,00,-
- 5.4 Pembangunan Jalan Lintas Barat Lanjutan (Ruas 4) Kab. Bintan (Tahap 1) (2,9 Km) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.580.134.533,00,-

Capaian kinerja tahun 2016 untuk program in antara lain :

1. **Jumlah jembatan yang dibangun;** Adapun kondisi existing jumlah jembatan sampai tahun 2015 adalah 3 unit jembatan. Di tahun 2016, pada awal penyusunan rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan tidak menganggarkan pembangunan jembatan. Namun pada saat pelaksanaan, terbangun 1 unit jembatan atau sebesar 100% di tahun 2016.
2. **Jalan Mantap Marginal;** Adalah kondisi ruas jalan sedang sampai dengan baik. Dari aspek kondisi namun tidak mantap secara aspek pemanfaatan atau sebaliknya. Bidang Bina Marga menargetkan 89,896% peningkatan menjaga kondisi jalan menjadi mantap marginal, sampai dengan tahun 2021 total panjang jalan yang dibangun sampai dengan tahun 2021 adalah 543,76 Km. Jadi target kondisi jalan mantap marginal setiap tahunnya sampai dengan 2021 sampai dengan 488,4589 Km.
3. **Jalan Tidak Mantap** adalah Kondisi ruas jalan secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap. Bidang Bina Marga

menargetkan Kondisi Jalan tidak mantap tidak lebih dari 8,662% per tahunnya sampai dengan tahun 2021. Total Panjang Jalan yang dibangun sampai dengan tahun 2021 sepanjang 543,73 km. Jadi target kondisi jalan tidak mantap setiap tahunnya sampai dengan tahun 2021 maksimal sama dengan 47,099 Km.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Adanya batu besar pada badan jalan pada kegiatan pembangunan jalan (DAK-TAMBAHAN) yang mengakibatkan terkendalanya proses pengerjaan badan jalan

2) Solusi

- a. Dilakukan penyesuaian terhadap desain jalan yang akan dibangun dengan tetap menyesuaikan dengan kaidah teknis dan peraturan perundangan yang berlaku

2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum** dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.2.876.206.800,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.821.173.956,00,- atau 98,087 %. Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil dari program ini adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program

(1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.876.206.800,00,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp.2.821.173.956,00,- atau 98,087%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan Badan Jalan/Lapisan Permukaan/Aspal Jalan dengan hasil Output Terpeliharanya Jalan yang dapat Memperpanjang Umur Jalan dan Memperlancar Arus Transportasi.

Untuk mencapai hasil Output tersebut dilaksanakan 2 (dua) pekerjaan sebagai berikut :

- 1.1 Rehabilitasi/Overlay Jalan Permaisuri Kel. Tanjung Uban Timur Kec. Bintan Utara (750 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.280.170.566,00
- 1.2 Rehabilitasi/Overlay Jalan Tamansari Kec. Bintan Utara (1 Km) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.346.068.810,00

Capaian kinerja tahun 2016 untuk program ini antara lain :

1. **Jumlah jembatan yang dipelihara,** Adapun kondisi existing jumlah jembatan yang dipelihara sampai tahun 2015 adalah 6 unit jembatan. Di tahun 2016, kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan tidak mengganggu pemeliharaan jembatan. Hal ini dikarenakan jembatan yang ada masih dalam kondisi baik.
2. **Panjang jalan aspal yang dipelihara,** Sedangkan untuk kondisi existing panjang jaringan jalan yang terpelihara sebesar 222,93 km. Ditahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum menargetkan pemeliharaan jaringan jalan sebesar 10 km. Adapun realisasi pemeliharaan jaringan jalan di tahun 2016 sebesar 1,75 km atau sebesar 17,50 % dari rencana.

b. Permasalahan dan Solusi

Secara umum paket pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah di jadwal.

3) Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum** dalam rangka optimalisasi saluran drainase jalan untuk mengurangi genangan yang dapat merusak konstruksi jalan. Dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dengan Total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.2.299.940.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.138.379.990,00,- atau 92,975%. Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kapasitas pengembangan sarana dan prasarana perumahan permukiman.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembangunan dan Perbaikan Saluran Drainase Jalan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.795.940.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.672.763.670,00,- atau 93,141%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Box Culvert dengan hasil Output Tersedianya Saluran Drainase di kiri kanan jalan dapat memperlancar aliran air dan menghindari kerusakan jalan akibat genangan air. Untuk mencapai hasil Output tersebut dilaksanakan 7 (tujuh) paket pekerjaan sebagai berikut:

- 1.1 Pembangunan Drainase (400 M') dan Box Culvert (1 Buah)
Jalan Dt. Syahbandar RT.01 dan RT.02/RW. 01 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara dengan nilai kontrak sebesar Rp. 363.478.979,00,-
- 1.2 Pembangunan Drainase (250 M') dan Normalisasi (100 M')
Jl. Permaisuri RT. 01 RW. 01 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara dengan nilai kontrak sebesar Rp.156.165.999,00,-

- 1.3 Pembangunan Drainase (225 M') Kp. Mentigi RW. 01 Kel. Tanjung Uban Kec. Bintan Utara dengan nilai kontrak sebesar Rp.136.390.271,00,-
- 1.4 Pembangunan Drainase (200 M') dan Gorong-Gorong (1 Buah) Jalan Hang Tuah RT. 01 RW. 07 Kec. Bintan Utara dengan nilai kontrak sebesar Rp.139.669.942,00,-
- 1.5 Pembangunan Drainase/Parit Jalan Pasar Baru RT. 04 RW. 01 Desa Seborg Lagoi Kec. Teluk Seborg (500 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp.295.955.864,00,-
- 1.6 Pembangunan Drainase Perumahan Tirta Kencana Jalan Nusantara Km. 18 RT. 02 RW. 02 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (350 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp.204.085.137,00,-
- 1.7 Pembangunan Drainase Jalan Nusantara Km. 20 RT.03 RW.03 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (200 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp. 119.890.478,00,-

(2) **Pembangunan duiker, box culvert dan gorong-gorong jalan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.504.000.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.465.616.320,00,- atau 92,384%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Box Culvert dengan hasil Output Tersedianya Saluran Drainase di kiri kanan jalan dapat memperlancar aliran air dan menghindari kerusakan jalan akibat genangan air. Untuk mencapai hasil Output tersebut dilaksanakan 1 (satu) paket pekerjaan sebagai berikut :

- 2.1 Pembangunan Box Culvert Samping Kantor Desa Lancang Kuning Kec. Bintan Utara (8 M x 3 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp.424.656.020,00.-

Indikator capaian program ini adalah :

- 1) Panjang Drainase Jalan Yang Terbangun;** panjang drainase jalan yang terbangun sampai tahun 2015 sebesar 12.980 m'. Target penanganan di tahun 2016 direncanakan sebesar 4.919 m' dengan realisasi pelaksanaan sebesar 2.125 m' atau sebesar 43,20 % dari rencana.

4.1.5. URUSAN PENATAAN RUANG

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Pertama** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Penataan Ruang** adalah sebagai berikut :

1. **Jumlah dokumen tata ruang dan turunannya yang diperdakan / diperbupkan;** sampai dengan tahun 2016 telah mencapai **4 Perbub/Perda;**
2. **Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**

Urusan Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai kawasan perdagangan bebas industri, pariwisata, kelautan dan perikanan melalui optimasi pemanfaatan ruang yang terintegrasi serta memperhatikan daya dukung lingkungan. Maka diperlukan upaya penyelarasan kebijakan **Penataan Ruang** baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan penataan ruang kepala daerah dibantu oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Sebagai tindak lanjut pada tahun 2016 Pemerintah Daerah telah melakukan Peninjauan Kembali Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan, hal ini berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa pada pasal 16 ayat satu bahwa rencana tata ruang dapat ditinjau kembali. Pada tahun 2016 **tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang** di Kabupaten Bintan mencapai **87,62 persen**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- 1) **Program Perencanaan Tata Ruang**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.170.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.749.087.580,- atau 64,02%. *Outcome* program ini adalah Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Melalui Kajian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bintan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016.**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.670.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.605.257.730,- atau 90,3%. *Output* dan outcome dari kegiatan ini adalah:

1. Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
2. Terlaksananya pengumpulan data primer dan sekunder sebagai bahan telaah dan pengkajian RTRW Eksisting;
3. Terlaksananya koordinasi pengolahan data primer dan sekunder dalam rangka skoring atau penilaian tingkat kualitas dan kesahihan RTRW serta permasalahan pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Bintan;
4. Tersedianya dokumen hasil kajian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bintan dan Rekomendasi hasil kajian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bintan.

(2) **Pendampingan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 143.829.850,- atau 96%. *Output* dari Kegiatan Pendampingan P2KH Kabupaten Bintan dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Terbangunnya kesadaran masyarakat, khususnya dalam mengaktifkan Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya taman Kota.
2. Meningkatnya pengetahuan praktis pada masyarakat, tentang kontribusi apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan Kota Hijau.
3. Tersedianya ruang ekspresi kesenian di ruang terbuka hijau.
4. Meningkatnya interaksi antara kelompok warga.
5. Membudayanya kegiatan masyarakat di taman.

(3) **Ground Cek Point (GCP) RDTR Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dengan alokasi sebesar Rp.350.000.000,-. Namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan waktu untuk melaksanakan kegiatan ini sangat pendek mengingat kegiatan ini melalui proses lelang/ dipihak ketigakan dan pelaksanaan dilapangan membutuhkan waktu 2 hari sehingga kegiatan ini tidak memungkinkan dilaksanakan pada tahun anggaran perubahan 2016.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Pelaksanaan Program Perencanaan Tata Ruang tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

2) **Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.782.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.763.756.610,- atau 97,66%. *Outcome* Meningkatnya Kapasitas Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bintan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Koordinasi Penataan Ruang Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.460.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.453.429.220,- atau 98.57%. *Output* dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang daerah melalui pelaksanaan rapat koordinasi dengan 11 SKPD teknis terkait dan instansi vertikal, monitoring lapangan dan evaluasi capaian penataan ruang daerah.

(2) Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.247.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.241.227.940,- atau 97.66%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi penataan ruang daerah Kabupaten Bintang 10 kecamatan. Berikut Rekapitulasi Pelayan Pemanfaatan Ruang Dan Pengendaliannya TA. 2016.

Tabel 4.4 : Rekapitulasi Pelayan Pemanfaatan Ruang Dan Pengendaliannya TA. 2016.

NO	BULAN	INFORMASI RTRW	REKOMENDASI RTRW		TIDAK DAPAT DITINDAK LANJUTI	TOTAL
			DAPAT DIBERIKAN	TIDAK DAPAT DIBERIKAN		
1.	JANUARI	1	3	1	-	5
2.	FEBRUARI	6	9	2	-	17
3.	MARET	4	13	2	-	19
4.	APRIL	5	9	2	-	16
5.	MEI	5	11	1	-	17
6.	JUNI	5	13	1	-	19
7.	JULI	1	6	-	-	7
8.	AGUSTUS	4	7	2	-	13
9.	SEPTEMBER	1	8	-	-	9
10.	OKTOBER	6	5	1	-	12
11.	NOVEMBER	1	8	1	-	10
12.	DESEMBER	-	-	-	-	-
	TOTAL	39	92	13	3	144

Sumber : BP3D Kabupaten Bintang Tahun 2017

(3) Koordinasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air Kabupaten Bintang Tahun 2016

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.69.099.450,- atau

92%. Kegiatan Koordinasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air Kabupaten Bintan Tahun 2016 menjadi salah satu aksi nyata dalam menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan untuk menjaga, mengelola dan mengawasi serta meningkatkan keandalan kualitas maupun kuantitas sumberdaya air di Kabupaten Bintan.

Output dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya Tim Pelaksana Kegiatan GN-KPA Kabupaten Bintan;
2. Terlaksananya koordinasi horizontal antar instansi terutama yang bergerak dan berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumberdaya air;
3. Terlaksananya koordinasi secara vertikal Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam Aksi Penyelamatan Air;
4. Terlaksananya koordinasi Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kecamatan hingga Kelurahan/Desa serta masyarakat sebagai wujud komitmen untuk menjaga keandalan sumber air di seluruh wilayah Kabupaten Bintan;
5. Tersosialisasikan Gerakan Nasional - Kemitraan Penyelamatan Air sebagai salah satu wujud nyata keterpaduan pembangunan dengan konsep berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Pemanfaatan Tata Ruang tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4.1.6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Empat dan Enam** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2016, pemerintah Kabupaten Bintan berpedoman kepada RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2015. Proses penyusunan seluruh dokumen perencanaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan selalu dalam koridor mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dokumen perencanaan akan menjadi acuan seluruh OPD di Kabupaten Bintan dalam membangun Kabupaten Bintan.

Capaian kinerja **Urusan Perencanaan Pembangunan** dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan** melalui 9 (sembilan) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.994.518.350,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.761.633.678,- atau 88,32%. Outcome Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pendampingan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 66.569.700,- atau 89%. *Output* kegiatan ini adalah Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan Program PAMSIMAS III di Kabupaten Bintan;
2. Pemilihan desa sasaran Program PAMSIMAS III;

3. Melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan desa sasaran Program PAMSIMAS III;
4. Menyusun dan mengusulkan daftar pendek (*short list*) desa sasaran Program PAMSIMAS III;
5. Menverifikasi proposal desa dalam rangka penetapan desa sasaran kegiatan PAMSIMAS III di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016, disepakati 5 (lima) desa penerima program PAMSIMAS III dari 6 (enam) desa yang mengajukan proposal.
6. Dari 5 (lima) desa tersebut, 4 (empat) desa diajukan penganggarannya melalui APBN dan 1 (satu) desa melalui APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut ;

No	Desa	Kecamatan	Penganggar an
1.	Berakit	Teluk Sebong	APBN
2.	Malang Rapat	Gunung Kijang	APBN
3.	Sri Bintan	Teluk Sebong	APBN
4.	Kuala Sempang	Seri Kuala Lobam	APBN
5.	Desa Teluk Sasah	Seri Kuala Lobam	APBD

Sumber : BP3D Kabupaten Bintan Tahun 2017

(2) **Penyelenggaraan Forum SKPD**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.241.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.196.057.100,- atau sebesar 81,35%. *Output* dari Kegiatan ini adalah Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya rumusan akhir rencana kerja SKPD tahun 2016 melalui pelaksanaan forum SKPD yang diikuti oleh SKPD dilingkungan pemerintah Kab. Bintan dan DPRD Kabupaten Bintan.

(3) **Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.120.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar

Rp.112.329.430,- atau 93,61%. *Output* dari kegiatan tersedianya rencana program dan kegiatan kecamatan tahun 2017 melalui asistensi Bappeda pada musrenbang di 10 Kecamatan.

(4) **Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.289.997.150,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.259.960.000,- atau 89,64%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2017 melalui penyelenggaraan musrenbang tingkat Kabupaten yang diikuti unsur SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, DPRD, KADIN, Tokoh Masyarakat, PMDN, Ormas dengan jumlah peserta 200 Orang.

(5) **Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Aparatur dan Pemerintahan**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi dana sebesar Rp.138.400.000,-. Berdasarkan laporan fisik dan keuangan bulan Desember 2016, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.104.390.680,- atau 75,43 %. *Output* dari kegiatan ini adalah Terintegritasnya Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur melalui pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur (19 SKPD/10 Kecamatan dan 9 SKPD) Terdiri dari :

1. 10 Kecamatan (Desa dan Kelurahan)
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan
3. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan
4. Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
5. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan
7. Sekretariat Dewan Kabupaten Bintan
8. Badan Kasatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan

9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan

(6) **Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.250.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.182.322.850,- atau 72,93%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Bintan 2016 - 2020.

(7) **Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan 2016-2020**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.193.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.185.681.128,- atau 96,21%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan 2016 – 2020.

(8) **Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.399.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.375.300.340,- atau 93,92%. *Output* dari kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen RPJMD Kabupaten Bintan dan KLHS RPJMD.

(9) **Penyusun Rancangan RKPD dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.287.521.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.279.022.450,- atau 97,04%. *Output* dari kegiatan ini adalah Tersedianya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Masih kurangnya pemahaman aparat SKPD dalam kemampuan perencanaan, untuk itu perlu peningkatan kemampuan melalui diklat perencanaan.

2) **Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan** melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.587.198.780,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.531.066.200,- atau 90,44%. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan.

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Penyusunan APBD Desa**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.190.534.600,-. Berdasarkan laporan fisik dan keuangan bulan Desember 2016, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.173.149.250,- atau 90,88 %. *Output* dari kegiatan ini adalah tersusunnya APBD Desa se Kabupaten Bintan yang bersumber dari dana APBD. Adapun sasarannya adalah 36 Desa se-Kabupaten Bintan.

(2) **Identifikasi Bobot Desa Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.131.664.180,- dan realisasi sebesar Rp.113.395.980,- atau 86,13 %. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya DAU Desa Kabupaten Bintan dengan Tersusunnya Petunjuk Teknis Penyusunan DAU Desa (1 Dokumen) 36 Desa.

(3) **Sinkronisasi Data Profil Desa dan Kelurahan se Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.165.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.157.985.770,- atau 95,75 %. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Data Profil Desa dan Kelurahan se Kabupaten Bintan yang Akurat,

dengan kelompok sasaran 9 SKPD dan 10 Kecamatan (15 Kelurahan dan 36 Desa)

(4) **Sinkronisasi Penyusunan RPJMDes**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp.86.535.200,- atau sebesar 86,13 %. *Output* dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Desa yang memiliki acuan Perencanaan Pembangunan dengan Tersusunnya Dokumen Perencanaan RPJMDes (21 Dokumen, 21 Desa)

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

3) **Program Inventarisasi Sumber Daya Alam**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan** melalui Kegiatan **Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Kabupaten Bintan** memberikan nilai ekonomi bidang kehutanan yang cukup tinggi. dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 384.400.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.367.564.230,- atau 96%. *Outcome* Meningkatnya Inventarisasi Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Bintan. Dari hasil inventarisasi ini diperoleh angka pemanfaatan (pasiva) yang cenderung masih rendah (perbandingan antara potensi dan pemanfaatan yang masih cukup signifikan) menunjukkan bahwa bidang kehutanan masih memiliki nilai potensi kontribusi ekonomi yang besar.

Kegiatan koordinasi yang dilakukan antara lain :

1. Terlaksananya koordinasi pengolahan data primer dan sekunder dalam rangka scoring dan untuk penghitungan entitas awal sumber daya alam

yang dinyatakan dalam aktiva dan pasiva serta saldo akhir cadangan sumber daya alam pada periode tertentu ;

2. Terlaksananya koordinasi Tim Teknis kegiatan baik secara horizontal maupun vertical dengan instansi teknis bidang kehutanan dalam upaya pengumpulan data potensi sumber daya alam kehutanan di KabupatenBintan;
3. Tersedianya dokumen Neraca Sumberdaya Alam Kehutanan Kabupaten Bintan.

Pelaksanaan Program Inventarisasi Sumber Daya Alam tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4) **Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan** melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.660.472.370,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.616.693.322,- atau 93,37%. Outcome meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

a. Pelaksanaan Program

(1) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.180.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.174.708.592,- atau 97,06%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016. Hasil dari kegiatan ini adalah tersampainya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD, tepat pada waktunya.

(2) **Penyusunan Laporan Bulanan SKPD**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.97.985.100,- atau 97,99%. *Output* dari kegiatan ini terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan SKPD serta terintegrasinya data laporan bulanan kegiatan SKPD kedalam sistem informasi manajemen monitoring dan evaluasi (SIMONEV).

(3) **Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.292.872.370,- dan realisasi sebesar Rp.274.218.810,- atau 93,63%. *Output* dari kegiatan ini adalah terkendalinya rencana pembangunan di Kabupaten Bintan yang didanai dari APBD melalui penyusunan Laporan Bulanan, pelaksanaan Pemantauan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBD, pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi pengendalian.

(4) **Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.87.600.000,-. Berdasarkan laporan fisik dan keuangan bulan Desember 2016, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.69.780.820,- atau 79,66%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan RAD-PPK Kabupaten Bintan yang bersumber dari dana APBD (38 SKPD/1 Laporan) se-Kabupaten Bintan melalui konsolidasi data bersama dengan SKPD terkait dengan Terlaksananya pelaporan RAD-PPK Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Masih kurangnya pemahaman aparat SKPD dalam menyusun laporan LKPJ yang informatif

- b. Masih lambatnya SKPD menginput/mengupdate laporan fisik dan keuangan bulanan yang seharusnya disampaikan pada awal bulan

2) **Solusi**

- a. Memberikan bimtek LKPJ agar lebih meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan para peserta, khususnya dalam membuat laporan pertanggung jawaban SKPD mengenai tugas-tugasnya, memahami dan mengetahui secara umum tentang jenis-jenis laporan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Perlunya dibuat Peraturan Kepala Daerah yang menekankan pentingnya laporan bulanan SKPD disampaikan tepat waktu.

5) **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten** Bintan melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.192.296.625,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.117.018.790,- atau 93,68 %. *Outcome* meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan ekonomi.

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Kemiskinan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.159.443.750,-. Berdasarkan laporan fisik dan keuangan bulan Desember 2016, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.148.279.990,- atau 92,99 %. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan penduduk yang telah menerima manfaat dari program-program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari dana APBN serta APBD. Adapun sasarannya adalah 10 Kecamatan se-Kabupaten Bintan melalui konsolidasi data bersama dengan SKPD terkait dan survey

dilapangan. Terlaksananya program percepatan penanggulangan kemiskinan dalam peningkatan efektifitas program-program bantuan untuk rumah tangga sasaran.

(2) **Koordinasi Pengendalian & Evaluasi Program-Program Kemiskinan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.232.510.200,- dan realisasi sebesar Rp.222.189.990,- atau 95,56 %. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengendalian/ evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari dana cost sharing Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Melalui rapat koordinasi pembangunan serta pelaksanaan monitoring di 10 Kecamatan.

(3) **Penyusunan Laporan Evaluasi MDGS**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.137.200.000,- dan realisasi sebesar Rp.129.420.230,- atau 94,32 %. *Output* dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan capaian dengan 7 Tujuan dan 49 indikator MDG's di Kabupaten Bintan, adapun tujuan tersebut adalah : (1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. (2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua. (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. (4) Menurunkan angka kematian anak.(5) Meningkatkan kesehatan ibu.(6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.(7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup. Dari 7 tujuan dan 49 indikator MDGs di atas dapat dilaporkan bahwa : (1) Tercapai, 44 indikator atau 89,08%; (2) Akan tercapai, 4 indikator atau 25,0%; (3) Perlu Perhatian Khusus 1 indikator atau 9,1%.

(4) **Pelaksanaan Program Kabupaten Sehat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.213.353.800,-, dengan realisasi sebesar Rp.208.591.810,- atau sebesar 97,77 %. *Output* dari kegiatan ini adalah

Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Program Kabupaten Sehat dengan baik dapat dibuktikan dengan Kabupaten Bintan yang mendapat penghargaan Swasti saba sebagai salah satu Kabupaten/Kota sehat di Indonesia.

(5) **Penyusunan Potret Pembangunan Manusia**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.199.898.875,-, anggaran tersebut hanya dapat terserap sebesar Rp.184.234.750,- atau sebesar 92,16 %. adapun output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penyusunan Potret Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan.

(6) **Penyusunan Analisa Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.249.890.000,- adapun output kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan Analisa Indikator Pertumbuhan Ekonomi di 10 kecamatan. Dengan realisasi terealisasi sebesar Rp.224.302.020,- atau sebesar 89,76 %.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangun Sosial tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4.1.7. URUSAN PERUMAHAN

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Dua** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan **Perumahan** adalah sebagai berikut :

1. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Kondisi existing persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sampai tahun 2015 sebesar 63,75% dari total jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Bintan. Di tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum menargetkan jumlah persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 73,02%, sedangkan realisasi dari program ini sebesar 74,18 % atau sebesar 101,59 % dari rencana. Dengan demikian target indikator kinerja untuk tahun 2016 dapat dipenuhi dengan baik. Dengan terpenuhinya target di tahun 2016, maka persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih mengalami peningkatan sebesar 10,43%.

2. Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perdesaan Yang Terpasang

Untuk jumlah saluran rumah (SR) di perdesaan, kondisi existing sampai tahun 2015 sesuai RPJMD 2016 – 2021 sebesar 3302 SR. Target penanganan di tahun 2016 sebesar 654 SR dengan realisasi pelaksanaan sebesar 624 SR atau sebesar 95,41%.

3. Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perkotaan Yang Terpasang

jumlah saluran rumah (SR) di perkotaan, kondisi existing sampai tahun 2015 sesuai RPJMD 2016 – 2021 sebesar 2410 SR. Target penanganan di tahun 2016 sebesar 177 SR dengan realisasi pelaksanaan sebesar 187 SR atau sebesar 105,65%. Untuk sambungan SR kawasan perkotaan realisasi pelaksanaan telah melebihi dari rencana penanganan yang direncanakan pada tahun 2016.

4. Jumlah luas kawasan kumuh perkotaan (98,01 Ha); pada tahun 2016 ditargetkan kawasan kumuh perkotaan berkurang menjadi 18,01 Ha, sedangkan realisasi tahun 2016 luasan kawasan kumuh perkotaan berkurang menjadi 15 Ha. Target tersebut tidak dapat tercapai disebabkan adanya efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Bintan sehingga tidak dapat

dilaksanakannya kegiatan yang mendukung secara optimal demikian pula dengan adanya rasionalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.

5. **Persentase kawasan permukiman yang tertata (6.176,36 Ha);**

Kondisi existing kawasan permukiman yang tertata sampai tahun 2015 sesuai RPJMD kabupaten Bintan tahun 2016 - 2021 adalah sebesar 3,3 % dari total luasan kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Bintan. Target penanganan yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan tahun 2016 ini adalah sebesar 8% dengan realisasi penanganan sebesar 6,07% atau sebesar 75,88% dari rencana.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1) **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum** dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman. Total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.1.375.000.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.342.617.679,00,- atau 97,645%. *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kapasitas pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pembangunan SPAM Perdesaan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.375.000.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.342.617.679,00,- atau 97,645%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Peningkatan SPAM dan Jaringan Sarana Air Bersih, Pembangunan SPAM dan SAB dengan hasil *Output* Tersedianya Sarana Air Minum Bagi

Masyarakat Perdesaan. Untuk mencapai hasil *Output* tersebut dilaksanakan 5 (lima) paket pekerjaan sebagai berikut :

- 1.1 Optimalisasi SPAM RT. 02 RW. 05 Kp. Mansur Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp.215.521.809,00,-
- 1.2 Pembangunan SPAM RT 04 RW 02 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 203.258.508,00,-
- 1.3 Pembangunan SPAM Pedesaan RT. 03 RW. 03 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp.200.043.434,00,-
- 1.4 Pembangunan Sarana Air Bersih Tg. Elong Desa Mantang Lama Kec. Mantang (2,5 M x 2,5 M, 2 unit) dengan nilai kontrak sebesar Rp.229.249.981,00,-
- 1.5 Optimalisasi Jaringan Sarana air Bersih Dari Desa Kukup Menuju Pelabuhan Desa kukup Kec. Tambelan (Perpipaan 3.000 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp.325.691.997,00,-

(2) **Pembangunan Dan Peningkatan SPAM IKK dan Perkotaan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.291.202.873,00,- atau 97,068%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Optimaslisasi SPAM IKK dengan hasil *Output* Tersedianya Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Perdesaan. Untuk mencapai hasil *Output* tersebut dilaksanakan 1 (satu) pekerjaan sebagai berikut :

- 2.1 Optimalisasi SPAM IKK Kawal Rumah Bahagia Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang (1 Paket) dengan nilaikontrak sebesar Rp. 257.756.033,00,-

(3) **Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi (DAK - REGULER)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.504.670.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.504.664.000,00,- atau 99,999 %. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah dengan hasil *Output* Tersedianya Infrastruktur Sanitasi Bagi Masyarakat Perdesaan. Untuk mencapai hasil *Output* tersebut dilaksanakan 1 (satu) pekerjaan sebagai berikut :

3.1 Pembangunan dan Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL Komunal) Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan dengan nilai kontrak sebesar Rp.479.436.000,00,-

(4) **Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK - REGULER)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.666.820.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.629.537.897,00,- atau 94,409 %. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK - REGULER) dengan hasil *Output* Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK - REGULER). Untuk mencapai hasil *Output* tersebut dilaksanakan 1 (satu) pekerjaan sebagai berikut :

4.1 Pengembangan SPAM IKK Toapaya Kec. Toapaya (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp.548.893.897,00,-

(5) **Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK - AFFIRMASI),**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.944.160.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.815.780.783,00,- atau 86,403 %. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK - AFFIRMASI) dengan hasil *Output* Tersedianya

Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK - AFFIRMASI). Untuk mencapai hasil *Output* tersebut dilaksanakan 1 (satu) pekerjaan sebagai berikut

1.1 Pengembangan SPAM Pulau Tambelan Kec. Tambelan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 726.996.783,00,-

(6) **Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK - IPD)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.7.523.991.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.313.872.514,00,- atau 97,207 %. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK-IPD) dengan hasil *Output* Tersedianya Infrastruktur Air Minum Bagi Masyarakat Perdesaan. Untuk mencapai hasil *Output* tersebut dilaksanakan 13 (tigabelas) pekerjaan sebagai berikut :

6.1 Pengembangan SPAM IKK Seri Kuala Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.581.198.828,00,-

6.2 Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan Kp. Pelita Baru Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp.712.239.536,00,-

6.3 Pengembangan SPAM Numbing Kecamatan Bintan Pesisir (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp.463.506.640,00,-

6.4 Pengembangan SPAM Kelong Kecamatan Bintan Pesisir (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp.277.297.330,00,-

6.5 Optimalisasi dan Pengembangan SPAM Mapur Kecamatan Bintan Pesisir (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp.463.457.087,00,-

6.6 Optimalisasi dan Pengembangan SPAM Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp.668.218.284,00,-

- 6.7 Optimalisasi dan Pengembangan SPAM Kp. Bugis Kecamatan Bintan Utara (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp.474.944.646,00,-
 - 6.8 Optimalisasi dan Pengembangan SPAM Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp.474.939.312,00,-
 - 6.9 Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 274.999.971,00,-
 - 6.10 Peningkatan Kapasitas SPAM Desa Malang Rapat dan Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp.272.933.336,00,-
 - 6.11 Optimalisasi dan Pengembangan SPAM Desa Penaga Teluk Bintan (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp.454.240.030,00,-
 - 6.12 Pengembangan SPAM IKK Kawal Kecamatan Gunung Kijang (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 451.252.347,00,-
 - 6.13 Optimalisasi SPAM Kp. Bugis Kecamatan Bintan Utara (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 149.661.000,00,-
- (7) **Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi (DAK – AFFIRMASI)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.7.523.991.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.313.872.514,00,- atau 97,207%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK - IPD) dengan hasil *Output* Tersedianya Infrastruktur Air Minum Bagi Masyarakat Perdesaan. Untuk mencapai hasil *Output* tersebut dilaksanakan 2 (dua) paket pekerjaan sebagai berikut :

7.1 Pembangunan Septic tank Komunal Desa Air Glubi Kec. Bintang Pesisir (4 Unit) dengan nilai kontrak swadaya Rp.621.595.000,00,-

7.2 Pembangunan Septic tank Komunal Desa Mapur Kec. Bintang Pesisir (4 Unit) dengan nilai kontrak swadaya Rp.621.595.000,00,-

(8) Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK - IPD)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.2.322.170.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.222.165.040,00,- atau 95,693%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi IPAL dan Toilet Umum (DAK - IPD) dengan hasil *Output* Tersedianya Infrastruktur Sanitasi Bagi MBR dan Umum. Untuk mencapai hasil *Output* tersebut dilaksanakan 4 (empat) pekerjaan sebagai berikut :

8.1 Pembangunan Toilet Umum Kawasan Wisata Pantai Trikora Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang dengan nilai kontrak Rp.357.575.540,00

8.2 Pembangunan Toilet Umum Pasar Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang dengan nilai kontrak Rp.347.980.315,00,-

8.3 Pembangunan Toilet Umum Lapangan Olah Raga Kijang Kota dengan nilai kontrak Rp.367.414.068,00,-

8.4 Pembangunan Toilet Umum Taman Kota Kijang dengan nilai kontrak Rp. 347.425.117,00,-

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Permasalahan lahan pada kegiatan Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK - IPD) yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pada proses penyelesaian pekerjaan.

2) **Solusi**

- a. Untuk penyelesaian permasalahan lahan, dilakukan pendekatan secara persuasif terhadap pemilik lahan yang bersangkutan
- b. Dilakukan addendum waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan tetap memperhatikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak melewati tahun anggaran
- c. Untuk pekerjaan yang mengalami keterlambatan akibat dari kelalaian pihak penyedia jasa, dilakukan dengan mekanisme denda sesuai dengan hari keterlambatan

2) **Program Pengendalian Banjir**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum** dalam rangka mengatasi permasalahan dan dampak yang ditimbulkan akibat banjir yang terjadi. Dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan Total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.1.359.436.500,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.339.140.461,00,- atau 98,507%. *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kapasitas tampungan dan pengaliran saluran/sungai. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil dari program ini adalah sebagai berikut :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pemeliharaan dan normalisasi saluran/sungai,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.359.436.500,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.339.140.461,00,- atau 98,507%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Normalisasi Saluran/ Sungai dengan hasil *Output* Terbentuknya Alur Saluran/Sungai Yang Baik (Memenuhi Kaidah Sistem Pengaliran Air) dan Memperlancar Serta Meningkatkan Debit Aliran. Untuk mencapai hasil *Output* tersebut dilaksanakan 6 (enam) pekerjaan sebagai berikut :

- 1.1 Normalisasi (550 M'), Perkuatan Talud (260 M') dan Duiker (4 M x 2,5 M x 1,5 M) Belakang Masjid Al Mustaqin - SD. 008 RT. 01/RW.01 Kp. Bugis Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp.319.320.203,00,-
- 1.2 Normalisasi Drainase Lingkungan Pasar Baru Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara (104 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp. 89.785.862,00,-
- 1.3 Normalisasi Parit dan Batu Miring RT. 16 s/d RT. 17 RW. 05 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 167.390.112,00,-
- 1.4 Normalisasi Saluran/Sungai dan Pembangunan Talud RW. 05 s/d RW. 03 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang (500 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp.431.302.999,00,-
- 1.5 Normalisasi Parit RT. 03 RW. 05 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang (124 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp.109.845.357,00,-
- 1.6 Normalisasi Drainase Jalan Segame RT. 02 RW. 05 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang (93 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp.89.902.728,00,-

Capaian kinerja tahun 2016 untuk program ini adalah :

- **Jumlah Panjang Normalisasi Saluran/Sungai**

Kondisi existing saluran/sungai yang telah di normalisasi sampai tahun 2015 adalah sebesar 2.550 m'. Ditahun 2016 target penanganan yang rencanakan sebesar 2.521 m' dengan realisasi sebesar 1771m' atau sebesar 70,25% dari yang telah direncanakan.

- b. **Permasalahan dan Solusi**

Secara umum paket pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah di jadwal.

3) **Program Penyehatan Lingkungan Permukiman**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum** dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan permukiman guna menjaga kesehatan dilingkungan masyarakat. Dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.2.019.750.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.003.285.126,00 atau 99,185 %. *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kapasitas penyehatan lingkungan permukiman. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil dari program ini adalah sebagai berikut :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 2.019.750.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.003.285.126,00,- atau 99,185%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Parit/Drainase Lingkungan dengan hasil *Output* Terbentuknya Aliran Parit/Drainase Lingkungan yang Baik dan Memperlancar Aliran Air.

Untuk mencapai hasil *Output* tersebut dilaksanakan 11 (sebelas) pekerjaan sebagai berikut :

- 1.1 Pembangunan Drainase/Parit RT. 08 RW. 02 (Perum Bumi Sijori Indah) Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara (300 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp.156.851.749,00,-
- 1.2 Pembangunan Drainase Gg. Mandiri s/d Gg. Mitra RT. 03 RW. 01 Kel. Tanjung Uban Timur Kec. Bintan Utara (471 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.844.205,00,-
- 1.3 Pembangunan Drainase/Parit RT. 03 RW. 02 Desa Seborg Lagoi Kec. Teluk Seborg (602 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp.218.263.411,00,-

- 1.4 Perbaikan Drainase Kp. Suka Damai RT. 02 RW.02 Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam (255 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp.134.621.999,00,-
- 1.5 Pembangunan Drainase Perumahan Lobam Bestari Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam (474 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.862.587,00,-
- 1.6 Pembangunan Drainase Kp. Simpangan RT. 03 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya (272 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp. 156.857.000,00,-
- 1.7 Pembangunan Drainase/Parit Gg. Merdeka - Gg. Makmur RT. 004 RW. 002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (500 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp.252.337.296,00,-
- 1.8 Pembangunan Drainase RT. 02 RW. 22 (Samping Mushola Ma'asajidin) Kp. Kolong Enam Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (179 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp. 106.960.551,00,-
- 1.9 Pembangunan Drainase RT. 02 RW. 13 Perumnas Tekojo Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (237 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp.89.894.862,00,-
- 1.10 Pembangunan Drainase RT. 02 RW. 22 Gg Kesuma 2 Kp. Kolong Enam Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (237 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp.89.893.993,00,-
- 1.11 Pembangunan Drainase RT. 01 RW. 06 Jalan Sri Bay Intan Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (300 M') dengan nilai kontrak sebesar Rp.184.823.673,00,-

Capaian kinerja tahun 2016 untuk program ini adalah :

- **Jumlah Luas Kawasan Kumuh Perkotaan (98,01 Ha)**
Pelaksanaan program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah luasan kawasan kumuh yang ada di kabupaten Bintan. Melalui program ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan

menargetkan penanganan kawasan kumuh sebesar 18,01 Ha. Dalam pelaksanaannya realisasi penanganan kawasan permukiman kumuh di tahun 2016 ini sebesar 15 Ha atau sebesar 83,29 % dari target yang direncanakan.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Secara umum paket pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah di jadwal.

4) **Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum** dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman. Dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan Total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.18.854.991.600,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.549.057.807,00,- atau 98,377 %. *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kapasitas pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil dari program ini adalah sebagai berikut :

a. **Permasalahan dan Solusi**

(1) **Pembangunan Pelantar / Tambatan Perahu**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.4.724.776.750,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.606.399.191,00,- atau 97,49%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Pelantar Permukiman/ Tambatan Perahu Nelayan dengan hasil *Output* Tersedianya Bangunan Pelantar Permukiman/Tambatan Perahu. Untuk mencapai hasil *Output* tersebut dilaksanakan 13 (tigabelas) paket pekerjaan sebagai berikut :

- 1.1 Pembangunan Pelantar Beton Nelayan Hulu Riau RT. 04/RW. 02 Kel. Tanjung Uban Kec. Bintan Utara (170 M x 1,5 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp.532.489.519,00,-.
- 1.2 Rehabilitasi Pelantar Beton Bertulang Kp. Mentigi Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara (103 M x 1,7 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp.143.837.298,00,-
- 1.3 Pembangunan Pelantar Penghubung Keter Laut - Keter Tengah Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan (360Mx2M) dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.745.729.960,00,-
- 1.4 Pembangunan Pelantar/Tambatan Perahu RT. 03/RW. 1 Kp. Kawal Pantai Kel. Kawal. Kec. Gunung Kijang (25 M x 2 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 149.910.749,00,-
- 1.5 Pembangunan Pelantar Beton Gg. Nelayan RT. 3 RW. 17 Kp. Kolam Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (53 M x 1,5 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.812.834,00
- 1.6 Pembangunan Pelantar Rakyat Batu Licin Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (40 M x 2 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp.179.774.212,00,-
- 1.7 Pembangunan Pelantar Masyarakat RT. 02 RW. 01 Pasir Merah Desa Mantang Baru Kec. Mantang (32 M x 1,5 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 129.636.973,00
- 1.8 Pembangunan Pelantar Desa Dendun Kec. Mantang (45 M x 1,5 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.690.710,00
- 1.9 Pembangunan Pelantar Beton Gg. Jampong RT. 004 RW. 001 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (72 M x 1,5 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp.264.638.317,00
- 1.10 Pembangunan Pelantar Gg. Jebong RT.03 RW.01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (42 M x 1,5 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp.169.922.769,00

- 1.11 Pembangunan Pelantar Amzani RT. 04 RW. 01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (42 M x 1,5 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 169.879.708,00
- 1.12 Pembangunan Pelantar Gg. Zainuddin RT. 06 RW. 02 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (35 M X 1,5 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 139.837.928,00
- 1.13 Pembangunan Pelantar Gg. Selikur RT. 03 RW. 01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (45 M x 1,5 M) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.938.939,00

(2) Pembangunan Jalan Semenisasi/Paving Block dan Buras

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.12.193.866.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.030.094.085,00,- atau 98,657 %. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan jalan lingkungan,semenisasi/Paving block/ buras dan sarana pendukung dengan hasil *Output* tersedianya jalan lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman. Untuk mencapai hasil Output tersebut dilaksanakan 58 (limapuluh delapan) paket pekerjaan sebagai berikut:

- 2.1 Pembangunan Semenisasi Beton Bertulang Jalan Indun Suri Kp. Lembah Sari RT. 012 RW. 02 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara (601 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.314.522.667,00,-
- 2.2 Pembangunan Semenisasi Beton Bertulang Gg. Durin RT. 01 RW. 02 Desa Lancang Kuning Kec. Bintan Utara (267 M2)) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 139.687.825,00,-
- 2.3 Pembangunan Paving Blok Gg. Wonorejo RT. 11 RW. 2 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara (618 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.845.172,00,-
- 2.4 Pembangunan Paving Blok Gg. Bambu Jalan Datuk Syahbandar Kp. Kamboja Dalam RT. 01 RW. 01 Kel.

- Tanjung Uban Selatan Kec. Bintang Utara (537 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.172.850.070,00,-
- 2.5 Pembangunan Paving Blok Gg. Cempaka Putih Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintang Utara (483 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.155.445.890,00,-
- 2.6 Pembangunan Paving Blok, Penimbunan Tanah dan Gorong-gorong Gg. Yayasan Ar Rahman Taman Sari Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintang Utara (1 Paket) dengan nilai kontrak sebesar Rp.155.154.942,00,-
- 2.7 Pembangunan Paving Blok Gg. Wahid Dalam Desa Lancang Kuning Kec. Bintang Utara (435 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.139.845.491,00,-
- 2.8 Pembangunan Paving Blok Jalan Kamboja Gg. Jono Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintang Utara (342 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.109.306.755,00,-
- 2.9 Pembangunan Semenisasi Beton Bertulang Jalan Martosari Gg. Delima RT. 11 RW. 02 Kec. Bintang Utara (258 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 134.356.592,00
- 2.10 Pembangunan Semenisasi Beton Bertulang Jalan Perum Griya Bima Kencana RT. 06 RW. 02 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintang Utara (2.277 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.932.895.288,00
- 2.11 Pembangunan Semenisasi Beton Bertulang Jalan Senggiling Desa Sri Bintang Kec. Teluk Sebong (382 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.199.743.817,00,-
- 2.12 Pembangunan Semenisasi Buras Beton Bertulang Jalan Pecah Gelas Desa Sebong Lagoi Kec. Teluk Sebong (1.870 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 929.554.389,00
- 2.13 Pembangunan Semenisasi Beton Bertulang Gg. Karet RT. 01/RW. 04 Poyotomo Desa Sri Bintang Kec. Teluk Sebong (230 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 94.890.871,00,-

- 2.14 Pembangunan Semenisasi Buras Beton Bertulang Desa Ekang Anculai Kec. Teluk Sebong (382 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.199.768.316,00,-
- 2.15 Pembangunan Paving Blok Gg. Kertosono menuju Gg. Kemunting Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam (311 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.845.341,00,-
- 2.16 Pembangunan Semenisasi Beton Buras Bertulang Gg. Meranti Kec. Seri Kuala Lobam (286 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 148.015.731,00,-
- 2.17 Pembangunan Semenisasi Beton Buras Bertulang Gg. Nuri RT. 02 RW. 02 Kec. Seri Kuala Lobam (248 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 127.087.612,00
- 2.18 Pembangunan Paving Blok Gg. Salam menuju Gg. Kemunting Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam (345 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.109.850.373,00,-
- 2.19 Pembangunan Paving Blok Masjid Al Kautsar Cikolek Kec. Toapaya (481 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 154.940.901,00
- 2.20 Pembangunan Paving Blok Jalan Gereja Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang (543 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 201.178.384,00,-
- 2.21 Pembangunan Paving Block RT. 01/RW. III Kp. Beringin Depan Masjid Al-Furqon Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang (210 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 67.886.023,00
- 2.22 Pembangunan Semenisasi Buras Beton Bertulang Jalan Kangboi Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya (382 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.199.767.960,00 , -
- 2.23 Pembangunan Paving Blok Jalan Melati Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya (311 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.484.865,00,-

- 2.24 Pembangunan Paving Blok Jalan Mawar RT. 12 RW. 4 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya (404 M2) dengan nilai kontrak sebesar : Rp.128.455.904,00
- 2.25 Pembangunan Paving Blok Jalan Manunggal II Gg. Kenanga (Pokok Baru) Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya (536 M2) nilai kontrak sebesar : Rp. 172.342.152,00,-
- 2.26 Pembangunan Rabat Beton Kp. Simpangan RT. 02 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya (621 M2) nilai kontrak sebesar : Rp. 199.864.377,00,-
- 2.27 Pembangunan Semenisasi Buras Beton Bertulang Batu Parang RT. 06 RW. 03 Desa Kp. Hilir Kec. Tambelan (250 M2) nilai kontrk sebesar Rp.179.683.070,00,-
- 2.28 Pembangunan Jalan Semenisasi Buras Beton Bertulang Teluk Abek Desa Batu Lepuk Kec.Tambelan (250 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.179.843.569,00,-
- 2.29 Pembangunan Jalan Semenisasi Buras Beton Bertulang Jalan Lancang Desa Teluk Sekuni Kec.Tambelan (528 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 376.212.197,00,-
- 2.30 Pembangunan Jalan Semenisasi Buras Beton Bertulang menuju Makam dan SDN 002 RT. 006 RW. 003 Desa Kp. Hilir Kec. Tambelan (252 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 180.809.368,00,-
- 2.31 Pembangunan Jalan Paving Blok Mawar RT. 07/RW. 04 dan RT. 06/RW. 03 Desa Pangkil Kec. Teluk Bintan (670 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 248.233.303,00,-
- 2.32 Pembangunan Semenisasi Beton Buras Bertulang Jalan Balai Rejo Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan (382 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.756.813,00,-
- 2.33 Pembangunan Semenisasi Beton Buras Bertulang Jalan Kampung Belak Desa Penaga Kec. Teluk Bintan (382 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.803.410,00,-

- 2.34 Pembangunan Paving Blok Jalan Lapangan RT. 12 RW. 06
Tg. Kudus Desa Pangkil Kec. Teluk Bintan (371 M2)
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 140.515.652,00,-
- 2.35 Pembangunan Jalan Paving Blok Gg. Makmur dan Gg.
Bersama RT. 04 RW. 02 Kel. Gunung Lengkuas Kec.
Bintan Timur (592 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.
190.490.000,00,-
- 2.36 Pembangunan Jalan Paving Blok Gg. Suka Damai RT. 04
RW. 01 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur
(Lanjutan) (473 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.
152.350.883,00,-
- 2.37 Pembangunan Paving Block Gg. Bahrul Ulum RT. 02 RW.
02 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (559 M2)
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.890.011,00,-
- 2.38 Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Jalan
Akasia RT. 03/RW. III KM 20 Kel. Gunung Lengkuas Kec.
Bintan Timur (191 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.
99.843.045,00,-
- 2.39 Pembangunan Paving Block Gg. Sei Jati I RT. 01 RW. 01
Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (450 M2)
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 144.725.883,00,-
- 2.40 Pembangunan Paving Block Gg. Cempaka RT. 04 RW. 03
Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (668 M2) dengan
nilai kontrak sebesar Rp. 203.232.390,00,-
- 2.41 Pembangunan Paving Block Gg. Wisata I RT. 04 RW. 03
Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (322 M2)
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 103.585.150,00,-
- 2.42 Pembangunan Paving Block Gg. Asyura RT. 1 RW. 3
Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (284 M2) dengan
nilai kontrak sebesar Rp. 91.263.367,00,-
- 2.43 Pembangunan Paving Block Gg. Rawa Indah RT. 2 RW. 2
Bangun Rejo Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur

- (553 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 177.866.508,00,-
- 2.44 Pembangunan Jalan Semenisi Buras Beton Bertulang Gg. Mawar RT. 03 RW. 03 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintang Timur (420 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 208.833.663,00,-
- 2.45 Pembangunan Semenisi Buras Beton Bertulang Jalan Nusantara KM. 20 Gg. Melati RT. 03/RW. 03 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintang Timur (390 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp 199.875.172,00,-
- 2.46 Pembangunan Paving Blok RT. 002 RW. 001 Kp. Telaga Biru Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintang Timur (435 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.139.890.266,00,-
- 2.47 Pembangunan Paving Blok Jalan Musi Gg. Brantas RT. 02 RW. 03 Kel. Sei Lekop Kec. Bintang Timur (714 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.229.537.861,00,-
- 2.48 Pembangunan Jalan Paving Blok Halaman TPQ Nurul Qomar Kp. Sido Mulyo RT. 02 RW. 05 Kel. Sei Lekop Kec. Bintang Timur (311 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.899.007,00,-
- 2.49 Pembangunan Paving Blok Jalan Korindo Kp. Jawa Gg. Natuna 1 RT. 01 RW. 02 Kel. Sei Lekop Kec. Bintang Timur (559 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.179.617.168,00,-
- 2.50 Pembangunan Paving Blok RT. 01 RW. 02 Kp. Jawa Gg. Natuna Kel. Sei Lekop Kec. Bintang Timur (559 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.179.900.507,00,-
- 2.51 Pembangunan Jalan Semenisi Buras Beton Bertulang Jalan Musi Gg. Sepat Kel. Sei Lekop Kec. Bintang Timur (Lanjutan) (248 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.129.870.467,00,-

- 2.52 Pembangunan Paving Block Gg. Mawar 2 Kp. Baru RT. 2 RW. 1 Kel.Sei Lekop Kec.Bintan Timur (365 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.117.343.426,00,-
- 2.53 Pembangunan Paving Block RT. 01 RW. 01 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (528 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.169.890.682,00,-
- 2.54 Pembangunan Paving Block RT. 01 RW. 02 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (528 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp.169.892.474,00,-
- 2.55 Pembangunan Jalan Semenisasi Buras Beton Bertulang Perum Octaviary - Garuda Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (344 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.897.202,00,-
- 2.56 Pembangunan Paving Block Gg. Jahe RT. 4 RW. 2 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (Lanjutan) (365 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 117.265.541,00,-
- 2.57 Pembangunan Semenisasi Buras Beton Bertulang Jalan Nusantara Km. 20 Gg. Melati RT. 03/RW. 03 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (Lanjutan) (332 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 184.907.455,00,-
- 2.58 Pembangunan Paving Blok Jalan Korindo Gg. Bodri II RT. 03 RW. 02 Korindo - Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (570 M2) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 189.848.097,00,-

(3) **Penanganan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman (DAK-IPD)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.498.129.000,00,- atau 99,875%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Kapasitas Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman. Untuk

mencapai hasil *Output* tersebut dilaksanakan 3 (tiga) paket pekerjaan sebagai berikut :

3.1 Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Desa E kang Anculai di Kecamatan Teluk Sebong (11 Unit) dengan alokasi anggaran Rp.165.000.000,00,-

3.2 Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Desa Sebong Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong (44 Unit) dengan alokasi anggaran Rp.660.000.000,00,-

3.3 Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Desa Sebong Pereh di Kecamatan Teluk Sebong (40 Unit) dengan alokasi anggaran Rp.600.000.000,00,-

b. **Permasalahan dan Solusi**

Secara umum paket pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah di jadwal.

4.1.8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Tujuh** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga** adalah sebagai berikut :

1. **Persenstase Organisasi Kepemudaan yang aktif** sebesar 60.00 persen, dan realisasi untuk indikator ini 60.00 persen atau capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan adalah 100 persen. Dibanding pada tahun 2015 Persenstase Organisasi Kepemudaan yang aktif meningkat sebesar 10 persen.
2. **Jumlah pemuda yang mandiri dan berdaya saing** adalah 48 orang, angka ini sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan. Dan angka ini meningkat sebanyak 5 orang dibanding tahun 2015 sebanyak 43 orang.
3. **Jumlah Prestasi Olah Raga Yang diraih** sebesar 33 medali, dan realisasi untuk indikator ini 33 medali atau capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan adalah 100 persen. Dibanding pada tahun 2015 Jumlah Prestasi Olah Raga Yang diraih sedikit menurun sebanyak 10 medali dengan rincian 4 medali emas, 12 medali perak dan 18 medali perunggu, hal ini disebabkan pada partisipasi POPDA Tingkat Provinsi tahun 2016 Kabupaten Bintan mengurangi jumlah atlit yang dikirim pada cabang-cabang prioritas disebabkan karena keterbatas anggaran.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Kepemudaan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.995.765.800,-. dan realisasi anggaran sebesar Rp.992.848,475 atau 99,71%. *Outcome* program ini adalah meningkatkan peran serta pemuda dan organisasi kepemudaaan dalam masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. **Pelaksanaan Program**

- (1) **Kebangsaan Pembinaan Kemasyarakatan** dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.975.765.800,- dan realisasi Rp.972.888.875,- atau 99,71%. *Output* dari kegiatan ini adalah terselenggaranya seleksi dan pemusatan paskibraka tingkat Kabupaten Bintan sebanyak 1 tim. *Output* Kegiatan ini adalah terselenggaranya pengibaran bendera pusaka, meningkatnya kemampuan baris berbaris, menumbuhkan rasa cinta dan bela negara, serta meningkatkan kedisiplinan pelajar, memupuk jiwa kepemimpinan.
- (2) **Kapasitas Peran Pemuda** dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.20.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.19.959.600,- atau 99,80%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya temu wicara dan apel pemuda, adapun hasil dari kegiatan terselenggaranya Kapasitas Peran Pemuda sebanyak 20 orang.

2) **Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.491.840.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.487.027.905 atau 99,02%. *Outcome* program ini adalah meningkatkan peran serta dan minat masyarakat pada bidang Olahraga. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pelaksanaan Balap Motor**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.295.920.000,- dan realisasi Rp.295.284.725,- atau 99,79%. *Output* dari kegiatan ini adalah terselenggaranya lomba Motor Cross bagi peminat balap motor di Kabupaten Bintan. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya crosser-crosser beprestasi di Kabupaten Bintan.

(2) **Pelaksanaan Cross Country Fun Bike**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.195.920.000,- dan realisasi Rp.191.743.180,- atau 97,87%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya lomba sepeda indah. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya kesehatan masyarakat melalui olahraga sepeda

Capaian kinerja untuk program ini adalah :

- ❖ Pada tahun 2016 target **Persentase sarana dan prasarana olahraga yang standar** sebesar 40 persen, dan realisasi untuk indikator ini sudah tercapai atau capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan adalah 100 persen. Persentase sarana dan prasarana olahraga ini berdasarkan data sebaran sarana prasarana olahraga yang dimiliki dan dikelola Kecamatan se Kabupaten BIntan.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4.1.9. URUSAN PENANAMAN MODAL

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Satu** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Penanaman Modal** adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Nilai Investasi Perusahaan Berskala Nasional (PMA/PMDN)

Nilai investasi yang pada tahun 2016 meningkat masing-masing untuk perusahaan PMA/PMDN mencapai **US\$962.049/ Rp.475.257.923.685,-**

2. Lama Proses Perijinan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terus meningkatkan pelayanan dibidang perizinan. Hingga tahun 2016 durasi penyelesaian surat menyurat/administrasi perizinan di BPMPD khususnya mencapai **3-14 hari**;

3. Jumlah Perijinan Non Investasi Yang Dapat Diproses Dalam Satu Tahun 270 izin;

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan** dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.444.907.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.435.480.200,- atau 97,88%. *Outcome* program ini adalah meningkatnya promosi dan kerjasama investasi dengan kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan program

(1) Pameran/Expo dalam negeri tahun 2016,

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.379.593.300,- dan realisasi sebesar Rp.371.350.900,- atau 97,83%. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya promosi dan kerjasama investasi. Keluaran Kegiatan ini adalah terlaksananya mengikuti pameran dan promosi di dalam negeri. Hasil dari kegiatan ini adalah tersebarnya informasi potensi dan

peluang investasi. Pada kegiatan ini telah terlaksananya pameran / expo sebanyak 3 (tiga) kali.

(2) **Penyusunan Materi promosi dan informasi investasi,**

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.314.600,- dan realisasi sebesar Rp.64.129.300 atau 98,19%. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya promosi dan kerjasama investasi. Keluaran Kegiatan ini adalah tersedianya materi promosi dan informasi investasi. Hasil dari kegiatan ini adalah tersebarnya informasi potensi dan peluang investasi. Pada kegiatan ini telah adanya materi-materi promosi yang berbentuk Booklet, Leaflet, Shopping Bag, Brosur, souvenir/ cenderamata.

b. **Permasalahan dan Solusi**

BPMPD Kabupaten Bintan menyadari bahwa untuk membiayai suatu kegiatan ataupun even promosi pasti memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Dan pada faktanya alokasi biaya promosi ini masih dirasakan kecil bila berbanding potensi Kabupaten Bintan yang akan dipasarkan khususnya bidang investasi disektor industri maupun pariwisata. Diharapkan kedepan alokasi anggaran pada penyelenggaraan kegiatan promosi ini lebih mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah.

2) **Program Peningkatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan** dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.075.994.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.066.998.338,- atau 99,16%. *Outcome* program ini adalah meningkatnya jumlah sarana dan prasarana apartur dengan kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan program**

(1) **Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi,**

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.530.954.000. dan realisasi sebesar Rp.526.810.211,- atau 99,22%. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi. Dengan hasil target yang diharapkan adalah terbitnya izin sebanyak 1.740 izin. Keluaran Kegiatan ini adalah terselenggaranya pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perizinan. Adapun total perizinan investasi sebanyak 886 izin. Dengan adanya penerapan sistem *One Stop Service* Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan telah optimal memberikan kemudahan bagi pelayanan perizinan, hal tersebut berdampak pada adanya penghargaan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di tahun 2011, 2013 dan Tahun 2014 dan 2015 sebagai peringkat 5 tingkat nasional dari 443 daerah di seluruh Indonesia.

(2) **Optimalisasi peran Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Bintan Wilayah Kabupaten Bintan**

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.545.040.000,- dan realisasi sebesar Rp.540.188.127 atau 99,11%. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi. Keluaran Kegiatan ini adalah terlaksananya optimalisasi peranan BPK Bintan wilayah Bintan. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya investasi di Kawasan FTZ Bintan baik secara kualitas dan kuantitas.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Belum ditetapkannya kejelasan status lahan di wilayah Kabupaten Bintan sehingga permasalahan ini berpotensi menghambat proses

kegiatan promosi dan perizinan di BPMPD Kabupaten Bintan. masalah ini dapat disiasati dengan meningkatkan intensitas koordinasi antara tim teknis internal dalam hal ini *Back office* dan tim teknis BPMPD dengan tim teknis eksternal dari beberapa instansi terkait di Kabupaten Bintan.

a. Kinerja Peningkatan Investasi

Tabel 4.5. Perkembangan PMA dan PMDN s/d Tahun 2016

No	Status	Jumlah	Investasi (US\$ /Rp)		Tenaga Kerja
			Rencana	Realisasi	
1	PMA (US\$)	199	1,320.838	962.049	TKI : 11.631 / TKA : 164
2	PMDN (Rp)	61	702.946.000.000	475.257.923.685	TKI : 3.048 / TKA : -

Sumber : BPMPD Kabupaten Bintan Tahun 2017

Tabel 4.6 : Perkembangan Investasi Daerah PMA di Kabupaten Bintan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja				Jumlah Investasi (US\$)	
			Rencana		Realisasi		Rencana	Realisasi
			TKI	TKA	TKI	TKA		
1	S. Kuala Lobam	16	-	-	5.142	77	88.004.300	270.486.059
2	Teluk Sebong	28	-	-	4.330	324	434.645.499	
3	Bintan Utara							
4	Bintan Timur	8	85	-	713	5	83.920.052	
5	Gunung Kijang	8	-	-	1.272	26	54.884.167	
6	Bintan Pesisir	3	-	-	98	-	1.000.000	
7	Toapaya	1	-	-	30	-		1.512.398
8	Teluk Bintan							
	Jumlah	64	85	44	11.585	432	662.454.018	1,251.371

Sumber : BPMPD Kabupaten Bintan Tahun 2017

Tabel 4.7 : Perkembangan Investasi Daerah PMDN di Kabupaten Bintan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja				Jumlah Investasi (Rp)	
			Rencana		Realisasi		Rencana	Realisasi
			TKI	TKA	TKI	TKA		
1	Teluk Sebong	23	716	-	1.182	1	2.186.342.000.000	4.497.743.533.139
2	Bintan Timur	12	189	-	57	-	21.770.000.000	3.370.000.000
3	Gunung Kijang	9	136	-	660	-	2.014.853.956.566	61.205.450.000
	Jumlah	44	1.041		1.899	1	4.222.970.000.566	4.562.320.000.139

Sumber : BPMPD Kabupaten Bintan Tahun 2017

Tabel 4.8 : Perkembangan Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bintan Tahun 2015 s/d 2016

Tahun	Status	Jumlah	Investasi (US\$ /Rp.000)		Tenaga Kerja		Realisasi (%)
			Rencana	Realisasi	TKI	TKA	
2015	PMA	199	1,427	1,251	12.144	190	53,09 %
	PMDN	34	2.436.949.956,566	1.457.589.688.831	2.537	-	76,43 %
2016	PMA	199	1.320.838	962.049	11.631	164	72,83 %
	PMDN	61	702.946.000.000	475.257.923.685	3.048	-	67,60 %

Sumber : BPMPD Kabupaten Bintan Tahun 2017

Perkembangan investasi perusahaan Penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Bintan periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 seperti yang digambarkan pada tabel diatas, secara umum adanya fluktuasi pada perkembangan investasi di Kabupaten Bintan, peningkatan dan penurunan yang tidak begitu signifikan akan tetapi berdampak pada jumlah perusahaan yang sudah beroperasi atau melakukan realisasi investasi yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, perusahaan yang ada di Kabupaten Bintan sebanyak 199 Perusahaan PMA dan 61 PMDN. Adapun jumlah perusahaan yang sudah melakukan realisasi sampai dengan tahun 2016 adalah 33 PMA dengan total investasi sebanyak US\$962.049 Juta, sedangkan pada

PMDN sebanyak 61 Perusahaan dengan total investasi sebanyak Rp.475.257.923.685.

3) **Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan** dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.171.412.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.170.551.408,- atau 99,50%. *Outcome* program ini adalah meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian investasi dengan kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan program**

(1) **Updating Database perusahaan PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN di Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.590.000,- dan realisasi sebesar Rp.36.420.800,- atau 99,54%. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengawasan dan pengendalian investasi. Keluaran Kegiatan ini adalah terlaksananya database dan informasi perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Bintan. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya database dan informasi perusahaan PMA /PMDN di Kabupaten Bintan. Dengan kegiatan ini telah adanya sistem pendataan yang berbasis komputerisasi dan internet sehingga memudahkan dalam proses pendataan perkembangan investasi.

(2) **Pemantauan Permasalahan Investasi di Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.378.000,- dan realisasi sebesar Rp.74.305.208 atau 99,90%. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengawasan dan pengendalian investasi. Keluaran Kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan permasalahan investasi

PMA/PMDN di Kabupaten Bintan. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pemantauan permasalahan investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bintan. Adapun capaian dari kegiatan ini adalah jumlah PMA di Kabupaten Bintan pada tahun 2016 adalah 199 Perusahaan sedangkan PMDN sebanyak 61 Perusahaan.

(3) **Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.444.600,- dan realisasi sebesar Rp.59.825.400,- 98,98%. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi. Keluaran Kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2016. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan pada BPMPD Kabupaten Bintan.

4) **Program Pelayanan Perizinan Non Investasi**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan** dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.41.979.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.41.403.600,- atau 98,63%. *Outcome* program ini adalah meningkatnya pelayanan perizinan non investasi, dengan kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Pelayanan Perizinan Non Investasi Kegiatan ini memiliki jumlah dana Rp.41.979.000,- dengan realisasi Rp.41.403.600,- atau 98,63%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya pelayanan perizinan non investasi. Keluaran Kegiatan ini adalah meningkatnya pelaku usaha di Kecamatan yang akan mengurus izin atau memperpanjang izinnya. Adapun total perizinan non investasi sebanyak 270 izin.

- **Kinerja Peningkatan Pelayanan Perizinan**

Untuk tahun 2016 ini pelayanan perizinan secara satu pintu di Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah melayani 74 jenis layanan

perizinan berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu hanya 88 izin. Dengan berkurangnya jumlah izin yang ada disebabkan dengan adanya aturan tentang pelimpahan wewenang beberapa perizinan ke Provinsi, hal ini dalam rangka meningkatkan lagi tingkat pelayanan perizinan dapat lebih efisien dan efektif. Disamping itu juga telah adanya standar pelayanan yang bersertifikat ISO yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan perizinan yang lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan system dan prosedur pelayanan dalam wadah Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah perizinan yang telah di keluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah adalah selama kurun satu tahun yaitu periode Januari – Desember 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.9 : Jenis Perizinan dan Jumlah yang dikeluarkan oleh BPMPD Tahun 2016

No	Jenis Perizinan	Jumlah Yang Dikeluarkan
1	Izin Prinsip Penanaman Modal	19
2	Izin Usaha untuk berbagai sektor Usaha	-
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	-
4	Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha	-
5	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3
6	Izin Usaha Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha	-
7	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	-
8	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha	-
9	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	49
10	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	32

11	Izin Undang - Undang Gangguan (HO)	210
12	Izin Usaha Ketenaga Listrikan	-
13	Izin Penggalian	
14	Izin Timbun	
15	Izin Pemanfaatan Air (SIPA)	
16	Jasa Penyalur BBM	
17	Izin Pangkalan Gas	
18	Izin Penimbunan BBM	-
19	Izin Usaha Kawasan Industri	1
20	Izin Perluasan Kawasan Industri	-
21	Tanda Daftar Industri (TDI)	-
22	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	215
23	Tanda Daftar Gudang (TDG)	17
24	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	154
25	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	44
26	Izin Tempat Usaha – Minuman Beralkohol	17
27	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	
28	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	-
29	Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	-
30	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	1
31	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	-
32	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	17

33	Tanda Daftar Usaha Penyelenggara Kegiatan hiburan dan Rekreasi	-
34	Tanda Daftar Usaha Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran	-
35	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	-
36	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	-
37	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	-
38	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	-
39	Tanda Daftar Usaha SPA	-
40	Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) Perpanjangan	101
41	Izin Lembaga Pelatihan Kerja/Kursus	
42	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe D	4
43	Izin Klinik	1
44	Izin Praktek Bidan	62
45	Izin Praktek Perawat	108
46	Izin Tukang Gigi	
47	Izin Operasional Pemberantasan Hama	
48	Izin Apotek	12
49	Izin Toko Obat	1
50	Izin Optik	1
51	Izin Pengobat Tradisional	16
52	Izin Air Minum Dalam Kemasan	

53	Izin air minum isi ulang	5
54	Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	20
55	Keterangan Sertifikasi Laik Sehat (tempat pengolahan makanan,minuman/jasa boga,restoran dan rumah makan)	18
56	Izin Pangkalan Gas	13
57	Izin Trayek Angkutan Darat	--
58	Izin Operasi Angkutan Darat	-
59	Izin Usaha Pelayaran (SIUPP)	-
60	Izin Operasi Perusahaan non Pelayaran (SIOPNP)	-
61	Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)	-
62	Izin Kerja Refraksionis Optisen	1
63	Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	-
64	Surat Izin Usaha Tally	-
65	Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas	-
66	Penata Anastesi	1
67	Izin Praktek Dokter Hewan	-
68	Izin Klinik Hewan	-
69	Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga(PKRT)	5
70	Izin Perkebunan	1
71	Izin Usaha Perkebunan	-
72	Persetujuan Prinsip	-

73	Izin Lokasi (IL)	6
74	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	1
	JUMLAH	1.156

Sumber : BPMPD Kabupaten Bintan Tahun 2017

Indikator meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal perizinan investasi dan perizinan non investasi yang berorientasi pada peningkatan daya saing antara lain dapat dilihat pada indikator dibawah ini :

1. **Jumlah perizinan investasi yang dapat diproses dalam satu tahun** pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 1.740 izin dan dapat direalisasikan sebesar 886 Izin atau 50,91 %. Angka ini menurun bila dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 1.379 izin.
2. Sementara itu untuk **Jumlah perizinan non investasi yang dapat diproses dalam satu tahun** pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 325 izin dan dapat terealisasi sebesar 270 Izin atau **83,07 %**. Angka ini juga menurun bila dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar **3.933 izin**.
3. **Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Dan Administrasi Pemerintah** sudah tersedia untuk mendukung pelayanan perizinan
4. **Lama proses perizinan masih cukup baik sekitar 3-14 hari**
5. **Penyelesaian izin lokasi mencapai 100%**
6. **Jumlah jenis perizinan dari jumlah perizinan penanaman modal tahun 2016 ditargetkan sebesar 74 jenis dan terealisasi sebanyak 33 izin atau 44,59%**

4.1.10.URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah** adalah sebagai berikut :

1. Persentase koperasi aktif 55,15%;

Tabel 4.10 Jumlah Koperasi di Kabupaten Bintan Tahun 2016

NO	JENIS KOP	AKTIF	TIDAK AKTIF	ANGGOTA/ORANG	MODAL SENDIRI RP.JUTA	MODAL LUAR RP.JUTA	VOLUME USAHA	S H U RP.JUTA
1	KPRI	24	3	3.250	21.782	6.183	22.879	4.062
2	KUD	2	6	450	850	462	109	15
3	KSU	31	10	810	1.268	347	956	214
4	KOPANTREN	1	1	46	145	2	169	9
5	SEKUNDER	1	0	27	0	0	0	0
6	KOP. LAINNYA	117	27	8.356	17.324	4.372	12.216	1.976
	2016	123	100	12.939	41.369	11.366	36.329	6.276
	2015	175	29	12.082	39.422	11.501	37.408	5.697

Sumber : Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2017 (diolah)

Prosentase koperasi aktif pada tahun 2016 tercatat menurun dibandingkan tahun 2015, tetapi jumlah koperasi bertambah sebanyak 19 unit koperasi;

2. Persentase Pelaku Usaha yang terlatih 22%.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah (KUKM)**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.115.121.762,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.114.845.770,- atau 99,76%. *Outcome* Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

a. **Pelaksanaan Program**

Kegiatan Pembekalan Ketrampilan Teknis bagi Koperasi Baru dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran Rp.115.121.762,- dan realisasi sebesar Rp.114.845.770,- atau 99,76%. Hasil kegiatan ini adalah pembekalan ketrampilan teknis untuk 40 Koperasi di seluruh Kecamatan diwilayah Kabupaten Bintan;

b. **Permasalahan dan solusi**

1) **Permasalahan**

- a. Pada tahun anggaran 2016 telah direncanakan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha KUKM Berkeunggulan Sumberdaya Lokal dengan target 3 Kelompok dengan alokasi anggaran sebesar Rp.330.000.000,- namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.
- b. Rendahnya kepedulian anggota terhadap perkembangan koperasi

2) **Solusi**

- a. Melakukan sosialisasi tentang perkoperasian dikalangan anggota koperasi.

2) **Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.260.364.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.239.007.650,- atau 92,90%. *Outcome* Meningkatnya Pengetahuan SDM Pengelola Koperasi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.108.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.107.214.150,- atau 99,27%. Hasil kegiatan ini adalah pembinaan dan peningkatan kualitas kelembagaan untuk 40 koperasi diwilayah Kabupaten Bintan;

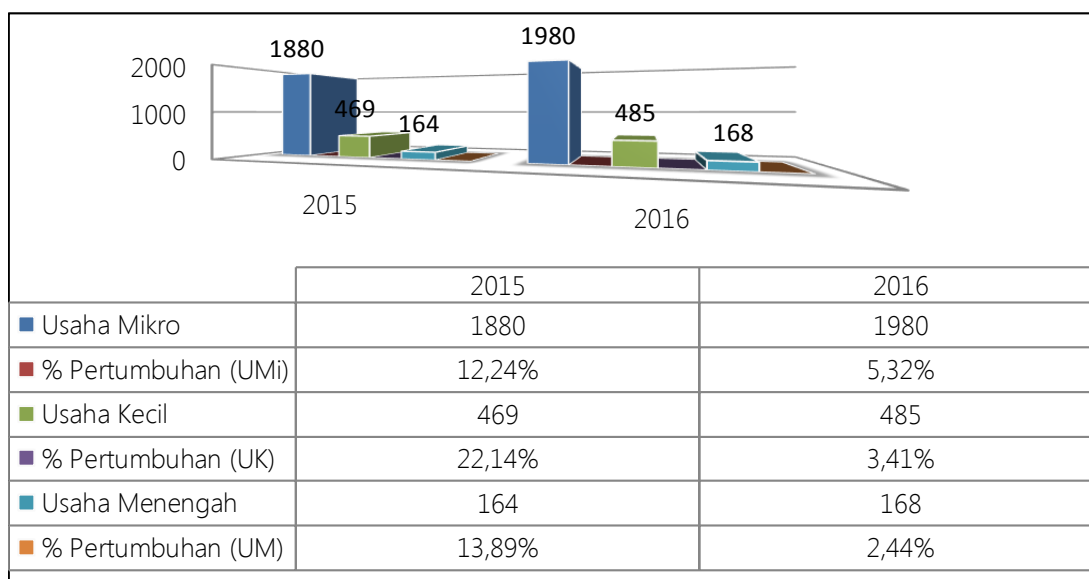
(2) **Pelatihan Pengelolaan Keuangan Pada Usaha KUKM**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.152.364.200,- dan realisasi sebesar Rp.131.829.500,- atau 86,52%. Hasil kegiatan ini adalah pelatihan manajemen administrasi keuangan untuk 40 pelaku usaha diwilayah Kabupaten Bintan.

Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan menguatkan dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta tingkat kemiskinan. Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat (*pro poor*). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai

pelaku ekonomi nasional juga merupakan subjek vital dalam pembangunan khususnya dalam rangka perluasan kesempatan bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*). Keberadaan Koperasi terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh, dan fleksibel dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan *leader* perekonomian Indonesia, menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. Dengan demikian pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan prioritas dan menjadi sangat *urgen* dan vital, upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik tatanan makro maupun mikro.

Grafik 4.6 : Jumlah Pelaku Usaha (UMKM) Kabupaten Bintan Tahun 2015-2016

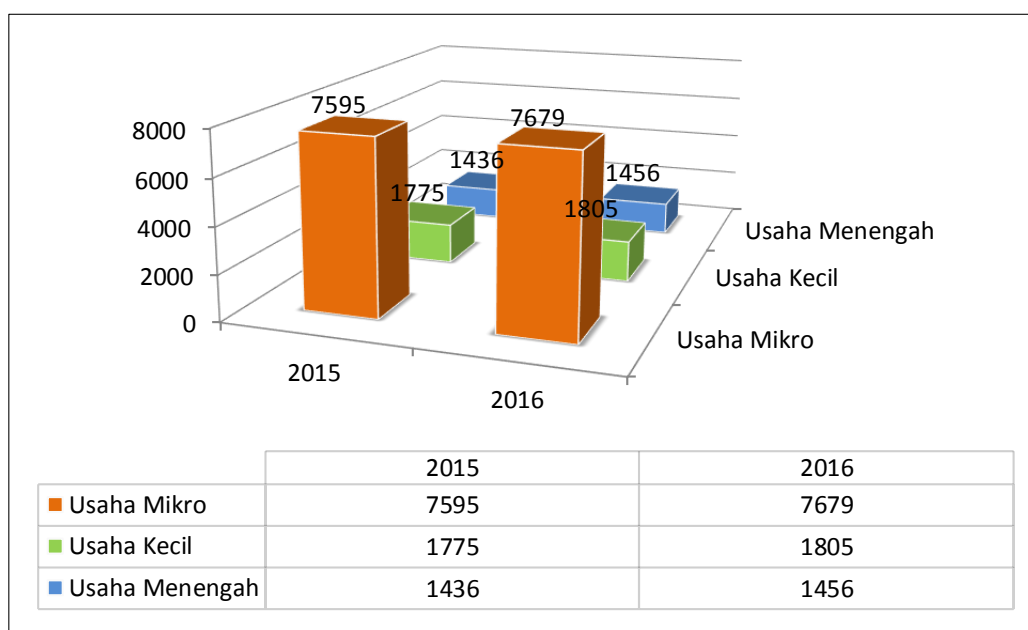


Sumber : Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2017 (diolah)

Perkembangan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Bintan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Seperti pada Tabel diatas, dari jumlah pelaku Usaha Mikro tahun 2011 sebanyak 1.377 unit usaha, sampai

dengan tahun 2016 berkembang menjadi 1980 unit usaha yang secara terperinci dapat dikatakan bahwa selama periode Tahun 2011-2016 terjadi pertambahan jumlah pelaku usaha sebanyak 603 unit usaha mikro dengan total persentase kenaikan sebesar 5,32% dari Tahun 2015. Sedangkan kategori Usaha Kecil pada tahun 2011 berjumlah 327 unit usaha berkembang menjadi 485 usaha pada tahun 2016 atau bertambah sebanyak 158 unit usaha atau terjadi peningkatan sebesar 3,41% dari Tahun 2015. Disisi lain untuk kategori Usaha Menengah juga mengalami pertumbuhan yang cukup berarti, dimana pada tahun 2011 terdapat 115 unit usaha dan pada tahun 2016 bertambah menjadi 168 unit usaha dalam skala menengah atau terjadi pertambahan sebanyak 53 unit usaha dengan persentase pertumbuhan sebesar 2,44% dari tahun 2015.

Grafik 4.7 Jumlah Tenaga Kerja Umkm Kabupaten Bintan Tahun 2015-2016



Sumber : Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2017 (diolah)

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, usaha mikro, kecil dan menengah memberikan kontribusi yang cukup besar pada angkatan kerja di Kabupaten Bintan. Pada usaha mikro terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja dari 6.278 tenaga kerja pada tahun 2011 menjadi 8.347 pada tahun 2016, terjadi pertambahan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.069 orang. Untuk usaha kecil pada tahun 2011 jumlah tenaga kerja sebanyak

1.306 orang dan pada tahun 2016 bertambah menjadi 1.869 orang atau terjadi penambahan sebesar 469 orang. Sedangkan untuk usaha menengah pada tahun 2011 jumlah tenaga kerja sebanyak 1.125 orang, bertambah menjadi 1.494 orang pada tahun 2016 atau terjadi penambahan tenaga kerja sebanyak 369 orang tenaga kerja. Secara total terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah dalam rentang enam tahun dimana pada tahun 2011 berjumlah 8.709 orang meningkat menjadi 11.616 orang pada tahun 2016 artinya terjadi penambahan tenaga kerja sebanyak 2.907 orang.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Masih rendahnya SDM pengelola dan daya saing Koperasi dan UMKM dalam mengakses pasar dan peluang usaha
- b. Masih lemahnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam penguasaan teknologi dan informasi
- c. Belum optimalnya promosi dan pemasaran serta terbatasnya informasi pasar mengenai produk unggulan daerah

2) Solusi

- a. Pelatihan bagi SDM pengelola KUKM dalam upaya peningkatan kualitas SDM dalam produktivitas koperasi dan UMKM dalam rangka pengembangan produk yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang berdaya saing baik di pasar domestik maupun mancanegara.
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas nilai tambah produk yang dihasilkan KUKM dengan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- c. Fasilitasi promosi produk Koperasi dan UMKM di pasar domestik maupun internasional, melalui promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar dan peluang usaha melalui kerjasama kemitraan antara BUMN dan BUMS.

3) Program Peningkatan Wirausaha dan UKM

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.358.158.010,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.334.855.135,- atau 94,17%. *Outcome* Meningkatnya Wirausahaan dan Usaha Kecil Menengah.

a. Pelaksanaan Program

(1) Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Pemerintah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.64.848.010 dan realisasi sebesar Rp.63.210.000,- (97,47%). Hasil kegiatan ini adalah termonitoringnya dan terevaluasinya kelompok-kelompok penerima bantuan pada tahun 2011 sampai dengan 2015;

(2) Pelatihan Manajemen Sistem Perdagangan Elektronik Pada KUKM

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.152.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.144.712.875,- (95,21%). Hasil kegiatan ini adalah Pelatihan Manajemen Sistem Perdagangan Elektronik Pada KUKM untuk 50 (lima puluh) peserta pelaku usaha diwilayah Kabupaten Bintan;

(3) Pelatihan Kewirausahaan bagi Pengelola UMKM

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran Rp.141.310.000,- dan realisasi sebesar Rp.126.932.260,- (89,83%). Hasil kegiatan ini adalah pelatihan kewirausahaan untuk pengelola UMKM sebanyak 40 pengurus UMKM diwilayah Kabupaten Bintan.

b. **Permasalahan dan Solusi**

1) **Permasalahan**

- a. Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usaha koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lainnya
- b. Akses koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan masih lemah

2) **Solusi**

- a. Mendorong adanya regulasi yang mampu mendukung aksesibilitas koperasi dan UMKM pada lembaga keuangan.
- b. Peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan UMKM, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) / Kredit Usaha Rakyat (KUR).

4.1.11.URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Ketiga** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil** adalah sebagai berikut :

1. Presentase Penduduk ber KTP-el dari jumlah penduduk wajib KTP-el;

Hasil sasaran pelaksanaan penerapan KTP-el terekam tercatat 96.292 jiwa dari wajib KTP-el sebanyak 99.169 jiwa (97.10%), selisih dari penduduk yang belum memiliki sebanyak 2.877 jiwa. Dimana penduduk yang belum memiliki KTP-el tersebut adalah penduduk pemohon pemula memasuki usia wajib KTP el, penduduk pendatang yang belum melakukan perekaman KTP el di daerah asal dan penduduk Bintan yang sudah tidak berdomisili di Kabupaten Bintan.

2. Presentase bayi berakte kelahiran per 100 Bayi Lahir;

Penerbitan akta kelahiran tahun 2016 tercatat sebanyak 3.545 jiwa, sedangkan dari jumlah kelahiran penduduk di Kabupaten Bintan sebanyak 3.077 jiwa yang bersumber dari data Dinas Kesehatan. Penjelasan sebagai berikut warga yang memiliki akta kelahiran <60 hari sebanyak 1.286 jiwa (42%) dari jumlah kelahiran, untuk kepemilikan Akta Kelahiran >60 hari (keterlambatan) sebanyak 2.259 jiwa. Perolehan Akta Kelahiran bagi bayi lahir pada tahun 2016 pada bulan November dan Desember 2016 dilaporkan pada bulan Januari dan Februari tahun 2017 yang masuk dalam <60 Hari, namun tidak termasuk jumlah bayi lahir pada bulan November dan Desember 2016 yang belum melaporkan dalam <60 hari. Selanjutnya untuk jumlah penerbitan berakte kematian umum di tahun 2016 sebanyak 165 jiwa dari jumlah penduduk yang meninggal pada tahun 2016 sebanyak 242 jiwa (68%), sedangkan penerbitan akta kematian terlambat sebanyak 408 jiwa, maka jumlah penerbitan akta kematian keseluruhan berjumlah 573 jiwa di tahun 2016. Untuk Persentase penduduk yang belum memiliki dokumen perkawinan (non muslim) sebanyak 59.919 jiwa dari jumlah penduduk kawin sebanyak 67.666 jiwa (11%). Jadi dari pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2017 perlu adanya koordinasi antar OPD Kabupaten Bintan yang terkait dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemahaman arti pentingnya

kepemilikan dokumen kependudukan kepada Masyarakat sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) **Program Penataan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan** melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.444.907.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.435.480.200,- atau 97,88%. *Outcome* dari program ini adalah meningkatnya penataan administrasi kependudukan, dengan kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran Rp. 946.436.325,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 925.509.825,- atau (98%). Hasil dari kegiatan adalah terlaksananya jaringan data, maintenance, perawatan dan pemeliharaan di setiap titik jarkomdat pada sarana yang dibangun di 10 (sepuluh) Kecamatan dan 1 (satu) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Dari hasil sasaran tersebut terupdatenya data kependudukan yang akurat dan valid selama 1 tahun, yang mana kegiatan ini menjaga keamanan data, jaringan yang terkoneksi antar pusat ke Kabupaten dan kecamatan.

(2) **Penerapan KTP-el (Elektrik)**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran Rp.44.178.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.43.685.010,- atau (99%). Hasil dari kegiatan ini adalah penerapan KTP-el lanjutan dari program nasional sehingga terwujudnya kepemilikan bagi

penduduk Kabupaten Bintan. Hasil sasaran pelaksanaan penerapan KTP-el terekam tercatat 96.292 jiwa dari wajib KTP-el sebanyak 99.169 jiwa (97.10%), selisih dari penduduk yang belum memiliki sebanyak 2.877 jiwa. Dimana penduduk yang belum memiliki KTP-el tersebut adalah penduduk pemohon pemula memasuki usia wajib KTP el, penduduk pendatang yang belum melakukan perekaman KTP el di daerah asal dan penduduk Bintan yang sudah tidak berdomisili di Kabupaten Bintan.

(3) Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp.166.774.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 165.411.500,- atau (99%). Hasil dari kegiatan ini adalah, peningkatan kepemilikan akta kelahiran. Capaian pelaksanaannya yang mana penerbitan akta kelahiran tahun 2016 tercatat sebanyak 3.545 jiwa, sedangkan dari jumlah kelahiran penduduk di Kabupaten Bintan sebanyak 3.077 jiwa yang bersumber dari data Dinas Kesehatan. Hasil penerbitan memiliki akta kelahiran <60 hari sebanyak 1.286 jiwa (42%) dari jumlah kelahiran, untuk kepeilikan Akta Kelahiran >60 hari (keterlambatan) sebanyak 2.259 jiwa. Perolehan Akta Kelahiran bagi bayi lahir pada tahun 2016 pada bulan November + Desember 2016 dilaporkan pada bulan januari dan pebruari tahun 2017 yang masuk dalam <60 Hari, namun tidak termasuk jumlah bayi lahir pada bulan November dan Desember 2016 yang belum melaporkan dalam <60 hari. Selanjutnya untuk jumlah penerbitan berakta kematian umum di tahun 2016 sebanyak 165 jiwa dari jumlah penduduk yang meninggal pada tahun 2016 sebanyak 242 jiwa (68%), sedangkan penerbitan akta kematian terlambat sebanyak 408

jiwa, maka jumlah penerbitan akta kematian keseluruhan berjumlah 573 jiwa di tahun 2016. Untuk Persentase penduduk yang belum memiliki dokumen perkawinan (non muslim) sebanyak 59.919 jiwa dari jumlah penduduk kawin sebanyak 67.666 jiwa (11%). Jadi dari pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2017 perlu adanya koordinasi antar OPD Kabupaten Bintan yang terkait dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemahaman arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan kepada Masyarakat sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(4) **Pengawasan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui penerapan Siak**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.53.385.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.53.282.500,- atau 99%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dokumen kependudukan yang telah di verifikasi secara akurat dan validasi bagi penduduk Kabupaten Bintan, sehingga terciptanya dan tertatanya dokumen tertib administrasi kependudukan. Dari hasil pengawasan masih terdapat data ganda sebanyak 92 jiwa . dari data ganda sebanyak 92 jiwa tersebut telah dilakukan tindak lanjut ke dirjen kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri untuk dilakukan pembersihan sebanyak 55 jiwa. Oleh karena itu kegiatan ini diharapkan terus diharapkan dalam upaya penertiban dokumen administrasi kependudukan bagi Masyarakat Kabupaten Bintan yang valid dan akurat.

(5) **Peningkatan kapasitas kelembagaan catatan Sipil**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.104.558.710,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.104.558.710,- atau 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan sumberdaya aparatur dalam

penertiban dokumen kependudukan , juga pelayanan administrasi kependudukan baik di tingkat kecamatan, desa, kelurahan dan Dinas Kesehatan sebagai koordinator yang membawahi pelayanan kelahiran baik di rumah sakit dan puskesmas bagi Masyarakat Kabupaten Bintan, sehingga terciptanya, tertatanya dan tertibnya dokumen administrasi kependudukan yang valid dan akurat

a. **Permasalahan dan Solusi**

1)Permasalahan

- a. Belum berfungsi maksimalnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Seperti proses pelayanan pencatatan sipil belum sepenuhnya menggunakan program tersebut.
- b. Faktor masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan.
- c. Masih kurang aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Penduduk pendatang dari luar Kabupaten/Kota masih tidak memiliki akta lahir.

2)Solusi

- a. Mengingat pentingnya dokumen kependudukan bagi Masyarakat dalam pengurusan administrasi maka perlu dilakukan himbauan secara terkoordinasi dengan Instansi terkait melalui informasi elektronik dan sosialisasi yang menekankan pentingnya memiliki dokumen kependudukan bagi Masyarakat Kabupaten Bintan.
- b. Peningkatan anggaran program kegiatan, baik itu sarana dan prasarana pendukung dalam penertiban Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi sesuai dengan persaingan global yang berkembang.

- c. Perlu upaya meningkatkan kerjasama dalam koordinasi dan persepsi terhadap penanganan kependudukan dan pencatatan sipil bagi aparatur pemerintah baik pusat, provinsi kabupaten/kota lainnya, masyarakat, tokoh dan kepemudaan.
- d. Tersedianya aparatur SDM pemerintah yang mempunyai kualitas dan inovatif dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sehingga dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya.
- e. Mengingat pentingnya dokumen kependudukan, perlu adanya Informasi berbasis teknologi maupun media public, himbauan, sosialisasi dan koordinasi melalui instansi pemerintah yang terkait di Kabupaten Bintan.
- f. Pentingnya pengawasan melalui kegiatan yustisi yang mampu dalam memotivasi mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga Masyarakat Kabupaten Bintan benar-benar sadar akan arti pentingnya dokumen kependudukan dalam hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia yang baik.

4.1.12.URUSAN KETENAGAKERJAAN

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keempat** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Ketenagakerjaan** adalah sebagai berikut :

1. **Tingkat partisipasi angkatan kerja;** Capaian indikator tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2016 sebesar 82,77%, angka ini lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 62%. Hal ini mengindikasikan bahwasannya ada pertumbuhan ekonomi yang cenderung baik dan didukung oleh angkatan kerja yang semakin aktif masuk di dalam pasar kerja baik formal maupun informal. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja adalah karena relatif berkurangnya angkatan kerja yang mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja melalui bidang Penempatan Tenaga Kerja yaitu melalui pelaporan AK.I. (kartu pencari kerja).
2. **Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;** Pada tahun 2016 capaian indikator persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sebesar 75%, capaian ini telah memenuhi target tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 68%. Dari 40 peserta yang mendaftar pada kegiatan Pelatihan Keterampilan Satuan Pengaman hanya diambil 30 peserta yang dilatih yang memenuhi kualifikasi.
3. **Tingkat pengangguran terbuka,** capaian indikator tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,98%, angka ini hampir memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 6,9%. Indikator Tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja. Semakin kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan semakin rendahnya angka pengangguran. Angkatan kerja yang mendaftarkan dirinya ke Dinas Tenaga Kerja melalui Bidang Penempatan Tenaga Kerja yang menggunakan pelaporan AK I cenderung menurun, hal ini disebabkan lowongan kerja disektor formal menurun sedangkan sektor informal meningkat sangat signifikan dan tenaga kerja tersebut tidak mendaftarkan dirinya. Sehingga hal ini berpengaruh positif terhadap angka pengangguran terbuka.

4. **Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan;**

Capaian persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja pada tahun 2016 sebesar 100%, capaian ini lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan dari 18 kasus yang masuk dapat diselesaikan 18 kasus baik melalui perjanjian bersama maupun melalui tingkat perantara (anjuran). Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) **Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.356.908.240,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.347.307.500,- atau 99,3%. *Outcome* program ini meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.830.000,- dan realisasi sebesar Rp.53.236.550,- atau 98,9%, *Output* kegiatan ini adalah tersedianya informasi pasar kerja. Kegiatan ini dilaksanakan di SMKN 2 Bintan Kecamatan Bintan Timur melalui penyuluhan penempatan tenaga kerja kepada calon tenaga kerja sebanyak 50 orang, yang merupakan Tenaga Kerja pemula, Kegiatan ini juga berupa penyebarluasan informasi kebutuhan tenaga kerja kepada masyarakat.

(2) **Peningkatan Kapasitas Data Ketenagakerjaan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.783.810 dan realisasi sebesar Rp.106.780.650 atau 99,99%, *Output* kegiatan ini adalah tersedianya data ketenagakerjaan, Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis yang diikuti oleh 10 (sepuluh) orang peserta yang berasal dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. *Output* dari kegiatan ini adalah terpenuhinya data

ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan yang disusun dalam bentuk buku Data Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan.

(3) **Pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.196.294.430 dan realisasi sebesar Rp.1.187.317.300 atau 99,25%, *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya Tenaga Kerja Sarjana di pedesaan, Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penempatan Tenaga Kerja Sarjana yang berpendidikan sarjana sebanyak 48 orang di desa-desa dalam kecamatan Kabupaten Bintan, Anggaran yang tersedia digunakan untuk membiayai pembekalan TKS, insentif, transportasi, operasional pendukung kegiatan, melalui kegiatan ini diharapkan Tenaga Kerja Sarjana mampu berperan aktif dalam pembangunan pedesaan, Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menciptakan peluang kerja dan menekan angka pengangguran.

Capaian kinerja tahun 2016 untuk program ini adalah :

1. **Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan;** Capaian Indikator Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2016 sebesar 32,40%, angka ini lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan pada prioritas RPJMD sebesar 50%. Indikator ini berhubungan dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan (kesempatan kerja) dibanding dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar (melalui Ak.I). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin berkurangnya lapangan pekerjaan dan semakin kecilnya kesempatan pencari kerja untuk mengisi lowongan-lowongan yang ada di perusahaan.

2. **Rasio penduduk yang bekerja**, Capaian indikator rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2016 sebesar 0,93, angka ini lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 0,9. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Angka capaian ini mengindikasikan bahwa dari angkatan kerja yang ada sebanyak 93% sudah bekerja dan hanya 7% yang belum bekerja.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan Kualifikasi keterampilan calon tenaga kerja belum memenuhi kualifikasi keterampilan yang dibutuhkan oleh penyedia kesempatan kerja. Solusinya adalah Pemenuhan kesempatan kerja yang dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kewirausahaan. Peningkatan akses terhadap informasi pasar kerja.

2) **Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.181.970.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.181.679.250,- atau 99,7%. Outcome Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan.

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Kegiatan Penyuluhan Perlindungan Waktu Kerja Waktu Istirahat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.050.000 dan realisasi sebesar Rp.48.944.000 atau 99,78%, *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya penyuluhan waktu kerja dan waktu istirahat, Kegiatan ini berupa penyuluhan tentang aturan ketenagakerjaan yang berkaitan

dengan perlindungan upah, upah lembur, hak cuti serta hak istirahat lainnya, Sasaran kegiatan ini adalah pekerja dan pengusaha sebanyak 70 orang untuk 2 (dua) kecamatan, Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelaksanaan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat yang artinya pengusaha memberikan apa yang menjadi hak normatif karyawan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

(2) **Kegiatan Pemeriksaan/Pengawasan Terpadu Norma Kerja Umum dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.940.000 dan realisasi sebesar Rp.81.849.750 atau 99,89%, *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeriksaan/ pengawasan terpadu norma kerja umum dan keselamatan dan kesehatan kerja. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan/pengawasan dan juga pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang meliputi norma kerja umum dan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Jumlah perusahaan yang diperiksa pada tahun 2016 sebanyak 64 perusahaan dengan sasaran pengusaha dan pekerja, Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelaksanaan perundang-undangan ketenaga kerjaan untuk meminimalisir pelanggaran dalam penerapan aturan ketenagakerjaan di perusahaan, sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja dan dunia usaha.

(3) **Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja**

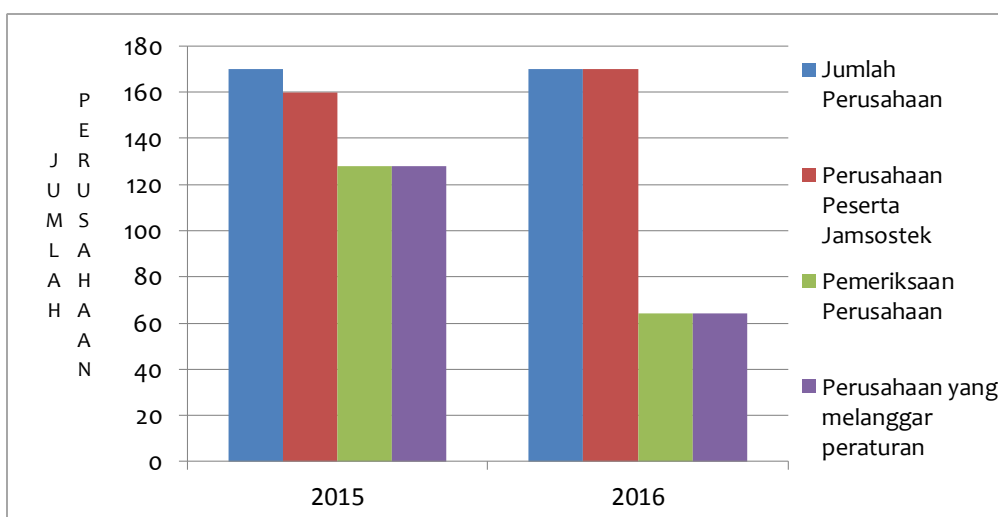
Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.50.980.000 dan realisasi Rp.50.885.500 atau 99,81%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya penyuluhan tentang pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan di 2 (dua) kecamatan dengan peserta dari unsur pekerja dan pengusaha sebanyak 70 orang. Hasil dari kegiatan ini diharapkan meningkatnya pemahaman tentang pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sejak tahun 2011 kecelakaan kerja di Kabupaten Bintan relatif berkurang.

Dengan pencapaian indikator kinerja program sebagai berikut :

- **Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB);** Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) sebesar 50%. Capaian ini lebih kecil sedikit dari target yang ditentukan yaitu sebesar 60%. Dari 18 kasus yang dicatatkan, 9 kasus diantaranya diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB). Hal ini disebabkan tidak ditemukan kata sepakat antara pihak yang berselisih sehingga diberikan surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Bintan. Beberapa dari pihak yang berselisih ada yang melanjutkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial (Berdasarkan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

Grafik 4.8 : Jumlah Tenaga Kerja Umkm Kabupaten Bintan Tahun 2015-2016



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Bintan, Tahun 2016

Tabel 4.11 Jumlah Kecelakaan Kerja di Kabupaten Bintan dari Tahun 2015-2016

No	Kecelakaan	2015	2016
1	Kecelakaan ringan	164	71
2	Kecelakaan berat	9	-
3	Meninggal	1	-
	Jumlah	174	71

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Bintan, Tahun 2016

b. **Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

- a. Kurangnya jumlah pegawai teknis ketenagakerjaan baik pegawai pengawas spesialis dan umum maupun pegawai pengantar kerja.
- b. Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan aturan ketenagakerjaan.

2) Solusi

- a. Meningkatkan frekuensi dan efektifitas Pemeriksaan/ Pengawasan perusahaan
- b. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat Pegawai Pengawas Spesialis dan umum maupun Diklat Pegawai Pengantar Kerja.

3) **Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan** melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.836.262.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.819.053.200,- atau 97,94%. *Outcome* Meningkatnya Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pembinaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.957.500 dan realisasi sebesar Rp.40.912.200 atau 99.89%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan Lembaga Kerja Sama Bipartit. Bentuk kegiatan ini adalah melakukan pembinaan dengan turun langsung ke perusahaan-perusahaan. Melalui kegiatan ini hasil yang diharapkan adalah terbentuknya serta optimalnya fungsi Lembaga Kerja Sama Bipartit. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 orang wajib membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit. Hingga tahun 2016 LKS Bipartit yang sudah terbentuk adalah 18 lembaga di perusahaan yang tersebar di Kabupaten Bintan.

(2) **Bimbingan Teknis Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.52.780.000 dan realisasi Rp.52.510.500 atau 99,49%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Peraturan Perusahaan (PP) dan Peraturan Kerja Bersama (PKB). Kegiatan ini dilaksanakan di 2 kecamatan di Kabupaten Bintan dengan jumlah peserta 80 orang dari unsur pengusaha dan pekerja. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bertambahnya jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.

(3) **Kebijakan Pengupahan dan Pengembangan Sistem Pengupahan Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.334.466.200 dan realisasi Rp.326.178.950 atau 97,52%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya Tugas dan Fungsi Dewan Pengupahan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk

rapat-rapat koordinasi dan survey yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan . Hasilnya berupa 1 (satu) dokumen Penetapan UMK Kabupaten Bintan. Sistem pengupahan di Kabupaten Bintan dari tahun ketahun semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pengupahan Kabupaten Bintan yang terus meningkat. Pada tahun 2011 tingkat upah di Kabupaten Bintan tercatat Rp. 975.000,- dan pada tahun 201 telah mencapai Rp. 2.645.017,- , data ini dapat dilihat pada tabel 4,2

(4) **Rapat Koordinasi Kebijakan Lembaga Kerja**

Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Tripartit dengan alokasi anggaran Rp.270.308.300 dan realisasi sebesar Rp. 267.400.150 atau 98,92%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi kebijakan lembaga kerjasama tripartit yang terdiri dari unsur Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi, sosialisasi UMK. Melalui kegiatan ini diharapkan optimalisasi fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. Hasilnya berupa 1 dokumen Laporan Kegiatan Koordinasi Kebijakan Lembaga Kerja Sama Tripartit.

(5) **Penyuluhan Hubungan Industrial**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.53.180.000 dan realisasi Rp.53.179.600 atau 100%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan hubungan industrial yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan di 2 (dua) kecamatan dengan peserta dari unsur pekerja dan pengusaha sebanyak 80 orang. Hasil dari kegiatan ini diharapkan terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Hal ini dapat dilihat dari Indikator Kinerja Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang cenderung menurun dari tahun sebelumnya (tabel diatas)

(6) **Koordinasi dan Fasilitas Serikat Pekerja**

dengan alokasi anggaran Rp.84.570.000 dan realisasi Rp.78.871.800 atau 93,26%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya persediaan fasilitas serikat pekerja. Sasarannya adalah 5 (lima) Serikat Pekerja (SP) yang ada di Kabupaten Bintan. Bentuk kegiatan ini adalah menciptakan sinergi serta memfasilitasi Serikat Pekerja agar pekerja dan pengusaha mengetahui dan memahami serta melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis antara Serikat Pekerja dan pengusaha.

Dengan pencapaian indikator kinerja program sebagai berikut :

- **Persentase kasus PHK yang terselesaikan;** Data untuk Persentase kasus PHK yang terselesaikan sebagai berikut : kasus yang masuk sebanyak 15 kasus, 8 kasus diselesaikan secara Perjanjian Bersama dan 7 kasus sudah terselesaikan di tingkat Perantara (anjuran) dan 1 dari 7 kasus diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Angka kasus PHK ini melibatkan 772 tenaga kerja. Sehingga capaian persentase kasus PHK yang terselesaikan sebesar 100%.

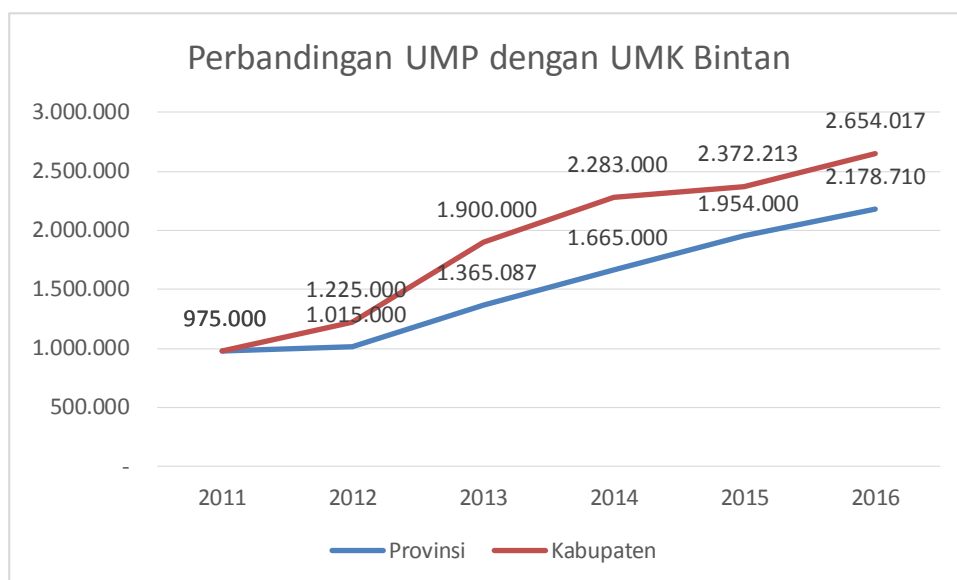
Tabel 4.12. Penyelesaian PHI dan PHK di Kabupaten Bintan
Tahun 2015-2016

No.	Uraian	2015	2016
1	Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI)		
	a. Jumlah Perselisihan Hubungan Kerja (PHI) (kasus)	27	18
	b. Jumlah Tenaga Kerja (org)	112	772
	c. Diselesaikan Tk. Perantara (kasus)	20	18
	d. Jumlah Tenaga Kerja (org)	45	772
	e. Diteruskan ke PHI (Kasus/PHI)	5	1
	f. Jumlah Tenaga Kerja (org)	34	1
2	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)		

a. Jumlah PHK (kasus)	22	15
b. Jumlah Tenaga Kerja (org)	112	772
c. Diselesaikan Tk. Perantara (kasus)	16	15
d. Jumlah Tenaga Kerja (org)	45	772
e. Diteruskan ke PHI (kasus/PHI)	4	1
f. Jumlah Tenaga Kerja (org)	34	1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, Tahun 2016

Grafik 4.9. Perbandingan UMP dengan UMK Bintan Tahun 2011-2016



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, Tahun 2016

Tabel 4.13 : Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan berdasarkan Upah Minimum Tahun 2015-2016

No	Uraian	2015	2016
1	Jumlah Perusahaan	170	170
2	Upah Minimum Provinsi	1.954.000	2.178.710
3	Upah Minimum Kabupaten	2.372.213	2.654.017

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, Tahun 2016

b. **Permasalahan Dan Solusi**

1) **Permasalahan**

- a. Masih banyaknya perselisihan hubungan industrial yang belum dapat diselesaikan secara Bipartit.
- b. Usulan angka Upah Minimum Kabupaten Bintan ke Bupati masih bervariasi.

2) **Solusi**

- a. Meningkatkan pemahaman hubungan industrial yang harmonis dan dinamis antara karyawan dan pengusaha dengan cara melaksanakan penyuluhan perundang-undangan ketenaga kerjaan
- b. Meningkatkan sinkronisasi internal Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan

4) **Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.444.194.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.444.050.200,- atau 99,97%. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Kegiatan Pelatihan Keterampilan Satuan Pengamanan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.444.194.000 dan realisasi sebesar Rp.444.050.200 atau 99,97%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan satuan pengamanan. Jumlah peserta yang dilatih sebanyak 30 orang. Pesertanya adalah mereka yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bintan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pelatihan satuan pengamanan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi

tenaga kerja satuan pengamanan (Satpam). Pelatihan Satpam ini memberikan kontribusi positif dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Bintan. Hal ini dikarenakan setelah menyelesaikan pelatihan, peserta mendapatkan kesempatan kerja sebagai satpam untuk mengisi lowongan yang ada di perusahaan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan ini mendukung capaian indikator RPJMD yaitu Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Dengan pencapaian indikator kinerja program sebagai berikut :

- **Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan;** Capaian indikator persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan sebesar 100%, angka ini lebih besar dari target yang ditentukan, hal ini disebabkan jumlah peserta yang mendapat pelatihan kewirausahaan sama dengan jumlah pendaftarannya.

b. **Permasalahan dan solusi**

Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

4.1.13.URUSAN KETAHANAN PANGAN

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Delapan** terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Ketahanan Pangan** adalah sebagai berikut :

1. **Stabilitas Harga Pangan Pokok (Beras) ditingkat Konsumen (%)** pada tahun 2016 target yang ditetapkan 95%, sedangkan capaiannya sebesar 95 %;
2. **Skor Pola Pangan Harapan (PPH);** Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk ,menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. target yang ditetapkan untuk tahun 2016 sebesar 95%, sedangkan capaiannya sebesar 98,46%, melebihi target sebesar 103,64%.
3. **Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat** pada tahun 2016 mencapai 100% sebagaimana ditargetkan sebesar 100%.
4. **Jumlah Lokasi Rawan Pangan,** Jumlah lokasi yang tergolong rawan pangan di Kabupaten Bintan ada 9 Desa, 8 di Kecamatan Tambelan dan 1 di Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesir. Sebenarnya daerah yang tergolong rawan pangan di Kabupaten Bintan ini hanya masalah transportasi, karena merupakan wilayah kepulauan yang cukup jauh dari kabupaten induk. Sehingga masalah transportasi merupakan kendala utama dalam distribusi pangan.
5. **Ketersediaan Pangan Utama (kg/pdd/th)** pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 1.805 kg/kap/th sedangkan capaiannya sebesar 1.817 kg/kap/th.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan** melalui 5 (lima) kegiatan dengan pagu dana Rp.420.238.260,-. dan realisasi anggaran sebesar

Rp.395.412.582,- atau dengan persentase sebesar 94,09% Realisasi Fisik sampai bulan Desember 2016 sebesar 100% Capaian program adalah meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Konsumsi Pangan Segar dan B2SA**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.96.697.060,- Realisasi sebesar Rp.87.181.800,- atau 91,10%. *Output* dari kegiatan Konsumsi Pangan Segar dan B2SA adalah Tersedianya bahan Pangan yang segar, berimbang, bergizi, sehat dan aman untuk dikonsumsi pada untuk 10 Kecamatan.

(2) **Pengembangan Desa Mandiri Pangan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.83.617.800,- atau 98,37%. *Output* dari kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan adalah meningkatnya desa mandiri pangan dengan target 10 Desa.

(3) **Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Lokal**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.71.052.000 dan realisasi Rp.67.439.800,- atau 94,92%. *Output* Kegiatan ini adalah Pengembangan Pangan Lokal dengan Terlaksananya pemanfaatan lahan untuk pengembangan pangan local dengan Target 25 Kelompok Wanita Tani (KWT) di 9 Kecamatan.

(4) **Pelatihan Neraca Pangan Masyarakat dan Peta FSVA**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.107.299.200,- dan realisasi sebesar Rp.102.447.282,- atau 95,48%. *Output* kegiatan dari Pelatihan Neraca Pangan Masyarakat dan Peta FSVA sehingga tersusunnya buku neraca pangan dan peta FDSVA Kabupaten Bintan. sebanyak buku 15 buah.

(5) **Peningkatan Dewan Ketahanan Pangan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.190.000,- dan realisasi sebesar Rp.54.725.900,- atau 89,44%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya operasional dewan ketahanan pangan Kabupaten Bintan sebanyak adalah 1 tim/55 orang.

2) **Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani.**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan pagu dana Rp.459.945.400,-. dan realisasi anggaran sebesar Rp.421.817.870,- atau dengan persentase sebesar 91,71%. Realisasi Fisik sampai bulan Desember 2016 sebesar 100% Capaian program adalah meningkatnya pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani.

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Peningkatan dan Penguatan Kemampuan Kelembagaan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.258.245.400,- dan realisasi sebesar Rp.239.159.840,- atau 92,61%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan dan penguatan kelembagaan kepada 161 orang.

(2) **Penilaian Kemampuan Kelompok Tani**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.88.700.000,- dan realisasi sebesar Rp.74.040.830 atau 83,47%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya penilaian kemampuan kelompok tani kepada 10 Kecamatan.

(3) **Temu Usaha Pelaku Agribisnis**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.113.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.108.617.200 atau 96,12%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya temu usaha agribisnis untuk 250 orang dari 10 Kecamatan.

3) **Program Pengembangan dan Penyuluhan Petani dan Nelayan**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan pagu dana Rp.402.418.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.290.419.000,- atau dengan persentase sebesar 72,17% Realisasi Fisik sampai bulan Desember 2016 sebesar 100% Capaian program adalah meningkatnya pengembangan dan penyuluhan petani dan nelayan.

a. **Permasalahan dan solusi**

(1) **Penyusunan Program dan Programa Penyuluhan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.184.738.000,- dan realisasi sebesar Rp.118.026.800 atau 63,89%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penyusunan program dan programa masing-masing penyuluh, BPK dan BPPKP dengan 7 BPK/20 PPL.

(2) **Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.116.391.000,- dan realisasi sebesar Rp.77.171.750 atau 66,30%. *Output* Kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana di Balai Penyuluhan Kecamatan.

(3) **Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.101.289.000,- dan realisasi sebesar Rp.95.220.450,- atau 94,01 %. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian dan Hama Terpadu di 5 Kecamatan yang melibatkan 50 orang warga masyarakat/petani.

4) **Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp.205.008.115,-. dan realisasi anggaran sebesar Rp.192.061.600,- atau persentase sebesar 93,68%. *Outcome* dari program adalah meningkatnya penerapan teknologi, pertanian, perikanan dan kehutanan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah **Penyuluhan Teknologi dan Informasi Pertanian**, dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.205.008.115,- dan realisasi sebesar Rp.192.061.600, atau 93,68%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya penerapan teknologi dan informasi pertanian dan perikanan untuk 10 Kecamatan.

a. **Permasalahan dan solusi**

1) **Permasalahan**

- a. SDM penyuluh masih terbatas jumlahnya ,yaitu hanya ada 22 orang, terdiri dari Penyuluh Pertanian sebanyak 12 orang berstatus PNS, ditambah 1 orang PTT yang menjadi Penyuluh Pertanian, 1 orang Penyuluh Pertanian THLTBPP, 2 Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK),dan 2 Penyelia Mitra Tani (PMT),dan perlu ditingkatkan keahliannya, baik melalui pendidikan formal standar baku penyuluh maupun ketrampilan-ketrampilan lain yang menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Penyuluh swadaya di Kabupaten Bintan sebanyak 31 orang belum pernah mendapat pelatihan / pembinaan secara optimal.
- c. Belum optimalnya peran fungsional Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bintan dan masih ada beberapa titik daerah terindikasi rawan pangan sehingga memerlukan adanya penyusunan peta situasi dan neraca pangan masyarakat yang bisa memberi informasi secara jelas.

- d. Komposisi kebutuhan pangan masih tetap didominasi oleh beras. Diversifikasi Pangan baru sebatas pada makanan tambahan dan belum menyentuh pada kebutuhan pangan pokok. Peran serta Dinas/ LSM dan pihak swasta dalam penumbuhan kelembagaan pangan lokal di masyarakat belum berjalan optimal.
- e. Ada kecenderungan kenaikan lagi jumlah kelompok tani dan anggota kelompok tani pada tahun 2016 dibandingkan pada tahun 2015. Keadaan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor permasalahannya, antara lain : gairah bertani yang disebabkan adanya perhatian dari Pemerintah pada bidang Pertanian , Peran Penyuluh baik itu PNS, Swadaya, THLTBPP, PMT.

2) **Solusi**

- a. Meningkatkan kualitas SDM penyuluh di masing-masing Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) serta mengusulkan tambahan jumlah personil penyuluh, karena jumlah yang ada sekarang tidak seimbang dengan jumlah desa/ kelurahan yang ada di Kabupaten Bintan.
- b. Mengadakan pelatihan kepada para penyuluh swadaya dengan dana APBD Murni/ Perubahan.
- c. Peran Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bintan dapat lebih dioptimalkan dengan tersusunnya peta situasi dan neraca pangan masyarakat secara jelas sebagai langkah untuk mengatur kebijakan-kebijakan.
- d. Meningkatkan konsumsi makanan non beras sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada makanan pokok beras yang jumlahnya terbatas, lewat budi daya makanan lokal non beras (ubi, jagung, palawija, hortikultura) baik itu dengan memanfaatkan fungsi lahan pekarangan. Selain itu perlu ditingkatkan uji coba dan uji terap di

beberapa lahan basah atau lahan tidur yang ada untuk tanaman padi.

- e. Perlu peningkatan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan penumbuhan kelembagaan, budidaya, konsumsi maupun usaha yang menggalakkan produksi pangan lokal, seperti Dinas Pertanian, LSM, swasta lainnya.
- f. Perlu support dan stimulan dari Pemerintah kepada Kelompok-Kelompok Tani supaya produksi hasil pertanian semakin meningkat seiring dengan naiknya angka jumlah kelompok tani dari 174 pada tahun 2015 menjadi 301 pada tahun 2016. Seperti perlu ditingkatkan penyuluhan-penyuluhan dan bantuan-bantuan yang bisa menambah gairah para petani.

4.1.14.URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keenam**. terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** adalah sebagai berikut :

- **Indeks Pembangunan Gender**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2016 adalah sebesar 92,41 dari target 60,9 dan capaian tahun sebelumnya sehingga dapat dikatakan pelaksanaan kesetaraan gender di Kabupaten Bintan telah berjalan dengan baik. upaya yang dilakukan antara lain sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat baik lingkungan kerja, sekolah maupun lingkungan masyarakat.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- 1) **Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan** melalui 6 (lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.608.599.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.590.614.816,- atau 97,04%. Outcome program ini untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas, termasuk didalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas.

Terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain:

- a. **Pelaksanaan Program**

- (1) **Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.124.200.000,-. terealisasi sebesar Rp.122.660.610,- atau 98,76%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah meningkatnya

kualitas hidup perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan hasil (outcomes) dari kegiatan ini adalah berkurangnya tindak kekerasan, kejahatan, eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Kegiatan Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat pelayanan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Dana yang di alokasikan Kegiatan Pengembangan Pusat.

(2) **Pertemuan Pokja PUG Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.136.799.900,-. terealisasi sebesar Rp.133.574.820,- atau 97,64%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta tentang gender. Sedangkan hasil (outcomes) dari kegiatan ini adalah peserta dapat membuat program yang responsif gender. Yang menjadi sasaran adalah 48 SKPD di Kabupaten Bintan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan PUG kedalam siklus perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam pelaksanaan PUG di daerah diharapkan setiap SKPD dapat melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol

dan manfaat pembangunan. Untuk mewujudkan program tersebut Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen melaksanakan program yang responsif gender guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bintan, salah satu program yang dilaksanakan adalah Pertemuan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) untuk merealisasikan setiap program yang responsif di setiap SKPD.

(3) Pembinaan Sekolah dan Puskesmas Ramah Anak

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73.600.000,-. terealisasi sebesar Rp.71.784.106,- (97,53 %). *output* kegiatan ini adalah peningkatan sarana prasarana Puskesmas dan sekolah yang memadai bagi kebutuhan anak sehingga tercapainya kabupaten layak anak. Yang menjadi sasaran adalah semua sekolah dan puskesmas di Kabupaten Bintan. Anak sebagai Investasi SDM bagi pembangunan Nasional, perlu dilindungi dan dipenuhi haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak anak. Dalam rangka pemenuhan hak-hak anak secara maksimal khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

(4) Pengembangan dan Fasilitas Forum Anak

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.000.000,-. terealisasi sebesar Rp.67.713.380,- atau 91,50%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan dan fasilitas forum anak di desa. Sedangkan hasil (*outcomes*) dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan dan fasilitas forum anak-anak se-Kabupaten Bintan. Forum anak adalah organisasi yang dibina Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak, forum anak juga diharapkan sebagai wadah kreatifitas dan inovasi, anak sebagai generasi penerus harus

mendapatkan bimbingan agar dapat melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan hak-haknya.

(5) Pelatihan Keterampilan Membuat Hantaran

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,-. terealisasi sebesar Rp.49.981.700,- (99,96 %). *Output* kegiatan ini adalah meningkatnya organisasi perempuan. Sedangkan hasil (outcomes) dari kegiatan ini adalah tercapainya pendidikan dan keterampilan perempuan di Kabupaten Bintan. Sasaran dari kegiatan ini adalah 50 orang dari 35 organisasi perempuan di Kabupaten Bintan. Salah satu prioritas pemerintah baik ditingkat Pusat maupun di tingkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, diantaranya adalah Upaya peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi perempuan melalui pemberian ilmu atau ketrampilan, sehingga akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial di dalam keluarga. Dengan dilaksanakan kegiatan pelatihan ini di harapkan ketrampilan perempuan di Kabupaten Bintan akan dapat meningkat kearah yang lebih maju dan profesional serta hasil yang di peroleh akan maksimal.

(6) Pelatihan Manajemen Kewirausahaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,-. terealisasi sebesar Rp.144.900.200,- (96,60 %). *Output* kegiatan ini adalah meningkatnya organisasi perempuan. Sedangkan hasil (outcomes) dari kegiatan ini adalah tercapainya pendidikan dan keterampilan perempuan di Kabupaten Bintan. Sasaran dari kegiatan ini adalah 100 orang dari 35 organisasi perempuan di Kabupaten Bintan.

Pelatihan Kewirausahaan bagi Perempuan di Kabupaten Bintan merupakan program pemerintah guna meningkatkan kemampuan perempuan dalam melaksanakan usaha-usaha produktif. Peningkatan Produktivitas Ekonomi perempuan diarahkan untuk mensinergikan seluruh kekuatan yang ada yaitu

pemerintah, pengusaha, perbankan maupun kekuatan masyarakat umum untuk secara bersama sama dan harmonis mengupayakan peningkatan produktifitas ekonomi yang dapat diatasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Ada beberapa hal strategis yang dilaksanakan guna mendorong produktivitas ekonomi yaitu :

1. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi rakyat
2. Peningkatan Ekonomi Perempuan melalui Pembinaan Kewirausahaan
3. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan melalui Kemitraan
4. Pengembangan (PRIMA) Perempuan Indonesia Maju Mandiri.
5. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran secara strategis melalui Menguatkan dan memfasilitasi sektor terkait, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dan meningkatkan kemitraan dan jejaring kerja (networking).

Capaian kinerja tahun 2016 dapat dilihat melalui indikator berikut :

1. **Rasio KDRT**

Rasio KDRT pada tahun 2016 adalah sebesar 0,01. Angka ini sama dengan target yang ditetapkan sebesar 0,01. Karena terkait angka KDRT yang terjadi selama kurun waktu tahun 2016 terjadi 4 kasus dibandingkan dengan jumlah rumah tangga sebesar 40.000 RT di Kabupaten Bintan.

2. **Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan**

Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2016 adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% karena Koordinasi cukup baik dengan SKPD terkait (Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, KPPAI) dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan

anak, dan sudah terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

3. **Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK**

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2016 adalah sebesar 3,58 dari target 2 atau mencapai sebesar 179% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2016. Hal ini disebabkan jumlah Kelompok PKK yang dibina oleh PKK aktif sebanyak 3.113 kelompok dibandingkan dengan 869 kelompok PKK aktif. Adapun kelompok binaan PKK tersebut antara lain:

1. Dasawisma : 808 kelompok
2. Posyandu Balita : 162 kelompok
3. Posyandu Lansia : 154 kelompok
4. PAUD dan TK : 177 kelompok
5. Kelompok Wanita Tani : 106 kelompok
6. Kelompok Usaha Bersama : 350 kelompok
7. Desa Siaga : 51 kelompok
8. Koperasi Perempuan : 29 kelompok
9. Bina Keluarga Lansia (BKL) : 56 kelompok
10. Bina Keluarga Balita (BKB) : 1120 kelompok
11. Bina Keluarga Remaja (BKR) : 35 kelompok
12. UPPKS : 36 kelompok
13. PIK-R : 29 kelompok

4. **Jumlah PKK aktif**

Jumlah PKK aktif pada tahun 2016 adalah sebesar 870 dari target 668 angka ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar 665 PKK ini dan tersebar di tingkat Kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan antara lain :

1. PKK Kabupaten : 1 kelompok
2. PKK Kecamatan : 10 kelompok
3. PKK Desa Kelurahan : 51 kelompok
4. Dasawisma : 808 kelompok

5. **Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak**

Jumlah kasus kekerasan pada anak pada tahun 2016 adalah sebesar 76 dari target 24 atau meningkat dari tahun sebelumnya. Kasus ini cenderung meningkat dilatar belakangi berbagai masalah ekonomi maupun rumah tangga. Karena dari beberapa kasus yang terjadi pelakunya adalah orang terdekat(Orang tua, pasangan, paman).

6. **Jumlah Kasus Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak**

Jumlah kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak pada tahun 2016 adalah sebesar 33 dari target 24. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 26 kasus. Penyebab utamanya antara lain karena semakin tingginya perkembangan teknologi, penggunaan internet yang tidak terkontrol oleh orang tua, serta faktor ekonomi keluarga.

b. **Permasalahan dan Solusi**

3) **Permasalahan**

- a. Forum anak masih terfokus di kecamatan sehingga forum anak tersebut masih belum mewakili suara anak-anak yang ada di kabupaten Bintan.
- b. Anak-anak di Kabupaten Bintan masih banyak yang belum berani menyuarakan hak-haknya sebagai anak.
- c. Masih banyak kita temui bangunan fisik di Kabupaten Bintan yang belum memenuhi kebutuhan hak-hak anak.
- d. Permasalahan dalam pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan bagi perempuan Bintan adalah terbatasnya kesediaan Dana sehingga pelaksanaan pelatihan sangat terbatas baik dari segi waktu, tempat dan sasaran sebagai peserta.

4) **solusi**

- a. Mengembangkan forum anak di kelurahan/ Desa (Kelurahan Kijang Kota, Kelurahan Sei. Lekop, Kelurahan gunung Lengkuas, Desa Berakit, Desa malang Rapat, Kampung KB Kelurahan Tembeling Tanjung).

- b. Mengikut sertakan anak-anak dalam kegiatan sosial, seperti kampanye "Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak" yang di sejalankan dengan perayaan hari anak internasional di kecamatan Bintan Timur.
- c. Berpartisifasi pada perayaan Hari Ibu.
- d. Mengadvokasi kelurahan dan kecamatan untuk dapat mengikut sertakan anak pada kegiatan musawarah masarakat Desa (MMD) dan Musrenbang.
- e. Meningkatkan kualitas pelatihan Keterampilan Kewirausahaa diperlukan Dana yang cukup sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat dilaksanakan disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan.

4.1.15.URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keempat** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera** adalah sebagai berikut :

1. Cakupan peserta KB aktif

Pada tahun 2015 prosentase cakupan peserta KB mencapai 82,45% sedangkan pada tahun 2016 menjadi 82%, namun tetap melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 65%.

2. Angka pertumbuhan penduduk 2,3%;

Angka pertumbuhan penduduk atau Laju Pertumbuhan Kabupaten Bintan pada tahun 2016 adalah sebesar 2,3%. angka ini sama dengan angka tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk masih stabil. Namun tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 2,1%. Penyebabnya bukanlah dari angka kelahiran yang tinggi tetapi lebih kepada meningkatnya pendatang dari luar daerah yang bekerja serta menetap di wilayah Kabupaten Bintan.

3. Jumlah keluarga yang terlayani oleh kader Catur Bina;

Hingga tahun 2016 jumlah keluarga yang terlayani oleh Kader Catur Bina telah mencapai sebesar 4.488 keluarga meningkat sangat signifikan dibanding tahun 2015 yang hanya sebesar 589 keluarga.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Keluarga Berencana

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan** melalui 5 (lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.249.457.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.240.605.591,- atau 96,45 %. *Outcome* program ini untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas, termasuk didalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak serta

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas.

Terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pelayanan Keluarga Berencana Kontrasepsi Tetap (KONTAP)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.600.000,-. terealisasi sebesar Rp.76.686.585,- (97,56%). *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan kontrasepsi tetap (KONTAP) di Kabupaten Bintan. Yaitu melalui pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang seperti MOP, MOW, IUD dan Implant. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan pemasangan kontrasepsi tetap bekerjasama dengan RSUD Propinsi Kepri dengan sasaran 37 orang, terdiri dari pemasangan MOP 7 akseptor dan MOW 30 akseptor. Namun untuk MOP dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Provinsi Kepulauan Riau sedangkan MOW dengan anggaran Kabupaten Bintan melalui kegiatan ini. Kegiatan ini mendukung cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Bintan dimana cakupan ini terus meningkat.

(2) **Peningkatan Pelayanan KB Keliling**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.571.000,-. terealisasi sebesar Rp.81.310.920,- atau 96,15%. Keluaran kegiatan ini adalah Tersedianya operasional pelayanan KB di Kabupaten Bintan. Yang menjadi target adalah 50 peserta KB. Kegiatan ini untuk melayani peserta KB baru dan KB aktif.

(3) **Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.850.000,-. terealisasi sebesar Rp.17.348.036,- atau

97,19%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan kontrasepsi di Kabupaten Bintan. Yang menjadi target adalah 70 akseptor KB. Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan dan operasional kegiatan yang berlangsung di Balai Penyuluhan KB di Kabupaten Bintan yang berada di Kecamatan Toapaya. Anggaran kegiatan ini berasal dari DAK Non Fisik Bidang KB dan selama tahun 2016 tidak ada permasalahan yang dihadapi dan kegiatan berjalan dengan lancar.

(4) Pengadaan Kendaraan Fungsional Jemput Antar Peserta KB (DAK Fisik)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.425.500,-. terealisasi sebesar Rp.36.280.550,- atau 99,60%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan kendaraan fungsional jemput antar akseptor KB di Kabupaten Bintan. Yang menjadi target adalah 1 unit mobil. Sumber anggaran berasal dari DAK Bidang KB Tahun 2016. Kegiatan ini untuk memberi kemudahan transportasi bagi akseptor KB sehingga diharapkan dapat meningkatkan semangat dan minat bagi masyarakat untuk mengikuti Program Keluarga Berencana.

(5) Pengadaan Furniture dan Peralatan Lainnya untuk Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.011.000,-. terealisasi sebesar Rp.28.979.500,- atau 90,53%. *Outcome* kegiatan ini adalah tersedianya peralatan peralatan gudang alat dan obat di Kabupaten Bintan. Yang menjadi target adalah 10 jenis peralatan gudang alat dan obat KB. Sumber anggaran berasal dari DAK Bidang KB Tahun 2016. Kegiatan ini untuk mendukung penggunaan gudang alat dan obat yang akan dibangun melalui dana DAK Bidang KB seperti Lemari, Rak Obat, Meubelair, Tangga, dan Alat Pemadam Kebakaran.

2) **Program Ketahanan Pemberdayaan Keluarga**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan** melalui 6 (lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.271.335.570,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.268.959.710,- atau 99,12%. *Outcome* program ini untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas, termasuk didalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas. Terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain:

Terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain:

(1) **Pelatihan Kualitas Program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.748.850,-, terealisasi sebesar Rp.49.199.930,- (96,95 %). *output* kegiatan ini adalah tersedianya kader PIK R yang profesional. Sedangkan hasil (*outcomes*) dari kegiatan ini adalah terbentuknya remaja yang berkarakter dan berakhlak mulia. Sasaran dari kegiatan ini adalah 75 remaja dari se-Kabupaten Bintan. Permasalahan untuk kegiatan ini adalah tidak terjangkaunya pembinaan PIK R di daerah pesisir seperti Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Tambelan. Sedangkan solusinya adalah adanya penambahan anggaran untuk mengundang remaja-remaja daerah pesisir untuk bisa ikut di kegiatan pembinaan mengingat penting nya peran konseler tingkat remaja yang dibangun melalui kegiatan ini.

(2) **Pembinaan Kelompok Tribina dan UPPKS**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.104.371.720,-. terealisasi sebesar Rp.104.095.880,- atau 99,74%. *Output* kegiatan ini adalah tersedianya kelompok BKB holistik integratif. Sedangkan hasil (*outcomes*) dari kegiatan ini adalah terbentuknya kelompok BKB holistik integratif. Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok BKB di Kabupaten Bintan. Permasalahan untuk kegiatan ini adalah tidak terjangkaunya pembinaan Kelompok Tribina dan UPPKS di daerah pesisir seperti Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Tambelan. Sedangkan solusinya adalah adanya penambahan anggaran untuk mengundang kader-kader daerah pesisir untuk bisa ikut di kegiatan pembinaan mengingat penting nya peran konseler tingkat remaja yang dibangun melalui kegiatan ini.

(3) **Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kader Catur Bina / Kader Posyandu.**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.116.215.000,-. terealisasi sebesar Rp.115.663.900,- atau 99,53 %. *Output* kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja kader KB dan PLKB. Sedangkan hasil (*outcomes*) dari kegiatan ini adalah tersedianya pencatatan dan pelaporan KB (*up to date*). Sasaran dari kegiatan ini adalah 61 orang Kader KB dan PLKB di Kabupaten Bintan.

Capaian kinerja tahun 2016 dapat dilihat melalui indikator berikut :

1. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB tahun 2016 mencapai sebesar 82%. Pencapaian ini kurang sedikit dari yang ditargetkan yaitu sebesar 82,75%. Angka rasio ini juga masih dapat dipertahankan dibanding rasio tahun 2015.

2. Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif sebesar pada tahun 2016 mencapai 82%. Pencapaian ini cukup signifikan karena melebihi target yang ditetapkan sebesar 77.8% serta pencapaian tahun 2015. Keberhasilan program KB ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan pemerintah seperti :

1. Memaksimalkan Peran PLKB di setiap kecamatan melalui pemantauan laporan bulanan ONLINE F1KB
2. Memberikan pendampingan pencatatan pelaporan F2KB secara ONLINE kepada bidan pemegang program KB.
3. Penambahan jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja(BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera uppk) yang berfungsi sebagai wadah penyuluhan keluarga tentang pentingnya KB / alat kontrasepsi.
4. Mempertahankan keikutsertaan berkb bagi keluarga sasaran Prasejahtera, maupun Sejahtera 1.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Letak geografis Kabupaten bintang terdiri dari kepulauan yang di kelilingi lautan sehingga menghambat arus kegiatan ke pulau-pulau terluar/terpencil.
- b. Penyebaran penduduk yang tidak merata di pulau-pulau terluar/terpencil.
- c. Efisiensi anggaran pada Perwakilan BKKBN provinsi Kepulauan Riau terhadap Bantuan Operasional Lapangan / Operasional Laporan Bulanan yang berdampak pada Kualitas Laporan itu sendiri.
- d. Realisasi Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 yang berdampak pada terhambatnya kinerja PLKB karena Status, wewenang serta tanggung jawab di Alihkan Kepemerintah Pusat.

- e. Masih minimnya Oprasional PLKB di lapangan untuk mobilisasi kegiatan antar Desa.
- f. Terputusnya kiriman obat/alkon dari BKKBN provinsi dan BKKBN Pusat pada pertengahan tahun 2016.
- g. Perlunya administrasi yang tepat terhadap klaim pelayanan yang telah dilakukan bidan CTU ke BKKBN Provinsi Kepulauan Riau.

2) Solusi

- a. Memperkuat koordinasi BKKBN-RI, BKKBN Provinsi Kepulauan Riau dengan SKPD-KB Kabupaten Bintan dalam berbagai kegiatan realisasi program keluarga berencana & pelayanan terpadu.
- b. Mengaktifkan sub PPKBD yang ada di desa-desa seluruh kabupaten bintan.
- c. Terus meningkatkan kualitas penganggaran, pemetaan , pencatatan, pelaporan serta pemantauan berkala.

4.1.5. URUSAN PERHUBUNGAN

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kedua** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Sosial adalah sebagai berikut :

- 1. Jumlah Pulau yang tercakupi jaringan Transportasi 8 pulau;**
- 2. Jumlah pengujian kendaraan bermotor wajib uji (KIR) 2098 Kendaraan;**
- 3. Presentase wilayah yang tercakupi jaringan operator selular;**

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.186.198.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.157.133.730 atau 97,55%. *Outcome* dari program ini meningkatnya pelayanan angkutan, Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. Pelaksanaan Program

(1) Peningkatan dan Pelayanan kepelabuhanan (5 dermaga/pelabuhan)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.305.285.000,- dan realisasi sebesar Rp.302.538.450,- atau 99,10%. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan kepelabuhan sehingga menimbulkan kenyamanan bagi masyarakat pengguna pelabuhan/dermaga.

(2) Kegiatan Peningkatan dan Pelayanan Terminal Angkutan Darat (1 unit)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 44.047.090,- atau 98,32%. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan baik untuk angkutan umum maupun penumpang

dengan menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan bagi pengguna terminal.

(3) **Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (2.100 unit kendaraan)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.413.000,-. dan realisasi sebesar adalah Rp.170.483.895,- dengan capaian persentase keuangan 97,75%. *Output* dari kegiatan ini dimaksudkan untuk pelayanan dan meningkatkan layak uji KIR kendaraan angkutan orang dan barang.

(4) **Sewa kapal/transportasi laut (1 kegiatan-4 trip)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.565.600.000,-. dan realisasi sebesar Rp.548.357.600,- atau 96,95%. *Output* dari Kegiatan ini adalah menunjang pelaksanaan subsidi kapal bagi masyarakat Kecamatan Tambelan.

(5) **Pembinaan Pelayanan PAS Kecil Kapal Pompong Masyarakat (1000 kapal/pompong),**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.600.000,-, dan realisasi sebesar Rp.61.566.250,-. *Output* dari kegiatan ini adalah membantu masyarakat dengan pemberian tanda kepemilikan kapal/pompong GT 7 kebawah sebanyak 1000 buah.

(6) **Peningkatan Pelayanan verifikasi BBM**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.30.140.445,-. *Output* kegiatan ini adalah terlaksanakannya pemberian bantuan kepada membantu masyarakat dengan pemberian tanda kepemilikan kapal/pompong GT 7 kebawah jenis tertentu bagi 11 kios yang melayani 98 unit kendaraan darat dan 8 unit kendaraan laut.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Tidak terdapat dalam pelaksanaan program Peningkatan Pelayanan Angkutan, namun ada kegiatan pembangunan Dermaga Sebong Pereh yang tertunda sedangkan UKL/UPL nya yang dilaksanakan, ini disebabkan defisit anggaran.

2) **Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.442.635.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.416.659.993,- atau 94,13%. *Outcome* dari program ini antara meningkatnya keselamatan pengguna angkutan umum. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pembangunan halte bis, taxi, gedung terminal**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.176.315.000,- dengan realisasi sebesar Rp.174.545.343,- atau 99%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembangunan halte bis/taxi/angkot bagi masyarakat pengguna angkutan umum. Pembangunan halte sebanyak 4 unit yang terletak dilokasi : (1). RT.1/RW.1. Tembeling Tanjng, (2). RT.1/RW1. Jl. Lintas Barat Desa Tembeling, (3). SDN 014/SMPN 26 satu atap Wacopek Kec, Bintan Timur. (4). Depan PT. Crystalini/SMPN 03 Jl. Nusantara Km.18 Kec. Bintan Timur,.

(2) **Pembangunan dermaga/pelabuhan rakyat dan ruang tunggu (1 dermaga);**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.105.270.000,- dan realisasi sebesar Rp.81.993.650,- atau 77,89%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyusunan UKL/UPL pembangunan dermaga Sebong Pereh.

(3) **Pengadaan Sarana dan Fasilitas Pendukung/penunjang dermaga/pelabuhan,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.161.050.000,- dan realisasi sebesar Rp.160.121.000,- atau 99,42%. Output dari kegiatan ini dimaksudkan agar tersedianya penerangan pada dermaga/pelabuhan sebanyak 5 unit yaitu dermaga Semelur 2 unit, Pantai Indah 1 unit, Pangkil 1 Unit dan Dendum 1 unit, adapun tujuannya untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jasa dermaga/pelabuhan.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan

3) **Program Peningkatan Perencanaan Teknis dan Kebijakan Bidang Perhubungan**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.524.497.300 dan realisasi anggaran sebesar Rp.509.141.900 atau 97,07%. *Outcome* dari program ini adalah terlaksananya ketertiban berlalulintas bagi anak sekolah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. **Permasalahan dan Solusi**

(1) **Penyusunan Profil Perhubungan Kabupaten Bintan** (1 dokumen)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.450.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp.80.662.000,- atau 97,83%. Kegiatan ini dimaksudkan agar tersedianya dokumen tentang profil Perhubungan Kabupaten Bintan yang

dapat menjadi informasi bagi masyarakat yang membutuhkannya,

(2) **Penyusunan DED Sarana Transportasi Laut/kapal**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.79.702.600,-. Atau 99,63%. Kegiatan ini dimaksudkan agar tersedinya data perencanaan pembangunan pembangunan Kapal Operasional Kabupaten Bintan (1 dokumen DED).

(3) **Penyusunan Perencanaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan (Penyusunan DED Fasilitas Penunjang/ Pendukung Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit sebanyak 1 dokumen)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.171.850.000,- dan realisasi sebesar Rp. 162.673.000,- atau 94,66%. Kegiatan ini dimaksud agar tersedianya fasilitas pendukung antara lain : Kantor UPP (Syahbandar dan Bea Cukai), Kantor Imigrasi, Kantor Karantina, Kantor KP3) Mushola, Gudang.

(4) **Penyuluhan Keselamatan Berlalu Lintas Anak Sekolah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.190.197.300,- dan realisasi sebesar Rp.186.104.300,-. atau 97,85%. Kegiatan ini dimaksudkan agar anak sekolah mendapatkan pembekalan pengetahuan tentang bagaimana berlalu lintas dengan baik dan benar supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas (peserta penyuluhan 500 orang) adapun sekolah yang diberikan penyuluhan adalah 1) SMA Negeri 2 Bintan, 2) SMP Negeri 13 Bintan, 3) SD Negeri 001 Gunung Kijang, 4) SD Negeri 003 Seri Kuala Lobam dan 5) SD Negeri 004 Bintan Timur.

4) **Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan** melalui 14 (empatbelas) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.3.117.940.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.948.864.095,- atau 94,58%. *Outcome* dari program ini meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. **Pelaksanaan Program :**

(1) **Rehabilitasi dan pemeliharaan dermaga/pelabuhan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp.947.680.000,- dengan realisasi sebesar Rp.836.080.000 atau (88%). *Output* kegiatan ini adalah terpeliharanya 1 (satu) unit dermaga/pelabuhan Pantai Indah Kecamatan Bintan Timur yang dilaksanakan oleh CV.Karya Bersama Tanjungpinang dan 1 (satu) unit Ponton Dermaga Bulang Linggi Kecamatan Bintan Utara yang dilaksanakan oleh PT. Budi Putra Indonesia, TanjungPinang

(2) **Rehabilitasi Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan (15.000 M' marka jalan dan 2 lokasi ZOSS),**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.639.820.000,- dan realisasi sebesar Rp.606.818.490,- atau 94,84%. *Output* dari kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk yang jelas terhadap pengendara lalu lintas, sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna jalan dan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

(3) **Pengadaan dan Pemasangan Rambu Rambu Lalu Lintas (120 Buah) 100 Bh Rambu Lalin (Rambu Himbauan), 20 Bh Rambu Petunjuk,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.158.750.000,- dan realisasi sebesar Rp.156.112.500,- atau 98,34%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk yang jelas terhadap pengendara lalu lintas, sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna jalan dan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

(4) **Rehabilitasi dan Pemeliharaan fasilitas lalu lintas (9 Unit Apil, 29 Unit Warning Light)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.205.250.000,- dan realisasi sebesar Rp.195.208.000,- atau 95,11%.Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas seperti Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) agar dapat berfungsi dengan baik sehingga bermanfaat bagi keselamatan pengguna jalan.

(5) **Pengamanan Lalu Lintas**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.377.150.000,- dan realisasi sebesar Rp.373.718.037,- dengan capaian persentase keuangan 99,09%. Output dari kegiatan ini adalah untuk pengamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dalam perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan iven-iven internasional maupun nasional dengan. Tahun 2016 telah dilaksanakan pengamanan sebanyak 12 kegiatan dalam 1 tahun yaitu : pengamanan anak sekolah sebanyak 188 kali, kunjungan Gubernur sebanyak 3 kali, kunjungan Bupati dan wakil Bupati sebanyak 30 kali, Upacara Kenegaraan 9 kali, Perayaan hari Raya Keagamaan 8 kali, Posko arus mudi dan balik 27 kali, event olah raga Nasional dan Internasional 8 kali, event budaya/tari tadisional 2 kali,

Sembahyang keselamatan Vihara 16, gerak jalan santai 3 kali, pernikahan dan khitanan 9 kali, dan pengamanan pengaspalan, penggalian dan pembangunan jalan raya 80 kali,

(6) **Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.211.050.000,- dan realisasi sebesar Rp.208.988.000,- atau 99,02%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan peringatan bagi pengemudi kendaraan untuk berhati-hati/mengurangi kecepatan kendaraan karena kondisi jalan rawan kecelakaan sehingga tercapai penurunan/berkurangnya kecelakaan lalu lintas. Tahun 2016 telah dilakukakn pemasangan sebanyak 4 unit warning light yaitu di Jl. Wisata Bahari Kec. Gunung Kijang, Depan MTS Berakit Jl. Wonosari Kec. Teluk Sebong, Depan SDN 007 Jl. Wonosari Kec. Teluk Sebong, Depan SMP 12 Kec. Bintan Utara,

(7) **Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.293.940.000,- dan realisasi sebesar Rp.290.792.053,- dengan capaian persentase keuangan 98,93%. Kegiatan ini meliputi Pengadaan paku jalan sebanyak 380 buah, pengadaan dan pemasangan delineator sebanyak 300 buah. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberi petunjuk/peringatan atau himbauan bagi pengguna jalan (pengemudi) sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna jalan dan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

(8) **Pengendalian dan Pengawasan Operasional Perparkiran Dan Perbengkelan (1 Tahun)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.40.964.690,- atau

99,91%. Kegiatan ini meliputi Pengendalian dan pengawasan perparkiran dan perbengkelan. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberi fasilitas parkir sesuai ketentuan yang berlaku demi kenyamanan dan keamanan pemilik kendaraan.

(9) Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Orang/Barang (1 tahun)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.800.000,- dan realisasi sebesar Rp.37.576.970,- atau 99,41%. Kegiatan ini meliputi Pengendalian dan pengawasan terhadap angkutan orang/barang. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap angkutan orang/barang agar persyaratan teknis, kelengkapan administrasi kendaraan dapat terpantau sehingga dapat mengurangi kecelakaan serta dapat member kenyamanan pada kendaraan lain.

(10) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal/Halte (1 Unit)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.850.000,- dan realisasi sebesar Rp.54.439.768,- dengan capaian persentase keuangan 97,47%.Kegiatan dimaksud agar terpeliharanya gedung terminal sehingga memberikan kenyamanan dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa terminal.

(11) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Pengujian (1 Unit)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.350.000,- dan realisasi sebesar Rp.49.205.087- atau 99,71%. *Output* kegiatan ini dimaksud adalah terpeliharanya gedung pengujian sehingga memberikan kenyamanan dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa pengujian.

(12) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas (100 Bh Rambu Dan 100 Bh Delineator)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.250.000,- realisasi sebesar Rp.38.229.500,- atau 97,40%. Kegiatan dimaksud agar terpeliharanya rambu rambu jalan dan delineator sehingga dapat membantu memberikan petunjuk bagi pengguna jalan.

(13) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dermaga/Pelabuhan (2 Unit) yaitu Dermaga Pantai Indah Kijang dan Ponton Dermaga Bulang Linggi Tanjung Uban

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.947.680.000,- dengan realisasi sebesar Rp.836.080.000,- dengan capaian persentase keuangan 88,22%. Output dari Kegiatan terpeliharanya dermaga/pelabuhan sehingga dapat membantu memberikan keamanan dan kenyamanan bagimobilitas orang dan barang.

(14) Rehabilitasi dan pemeliharaan solar cell/penerangan tenaga surya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.050.000,- dan realisasi sebesar Rp.60.731.000,- atau 99,48%. Kegiatan dimaksud agar terpeliharanya penerangan didermaga/pelabuhan sehingga dapat membantu memberikan keamanan dan kenyamanan bagimobilitas orang dan barang.

sebanyak 26 unit yang terletak di dermaga/pelabuhan :

1. Dua (2) unit di Dermaga Semelur Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong
2. Dua (2) unit di Dermaga Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang
3. Satu (1) unit di Dermaga Kawal (Jembatan) Kecamatan Gunung Kijang

4. Dua (2) unit di Dermaga Kawal (Pantai) Kecamatan Gunung Kijang
5. Satu (1) unit di Dermaga Kp. Melayu Kecamatan Gunung Kijang
6. Dua (2) unit di Dermaga Dakomas Pulau Pucung Desa Mlang Rapat Kecamatan Gunung Kijang
7. Satu (1) unit di Dermaga Sei Enam Kecamatan Bintan Timur
8. Satu (1) unit di Dermaga Desa Batu Licin Kecamatan Bintan Timur
9. Satu (1) unit di Dermaga Desa Pulau Alang Kecamatan Mantang

5) **Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.62.200.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.62.095.050, atau 94,58%. *Outcome* dari program ini meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

Program ini difokuskan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap pelaku/ pemilik/pengusaha jasa telekomunikasi. dengan capaian target kegiatan 100%,

Capaian ini merupakan kontribusi dari hasil pelaksanaan kegiatan :

Kegiatan **Pengawasan dan Pengendalian Bidang Postel**, dengan alokasi anggaran Rp.62.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.62.095.050,- atau 99,83%. *Output* Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban, ketaatan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan tentang penyelenggaraan

pos telekomunikasi dan informatika serta pengendalian dan pengawasan tower telekomunikasi.

4.1.6. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Ketiga** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. **Persentase peliputan kegiatan strategis pemerintah daerah sudah mencapai 100%;**
2. **Web site milik pemerintah daerah;** hingga tahun 2016 Web Site milik pemerintah Kabupaten Bintan telah mencapai 30 buah, meningkat bila dibanding tahun sebelumnya yang tercatat hanya 22 buah.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- 1) **Program Peningaktan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Dan Keprotokolan**

Program ini dilaksanakan oleh **Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan** melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.5.282.648.827,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.055.979.444,- atau 95,71%. *Outcome* Meningkatnya Pelayanan Informasi Daerah Kabupaten Bintan

- a. **Pelaksanaan Kegiatan**

- (1) **Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Materi Komunikasi Dan Informasi**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.4.216.974.827,- dan realisasi sebesar Rp.4.013.192.192,- atau 95,17%. *Output* kegiatan ini adalah Tersedianya sarana informasi melalui Publikasi media masa cetak media masa elektronik.

- (2) **Pengembangan Dan Pemeliharaan Bintan Radio**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.737.274.000,- dan realisasi sebesar Rp.716.939.878,- atau

97,24%. *Output* kegiatan ini adalah Terwujudnya sarana informasi bagi masyarakat Kab. Bintan melalui Bintan Radio.

(3) **Pelayanan Pengembangan Dan Pemeliharaan Website**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.75.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.74.935.000,- atau 99,91%. *Output* kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan informasi melalui Website Pemerintah kabupaten Bintan

(4) **Pelaksanaan Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kab. Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.69.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.68.838.904,- atau 99,77%. *Output* kegiatan ini adalah Tersedianya informasi dan dokumentasi PPID

(5) **Sosialisasi Data Kemiskinan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.98.541.610,- atau 98,54%. *Output* kegiatan ini adalah terpublikasinya informasi data tentang kemiskinan

(6) **Sosialisasi Teknis Keprotokolan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.84.400.000,- dan realisasi sebesar Rp.83.531.860,- atau 98,97% *Output* kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan teknis keprotokolan

b. **Permasalahan dan Solusi**

1) **Permasalahan**

- a. Kelengkapan data dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
- b. Belum lengkapnya data dan informasi masing-masing bagian di Setda Bintan dalam melengkapi website di Kabupaten Bintan.

- c. Belum adanya Gedung /Tempat sendiri untuk Bintang Radio, listrik dan crew

2) **Solusi**

- a. Mengumpulkan data yang menyangkut Organisasi Perangkat Daerah kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi agar dapat diinformasikan kepada masyarakat yang memerlukannya.
- b. Perlu peningkatan informasi data pada website Pemerintah Kabupaten Bintan dengan mengembangkan website menjadi lebih besar sehingga data informasi yang ada di Kabupaten Bintan dapat tercover semua kedalam website Bintan.
- c. Mewujudkan sarana dan Prasarana yang permanen agar Bintang Radio dapat mandiri serta karyawan yang berpotensi dalam penyiaran dan tidak lagi bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bintan.

4.1.7. URUSAN PERTANAHAN

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Ketiga** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **urusan Pertanahan** adalah sebagai berikut :

1. **Penyelesaian izin lokasi 100 %.**
2. **Luas Lahan Milik Pemerintah Daerah 431 ha**
3. **Persentase Lahan Pemda yang tidak bersertipikat dengan bersertipikat 20%**
4. **Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan 100%**

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- 1) **Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

Program ini dilaksanakan oleh **Bagian Agraria Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan** melalui 5 (lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.2.749.100.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.790.142.360,- atau 28,74%. *Outcome* Terlaksananya Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan Pengguna dan Pemanfaatan lahan

a. **Pelaksanaan Program**

- (1) **Sertifikasi Asset Lahan Pemda dilaksanakan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.37.819.580,- atau 25,21%. *Output* Adanya jaminan kepastian hukum terhadap aset-aset tanah milik Pemerintah Kab. Bintan

- (2) **Rapat Dan Koordinasi Pertanahan Dalam Dan Luar Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.199.737.790 ,- atau 99,87%. *Output* Terjalinnya koordinasi antar SKPD se Kab.

Bintan maupun instansi vertikal mulai dari tingkat pusat hingga daerah terkait.

(3) **Mediasi Sengketa Pertanahan Warga Dan Pemerintah Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.233.206.780,- atau 93,28%. *Outputnya* Turunnya berkurangnya sengketa pertanahan warga dan Pemerintah

(4) **Lanjutan Pengembalian Jalan Lintas Barat Di Kec. Teluk Bintan Dan Seri Kuala Lobam**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.236.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.236.315.090,- atau 99,92%. *Output* Adanya kepastian batas-batas tanah milik pemerintah Ksab. bintan yang diperuntukkan untuk jalan lintas barat

(5) **Pengadaan Lahan Jalan Lintas Barat Lanjutan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.912.600.000,- dan realisasi sebesar Rp.83.063.120,- atau 4,34% tersedianya lahan/ tanah yang diperuntukkan untuk lanjutan pembangunan jalan lintas barat

b. **Permasalahan dan Solusi**

1) **Permasalahan**

- a. Proses pensertifikatan tanah telah dilakukan terhadap aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Bintan telah dilakukan ganti rugi, namun belum disertifikatkan
- b. Kasus penyelesaian sengketa tanah tahun 2016 dari 5 kasus baru dua kasus kasus yang terselesaikan, dan 3 kasus penyelesaian sengketa pertanahan masih dalam tahap proses penyelesaian.

2) **Solusi**

- a. Segera mengintensifkan tanah-tanah yang telah diganti rugi.
- b. Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Terkait sengketa tanah hendaknya mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ("Permen Agraria 11/2016").

4.1.8. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri mendukung pada **Misi Ketiga** terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan.

Pencapaian kinerja pada urusan ini dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) **Program Pembinaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan** melalui 2 (Dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.184.635.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.181.872.845,- atau 98,50%. Outcome dari program ini antara lain tercapainya pemahaman pencegahan peredaran narkoba/penggunaan minuman keras kepada siswa SLTA dan tercapainya kerukunan antar pemuka masyarakat, suku dan etnis di Kabupaten Bintan Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.170.000,- dan realisasi sebesar Rp.80.170.000 atau 99,69%. *Output* dari kegiatan ini adalah Dalam sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang telah dilaksanakan di Kecamatan Toapaya dan Kecamatan Gunung Kijang yang diikuti oleh 100 orang pelajar SLTA agar pelajar sadar akan bahaya penggunaan narkotika. Pada Tahun 2015 telah diberikan penyuluhan sebanyak 150 orang pelajar.

(2) **Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK),**
Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.465.000,- dan realisasi sebesar Rp.100.958.370 atau

97,58%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi forum pembauran kebangsaan, sedangkan hasil kegiatan adalah terbentuknya rapat forum pembauran kebangsaan. Rapat dilakukan sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta sebanyak 44 orang yang terdiri dari pemuka adat, suku dan etnis, yang selanjutnya diharapkan tercapainya kerukunan antar pemuka masyarakat, suku dan etnis di Kabupaten Bintan.

2) **Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan** melalui 6 (Enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.744.090.580,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.695.189.161,- atau 93,40%. Outcome dari program ini antara lain terpantaunya kegiatan orang asing di daerah serta kegiatan pemantauan dalam daerah dan terwujudnya pemberian bantuan kepada partai politik di Kabupaten Bintan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan orang Asing, NGO dan Lembaga Masyarakat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.88.420.400,- dan realisasi sebesar Rp.81.249.330 atau 91,89%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terjalinnya koordinasi kerjasama lintas sektoral, sedangkan hasil kegiatan adalah terpantaunya kegiatan orang asing di daerah. Rapat-rapat Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing (NGO) sebanyak 2 kali sehingga terwujudnya koordinasi lintas sektoral yang melibatkan instansi vertikal lainnya seperti Imigrasi, TNI, POLRI, Kejaksaan dan dinas terkait lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, lembaga

asing, NGO yang melakukan penelitian maupun bekerjasama dengan organisasi lokal/perorangan di wilayah Kabupaten Bintan. Adapun hasil dari kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Informasi mengenai kunjungan dan aktivitas orang asing di daerah.
2. Notulen rapat, nota dinas dan rekomendasi kepada Bupati Bintan.
3. Laporan situasi harian dan perkembangan aktivitas kegiatan orang asing di daerah.

(2) Rapat Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.242.744.900,- dan realisasi sebesar Rp.240.656.310 atau 99,14%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi Tim Kominda Kabupaten bintan sebanyak 4 kali, serta kegiatan pemantauan dalam daerah, sedangkan hasil kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan intelijen secara terpadu dan temu tim kominda di daerah Kabupaten Bintan. Tim Kominda terdiri dari Bupati Bintan, unsur intelijen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Bakesbangpol, BINDA, TNI, Kejari, Imigrasi, Bea Cukai, Pajak, dan Perbankan di Kabupaten Bintan. Adapun hasil dari kegiatan yang dilaksanakan yaitu : (1) Informasi mengenai situasi keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat;(2) Notulen rapat, nota dinas dan rekomendasi kepada Bupati Bintan.(3) Laporan situasi Harian IPOLEKSOSBUD POLHUKAMTIBMAS.

(3) Pelaksanaan Monitoring/Pendataan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.122.369.200,- dan realisasi sebesar Rp.108.016.331,- atau

88,27%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya validasi organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bintan, sedangkan hasil kegiatan adalah tercapainya jumlah organisasi kemasyarakatan yang valid di Kabupaten Bintan.

ORMAS/LSM

Jumlah Ormas/LSM yang legal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan sampai dengan 31 Desember 2016 adalah 69 buah LSM.

(4) Penghargaan Terhadap Pejuang Veteran Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.87.800.000,- dan realisasi sebesar Rp.81.265.000 atau 92,56%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan PVRI Kabupaten Bintan Tahun 2016. Hasil kegiatan ini adalah terfasilitasinya kegiatan PVRI Kabupaten Bintan Tahun 2016. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Bintan dalam bentuk uang santunan dengan harapan dapat meringankan beban hidup atau kebutuhan hidup para veteran yang berjumlah 24 orang. Terdiri dari 10 (sepuluh) orang veteran dan 14 (empat belas) orang janda veteran yang ditinggalkan karena veteran meninggal dunia. Penghargaan bantuan ini diberikan pada momen acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan Hari Pahlawan tanggal 10 November.

(5) Verifikasi dan Seleksi Administrasi Partai Politik

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.549.620,- dan realisasi sebesar Rp.75.538.030 atau 99,98%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya verifikasi dan seleksi administrasi bantuan keuangan partai politik, sedangkan hasil kegiatan adalah terwujudnya pemberian bantuan kepada partai politik di Kabupaten Bintan. Pemberian

bantuan keuangan kepada kepada 8 (Delapan) Partai Politik (Parpol) yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Bintan. Tujuan dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ini adalah sebagai sarana pembinaan politik dari Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik. Parpol yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, adalah :

Tabel 4.14 : Daftar Partai dan Jumlah Kursi di DPRD Kabupaten Bintan Periode 2016 – 2019

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi
1.	Partai Golongan Karya	6 (Enam)
2.	Partai Demokrat	6 (Enam)
3.	Partai Keadilan Sejahtera	3 (Tiga)
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 (Tiga)
5.	Partai Amanat Nasional	3 (Tiga)
6.	Partai Hati Nurani Rakyat	2 (Dua)
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1 (Satu)
8.	Partai Nasdem	1 (Satu)
Jumlah Kursi		25 (Dua Puluh Lima)

Sumber : Badan Kesbangpol Kab Bintan Tahun 2017

(6) **Rapat Koordinasi Tim Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127.206.460,- dan realisasi sebesar Rp.127.136.460 atau 99,94%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi dan temu tim satgas di daerah Kabupaten Bintan,

sedangkan hasil kegiatan adalah terbentuknya tim satgas penyelesaian konflik sosial di daerah Kabupaten Bintan. Kegiatan Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Kabupaten Bintan dilakukan dengan menggunakan metode rapat dan koordinasi sebanyak 25 orang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program **Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik**. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

3) **Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan** melalui 2 (Dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.156.756.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.145.931.116,- atau 93,09%. Outcome dari program ini antara lain kewaspadaan dini masyarakat guna menjaga kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. **Permasalahan dan Solusi**

(1) **Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.076.800,- dan realisasi sebesar Rp.89.023.950 atau 99,94%. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala

Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Antar Umta Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Dengan demikian untuk mengimplementasikan PBM dimaksud Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan melaksanakan kegiatan Pembentukan dan Pengukuhan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bintan Tahun 2016. Keluaran dari kegiatan adalah terlaksananya pembentukan dan pengukuhan forum kerukunan umat beragama (FKUB) Kabupaten Bintan. Dengan hasil terbentuknya forum kerukunan umat beragama dari utusan masing-masing agama yaitu Agama Islam, Agama Protestan, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Budha dan Agama Kong Hu Cu di wilayah Kabupaten Bintan.

Berikut adalah jumlah rumah ibadah yang terdapat di Kabupaten Bintan :

Tabel 4.15 : Daftar penyebaran Rumah Ibadah di Kabupaten Bintan

1	Mesjid	167	Buah
2	Mushalla	175	Buah
3	Gereja	16	Buah
4	Gereja Katedral	11	Buah
5	Pura	1	Buah
6	Vihara	6	Buah
7	Cetiya	12	Buah
8	Klenteng	12	Buah

Sumber : Badan Kesbangpol Kab Bintan Tahun 2017

(2) **Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.680.000,- dan realisasi sebesar Rp.56.907.166 atau 84,08%. Keluaran dan Hasil dari kegiatan ini adalah

Terlaksananya Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan. Tujuan kegiatan dimaksud kewaspadaan dini masyarakat guna menjaga kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2016 diikuti oleh 60 (Enam puluh) orang peserta dari Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Bintan yaitu :

a) Kecamatan Bintan Utara	: 6 Orang
b) Kecamatan Seri Kuala Lobam	: 6 Orang
c) Kecamatan Teluk Sebong	: 8 Orang
d) Kecamatan Teluk Bintan	: 7 Orang
e) Kecamatan Toapaya	: 5 Orang
f) Kecamatan Gunung Kijang	: 5 Orang
g) Kecamatan Bintan Timur	: 5 Orang
h) Kecamatan Bintan Pesisir	: 5 Orang
i) Kecamatan Mantang	: 5 Orang
j) <u>Kecamatan Tambelan</u>	<u>: 8 Orang</u>
Jumlah	60 Orang

b. Permasalahan dan Solusi

Belum terbentuknya FKDM di Kecamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2017 kegiatan Pembentukan FKDM tingkat kecamatan tidak tersedia. Solusi yang perlu dilakukan untuk Tahun 2017 diharapkan dibentuk FKDM Kecamatan dan dapat dianggarkan pada rencana kerja perubahan kegiatan Badan Kesbangpol Kab. Bintan Tahun 2017.

4.1.9. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu, Kedua, Ketiga dan Kelima** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian adalah sebagai berikut :

1. **Jumlah BUMD yang beroperasi 2 BUMD**
2. **Jumlah sarana dan prasarana di wilayah perbatasan 2 Unit**
3. **Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti pendidikan kedinasan 73 %**
4. **Persentase penempatan Aparatur sesuai kompetensi 99 %**
5. **Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD); untuk tahun 2015 Kabupaten Bintan mendapat peringkat 10 Besar; sedangkan untuk tahun 2016 sedang dalam proses administrasi dan kelengkapan data LPPD. Diharapkan peringkat tahun 2016 meningkat sesuai target.**
6. **Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa yang sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2015 36 (Badan Penilaian Desa) BPD**
7. **Persentase rekomendasi temuan eksternal (BPK) yang ditindak lanjuti 77,89 %**
8. **Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori CC 10 SKPD**
9. **Persentase SKPD yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan 77,15%**
10. **Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP 20 %**
11. **Persentase OPD yang memiliki capaian kinerja baik 80 %**
12. **Persentase Indikator yang telah mencapai SPM 98 %**
13. **Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan 60,10 (B)**

14. **Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan 96 %**
15. **Presentasse Nilai turun harga yang menyebabkan inflasi 3,35 %**
16. **Kontribusi BUMD terhadap PAD 4,45 M**
17. **Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan Sumber Pendanaan DAK dan APBN 86,72%**
18. **Web site milik pemerintah daerah 30 Situs**
19. **Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 97,22%**
20. **Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa) yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui computer 83,33%**
21. **Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar WTP**
22. **Persentase Keakuratan Data Neraca Asset 70%**
23. **Target Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah 986 Milyar/184 Milyar**
24. **Persentase Desa yang menyampai kan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku 84 %**
25. **Tingkat kepuasan Masyarakat representatif Kecamatan dan Kelurahan 99%**
26. **Cakupan Penegakan Perda dan Perkada 90,63 %**
27. **Rasio Petugas Linmas 95,89 %**
28. **Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pendidikan pengetahuan keagamaan 2.342 Orang**

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

4.1.9.1. OTONOMI DAERAH

1. Kecamatan Bintan Timur

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan diwilayah kecamatan. *Outcome* program ini adalah

Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah **Fasilitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan** dengan alokasi anggaran Rp.52.364.300,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.52.209.950,00,- atau 99,71%. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/kelurahan/ kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dengan dihadiri peserta yang terdiri dari perangkat kelurahan, kecamatan masyarakat dan pemuda.

2) **Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan**

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan serta penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.158.748.300 realisasi sebesar Rp.1.029.662387 atau 88,86% dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.113.914.300,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.113.109.030,00,- atau 99,29%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan dan pembinaan masyarakat khususnya keterlibat pada kegiatan bhakti sosial gotong royong berkat ketekunan dan kerja keras tahun 2016 ini Pemerintah Kecamatan Bintan Timur kembali mendapatkan penghargaan piala ADIPURA BUANA presiden republik indonesia

(2) **Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Tk. Kecamatan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.276.548.300,00,- dan realisasi anggaran sebesar

Rp.156.451.695,00,- atau 56,57%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan qori dan qoriah sebanyak 11 orang; pembinaan Lasqi sebanyak 2 Kelompok dan Majelis Taklim sebanyak 42 kelompok se-Kecamatan Bintan Timur.

(3) Pembinaan Olah Raga dan Seni di Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Timur dengan alokasi anggaran Rp.89.921.400,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.89.558.550,00,- 99,60%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan Sanggar Seni sebanyak 9 kelompok dan 35 orang atlet sepak bola, volley ball, futsall dengan se-Kecamatan Bintan Timur.

(4) Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita

Kegiatan ini Pedesaan/Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Timur dengan alokasi anggaran Rp.38.364.300,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.38.304.450,00 atau 99,84%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan kepada kelompok Dasawisma untuk mendukung peranan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berperspektif gender di Kecamatan Bintan Timur

(5) Peningkatankapasitas Kelurahan Sei Enam

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.157.368.717,- atau 98,36%. *output* dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Sei Enam melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Sei Enam.

(6) Peningkatan kapasitas Kelurahan Sei Lekop,

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.156.691.875,- atau 97,93%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Sei Lekop melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Sei Lekop.

(7) Peningkatan kapasitas Kelurahan Kijang Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.159.376.125,- atau 99,61%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Kijang Kota melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Kijang Kota.

(8) Peningkatan kapasitas Kelurahan Gunung Lengkuas

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.158.801.945,- atau 99,25%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Gunung Lengkuas melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Lengkuas.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

1. Partisipatif dan antusiasme masyarakat dan organisasi kepemudaan dalam kegiatan pelatihan dan gotong royong.
2. Terdapat dua Jenis Belanja yang tidak bisa di laksanakan karena regulasi/ peraturan Menteri Dalam Negeri, sehingga belum optimalnya penyerapan anggaran Kegiatan Keagamaan.
3. Belum optimalnya pembibitan atlet,; sikap sportivitas, disiplin dan semangat juang atlet masih belum memadai; Belum optimalnya pemasyarakatan dan prestasi olahraga; Atlet yang dibina sudah tidak aktif dan atau telah berpindah domisili, bersekolah atau bekerja ke daerah lain.
4. Belum optimalnya dukungan [support] dari pemerintah untuk kelompok dasawisma dan PKK berprestasi.

2) Solusi

1. Berkoordinasi dengan berbagai stakeholder yang meliputi pemerintah, masyarakat, organisasi kepemudaan dalam hal

- partisipasi aktif, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan.
2. Mekanisme perencanaan dan aturan hukum, serta penguatan kelompok keagamaan yang aktif, serta mengoptimalkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama.
 3. Pengelolaan atlet yang berkelanjutan dan berkesinambungan, pencarian atlet olahraga berbakat secara sistemik, melakukan pembinaan atlet-atlet berbakat dan klub olahraga berprestasi, mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia dengan even turnamen.
 4. Meningkatkan pengetahuan kelompok dengan pendidikan dan pelatihan rekonstruksi karya cipta menu.

2. Kecamatan Mantang

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan di wilayah kecamatan. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah **Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.34.352.260,- atau 98,15%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/ kelurahan/ kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dengan peserta yang terdiri dari perangkat kelurahan, kecamatan masyarakat dan pemuda.

2) Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan serta penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Outcome* program ini

adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.512.677.000,- realisasi sebesar Rp.366.262.750,- atau 46,69% dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pembinaan Kemasyarakatan di Kecamatan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp.69.554.000,- Adapun anggaran yang terealisasi sebesar Rp.66.878.500,- atau 96,15%. *Output* dari kegiatan ini adalah terbinanya kegiatan masyarakat di Kecamatan.

(2) **Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp.80.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.79.418.200,- atau 99,27%. *Output* dari kegiatan ini adalah terbinanya Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan.

(3) **Pembinaan Keagamaan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.262.973.000,- dan realisasi sebesar Rp.124.186.350,- atau 98,78%. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui Peningkatan Kegiatan Keagamaan yaitu Pelaksanaan STQ di tingkat Kecamatan dan Pengiriman Peserta MTQ serta Pembinaan Kegiatan Keagamaan bagi masyarakat Kecamatan Mantang.

(4) **Pembinaan Olahraga dan Seni**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.97.150.000,- dan realisasi sebesar Rp.95.779.700,- atau 98,59%. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya pembinaan dan prestasi dibidang olahraga dan seni di Kecamatan antara lain pembinaan beberapa cabang olahraga seperti Sepak Bola, Futsal dan Turnamen Volly; menyertai kegiatan seni seperti Mak Yong

dan kegiatan pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan seperti Bintan Mountain Trekking, festival dugong dan Bintan Fishing Festival

b. **Permasalahan dan Solusi**

Dalam operasional Kantor Kecamatan masih menggunakan genset sehingga arus listrik tidak stabil mempengaruhi sarana prasarana elektronik di kantor Penggunaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk meminimalisir kerusakan.

3. **Kecamatan Teluk Bintan**

1) **Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan**

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan di wilayah kecamatan. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah **Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan** dengan alokasi anggaran Rp.30.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.27.851.300,- atau 92,84%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/kelurahan/ kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dengan dihadiri peserta yang berasal dari perangkat kelurahan, kecamatan masyarakat dan pemuda

2) **Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan**

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan serta penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan dengan total

anggaran sebesar Rp.439.500.000 realisasi sebesar Rp.406.060.154 atau 92,39% dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.40.000.000,- Adapun anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp.35.398.700,- atau sekitar 88,50%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat dengan sasaran adalah PKK Se Kecamatan Teluk Bintan. Kegiatan lainnya yang diikuti oleh PKK Kecamatan Teluk Bintan adalah ikut serta dalam kegiatan PKK yang dikoordinir oleh PKK Kabupaten Bintan.

(2) **Pembinaan Keagamaan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.89.000.000,- dan yang terealisasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp.81.656.545 atau sekitar 91,75%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan peningkatan pengetahuan keagamaan di Kecamatan, seperti STQ tingkat kecamatan, majelis taklim yang dibina dan LASQI.

(3) **Pembinaan Olahraga dan Seni**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000 dan realisasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut yang terserap sebesar Rp.18.341.555 atau sekitar 91,71%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya berbagai kegiatan seperti antara lain Pembinaan atlit Olahraga dan pegiat Seni di Kecamatan.

(4) **Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.120.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp.119.102.804,-

atau sekitar 99,25%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat seperti siskamling, karang taruna, dan kepemudaan

(5) **Peningkatan kapasitas Kelurahan Tembeling Tanjung**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.170.500.000 dan yang terealisasi Rp.151.560.550 atau sekitar 88,89%. *Output* dari kegiatan ini adalah untuk terlaksananya pembinaan kelurahan dan masyarakat di kelurahan Tembeling Tanjung.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di kecamatan antara lain keterbatasan sarana maupun prasarana penunjang kegiatan seperti sarana dan prasarana olahraga; sanggar seni; ketersediaan tenaga pembimbing agama/majelis taklim; tenaga pelatih yang profesional memandang begitu tingginya tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti berbagai aktifitas tersebut diatas. Solusinya adalah pemerintah daerah agar memperhatikan usulan pembangunan dari kecamatan khususnya terkait sarana dan prasarana kegiatan masyarakat.

4. **Kecamatan Toapaya**

1) **Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan**

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan di wilayah kecamatan. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah **Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan** dengan alokasi anggaran Rp.28.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.27.948.800,- atau 99,82%. *Output* dari kegiatan ini adalah

Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/ kelurahan/ kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dengan dihadiri peserta yang terdiri dari perangkat kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat dan pemuda.

2) Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan serta penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.431.204.000,- realisasi sebesar Rp.430.075.800,- atau 99,82% dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.56.474.000,- dan terealisasi sebesar Rp.56.317.700,- atau 99,72%. *Output* dari kegiatan adalah terlaksananya pembinaan kegiatan kemasyarakatan. Salah satu kegiatan pembinaan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kecamatan Toapaya yaitu seperti wisuda TPQ yang dilaksanakan pada Tanggal 3 juni 2016. Selain itu juga dapat dilihat dari acara silaturahmi antara pegawai dan staf Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Masyarakat Toapaya yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kecamatan Taopaya pada Tanggal 6 Agustus 2016.

(2) Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.39.941.600,- atau 99,85%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan PKK seperti mengikuti kegiatan Jambore PKK tingkat Kabupaten di Pantai Trikora Kecamatan Gunung Kijang pada Tanggal 11 April

2016 dengan posisi sebagai juara umum. Mengikuti Cerdas Cermat PKK tingkat Kabupaten dan aktifnya ibu-ibu PKK Kecamatan Toapaya dalam Rapat Bulanan yang diadakan di Kantor Camat Toapaya setiap bulannya.

(3) Kegiatan Pembinaan Keagamaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.113.150.000,- dan realisasi sebesar Rp.113.084.300,- atau 99,94%. *Output* dari kegiatan ini adalah Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain; Kegiatan STQ Tingkat Kabupaten Bintan 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 26 Maret 2016 bertempat di Kijang Kecamatan Bintan Timur. Kegiatan Santri TPQ tanggal 3 Juni 2016 di Masjid Besar Alfalah Kecamatan Toapaya. Munakahad anak-anak TPQ Kecamatan Toapaya yang diadakan di Aula Kantor Camat Toapaya selama 2 hari 14 s/d 15 Maret 2016

(4) Kegiatan Pembinaan Olahraga dan Seni

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.61.580.000,- dan realisasi sebesar Rp.61.226.000,- atau 99,43%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya berbagai kegiatan seperti antara lain : (1) Kegiatan Festival Tari Tingkat Kabupaten Bintan yang dilaksanakan tanggal 7 s/d 9 April 2016 bertempat di Lapangan Relif Antam Kijang Kecamatan Bintan Timur. (2) Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat Kabupaten Bintan yang dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 18 Mei 2016.

(5) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Toapaya Asri,

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.160.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.159.506.200,- atau 99,69%. *Output* dari kegiatan ini adalah

Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Toapaya Asri melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Toapaya Asri.

b. **Permasalahan dan Solusi**

1) **Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran yang dimiliki dalam melaksanakan setiap Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Toapaya.

2) **Solusi**

Penyesuaian anggaran dalam menunjang sarana dan prasarana kantor Camat Toapaya serta Program dan kegiatan Pembinaan Masyarakat kecamatan.

5. **Kecamatan Bintang Pesisir**

1) **Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan**

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan di wilayah kecamatan. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah **Fasilitasi Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan/ kecamatan** dengan alokasi anggaran Rp.35.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.34.192.300,- atau 97,69%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/ kelurahan/ kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dengan dihadiri peserta yang terdiri dari perangkat kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat dan pemuda.

2) **Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan**

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan serta penataan

hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.493.836.400,- realisasi sebesar Rp.438.161.775,- atau 88,73% dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.541.073,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.78.595.625,- atau 98,81%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan RT/RW se-Kecamatan Bintang Pesisir kepada 64 orang.

(2) Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Tk.Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.230.880.770,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.180.175.300,- atau 78,04%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan qori dan qoriah se- Kecamatan Bintang Pesisir sebanyak 70 orang.

(3) Pembinaan Olah Raga dan Seni di Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78,414,557,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.77.680.550,- 99,87%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan Sanggar Seni, LASQI dan Tim Olah Raga kepada 1 sanggar/ 1 tim LASQI/1 Tim Olah Raga.

(4) Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.105.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.101.710.300 atau 96,87 %. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan Kelompok PKK, Posyandu dan organisasi wanita lainnya selama 1 tahun dengan jumlah 50 orang

b. Permasalahan Dan Solusi

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bintan Pesisir terutama menyangkut tugas, pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, terdapat beberapa permasalahan umum yang tidak jauh berbeda sebagaimana tahun sebelumnya, antara lain jumlah personil (staf) yang ada di Kecamatan sangat minim sehingga beberapa tugas dan pekerjaan dibebankan/ dikerjakan oleh satu orang, keterbatasan ketersediaan transportasi yang ada di Desa maupun Kecamatan ditambah dengan adanya pergantian musim angin kencang dan cuaca ekstrem lainnya sehingga cukup menyulitkan bagi pihak kecamatan dalam mewujudkan pemerataan pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat, terkendalanya beberapa perencanaan pembangunan untuk diwujudkan yang terkadang diakibatkan oleh pola pikir sebagian masyarakat yang kontra terhadap perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya pembangunan secara maksimal, tingkat partisipasi atau keikutsertaan masyarakat juga masih cukup rendah dan selalunya hanya orang - orang itu saja yang turut serta sehingga terkesan masyarakat lain yang ada acuh tak acuh pada perkembangan wilayahnya sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berikut kami sampaikan beberapa solusi yang mungkin dapat diterapkan, yakni perlu adanya alokasi penambahan jumlah pegawai (staf) berkualitas yang ditempatkan di Kecamatan Bintan Pesisir sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal. Memancing minat masyarakat untuk lebih partisipatif terhadap pengusaha pengembangan wilayahnya salah satunya dengan mengikut sertakan masyarakat terutama orang-orang baru dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah terutama Kecamatan.

6. Kecamatan Bintang Utara

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan di wilayah kecamatan. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah **Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan** dengan alokasi anggaran Rp.28.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.27.849.300,- atau 99,46%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/ kelurahan/ kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dengan dihadiri peserta yang terdiri dari perangkat kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat dan pemuda.

2) Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan serta penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.491.037.000,- realisasi sebesar Rp.1.250.910.850,- atau 83,90% dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.173.305.000 dengan realisasi Rp.100.285.000 atau 57,87%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan yang terdiri dari kegiatan kepemudaan, Pramuka dan Karang Taruna.

(2) Pembinaan Kegiatan Keagamaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.541.952.000,- dengan realisasi Rp.390.681.800,- atau 72,09%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya qori dan qoriah dari Kecamatan Bintan Utara melalui kegiatan STQ Tingkat Kecamatan, pembinaan kemasyarakatan dalam bidang keagamaan, dan pembinaan LASQI.

(3) Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.780.000,- dengan realisasi Rp.80.220.000,- atau 99,31%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Olahraga dan seni di masyarakat melalui pembinaan dalam bidang olahraga dan seni. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan sportifitas para atlet agar mampu bersaing dalam setiap event perlombaan yang diselenggarakan serta memelihara kelestarian budaya daerah lokal dan meningkatkan gairah masyarakat untuk memajukan kesenian budaya Melayu.

(4) Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.000.000,- dengan realisasi Rp.54.650.000,- atau 99,36%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberdayaan dan pembinaan organisasi wanita di Kecamatan Bintan Utara melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK dan Organisasi Wanita dalam rangka mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri.

(5) Peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Selatan,

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.000.000,- dengan realisasi Rp.155.850.853,- atau 97,41%. *Output* dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Selatan melalui peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Selatan.

(6) **Peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Utara,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.000.000,- dengan realisasi Rp.156.020.257,- atau 97,51%. *Output* dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Utara melalui peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Utara.

(7) **Peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Timur,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.155.731.950,- atau 99,02%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Timur melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Tanjung Uban Timur.

(8) **Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.000.000,- dengan realisasi Rp.157.470.990 atau 98,42%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya kapasitas Kelurahan Tanjung Uban melalui peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban.

7. **Kecamatan Teluk Sebong**

1) **Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan**

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan di wilayah kecamatan. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah **Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan** dengan alokasi anggaran Rp.32.550.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.32.428.750,- atau 99,63%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/

kelurahan/ kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dengan dihadiri peserta yang terdiri dari perangkat kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat dan pemuda.

2) Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan serta penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.399.986.200,- realisasi sebesar Rp.374.396.690,- atau 93,60% dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.000.000,- Adapun anggaran yang terealisasi sebesar Rp.48.672.300,- atau 99,33%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan yang terdiri dari kegiatan gotong royong, kepemudaan, Pramuka dan Karang Taruna.

(2) Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.39.821.800,- atau 99,55%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan.

(3) Pembinaan Keagamaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.105.986.200,- dan realisasi sebesar Rp.97.384.450,- atau 91,88%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan keagamaan melalui Kegiatan Peningkatan Keagamaan merupakan 2 (dua) kegiatan yang terangkum dalam satu kegiatan, yaitu Pelaksanaan MTQ di tingkat Kecamatan dan Pengiriman Peserta MTQ serta

Pembinaan Kegiatan Keagamaan bagi masyarakat Kecamatan Teluk Sebong, Memperingati hari-hari besar Agama Islam, Pengiriman peserta dari masyarakat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang keagamaan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bintan maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya : Pembinaan Guru-guru Ngaji, Imam dan pengurus Masjid, Pelatihan Fardhu Kifayah, dll.

(4) Pembinaan Olahraga dan Seni di Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.44.551.200,-. Atau 99%. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya pembinaan dan prestasi dibidang olahraga dan seni di Kecamatan antara lain kegiatan mengirimkan satu tim mengikuti Pertandingan Bupati Cup yang berada di Tanjung Uban.

(5) Peningkatan Kapasitas Kelurahan Kota Baru

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.143.967.940,- atau 89,98%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Kelurahan Kota Baru melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Kota Baru.

8. Kecamatan Gunung Kijang

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan diwilayah kecamatan. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah **Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan** dengan alokasi anggaran Rp.30.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.29.693.300,- atau 98.98%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/kelurahan/ kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dengan dihadiri peserta

yang terdiri dari perangkat kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat dan pemuda.

2) Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan serta penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.864.761.400,- realisasi sebesar Rp.852.206.620,- atau 98.70% dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.163.193.000,- dan realisasi sebesar Rp.159.596.300,- atau 97.80%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan Gunung Kijang.

(2) Kegiatan Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Gunung Kijang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.361.568.400,-. Dan realisasi sebesar Rp.357.212.300,- atau 98.80%. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pelaksanaan keagamaan pada masyarakat di Kecamatan melalui pembinaan qori dan qorih dalam penyelenggaraan STQ, PHBI, LASQI, keagamaan lainnya di Kecamatan Gunung Kijang.

(3) Kegiatan Pembinaan Olahraga dan Seni

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.118.768.300,- atau 98.97%. *Output* dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pembinaan kemasyarakatan dalam bidang olah raga dan seni di Kecamatan

Gunung Kijang sehingga meningkatkan prestasi atlet olahraga dan pelaku seni di Kecamatan Gunung Kijang.

(4) **Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.59.256.300,- atau 98.76%. *Output* dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kegiatan PKK, organisasi kewanitaan dan remaja di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan sehingga meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan organisasi-organisasi wanita yang ada di kecamatan.

(5) **Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Gunung Lengkuas**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.157.373.420,- atau 98.36%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Gunung Lengkuas melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Lengkuas

b. **Permasalahan Dan Solusi**

Belum terealisasinya seluruh usulan yang terangkum dalam musyawarah perencanaan pembangunan tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah solusinya adalah diusulkan kembali pada tahun yang akan datang, baik melalui anggaran rutin pemerintah daerah maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya.

9. **Kecamatan Seri Kuala Lobam**

1) **Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan**

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan di wilayah kecamatan. ***Outcome*** program ini adalah

Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah **Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan** dengan alokasi anggaran Rp.30.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.29.758.630,- atau 99.20%. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/kelurahan/kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dengan dihadiri peserta yang terdiri dari perangkat kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat dan pemuda.

2) **Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan**

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan serta penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.732.500.000,- realisasi sebesar Rp.528.951.980,- atau 72,21% dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.182.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.53.404.800,- atau 29,26% Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan terhadap masyarakat dalam bentuk pelaksanaan kegiatan memeriahkan HUT RI Ke 70; Fasilitasi kegiatan Sosialisasi KBS; Fasilitasi pendistribusian Sembako Murah; Fasilitasi penyerahan Dana RT/RW dan LPM Tahun 2016; Fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan, kepramukaan dll Sehingga terciptanya hubungan Pemerintah dengan masyarakatnya sehingga pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam.

(2) Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Tk. Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.93.828.900,- atau 62,55% Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan qori dan qoriah se- Seri Kuala Lobam melalui kegiatan:

- a) Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke V Tingkat Kecamatan Seri Kuala Lobam Tahun 2016 diselenggarakan pada tanggal 16 sd 18 Maret 2016 di Aula Kantor Camat Seri Kuala Lobam dengan peserta utusan dari Desa/Kelurahan :
- b) Mengadakan kegiatan peringatan hari-hari besar Keagamaan di tingkat Kecamatan (Maulud Nabi Besar Muhammad SAW, Isra Mi'raj dll);
- c) Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Bagi Guru TKQ/TPQ yang dilaksanakan oleh Badko Kecamatan;
- d) Mengadakan kegiatan safari ramadhan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan serta fasilitasi kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Bintan; dan
- e) Pembinaan kepada Kelompok Majelis Taklim dan Kelompok Kesenian Qasidah/Kompang yang ada di Kecamatan.

(3) Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.48.891.200,- 97,78%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam upaya pembinaan masyarakat kecamatan dilaksanakan dalam bentuk pertandingan olahraga dan seni diadakan untuk memeriahkan HUT RI ke 71 Tahun 2016; Fasilitasi Kegiatan Festival Tari Tingkat Kabupaten Bintan yang dilaksanakan di Kecamatan Bintan Timur dengan mengirim 1 sanggar seni;

(4) Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.29.498.300,- atau 98,33%. Hasil dari kegiatan ini adalah terbinanya Organisasi Wanita Pedesaan/ Kelurahan melalui Pelaksanaan Lomba Dasa Wisma TP-PKK Kecamatan Seri Kuala Lobam yang dilaksanakan pada diikuti oleh 4 Kelompok Dasa Wisma; Pembinaan dan pemberdayaan organisasi wanita yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014 (pertemuan rutin PKK, Dharma Wanita, kunjungan ke Posyandu, Dasa Wisma, KUBE, Kebun PKK Desa/Kelurahan, Lansia, Kegiatan KB, UP2K, UP2WKSS, Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1435H dll); Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi wanita tingkat Kabupaten Bintan (UP2K, UP2WKSS, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia) dll; Mengikuti Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Tingkat;

(5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelurahan Tanjung Permai,

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.155.672.337,- atau 97,30%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Sei Lekop melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Tanjung Permai.

(6) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Teluk Lobam,

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Seri Kuala Lobam dengan alokasi anggaran Rp.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.147.656.443,- atau 92,29%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Sei Lekop melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Teluk Lobam.

b. **Permasalahan dan Solusi**

1) **Permasalahan**

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal khususnya dalam hal Perencanaan Program dan Keuangan yaitu sarjana khusus Perencanaan dan Sarjana Akuntansi;
- b. Kurangnya pemahaman dan komitmen SKPD terhadap sasaran strategis dan perjanjian kinerja sehingga capaian kinerja khususnya kegiatan tidak sesuai dengan DPA;

2) **Solusi**

- a. Disetujuinya Usulan SKPD khususnya untuk memenuhi dan melengkapi Sarana dan Prasarana yang baik dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- b. Terdapatnya anggaran khusus di SKPD terutama dalam memenuhi pengajuan kegiatan dari kelompok-kelompok masyarakat;
- c. Pihak pelaksana pekerjaan pembangunan (Kontraktor) di Desa/Kelurahan melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah daerah dalam pelaksanaan pekerjaan, melapor terlebih dahulu baru melaksanakan pekerjaan;
- d. Desa/Kelurahan melakukan komunikasi, melapor kepada kepala wilayah (Kecamatan) perihal pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Desa dan kelurahannya agar kegiatan dapat diawasi dan dimonitoring sehingga pembangunan yang dilaksanakan bermanfaat bagi masyarakat;
- e. Camat beserta jajaran pemerintahan desa melakukan pengawasan secara intensive terhadap masyarakat penerima bantuan RTLH agar pelaksanaan pembangunannya segera diselesaikan dan dapat dirasakan manfaatnya;
- f. Camat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terkait

penyetoran dana raskin dari Desa/Kelurahan ke Bulog sehingga pendistribusian selanjutnya berjalan dengan maksimal.

10. Kecamatan Tambelan

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan diwilayah kecamatan. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah **Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan** dengan alokasi anggaran Rp.**45.000.000,-** dan realisasi anggaran sebesar Rp.**44.253.000,-** atau **98,34%**. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/ kelurahan/ kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dengan dihadiri peserta yang terdiri dari perangkat kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat dan pemuda.

2) Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan serta penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.519.815.000,- realisasi sebesar Rp.467.663.281,- atau 89,97% dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. **Permasalahan Dan Solusi**

(1) **Peningkatan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.45.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.44.326.000,- atau 98,50%. Secara umum, hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui Kegiatan Upacara Hari Besar Nasional salah satunya seperti upacara memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 dimana kegiatan tersebut dipusatkan di Lapangan Bola Kaki Kecamatan Tambelan Desa Batu Lepuk. Selain itu juga dilaksanakannya lomba gerak jalan memperingati HUT Kemerdekaan RI dan Lomba rakyat seperti lomba Sampan Kayuh dan perlombaan Tarik Tambang.

(2) **Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/ Kelurahan**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelan dengan alokasi anggaran Rp.60.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.58.986.000,- atau 98,31%. Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan ini merupakan capaian untuk meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan :

- a. Mengikuti Jambore PKK tingkat Kabupaten
- b. Melaksanakan Lomba Masak se-Kecamatan Tambelan
- c. Mengikuti Lomba Masak Gemar Ikan tingkat Kabupaten
- d. Mengikuti Lomba Masak B2SA tingkat Kabupaten
- e. Mengikuti Bazar Kabupaten Bintan
- f. Melaksanakan Kegiatan peningkatan keterampilan Fardu Kifayah
- g. Melaksanakan Kegiatan peningkatan keterampilan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah berkerjasama dengan

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Bintan.

- h. Disamping kegiatan tersebut PKK kecamatan mempunyai kegiatan rutin diantaranya ;
- i. Pembinaan Majelistaklim Desa/Kelurahan.
- j. Pembinaan Dasawisma Desa/Kelurahan.
- k. Kunjungan ke Posyandu Desa/Kelurahan.
- l. Pemantapan Toga Desa/Kelurahan.
- m. Pengembangan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif melalui PAUD Desa/Kelurahan.

(3) Peningkatan Pengetahuan Keagamaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelan dengan alokasi anggaran Rp.90.000.000,-. dan realisasi sebesar Rp.89.382.500,- atau 99,31%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya Pengetahuan Keagamaan diantaranya Pengiriman peserta Seleksi Tilawaatil Qur'an (STQ) di tingkat Kabupaten tepatnya di Kecamatan Bintan Gunung Kijang, dimana pada saat penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Tingkat Kabupaten Bintan tersebut, salah satu peserta dari Kecamatan Tambelan memperoleh juara pertama untuk Cabang Lukisan Musaf kategori dewasa. Ini merupakan suatu capaian yang luar biasa di dalam bidang keagamaan di Kecamatan Tambelan. Peringatan hari-hari besar islam seperti Isra' mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, Perayaan Hari Raya Idul fitri dan Idul Adha. Di samping itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya generasi muda maka diadakan suatu kegiatan Festival Anak Sholeh se-Kecamatan Tambelan.

(4) Pembinaan Olahraga dan Seni di Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelan dengan alokasi anggaran Rp.119.815.000,- dan realisasi sebesar Rp.116.270.125,- atau 97,04%. Hasil dari kegiatan ini meningkatnya pembinaan olahraga dan seni di Kecamatan. dengan bentuk Pembinaan Olahraga dan Seni Kecamatan yaitu pertandingan bola voli di tingkat kecamatan, pertandingan sepakbola tingkat kecamatan, pertandingan sepak takraw tingkat kecamatan, pertandingan seni tarik suara tingkat kecamatan.

(5) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Teluk Sekuni,

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Seri Kuala Lobam dengan alokasi anggaran Rp.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.158.698.656,- atau 99,19%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Teluk Sekuni melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Teluk Sekuni.

b. Permasalahan dan Solusi

Adapun di dalam pelaksanaan Program Pembinaan Olahraga dan Seni di Kecamatan Tambelan juga mengalami beberapa hambatan diantaranya yaitu masalah jarak antar Desa dan Kelurahan di Kecamatan Tambelan yang berjauhan serta terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan setiap desa dan kelurahan dengan ibukota Kecamatan menyebabkan tingkat partisipasi dari masyarakat menjadi kurang maksimal. Minimnya akses transportasi yang ada menyebabkan masyarakat yang berada di luar Pulau Tambelan, seperti di Desa Mentebung, Desa Pulau Pinang dan Desa Pengikik sulit untuk selalu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan solusi pembenahan dan perbaikan di bidang transportasi merupakan suatu masalah yang wajib untuk dilaksanakan.

4.1.9.2. PEMERINTAHAN UMUM

1) Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

Program ini dilaksanakan oleh **Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.251.486.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.240.644.833,- atau 95,69%. *Outcome* Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.141.424.000,- dengan realisasi sebesar Rp.132.465.290,- yaitu 93,67% dengan *output* telah terbinanya pengelolaan keuangan desa se Kab. Bintan

(2) Pembinaan Perangkat Pemerintah Kelurahan/Desa (RT/RW)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.062.000,- dengan realisasi sebesar Rp.108.179.543,- yaitu 98,29% dengan hasil Terbinanya perangkat pemerintahan Kelurahan/Desa (RT/RW)

b. Permasalahan

Pelaksanaan Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembinaan Perangkat Pemerintah Kelurahan/Desa (RT/RW) tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

2) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Program ini dilaksanakan oleh **Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total

alokasi anggaran sebesar Rp.47.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.35.853.950,- atau 76,29%. Outcome Meningkatnya Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Penyusunan LAKIP Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.47.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.35.853.950,- atau 76,29% dengan hasil Tersedianya informasi dalam rangka penyusunan kebijakan peningkatan akuntabilitas yaitu Pelayanan Publik, Penilaian Akuntabilitas dan Pemenuhan/ kepatuhan terhadap peraturan.

(2) **Penyusunan LPPD dan Suplemen LPPD (IKK)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran yang dialokasikan Rp.192.440.000,- dan realisasi sebesar Rp.185.521.829,- atau 96,41% dengan hasil Tersusunya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

b. **Permasalahan**

Untuk Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3) **Program Penataan, Ketatalaksanaan Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah**

Program ini dilaksanakan oleh **Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan** melalui 5 (lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.004.200.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.924.060.115,- atau 92,02%. *Outcome* Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Kelembagaan

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Forum Koordinasi Pimpinan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.530.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.459.636.420,- yaitu 86,72% dengan hasil Terlaksananya rapat pimpinan FKPD se Kab. Bintan

(2) **Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Bidang Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp.79.675.845,- yaitu 99,10% dengan hasil Diperolehnya informasi dan penyelesaian permasalahan dibidang Organisasi

(3) **Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp.52.289.760,- yaitu 94,39% dengan hasil Terpilihnya SKPD yang berprestasi yaitu skor tertinggi 851 dari OPD yang dinilai. Rata-rata OPD di Kabupaten Bintan hampir semua memenuhi Penilaian Kinerja OPD dari target 60% dengan capaian yaitu sebesar 80%.

(4) **Penyusunan Uraian Tugas SKPD**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp.52.289.760,- yaitu 94,39% dengan hasil Buku uraian Tugas SKPD Kabupaten Bintan

(5) **Penyusunan Road Map Inovasi Pelayanan Publik**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.242.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.237.559.470,- yaitu 97,84% dengan hasil Road Map Inovasi Pelayanan Publik 3 Sektor

b. **Permasalahan dan Solusi**

1) **Permasalahan**

- a. Permasalahan dalam Rakor Bidang Organisasi, peserta yang menghadiri rapat koordinasi tidak sesuai dengan undangan, hal ini dapat menghambat untuk pengambilan keputusan dan kebijakan.
- b. Hasil Rapat koordinasi yang merupakan rekomendasi dan/ atau merupakan suatu komitmen bersama belum dilaksanakan oleh OPD.

2) **Solusi**

- a. Diharapkan agar Pimpinan menginstruksikan dan mengawasi keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah dalam kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Agar melaksanakan monitoring serta mengevaluasi pelaksanaan hasil Rapat Koordinasi oleh Bagian Organisasi.

4) **Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

Program ini dilaksanakan oleh **Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.719.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.666.732.153,- atau 92,73%. *Outcome* Meningkatnya Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.248.086.000,- dengan realisasi sebesar Rp.246.272.150,- atau 99,27%. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah Peraturan Daerah (PERDA) sejalan bergantinya peraturan dengan melaksanakan penyusunan Perda. Jumlah Perda yang diajukan pada Tahun 2016 dari target 6 Perda terrealisasi sebanyak 10 Perda .

(2) Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.226.414.000,- dengan realisasi sebesar Rp.223.874.780,- atau 98,88%. *Output* dari kegiatan ini adalah terpublikasinya produk hukum daerah untuk mewujudkan tertib dokumentasi hukum melalui Website Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Kabupaten Bintan (**jdih.bintankab.go.id**).

(3) Litigasi Dan Non Litigasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.244.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.196.585.223,- atau 80,40%. *Output* dari kegiatan ini adalah terselesaikannya sengketa peraturan perundang-undangan sehingga akan ini diharapkan terselesainya sengketa sesuai Peraturan Perundang-undangan melalui penyelesaian sengketa dan penegakan hukum dalam kasus Perdata dan PTUN. Untuk Tahun 2016 tidak ada kasus yang diselesaikan.

b. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

- a. Organisasi Perangkat Daerah belum maksimal mengkoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka menggagas Ranperda.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka mencari informasi serta memahami terhadap produk hukum.
- c. Dalam kegiatan Litigasi dan Non Litigasi, tidak dilaksanakan perjanjian kerjasama dengan konsultan hukum.

2) Solusi

- a. Perlu gagasan dari Organisasi Perangkat Daerah untuk mengajukan Rencana Peraturan Daerah yang dapat mendukung iklim usaha serta berpihak kepada rakyat.

- b. Perlunya informasi dan sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami produk hukum daerah serta sarana prasarana publikasi terkait penegakan perda seperti papan pengumuman di tempat-tempat umum.
- c. Kasus-kasus yang dihadapi diharapkan bisa ditangani oleh Bagian Hukum saja.

5) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.**

Program ini dilaksanakan oleh **Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.132.900.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.128.755.450,- atau 96,88%. *Outcome* Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

a. **Pelaksanaan Program**

Kegiatan Penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.132.900.000,- dan realisasi sebesar Rp.128.755.450,- yaitu 96,88% dengan hasil Tersusunnya rencana kerja dan pelaporan kegiatan.

b. **Permasalahan dan solusi**

Dalam merencanakan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dirasakan belum memenuhi kebutuhan yang pasti sehingga banyak perubahan-perubahan yang perlu dievaluasi kembali mengenai belanja kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga perlu merencanakan kegiatan yang baik dan matang agar tercapai sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021.

6) **Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah**

Program ini dilaksanakan oleh **Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan** melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.959.290.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.955.558.695,- atau 99,61%. *Outcome* Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Dukungan Lembaga Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.207.865.600,- dan realisasi sebesar Rp.205.530.825,- yaitu 98,88%. *Output* Meningkatnya pelayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik melalui penyediaan sarana dan prasarana LPSE. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang Jasa sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) **Pengelolaan Dan Penatausahaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.177.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.176.899.370,- yaitu 99,94%. *Output* kegiatan ini adalah tersedianya data pelaksanaan pengadaan barang/ jasa Kab. Bintan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) **Dukungan Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan Sumber Pendanaan APBN**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.132.150.000,- dan realisasi sebesar Rp.132.018.230,- yaitu 99,90%. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya penyerapan anggaran sumber pendanaan APBN di Kabupaten Bintan alam rangka untuk mencapai Indikator Kinerja berupa Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan

Sumber Pendanaan DAK dan APBN.

(4) **Dukungan Kolokasi Server LPSE Di Data Center Pusat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.83.275.000,- dan realisasi sebesar Rp.82.690.500,- yaitu 99,30%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik

(5) **Dukungan Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.182.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.181.520.400,- yaitu 99,74%. Output dari kegiatan ini adalah dengan hasil meningkatnya penyerapan APBD di Kab. Bintan

(6) **Pengelolaan dan Penatausahaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.177.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.176.899.370,- yaitu 99,94%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bintan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan administrasi dan operasional Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bintan yang masih bersifat ad-hock atau melekat sementara pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bintan.

b. **Permasalahan dan Solusi**

1) **Permasalahan**

a. Masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah dengan realisasi pengadaan yang dilaksanakan.

b. Persentase uraian jenis pengadaan pada pengadaan barang

yang tidak memenuhi target. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa Paket Pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh SKPD pelaksana sebagai imbas dari efisiensi anggaran pada Tahun 2016.

- c. Selain itu, ditemukan keengganan Pokja ULP untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala ULP dikarenakan tidak adanya jaminan kepastian hukum dari Pemerintah Kabupaten Bintan.

2) **Solusi**

- a. Menyampaikan data pengadaan barang/ jasa berdasarkan DPA Organisasi Perangkat Daerah secara menyeluruh dan transparansi 100% dan menayangkan di Sistim Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) agar masyarakat/ penyedia dapat mengakses paket-paket pengadan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- b. Perlu adanya perencanaan penganggaran yang pasti dan prioritas agar kegiatan yang merupakan prioritas utama tersebut dapat terakomodir dan dilaksanakan sehingga tidak berdampak terhadap permasalahan efisiensi anggaran.
- c. Perlu adanya pendampingan dari pihak penegak hukum dan jaminan hukum kepada POKJA yang melaksanakan kegiatan APBN maupun APBD dalam melaksanakan pembangunan agar pelaksana kegiatan dapat bekerja dengan aman serta berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku

7) **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat**

Program ini dilaksanakan oleh **Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.320.440.000,- dan realisasi anggaran sebesar

Rp.314.001.750,- atau 97,99%. Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pengawasan Dan Monitoring Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas LPG**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.183.440.000,- dan realisasi sebesar Rp.182.301.050,- yaitu 99,38%. *Output* dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sistem pendistribusian bahan bakar minyak (BM) sehingga dapat tersalurnya kuota BBM jenis tertentu pada masyarakat yang berhak menggunakan BBM jenis tertentu dengan menerapkan kartukendali dan surat rekomendasi serta terjaganya harga eceran tertinggi (HET) gas LPG 3 Kg pada masyarakat.

(2) **Implementasi Dan Evaluasi Penerapan PPK BIUD**

dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.137.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.131.700.700,- yaitu 96,13%. *Outputnya* adalah dapat Implementasi dan evaluasi penerapan BLUD

b. **Permasalahan dan solusi**

Untuk Program Program Peningkatan Kualitas Masyarakat tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8) **Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekomian**

Program ini dilaksanakan oleh **Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.221.300.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.215.487.520,- atau 97,37%. Outcome Meningkatnya Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perekonomian

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Kegiatan Rapat Kerja Bidang Perekonomian**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.125.300.000,- serta realisasinya Rp.120.595.470,- atau 96,25%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terwujudnya koordinasi dalam penetapan kebijakan bidang perekonomian melalui kegiatan rapat dalam rangka meningkatkan kemandirian, daya saing dan pengetahuan didalam mengelola sumberaya alam sehingga membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat melalui cara pembuidayaan.

(2) **Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.96.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.94.892.050,- atau 98,85% dengan hasil Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Fasilitasi TPID Kabupaten Bintan dan diperoleh data yang merupakan komoditas penyumbang inflasi antara lain :

- a. *volatile food* (aneka cabai, sayuran, (bayam, kangkung, kacang panjang) dan ikan segar.
- b. *administreed price* : tarif angkutan udara, tarif listrik dan rokok.
- c. kelompok inti : sewa rumah dan biaya sekolah.

b. **Permasalahan dan Solusi**

1) **Permasalahan**

Kenaikan harga barang dan jasa Tidak memiliki sertifikasi produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha baik pengolahan hasil pertanian dan perikanan dan ini sangat mempengaruhi para pelaku usaha menjual kepasar Domestic maupun pasaran internasional.

2) **Solusi**

Pemerintah Kabupaten Bintan harus menyiapkan anggaran khusus yang dialokasikan untuk kepentingan pengendalian harga. Jika ada kenaikan harga yang tidak wajar di suatu daerah, maka pemerintah daerah dapat langsung melakukan intervensi melalui intervensi di sisi distribusi, harga, atau penambahan stok.

9) **Program Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Umat Beragama**

Program ini dilaksanakan oleh **Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.270.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.261.914.530,- atau 97,01%. Outcome Peningkatan toleransi dan kerukunan mat beragama

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pelaksanaan Pembinaan Umat Kristiani**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp.110.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.108.391.600,- yaitu 98,54%. *Output* dari kegiatan ini Terwujudnya kualitas peserta pengembangan diri dan kewirausahaan bagi masyarakat Kab. Bintan.

(2) **Pembinaan Rohani Bagi Lansia Se-Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan alokasi anggaran sebesar Rp.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.153.522.930 ,- yaitu 95,95%. *Output* terwujudnya kualitas peserta lansia se Kab. Bintan

b. **Permasalahan dan Solusi**

Untuk Program Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Umat Beragama tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

10) **Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan**

Program ini dilaksanakan oleh **Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan** melalui 9 (sembilan) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.9.839.889.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.9.433.281.979,- atau 95,87%. *Outcome* Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Safari Ramadhan Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.169.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.149.034.820,- atau 88,19%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Hubungan Silaturahmi dan Pembinaan Kerohanian Masyarakat Kabupaten Bintan di 9 Kecamatan

(2) **Penatausahaan Administrasi Bantuan Hibah dan Sosial**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.137.430.000,- dan realisasi sebesar Rp.135.151.568,- atau 98,34%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Sistem Administrasi yang baik terhadap penerima Bantuan Sosial dan Hibah yang tepat sasaran.

(3) **Peningkatan pelayanan haji masyarakat Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.335.130.000,- dan realisasi sebesar Rp.312.797.865 atau 93,34%. *Output* dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan Kualitas Ibadah Haji di Kabupaten Bintan Tahun 2015 dengan hasil dapat merwujudnya Kualitas Haji Mabrur bagi masyarakat di Kabupaten Bintan.

(4) **Pembinaan Kepada Guru Ngaji, Mubaliq, Imam Dan Penjaga Mesjid, Pelaksana Fardhu Kifayah Se Kab. Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.5.950.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.5.938.554.060,-

atau 99,81%. *Output* dari kegiatan ini Pembinaan Kualitas imam, Penjaga mesjid, fardhu kifayah, mubaligh/mubalighah dan guru ngaji dengan hasil Terwujudnya Peningkatan Kualitas imam, Penjaga mesjid, fardhu kifayah, mubaligh/mubalighah dan guru ngaji di Kabupaten Bintan.

(5) **Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Pendayagunaan Da'i Pedesaan di Kab. Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.804.419.700,- dan realisasi sebesar Rp.798.168.770,- yaitu 99,22% dengan *Output* Terwujudnya pemahaman Keagamaan melalui pendayagunaan Da'i Pedesaan di Kabupaten Bintan.

(6) **Temu Karya Kelompok Pengajian Se Kab. Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokas anggaran sebesar Rp.391.070.000,- dan realisasi sebesar Rp.290.866.340,- yaitu 74,38%. *Output* hubungan silaturahmi dan pembinaan kerohanian masyarakat Kab. Bintan

(7) **Peningkatan Mutu Pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Madani Unggulan**

Kegiatan ini dilaksanakan yang dialokasikan sebesar Rp.792.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.689.956.223,- yaitu 87,12%. *Output* kegiatan ini untuk mewujudnya santri yang berkualitas di Kab. Bintan.

(8) **Pembinaan Pusat Hafal Al Qur'an**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.1.063.600.000,- dan realisasi sebesar Rp.947.455.393,- yaitu 89,08 dengan *output* Terwujudnya Qori dan Hafiz terbaik di Kab. Bintan.

(9) **Pesantren Pengembangan Diri Dan Kewirausahaan Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.197.240.000,- dan realisasi sebesar Rp.171.296.940,- yaitu

86,85% dengan *output* Terwujudnya kualitas peserta pengembangan diri dan kewirausahaan bagi masyarakat Kab. Bintan

b. **Permasalahan dan solusi**

1) **Permasalahan**

- a. Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan terdapat data petugas lapangan yang ada lebih banyak jumlah PNS dari Non PNS.
- b. Sering terjadi masalah jamaah yang sakit.
- c. Jumlah honorarium yang diberikan tidak terdapat (belum sesuai) dengan Standar Satuan Harga Kabupaten Bintan Disamping itu, terdapat laporan dari guru agar jumlah honorarium yang ada diperjelas dasar pemberiannya.
- d. Efisiensi Anggaran di DPA berdampak pada pelaksanaan kegiatan dilapangan.

2) **Solusi**

- a. Verifikasi terhadap data jamaah haji yang masuk agar nama-nama petugas yang ada diteliti kembali sehingga dapat dilakukan perbaikan dan mengutamakan data yang bukan PNS.
- b. Masalah penanganan haji tersebut perlu menjadi catatan bagi panitia pelaksana kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan ibadah haji dengan dibekali pengetahuan social budaya serta aturan-aturan yang berlaku di tanah suci. Sehingga hal-hal buruk yang terjadi dapat dihindari.
- c. Perlu usulan perubahan SSH agar dapat mengadaptasi kebutuhan honorarium dilingkungan pondok pesantren madani. Disamping itu, kami juga meminta kepada pengurus yayasan untuk membuat rincian dasar pemberian honor yang diberikan kepada masing-masing guru.

- d. Dalam mengatasi kekurangan dari setiap jenis belanja kegiatan agar mengajukan perubahan atau pergeseran terhadap belanja yang dibutuhkan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan.

11) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini dilaksanakan oleh **Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan** melalui 11 (sebelas) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.12.047.881.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.10.980.437.232,- atau 91,14%. *Outcome* Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.97.957.116,- yaitu 97,96%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya materai, perangko dan benda pos lainnya Terpenuhinya untuk 1 (satu) tahun anggaran.

(2) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.41.830.000,- dengan realisasi sebesar Rp.786.780.908,- yaitu 93,46%. *Output* dari kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya sarana listrik, air bersih, telepon, majalah dan koran alam satu tahun.

(3) **Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.1.780.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.315.295.000,- yaitu 73,88%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya tenaga pendukung administrasi perkantoran dalam satu tahun.

(4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.197.307.000,- yaitu 98,65%. *Output* dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

(5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.495.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp.365.347.650,- yaitu 73,72%. *Output* dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kondisi kebersihan kantor

(6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.380.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.376.945.500,- yaitu 99,20%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan

(7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.180.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.179.583.000,- yaitu 99,77%. *Output* dari kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya peralatan dan komponen listrik

(8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.2.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.093.659.750,- yaitu 99,70%. *Output* dari kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak/genset.

(9) Penyediaan Makanan Dan Minuman

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.4.010.151.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.822.993.067,- yaitu 95,33%. *Output* dari kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya kebutuhan konsumsi harian, peserta rapat dan tamu.

(10) **Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.1.300.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.084.768.241,- yaitu 83,44%. *Output* dari kegiatan tersebut adalah dengan capaian Meningkatnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

(11) **Rapat-Rapat Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Dalam Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.660.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.659.800.000,- yaitu 99,97%. *Output* dari kegiatan tersebut adalah Meningkatnya koordinasi monitoring dan evaluasi dalam daerah

b. **Permasalahan dan solusi**

Masalah *cleaning service* pada Bagian Umum yang baru-baru ini gagal dalam mengikuti ujian registrasi pegawai honor perlu mendapatkan perhatian sehingga perlu memperkerjakan kembali *cleaning service* berdasarkan kebijakan yang diambil oleh pimpinan agar kebersihan pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dapat terjaga dan berjalan seperti biasanya.

12) **Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

Program ini dilaksanakan oleh **Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan** melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.7.298.844.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.6.861.994.303,- atau 94,01%. *Outcome* Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.885.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.880.923.700,- yaitu 99,54% dengan capaian Terpeliharanya gedung kantor

(2) **Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.989.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.907.792.600,- yaitu 91,79% dengan capaian Terpeliharanya kendaraan dinas

(3) **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.335.920.000,- dengan realisasi sebesar Rp.331.083.750,- yaitu 98,56% dengan capaian Terpeliharanya peralatan kantor

(4) **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Sandi Dan Telekomunikasi (Santel)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.49.976.000,- dengan realisasi sebesar Rp.49.831.787,- yaitu 99,71% dengan capaian Informasi/ data berupa sandi-sandi

(5) **Peningkatan Prasarana Dan Sarana Aparatur**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.664.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.359.240.200,- yaitu 54,10% dengan capaian Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

(6) **Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/tempat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.4.374.948.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.333.122.266,- yaitu 99,04% dengan capaian Terpenuhinya kebutuhan jasa sewa gedung kantor dan tempat

b. **Permasalahan dan solusi**

Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan adalah merupakan permasalahan yang berarti dan perlu menapatkan perbaikan yang dikarenakan banyak ruangan yang mengalami kerusakan seperti bocor akibat hujan dan serta ruang rapat yang belum mencukupi untuk kapasitas yang banyak sehingga perlu meningkatkan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dilaksanakan oleh Bagian Umum dengan harapan agar Gedung atau ruangan yang mengalami kerusakan dapat diperbaiki dan ruangan untuk melaksanakan rapat agar segera diperluas demi keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan.

13) **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini dilaksanakan oleh **Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.350.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.304.333.700,- atau 86,95%. Outcome Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

a. **Pelaksanaan Program**

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.350.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.304.333.700,- yaitu 86,95% dengan capaian Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai

b. **Permasalahan**

Pelaksanaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai kebutuhan.

14) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini dilaksanakan oleh **Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Sekretariat KORPRI Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.076.550.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.019.181.883,- atau 94,67%. *Outcome* Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan Keprotokolan**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh dengan alokasi anggaran Rp.626.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp.622.060.767,- yaitu 99,28% dengan capaian Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan Keprotokolan.

(2) **Pendidikan Dan Pelatihan Formal**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh dengan alokasi anggaran Rp.250.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.199.750.000,- yaitu 79,90% dengan capaian meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

(3) **Dukungan Kegiatan Anggota Korpri Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.197.371.116,- yaitu 98,69% dengan capaian Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Masih kurangnya tenaga pelaksana pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, diharapkan solusi kedepannya agar Meningkatkan kapasitas pelaksana pengelola keuangan dan pengelola barang/ jasa dengan mengadakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan barang/jasa di Kabupaten Bintan guna dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

15) **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

Program ini dilaksanakan oleh **Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintan** melalui 8 (delapan) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.10.872.301.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.9.992.634.184,- atau 91,91%. *Outcome* disahkannya Peraturan Daerah sebagai Payung Hukum

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.739.655.000,- dan realisasi sebesar Rp.533.665.980,- atau 72,15%. *Output* kegiatan ini adalah terfasilitasinya peningkatan wawasan DPRD Kabupaten Bintan terdiri dari 1 Indikator yaitu jumlah keikutsertaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peningkatan kemampuan dan wawasan. Jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan pada tahun 2016 sebesar 25 Orang anggota atau sebesar 100%.

(2) **Rapat Rapat Paripurna Hasil**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.169.042.000 dengan realisasi sebesar Rp.51.920.000 atau 30,71%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna menghasilkan 20 kali paripurna.

(3) **Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.399.745.000,- dan realisasi sebesar Rp.398.890.500,- atau 99,80%. *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya 56 kali peliputan yang direncanakan telah terealisasi sebanyak 56 kali peliputan.

(4) Hearing Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.13.500.000 dan realisasi sebesar Rp.3.366.000,-, *output* dari kegiatan ini adalah 45 kali kegiatan hearing dengan pejabat pemerintah dan tokoh Agama/Tokoh Masyarakat dan dijadwalkan setiap Komisi untuk 15 kali hearing dalam satu tahun. Komisi Di DPRD Kabupaten Bintan terdiri dari 3 Komisi yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan bidang Tugas tiap-tiap komisi.

- Komisi I membidangi Hukum dan Pemerintahan
- Komisi II membidangi anggaran , ekonomi dan pembangunan,
- Komisi III membidangi Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia.

Capaian Realisasi Laporan Fisik sebesar 35,55% (16 kali hearing dari 45 yang dianggarkan untuk tahun 2016 ini) dan Keuangan sampai dengan bulan Desember 2016 ini baru terealisasi sebesar Rp.3.366.000, atau sebesar 24,93 % ini dikarenakan kurangnya laporan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD sehingga Hearing jarang dilakukan. Hearing yang dilaksanakan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- Komisi I : 5 kali hearing.
- Komisi II : 8 Kali hearing.
- Komisi III : 3 kali hearing.

(5) Evaluasi Pelaksanaan APBD Musrenbang Inspeksi Mendadak

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.841.475.000,- dan realisasi sebesar Rp.840.660.000,- atau 99,90%. *Output* dari kegiatan ini adalah

- Musrenbang/Inspeksi 24 kali turun/hari

- Evaluasi Pelaksanaan APBD 24 kali turun/ hari
- Untuk ke Tambelan dijadwalkan 1 kali khusus dapil Tambelan
- Jadi Total kegiatan ini berjumlah 49 kali jalan/hari

Dari sisi kinerja dapat disimpulkan bahwa dari 49 kali inspeksi yang direncanakan telah dilaksanakan sebanyak 49 kali inspeksi atau 100% dengan beberapa temuan yang telah ditindak lanjuti. Sisa Anggaran sebesar Rp.815.000,- menjadi SILPA Tahun 2016.

(6) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.1.535.707.800,- dengan realisasi sebesar Rp.1.392.094.155,- atau 90,65%. *Output* dari kegiatan ini adalah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah indikatornya adalah jumlah Ranperda yang disahkan menjadi Perda dan Persentase kehadiran Anggota DPRD dalam pembahasan perda tersebut. Dimana target yang ingin dicapai pada Tahun 2016 sebanyak 11 Perda namun yang disahkan hanya 9 Perda atau 81,80% . hal ini tidak mencapai target, dikarenakan 2 (dua) Prolegda belum siap rancangannya untuk diserahkan kepada DPRD sehingga belum dapat dilakukan pembahasan.

(7) Konsultasi Dalam Rangka Pengawasan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.5.226.652.800,- dan realisasi sebesar Rp.4.979.970.449,- atau 95,28%. *Output* kegiatan ini banyak mendapat respon yang tidak baik dari berbagai pihak baik itu dari Instansi maupun dari masyarakat, tetapi Anggota DPRD selalu mengambil sisi positifnya karena mengingat di daerah kita bisa dikatakan daerah yang baru dan mulai berkembang jadi masih butuh banyak melakukan Kunjungan ke daerah-daerah yang lebih maju untuk mendapat informasi yang aktual untuk perkembangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kabupaten

bintan. Maka anggota DPRD Kabupaten Bintan banyak melakukan perubahan baik itu dalam pengambilan keputusan maupun dalam melayani masyarakatnya.

(8) Reses

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.1.946.523.800,- dan realisasi sebesar Rp.1.792.067.100 atau 92,06%. *Output* dari kegiatan ini adalah dilaksanakan sebanyak 2 kali reses selama tahun anggaran 2016 sebagaimana rencana kerja sebelumnya.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Terbatasnya waktu pembahasan dimana konsentrasi anggota lebih terfokus pada penyelenggaraan Pilkada
- b. Letak geografis Bintan yang terdiri dari ratusan pulau pulau yang sulit untuk dicapai dan sulit untuk menerapkan perda yang ada didalam kehidupan masyarakat setempat.
- c. Penerapan Peraturan Daerah tersebut terkadang memberatkan masyarakat sehingga penerapan Perda ini berjalan tidak efektif dan hasil yang diharapkan tidak maksimal.
- d. Ranperda yang ada didalam Prolegda kadang belum siap rancangannya untuk diserahkan kepada DPRD walaupun telah ditetapkan Prolegda ini berdasarkan skala prioritas skala waktu yang dibagi tiap per Triwulan.
- e. Kendala yang sering dihadapi yaitu terlambatnya penyerahan Rancangan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
- f. Adanya Perubahan Peraturan Perundang Undangan sehingga mempengaruhi terhadap waktu dan pembahasan serta pengesahannya menjadi lebih cepat ataupun menjadi lebih

lambat karena harus menyesuaikan dengan aturan aturan terbaru dari pusat.

- g. Evaluasi Gubernur terhadap Perda Perda yang memakan waktu
- h. Terlambatnya Proses Penyerahan oleh Kepala Daerah maupun untuk proses Pembahasan KUA PPAS di tingkat eksekutif dan legislatif yang pada akhirnya akan menyebabkan terlambatnya proses penyusunan APBD
- i. Terlambatnya Proses Penyusunan APBD menyebabkan Terlambatnya Penyampaian APBD oleh Kepala Daerah yang pada akhirnya menyebabkan terlambatnya proses penetapan dan pengesahan Ranperda menjadi Peraturan Daerah.
- j. Terlambatnya Masuknya LKPJ Kepala Daerah yang masuk ke DPRD serta lambat proses pemeriksaan oleh BPK sehingga kita terlambat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan APBD tahun yang baru saja berlalu untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- k. Tidak sesuainya antara data dengan realisasi dilapangan.
- l. Tidak adanya rekomendasi terhadap hasil laporan.
- m. Permasalahan yang ada belum ditindak lanjuti secara serius.
- n. Kurangnya laporan dari masyarakat terhadap permasalahan yang ada di Daerah.
- o. Tidak sesuainya data dengan kenyataan dilapangan.
- p. Cuaca yang kurang mendukung.
- q. Terjadi bencana alam.
- r. Wilayah yang dituju sangat sulit

2) **Solusi**

- a. Ranperda yang sudah menjadi Perda sebaiknya cepat disosilisasikan ke masyarakat terutama masyarakat

masyarakat yang ada di daerah pesisir dan yang berada di pulau-pulau.

- b. Hendaknya Perda yang ada pasal-pasal yang mengatur di dalamnya haruslah menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat yang ada.
- c. Dinas yang Ranperda masuk di dalam Prolegda hendaknya di awal tahun anggaran telah menyiapkan draft rancangan peraturan daerahnya sehingga tidak terjadi keterlambatan pembahasan ranperda dan pembahasan ranperda ini berjalan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan waktu dan skala prioritasnya di dalam Prolegda.
- d. Sehingga semua ranperda yang telah siap dapat segera diserahkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD sesuai agenda yang telah ditetapkan.
- e. Hendaknya kita di daerah dapat dengan cepat menyesuaikan diri terhadap segala perubahan aturan perundang-undangan dari pusat dan aturan baru tersebut dapat kita tuangkan di dalam ranperda kita sebagai pedoman dasar peraturan daerah.
- f. Diharapkan adanya kerjasama yang baik antara kabupaten/kota dengan pihak propinsi terhadap proses evaluasi Perda yang telah ditetapkan oleh DPRD agar tidak memakan waktu yang terlalu lama supaya penerapan perda untuk hajat hidup orang ramai dapat segera direalisasikan seperti Perda APBD Perubahan maupun untuk Perda APBD Murni.
- g. Karena sekarang adanya Audit pihak BPK maupun pihak Inspektorat terhadap mekanisme alur pembahasan APBD mulai dari Penyampaian KUA PPAS Perubahan dan Penyampaian KUA PPAS Murni.
- h. Sampai dengan Masuk dan Penyampiannya oleh Kepala Daerah, Pembahasan hingga Penetapan APBD Perubahan

dan APBD Murni hingga proses evaluasi akan keliatan tahapan tahapannya apabila berjalan lambat atau tidak sesuai dengan waktu dan mekanisme yang ada akan dapat diketahui secara nyata oleh Badan Pemeriksa . Untuk itu pihak Pemerintah Daerah, Legislatif dan Eksekutif harus cerdas dalam menyikapi waktu dan tahapan tahapan dan mekanisme Alur untuk sebuah ranperda APBD maupun ranperda ranperda yang lainnya.

- i. Sebagaimana dalam aturan yang ada Kepala Daerah telah menyelesaikan dan harus mempertanggungjawabkan Pelaksanaan APBD paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir , jadi LKPJ dilaksanakan tepat waktu dan tidak terjadinya keterlambatan.
- j. Begitu juga dengan Pemeriksaan oleh BPK disetiap awal tahun anggaran agar dapat dilaksanakan tepat waktu agar berdasarkan LHP yang ada dapatlah disusun Rancangan Peraturan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan APBD dapat segera disampaikan kepada DPRD oleh kepala Daerah dan dapat disyahkan sesuai agenda untuk ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah.
- k. Menegur dan menyurati Instansi terkait.
- l. Mencari Solusi permasalahan.
- m. Mengeluarkan surat Rekomendasi atas tindak lanjut permasalahan yang ada.
- n. Menyurati atau Menegur instansi / dinas terkait.
- o. Mengadakan rapat / hearing dengan Pejabat Pemerintah/ tokoh masyarakat dan Tokoh Agama.
- p. Turun langsung menemui masyarakat atau meninjau lokasi yang bermasalah.

4.1.9.3. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

Urusan Administrasi Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan. Semua program 8 (delapan) program dan 60 (enam puluh) kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan mencapai 86.16% Secara rinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan** melalui 18 (delapanbelas) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.3.766.450.550,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.596.968.888,- atau 95,50%. Outcome Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pelaksanaan Program

(1) Penyusunan Standar *Output* Satuan Harga (SSH),

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.232.800.000,- realisasi sebesar Rp.226.208.750,- atau 97.17%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya buku pedoman Standar Satuan Harga 2016 sebanyak 100 (seratus) buku. Penyusunan Standar Satuan Harga ini dimaksudkan untuk (a) Menyajikan data harga barang / jasa; (b) Mendapatkan informasi adanya perubahan harga berkaitan kebijakan regulasi ekonomi. (c) Mendapatkan informasi tentang besaran plafond dana / biaya untuk keseragaman SKPD dalam pelaksanaan program kegiatan. Adapun output yang dicapai adalah terwujudnya penatausahaan yang transparan, efisiensi,

dan akuntabilitas pada 38 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

(2) **Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.67.750.000,- realisasi sebesar Rp.64.345.000,- atau 94.97%. Keluaran dan output yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya Buku dan Informasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebanyak 50 (lima puluh) Buku.

(3) **Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.22.100.000,- realisasi sebesar Rp.19.997.800,- atau 90.49%. *Output* dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya dan Informasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebanyak 20 (dua puluh) Buku.

(4) **Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.104.900.000,- realisasi sebesar Rp.104.798.500,- atau 99.90%. *Output* dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Transparansi Informasi Keuangan Daerah yaitu 1 (satu) Website : www.dppkd.bintankab.go.id dan media massa Batam Pos.

(5) **Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.135.200.000,- realisasi sebesar Rp.130.016.800,- atau

96.17%. *Output* dari kegiatan ini adalah mendapatkan data yang akurat terhadap jasa giro/bunga deposito bank berupa buku laporan manajemen Investasi Kas Pemerintah Daerah selama 1 Tahun Anggaran. Adapun kegiatan ini adalah berupa penempatan Deposito pada Bank BPR, BNI, BRI, BSM, BTN dan Mandiri dan Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau, PD, BPR BINTAN dan PT. Bintang Inti Sukses.

(6) **Peningkatan Manajemen BLUD Dana Bergulir**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.117.750.000,- realisasi sebesar Rp.109.687.000,- atau 93.15% *Output* yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Aparatur Pengelolaan Keuangan PPK BLUD Dana Bergulir :

- 1) Pengurus PPK BLUD Dana Bergulir diberikan Pemahaman
- 2) Keterampilan Tupoksi dalam mengelola Dana Bergulir sehingga terdapat peningkatan mutu pengelolaan (manajemen) BLUD
- 3) Laporan Keuangan PPK BLUD Dana Bergulir

(7) **Rapat-rapat dan koordinasi Pelaksanaan APBD**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.119.000.000,- realisasi sebesar Rp.116.810.700,- atau 98.16%. *Output* dari kegiatan ini adalah Menguatnya koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan sehingga terlaksananya kebijakan pedoman pelaksanaan APBD dan P-APBD, adapun rapat-rapat dan koordinasi dari kegiatan tersebut adalah :

- Permasalahan APBD
- Perubahan APBD
- Penganggaran Tahun 2016
- Permasalahan Penganggaran SKPD se-Kabupaten Bintan
- Penyusunan RKA se-Kabupaten Bintan

Sedangkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terwujudnya akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD dan P-APBD yang sesuai peraturan Peraturan Perundang-undangan

(8) **Sinkronisasi Data Keuangan Triwulan SKPD**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.142.645.000,- realisasi sebesar Rp.139.907.643,- atau 98.08%. Terselenggaranya data realisasi keuangan pada 38 SKPD dan BUD yang jumlahnya sama setelah rekonsiliasi secara triwulan. Sehingga tersedianya Data Keuangan Triwulan SKPD yang akurat sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) buku.

(9) **Verifikasi dan Pelaporan Pengeluaran PPKD**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.170.600.000,- realisasi sebesar Rp.170.599.000,- atau 100%. *Output* dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya laporan bulanan realisasi pendapatan daerah dan Surat Pertanggung jawaban validasi Belanja Bantuan, Belanja Tak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan. Dan hasil yang diperoleh adalah terpenuhinya kelengkapan bukti dan laporan pertanggungjawaban penerimaan daerah, Belanja Bantuan, Belanja Tak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan. Pendapatan Daerah dan Belanja Bantuan pada PPKD sebagai berikut :

- Verifikasi Penerimaan dan Pelaporan PPKD 12 (dua belas) Laporan.
- Verifikasi Pengeluaran dan Pelaporan PPKD 12 (dua belas) Laporan.

(10) **Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.84.464.000,- realisasi sebesar Rp.76.282.900,- atau 90.31%. *Output* dan hasil yang diperoleh dari kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran adalah Laporan

Realisasi Anggaran Prognosis Semesteran I Pemerintah Kabupaten Bintan 1 (satu) Laporan Pemerintah Kabupaten Bintan / 38 SKPD se-Kabupaten Bintan. Sebanyak 50 (lima puluh) Buku.

(11) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp146.149.000,- realisasi sebesar Rp.146.114.000,- atau 99.98%. *Output* dan hasil yang diperoleh dari kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun adalah sebagai berikut :

- Laporan Arus Kas 1 (satu) Laporan.
- Laporan Realisasi Anggaran 1 (satu) Laporan Pemerintah Kabupaten Bintan / 38 SKPD se-Kabupaten Bintan.
- Neraca 1 (satu) Laporan Pemerintah Kabupaten Bintan / 38 SKPD se-Kabupaten Bintan
- Buku Laporan Keuangan Un-Audited dan Audited sebanyak 50 (lima puluh) buku.

(12) Workshop Akuntansi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp112.349.000,- realisasi sebesar Rp.87.760.900,- atau 78.11%. *Output* dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Peningkatan Tenaga Akuntansi Keuangan Daerah pada 38 (tiga puluh delapan) SKPD dalam rangka peningkatan keterampilan dan pemahaman pada 38 (tiga puluh delapan) orang Pejabat Penatausahaan Keuangan

(13) Optimalisasi Tim tuntutan Bendahara dan Tuntutan Ganti Rugi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.146.000.000,- realisasi sebesar Rp.145.352.500,- atau 99.56% *Output* dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut

adalah Terlaksananya Pertemuan Tim TPTGR untuk menangani kasus-kasus kerugian daerah .

(14) **Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp202.498.550,- realisasi sebesar Rp188.998.750,- atau 93.33% *Output* dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bintan.

(15) **Penyusunan KUA dan PPAS**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.54.500.000,- realisasi sebesar Rp.49.143.425,- atau 90.17%. *Output* dan hasil kegiatan ini adalah Dokumen KUA Tahun Anggaran 2017, Dokumen PPAS Tahun Anggaran 2017, Dokumen Perubahan KUA Tahun Anggaran 2016 dan Dokumen Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2016.

(16) **Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran APBD**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp1.674.300.000,- realisasi sebesar Rp1.607.739.220,- atau 96.02%. *Output* dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedianya Buku Peraturan Daerah APBD Tahun 2016, Peraturan Bupati Penjabaran APBD Tahun 2016, Nota Keuangan APBD 2016, Peraturan Daerah PAPBD 2016, Peraturan Bupati Penjabaran PAPBD 2016, DPA Tahun Anggaran 2016 dan DPPA Tahun Anggaran 2016 dan Nota Keuangan PAPBD 2017.

(17) Pembinaan Atas Penerapan Sistem Akuntansi pemerintah Berbasis AkruaI pada SKPD

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.133.445.000,- realisasi sebesar Rp.129.048.000,- atau 96.71%. *Output* dan hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Tenaga Akuntansi Pemerintah Keuangan yang handal pada 38 SKPD. Dan Terlaksananya Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah.

(18) Pengembangan Aplikasi SP2D (CMS)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000,- realisasi Rp.84.158.000 atau 84.16% *Output* dan hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya aplikasi Cash Management System (CMS) yang terkoneksi dengan kas daerah serta aplikasi SIMDA.

Capaian kinerja tahun 2016 pada urusan Administrasi Keuangan ini dapat dilihat dengan pencapaian indikator berikut :

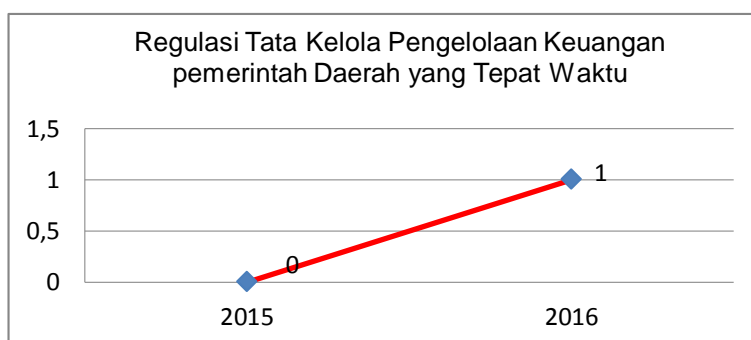
1. Laporan Keuangan Yang Mendapat Opini Wajar

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2015	WTP
2	2016	WTP

Peran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi target WTP. Tahun 2016 telah mencapai 100% dengan opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2015. Kegiatan yang menunjang indikator ini adalah Program Kegiatan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pagu Rp.202.498.550,00 dan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pagu Rp.104.900.000,00

2. Regulasi Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Tepat Waktu

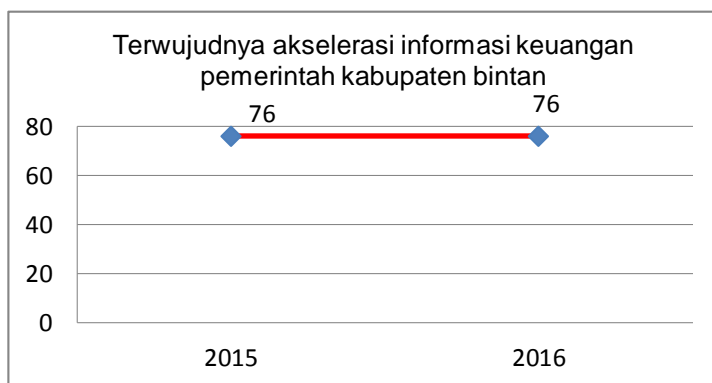
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2015	0
2	2016	1



Regulasi Tata Kelola Pegelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Tepat Waktu. Target Tahun 2016 untuk Regulasi Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Tepat Waktu Target 1 Perda/perbup dan telah terealisasi yaitu perda Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah Tahun 2015. Program yang menunjang indikator ini adalah Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pagu Rp.67.750.000,00 dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Pagu Rp.1.674.300.000,00 dan Verifikasi dan Pelaporan Pengeluaran PPKD Pagu Rp.170.600.000,00 dan Optimalisasi Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Pagu Rp.146.000.000,00.

3. Terwujudnya akselerasi informasi keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan

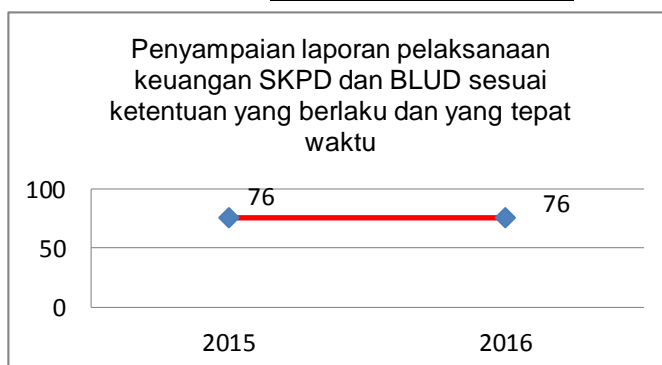
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2015	76
2	2016	76



Terwujudnya Akselerasi Informasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk Tahun 2016 realisasi mencapai 76% sesuai target yang telah ditetapkan Program yang menunjang indikator ini adalah Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pagu Rp.202.498.550,00 dan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pagu Rp.104.900.000,00

4. Persentase Penyampaian Laporan Pelaksanaan Keuangan SKPD dan BLUD sesuai ketentuan yang berlaku dan yang tepat waktu

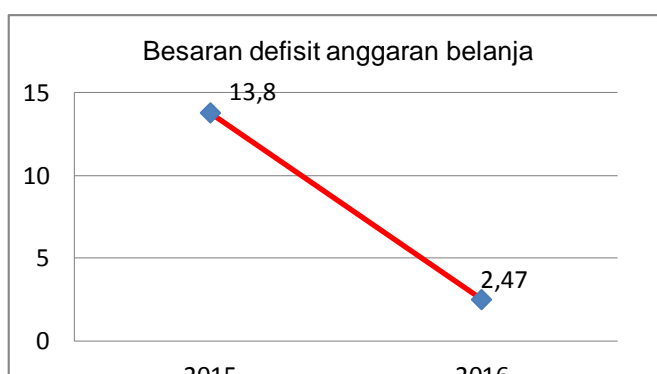
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2015	76
2	2016	76



Persentase Penyampaian Laporan Pelaksanaan Keuangan SKPD dan BLUD sesuai ketentuan yang berlaku dan yang tepat waktu Tahun 2016 realisasi mencapai 76% sesuai target yang telah ditetapkan Program yang menunjang indikator ini adalah Pembinaan Atas Penerapan Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrua! Pada SKPD Pagu Rp.133.445.000,00 dan Workshop Akuntansi Pagu Rp.112.349.000,00 dan Peningkatan Manajemen PPK-BLUD Dana Bergulir Pagu Rp.117.750.000,00

5. Besaran defisit anggaran belanja

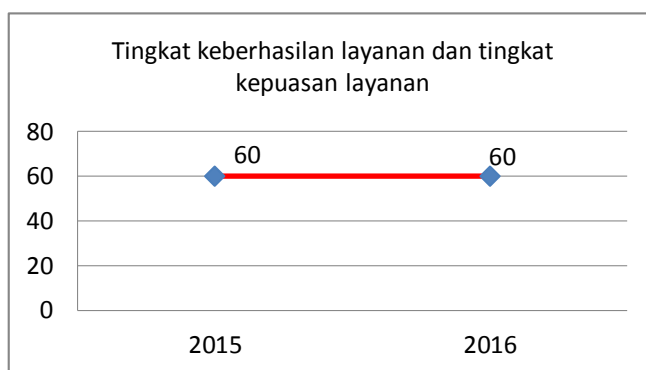
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2015	13.8
2	2016	2.470



Besaran defisit anggaran belanja pada Tahun 2016 realisasi mencapai 2,47% dari Target 5,25<n7,25%, ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan dapat mengelola Keuangan dengan baik sehingga dapat memperkecil defisit anggaran. Guna mendukung tercapainya sasaran ini dilaksanakan dengan kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.54.500.000,00 dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD dengan pagu Rp.1.674.300.000,00.

6. Tingkat keberhasilan layanan dan tingkat kepuasan layanan

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2015	60
2	2016	60



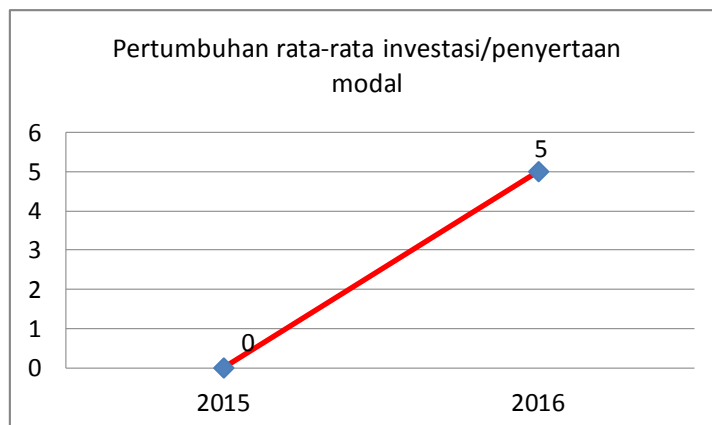
Tingkat keberhasilan layanan dan tingkat kepuasan layanan Tahun 2016 realisasi mencapai 60% sesuai target yang ditetapkan, tolak ukur dari tingkat kepuasan layanan adalah dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak mengurus pencairan SP2D serta sarana dan prasarana yang tersedia, adapun Kegiatan yang menunjang indikator ini adalah Rapat-rapat dan koordinasi Pelaksanaan APBD Pagu Rp.119.000.000,00 dan Sinkronisasi Data Keuangan Triwulan SKPD Pagu Rp.142.645.000,00.

7. Pertumbuhan rata-rata investasi/penyertaan modal

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2015	0
2	2016	5

Pertumbuhan rata-rata investasi/penyertaan modal Tahun 2016 Terealisasi 5% sesuai target yang ditetapkan dengan Kegiatan yang menunjang indikator ini adalah Peningkatan manajemen investasi daerah dengan Pagu Rp.135.200.000,00. Penyertaan Modal Pemerintah

Kabupaten Bintan diinvestasikan pada BUMD (yaitu pada PT Bintan Inti Sukses atau PT BIS), Bank Riau Kepri dan BPR Bintan.



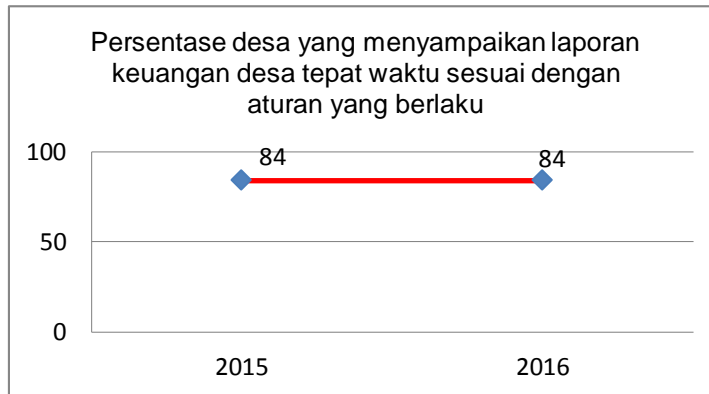
8. Pendanaan belanja melalui penerbitan utang

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2015	0
2	2016	0

Pendanaan belanja melalui penerbitan utang di Tahun 2016 Terealisasi 0%, ini dikarenakan Pemerintah daerah Kabupaten Bintan tidak melakukan pinjaman atau utang, adapun target yang ditetapkan sebesar 5 % dikarena untuk berjaga-jaga apabila terjadi defisit anggaran.

9. Persentase desa yang menyampaikan laporan keuangan desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku

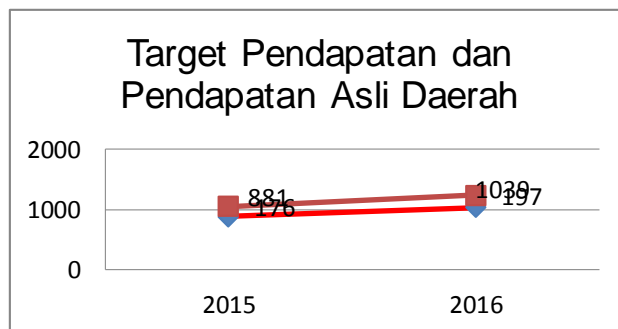
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2015	84
2	2016	84



Persentase Desa yang menyampaikan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku realisasi mencapai 84% sesuai target yang telah ditetapkan Untuk menunjang indikator ini dilaksanakan kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa Pagu Rp.55.500.000,00

10. Target Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2015	881/176
2	2016	1039/197

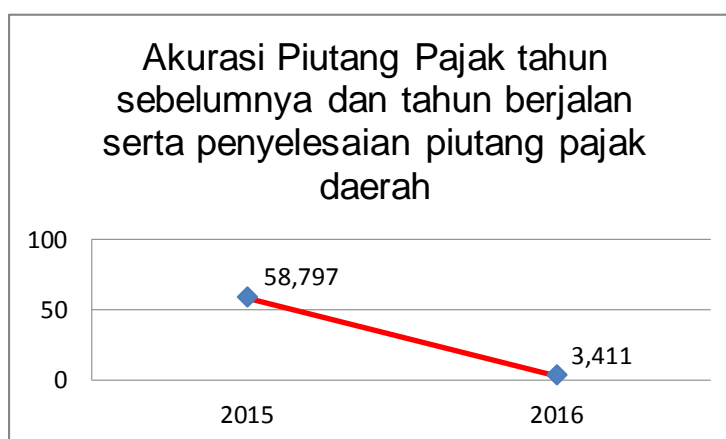


Target Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 realisasinya mencapai 1.039T/197M dari target 875M/171M yang telah ditetapkan, sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah melebihi dari target yaitu sebesar 26M atau 115%. Untuk menunjang indikator ini dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah Pagu Rp.93.320.000,00 dan Pemutakhiran Basis Data PBB P2 dan Pemetaan Pagu Rp.729.736.000,00 dan Pencetakan Massal dan Penyampaian SPPT PBB Pagu Rp.612.405.000,00 dan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan

Daerah Pagu Rp.161.060.000,00 dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Pagu Rp.146.620.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Pagu Rp.213.680.000,00

11. Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2015	58,797
2	2016	3,411



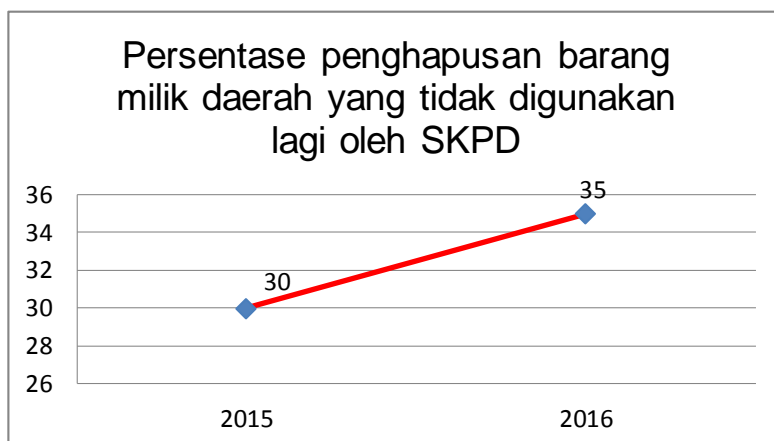
Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah realisasi mencapai 3,411M dari target 3,650M, penerimaan dari piutang ini belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan banyak wajib pajak yang usahanya sudah tutup dan tidak ditemui lagi penanggungjawab wajib pajak terhutang. Untuk menunjang indikator ini dilaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 Pagu Rp.137.120.000,00

12. Persentase keakuratan data neraca aset

Tidak ada realisasi dalam indikator ini, karena kegiatan ini tidak di anggarkan pada Kantor DPPKD Kabupaten Bintan dan kedepan kegiatan ini lebih sesuai ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

13. Persentase penghapusan barang milik daerah yang tidak digunakan lagi oleh SKPD

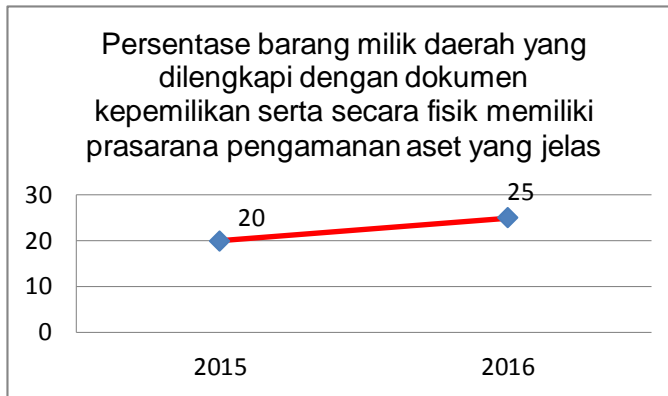
NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2015	30
2	2016	35



Persentase penghapusan barang milik daerah yang tidak digunakan lagi oleh SKPD realisasi mencapai 35% sesuai target yang ditetapkan, adapun persentase diperoleh dari usulan penghapusan yang diusulkan dari SKPD berupa nilai aset dibagi dengan penghapusan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan SK penghapusan. Untuk menunjang indikator ini dilaksanakan kegiatan Penghapusan Barang Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.264.900.000,00

14. Persentase barang milik daerah yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan serta secara fisik memiliki prasarana pengamanan aset yang jelas

NO	TAHUN	ANGKA PENCAPAIAN
1	2015	20
2	2016	25



Persentase barang milik daerah yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan serta secara fisik memiliki prasarana pengamanan aset yang jelas realisasi mencapai 25% sesuai target yang ditetapkan, ini didapatkan dari data aset dibagi dengan jumlah sertifikat. Untuk menunjang indikator ini dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Aset Daerah Pagu Rp.92.200.000,00 dan Asuransi Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Bintan Pagu anggaran Rp.455.900.000,00

2) **Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan melalui 1 (sebelas) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.55.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.55.223.100,- atau 99,50%. *Outcome* Meningkatnya Pejabat pengelola keuangan desa yang telah terlatih

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa** dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.55.500.000,- realisasi sebesar Rp.55.223.100,- atau 99,50%. *Output* dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. SPJ bulanan / triwulan dari 36 Desa se-Kabupaten Bintan
2. Honorarium Pengesahan SPJ per-Bulan
3. Rekapitulasi realisasi tahunan per-Desa

3) **Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten** Bintan melalui 11 (sebelas) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.2.595.143.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.415.585.117,- atau 93,08%. *Outcome* Meningkatnya penerimaan dan pengamanan keuangan daerah

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Sosialisasi Pajak Daerah**

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.93.320.000,- realisasi sebesar Rp.90.457.300,- atau 96.93%. *Output* dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya Stiker Lunas Pajak untuk pemasangan reklame
- b. Pencetakan maklumat untuk seluruh wajib pajak di wilayah Kabupaten Bintan
- c. Pemasangan X-Banner yang memuat sosialisasi pajak daerah yang dipasang di wilayah wisata Lagoi.

(2) **Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.161.060.000,- realisasi sebesar Rp.90.423.650,- atau 56.14%. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah :

1. Terealisasi Pajak Provinsi Tahun 2016
2. Terealisasi Penyaluran Tunda Salur Pajak Provinsi Tahun 2015
3. Terealisasi Penyaluran Kurang Bayar Pajak Provinsi Tahun 2015

(3) Pendataan dan Penggalian Pajak dan Retribusi Daerah untuk Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong dan Kec. Sri Kuala Lobam

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.124.620.000,- realisasi sebesar Rp.110.189.980,- atau 88.42%. *Output* dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah tersedianya data yang akurat dan mengetahui sumber-sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah.

- 1) Dilaksanakan Pemeriksaan Lapangan Objek Pajak PBB – P2 yang berada di UPT DPPKD Pendataan dan Penagihan Tanjung Uban, terhadap Objek Pajak PBB yang baru didaftarkan, baik yang melalui Kelurahan maupun melalui Kecamatan yang berada dalam wilayah kerja UPT DPPKD Pendataan dan Penagihan Tanjung Uban
- 2) Dilakukan Pemungutan Pajak Daerah setiap bulannya terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran langsung ke Bidang Pendapatan, maupun ke Bank yang telah di tunjuk, setelah dilakukan pemungutan oleh UPT langsung disetorkan ke Kas Daerah melaui Bank Riau Kepri
- 3) Penggalian Pajak Daerah dilakukan untuk mencari Wajib Pajak baru, maupun sumber penerimaan Pajak yang belum tergali.
- 4) Melakukan pengawasan dan penertiban Objek Pajak Reklame berupa pemasangan spanduk/umbul-umbul/baleho yang tidak dibayar pajaknya, maupun terhadap reklame yang terpasang telah habis masa berlakunya namun tidak diperpanjang ataupun dibayar kembali Pajak Reklamennya. Penertiban tersebut dilakukan pada wilayah Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong dan Kecamatan Seri Kuala Lobam.
- 5) Melakukan Pendataan Objek Pajak Reklame Tetap/Objek Pajak Reklame papan yang bertujuan untuk menjangring

semua reklame tetap yang ada agar terdaftar dan dapat ditagih Pajak Reklamenya

6) Penelitian Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan setiap terjadinya transaksi jual beli yang diajukan Wajib Pajak untuk validasi SSPD BPHTB. Pada Tahun 2016, Pajak BPHTB yang telah dilakukan penelitian verifikasi lapangan objek pajak BPHTB oleh UPT DPPKD Tanjung Uban dan telah dibayar pajaknya oleh Wajib Pajak, dengan jumlah penerimaan Pajak BPHTB selama Tahun 2016 sebanyak Rp.1.435.904.411,- yang dilakukan Wajib Pajak di Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban, setelah SSPD BPHTB divalidasi oleh UPT DPPKD Tanjung Uban.

(4) Pendataan dan Penggalian Pajak dan Retribusi untuk Kec. Bintan Timur, Kec. Tambelan, Kec. Bintan Pesisir dan Kec. Mantang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.124.100.000,- realisasi sebesar Rp117.858.160,- atau 94.97%. *Output* yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah:

- Penyampaian SPTDP Pajak Hotel/Restoran/Rumah Makan/Kedai Kopi dan Hiburan
- Penyampaian Surat Teguran Pajak Hotel/Restoran/Rumah Makan/Kedai Kopi dan Hiburan
- Pemungutan Pajak Hotel/Restoran/Rumah Makan/Kedai Kopi dan Hiburan
- Pendataan dan pengawasan Objek Pajak Reklame
- Pendataan Objek Pajak Hotel/Restoran/Rumah Makan/Kedai Kopi Hiburan dan Mineral Bukan Logam
- Pendataan dan Penggalian Objek Pajak Bumi dan Bangunan

(5) **Pendataan dan Penggalian Pajak dan Retribusi Daerah untuk Kec. Gunung Kijang, Kec. Teluk Bintan dan Kec. Toapaya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.125.850.000,- realisasi sebesar Rp125.325.140,- atau 99.58%. *output* dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya data wajib pajak daerah dan potensi penerimaan daerah di Kecamatan Gunung Kijang, Toapaya dan Teluk Bintan, yakni :

Tabel 4.16 : Jumlah Wajib Pajak yang di Tagih UPT Gunung Kijang

No.	Bulan	Jumlah pajak yang dipingut /ditagih UPT Gn.Kijang			
		Kec. Gn. Kijang	Kec. Tl.Bintan	Kec. Toapaya	Jumlah
1	Januari	282.988.243,-	1.749.864,-	350.000,-	285.088.107,-
2	Februari	258.757.976,-	1.945.500,-	2.974.909,-	263.678.385,-
3	Maret	365.778.966,-	1.934.636,-	2.708.455,-	370.422.057,-
4	April	319.634.726,-	2.005.955,-	2.849.091,-	324.489.772,-
5	Mei	396.244.664,-	1.932.955,-	2.891.500,-	401.069.119,-
6	Juni	355.978.723,-	1.267.682,-	2.518.909,-	359.765.314,-
7	Juli	331.143.014,-	1.751.364,-	2.857.727,-	335.752.105,-
8	Agustus	346.729.279,-	1.970.227,-	2.323.182,-	351.022.688,-
9	September	365.771.711,-	1.959.500,-	2.741.955,-	370.473.166,-
10	Oktober	286.798.365,-	2.068.500,-	2.692.864,-	291.559.729,-
11	November	293.900.912,-	2.001.000,-	2.609.273,-	298.511.185,-
12	Desember	323.403.676,-	1.979.500,-	3.171.545,-	328.554.721,-
Jumlah		3.927.130.255,-	22.566.683,-	30.689.410,-	3.980.386.348,-

Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan 2017

Pada Tahun 2016, penggalan pajak yang telah dilakukan berupa :

- Pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak Restoran yang baru sebanyak 13 (tiga belas) Wajib Pajak
- Pengukuhan Wajib Pajak Restoran sebanyak 4 (empat) Objek Pajak Restoran
- Penertiban Pajak Reklame seperti spanduk, baleho billboard dan lain-lain sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) Reklame yang tidak membayar pajak dan sudah habis masa pajaknya
- Observasi/pengedokan terhadap objek pajak Restoran/Rumah Makan sebanyak 2 (dua) objek pajak
- Update/pemutakhiran data pada objek pajak Hotel/Wisma sebanyak 2 (dua) objek pajak
- Pendataan dan Penagihan/Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Tanah Urug)
- Pendataan dan Pemeriksaan Lapangan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan PBB P2 baik data baru maupun pembetulan/mutasi, pemeriksaan lapangan dengan pengambilan foto lokasi objek, letak lokasi, sempadan tanah objek pajak dan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS.

(6) **Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.137.120.000,- realisasi sebesar Rp.134.012.800,- atau 97.73%. *Output* kegiatan ini adalah Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Piutang PBB P2 berlokasi sebagai berikut :

Tabel 4.17 : pemutakhiran piutang pbb p2

NO	KECAMATAN	TARGET 2016	PENCAPAIAN 2016	TARGET 2017
1	Kec. Teluk Sebong	817 OP	735 OP	1.703OP

NO	KECAMATAN	TARGET 2016	PENCAPAIAN 2016	TARGET 2017
2	Kec. Bintan Utara	708 OP	680 OP	1.449 OP
3	Kec. Gunung Kijang	557 OP	876 OP	799 OP
4	Kec. Bintan Timur	854 OP	830 OP	1.736 OP
5	Kec. Toapaya	620 OP	546 OP	1.320 OP
6	Kec. Seri Kuala Lobam	764 OP	791 OP	1.506 OP
7	Kec. Tambelan	149 OP	384 OP	71 OP
8	Kec. Teluk Bintan	542 OP	586 OP	1.047 OP
9	Kec. Mantang	150 OP	438 OP	17 OP
10	Kec. Bintan Pesisir	299 OP	688 OP	-
	JUMLAH	5.390 OP	6.572 OP	9.648 OP

Sumber : DPPKD Kabupaten Bintan 2017

Pemutakhiran PBB P2 tahap pertama di Tahun 2016 sebanyak 5.390 OP terealisasi sebanyak 6.572 OP

(7) **Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD) Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp146.620.000,- realisasi sebesar Rp.141.335.800,- atau 96.40%. *Output* yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah :

- 1) Menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk taat membayar pajak
- 2) Meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap tatacara penyetoran pajak daerah
- 3) Terlaksananya pengawasan penerimaan pajak hotel dan pajak MBLB
- 4) Tersedianya laporan pajak terhutang atas hasil pemeriksaan pajak daerah

(8) **Pemutakhiran Basis Data PBB P2 dan Pemetaan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.729.736.000,- realisasi sebesar Rp717.730.950,- atau 98.35%. *Output* yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah :

1. Peningkatan NJOP di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong dan Kecamatan Toapaya.
2. Peningkatan NJOP dan Ketetapan PBB Objek Khusus / di wilayah pariwisata Lagoi

(9) **Asistensi Simda Pendapatan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.126.632.000,- realisasi sebesar Rp90.558.050,- atau 71.51% *Output* yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah :

1. Tersedianya Database Wajib Pajak
2. Tersedianya Laporan Penerimaan, tunggakan
3. Tersedianya umur piutang

(10) **Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.213.680.000,- realisasi sebesar Rp209.719.887,- atau 98.15% Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah :

1. Tersedianya sarana informasi pajak daerah melalui media lampu Led berjalan (running text)
2. Tersedianya sarana antrian wajib pajak
3. Tersedianya sarana kotak pengaduan dan saran untuk wajib pajak menyampaikan permasalahan tentang pelayanan
4. Tersedianya server untuk penyimpan data Wajib Pajak

(11) **Pencetakan Massal dan Penyampaian SPPT PBB**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.612.405.000,- realisasi sebesar Rp.583.373.400,- atau 95.26%. *Output* yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah :

1. Terlaksananya penyampaian SPPT PBB
2. Tercapainya target penyampaian dan penerimaan PBB

1) Program Manajemen Aset Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.908.030.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.732.767.065,- atau 90,81%. Outcome Meningkatnya pengelolaan manajemen aset daerah

a. Pelaksanaan Program

(1) Penghapusan Barang Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.264.900.000,- realisasi sebesar Rp179.796.280,- atau 67.87% Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Data Barang inventarisasi milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang akan dihapuskan.

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan penghapusan barang daerah adalah :

1. Keputusan Bupati Bintan Nomor 374/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah dari Daftar Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 yang berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bintan di Jalan/Kampung Bintan Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Dusun 2 Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan yang telah di hibahkan kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.
2. Hasil Penilaian / Appresial dari Jasa Konsultan terhadap Asset-asset Milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang berada di Pekanbaru Riau oleh Kantor Konsultan PT. Abata Rencana Karyanusa di Pekanbaru – Riau :
 - Asrama Mahasiswa Putra Putri Segantang Lada di Jl. Air Dingin Gg. Taqwa 6 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau

- Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan di Jl. Cemara No. 5 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau
- Asrama Mahasiswa di Jl. Dwikora No. 15 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau
- Asrama Mahasiswa Putra Segantang Lada di Jl. Elang Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau
- Asrama Mahasiswa Putri Segantang Lada di Jl. Manyar Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau

(2) **Kegiatan Pembinaan kinerja pengurus barang dan penyimpan barang di SKPD**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.275.000.000,- realisasi sebesar Rp.260.763.450,- atau 94.82% Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (38 SKPD).

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Pelaksanaan pembinaan dan penguasaan terhadap kinerja penyimpan dan pengurus barang SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam melakukan penatausahaan, pengamanan, penyimpanan Barang Milik Daerah
- Meningkatkan dan memperbaiki kinerja penyimpan dan pengurus barang untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
- Menghasilkan laporan barang milik daerah yang akurat dan tepat waktu

(3) Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Aset Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.362.550.000,- realisasi sebesar Rp.329.704.100,- atau 90.94% Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (38 SKPD).

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis paket regulasi tentang Barang Milik Daerah dilakukan kepada seluruh pengurus, penyimpan dan Kepala Subbagian Umum SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan serta seluruh aparatur Bidang Asset dengan mendalami Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pengurus dan Penyimpan Barang serta Kasubbag Umum dan Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah menjadi lebih baik.

(4) Kegiatan Pengamanan Asset Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.92.200.000,- realisasi sebesar Rp87.510.900,- atau 94.91% Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah terpasangnya Pemasangan Plank Asset Milik Pemerintah Kabupten Bintan sebanyak 25(dua puluh lima) unit yang berada di:

- Kecamatan Bintan Utara
 - SDN 008 Tanjung Uban
 - SDN 011 Tanjung Uban

- SMPN 12 Tanjung Uban
- SMPN 13 Tanjung Uban
- SMAN 5 Tanjung Uban
- SMKN 1 Tanjung Uban
- Kecamatan Teluk Bintan
 - SDN 001 Teluk Bintan
 - SDN 002 Teluk Bintan
 - SDN 009 Teluk Bintan
 - SMPN 007 Teluk Bintan
 - SMPN 28 Teluk Bintan
 - SMAN 3 Teluk Bintan
- Kecamatan Seri Kuala Lobam
 - SDN 002 Seri Kuala Lobam
 - SDN 006 Seri Kuala Lobam
 - SDN 007 Seri Kuala Lobam
 - SMKN 004 Seri Kuala Lobam
- Kecamatan Gunung Kijang
 - SDN 004 Gunung Kijang
 - SMPN 20 sSatu Atap Gunung Kijang
 - SMKN 003 Gunung Kijang
- Kecamatan Teluk Sebong
 - SDN 009 Teluk Sebong
 - SMPN 10 Teluk Sebong
 - SMAN 4 Teluk Sebong
- Kecamatan Toapaya
 - SMPN 17 Toapaya
- Kecamatan Bintan Timur
 - SDN 006 Bintan Timur
- Kecamatan Mantang
 - SMAN 8 Mantang

(5) **Asuransi Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.455.900.000,- realisasi sebesar Rp446.782.835,- atau 98.00% Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Polis Asuransi oleh pelaksana PT. Asuransi Parolamas terhadap Kendaraan Dinas Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit dan Kendaraan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Bintan 28 (dua puluh delapan) unit.

(6) **Pemeliharaan Aset Daerah** dengan alokasi anggaran Rp.260.000.000,- realisasi sebesar Rp259.302.000,- atau 99.73% Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah memperbaiki kendaraan Dinas agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

(7) **Verifikasi dan Pelaporan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.194.480.000,- realisasi sebesar Rp168.907.500,- atau 86.85% Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah :

- tersedianya data laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan dan laporan Barang Milik Daerah SKPD
- tersedianya Database Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan yang dapat di pertanggungjawabkan

b. **Permasalahan dan Solusi**

1) **Permasalahan**

- a. Untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun sedikit mengalami kendala dalam penyampaian laporan

keuangan diantaranya adalah sistem aplikasi SIMDA akuntansi akrual dan aset mengalami update versinya sehingga informasi yang diberikan angkanya belum fix (tetap)

- b. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berimplikasi pada administrasi pengelolaan Barang Daerah mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan perbaikan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati tentang Barang Milik Daerah
- c. Masih kurangnya kesadaran dari SKPD untuk mengelola anggaran dengan baik, sehingga terjadi penumpukan berkas pencairan di akhir tahun.
- d. Masih belum optimalnya peran Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dalam menyikapi perkembangan kompetensi terutama dalam ilmu dan teknologi dimana Aparatur Sipil Negara dituntut memiliki profesionalisme, memiliki wawasan global, dan mampu berperan demi kemajuan daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2) **Solusi**

- a. Diharapkan seringnya melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi kepada SKPD tentang perkembangan sistem terutama penggunaan aplikasi versi terbaru serta pro aktif Bendahara SKPD.
- b. Hendaknya Aparatur Sipil Negara Tanggap dan Cepat dalam menghadapi perubahan peraturan perundangan – undangan yang terjadi, dijabarkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah agar menjadi acuan dan Pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- c. Melakukan sosialisasi tentang tata cara pencairan dan tertib pelaksanaan anggaran yaitu pencairan, penyerapan sesuai

dengan schedule yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

- d. Dilakukan Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara antara lain :
- e. Menyiapkan seseorang pada suatu saat mampu diserahi tugas yang sesuai.
- f. Memperbaiki kondisi seseorang yang merasa sedang ada kekurangan pada dirinya diharapkan mampu mengemban tugas sebagaimana mestinya.
- g. Mempersiapkan seseorang untuk diberi tugas tertentu yang lebih berat dari tugas yang sedang dikerjakan
- h. Melengkapi seseorang dengan hal-hal yang mungkin timbul disekitar tugasnya, baik yang langsung maupun yang tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugasnya.
- i. Menyesuaikan seseorang kepada tugas yang mengalami perubahan
- j. Menambah keyakinan dan percaya dari kepada seseorang bahwa dia adalah orang yang sesuai dengan tugas yang sedang diembannya.

4.1.9.4. URUSAN KEPEGAWAIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh **Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (BKPPD)** Kabupaten Bintan. Pada Tahun Anggaran 2016 selain melaksanakan Program dan Kegiatan Kelompok Belanja Konversi (rutin) yang terdiri dari 4 program dan 17 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1,318,541,614, dilaksanakan juga Program Dan Kegiatan urusan wajib Kepegawaian dengan melaksanakan 3 program dan 16 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.4,394,046,140, program dan kegiatan tersebut adalah :

1) Program Pendidikan Kedinasan

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1,479,593,140,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1,438,250,009,- atau 97,20%. *Outcome* Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.

a. Pelaksanaan Program

(1) Diklat Prajabatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1,358,369,140 dan realisasi anggaran sebesar Rp.1,322,164,937 atau 97.30%, merupakan kegiatan dengan *output* terlaksananya Diklat Prajabatan dengan target jumlah peserta sebanyak 114 CPNS yang terdiri dari CPNS golongan III sebanyak 39 orang dan golongan II sebanyak 75 orang. Pelaksanaan Diklat Prajabatan untuk CPNS golongan III mengacu pada Perka LAN nomor 15 Tahun 2015 yaitu dilaksanakan selama 37 (tiga puluh tujuh) hari. Sedangkan

untuk CPNS golongan II mengacu pada Perka LAN nomor 16 Tahun 2015 yang dilaksanakan selama 28 hari. Kegiatan Diklat Prajabatan dan mengikuti Diklat Prajabatan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Bintan dengan biaya sendiri. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti Diklat Pim dan Prajabatan.

(2) **Bimtek Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.121,224,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.116,085,072 atau 95.80%, merupakan kegiatan dengan *output* terlaksananya Bimtek Pelayanan Publik dengan target jumlah peserta sebanyak 40 peserta. Bimtek ini diikuti oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Pelaksanaan kegiatan pada Program Pendidikan Kedinasan secara umum tidak ditemui hambatan yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang dirasakan antara lain :

1) **Permasalahan**

- a. Belum tersedianya infrastruktur Balai Diklat yang representatif yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai tempat penyelenggaraan diklat, sehingga pelaksanaan diklat Prajabatan khususnya dan diklat-diklat lainnya pada umumnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian,

Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan harus menggunakan hotel/ penginapan sebagai tempat penginapan/ asrama peserta diklat.

- b. Belum tersedianya tenaga pengajar/widyaiswara yang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang mengikuti ***Training of Fasilitator (ToF)***, sehingga di dalam pelaksanaan Diklat dimaksud sangat bergantung pada widyaiswara yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau dan Lembaga Administrasi Negara serta lembaga lainnya.

2) **Solusi**

- a. Tersedianya infrastruktur Balai Diklat yang representatif yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai tempat penyelenggaraan diklat, sehingga pelaksanaan diklat Prajabatan khususnya dan diklat-diklat lainnya pada umumnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan dapat berjalan efektif dan efisien.
- b. Tersedianya tenaga pengajar/widyaiswara yang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang mengikuti ***Training of Fasilitator (ToF)***, sehingga di dalam pelaksanaan Diklat dimaksud sangat bergantung pada widyaiswara yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau dan Lembaga Administrasi Negara serta lembaga lainnya.

2) **Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bintan** melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1,655,548,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1,561,557,553,- atau 94.30%. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya sistem informasi manajemen kepegawaian

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pelaksanaan Mutasi dan Kepangkatan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1,218,920,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.1,140,265,398 atau 93.50%, merupakan kegiatan dengan *output* jumlah Pegawai yang mengurus kenaikan pangkat dengan target sebanyak 600 PNS, terlaksananya Penyelenggaraan Baperjakat mutasi yaitu sekitar 400 PNS dan terlaksananya seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi sebanyak 34 Jabatan Pimpinan Tinggi. Proses pengurusan kenaikan pangkat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu kenaikan pangkat periode April dan kenaikan pangkat periode Oktober. Target dari kegiatan ini adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Sementara itu, Baperjakat dilaksanakan setiap akan diadakan mutasi baik pejabat maupun pelaksana, untuk waktunya tidak dapat ditentukan dan bersifat rahasia. Rata-rata jumlah frekuensi Baperjakat tiap tahunnya berbeda-beda tergantung dari kondisi dan kebutuhan akan pegawai. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase penempatan aparatur sesuai kompetensinya.

(2) **Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82,000,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.74,635,360 atau 91.00%, merupakan kegiatan dengan *output* jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah dengan target sebanyak 50 PNS. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase penempatan aparatur sesuai kompetensinya.

(3) **Penataan SIMPEG Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73,010,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.71,708,340 atau 98.20%, merupakan kegiatan dengan *output* terlaksananya updating data kepegawaian (PNS dan Honorer) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan target sebanyak 4 dokumen DUK dan Surat Keputusan (SK) PTT/Tenaga Honorer. Kegiatan ini meliputi pemutakhiran (up dating) data-data kepegawaian melalui formulir isian pegawai pada Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang akan dituangkan kedalam Dokumen DUK dan penerbitan SK PTT/Tenaga Honorer. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase penempatan aparatur sesuai kompetensinya.

(4) **Seleksi Calon Praja IPDN dan Taruna STTD**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.66,618,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.62,791,975 atau 94.30%, merupakan kegiatan dengan *output* Jumlah calon Praja IPDN dan Taruna STTD yang lulus seleksi dengan target sebanyak 6 calon Praja IPDN/Taruna STTD. Kegiatan Seleksi Calon Praja IPDN dan Taruna STTD dimaksudkan untuk memfasilitasi para lulusan SLTA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yaitu IPDN dan STTD. Selain itu juga, agar

lulusan SLTA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan lebih mudah melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi, maka pada tahun 2015 ini Pemerintah Kabupaten Bintan membuka peluang dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang ditandai dengan penandatanganan MOU antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan pihak STTD. Adapun peserta seleksi adalah anak-anak lulusan SLTA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Secara fisik kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar 94.30%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase penempatan aparatur sesuai kompetensinya.

(5) **Penyusunan Formasi PNS**

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150,000,000 dan realisasi sebesar Rp.0,-. *Output* kegiatan berupa dokumen formasi PNS. Kegiatan Penyusunan Formasi PNS pada tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan pemerintah tentang penundaan penambahan pegawai ASN sebagaimana disebutkan dalam surat edaran Menteri PAN dan RB Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2015 dan surat edaran Menteri PAN dan RB Nomor B/2631/M.PAN-RB/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal Informasi Mengenai Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran belanja antara lain dengan cara menunda melakukan penerimaan pegawai baru dalam tahun 2016. Berdasarkan kedua alasan tersebut diatas, Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan menyepakati bahwa kegiatan Penyusunan Formasi PNS di Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sehingga

anggaran yang telah disusun tersebut di drop pada Perubahan APBD Tahun 2016. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase penempatan aparatur sesuai kompetensinya.

(6) **Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Honorer Dan PTT**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.215,000,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.212,156,480 atau 98.70%, merupakan kegiatan baru yang dianggarkan pada perubahan anggaran tahun 2016. Kegiatan ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja para tenaga honorer dan PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. *output* dari kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Honorer Dan PTT adalah jumlah Tenaga Honorer dan PTT yang mengikuti uji kompetensi dengan target sebanyak 698 untuk tenaga honorer dan 48 untuk PTT. Kegiatan ini diawali dengan pendaftaran yang ditandai dengan penyampaian surat lamaran , seleksi administrasi dan diakhiri dengan tes tertulis untuk mengetahui kemampuan dasar dari para peserta. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensinya.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Pelaksanaan kegiatan pada Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah terdapat sedikit kendala yaitu berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang sering berubah-ubah, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan khususnya yang berkaitan dengan pengadaan formasi pegawai, pelaksanaan kegiatannya tidak dapat berjalan sesuai rencana.

3) **Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bintan** melalui 8 (delapan) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1,258,905,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1,168,245,276,- atau 92.80%. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya ketepatan penanganan kasus-kasus pegawai dan Meningkatnya kinerja sumber daya aparatur

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pemberian Penghargaan Bagi PNS**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127,232,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.106,163,500 atau 83.30%, merupakan kegiatan dengan *output* terlaksana pemberian penghargaan bagi PNS dengan target sebanyak 120 PNS. Kegiatan ini diikuti oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Penghargaan yang diberikan berupa penghargaan Satya Lancana Karya Satya X Tahun, XX Tahun, XXX Tahun. Hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan penghargaan bagi PNS yaitu sebanyak 120 PNS. Secara fisik kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS telah terealisasi 100% dengan penerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya sebanyak 289 PNS. Adapun serapan anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar 93.65%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja indeks kepuasan aparatur.

(2) **Penanganan Kasus-Kasus Disiplin**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.117,633,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.106,434,300 atau 90.50%, merupakan kegiatan dengan *output* terlaksananya penanganan kasus-kasus pegawai dengan target penyelesaian sebanyak 20 LHP Kasus Disiplin dan 30 LHP Kasus

Perceraian. Kasus-kasus pegawai yang ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Bintan adalah kasus-kasus disiplin dan kasus-kasus perceraian. Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya efektifitas penanganan kasus-kasus pegawai yaitu sebanyak 50 kasus. Berdasarkan hasil laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal. Pada tahun 2016 ini jumlah kasus yang ditangani sebanyak 22 kasus yang terdiri dari 10 kasus perceraian dan 12 kasus disiplin. Secara fisik kegiatan ini terealisasi secara optimal (100%) dengan serapan anggaran sebesar 90.50%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase penanganan kasus-kasus disiplin aparatur.

(3) **Pembinaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas**

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.602,946,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.594,162,746 atau 98.50%, merupakan kegiatan dengan *output* terlaksananya pegawai mengikuti tugas belajar dan ikatan dinas dengan target sebanyak 100 orang. Pada kegiatan Pembinaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas, Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan diberikan dukungan anggaran selama yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar dan ikatan dinas dengan mengajukan proposal terlebih dahulu. Besarnya dukungan anggaran tersebut berbeda sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikutinya dan kemampuan anggaran dari Pemerintah Daerah. Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi pegawai yang mengikuti tugas belajar dan ikatan dinas yaitu sebanyak 100 orang. Dari hasil laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan ini secara fisik telah terlaksana 100%, meskipun realisasi hasilnya hanya 19 orang yang mendapat dukungan

anggaran dengan rincian 14 orang peserta tugas belajar dan 5 orang yang sedang dalam tugas akhir. Rendahnya capaian pada tahun 2016 disebabkan karena peserta izin belajar banyak yang belum menyelesaikan tugas akhir, sehingga target yang telah direncanakan yaitu sebanyak 87 orang beasiswa tugas akhir, hanya 5 orang yang mengajukan beasiswa tugas akhir. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja indeks kepuasan aparatur.

(4) Kegiatan Pengurusan Pensiun Pegawai

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.180,178,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.142,015,730 (78.80%), merupakan kegiatan dengan *output* terlaksananya pengurusan pensiun PNS dengan target sebanyak 40 orang dan terlaksananya pengurusan pemberhentian tenaga honorer daerah dengan target sebanyak 10 orang. Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil berdasarkan dengan surat edaran Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang Batas Usia Pensiun adalah 58 Tahun. Sementara itu, pengurusan pemberhentian tenaga honorer daerah berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Tenaga Honorer Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, tenaga honorer yang diberhentikan karena telah mencapai usia 56 tahun diberikan uang penghargaan sesuai masa kerja, sedangkan tenaga honorer yang meninggal selain diberikan uang penghargaan sesuai masa kerjanya juga diberikan uang duka. Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan pensiun PNS yaitu sebanyak 40 orang dan meningkatnya pelayanan pemberhentian tenaga honorer daerah yaitu sebanyak 10 orang. Berdasarkan hasil dari laporan kemajuan program dan

kegiatan, kegiatan pengurusan pensiun ini telah dilaksanakan dengan baik. Realisasi dari pengurusan pensiun ini adalah 75 orang yang terdiri dari 71 PNS pensiun dan 4 tenaga honorer daerah yang yang berhenti karena telah memasuki batas usia kerja. Secara fisik kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan serapan anggaran 78.80%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase kelengkapan administrasi pegawai.

(5) **Kegiatan Pengurusan Kartu Pegawai**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64,846,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.59,969,300 atau 92.50%, merupakan kegiatan dengan *output* terlaksananya pengurusan kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dengan target sebanyak 250 orang. Kartu Pegawai adalah Kartu identitas yang diberikan kepada mereka yang telah berstatus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Baik itu pegawai Pusat ataupun Pegawai Daerah. Adapun tujuan dari ditetapkannya Kartu Pegawai oleh pemerintah adalah untuk memberikan jaminan kepada pemegangnya bahwa ia adalah benar-benar seorang PNS dan sekaligus data diri. Kartu Pegawai berlaku selama yang bersangkutan menjadi PNS dan apabila yang bersangkutan berhenti menjadi PNS, maka Kartu pegawainya dengan sendirinya tidak akan berlaku lagi. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE). KPE ini merupakan kartu identitas PNS yang memiliki fungsi sebagai kartu identitas, kartu Askes, kartu TASPEN, kartu Bapertarum dan kartu debit (ATM). Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya efektifitas pengurusan kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik yaitu sebanyak 250 orang. Berdasarkan laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan pengurusan kartu pegawai telah dilaksanakan dengan baik. Dari target yang

ditetapkan, pengelolaan kartu pegawai terealisasi 202 orang/kartu. Secara fisik kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar 92.50%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase kelengkapan administrasi kepegawaian.

(6) **Pengurusan Karis dan Karsu PNS**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51,990,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.51,223,500 atau 98.50%, merupakan kegiatan dengan *output* terlaksananya pengurusan kartu suami dan kartu isteri PNS dengan target sebanyak 60 orang. Kartu istri/ kartu suami (karis/karsu) adalah kartu identitas istri/suami PNS yang pemegangnya adalah istri/suami yang sah. Apabila istri/suami bercerai maka karis/karsu tidak berlaku lagi, namun jika rujuk kembali maka karis/karsu berlaku kembali. Hasil (*outcome*) yang diharapkan adalah meningkatnya efektifitas pengurusan kartu suami dan kartu isteri PNS sebanyak 60 orang. Berdasarkan laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan pengurusan karis dan karsu pegawai telah terealisasi 100%. Dari target yang ditetapkan, telah terealisasi sebanyak 186 kartu yang terdiri dari 101 kartu suami dan 85 kartu isteri. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran yang meningkat dari para PNS terhadap fungsi karis dan karsu, sehingga berkas usulan pengurusan karis dan karsu cukup meningkat secara signifikan dari target yang ditetapkan. Kegiatan pengurusan Karis dan Karsu PNS menyerap anggaran sebesar 98.50%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase kelengkapan administrasi kepegawaian.

(7) **Pengambilan Sumpah PNS**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48,560,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.46,666,300

atau 96.10%, merupakan kegiatan dengan *output* terlaksananya penyelenggaraan pengambilan sumpah PNS dengan target sebanyak 200 orang. Pengambilan Sumpah PNS merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan dan dinyatakan seratus persen menjadi PNS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah PNS / Janji PNS. Hasil (outcome) yang diharapkan adalah terpenuhinya kewajiban pengangkatan sumpah PNS bagi 200 PNS. Berdasarkan laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan pengambilan sumpah PNS telah terealisasi 100% yang diikuti sebanyak 516 PNS. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 96.10%. Kegiatan Pengambilan Sumpah PNS mendukung capaian indikator kinerja persentase kelengkapan administrasi kepegawaian.

(8) Evaluasi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65,520,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.61,609,900 atau 94.00%, merupakan kegiatan dengan *output* terlaksananya evaluasi penyusunan sasaran kerja pegawai bagi kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan target sebanyak 45 SKP. Hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya akurasi penyusunan SKP bagi kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan evaluasi penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) telah terealisasi 100%. Hal ini ditunjukkan dengan 45 SKP yang telah dilakukan verifikasi. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 94.00%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase kelengkapan administrasi kepegawaian.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Pelaksanaan kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengembangan tidak terdapat permasalahan dan kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4.1.9.5. PERSANDIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh **Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan**, Pada Tahun Anggaran 2016 selain melaksanakan Program dan Kegiatan Kelompok Belanja Konversi (rutin) juga dilaksanakan kegiatan utama yang terdiri dari 3 program dan 9 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.383.261.440,- dan realisasi sebesar Rp. 1.327.268.327 atau 95,95%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1) Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal

Program ini dilaksanakan oleh **Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan** dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.559.719.840,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.514.389.540,- atau 91,90%. *Outcome* program ini adalah pengendalian internal dan eksternal kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

a. Pelaksanaan Program

(1) Pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan internal secara berkala

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.425.719.840,- dan realisasi sebesar Rp.385.816.200,- atau 90,63%. *Output* dari kegiatan ini adalah Pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan internal secara berkala merupakan kegiatan reguler pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan terhadap pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan dengan target sebanyak 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Namun berdasarkan skala prioritas dalam pemeriksaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan hanya melakukan pemeriksaan kepada 32 SKPD dari 37 SKPD, atau 86,48%. Hal ini dilakukan dikarenakan

tingkat resiko pada SKPD yang tidak dilakukan pemeriksaan dalam kategori tingkat resiko rendah. Adapun SKPD yang dimaksud adalah :

- Kecamatan Teluk Sebong;
- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan;
- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kabupaten Bintan;
- Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bintan;
- BPP & Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan.

(2) **Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.134.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.128.573.340,- atau 95,95%, *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemutakhiran data dan tindak lanjut hasil pengawasan yaitu dengan melakukan updating data temuan terhadap data yang sudah ditindaklanjuti. Data temuan tersebut mencakup data Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut bertujuan untuk melakukan updating data temuan terhadap data yang sudah ditindaklanjuti. Data temuan tersebut mencakup data Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Pemutakhiran data tindak lanjut dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun atau per semester.

Tabel 4.18 : Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Terhadap Kabupaten Bintan

No	Tahun Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi	Sesuai	Belum Sesuai	Belum di TL	Tidak Dapat di TL	%
1.	2016	13	23	0	1	22	0	0

2.	2015	19	53	9	21	23	0	16.98
3.	2014	18	40	22	16	0	0	55
4.	2013	36	51	42	9	0	0	82.35
5.	2012	22	34	30	4	0	0	88.24
6.	2011	42	105	104	1	0	0	99.05
7.	2010	33	60	56	4	0	0	93.33
8.	2009	30	45	41	4	0	0	91.11
9.	2008	27	44	44	0	0	0	100
10.	2007	14	29	29	0	0	0	100
J U M L A H		254	484	377	60	47	0	77.89

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017

Dari Tabel II.7 terlihat bahwa dari temuan sebanyak 254 temuan, 484 rekomendasi, telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi atau selesai sebanyak 377 rekomendasi, dalam proses atau belum sesuai sebanyak 60 rekomendasi, dengan persentase capaian sebesar 77,89%.

Tabel 4.19 : Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah dari Tahun 2006-2015

No	Tahun Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi	Adm	Keuangan		Ditarik	Sisa	Selesai	Dalam Proses	Belum	%
1.	2006	178	193	156	37	1.092.499.971	376.070.088	716.429.883	190	3	0	98.45
2.	2007	240	267	240	27	443.449.848	401.176.348	42.273.500	260	7	0	97.38
3.	2008	251	287	256	31	679.703.388	665.504.734	14.198.654	283	4	0	98.61
4.	2009	308	384	343	41	453.340.824	444.120.862	9.219.962	376	8	0	97.92
5.	2010	356	427	373	54	947.460.725	591.966.340	355.494.385	382	45	0	89.46
6.	2011	248	297	251	46	827.828.099	337.826.113	490.001.986	278	19	0	93.60
7.	2012	170	181	161	20	109.916.323	66.141.906	43.774.417	170	11	0	93.92
8.	2013	130	158	134	24	49.587.553	35.586.694	14.000.859	125	33	0	79.11
9.	2014	113	130	100	23	180.725.306	34.445.386	146.279.920	122	8	0	99.19
10.	2015	79	116	113	3	4.642.066	3.045.000	4.642.066	59	23	34	67.05
J U M L A H		2079	2440	2127	306	4.789.457.768	3.042.620.091	1.746.837.677	2245	161	34	92.01

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bintan Tahun 2017

Dari Tabel III.2 terlihat bahwa dari temuan sebanyak 2079 temuan, 2440 rekomendasi, 2127 bersifat administrasi, 306 bersifat keuangan, telah ditindaklanjuti atau selesai sebanyak 2245 temuan, dalam proses sebanyak 161 temuan, dengan persentase capaian sebesar 92,01 %.

- Persentase rekomendasi temuan eksternal (BPK) yang ditindak lanjuti Target Tahun 2016 sebesar 90% dan capaian Tahun 2016 adalah sebesar 77,89%.
- Persentase rekomendasi temuan internal yang ditindak lanjuti. Target Tahun 2016 sebesar 90% dan capaian Tahun 2016 adalah sebesar 92,01%.

b. **Permasalahan dan Solusi**

1) **Permasalahan**

- a. Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK RI semakin bertambah yang merupakan jumlah akumulasi setiap tahunnya, disamping itu, SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI belum dilaksanakan secara tepat waktu.
- b. Masih kurang efektifnya SKPD dalam menagih kepada pihak ketiga atas temuan kerugian negara/daerah.
- c. Dalam hal ini objek pemeriksaan (SKPD) telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan baik, namun masih ada SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan belum sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
- d. Kurang tanggapnya SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.

2) **Solusi**

- a. Bupati Bintan memberikan ketegasan (*rewards and punishment*) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal.

- b. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 1 selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

2) **Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah**

Program ini dilaksanakan oleh **Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan** dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.585.141.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.577.151.092,- atau 98,63%. *Outcome* program ini adalah meningkatnya Mutu Laporan Keuangan Pemerintahan kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Kegiatan Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.119.440.000,- dan realisasi sebesar Rp.118.127.630,- atau 98,90%. *Output* dari kegiatan ini adalah Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 33 ayat 3 diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reuiu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuan reuiu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan

standar akuntansi pemerintahan. Pelaksanaan reviu dilakukan terhadap laporan keuangan 38 (tiga puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

(2) **Kegiatan Evaluasi Pengawasan Pembangunan Fisik**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.141.472.000,- dan realisasi sebesar Rp.136.353.127,- atau 96,38%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya evaluasi pengawasan pembangunan fisik dilakukan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang berada pada 10 Kecamatan. Dimana dilakukan evaluasi pengawasan/pemeriksaan sebanyak 226 paket pekerjaan dengan persentase 100% selesai (226 paket). Lihat Tabel II.1 berikut :

Tabel 4.20 : Jumlah Paket Pembangunan Fisik Tahun Anggaran 2016

No	Wilayah	Jumlah Paket	Keterangan
1.	Kecamatan Bintan Timur		
	• Dinas PU	46	selesai
	• Dinas Perhubungan	4	selesai
	• Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman	1	selesai
	• Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	3	selesai
2.	Kecamatan Bintan Pesisir		
	• Dinas PU	12	selesai

	• Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman	2	selesai
3.	Kecamatan Mantang		
	• Dinas PU	3	selesai
	• Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman	1	selesai
4.	Kecamatan Tambelan		
	• Dinas PU	10	selesai
5.	Kecamatan Gunung Kijang		
	• Dinas PU	18	selesai
	• Dinas Perhubungan	2	selesai
	• Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman	1	selesai
	• Dinas Kesehatan	1	selesai
	• Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	selesai
6.	Kecamatan Seri Kuala Lobam		
	• Dinas PU	11	selesai
	• Dinas Perhubungan	1	selesai
	• Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman	3	selesai

	• Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	selesai
7.	Kecamatan Toapaya		selesai
	• Dinas PU	20	selesai
	• Dinas Perhubungan	3	selesai
	• Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman	4	selesai
8.	Kecamatan Teluk Sebong		
	• Dinas PU	13	selesai
	• Dinas Perhubungan	3	selesai
	• Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	selesai
9.	Kecamatan Bintan Utara		
	• Dinas PU	27	selesai
	• Dinas Perhubungan	2	selesai
	• Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman	1	selesai
	• Dinas Kesehatan	2	selesai
	• Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	5	selesai
10.	Kecamatan Teluk Bintan		

	• Dinas PU	14	selesai
	• Dinas Perhubungan	3	selesai
	• Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman	5	selesai
	• Dinas Kesehatan	1	selesai
	• Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	selesai
Jumlah		226	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bintan Tahun 2017

(3) **Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.105.252.600,- dan realisasi sebesar Rp.104.932.190,- atau 99,70%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengawasan dana BOS dilakukan terhadap penerima dana BOS sebanyak 124 sekolah, dengan rincian 96 Sekolah Dasar, 27 Sekolah Menengah Pertama, dan 1 (satu) TKN Pembina, yang berada pada 10 Kecamatan. Lihat Tabel II.2 berikut :

Tabel 4.21 Lokasi dan Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Tahun Anggaran 2016

No	Lokasi Wilayah Sekolah	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS			Keterangan
		TK	SD	SMP	
1	Kecamatan Bintan Timur		18	5	SDN 001, SDN 018, SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 26 Satu Atap
2	Kecamtan Bintan Utara	1	9	3	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 007, SDN 008, SDN 009,

No	Lokasi Wilayah Sekolah	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS			Keterangan
		TK	SD	SMP	
					SMPN 11, SMPN 12, SMPN 13, TKN Pembina Bintang Utara
3	Kecamatan Teluk Sebung		9	4	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 007, SDN 008, SDN 009 SMPN 8, SMPN 9, SMPN 10, SMPN 24 Bintang
4	Kec. Gunung Kijang		8	3	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 007, SDN 008, SMPN 5 Bintang, SMPN 20 Satu Atap, SMPN 27 Satu Atap
5	Kecamatan Teluk Bintang		14	3	SDN 001 s.d. SDN 014 SMPN 6, SMPN 7 Bintang, SMPN 21 Satu Atap
6	Kecamatan Tambelan		9	1	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 007 SDN 006 Kelas jauh, SDN 007 Kelas Jauh
7	Kec. Seri Kuala Lobam		6	2	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006 SMPN 15, SMPN 16 Bintang
8	Kecamatan Toapaya		6	1	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SMPN 17 Bintang
9	Kec. Bintang Pesisir		7	3	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 005, SDN 006, SDN 004 Kelas Jauh, SMPN 18, SMPN 19, SMPN 22 SATAP Mapur)
10	Kecamatan Mantang		10	2	SDN 001, SDN 002, SDN 003, SDN 004, SDN 003 Kelas jauh P.Alang, SDN 003 Belakang Sidi, SDN 004 Telang Besar, SDN 004 Telang Kecil, SDN 004 Selat limau, SDN

No	Lokasi Wilayah Sekolah	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS			Keterangan
		TK	SD	SMP	
					004 Pulau Sirai, SMP SATAP 23 Mantang, SMP 23 SATAP Selat Limau

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bintan Tahun 2017

(4) Pengawasan Dana ADD dan DAK Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.156.577.000,- dan realisasi sebesar Rp.156.254.300,-atau 99,79%. *Output* dari kegiatan ini adalah Pengawasan Dana ADD dan DAK Desa Kelurahan bertujuan agar tercapainya Pengelolaan Dana ADD yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 11 bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pengawasan ini dilakukan pada desa-desa yang berada di 10 (sepuluh) Kecamatan di wilayah Pemerintah Kabupaten Bintan.

(5) Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.400.000,- dan realisasi sebesar Rp.61.483.845,-atau 98,53%. Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan merupakan satu kegiatan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat

menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Pihak yang melaksanakan reviu Laporan kinerja adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan, dalam hal ini harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau tim yang dibentuk untuk itu. Waktu pelaksanaan reviu mencakup tahapan reviu laporan kinerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB. Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan, dalam hal ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau tim yang dibentuk untuk mereviu, telah melakukan reviu terhadap Laporan kinerja Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan yang merupakan kompilasi dari 38 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

- **Persentase SKPD yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan.**

Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dapat dilihat melalui data berikut :

- Sesuai Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 disebutkan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara luas dikoordinasikan oleh Menteri dan untuk daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Wakil Bupati / Wakil Walikota. Pencapaian SKPD yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan, dapat terlihat melalui Hasil Tindak Lanjut hasil Pengawasan Eksternal (BPK-RI) (Tabel II.7) dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah (Tabel II.8), serta Hasil evaluasi SAKIP terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.22 : Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016

No	Nama SKPD	Hasil Penilaian	Kategori
1	Dinas Sosial	40.36	C
2	Bappeda	64.05	B
3	Dinas Kesehatan	79.62	BB
4	Dinas Kelautan Dan Perikanan	60.48	B
5	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD)	61.74	B

No	Nama SKPD	Hasil Penilaian	Kategori
6	Satpol PP	44.99	C
7	Dinas Pekerjaan Umum	79.72	BB
8	Dinas Pertambangan dan Energi	69.35	B
9	Badan Lingkungan Hidup	66.29	B
10	Dinas Perhubungan	48.90	C
	Jumlah Kumulatif	61.55	B

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bintan Tahun 2017

- b. Dari data tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar **77,15%** (61,55% + 92.01% + 77,89%)

b. **Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah, semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

3) **Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur**

Program ini dilaksanakan oleh **Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan** dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.238.400.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.235.727.695,- atau 98,88%. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Mutu Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- **Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori CC.** Target Tahun 2016 sebanyak 10 (sepuluh) SKPD dan capaian Tahun 2016 adalah sebanyak 10 (sepuluh) dengan kategori "B".
- **Jumlah Pegawai Golongan (III/a) keatas yang membuat LP2P Target Tahun 2016 sebesar 2.040 Pegawai yang melaporkan LP2P,** dan capaian Tahun 2016 adalah sebesar 2.136 pegawai yang melaporkan LP2P. Dalam mencapai indikator sasaran ini, Inspektorat Daerah telah melakukan asistensi tentang Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi ke SKPD di lingkungan Kabupaten Bintan.

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Evaluasi dan Pembinaan LAKIP SKPD tahun 2016**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.113.400.000,- dan realisasi sebesar Rp.111.593.795,-atau 98,41%. *Output* dari kegiatan ini adalah evaluasi dan Pembinaan LAKIP SKPD Tahun 2016 dilaksanakan dengan melakukan asistensi yang difasilitasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan diambil sampel 10 (sepuluh) institusi yaitu Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD), Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;

2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP dilakukan melalui :

a. Evaluasi atas komponen SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

- 1) Unit kerja/SKPD dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil;
- 2) Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
- 3) Pengungkapan informasi pencapaian kinerja;
- 4) Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;
- 5) Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
- 6) Capaian kinerja utama dari masing-masing Instansi pemerintah/unit kerja/SKPD;
- 7) Tingkat implementasi SAKIP instansi pemerintah/unit kerja/SKPD;
- 8) Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

b. Penilaian dan Penyimpulan

- 1) Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
- 2) Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
 - a). Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu:
 - (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria.
 - b). Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut :

Tabel 4.23 : Komponen Penilaian SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Sub Komponen
a.	Perencanaan Kinerja	30	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
b.	Pengukuran Kinerja	25	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
c.	Pelaporan Kinerja	15	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
d.	Evaluasi Kinerja	10	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
e.	Capaian Kinerja	20	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)

		b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
		c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
Total	100	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bintan Tahun 2017

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem AKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya. Penilaian atas butir 5a, b dan c didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja. Dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan melalui tahapan Survei Pendahuluan dan Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Survei pendahuluan dilaksanakan untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan/unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan evaluasi implementasi terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Setelah melaksanakan tahapan-tahapan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 4.24 : Kategori dan Penilaian Angka

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan,
2	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 - 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bintan Tahun 2017

Hasil evaluasi SAKIP terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2016, lihat data sebagai berikut :

Tabel 4.25 : Hasil evaluasi SAKIP terhadap SKPD dan Kategori Penilaian

No	Nama SKPD	Kategori
1	Dinas Sosial Kabupaten Bintan	C
2	Bappeda	B
3	Dinas Kesehatan	BB
4	Dinas Kelautan Dan Perikanan	B
5	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD)	B
6	Satpol PP	C
7	Dinas Pekerjaan Umum	BB
8	Dinas Pertambangan dan Energi	B
9	Badan Lingkungan Hidup	B
10	Dinas Perhubungan	C

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bintan Tahun 2017

Sedangkan Pengelolaan LP2P bertujuan agar setiap pelaporan pajak aparatur pemerintah dilaksanakan tertib. Hasil dari kegiatan ini terwujudnya azas akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan LP2P dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.125.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.124.133.900,- atau 99,31%. Lihat Tabel II.6 berikut :

Tabel 4.26 Jumlah PNS yang melaporkan LP2P

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV/d	1	Selesai
2	IV/c	30	Selesai
3	IV/b	52	Selesai
4	IV/a	410	Selesai
5	III/d	309	Selesai
6	III/c	387	Selesai

7	III/b	475	Selesai
8	III/a	472	Selesai
Jumlah		2.136	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bintan Tahun 2017

b. Pelaksanaan Program

1) Permasalahan

- a. Masih banyak penetapan indikator kinerja yang sulit diukur, IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
- b. Sebagian indikator kinerja belum didukung oleh data yang informatif dan memadai, andal, serta akurat, yang mengarah pada pencapaian sasaran yang diinginkan.
- c. Sebagian angka realisasi dari indikator kinerja belum dijelaskan secara rinci dari mana perhitungannya, sehingga menyulitkan dalam menelusuri angkanya. Dalam penyajian Laporan Kinerja (LKj) disarankan untuk mempergunakan hanya realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan, jangan menggunakan angka yang tidak dapat ditelusuri dan tidak andal, serta lemah akurasi.
- d. Angka realisasi dari indikator kinerja yang disajikan di dalam Laporan Kinerja (LKj) disarankan untuk lebih banyak dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya, dan upayakan untuk melakukan perbandingan dengan Kab/Kota lain di Provinsi Kepulauan Riau, serta berikan analisis yang memungkinkan.
- e. Masih ada pegawai negeri sipil yang tidak membuat LP2P;
- f. Masih ada pegawai negeri sipil yang terlambat menyampaikan LP2P ke Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.

2) **Solusi**

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti saran dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
- b. Mengumpulkan data yang informatif dan memadai, andal, serta akurat, yang mengarah pada pencapaian sasaran yang diinginkan.
- c. Memanfaatkan IKU di dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
- d. Memperkuat analisis data yang diberikan/disajikan di dalam Laporan Kinerja.
- e. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan ketegasan (rewards and punishment) kepada bawahannya agar wajib membuat dan menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) ke Inspektorat Daerah Kbabupaten Bintan.

4.1.10.URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keenam** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa** adalah sebagai berikut :

1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan pada tahun 2016 mencapai 76,68% dari target 55%. Pencapaian angka ini lebih baik dari target dan dibanding tahun sebelumnya. Ada berapa indikator yang menentukan terjadi kenaikan tingkat partisipasi masyarakat desa diantaranya :

- a. Jumlah kehadiran masyarakat desa dalam setiap musyawarah desa dari undangan yang disebar kehadirannya di atas 70%.
- b. Jumlah inisiatif penyampaian usulan program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat cukup banyak dan variatif (tidak terfokus pada pembangunan fisik saja) .
- c. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan secara swakelola cukup banyak ,bahkan ada swadaya masyarakat/ gotong royong dalam bentuk tenaga, material bahan untuk mendukung kegiatan tersebut di beberapa desa .
- d. Partisipasi masyarakat terhadap Tentara Manunggal Masuk Desa juga tinggi.
- e. Partisipasi dalam teknologi tepat guna setiap tahun ada dari sekolah sekolah.
- f. Dan partisipasi dalam kegiatan lomba desa

2. Persentase Kenaikan PADes

Persentase Kenaikan PADes terhadap DAU Desa pada tahun 2016 adalah sebesar 2 % dari target 10 % yang ditargetkan. atau sebesar 20 % dari target tahun 2016 karena Kenaikan Pendapatan Asli Desa tahun 2016 ditargetkan ada penerimaan desa sekitar 10% dari pagu ADD tahun 2016 atau $10\% \times (41.378.579.399 - 2.896.500.000)$ atau $10\% \times 38.482.079.399 = \text{Rp.}3.848.207.940,-$ sehingga realisasi tahun 2016 penerimaan PADes dari beberapa desa yang sudah dilaporkan sekitar Rp.77.800.000 atau sekitar 0,20% dari

ADD tahun 2016 yang disalurkan. Dibandingkan tahun sebelumnya presentase Kenaikan PADes ini berkurang cukup signifikan.

3. **Persentase Desa yang menyampaikan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku** tahun 2016 tercatat telah mencapai **76%**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- 1) **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan** melalui 5 (lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.4.023.132.170,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.947.979.476,- atau 98,13%. *Outcome* program ini untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas, termasuk didalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. **Pelaksanaan Program**

- (1) **Pemenuhan Kebutuhan Pokok Keluarga Miskin (RASKIN)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.506.322.444,-. terealisasi sebesar Rp.3.466.061.017,- atau 98,85%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya pendistribusian Program Beras Raskin. Sedangkan hasil (outcomes) dari kegiatan ini adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui program raskin. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat miskin di Kabupaten Bintan.

(2) **Lomba Desa dan Kelurahan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.131.062.690,-. terealisasi sebesar Rp.100.679.576,- atau 76,82%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya lomba desa/kelurahan. Sedangkan hasil (outcomes) dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas aparat desa/kelurahan. Sasaran dari kegiatan ini adalah SDM aparat desa kelurahan di Kabupaten Bintan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bintan telah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk menunjang program/kegiatan pada bidang Pemerintahan desa dan kelurahan, khususnya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemerintahan Desa/Kelurahan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bintan dimana kegiatan ini telah berjalan sejak tahun 2009 hingga sekarang. Peserta perlombaan yakni desa dan kelurahan yang meraih predikat juara I pada tingkat kecamatan, sehingga desa dan kelurahan tersebut diperbolehkan mewakili Kecamatan dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bintan.

Dari 10 kecamatan ada 4 Desa yang nilai persentase pengisian profil desa dan kelurahannya tinggi hampir dan mencapai 80% sebagai syarat utama lomba adalah :

- a. Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir
- b. Desa Numbing Kecamatan Bintan Pesisir
- c. Desa Pengujan Kecamatan Teluk Bintan
- d. Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam .

Setelah dilakukan penilaian secara administrasi sesuai instrumen/ indikator yang ada di Permendagri 81 Tahun 2015 antara lain :

- a. Evaluasi bidang pemerintahan desa dan kelurahan
- b. Evaluasi bidang kewilayahan
- c. Evaluasi bidang kemasyarakatan meliputi :
 - 1) Partisipasi masyarakat
 - 2) Lembaga kemasyarakatan
 - 3) Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
 - 4) Keamanan dan ketertiban
 - 5) Pendidikan
 - 6) Kesehatan
 - 7) Ekonomi
 - 8) Penanggulangan kemiskinan
 - 9) Peningkatan kapasitas masyarakat.

Pemenang lomba desa tingkat kabupaten Bintan tahun 2016 adalah :

- Juara I Desa Busung
- Juara II Desa Numbing
- Juara III Desa Pengujan

Setelah dilakukan penilaian lomba desa pada tingkat Propinsi, Kabupaten Bintan (Desa Busung memperoleh Juara II.

(3) **Pembinaan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.954.211,-. terealisasi sebesar Rp.158.996.380,- atau 98,78 %. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya gelar TTG Provinsi dan Nasional. Sedangkan hasil (outcomes) dari kegiatan ini adalah terwujudnya masyarakat yang terampil dan mampu. Sasaran dari kegiatan ini adalah anggota Posyantek, SMU/SMK dan masyarakat di Kabupaten Bintan. Pelaksanaan

TTG berdasarkan permendagri Nomor 20 tahun 2010 tentang pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan TTG, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 1998 tentang Operasional Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna.

(4) **Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.107.023.197,-. terealisasi sebesar Rp.106.709.055,- atau 99,71%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan 36 desa se-Kabupaten Bintan. Sedangkan hasil (outcomes) dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan partisipasi. Sasaran dari kegiatan ini adalah anggota 36 desa di Kabupaten Bintan.

(5) **Penyusunan Kebijakan Teknis Dana Desa**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.769.628,-. terealisasi sebesar Rp.42.520.810,- atau 99,42 %. *Output* kegiatan ini adalah tersedianya peraturan bupati. Sedangkan hasil (outcomes) dari kegiatan ini adalah tersedianya kebijakan pengelola dana desa. Sasaran dari kegiatan ini adalah 8 peraturan bupati di Kabupaten Bintan. Adapun beberapa kebijakan yang wajib ada sesuai Peraturan Pemerintah wajib ada antara lain :

1. Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 tahun 2015 tentang Tatacara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016.
2. Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 tahun 2015 tentang Tatacara pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016
3. Peraturan Bupati Bintan nomor 36 tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan besaran Penghasilan Tetap dan

tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bintan.

4. Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 tahun 2015 tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Bintan .
5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 38 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa.
6. Peraturan Bupati Bintan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bintan no 38 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
7. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2016 tentang pengadaan barang dan jasa.
8. Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 536/XII/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Bintan.
9. Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 537/XII/2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Bintan.
10. Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor tahun 2016 tentang Perubahan Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Bintan.

(6) Pelatihan Penatausahaan Keuangan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,-. Terealisasi sebesar Rp.73.012.638,- atau 97,35 %. *Output* kegiatan ini adalah meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aparatur desa dalam

penatausahaan keuangan desa. Sedangkan hasil (outcomes) dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aparatur desa dalam penatausahaan keuangan desa. Sasaran dari kegiatan ini adalah aparatur desa di Kabupaten Bintan terdiri dari Kepala desa, Sekdes, Camat, Kasi PMD dan Bendahara desa.

Selain itu juga telah dilakukan pelatihan dengan narasumbernya dari Kabupaten Bintan dan BPKP antara lain :

1. Pelatihan Penyusunan anggaran dan kebijakan Dana Desa oleh BPKP dengan sasaran 36 orang Kades, 36 orang Sekdes dan 36 orang BPD.
2. Pelatihan penatausahaan keuangan dan penggunaan dana desa oleh Kementerian Keuangan dengan sasaran 36 orang Kepala Desa, 36 orang Sekretaris Desa, 36 orang Bendahara Desa.
3. Pelatihan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan dana APBDesa masing masing desa bekerjasama dengan PT Icon Mandiri dan BPKP dengan peserta 75 orang yang berasal dari Kepala desa dan perangkat dan LPM yang menjadi UPK di Desa.
4. Pelatihan Siskeudes (Sistem Aplikasi Keuangan Desa) yang dilatih oleh BPKP untuk 36 orang Kepala Urusan Keuangan Desa, 36 orang Kaur Perencana dan 36 orang Bendahara Desa. Dengan jumlah 108 orang .
5. Pelatihan Siskeudes (Sistem Aplikasi Keuangan Desa) yang dilatih oleh BPMPKB Bidang PMD untuk 18 orang dengan sasaran 9 Kepala Seksi PMD Kecamatan dan 9 orang Staf kasi PMD.
6. Pelatihan pengelolaan keuangan desa dengan narasumber dari Tenaga Ahli Kabupaten dan BPMPKB Kab Bintan dengan sasaran Kepala Urusan Keuangan Desa sebanyak

36 desa dan Bendahara Desa sebanyak 36 orang dengan total 72 orang.

Selama tahun 2016 telah terlatih 489 orang unsur BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, melalui kegiatan yang tidak didanai dari APBD Kabupaten Bintan.

Capaian kinerja tahun 2016 dapat dilihat melalui indikator berikut :

1. **Persentase Pertumbuhan Pendapatan Desa terhadap DAU Desa**

Persentase Pertumbuhan Pendapatan Desa terhadap DAU Desa pada tahun 2016 adalah sebesar 10% dari target 20%. Pencapaian ini sama dengan tahun 2015. Pendapatan asli Desa adalah wujud nilai kenaikan ekonomi desa .

- a. Pada tahun 2016 pertumbuhan BUMDES 23 desa yang awalnya hanya 3 desa sehingga realisasi tahun 2016 mencapai 26 desa dari 36 desa yang ada di Kabupaten Bintan.
- b. Perkembangan unit usaha di setiap bumdes juga sudah mulai ada perkembangan antara lain :jasa persewaaan , simpan pinjam, unit usaha perdagangan, unit usaha pertanian, unit usaha wisata , unit pengelolaan air minum desa dll
- c. Pertmbuhan Bumdes Bersama juga mulai ada selama tahun 2016 sudah ada 1 unit Bumdes Bersama di kawasan Perdesaan yaitu Bumdesa Berdama Dugong bintan yang meliputi kerjasama 4 desa yait Desa Teluk Bakau, fesa Malang Rapat, Desa Berakit dan desa Pengudang.

Dari realisasi pelaksanaan di lapangan tahun 2016 maka diperkirakan pertumbuhan PAD desa terhadap ADD naik menjadi 20 % atau ada pertumbuhan 10% .

2. **Tingkat Kesesuaian Perencanaan ADD dengan Pelaksanaan di Lapangan**

Tingkat Kesesuaian Perencanaan ADD dengan Pelaksanaan di Lapangan pada tahun 2016 mencapai 90%. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 70% dan meningkat sangat signifikan dibanding tahun 2015 yang hanya tercatat 5%. Hal ini dapat terwujud karena adanya koordinasi antara SKPD dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Pusat yang melaksanakan monev dan pelaporan progres pelaksanaan pembangunan desa secara online. Diharapkan pula tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan. Dari laporan pelaksanaan pemerintah desa konsisten melaksanakan kegiatan yang ada di desa mempedomani Dokumen pelaksanaan anggaran yang ada.

3. **Indeks Pemberdayaan Masyarakat**

Indeks Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2016 mencapai sebesar 75,70% dari target yang ditetapkan sebesar 75,68%. Indeks Pemberdayaan masyarakat desa ini tidak meningkat secara signifikan dikarenakan alokasi pelaksanaan program belum ada inovasi didalam program pemberdayaan masyarakat.

4. **Persentase Akses Masyarakat Desa terhadap Media Publik**

Persentase Akses Masyarakat Desa terhadap Media Publik pada tahun 2016 adalah sebesar 91,66 % melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 45% dan meningkat dari tahun 2015 yang tercatat 40%. Akses masyarakat desa terhadap media publik yaitu dimana hadirnya Teknologi Informasi hingga ke tingkat desa dan arus informasi koneksi jaringan komunikasi yang lancar. Banyak desa di Kabupaten Bintan yang sudah mulai dapat membuka informasi dari luar melalui jaringan internet. Hanya beberapa desa yang masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap media publik adalah seperti Desa pengikik, desa Pulau pinang, Desa Mentebung dan desa yang ada di kecamatan Bintan

Pesisir dan Mantang akan tetapi masih dapat mengakses informasi melalui media publik dengan menggunakan antena parabola.

4.1.11.URUSAN SOSIAL

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keenam** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Sosial** adalah sebagai berikut :

1. Persentase Penduduk Miskin

Dari berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan telah menunjukkan manfaat (*outcome*) cukup positif dalam menekan angka kemiskinan pada tahun 2016 angka kemiskinan di Kabupaten Bintan diestimasi menjadi 5,90% dari kondisi tahun sebelumnya yaitu 6,07%.

2. Persentase rumah tangga miskin yang ditangani

Pada tahun 2016 jumlah keluarga miskin yang ditangani oleh Dinas Sosial mencapai mencapai 3.068 atau 60,83%, Keluarga Miskin atau Keluarga Penerima Manfaat melalui kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin sebanyak sebanyak 650 KK sumber dana Kementerian Sosial, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 112 KK sumber dana APBD Kab. Bintan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sumber dana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Pengembangan Program Keluarga Harapan sebanyak 2.257 KK sumber dana Kementerian Sosial RI. Untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBN, Kementerian Sosial menetapkan kriteria bahwa sasaran penerima program harus peserta Program Keluarga Harapan dan masuk dalam Data Basis Terpadu tahun 2015. Ketentuan ini menyulitkan karena masih banyak masyarakat miskin di Kabupaten Bintan tetapi belum masuk dalam daftar Basis Data Terpadu Tahun 2015.

3. Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab;

Untuk kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) target tahun 2016 adalah 814 unit, tetapi tidak tercapai karena alokasi bantuan RTLH dari Kementerian Sosial sebanyak 50 unit direalisasikan pada akhir November 2016 dengan target penyelesaian selama 30 hari kerja. Singkatnya waktu yang diberikan membuat Dinas Sosial Kabupaten Bintan tidak menerima program

tersebut. Verifikasi lapangan yang dilaksanakan Tim dari Kementerian PU Dan PR juga mengurangi jumlah penerima bantuan rehab rumah Kegiatan BSPS.

4. Persentase pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial yang komperen/terlatih (terkait tenaga kerja)

Pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial merupakan bagian dari potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang menjadi mitra Dinas Sosial di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bintan pada Tahun 2015 adalah 127 orang dan yang kompeten sebanyak 30 orang. Pada Tahun 2016 jumlahnya tetap 127 orang, jumlah pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang kompeten adalah 30 orang. Pada Tahun 2016 Kementerian Sosial melaksanakan rekrutmen untuk Pendamping PKH sebanyak 3 orang dan mengadakan pelatihan selama 3 hari di Kota Batam, singkatnya waktu pelatihan menyebabkan masih banyak materi pendampingan yang belum dikuasai pendamping, begitu juga untuk Pendamping KUBE PKH perdesaan, waktu yang pelaksanaan yang berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan validasi data di Kabupaten menyebabkan tidak semua pendamping yang diundang bisa ikut kegiatan pelatihan dan mengutus 1 orang saja. Yang dimaksud kompeten dalam hal ini adalah bisa melaksanakan peranannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keduanya sangat berperan dalam keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kemampuan managerial, kemampuan menjalin komunikasi dan relasi dengan masyarakat khususnya PMKS dan keterampilan tenaga kesejahteraan sosial maka Dinas Sosial mengadakan pelatihan, bimbingan, magang, rapat rutin dan simulasi bagi para tenaga kesejahteraan sosial.

5. Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bintan mencapai 22%

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Sosial Kabupaten Bintan** melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.844.100.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.823.478.880,- atau 97,56 %. *Outcome* dari program ini adalah meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,- realisasi sebesar Rp.73.660.300 atau 98,21%. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya keberfungsian sosial penyandang cacat guna terwujudnya kemandirian dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha, peningkatan kemampuan diri melalui pelatihan di panti rehabilitasi, juga melalui pendampingan yang dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Sosial sehingga Usaha Ekonomi Produktif yang sudah terbentuk bisa tetap berjalan dan bahkan mungkin berkembang. Pada tahun 2016 Dinas Sosial mengadakan kegiatan Sosialisasi tentang Pengasuhan Anak Disabilitas Bagi Orang Tua (*Parenting Skill*) sebanyak 30 orang. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi bagi para orang tua tentang kebutuhan anak disabilitas dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan anak disabilitas serta fasilitas yang diberikan pemerintah sehingga tumbuh keinginan untuk memberi kesempatan kepada anak disabilitas dalam mengecap pendidikan fomal maupun informal sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk

meningkatkan kemampuan keterampilan para penyandang disabilitas, Dinas Sosial juga mengirim mereka ke pusat atau panti rehabilitasi. Sepanjang Tahun 2016 telah dikirim penyandang disabilitas 1 orang yang disesuaikan dengan bakat dan minat mereka. Penyandang disabilitas yang dikirim adalah ke Panti Sosial Bina Rungu Wicara (PSBRW) di Jakarta. Pelatihan dilaksanakan selama 6 bulan dan dibiayai oleh Kementerian Sosial RI. Pada tahun 2016 Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kedisabilitas (FKKADK) melalui dana dekonsentrasi dari Kementerian Sosial RI, APBD Provinsi Kep. Riau dan APBD Kabupaten Bintan mengadakan kegiatan Temu Penguatan Keluarga dan Anak (TEPAK) sebanyak 20 anak, membentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) FKKADK jenis usaha Bordir, pendampingan kegiatan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat, memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi 12 Penyandang Disabilitas Berat, bantuan alat bantu bagi disabilitas seperti kursi roda dan alat bantu dengar serta UEP bagi 4 orang penyandang disabilitas.

(2) **Kegiatan Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan NAPZA Secara Efektif,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,- realisasi sebesar Rp.39.427.900,- atau 98,57%. *Output* dari kegiatan ini adalah masyarakat khususnya pelajar SMU di Desa Berakit semakin memahami bahaya HIV/AIDS dan penyalahgunaan Napza serta upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegahnya melalui penyuluhan Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Napza kepada PSK di Kecamatan Teluk Sebong sebanyak 30 orang.

(3) **Kegiatan Penanganan orang yang mengalami gangguan jiwa/ mental**

Kegiatan ini dilaksanakan alokasi anggaran sebesar Rp.80.000.000,- realisasi sebesar Rp.79.968.090,- atau 99,96%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengiriman penyandang gangguan jiwa/ mental yang dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Tampan di Pekanbaru sebanyak 1 orang pasien, sehingga diharapkan para Penyandang Gangguan Jiwa/ Mental dapat sembuh, kembali ke tengah-tengah keluarganya dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Penanganan para penyandang gangguan jiwa/ mental sudah mulai dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang. Dalam kenyataannya jumlah penyandang gangguan jiwa tidak berkurang.

(4) **Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila di Lokalisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.000.000,- realisasi sebesar Rp.105.718.500,- atau 88,10%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyuluhan kepada Pekerja Seks Komersial yang ada di 2 lokalisasi yaitu Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara dan Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya. Dengan target Pekerja Seks Komersil sebanyak 123 orang dan mantan PSK sebanyak 43 orang. Tujuannya adalah pendekatan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat yang ada di lokalisasi tentang rencana pemerintah untuk mengalihfungsikan lokalisasi menjadi tempat yang lebih bersih, sehat dan produktif. Penyuluhan melibatkan instansi terkait seperti Komisi Perlindungan AIDS Provinsi Kep. Riau, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kep. Riau dan Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Bintan. Rencana

Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mengalihfungsikana lokalisasi mendapat dukungan dari semua pihak dengan tetap mengedepankan bahwa kepentingan masyarakat yang berada di wilayah tersebut tetap menjadi prioritas.

(5) **Peningkatan Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Dalam Panti**

Kegiatan ini dilaksanakan alokasi anggaran sebesar Rp.444.100.000,- realisasi sebesar Rp.439.935.050,- atau 99,06%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan sosial bagi lanjut usia di panti Rumah Bahagia melalui penyediaan kebutuhan pangan, sandang dan sosial bagi 41 orang lanjut usia serta insentif bagi 9 orang pengurus Rumah Bahagia.

(6) **Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia di Luar Panti**

Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Komisi Daerah (KOMDA) Lanjut Lansia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.000.000,- realisasi sebesar Rp.84.769.040 atau 99,73%. *Output* kegiatan ini adalah pemberian bantuan sembako bagi 200 orang lanjut usia. Sasarannya adalah lanjut usia yang berada dalam pengasuhan keluarga.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terpilah khususnya data lanjut usia dan keluarga miskin sehingga menyulitkan dalam menentukan sasaran kegiatan. Solusinya Melakukan pemutakhiran data dan pemilahan data dengan melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada.

Tabel 4.27 : Daftar Jumlah dan Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bintan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis PMKS				
		Penyandang Disabilitas (org)	Tuna Susila (org)	Bekas Napi (org)	Lanjut Usia (orang)	Rumah Tangga Miskin (KK)
1	Teluk Bintan	52				458
2	Bintan Pesisir	49				442
3	Teluk Sebong	59				744
4	Bintan Timur	65		3		1050
5	Bintan Utara	43	54			764
6	Toapaya	38	69	1		349
7	Seri Kuala Lobam	39				530
8	Mantang	17				286
9	Gunung Kijang	47				506
10	Tambelan	62				602
	Jumlah	481	123	4	424	5.731

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan, tahun 2017

2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Sosial Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.238.400.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.235.722.800,- atau 98,88%. *Outcome* dari program ini adalah meningkatnya pembinaan bagi peserta program keluarga harapan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Kegiatan Administrasi Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh dengan alokasi anggaran sebesar Rp.138.400.000,- realisasi sebesar Rp.137.763.100,- atau (99,54%). *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi antar Pelaksana Program (provider) dan pemantauan terhadap pemanfaatan bantuan yang diterima peserta sasaran Program Keluarga Harapan. Pada tahun 2016 jumlah rumah tangga sasaran yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang di pantau sebanyak 2.257 KPM atau 8.165 jiwa, dengan komponen seperti diuraikan dalam table di bawah ini.

Tabel 4.28 : Komponen PKH Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis Komponen							
		Bumil	Balita	Apras	SD	SMP	SMA	Lanjut Usia	Disabilitas
1	Bintan Pesisir	1	60	11	187	73	45	8	0
2	Bintan Timur	1	89	33	274	118	98	10	2
3	Bintan Utara	4	63	15	210	135	96	3	0
4	Gunung Kijang	0	107	22	267	138	105	36	0
5	Seri Kuala Lobam	5	78	28	223	120	85	13	0
6	Tambelan	36	641	237	1571	879	623	156	11
7	Teluk Bintan	3	79	10	193	103	78	26	0
8	Teluk Sebong	2	86	18	246	111	80	8	0
9	Toapaya	5	81	13	200	115	80	12	7
UMLAH		57	1236	373	3238	1737	1232	272	20

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan, tahun 2017

Kegiatan Bantuan Tunai Bersyarat Program Keluarga Harapan ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini

membantu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sangat Miskin, sedangkan untuk jangka panjang dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil dan perbaikan gizi, diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Tabel 4.29 : Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bantuan yang dibayarkan pada Tahun 2016

No	Uraian Kegiatan	Tgl Pencairan	Jumlah RTSM	Jumlah Dana (Rp.)
1	Tahap I	8 sd 10 April	869	774.033.750,-
2	Tahap II	9 sd 27 Juli	862	342.738.250,-
3	Tahap III	8 sd 15 Oktober	855	337.852.500,-
4	Tahap IV	26 Des sd 12 Jan 2017	2.257	1.120.930.000,-
TOTAL				2.575.554.500,-

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan, tahun 2017

(2) **Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Service Provider Program Keluarga Harapan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi sebesar Rp.97.959.700,- atau (97,96%). Peserta kegiatan sebanyak 80 orang yang terdiri dari pemberi layanan pendidikan (guru) dan layanan kesehatan (kader posyandu, bidan desa, dokter) yang memberi pelayanan pada peserta PKH di Kecamatan Gunung Kijang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping PKH. Tujuannya adalah untuk menginformasikan pelaksanaan kegiatan PKH kepada guru dan tenaga kesehatan di Kecamatan Gunung Kijang serta apa saja tugas mereka dalam mendukung pelaksanaan program ini.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terpilah khususnya data lanjut usia dan keluarga miskin sehingga menyulitkan dalam menentukan sasaran kegiatan. Solusinya Melakukan pemutakhiran data dan pemilahan data dengan melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada.

3) **Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Sosial Kabupaten Bintan** melalui 8 (delapan) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.2.418.056.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.375.926.101,- atau 98,26 %. *Outcome* dari program ini adalah meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pemberdayaan Kelembagaan Sosial**

Kegiatan ini dilaksanakan alokasi anggaran sebesar Rp.91.500.000,- realisasi sebesar Rp.91.057.540,- atau (99,52%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di wilayahnya masing-masing, melalui pembinaan pada potensi sumber kesejahteraan social baik yang bersifat kelembagaan maupun individu. Jenis dan jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di kabupaten Bintan Tahun 2016 seperti table di bawah ini :

Tabel 4.30 : Jenis dan jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Bintan Tahun 2016

No	Jenis PSKS	Jumlah	Ket
I	PSKS Perseorangan		
	1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	39	
	2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK)	10	
II	PSKS Keluarga		
	1. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	
	2. Family Care Unit (FCU)	1	
III	PSKS Kelembagaan		
	1. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	15	
	2. Karang Taruna	51	
	3. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	9	
	4. Forum CSR Kesejahteraan Sosial	0	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan, tahun 2017

Tabel 4.31 : Daftar Jumlah dan Jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Di
Kabupaten Bintan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis PSKS							
		Orsos	PSM	Karang Taruna	TKSK	Tagana	WKSBM	FCU	LK3
1	Teluk Bintan	-	3	6	1	9	4	-	-
2	Bintan Pesisir	1	2	4	1	2	-	-	-
3	Teluk Sebong	-	1	7	1	5	-	-	-
4	Bintan Timur	7	4	4	1	18	2	-	-
5	Bintan Utara	2	7	5	1	10	2	-	-
6	Toapaya	3	6	4	1	9	2	1	1
7	Seri Kuala Lobam	-	5	5	1	1	2	-	-
8	Mantang	-	1	4	1	1	-	-	-
9	Gunung Kijang	1	7	4	1	5	-	-	-
10	Tambelan	1	2	8	1	2	-	-	-
	Jumlah	15	34	51	10	62	12	1	1

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan, tahun 2017

(2) **Pemberdayaan Keluarga**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.000.000,- realisasi sebesar Rp.69.917.950,- atau (99,88%). *Output* dari kegiatan ini adalah, meningkatnya pengetahuan baik secara teori maupun praktek/implementasi para Pengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), TKSK dan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dalam menangani permasalahan sosial khususnya permasalahan psikososial keluarga melalui bimbingan teknis penanganan masalah psikososial sebanyak 34 orang peserta.

(3) **Penanggulangan Kemiskinan (Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.540.000.000,- realisasi sebesar Rp.535.139.733,- atau (99,01%). *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya penghasilan keluarga melalui pemberian bantuan dana permodalan bagi masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH Perdesaan sebanyak 323 KPM PKH dengan jumlah bantuan masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), KUBE PKH Perkotaan sebanyak 239 KPM dengan jumlah bantuan masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), KUBE Dekonsentrasi 200 KPM dengan jumlah bantuan Rp.400.000.000,-, dan Usaha Ekonomi Produktif Pesisir sebanyak 450 KPM dengan jumlah bantuan Rp.900.000.000,- yang bersumber dari Kementerian Sosial RI.

Untuk meningkatkan motivasi anggota KUBE dalam mengelola KUBE maka diadakan penilaian terhadap KUBE dan Pendamping KUBE. Berdasarkan penilaian yang dilakukan maka ditetapkan 3 KUBE Berprestasi dan 4 Pendamping Berprestasi, yaitu :

Tabel 4.32 : Penilaian KUBE Perdesaan Berprestasi

NO	NAMA	ALAMAT	PERINGKAT	JUMLAH
1	BUNGA	Ds Gunung Kijang	JUARA I	Rp.2.500.000,-
2	BUANA	Desa Toapaya	JUARA II	Rp.1.500.000,-
3	BINA	Desa Teluk Sasah	JUARA III	Rp.1.000.000,-

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2017

Tabel 4.33 : Penilaian KUBE Perkotaan Berprestasi

NO	NAMA	ALAMAT	PERINGKAT	JUMLAH
1	KIJANG	Kelh Kijang Kota	JUARA I	Rp.2.500.000,-
2	MULIA	Kelh Tanjung	JUARA II	Rp.1.500.000,-
3	JAYA	Kelh. Toapaya	JUARA III	Rp.1.000.000,-

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2017

Untuk penilaian Pendamping diberikan kepada 4 (empat) orang dengan peringkat sebagai berikut :

Tabel 4.34: Penilaian Pendamping Berprestasi

NO	NAMA PENDAMPING	JABATAN	PERINGKAT	KET.
1	IMPI RUSNITA	Pendamping KUBE Kec. Bintan Pesisir	JUARA I	
2	YUFRIADI	Pendamping KUBE Kec. Seri Kuala Lobam	JUARA II	
3	JUNAIDI	Pendamping KUBE Kec. Bintan Utara	JUARA III	
4	ZULKIFLI	Pendamping KUBE Kec. Toapaya	JUARA IV	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2017

(4) **Administrasi Kegiatan Kelembagaan Sosial Kabupaten**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.392.556.000,- realisasi sebesar Rp.391.478.348,- atau (99,73%). Hasil dari kegiatan ini tersalurkannya bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu di Kecamatan Mantang melalui kegiatan Bhakti Sosial Karang Taruna Kabupaten Bintan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bintan sebanyak 250 paket sembako.

(5) **Penanggulangan Kemiskinan (Administrasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.450.000.000,- realisasi sebesar Rp.447.735.150,- atau (99,5%). Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan kegiatan pendampingan untuk bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang disediakan untuk verifikasi, sosialisasi, bantuan upah tukang dan monitoring kegiatan. Jumlah rumah yang direhab adalah 596 unit rumah yang tersebar di Kecamatan Teluk Bintan sebanyak 240 unit jumlah bantuan sebesar Rp.3.460.000.000,- Teluk Sebong 89 unit jumlah bantuan Rp.1.270.000.000,- Toapaya sebanyak 149 unit jumlah bantuan sebesar Rp.2.175.000.000,- dan Kecamatan Bintan Timur sebanyak 88 unit dengan jumlah bantuan sebesar Rp.1.170.000.000,- . Total keseluruhan bantuan yang diterima dari Kementerian Pu dan Perumahan Rakyat adalah Rp.8.525.000.000,-

(6) **Penanggulangan Kemiskinan (Administrasi Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH))**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.284.000.000,- realisasi sebesar Rp.251.561.305,- atau

(88,58%). Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)) bagi 112 sasaran bersumber dari dana APBD Kabupaten Bintan sebesar Rp.2.436.000.000,-. Daftar alokasi dan sasaran Bantuan RS RTLH di Kabupaten Bintan Tahun 2015 seperti tabel di bawah ini :

Tabel 4.35 : Daftar Alokasi dan Sasaran Bantuan RS RTLH di Kabupaten Bintan Tahun 2016

No	Kecamatan/Desa/ Kelurahan	Jlh sasaran (unit)	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1	GUNUNG KIJANG			
	- Desa Gunung Kijang	10	205.000.000,-	APBD Bintan
	- Kelurahan Kawal	10	205.000.000,-	
2	TELUK BINTAN			
	- Desa Tembeling	2	40.000.000,-	APBD Bintan
	- Desa Bintan Buyu	1	20.000.000,-	
	- Desa Pengujan	21	430.000.000,-	
	- Kelh. Tembeling Tanjung	3	61.000.000,-	
3	BINTAN PESISIR			
	- Desa Kelong	18	430.000.000,-	APBD Bintan
	- Desa Numbing	10	235.000.000,-	
4	TELUK SEBONG			
	- Desa Sebong Perih	6	120.000.000,-	APBD Bintan
	- Desa Ekang Anculai	6	120.000.000,-	
	- Desa Sri Bintan	5	60.000.000,-	
	- Desa Berakit	6	120.000.000,-	
5	BINTAN UTARA			
	- Kelh Tanjung Uban	16	390.000.000,-	APBD Bintan

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2017

(7) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K2KS) Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.440.000.000,- realisasi sebesar Rp.439.185.930,- atau (99,81%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya peranan serta partisipasi dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayahnya masing-masing melalui pemberian bantuan UEP bagi Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 10 paket, pelaksanaan Hari Lansia dan pemberian bantuan sembako bagi keluarga miskin sebanyak 1000 paket.

(8) Pelaksanaan Olimpiade Kepahlawanan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi sebesar Rp.149.417.975,- atau (99,61%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya generasi muda untuk menghormati dan menghargai jasa-jasa pahlawannya serta menanamkan dan mengembangkan jiwa, semangat serta cita-cita patriotisme bagi generasi muda melalui kegiatan Lomba Pidato Kepahlawanan dan Story Telling , yang diikuti oleh pelajar SMU yang ada di Kabupaten Bintan sebanyak 100 orang peserta

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Penetapan penerima bantuan kegiatan penanganan keluarga miskin khususnya dari Kementerian Sosial RI yang mensyaratkan bahwa calon penerima harus peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau terdaftar dalam Basis Data Terpadu, sementara kondisi real di lapangan banyak keluarga

miskin yang tidak menerima PKH atau tidak terdaftar di Basis Data Terpadu Tahun 2015 sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

- b. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang diterima dari pemerintah membuat masyarakat cenderung menjadi manja dan malas sehingga setiap bantuan yang diterima tidak dimanfaatkan secara maksimal
- c. Pembangunan kesejahteraan sosial masih dititikberatkan pada penanganan masyarakat miskin, sehingga alokasi dana untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang lain sangat kecil dan pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial belum optimal.

2) Solusi

- a. Membuat usulan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan agar masyarakat miskin yang bukan peserta PKH dan tidak terdaftar di Basis Data Terpadu tahun 2015 agar dibantu melalui anggaran Pemerintah Daerah.
- b. Mengembalikan fungsi pelayanan sosial kepada hakikatnya semula yaitu "Help People To Help Them Self" sehingga masyarakat tidak tergantung kepada bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
- c. Menyusun rencana kegiatan yang sarannya adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial sehingga PSKS yang ada di Kabupaten Bintan bisa optimal dalam menjalankan tugas dan peranannya.

4) Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Sosial Kabupaten Bintan** melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.755.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.739.570.625,- atau

97,88%. *Outcome* dari program ini adalah meningkatnya kapasitas pelaku kesejahteraan sosial. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan bekerja sama dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Persatuan Isteri-isteri Dewan (PISWAN) Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.270.000.000,- realisasi sebesar Rp.260.967.300,- atau (96,65%). *Output* kegiatannya adalah Bhakti Sosial berupa pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu di Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan dan pemberian bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu di seluruh kecamatan se Kabupaten Bintan sebanyak 625 paket.

(2) **Penyuluhan Sosial**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.000.000,- realisasi sebesar Rp.79.808.360,- atau (99,76%). *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam upaya meningkatkan peran keluarga untuk mencegah eksploitasi dan tindak kekerasan pada anak khususnya di Kecamatan Tambelan dengan peserta sebanyak 100 orang.

(3) **Bimbingan Teknis Pendamping KUBE**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp.100.000.000,- realisasi sebesar Rp.99.542.575,- atau (99,54%). *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan managerial pendamping KUBE dalam mendampingi KUBE sehingga KUBE bisa bertumbuh dan berkembang menjadi KUBE Mandiri. Sasaran kegiatan ini adalah para pendamping KUBE berjumlah 35 orang.

(4) **Bimbingan Teknis Pendamping RTLH**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp.120.000.000,- realisasi sebesar Rp.118.440.800,- atau (98,70%). *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pendamping RTLH dalam mendampingi penerima sasaran RS RTLH sehingga bantuan yang diterima dipergunakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Bimbingan teknis dilakukan selama 3 hari dan diikuti oleh 24 orang peserta calon pendamping RS RTLH dari Kecamatan se Kabupaten Bintan.

(5) **Penyusunan Profil Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kab. Bintan Tahun 2011-2015**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp.36.400.000,- realisasi sebesar Rp.31.011.100,- atau (87,11%). *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya buku profil penyelenggaraan kesejahteraan social di Kabupaten Bintan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

(6) **Ekspo Bintan Sejahtera**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp.150.000.000,- realisasi sebesar Rp.149.800.490,- atau (99,87%). *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pameran produk-produk pemberdayaan ekonomi masyarakat baik yang tergolong penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) maupun potensi sumber kesejahteraan social (PSKS) se Kabupaten Bintan. Tujuannya adalah meningkatkan motivasi dari para PMKS dan PSKS dalam memanfaatkan setiap bantuan yang diterima dan sebaga sarana untuk memasarkan hasil produksi dari KUBE, UEP dan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan social baik kualitas maupun kuantitas sementara sarana tidak tersedia misalnya rumah singgah atau shelter bagi orang yang mengalami gangguan jiwa/ mental dan orang terlantar, sehingga menyulitkan dalam penanganannya solusinya Memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menangani permasalahan sosial yang ada dilingkungannya dengan melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan maupun lembaga pelayanan sosial yang ada di Kabupaten Bintan.

5) **Program Mitigasi Bencana**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Sosial Kabupaten Bintan** melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.156.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.152.879.300,- atau 97,88%. *Outcome* dari program ini adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.156.500.000,- realisasi sebesar Rp.152.879.300,- atau (97,69%). *output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyaluran bantuan logistik masa tanggap darurat dengan cepat dan tepat bagi korban bencana di Kabupaten Bintan. Peristiwa bencana alam di Kabupaten Bintan selama Tahun 2016 sebanyak 42 kali dengan korban jiwa berjumlah 1.589 jiwa.

b. **Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

- a. Anggaran yang terbatas menyulitkan untuk melaksanakan pembinaan secara kontiniu karena kondisi geografis daerah pada umumnya terpencar dan harus ditempuh dengan menggunakan transportasi laut dengan biaya relatif tinggi.
- b. Frekuensi bencana alam yang cenderung meningkat, mengakibatkan buffer stock untuk masa tanggap darurat penanggulangan bencana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat ke Kabupaten Bintan tidak cukup

2) Solusi

- a. Membuat usulan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan agar menyediakan bantuan logistik masa tanggap darurat sehingga semua korban bencana bisa dilayani.
- b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia potensi dan sumber kesejahteraan sosial melalui pemberian bimbingan teknis dan pelatihan sehingga mampu menjadi mitra Dinas Sosial di wilayahnya masing-masing.

4.1.12.URUSAN KEBUDAYAAN

Pecapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kelima** pada Tahun 2016 terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Bintan untuk **Urusan Kebudayaan** adalah sebagai berikut:

1. Jumlah grup kesenian yang di bina 35 group;

Indikator jumlah grup kesenian yang di bina Tahun 2016 tercapai sebesar 35 Grup Sanggar, Indikator ini Sama dari tahun sebelumnya adapun Rincian Data tersebut Sebagai Berikut :

Tabel 4.36 : Data Sanggar Yang Di Bina

No	Nama Sanggar	Lokasi	Budaya
1	Sri Bintan	Bintan Timur	Tari Kreasi
2	Kreasi Guru	Bintan Timur	Tari Kreasi
3	Bujang dan Dara	Bintan Timur	
4	Sirih Delima	Bintan Timur	
5	Bintan Pelangi	Bintan Timur	
6	Dangkong	Bintan Timur	Tari Dangkong
7	Makyong Keke	Bintan Timur	Teater Makyong
8	Makyong Seinam	Bintan Timur	Teater Makyong
9	Bahtera	Bintan Timur	Tarian,Berzanji,Hadrah
10	Bengkel Seni Bintan Buana	Bintan Timur	Orkestra Melayu
11	Mutiara Bintan	Sri Koala Lobam	Tari Kreasi
12	Sri Bintan Buana	Sri Koala Lobam	Tari Kreasi
13	Kemilau	Sri Koala Lobam	Tari Kreasi
14	Melayu Asli	Sri Kuala Lobam	Gazal
15	Nurur Hilal	Sri Kuala Lobam	Hadrah

16	Sanggar Seni Diknas	Bintan Utara	Tari Melayu dan Daerah
17	Laksamana	Bintan Utara	Tari Melayu dan Daerah
18	Sang Nila Utama	Bintan Utara	Tari Kreasi
19	Bentang Budaya	Bintan Utara	Tari Melayu dan Daerah
20	Alang Babega	Bintan Utara	Tari Kreasi
21	Guang Mung Long She Duan	Bintan Utara	Barongsai
22	Reog Lancang Kuning	Bintan Utara	Reog
23	Sri Penolak	Tambelan	Tari Kreasi
24	Sinar Melayu	Tambelan	Tari Kreasi
25	Tambelan Bertuah	Tambelan	Tari Kreasi
26	Madani	Toapaya	
27	Tepak Sirih	Toapaya	
28	Tuah Bestari	Bintan Pesisir	
29	Gelora	Teluk Sebong	
30	Bungsu Sakti	Mantang	
31	Makyong Mantang	Mantang	Teater Makyong
32	Hari Kelana	Gunung Kijang	Kuda Kepang
33	Kreda Budaya	Gunung Kijang	Reog Ponorogo
34	M.T.Ataqwa	Gunung Kijang	Kompang
35	Dang Merdu	Teluk Bintan	

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2017

2. Jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara 14 Cagar Budaya

Indikator jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara Tahun 2016 tercapai sebesar 14 Cagar Budaya, Indikator ini Sama dari tahun sebelumnya adapun Rincian Data tersebut Sebagai Berikut :

Tabel 4.37 : Cagar Budaya di Kabupaten Bintan

No	Nama Cagar Budaya	Jumlah
1.	Makam Tok Uke	1
2.	Makam Keramat Bukit Batu	1
3.	Makam Ahmad Syah	1
4.	Kota Kara	1
5.	Situs Bukit Kerang	1
6.	Komplek Makam Muayad Syah	1
7.	8 buah keramik peninggalan kapal tengelam	8

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2017

Dalam penyelenggaraan Urusan Kebudayaan adapun program-program yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan pada Tahun 2016 yaitu :

1) Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya, Seni dan Film

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan** dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.80.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.79.244.300,- *Outcome* program ini adalah terlaksananya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni dan budaya. Program ini menitik beratkan kepada 1).Pelaksanaan Pagelaran, Fetival dan Parade seni dan budaya 2).Pembinaan sanggar dengan pemberian bantuan 3).Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku seni dan Budaya.

a. **Pelaksanaan Program**

Kegiatan Pelestarian Adat Istiadat Bintan ini dilaksanakan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.80.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.79.244.300,- atau 99,06%. *Outputnya* adalah Terlaksananya Keduri melayu dan Malam Penganugrahan Seni dan Budaya Laksamana Bintan.

b. **Permasalahan dan Solusi**

- 1) Perlu Kegiatan Pelatihan dan Bimtek untuk pelaku seni dan budaya agar lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas Pelaku seni dan Budaya
- 2) Perlu di lakukan Wadah baik untuk pembinaan maupun Kompetisi yang lebih luas tak hanya untuk seni tari saja tetapi untuk seni lain seperti Seni Sastra puisi, Pantun, dan seni drama yang selama ini belum pernah diadakan.

2) **Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan** dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.706.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.703.370.800,- atau 99,63%. *Outcome* program ini adalah terlaksananya Pembinaan kepada Pelaku Seni, Budaya dan Pariwisata Program ini menitik beratkan kepada 1). Menampilkan Seni da Budaya di beberapa Kecamatan 2). Pelaksanaan Rakor Kegiatan Seni dan Budaya. 3. Pelatihan seni, Budaya dan Pariwisata

a. **Pelaksanaan Program**

Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Bintan ini dilaksanakan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.706.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.703.370.800,- atau 99,63%. *Outputnya* adalah Terlaksananya 5 kali Kegiatan Panggung Seni dan Budaya Bintan, 2 Kali Pagelaran Wayang Kulit, 1 Kali Rakor Budaya

b. **Permasalahan dan Solusi**

Masih Belum meratanya perkembangan Kesenian di Kabupaten Bintan.

3) **Program Kesejahteraan, Kepurbakalaan da Permuseuman**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.249.360.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.245.836.042,- atau 98,59% *Outcome* program ini adalah terlaksananya Pelestarian, pelindungan dan Pengembangan nilai sejarah dan warisan budaya. Program ini menitik beratkan kepada 1). Melestarikan dan melindungi benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya 2). Mengali nilai-nilai warisan Budaya dengan melakukan penelitian dan kajian. 3). Pengembangan Musium Bahari

a. **Pelaksanaan Program**

Kegiatan Pengembangan Musium Bahari Bintan ini dilaksanakan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.249.360.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.245.836.042,- atau 98,59%. *Outputnya* adalah Tersedianya Fasilitas Perlindungan Pengembangan Benda dan Warisan Budaya yang ada di Kabupaten Bintan (Musium Bahari Bintan).

b. **Permasalahan**

Masih kurangnya sistim Pengamanan Gedung yang ada di Musium Bahari, mengginat terdapat benda-benda sejarah yang berharga seperti Keramik peninggalan Dinasti Ming solusinya Perlu Pelatihan Khusus Bagi Penjaga musium agar mampu melakukan pelayanan dengan baik.

4.1.13.URUSAN STATISTIK

Urusan ini mendukung **Misi Keempat** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1) **Program Pengembangan Data dan Informasi**

Program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.307.200.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.288.181.140,- atau 93,81%. *Outcome* Meningkatnya kualitas pengembangan data dan informasi kabupaten bintang

a. **Pelaksanaan Program**

1) **Peningkatan dan Penyusunan Sistem Peragaan Data Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.141.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.128.830.990,- atau 91.24%. Hasil kegiatan ini adalah terpublikasinya data pembangunan daerah melalui media ekspos.

2) **Pengembangan Data Website Bappeda Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.97.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.92.775.200,- atau 95.64%. Hasil kegiatan ini adalah terpublikasinya data, kegiatan Bappeda Kabupaten Bintan kedalam situs web <http://bappeda.bintankab.go.id>.

3) **Fasilitasi Dan Integrasi Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.000.000,- dengan realisasi Rp.66.574.950,- atau 96,49%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi dan integrasi data SKPD yang merupakan elemen data pembangunan daerah kedalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terdiri dari 8 Kelompok Data, 31 Jenis Data, 3.034 Elemen Data.

Capaian kinerja tahun 2016 untuk program ini adalah :

1) **Persentase tingkat keterisian data SIPD**

Menurut hasil evaluasi Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dari aplikasi SIPD, didapat informasi tingkat keterisian data SIPD periode tahun 2015 untuk Pemerintah **Kabupaten Bintan mencapai 47,38%**; keterisian data ini masih **tertinggi** berbanding 5 Kabupaten/Kota lainnya dilingkungan Propinsi Kepulauan Riau. Informasi ini dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 4.1 : Tingkat Keterisian Data SIPD Kabupaten Bintan Tahun 2016

NO	NAMA DAERAH	JML. TOT. ELEMEN DATA	JML. ELEMEN DATA TERSEDIA	JML. ELEMEN DATA TIDAK TERSEDIA	JML. ELEMEN DATA TERISI	% KETERISIAN DATA
1	Kabupaten Bintan	2897	1382	935	1386	47.38 %
2	Kabupaten Karimun	2897	2897	0	698	24.18 %
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	2897	2437	280	215	6.95 %
4	Kabupaten Lingga	2897	2539	158	573	19.77 %
5	Kabupaten Natuna	2897	2645	2	452	15.77 %
6	Kota Bintan	2897	2311	306	561	19.38 %
7	Kota Tanjung Pinang	2897	2430	267	616	21.26 %

Sumber : BP3D Kabupaten Bintan (<http://bappeda.bintankab.go.id>.) tahun 2017

2) **Tingkat kepuasan pengguna informasi atas data/informasi pembangunan daerah bintan yang disajikan dalam website Pemkab/Bappeda Bintan**

Dari hasil publikasi data, kegiatan Bappeda Kabupaten Bintan kedalam situs web <http://bappeda.bintankab.go.id> pengguna informasi

3) **Jumlah penelitian yang dihasilkan;**

Indikator ini merupakan indikator baru, pada tahun 2016 kegiatan penelitian belum dilakukan, baru mulai dianggarkan pada tahun 2017

b. **Permasalahan dan Solusi**

Pemahaman tentang pentingnya Data untuk perencanaan pembangunan masih sangat kurang. Permasalahan ini hampir terjadi di setiap SKPD, penyebabnya bukan saja kekurangan jumlah SDM maupun aparatur yang menguasai bidang TIK. Namun infrastruktur yang memadai untuk mendukung pekerjaan khususnya di wilayah Kabupaten Bintan yang hampir 90%-nya merupakan lautan. Akibatnya sering terjadi inkonsistensi data pembangunan maupun data yang tidak valid ataupun *uptodate* dalam pengumpulan data, sehingga perencanaan pembangunan tidak efisien dan efektif. Dengan adanya SIPD merupakan langkah pemerintah yang cukup efektif dalam sebagai *tool* untuk menghimpun data sehingga dapat menghasilkan satu data pembangunan yang *uptodate* dan terintegrasi. Diharapkan aplikasi SIPD dapat menjadi sistem informasi yang berguna bagi perencanaan pembangunan. Optimalisasi SIPD perlu mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder khususnya pemerintah daerah.

4.1.14.URUSAN KEARSIPAN

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Ketiga** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Kearsipan adalah sebagai berikut **Pengelolaan Arsip Secara Baku** yang telah mencapai **18 OPD/SKPD**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1) **Program Penyelenggaraan Kearsipan daerah**

Program ini dilaksanakan oleh **Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.83.414.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.79.521.320,- atau 95,33%. *Outcome* meningkatkan penyelenggaraan kearsipan daerah

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu sebesar Rp.45.475.500 dan realisasi anggaran sebesar Rp.45.122.100 atau 99,22%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Bintan. Kegiatan ini sudah dilakukan dimulai dengan rapat koordinasi dilanjutkan pendampingan/asisitensi penerapan sistem kearsipan sesuai Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan dan di akhiri dengan penilaian SKPD terbaik penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2016. Dari 38 SKPD baru 20 yang dapat dilaksanakan pengelolaan arsip dengan baik, baru mencapai 60%. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan juga antara lain untuk memenuhi amanat undang-undang Nomor 43 Tahun

2009 tentang kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan.

- (2) **Pengembangan Sumber Daya manusia Kearsipan berupa Bimtek manajemen Kearsipan.** Kegiatan ini dilaksanakan dengan dengan pagu anggaran sebesar Rp.37.938.500 dan realisasi anggaran sebesar Rp.34.399.220. atau 90,67%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya Bimtek dengan peserta 66 orang Pengelola arsip UPT PAUS dan SLTP/MTs se Kabupaten Bintan bertempat di Hotel Hermes Agro dengan nara sumber dari internal Kantor Perpustakaan dan Arsip kabupaten Bintan. Sehingga tersedia pengelolaan kearsipan yang baik dan handal sesuai dengan keterampilan yang memadai.

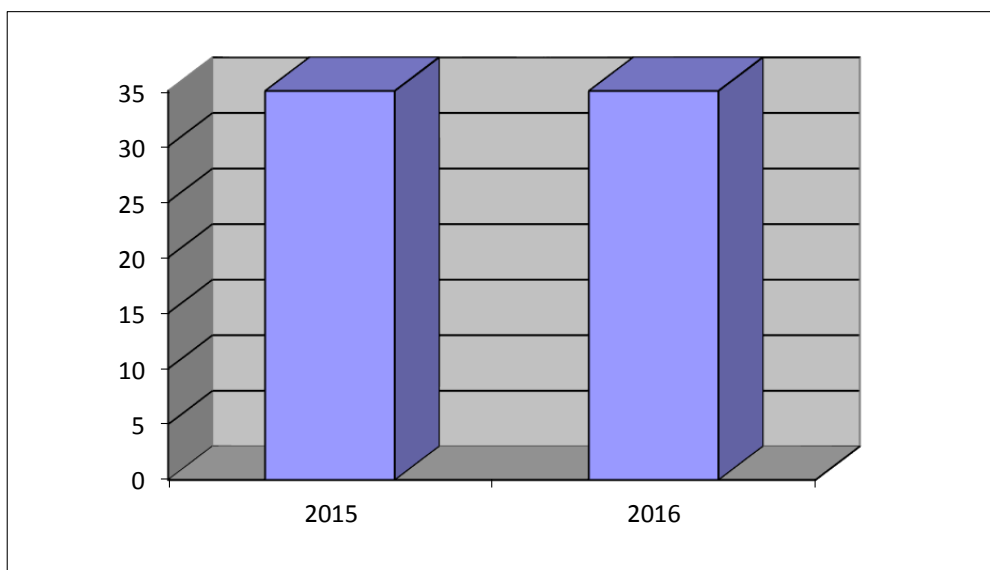
Capaian kinerja tahun 2016 untuk program ini adalah :

- 1) **Jumlah Gedung Arsip Daerah Yang Representatif 0 Unit;** Jumlah gedung arsip sampai tahun 2016 belum terbangun, namun sudah diusulkan untuk pembangunannya. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Bintan akan memprioritaskan pembangunan Gedung Arsip ini mengingat perkembangan arsip dari lembaga pemerintah terus bertambah setiap tahun.
- 2) **Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan;** Setiap tahun peningkatan SDM ini dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang mendukung untuk menciptakan SDM Pengelola Arsip yang profesional. Tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 1 Kegiatan.

4.1.15.URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan Perpustakaan masuk dalam Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pencapaian indikator kinerja daerah pada urusan ini mendukung **Misi Ketiga** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan sebagai berikut :

Grafik 4.10 Jumlah Taman Bacaan / Perpustakaan di Kabupaten Bintan



Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip 2017

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Perpustakaan

Program ini dilaksanakan oleh **Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.504.341.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.477.810.820,- atau 93,79%. *Outcome* meningkatnya pengembangan perpustakaan.

Dengan kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.63.439.300 dan realisasi sebesar Rp.52.562.700 atau 82.86%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksanakannya Bimtek Pengelolaan Perpustakaan sekolah dengan jumlah peserta 30 orang yang berasal dari pelajar SD/MI se-Kabupaten Bintan sehingga diharapkan dengan kegiatan ini pengelola pustaka SD/MI se-Kabupaten Bintan akan lebih baik pelayanan kepada pemustaka.

(2) Operasional Pustaka kapal Apung

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.126.959.300 dengan realisasi sebesar Rp.123.570.300 atau 97.33%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan masyarakat melalui perpustakaan keliling yang menyediakan bahan bacaan masyarakat khusus untuk daerah pulau-pulau (hinterland). Hingga saat ini Kantor perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan mengupayakan melakukan pelayanan pustaka keliling dengan kapal bantuan Perpustakaan Nasional lengkap dengan koleksi buku-bukunya. menjangkau 3 kecamatan di pulau-pulau menyambangi sekolah-sekolah dalam satu bulan 2 kali turun.

(3) Operasional Pustaka Mobil Keliling

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.99.000.000 dan terserap anggaran Rp.97.399.250. *Output* dari kegiatan ini adalah pelayanan pustaka dengan mobil keliling yang melayani 6 kecamatan yaitu mengunjungi sekolah-sekolah yang belum memiliki perpustakaan maupun kepada masyarakat. Operasional mobil terdiri dari perawatan mobil pustaka dan penyediaan BBM serta operasional lainnya.

(4) **Peningkatan Pelayanan Perpustakaan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.127.000,- dan realisasi sebesar Rp.51.068.020,- atau 96,12%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya perlombaan antar perpustakaan Desa/Kelurahan untuk memberi ransangan sekaligus sebagai upaya pemetaan dalam pembinaan perpustakaan sehingga meningkatnya pembinaan perpustakaan.

(5) **Promosi Minat Baca**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.425.500,- dan realisasi sebesar Rp.6.422.300,- atau 99,95%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya Road Show atau audiensi dengan masyarakat khususnya pelajar dalam sebuah acara terbuka dengan menyampaikan pentingnya membaca sekaligus memberi pelayanan dan promosi koleksi buku perpustakaan di 4 Kecamatan diwilayah Kabupaten Bintan

(6) **Lomba Cerita**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.964.700.dengan realisasi sebesar Rp.77.877.650,- atau 98.62%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan lomba Cerita bagi anak Sekolah Dasar se-kabupaten Bintan yang juaranya akan diajukan untuk mewakili Kabupaten Bintan dalam Lomba tingkat provinsi sampai di pusat sehingga meningkatkan minat baca dan menambah angka partisipasi masyarakat berkunjung ke Perpustakaan.

Capaian kinerja tahun 2016 untuk program ini adalah :

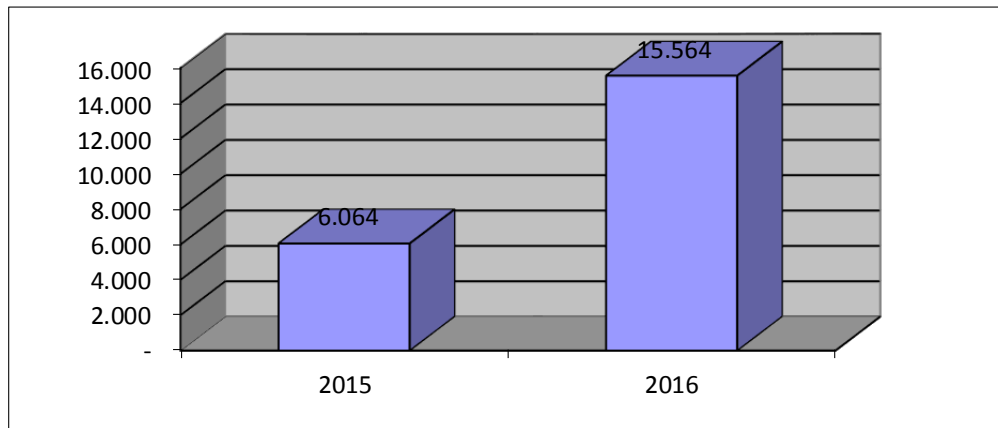
1) **Jumlah Perpustakaan Daerah**

Jumlah Perpustakaan Daerah sampai tahun 2016 belum terbangun, namun sudah diusulkan untuk pembangunannya. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Bintan akan memprioritaskan pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah

yang representatif mengingat perkembangan pengunjung serta jumlah koleksi buku dari tahun ketahun terus meningkat.

2) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

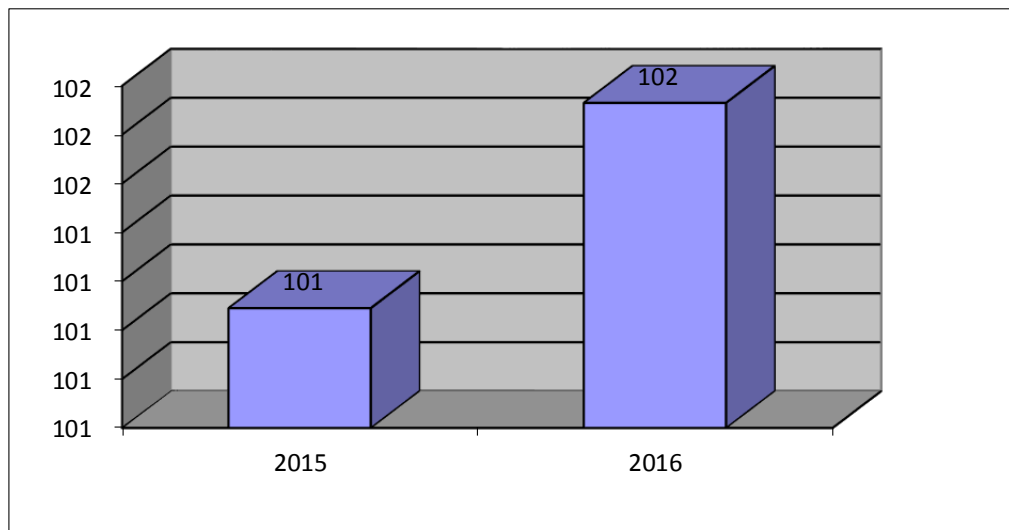
Grafik 4.11 : Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan dari Tahun 2015 s.d 2016



Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip 2017

3) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Grafik 4.12 : Perkembangan Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah dari Tahun 2015 s.d. 2016



Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip 2017

4.2. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

4.2.1. URUSAN PARIWISATA

Pecapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu** pada Tahun 2016 terhadap penyeleggaraan urusan pemerintah Kabupaten Bintan untuk **Urusan Pariwisata** adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya jumlah Objek Wisata

Indikator Meningkatnya jumlah Objek Wisata Tahun 2016 tercapai sebesar **29 Objek Wisata**, Masih Banyak daerah yang memiliki potensi sebagai Objek Wisata namun di Tahu 2016 ini Dinas Pariwisata menetapkan 29 Objek yang layak untuk dikembangkan sebagai Objek Wisata di Kabupaten Bintan, Indikator ini meningkat dari tahun sebelumnya 20 Objek wisata. Adapun 29 Indikator tersebut Sebagai Berikut :

Tabel 4.38 : Daftar Objek Wisata Per Kecamatan

KECAMATAN	OBJEK WISATA	JENIS OBJEK WISATA
Teluk Sebong	Kawasan Terpadu Wisata Lagoi	Khusus
	Desa Wisata Sebong Pereh	Budaya
	Pantai Sakera	Alam-Bahari Pantai
	Desa Wisata Sri Bintan	Budaya
	Desa Wisata Pengudang	Budaya
	Desa Wisata Berakit	Budaya
	Tour Mangrove Sei Kecil	Alam-Hutan
Teluk Bintan	Gunung Bintan	Alam-Pegunungan
	Hutan Mangrove	Alam Hutan
Gunung Kijang	Pantai Trikora	Alam-Bahari Pantai
	Perkampungan Nelayan Kawal	Budaya
	Hutan Mangrove Kawal	Alam-Hutan
	Tanjung Pesona	Khusus

	Bukit Kerang	Budaya
Bintan Timur	Air Terjun Lengkuas	Alam-Air Terjun
	Kota Tua Kijang	Budaya
	Mini Zoo	Khusus
Tambelan	Teluk Abik	Alam-Bahari
	Taman Laut	Alam-Bahari
	Pulau Bungin	Alam-Bahari
Bintan Pesisir	Pulau Mapur	Alam-Bahari
	Pulau Nikoi	Alam-Bahari
	Pulau Mangkil	Alam-Bahari
Toapaya	Perkebunan Buah Naga	Khusus-Agrowisata
	Kebun Nenas	Khusus-Agrowisata
Bintan Utara	Pantai Sakera	Alam-Bahari Pantai
	Pantai Sungai Lepah	Alam-Bahari Pantai
Mantang	Kesenian Makyong	Budaya
Seri Kuala Lobam	Kuliner Mangrove	Budaya

Sumber : Dispar Kab. Bintan Tahun 2017

- 2) **Distribusi Pariwisata terhadap PDRB;** pada tahun 2016 diestimasi sebesar **5,41%** angka ini sedikit menurun bila dibanding tahun 2015 yang diestimasi sebesar **5,59%.**

Tabel 4.39 : PDRB Sektor Pariwisata

No	Tahun	% PDRB
1	2015	5,59
2	2016	5,41

Sumber Data : Data diolah oleh BP3D Kabupaten Bintan Tahun 2017

3) Meningkatnya jumlah Desa Wisata

Indikator Meningkatnya Jumlah Desa Wisata sebesar **4 Desa Wisata**, Indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 0 Desa. Pemberdayaan Masyarakat dengan mengembangkan Desa wisata merupakan salah satu Skala Prioritas Dinas Pariwisata dalam membangun Pariwisata berbasis Masyarakat, jumlah keseluruhan yang dibentuk oleh dinas ada 15 Desa Wisata yang di rencanakan dan di Tahun ini ada 4 Desa Wisata yang siap untuk kembangkan di Tahun 2016 adapun data tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.40 : Daftar Desa Wisata di Kabupaten Bintan

No	Nama Desa Wisata	Jenis Wisata	Ket
1	Desa Wisata Sebong Perih	Budaya	Teluk Sebong
2	Desa Wisata Sri Bintan	Alam-Bahari Pantai	Teluk Sebong
3	Desa Wisata Pengudang	Budaya	Teluk Sebong
4	Desa Wisata Berakit	Budaya	Teluk Sebong

Sumber : Dispar Kab. Bintan Tahun 2017

4) Meningkatnya jumlah PAD dari sektor Pariwisata;

Indikator Meningkatnya Jumlah PAD dari Sektor Pariwisata, Pendapatan dari Sektor Pariwisata sebesar Rp.99.355.538.041,94 atau 51,40% dari Total PAD Kabupaten Bintan sebesar Rp.194.288.632.843,08,- ,indikator ini mencapai mencapai target seperti yang telah ditetapkan dari DPKKD Kab. Bintan, Adapun Data per 21 Desember 2016 secara rincinnya dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel 4.41 : Daftar Desa Wisata di Kabupaten Bintan

No	Jenis Pendapatan	Target Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016 (Rp)	%
1	Pajak Hotel	67.859.000.000	69.880.941.763,66	102,98%
2	Pajak Restoran	28.341.000.000	27.537.524.328,40	97,16%

3	Pajak Hiburan	1.937.823.382	1.937.071.949,88	99,96 %
	Total	98.137.823.382	99.355.538.041,94	105,12 %

Sumber : DPKKD Kab. Bintang Tahun 2017

5) **Meningkatnya Kunjungan wisatawan;**

Indikator Meningkatnya Kunjungan Wisatawan sebesar 574,337 wisatawan Atau 116%, ini mengalami Peningkatan Adapun secara rincinnya dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 4.42 : Kunjungan wisatawan

No	Wisatawan	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Mancanegara	312.979	305.474
2	Nusantara	180.516	268.863
	Total	493.495	574.337

Sumber : BPS, BRC, Imigrasi Diolah Oleh Diparbud Kab. Bintang Tahun 2017

6) **Meningkatnya lama tinggal wisatawan**

Indikator Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan sebesar **2,6 hari**, Indikator ini mengalami penetapan dan sesuai dengan yang di targetkan.

7) **Jumlah Jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata;**

Indikator Jumlah Jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebesar **27 Badan Usaha** atau 117,4%, ini mengalami Peningkatan dari Tahun Sebelumnya yaitu sebesar 23 Badan Usaha.

8) **Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi Pariwisata;**

Indikator ini merupakan indikator baru yang harus dipenuhi untuk urusan Pariwisata. Program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator ini belum dilaksanakan untuk anggaran tahun 2016;

9) **Persentase SDM Pariwisata yang terlatih;**

Indikator ini merupakan indikator baru yang harus dipenuhi untuk urusan Pariwisata. Program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator ini belum dilaksanakan untuk anggaran tahun 2016;

Dalam penyelenggaraan **Urusan Pariwisata**, program-program yang dilaksanakan pada Tahun 2016 yaitu antara lain :

1) **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan** dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.5.676.179.021,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.534.480.636,- atau 97,50%. *Outcome* program ini adalah Peningkatan Informasi Pasar Pariwisata, Mempublikasikan dan Mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki ke dalam dan luar negeri sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara dan mancanegara. Program ini menitik beratkan kepada 1). Melakukan Promosi Wisata 2). Penyediaan Materi Promosi. 3). Pelaksanaan Event Pariwisata.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Program Pelaksanaan**

(1) **Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri Pameran/epo)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.163.631.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.152.017.160,- atau 92,90%. *Outputnya* adalah Terlaksananya Pameran Dalam negeri di beberapa kota.

(2) **Penyediaan Materi Promosi Wisata**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.239.584.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.238.940.600,- atau 99,73%. *Outputnya* adalah Tersedianya Materi Promosi seperti Tas, Map, Pamflet. Baleho dan Spaduk.

(3) **Partisipasi Kegiatan Parade Tari Provinsi Kepulauan Riau**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.145.700.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.144.772.500,- atau 99,36%. *Outputnya* adalah Terselenggaranya Partisipasi Tim Tari Kabupaten Bintan pada Parade Tari Provinsi Kepulauan Riau.

(4) **Partisipasi Penyusunan Buku Highlight Pariwisata**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.245.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.234.575.500,- atau 95,51%. *Outputnya* adalah Terselenggaranya Partisipasi Tim Tari Kabupaten Bintan pada Parade Tari Provinsi Kepulauan Riau.

(5) **Penyelenggaraan Event Pariwisata (Tour De Bintan)**

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.729.800.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.713.102.000,- atau 99,03%. *Outputnya* adalah Terselenggaranya Event Pariwisata Tour De Bintan.

(6) **Penyelenggaraan Sail Indonesia (Sail Karimata)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.246.836.745,- atau 98,73%. *Outputnya* adalah Terselenggaranya Dukungan atas Kegiatan Sail Indonesia (Sail Karimata) yang menjadikan Pulau Bintan sebagai Eksis Point terakhir pada acara tersebut.

(7) **Wisataan Perdana**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.144.897.200,- atau 96,60%. *Outputnya* adalah

Terselenggaranya Kegiatan Penyambutan Wisatawan Perdana sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah terhadap Wisatawan yang datang pertama ke Kabupate Bintan melalui dengan harapan akan memberikan efek positif terhadap Kunjungan Wisatawan.

(8) Pengembangan Galery Promosi Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.230.053.821,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.168.634.581,- atau 73,30%. *Outputnya* adalah Terselenggaranya Kegiatan Galery Promosi Bintan sebagai Promosi dan etalase Kepariwisataaan Bintan di Kawasan Pariwisata Eksklusif Lagoi.

(9) Partisipasi Mengikuti Kepri Karnaval

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.217.400.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.215.150.300,- atau 98,97%. *Outputnya* adalah Terselenggaranya Kegiatan Partisipasi Mengikuti Kepri Karnaval sebagai wadah Kreatifitas Designer dalam mengkreasikan Potesi Seni dan Budaya yang dimiliki untuk meningkatkan branding Kepariwisataaan Kepulauan Riau.

(10) Penyelenggaraan Event Ironman Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.969.840.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.961.184.900,- atau 99,11%. *Outputnya* adalah Terselenggaranya Kegiatan Event Pariwisata Ironman Bintan yang merupakan salah satu Event Internasional dalam meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik.

(11) Festival Tari

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.236.450.000,-dan realisasi anggaran sebesar Rp.235.303.000,- atau 99,51%. *Outputnya* adalah Terselenggaranya Kegiatan Festival Tari Bintang yang merupakan Wadah Kompetisi dalam menali Kreativitas Pelaku seni tari dalam Mengembangkan Seni tari di Kabupaten Bintang selain itu juga dapat di jadikan atraksi budaya dalam meningkatkan daya tarik wisata Budaya Kabupaten Bintang.

(12) Pentas Kesenian Rakyat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.136.160.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.132.943.300,- atau 97,64%. *Outputnya* adalah Terselenggaranya Kegiatan Pentas Kesenian Rakyat yang merupakan Peyelenggaraan Atraksi dan juga mempromosikan kekayaan Seni dan Budaya Bintang sebagai salah satu daya tarik wisata Budaya Kabupaten Bintang.

(13) Kegiatan Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.381.960.000,-dan realisasi anggaran sebesar Rp.380.142.850,- atau 99,52%. *Outputnya* adalah Terselenggaranya Kegiatan Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya adalah partisipasi kabupaten Bintang dalam mengikuti pawai taqruf yan diselenggarakan oleh provinsi Kepri dan juga sebagai langkah mempromosikan potensi seni dan budaya yang miliki Kabupaten Bintang.

(14) **Kegiatan Penyelenggaraan Event Pariwisata (Moonrunner)**

ini dilaksanakan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.330.000.000,-dan realisasi anggaran sebesar Rp.322.158.500,- atau 97,62%. *Outputnya* adalah Terselenggaranya Event Pariwisata (**Moonrunner**) merupakan salah satu event pariwisata unggulan yang di kembangkan untuk menarik pangsa pasar wisata minat khusus Marathon yang telah memiliki komunitas internasional di beberapa negara Tetangga seperti Singapura, Malaysia, Korea, Japan dan Thailand.

(15) **Kegiatan Penyelenggaraan Event Pariwisata (Spartan Bintan)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,-dan realisasi anggaran sebesar Rp.243.821.500,- atau 97,53%. *Outputnya* adalah Terselenggaranya Event Pariwisata (**Spartan Bintan**) merupakan salah satu event pariwisata Perdana yang dilaksanakan berdasarkan trend baru dimana event ini akan mengait wisatawan minat khusus gemar akan olah raga yang menantang dan memiliki resiko tinggi.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Perlunya Meningkatkan Kerjasama yang intensif terhadap Instansi Vertikal seperti Imigrasi, Bea Cukai dan Polisi dalam memberikan pelayanan terhadap Wisatawan Khususnya pada pintu masuk Pelabuhan.

2) **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan** dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.140.155.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.139.781.700,- atau 99,73%. *Outcome* program ini adalah Pelayanan Pemerintah dalam meningkatkan Kualitas dan kuantitas Sarana Maupun Prasarana serta Objek dan Dayatarik Pariwisata. Program ini menitik beratkan kepada 1). Menata Kawasan Objek Pariwisata 2). Penyediaan Fasilitas Objek Pariwisata. 3). Memelihara, Merawat dan Mengamankan Sarana dan Prasarana Pariwisata Daerah

a. **Program Pelaksanaan**

Kegiatan Pemeliharaa Objek/Kawasan Pariwisata, Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.155.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.139.781.700,- atau 99,73%. *Outputnya* adalah Tersedianya Fasilitas Perlindungan Pengembangan Benda dan Warisan Budaya yang ada di Kabupaten Bintan (Musium Bahari Bintan).

b. **Permasalahan dan Solusi**

Masih kurangnya sistim Pengamanan Gedung yang ada di Musium Bahari, mengingat terdapat benda-benda sejarah yang berharga seperti Keramik peninggalan Dinasti Ming yang diserahkan dari Kejaksaan negeri solusinya Perlu Pelatihan Khusus Bagi Penjaga musium agar mampu melakukan pelayanan dengan baik.

3) **Program Peningkatan Informasi Pasar Pariwisata**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan** dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.57.231.800,- atau 95,39%. *Outcome* program ini adalah Peningkatan Informasi

Kepariwisataan Bintang Kepada wisatawan Domestik dan Mancanegara. Program ini menitik beratkan kepada 1). Informasi Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata Pariwisata 2). Kalender Event Pariwisata Bintang.

a. Pelaksanaan Program

Pemeliharaan Web Site, kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.57.231.800,- atau 95,39%. *Outputnya* adalah Tersedianya Fasilitas Informasi yang update secara elektronik (Web Site).

b. Permasalahan dan solusi

Pelaksanaan program Peningkatan Informasi Pasar Pariwisata tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4.2.2. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Kelautan dan Perikanan** adalah sebagai berikut :

1) Produksi perikanan budidaya

Tahun 2016 tercatat sebesar **1.512,60** angka produksi ini meningkat lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar **Ton 1.696,63**

2) Jumlah sarana dan prasarana budidaya perikanan

Untuk tahun 2016 mencapai **2/451/130 unit/kantong/ha**

3) Persentase kelompok nelayan yang aktif 53%

4) Persentase Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) aktif 25%.

5) Persentase UMKM perikanan yang aktif 40%

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Perikanan Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.43.749.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.43.552.735,- atau 99,55%. *Outcome* Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bintan dengan kegiatan

a. Pelaksanaan Program

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.43.749.000,- dan realisasi sebesar Rp.43.552.735,- atau 99,55%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pelayanan Perizinan Usaha sebanyak 100 izin Usaha.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Perikanan Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.67.137.984,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.66.293.416,- atau 98,74%. *Outcome* Meningkatnya Kapasitas Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap.

a. Pelaksanaan Program

(1) Monitoring Dan Evaluasi Distribusi BBM Bagi Nelayan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.32.435.984,- dan realisasi sebesar Rp.32.011.516,- atau 98,69%. *Output* kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendistribusi BBM Bersubsidi bagi Nelayan.

(2) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Bidang Perikanan Tangkap (Pendampingan Percepatan Penerbitan Kartu Nelayan)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.34.702.000,- dan realisasi sebesar Rp.34.281.900,- atau 98,79%. *Output* dari kegiatan ini adalah Tersedianya operasional Operasional Penerbitan Kartu Nelayan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

3) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Perikanan Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.212.182.609,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.211.702.485,- atau 99,77%. *Outcome* Meningkatnya Daya Saing Produk Perikanan.

a. Pelaksanaan Program

(1) Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.2.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.950.000,- atau 100%. *Output* dari kegiatan ini adalah Tersedianya Bantuan Alat Pengolah hasil perikanan

(2) Perbaikan Peralatan Pabrik Es

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.65.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.64.982.000,- atau 99,97%. *Output* dari kegiatan ini adalah Peralatan Pabrik es Kawal dapat berfungsi dengan baik.

(3) Lomba Masak Menu Serba Ikan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.144.232.609,- dan realisasi sebesar Rp.143.770.485,- atau 99,68 %. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

Belum adanya dukungan permodalan yang memadai untuk pengembangan subsektor perikanan dan lemahnya penguasaan pasar (*market intelligence*) hal ini ditandai menurunnya pendapatan masyarakat nelayan.

4) Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Perikanan Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.559.088.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.552.808.048,- atau 98,88%. Outcome Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

a. Pelaksanaan Program

(1) Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendukung Desalinasi Air Laut

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.70.924.000,- dengan realisasi sebesar Rp.70.771.150,- atau 99,78%. *Output* dari kegiatan ini adalah Peningkatan Dukungan sarana dan prasarana air bersih di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Konservasi dan Perindungan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan (Konservasi Penyu)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.119.336.900,- dengan realisasi sebesar Rp.117.619.250,- 98,56%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya konservasi dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan pengelolaan penyu dan ekosistem terkait di 2 Kecamatan.

(3) Konservasi dan Perlindungan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan (Operasional dan Pendampingan Program Coremap *Coral Triangle Inintiation* (CTI))

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.368.828.000,- dan realisasi sebesar Rp.364.417.648,- atau 98,80%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya konservasi dan perlindungan sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai pendamping kegiatan rehabilitasi dan

pengelolaan terumbu karang, mangrove dan seagrass di 3 kecamatan dan 9 desa MMAS.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Perikanan Kabupaten Bintan** melalui 5 (lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.752.957.319,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.409.721.477,- atau 80,42%. *Outcome* Meningkatnya Kapasitas Pengembangan Sumberdaya Perikanan.

a. Pelaksanaan Program

(1) Penunjang DAK Perikanan Budidaya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.122.156.260,- dengan realisasi sebesar Rp.55.983.388,- atau 45,83%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Operasional Penunjang Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya.

(2) Monev Hama, Penyakit Ikan Dan Kesehatan lingkungan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.50.933.200,- dengan realisasi sebesar Rp.50.357.250,- atau 98,87%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengendalian HPI dan Kesehatan Lingkungan BDIAT dan BDL di 9 Kecamatan.

(3) Peningkatan Prasarana Dan Sarana Pembudidayaan Perikanan (DAK Budidaya)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.1.414.776.000,-dengan realisasi sebesar Rp.1.140.395.280,- atau 80,61%. *Output* dari kegiatan ini adalah Tersedianya kolam induk sebanyak 1 unit, bak pemijahan sebanyak 8 petak, gudang pakan sebanyak 4 petak, rumah pompa sebanyak 1 unit, rumah genset sebanyak 2 unit, tandon air sebanyak 2 unit dan KJA sebanyak 49 kantong.

(4) **Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.15.091.859,-dengan realisasi sebesar Rp.15.091.859,- atau 100%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pengembangan usaha budidaya perikanan air tawar dan laut.

(5) **Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan (Dukungan Infrastruktur HSRT)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.150.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp.147.893.700,- atau 98,60%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan/ DED pembangunan tambatan perahu dan terlaksananya identifikasi serta verifikasi calon pokdakan penerima bantuan.

b. Permasalahan dan Solusi

Adanya ketimpangan pemanfaatan stock ikan antara kawasan Pantai Barat yang sudah "*over fishing*" dibandingkan dengan Kawasan Pantai Timur dan Utara Bintan yang pemanfaatannya belum optimal, termasuk kawasan ZEE laut Cina Selatan yang masih sedikit disentuh oleh nelayan Bintan. Suhubungan dengan itu dilakukan alih usaha nelayan ke usaha budidaya KJA (Kerapu).

6) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Perikanan Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.62.027.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.62.025.740,- atau 99,99%. *Outcome* Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.

a. Pelaksanaan Program

Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.62.027.000,- dengan realisasi sebesar Rp.62.025.740,- atau 99,99%. *Output* dari kegiatan ini terlaksananya pengawasan terhadap pelaku usaha Perikanan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4.2.3. URUSAN PERTANIAN

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kedelapan** terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Pertanian adalah sebagai berikut :

1) Capaian produksi tanaman sayuran 20.571 Ton

Capaian produksi tanaman sayuran tahun 2016 mencapai 20.571 ton angka ini meningkat bila dibandingkan pada tahun 2015 yang tercatat 19.248 ton.

2) Capaian produksi tanaman buah-buahan 12.017 Ton

Sedangkan untuk produksi tanaman buah-buahan mengalami penurunan produksi dari 18.506 ton pada tahun 2015 menjadi 12.016 ton pada tahun 2016. Penurunan produksi ini disebabkan serangan hama yang terjadi pada komoditas kakao dan kelapa.

3) Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (Jalan usaha tani dan jalan produksi) (Km).

Jalan pertanian merupakan indikator baru dalam urusan pertanian. Untuk tahun 2016 datanya belum tersedia karena belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalan-jalan yang sering digunakan untuk lalu lintas transportasi hasil pertanian.

4) Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber air (Unit).

Demikian pula untuk sumber-sumber air yang digunakan untuk sarana penyiraman tanaman pertanian merupakan indikator baru dalam urusan pertanian. Untuk tahun 2016 belum tersedia data karena belum dilakukan monitoring dan evaluasi.

5) Jumlah Produksi Daging dan Telur 6.824 Ton

Jumlah produksi daging menunjukkan angka yang meningkat cukup baik yaitu tercatat 6.834 ton. Meningkat bila dibandingkan dengan produksi tahun 2015 yang tercatat sebesar 4.360 ton

6) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bintan tahun 2015 yang tercatat sebesar 100,48; untuk tahun 2016 data belum dirilis dan masih diolah oleh BPS.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) **Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura berkelanjutan**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pertanian Kabupaten Bintan** melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.232.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.222.190.850,- atau 95,52%. *Outcome* Terlaksananya Peningkatan Produksi, Produktifitas dan mutu produk tanaman Hortikultura Berkelanjutan dengan beberapa kegiatan pokok antara lain sebagai berikut :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000 dan realisasi sebesar Rp.73.391.450 atau 97.86%. *output* kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan monitoring dan pelaporan pupuk bersubsidi dan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi TA. 2016 Target hasil kegiatan (*outcome*) berupa terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi sehingga penyalurannya tepat sasaran dan tersusunnya RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2016. Dalam penerapan pemupukan berimbang sangat dibutuhkan modal yang cukup, sedangkan kemampuan permodalan petani sangat terbatas dalam membiayai kebutuhan usaha taninya. Untuk itu pemerintah memfasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, agar petani dapat menerapkan teknologi pemupukan berimbang guna meningkatkan produksi dan pendapatannya. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di penyalur resmi di lini IV sebagaimana ditetapkan pemerintah. Agar pelaksanaan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik maka Pemerintah Kabupaten Bintan

telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2016. Realisasi penebusan pupuk bersubsidi Kabupaten Bintan per-Kecamatan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.43 : Realisasi penebusan pupuk bersubsidi Kabupaten Bintan per-Kecamatan tahun 2016

NO	KECAMATAN	RDKK (Kg)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORG
1	Bintan Timur	11,600	2,150	2,300	21,300	3,160
2	Bintan Pesisir	0	0	0	900	1,000
3	Mantang	200	0	0	1,000	0
4	Gunung Kijang	17,850	7,400	300	44,150	12,840
5	Toapaya	12,750	5,650	500	47,350	9,840
6	Teluk Bintan	15,700	8,000	2,500	23,650	10,000
7	Teluk Sebong	28,600	4,300	600	61,900	27,520
8	Bintan Utara	15,700	7,350	1,800	31,200	1,080
9	Seri Kuala Lobam	3,550	2,700	550	14,600	6,480
10	Tambelan	0	0	0	9,000	0
JUMLAH		105,950	37,550	8,550	255,050	71,920

NO	KECAMATAN	REALISASI PENYALURAN (Kg)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORG
1	Bintan Timur	10,500	1,000	1,000	20,000	280
2	Bintan Pesisir	0	0	0	1,000	0
3	Mantang	0	0	0	0	0
4	Gunung Kijang	9,800	850	0	31,500	5,120
5	Toapaya	9,200	750	100	34,050	1,000

6	Teluk Bintang	8,000	0	0	24,000	1,000
7	Teluk Sebong	9,900	1,400	0	54,150	1,240
8	Bintan Utara	6,500	2,350	900	23,450	0
9	Seri Kuala Lobam	600	650	0	6,850	520
10	Tambelan	0	0	0	4,000	0
JUMLAH		54,500	7,000	2,000	199,000	9,160

m

NO	KECAMATAN	KUOTA (Kg)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORG
1	Bintan Timur	8,000	1,000	1,000	18,000	2,000
2	Bintan Pesisir	0	0	0	1,000	0
3	Mantang	200	0	0	1,000	0
4	Gunung Kijang	9,000	1,000	0	30,000	2,000
5	Toapaya	7,000	1,000	0	31,000	1,000
6	Teluk Bintang	7,000	1,000	0	20,000	1,000
7	Teluk Sebong	15,000	2,000	0	55,000	2,000
8	Bintan Utara	6,500	3,000	1,000	25,000	1,000
9	Seri Kuala Lobam	3,300	1,000	0	12,000	1,000
10	Tambelan	0	0	0	7,000	0
JUMLAH		56,000	10.000	2,000	200.00	10,000

sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan Tahun 2017

realisasi keluaran dan hasil kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan atau tercapai 100%.



Gambar 4.2 : Rapat penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi

(2) **Pengembangan Sarana dan Prasarana Tanaman Sayuran Dataran Rendah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.000.000 dan realisasi sebesar Rp.30.318.800 atau 86.63%. *output* kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan petani tanaman sayuran dataran rendah sebanyak 10 Kelompok Tani



Gambar 4.3 : Pembinaan Tanaman Sayuran Dataran rendah di Bintan

Inti dari kegiatan ini adalah pembinaan kelompok tani pengembang tanaman sayuran dataran rendah pada

Kecamatan Bintan Timur, Toapaya, Gunung Kijang, Teluk Bintan dan Teluk Sebong. Kegiatan ini bertujuan untuk membina kelompok tani yang berusaha di bidang pertanian khususnya tanaman sayuran dataran rendah terkait dengan peraturan hibah, tata cara pengajuan proposal, permasalahan yang dihadapi petani dalam usaha tani dan target rencana strategi yang telah disusun. Kelompok tani yang dibina antara lain :

a. Kecamatan Bintan Timur :

- Kelompok tani Wacopek Andalan Ketua Tjung Kang)
- Kelompok tani Pemuda Lingkar Wacopek (Ketua Edy Yazid)

b. Kecamatan Toapaya :

- Kelompok tani Bina Karya (Ketua Tusiran)
- Kelompok tani Horti Karya (Ketua Tan Hak Sun)
- Kelompok tani Sari Tani (Ketua Syaifuddin)
- Kelompok tani Maju Jaya (Ketua Sayed)

c. Kecamatan Gunung Kijang :

- Kelompok tani Waras (Ketua Sumaryono)
- Kelompok tani Maju Bersama (Ketua Misdar)
- Kelompok tani Sido makmur (Ketua Katemin)
- Kelompok tani Makmur (Ketua Sofyan)

d. Kecamatan Teluk Bintan :

- Kelompok tani Ngudi Luhur (Ketua Sutarno)
- Kelompok tani Unggul Jaya (Ketua Hendri Silalahi)

e. Kecamatan Teluk Sebong :

- Kelompok tani Sri Rezeki (Ketua Mispani)
- Kelompok tani Sekuning Makmur (Ketua Tahang)

Realisasi keluaran dan hasil kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan atau tercapai 100%.

(3) **Pengembangan Tanaman Bawang Merah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.600.000 dan realisasi sebesar Rp.44.493.350 atau 93.47%. *output* kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan petani bawang merah sebanyak 8 Kelompok tani yang berada di 5 kecamatan antara lain : Kecamatan Bintan Timur, Toapaya, Gunung Kijang, Seri Kuala Lobam dan Bintan Utara. Pembinaan dilakukan pada :

a. Kecamatan Bintan Timur

- Kelompok Tani Usaha Pemuda Lingkar Wacopek (ketua Edy Yazid)

b. Kecamatan Toapaya

- Kelompok tani Harapan Jaya (ketua Supriyanto)

c. Kecamatan Gunung Kijang

- Kelompok tani Sido Makmur (ketua Katemin)
- Kelompok tani Karya Tani (Ketua Tirham)

d. Kecamatan Seri Kuala Lobam

- Kelompok tani Mitra Mandiri (ketua Meidi Supriadi)

e. Kecamatan Bintan Utara

- Kelompok tani Margo Mukti (ketua Sahabuddin)
- Kelompok tani Maju Jaya (ketua Suparman)

Realisasi hasil (Outcome) dan hasil kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan atau tercapai 100%.

Bawang merah (*Allium ascalonicum*) merupakan tanaman semusim yang banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan bawang merah semakin meningkat karena hampir semua masakan membutuhkan komoditas rempah-rempah ini. Pada periode tahun 1986-1990, Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor bawang merah, tetapi kini negara kita menjadi pengimpor komoditas ini. Jumlah impornya mencapai ribuan ton, bahkan di tahun 2013 ini

harganya dapat melonjak hingga 70 ribu per kg karena kelangkaan pasokan akibat gagalnya panen petani dan permainan para importir nakal, sehingga harga bawang dipermainkan dan membuat susah rakyat kecil dan semua golongan. Guna memenuhi kebutuhan bawang merah dan menjamin ketersediaan di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pertanian mengembangkan budidaya bawang merah. Diharapkan petani dapat menjadikan pengembangan bawang merah sebagai alternatif usaha tani yang prospektif karena tingginya kebutuhan terhadap bawang merah dan harga jual yang tinggi.

(4) Pengembangan Bibit Tanaman Hortikultura dan Peningkatan produk unggulan Daerah,

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000 dan realisasi sebesar Rp.73.987.250 atau 98,65%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan pengembangan tanaman hortikultura produk unggulan sebanyak 300 batang dengan lokasi di Kecamatan Bintan Utara. Inti dari kegiatan ini adalah pengembangan pengelolaan produk unggulan daerah yaitu 3 varietas tanaman salak "SARI INTAN" dan Alpukat untuk peningkatan jumlah produksi tanaman Hortikultura. " Sari Intan" yang merupakan kepanjangan dari "SALAK RESEARCH INSTITUTE OF FRUIT BINTAN" ada 3 varietas yang telah dilepas, yaitu : SARI INTAN 48 (SK Mentan No. 3510/KPTS/SR.120/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009), SARI INTAN 295 (SK Mentan No. 3511/KPTS/SR.120/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009) dan SARI INTAN 541 (SK Mentan No. 3512/KPTS/SR.120/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009). Saat ini Populasi Salak Sari Intan di Balai Benih Kabupaten (BBK) sebanyak 255 pohon dengan perincian sebagai berikut : Sari Intan 48 sebanyak 55 pohon, Sari Intan 295 sebanyak 100 pohon, dan Sari Intan 541 sebanyak 100 pohon. Selain itu,

kegiatan ini juga berupaya untuk meningkatkan jumlah populasi tanaman dengan cara disebar/dihibahkan kepada masyarakat yaitu :

a. Bibit tanaman **Alpukat** sebanyak 300 batang berdasarkan SK Bupati Nomor 430/XI/2016 tanggal 11 November 2016 diserahkan kepada :

1. Kelompok Tani Semangat Kerja yang beralamat di Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara sebanyak 100 Batang
2. Kelompok Tani Bumo Jaya yang beralamat di Kelurahan Tanjung Uban Timur, Kecamatan Bintan Utara sebanyak 100 Batang
3. Kelompok Tani Pisang yang beralamat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara.



Gambar 4.4 : Penyebaran bibit alpukat yang disebarakan ke petani

b. Bibit tanaman salak **Sari Intan** sebanyak 1.200 batang berdasarkan SK Bupati No 329/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 diserahkan kepada kepada :

1. Suwadi Kelompok Tani Maju Jaya yang beralamat di Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya sebanyak 100 Batang

2. Junianto Kelompok Tani Maju Jaya yang beralamat di Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya sebanyak 100 Batang
3. Suparno Kelompok Tani Maju Jaya yang beralamat di Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya sebanyak 100 Batang
4. Hendro Priyono Kelompok Tani Jaya Patih yang beralamat di Desa Ekan Anculai Kecamatan Teluk Sebong sebanyak 100 Batang
5. Ali Aspan Kelompok Tani Poyotomo Makmur yang beralamat di Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong sebanyak 300 Batang.
6. Rahim Kelompok Tani Poyotomo Makmur yang beralamat di Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong sebanyak 200 Batang
7. Sukatwan Kelompok Tani Poyotomo Makmur yang beralamat di Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong sebanyak 100 Batang



Gambar 4.5 : Petani Mendapatkan Bantuan Bibit Salak Sari Intan untuk dikembangkan sekaligus sebagai penangkar

f. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Rasionalisasi anggaran/penghematan menyebabkan alokasi bantuan untuk kelompok tani yang bersumber dari APBD II berkurang drastis
- b. Terkait mekanisme pemberian bantuan hibah yang mengharuskan kelompok tani berbadan hukum/terdaftar, sedangkan seluruh kelompok tani di Kabupaten Bintan masih belum berbadan hukum/terdaftar
- c. Sumber bibit/benih masih mendatangkan dari luar pulau Bintan
- d. Potensi tanah di beberapa daerah masih miskin unsur hara sehingga diperlukan upaya pemupukan
- e. Penurunan jumlah luas tanam dan produksi yang disebabkan meningkatnya cost produksi dan gagal panen serta permasalahan pemasaran dan pengolahan hasil pertanian
- f. Harga jual produksi yang masih belum berpihak kepetani

2) Solusi

- a. Perlu adanya upaya pengusulan anggaran dari sumber pendanaan selain APBD II
- b. Perlu adanya upaya dorongan kepada kelompok tani agar sesegera mungkin mendaftarkan / membentuk badan hukum kelompoknya agar pada tahun mendatang dapat diusulkan menjadi penerima bantuan hibah.
- c. Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas Balai Benih Kabupaten sebagai Balai penangkar dan sumber bibit/benih di Kabupaten Bintan.

- d. Peningkatan penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan dan upaya peningkatan kapasitas daya dukung lahan
- e. Peningkatan penggunaan pengendalian organisme pengganggu tanaman secara hayati serta perlakuan pasca panen yang baik
- f. Perlu adanya kebijakan untuk memutus panjangnya rantai pemasaran dan peraturan pasar yang berpihak pada petani.

2) **Program Peningkatkan Produksi Hasil Peternakan**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pertanian Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.108.900.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.87.657.300,- atau 80,49%. *Outcome* Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dengan beberapa kegiatan pokok antara lain sebagai berikut :

a. **Pelaksanaan Program**

- (1) **Pengembangan ternak masyarakat**, dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.900.000 dan realisasi sebesar Rp.21.300.700 atau 79.18%. *output* kegiatan ini adalah Pengembangan ternak masyarakat dimaksudkan untuk mengembangkan ternak yang ada di masyarakat sesuai potensi lokasi dan keinginan masyarakat yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat utamanya keluarga yang pada gilirannya juga dapat menunjang perekonomian keluarga. Jenis ternak yang dikembangkan adalah ternak kambing sebanyak 25 ekor untuk 1 kelompok tani di Kecamatan Bintan Pesisir. Dengan ketidakpastian aturan hukum bagi kegiatan yang menyangkut belanja hibah dan adanya penghematan anggaran, maka seluruh belanja hibah dikembalikan ke kas

daerah. Kepastian bisa dilaksanakan kegiatan pendukung (belanja ATK dan belanja perjalanan dinas) di triwulan 3, sehingga belanja ATK dan perjalanan dinas tidak dapat terealisasi 100%. Belanja perjalanan dinas diperuntukkan bagi pembinaan kelompok tani yang telah menerima bantuan ternak pada tahun sebelumnya.

- (2) **Pengembangan Budidaya Ternak Unggas**, dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.000.000 dan realisasi sebesar Rp.45.796.100 atau 80.34%. *output* kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dalam rangka pengembangan budidaya ternak unggas. Pengembangan budidaya ternak unggas dimaksudkan untuk mengembangkan ternak yang ada di masyarakat sesuai potensi lokasi dan keinginan masyarakat yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat utamanya keluarga yang pada gilirannya juga dapat menunjang perekonomian keluarga. jenis ternak yang dikembangkan adalah ternak ayam buras sebanyak 5000 ekor dan ayam ras pedaging sebanyak 2000 ekor untuk kelompok tani di Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Bintan Utara. Dengan ketidakpastian aturan hukum bagi kegiatan yang menyangkut belanja hibah dan adanya penghematan anggaran, maka seluruh belanja hibah dikembalikan ke kas daerah. Kepastian bisa dilaksanakan kegiatan pendukung (belanja ATK dan belanja perjalanan dinas) di triwulan 3, sehingga belanja ATK dan perjalanan dinas tidak dapat terealisasi 100 %. Belanja perjalanan dinas diperuntukkan bagi pembinaan kelompok tani yang telah menerima bantuan ternak pada tahun sebelumnya.
- (3) **Budidaya Ternak Kambing**, dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000 dan realisasi sebesar Rp.20.560.500 atau 82.24%. *output* kegiatan ini adalah

terlaksananya pembinaan Budidaya Ternak Kambing. Pengembangan budidaya ternak kambing dimaksudkan untuk mengembangkan ternak kambing yang ada di masyarakat sesuai potensi lokasi dan keinginan masyarakat yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat utamanya keluarga yang pada gilirannya juga dapat menunjang perekonomian keluarga. Ternak kambing yang diadakan sebanyak 50 ekor untuk 1 kelompok tani di Kecamatan Tambelan. Dengan ketidakpastian aturan hukum bagi kegiatan yang menyangkut belanja hibah dan adanya penghematan anggaran, maka seluruh belanja hibah dikembalikan ke kas daerah. Kepastian bisa dilaksanakan kegiatan pendukung (belanja ATK dan belanja perjalanan dinas) di triwulan 3, sehingga belanja ATK dan perjalanan dinas tidak dapat terealisasi 100%. Belanja perjalanan dinas diperuntukkan bagi pembinaan kelompok tani yang telah menerima bantuan ternak pada tahun sebelumnya

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Laporan kejadian penyakit dari masyarakat sering terlambat
- b. Kurangnya koordinasi peternak dengan petugas paramedis di lapangan.
- c. Kurangnya tenaga Medik Veteriner.
- d. Minimnya pengawas kesmavet.
- e. Kurangnya sarana mobilitas petugas.
- f. Kurangnya pengetahuan dan skill petugas.
- g. Jauhnya rentang kendali petugas.
- h. Belum dimanfaatkan secara maksimal RPHU, karena kurangnya air bersih.

- i. Belum adanya RPHU di Kecamatan Bintan Timur.

2) Solusi

- a. Sosialisasi ke masyarakat untuk segera melaporkan setiap kejadian yang terjadi pada ternaknya ke petugas.
- b. Memaksimalkan petugas lapangan sebagai pemantau, jika ada masalah dikoordinasikan dengan pengawas Kesmavet.
- c. Memaksimalkan Medik Veteriner yang ada di kantor.
- d. Mengusulkan penambahan Medik Veteriner.
- e. Mengusulkan penambahan sarana mobilitas.
- f. Pelatihan/ Bimbingan Teknis.
- g. Pengadaan sumur bor sebagai sumber air bersih RPHU.
- h. Mengusulkan pembangunan RPHU di Kecamatan Bintan Timur.
- i. Mengusulkan pembentukan UPTD Keswan – Kesmavet.

3) Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pertanian Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.34.100.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.33.628.850,- atau 98,62%. *Outcome* Meningkatnya ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH dengan beberapa kegiatan pokok antara lain sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program

Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.100.000 dan realisasi sebesar Rp. 33.628.850 atau 98.62%. *output* kegiatan ini adalah tersedianya produk pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

merupakan segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dengan keluaran hasilnya adalah tersedianya produk pangan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Salah satu bentuk kegiatannya adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan hewan kurban pada saat Hari Raya Idul Adha, baik pada saat hewan sebelum disembelih maupun pemeriksaan daging (setelah hewan disembelih) dan pemantauan peredaran produk asal hewan (Daging ayam dan sapi) menjelang Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri di Pasar Tradisional. Kegiatan ini bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepri, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bintan dan BPPV Regional II Bukittinggi.

Capaian realisasi fisik kegiatan ini adalah sebesar 100 % disebabkan karena realisasi kegiatan semuanya telah selesai dilaksanakan seperti; melaksanakan survey pasar menjelang hari raya Idul Fitri untuk mengetahui ketersediaan jumlah daging ayam dan sapi yang ada di Kabupaten Bintan. Melakukan pemantauan hewan qurban yang dilaksanakan menjelang Hari Raya Qurban atau Idul Adha. Melakukan pembinaan dan pengawasan ke tempat tempat pemotongan ayam. pemantauan persiapan penempatan RPHU oleh pedagang di pasar baru Tanjung Uban. Melaksanakan inventarisasi asset yang ada di RPHU. Melakukan monitoring RPHU. Memberikan penjelasan kepada para tukang potong hewan bagaimana cara penanganan hewan qurban yang ASUH dan Aspek Kesrawan. Melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi tempat usaha peternakan

b. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahannya adalah masih awamnya pengetahuan masyarakat tentang Kesmavet terutama berkaitan dengan peningkatan dan penyediaan bahan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Solusinya adalah perlunya sosialisasi tentang Kesmavet, terutama kepada masyarakat yang terkait langsung dengan proses pengolahan bahan pangan asal hewan seperti pemotong ayam, penjual daging dipasar dan panitia pelaksana pemotongan hewan kurban pada saat hari raya idul adha.

4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pertanian Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.270.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.249.486.300,- atau 92,40%. *Outcome* Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dengan beberapa kegiatan pokok antara lain sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pengamanan ternak daerah dan pengendalian zoonosis,

Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah upaya menjaga kesehatan ternak di Kabupaten Bintan. Sasaran utama kegiatan ini adalah menjaga kesehatan ternak secara umum (sapi, kambing dan unggas) baik ternak Pemerintah maupun yang dimiliki oleh masyarakat dengan cara pelayanan aktif (aktif service) kesehatan hewan kepada masyarakat, pengendalian dan surveillance penyakit zoonosis dengan keluaran hasil meningkatnya ketahanan tubuh hewan/ ternak sehingga terciptanya kesehatan hewan yang berimplikasi terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat dan peningkatan pendapatan peternak di Kabupaten Bintan. Hingga tahun 2016 Kabupaten Bintan masih dinyatakan sebagai

daerah yang bebas dari beberapa penyakit zoonosis berbahaya seperti Rabies, Anthrak, Flu Babi, Brucelosis, Penyakit Mulut dan Kuku dan beberapa penyakit lainnya. Khusus Untuk Penyakit Rabies Provinsi Kepulauan Riau telah mendapat sertifikat Bebas Rabies dari Menteri Pertanian pada Tahun 2015. Capaian realisasi fisik kegiatan ini adalah sebesar 94,44 % disebabkan karena adanya pengembalian dana honor paramedis veteriner yang semula 5 OB dikarenakan 1 orang resign dibulan mei sehingga tinggal 4 OB, ada kelebihan sisa anggaran. Adapun realisasi fisik belanja obat obatan hewan diberikan kepada masyarakat petani ternak yang ada di Kabupaten Bintan. Melakukan pengecekan kebuntingan sapi, pengobatan hewan/ternak yang sakit, pemeriksaan atau pengecekan masalah lalat yang ada di Kandang peternak, investigasi kematian ayam mendadak. Serta melakukan surveilans penyakit hewan menular dengan melakukan pengambilan sampel unggas dan sapi untuk monitoring penyakit Avian Influenza, New Castle Disease, Pullorum, Mycoplasmosis, Brucellosis, dan Endoparasit. serta penyidikan dan pengujian penyakit gangguan reproduksi, monitoring zoonosis, monitoring eksotik dan pembinaan lab pengambilan sampel yang dilakukan bersama Balai Veteriner Bukittinggi meliputi serum darah sapi, ulas darah sapi, serum darah kambing, ulas darah kambing, telur dari 10 farm.



Gambar 4.6 : Pemeriksaan rutin kesehatan ternak sapi di Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. yakni Kecamatan Toapaya, Teluk Bintan, Teluk Sebong, Bintan Timur, Bintan Pesisir, Seri Kuala Lobam, Mantang, Bintan Utara, Gunung Kijang dan Tambelan. Namun demikian, mengingat daerah potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Bintan terfokus di Pulau Bintan saja, maka fokus pelayanan keswan dominan di pulau Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

Masih kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) baik tenaga teknis (paramedic veteriner dan sarjana peternakan) sehingga pelaksanaan tugas kurang optimal dan adanya penghematan anggaran tahun 2015 mengakibatkan Dokumen Lingkungan Hidup pada Puskesmas dan RPH Unggas belum terlaksana. Adapun tindak lanjutnya adalah mengusulkan penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) terutama tenaga teknis lapangan seperti Paramedis veteriner dan sarjana peternakan dan mengusahakan usulan penyusunan Lingkungan Hidup pada Puskesmas dan RPH Unggas pada Tahun anggaran yang akan datang.

5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pertanian Kabupaten Bintan** melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.252.700.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.242.656.925,- atau 92,40%. *Outcome* Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dengan beberapa kegiatan pokok antara lain sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program

(1) Peningkatan sarana dan prasarana Balai Benih Kabupaten,

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.000.000 dan realisasi sebesar Rp.139.872.500 atau 99.91%. *output* kegiatan ini adalah tersedianya sarana prasarana alat pertanian dan peningkatan pengetahuan petani. Terlaksananya penyediaan sarana dan produksi tanaman hortikultura. Kegiatan pokok dari kegiatan ini adalah Tersedianya Obat-Obatan sebanyak 35 liter, pupuk kandang sebanyak 450 karung, pupuk NPK sebanyak 450 Kg, serta satu unit Tower Air. Selain itu juga menghasilkan bibit tanaman salak sari intan sebanyak 1.000 batang serta bibit tanaman buah-buahan sebanyak 700 batang diantaranya mangga, lengkeng, durian, jambu air, jambu batu, jeruk sambal, sirsak dan lain-lain.

(2) Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.700.000 dan realisasi sebesar Rp.30.327.100 atau 92.74%. *output* kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan intensifikasi tanaman pangan. Inti dari kegiatan ini adalah pembinaan kelompok tani intensifikasi pertanian tanaman pangan pada Kecamatan Bintan Timur, Teluk Bintan dan Teluk Sebong. Kegiatan ini bertujuan untuk membina kelompok tani yang berusaha di bidang pertanian khususnya tanaman padi dan tanaman pangan lainnya terkait dengan peraturan hibah, tata cara pengajuan proposal, permasalahan yang dihadapi petani dalam usaha tani dan target rencana strategi yang telah disusun. Kelompok tani yang dibina antara lain :

a. Kecamatan Bintan Timur :

- Kelompok tani Sumber Makmur (Ketua Poniran)
- Kelompok tani Pemuda Lingkar Wacopek (Ketua Edy Yazid)
- Kelompok tani Makarti Mukti (Riswadi)

b. Kecamatan Teluk Bintan :

- Kelompok tani Hidup Bersama (Ketua Edy Yazid)
- Kelompok tani Cahaya Purnama (Ketua Zainal Abidin)

c. Kecamatan Teluk Sebong :

- Kelompok tani Poyotomo Makmur (Ketua Ali Aspan)
- Kelompok tani Sido Mekar (Ketua Afandi)
- Kelompok tani Wira Mandiri (Ketua Kadeni) tidak terealisasi pada tahun 2016 dikarenakan adanya penghematan anggaran.

(3) **Peningkatan sarana dan prasarana Pertanian**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000 dan realisasi sebesar Rp.38.307.875 atau 95.77%. *output* kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani, sebenarnya anggaran peningkatan sarana dan prasarana pertanian tidak Rp.40.000.000,- melainkan Rp.230.000.000,-tetapi karena adanya penghematan anggaran maka kegiatan hanya bisa melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani penerima bantuan alat pengolah tanah (Hand Traktor, Mini Tiller) saja. Adapun target dari kegiatan ini adalah pembinaan pada 17 Kelompok tani.

(4) **Penyediaan sarana pengendalian hama tanaman hortikultura**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 34.149.450 atau 85.37%. *output* kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan pengendalian hama dan penyakit tanaman hortikultura. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan petani kepada 10 Kelompok tani. Pembinaan Kelompok tani dilakukan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan petani dalam

pengendalian hama terpadu berasaskan Ramah lingkungan, diantara kelompok tani yang dikunjungi dalam proses pembinaan yaitu :

- Kel. Tani : Hidup Bersama, desa Bintan Buyu, Kec. Teluk Bintan
- Kel. Tani : Jaya Patih, Desa Ekang Anculai, Kec. Teluk Sebung
- Kel. Tani : Wahana Tani, Desa Toapaya, Kec. Toapaya
- Kel. Tani : Bumo Jaya, Tanjung Uban Timur, Kec. Bintan Utara
- Kel. Tani : Maju Jaya, Desa Teluk Sasah, Kec. Seri Kuala Lobam
- Kel. Tani : Tunas Mandiri, Kel. Gn. Lengkuas, Kec. Bintan Timur
- Kel. Tani : Tegal sari, Desa Ekang Anculai, Kec. Teluk Sebung
- Kel. Tani : Harapan Jaya, Desa Lancang Kuning, Kec. Bintan Utara
- Kel. Tani : Beringin Jaya, Desa Kuala Sempang, Kec. Seri Kuala Lobam.

d. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia/ tenaga teknis dibidang Pertanian
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan Pertanian/Perkebunan.
- c. Potensi tanah di beberapa daerah masih miskin unsur hara sehingga diperlukan upaya pemupukan

- d. Pengelolaan lahan pertanian terkendala dengan status Hutan Lindung dan *catchment area* (daerah tangkapan air).

2) Solusi

- a. Penambahan Sumber Daya Manusia dibidang Pertanian, khususnya tenaga teknis Agronomi dan Hortikultura.
- b. Pembangunan dan pengadaan sarana dan Prasarana pendukung.
- c. Peningkatan penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan dan upaya peningkatan kapasitas daya dukung lahan
- d. Upaya perubahan status lahan dilaksanakan melalui usulan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pertanian Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.285.100.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.270.045.550,- atau 94,72%. Outcome Terlaksananya Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan dengan beberapa kegiatan pokok antara lain sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pemeliharaan Kebun Entrys Karet Dan Penanaman Sedling,

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.190.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 187.216.050 atau 98.53.%. *output* kegiatan ini adalah tersedianya obat-obatan, pupuk, polybag, tanah hitam di kebun entrys karet. Produksi karet khususnya produksi karet rakyat terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan banyaknya tanaman tua dan rusak serta pemilihan bibit tanaman karet non unggulan.

Pemerintah Kabupaten Bintan telah berupaya melakukan upaya revitalisasi dan peremajaan tanaman karet rakyat terhadap karet-karet tua yang tidak produktif dan optimalisasi populasi tanaman per satuan luas lahan. Upaya-upaya pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan diantaranya dengan melakukan pengadaan bibit unggul jenis PB. 260 dan membuat kebun bibit entrys karet di Km. 27 Kecamatan Toapaya pada tahun 2010. Kebun entres atau kebun karet okulasi adalah kebun yang dibangun secara khusus sebagai sumber penghasil mata tunas yang digunakan sebagai batang atas pada teknik okulasi dalam penyiapan bibit unggul karet. Dalam usaha memproduksi bibit karet bermutu, ketersediaan kebun entres sebagai sumber mata tunas atau kayu entres mutlak diperlukan. Sebagai sumber mata okulasi, maka jenis klon yang ditanam pada kebun entres berupa klon karet anjuran yang sudah merupakan benih bina, dan dikelola sesuai dengan standar teknis. Kebun entrys pada umumnya dipertahankan dalam waktu yang lama, yaitu lebih dari 8 tahun sehingga mampu menghasilkan kebun entres yang baik dan memenuhi persyaratan secara teknis. Kebun entres di Kecamatan Toapaya seluas 3,9 Ha dan telah ditanami bibit unggul jenis klon PB.260 sebanyak 1.823 batang dan IRR 39 sebanyak 5.885 batang dan sampai dengan saat ini telah menghasilkan bibit entrys sebanyak lebih kurang 45.000 batang.



Gambar 4.7 : Pembibitan karet okulasi di Kebun Entrys Kabupaten Bintan

Dalam upaya meningkatkan peranan kebun entrys sebagai sumber benih unggul di Kabupaten Bintan maka diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kebun bibit entrys diantaranya dengan melakukan pemeliharaan pada kebun entrys di Km. 27 Desa Toapaya Asri dan menambah berbagai sarana pengembangan diantaranya dengan membuat kebun bibit / seedling di Kota Kara Desa Bintan Buyu seluas 1 Ha. Berkenaan dengan hal tersebut maka pada tahun 2016 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan melalui sumber dana APBD Kabupaten Bintan mengalokasikan kegiatan pemeliharaan kebun entrys karet dan penanaman seedling. Tujuan pelaksanaan program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan melalui kegiatan Pemeliharaan Kebun Entrys karet dan Penanaman Seedling adalah sebagai berikut :

- ✓ Membuka lapangan wirausaha bagi masyarakat.
- ✓ Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/pekebun
- ✓ Membuka sentra sentra perkebunan karet.

Manfaat Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kebun Entrys Karet dan Penanaman Seedling adalah untuk menyediakan bibit karet unggul yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas kebun karet rakyat dan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani.

Kebun Entrys telah mendistribusikan bibit karet unggul sejak tahun 2013 dan sampai dengan akhir Desember Tahun 2015 kepada petani di Kabupaten Bintan dengan jumlah bibit sebanyak 41.000 bibit dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.44 : Kelompok Tani Penerima Bibit Karet Unggul Sumber Kebun Entrys Kabupaten Bintan

No.	Lokasi	Kelompok	Jumlah (Btg)	Tahun
1	Desa Kawal Kec. Gunung Kijang	Makmur	4.000	2013
2	Sri Bintan Kec. Teluk Bintan		2.000	2013
3	Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan	Ngudi Luhur	4.000	2013
4	Desa Pengujan Kec. Teluk Bintan	Bintan Jaya	7.500	2013
5	Kel. Tembeling Kec. Teluk Bintan	Cahaya Purnama	7.500	2013
6	Desa E kang Anculai Kec. Teluk Sebong	Jaya Patih	3.000	2014
7	Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan	Sido Muncul	3.000	2014
8	Desa Sri Bintan Kec. Teluk Sebong	Jati Mulyo	3.000	2015
9	Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan	Cahaya Purnama	2.000	2016
10	Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan	Ngudi Luhur	4.000	2016
11	Desa E kang Anculai Kecamatan Teluk Sebong	Jaya Patih	500	2016
12	Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara	Rambung Unggul	500	2016
Jumlah			41.000	

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan Tahun 2017

Pada tahun 2016 kebun entrys telah berhasil melakukan okulasi bibit tanaman karet sebanyak 11.000 batang. Dari jumlah bibit okulasi

tersebut telah didistribusikan kepada petani sebanyak 7.000 batang, hasil yang belum optimal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah musim kemarau yang panjang. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan Nomor : 525/SK/Distanhut/53 Tentang Penetapan Petani Penerima Bibit Karet Unggul Hasil Kebun Entrys Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2016 adalah Kelompok Tani Jati Ngudi Luhur Desa Bintan Buyu sebanyak 4.000 Batang, Kelompok Tani Rambung Unggul Desa Lancang Kuning sebanyak 500 Batang, Kelompok Tani Jaya Patih Desa Ekan Aculai sebanyak 500 Batang dan Kelompok Tani Cahaya Purnama Desa Tembeling sebanyak 2.000 Batang.

Disamping menjalankan fungsi sebagai penghasil bibit unggul kebun entrys di Km. 27 Desa Toapaya juga dijadikan sebagai tempat pelatihan bagi petani maupun petugas untuk meningkatkan kemampuan teknis okulasi karet unggul. Sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan pelatihan okulasi dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.45. : Kegiatan Pelatihan Petani Dan Petugas Okulasi

No.	Nama Kegiatan	Sumber Dana	Tahun	Jumlah Peserta	Peserta	Jumlah hari
1	Pelatihan okulasi karet	APBD I	2014	16 orang	Petani	14 Hari
2	Pelatihan okulasi karet	APBD II	2014	15 orang	Petugas Okulasi dan Petani Bintan buyu	5 Hari
	Jumlah			31 orang		

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan Tahun 2017

(2) Pengembangan Komoditi Perkebunan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.850.000 dan realisasi sebesar Rp.44.149.200 atau 80.49%. output kegiatan ini adalah terdistribusinya bibit okulasi karet unggul asal kebun entrys Kabupaten Bintan. Tujuan pelaksanaan program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan melalui kegiatan Pengembangan Komoditi Perkebunan adalah untuk : membuka lapangan wirausaha bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/pekebun serta membuka sentra sentra perkebunan karet.

Keluaran dari Kegiatan Pengembangan Komoditi Perkebunan adalah terdistribusinya bibit okulasi karet unggul asal Kebun Entrys Kabupaten Bintan, yang akan diberikan kepada kelompok petani perkebunan. Kelompok tani yang menerima bantuan bibit karet okulasi adalah Kelompok Tani Ngudi Luhur, Kelompok Tani Cahaya Purnama, Kelompok Tani Jaya Patih dan Kelompok Tani Rambung Unggul. Rincian bantuan yang diberikan adalah berupa bibit karet okulasi : 4.000 batang untuk Kelompok Tani Ngudi Luhur jumlah anggota 8 KK dan luas lahan 8 Ha di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan, Kelompok Tani Cahaya Purnama berupa bantuan bibit karet okulasi sebanyak 2.000 batang dengan jumlah anggota 4 KK dan luas lahan 4 Ha di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan, Kelompok Tani Jaya Patih di Desa Ekan Aculai Kecamatan Teluk Sebong, dengan bantuan bibit karet okulasi sebanyak 500 batang untuk keperluan penyulaman tanaman karet yang mati pada Kegiatan Perluasan Tanaman Karet tahun 2014, serta Kelompok tani Rambung Unggul di Desa Lancang Kuning



Gambar 4.8 : Penyerahan bibit karet okulasi hasil Kebun Entrys
Kabupaten Bintan Kepada Petani

Kecamatan Bintan Utara, dengan bantuan bibit karet okulasi sebanyak 500 batang untuk keperluan penyulaman tanaman karet yang mati pada Kegiatan Perluasan Tanaman Karet tahun 2014.

Secara umum, luas areal dan potensi pengembangan perkebunan di Kabupaten Bintan dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.46 : Potensi Pengembangan Perkebunan Kabupaten Bintan Tahun 2016

No	Kecamatan	Potensi (Ha)						Total (Ha)
		Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Lada	Cengkeh	Kakao	
1	Gunung Kijang	148	1.032	93	0	0	1	1.274
2	Teluk Sebong	1.576	1.119	74	4	0	0	2.773
3	Sri Kuala Lobam	476	365	662	0	0	8	1.511
4	Tuapaya	757	10	216	2	0	9	994
5	Teluk Bintan	979	590	30	3,5	0	0	1.602,5
6	Bintan Utara	22	18	2	0	0	0	42
7	Bintan Timur	35	31	16	0	0	0	82
8	Bintan Pesisir	15	100	0	0	1	0	116
9	Mantang	44	37	0	0	0	0	81
10	Tambelan	200	748	0	0	298	0	1.246

	TOTAL	4.252	4.050	1.093	9,5	299	18	9.721,5
Kondisi Tahun 2016								
	TBM	854	560	633	4	31	18	2.100
	TM	1.620	2.052	460	5	224	0	4.361
	TTR	1.778	1.438	0	0,5	44	0	3.260,5
	Total	4.252	4.050	1.093	9,5	299	18	9.721,5

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan Tahun 2017

(3) **Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan,**

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.250.000 dan realisasi sebesar Rp. 38.680.300 atau 96.1%. *output* kegiatan ini adalah terlaksananya pengamatan serangan OPT perkebunan. Tujuan pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tananaman Perkebunan Berkelanjutan melalui kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan adalah membuka pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan kebun yang benar, meningkatkan produksi, produktifitras dan mutu tanaman perkebunan, menjamin keberkelanjutan produksi tanaman perkebunan sebagai sumber bahan baku industri, serta meningkatkan pendapatan petani melalui sektor perkebunan karet unggul melalui pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi (monev) petani penerima bantuan tanaman perkebunan serta terlaksananya pengamatan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) Berdasarkan hasil pengamatan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman perkebunan pada tahun 2016, ditemukan adanya serangan hama rayap dan penyakit jamur akar putih pada tanaman karet sebanyak 2.110

Batang, hama Kumbang Nyiur (*Orycter rhinoceros*) dan Kumbang Janur (*Brontispa longissima*) pada tanaman kelapa sebanyak 170 Batang, penyakit Jamur Buah pada tanaman Kakao sebanyak 80 Batang dan penyakit Busuk Pangkal Batang (jamur *Phytophthora capsici*) sebanyak 210 Batang. Gangguan dan serangan penyakit tersebut diantaranya disebabkan kebun karet yang kurang terpelihara sehingga banyak terdapat gulma. Banyaknya gulma pada tanaman karet juga dapat meningkatkan resiko kebakaran pada kebun karet rakyat. Dalam upaya menciptakan kebun yang bersih dari gulma dan meminimalkan munculnya hama dan penyakit tanaman serta resiko kebakaran sehingga tanaman dapat terpelihara dengan baik dan produktifitas tetap tinggi maka di perlukan adanya upaya-upaya untuk menjaga kebun karet rakyat tersebut agar tetap terjaga dengan baik. Upaya- upaya tersebut diantaranya dengan memberikan penyuluhan kepada petani.



Gambar 4.9 : Serangan hama dan penyakit pada tanaman karet



Gambar 4.10 : Serangan hama dan penyakit pada buah / tanaman kakao



Gambar4. 11 : Serangan hama dan penyakit pada tanaman kelapa

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Kondisi tanaman karet masih banyak yang telah tua dan rusak (TTR). Sebagian tanaman karet petani adalah tanaman tua rusak (TTR) sehingga walaupun luasan yang dimiliki cukup namun produktifitas pohon karet rendah.
- b. Masih rendahnya sebagian kualitas SDM petani dalam penyadapan dan pengolahan hasil karet
- c. Kurangnya modal petani untuk perawatan, pemupukan dan pemeliharaan tanaman perkebunan.

- d. Lemahnya perawatan mengakibatkan biji karet yang tumbuh liar menjadikan kebun karet merubah menjadi hutan karet, hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas pohon karet.
- e. Rendahnya pemanfaatan teknologi sederhana pada tingkat petani.
- f. Maraknya alih fungsi kebun karet menjadi areal penggunaan lainnya .
- g. Rendahnya harga jual karet sehingga menyebabkan usaha ini kurang menarik hal ini mengakibatkan motivasi petani untuk merawat dan menjalankan usaha perkebunan karet rakyat rendah.
- h. Adanya beberapa kali pemangkasan anggaran, sehingga beberapa mata anggaran pada kegiatan ditiadakan/dipangkas sehingga mengakibatkan mata anggaran lain yang berkaitan juga tidak dapat dilaksanakan.
- i. Tidak tersedianya pengadaan obat dan pupuk tanaman perkebunan di bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan

2) Solusi

- a. Peningkatan modal dan kualitas sumber daya manusia petani sebagai upaya peningkatan produksi perkebunan.
- b. Meningkatkan harga jual karet melalui peningkatan kualitas produksi dan kemitraan dengan perusahaan perkebunan.
- c. Supaya Kegiatan Pengembangan Komoditi Perkebunan tetap dapat berjalan bibit karet yang disalurkan kepada masyarakat dipenuhi dari Kebun Entrys Kabupaten Bintan.
- d. Menghimbau kepada petani agar menyisihkan sebagian pendapatan untuk melakukan perawatan dan pengadaan obat obatan dan pupuk tanaman
- e. Melaksanakan pelatihan penanganan penyakit tanaman perkebunan kepada petani/pekebun.

4.2.4. URUSAN KEHUTANAN

Menyusul diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Amanat dalam UU tersebut, bidang kehutanan tidak lagi kewenangan pemerintah kabupaten/kota melainkan pemerintah provinsi. Demikian pula dengan Kabupaten Bintan yang sudah menindak lanjuti kebijakan pusat ini tersebut. Selanjutnya OPD Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan, sesuai dengan Peraturan terkait telah berubah nama menjadi OPD Dinas Pertanian Kabupaten Bintan, OPD ini tidak lagi menangani urusan Kehutanan. Sementara itu untuk pelaporan kinerja Urusan Kehutanan untuk tahun anggaran 2016 masih menjadi tanggung jawab dinas Dinas terkait.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1) Program Konservasi, Keanekaragaman Hayati Dan Perlindungan Hutan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pertanian Kabupaten Bintan** sebagai program Transisi sebelum pengalihan kewenangan sektor kehutanan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, program ini dilaksanakan melalui Bidang Kehutanan melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.287.995.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.178.820.010,- atau 91,52%. *Outcome* Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove dengan beberapa kegiatan pokok antara lain sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Program

(1) Rehabilitasi dan Reboisasi Hutan dan Lahan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 147.141.010 atau 98.09%. *output* kegiatan ini adalah Tersedianya bibit bakau sebanyak 21.998 btg untuk penanaman mangrove seluas 6 Ha. Lokasi kegiatan adalah di Desa Kuala Sempang, Kec. Seri Kuala Lobamdan Kelurahan Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan. Adapun Rehabilitasi kawasan mangrove seluas 6 Ha (Desa

Kuala Sempang seluas 3 Ha dan Kelurahan Tembeling Tanjung seluas 3 Ha).

(2) **Pengamanan dan perlindungan Hutan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.107.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 106.203.850 atau 99.26%. *output* kegiatan ini adalah terlaksananya pengamanan dan perlindungan hutan. Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan dilaksanakan pada 6 (enam) Hutan Lindung yang ada di Kabupaten Bintan yaitu Hutan Lindung Sei Pulai, Hutan Lindung Gunung Lengkuas, Hutan Lindung Gunung Kijang, Hutan Lindung Sei Jago, Hutan Lindung Gunung Bintan Besar, dan Hutan Lindung Gunung Bintan Kecil. Kegiatan yang dilakukan dalam pengamanan dan perlindungan hutan adalah patroli pengamanan hutan oleh Polisi Kehutanan dan Satuan Pengamanan Hutan (SATPAMHUT), pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan akan pentingnya hutan dan koordinasi dengan pihak kecamatan. Dari hasil kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan tahun 2016 ditemukan adanya kasus perambahan hutan. Terhadap pelaku telah diberikan pembinaan dan teguran secara tertulis dan memasang spanduk-spanduk di sekitar kawasan hutan lindung larangan untuk menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan dan atau merambah secara tidak sah.



Gambar 12 : Pemasangan Plang Himbauan Menjaga dan Melestarikan Hutan di Kabupaten Bintan

(3) **Rehabilitasi Lahan Kritis Daerah Aliran Sungai (DAS) Bintan (Kegiatan DAK),**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.971.306.000 dan realisasi sebesar Rp.869.816.500 atau 89.55%. *output* kegiatan ini adalah meningkatnya luasan kawasan hijau, daya tampung air di DAS Bintan. Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Daerah Aliran Sungai (DAS) Bintan (DAK) dimaksudkan untuk meningkatkan luasan kawasan hutan hijau, daya tampung air di DAS Bintan. Kegiatan yang dilakukan adalah Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 50 Ha di Hutan Lindung Sei Jago Kelurahan Tanjung Uban Utara Kecamatan Bintan Utara. Kegiatan ini lebih diarahkan kepada pemeliharaan tahun pertama (P1) terhadap tanaman yang ditanam melalui Kegiatan DAK TA 2015 antara lain mahoni, pulai, dan jengkol sebanyak 55.000 batang. Kegiatan RHL ini juga mendistribusikan bibit tanaman MPTS ke kelompok tani, ke masyarakat, desa, Kelurahan, SKPD dan ke berbagai instansi yang membutuhkan bibit untuk penghijauan.



Gambar 13 : Penanaman Pohon yang dilaksanakan Oleh Dinas Pertanian bersama Instansi Lain dilingkungan Kantor Bupati Bintan

(4) **Penunjang Kegiatan DAK Rehabilitasi dan Reboisasi Hutan dan Lahan Kritis DAS Bintan,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.59.689.500 dan realisasi sebesar Rp.55.658.650 atau 93.25%. *output* kegiatan ini adalah meningkatnya luasan kawasan hijau, daya tampung air di DAS Bintan. Untuk melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Daerah Aliran Sungai (DAS) Bintan (DAK) tersedia dana pendukung kegiatan DAK dengan kegiatan antara lain menyusun rancangan teknis (rantek) RHL di Hutan Lindung Sungai Jago, sosialisasi kepada masyarakat peserta kegiatan RHL dan Monitoring dan Evaluasi.

b. Permasalahan dan Solusi

Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga Hutan Lindung (lindung darat maupun mangrove), sehingga banyak dijumpai adanya perambahan Hutan Lindung dan Penimbunan Mangrove. Untuk itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar Hutan Lindung akan

pentingnya peran hutan lindung bagi kehidupan sehingga harus dijaga kelestariannya.

2) Program Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya Hutan

Program ini merupakan program transisi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bintan sebelum kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, melalui Bidang Kehutanan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.141.971.700,- atau 94,65%. Outcome Meningkatnya pembangunan pembinaan kehutanan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program

(1) Inventarisasi dan Pemetaan Kerusakan Hutan Lindung Sungai Jago di Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sebesar Rp.141.971.700 atau 94.65.%. *output* kegiatan ini adalah terlaksananya Inventarisasi dan Pemetaan Kerusakan Hutan Lindung Sungai Jago di Kabupaten Bintan. Inventarisasi dan Pemetaan Kerusakan Hutan Lindung Sungai Jago dilakukan melalui hasil penafsiran Citra Satelit Resolusi Tinggi yang kemudian diikuti dengan Ground Check ke lapangan. Hutan Lindung Sungai Jago Kecamatan Bintan Utara memiliki luas 1.629,6 Ha (sesuai SK Menteri Kehutanan No. 467/1987). Dari hasil penafsiran Citra Satelit dan Ground Check ke lapangan diperoleh kerusakan Hutan Lindung seluas + 977,2 Ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.47 : Kerusakan Kawasan Hutan Lindung Sungai Jago tahun 2016

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Lahan Terbuka	362,77	22,26
2	Permukiman	29,05	17,82
3	Perkebunan	44,98	27,60
4	Pertanian Lahan Kering	8,35	5,1
5	Semak/Belukar	532,02	32,64

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan Tahun 2017

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Pengetahuan masyarakat terhadap peranan dan manfaat Hutan Mangrove masih minim dan terbatas.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Batas-batas hutan dan kawasan lainnya
- Pal batas hutan (khususnya hutan lindung) umumnya banyak yang sudah rusak.

2) Solusi

- Sosialisasi peranan dan manfaat Hutan Mangrove perlu ditingkatkan.
- Pelaksanaan sosialisasi tata batas hutan lindung perlu ditingkatkan.
- Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar Hutan Lindung akan pentingnya hutan bagi kehidupan sehingga harus dijaga kelestariannya.
- Perlu usulan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII Tanjungpinang untuk memasang

kembali PAL batas Hutan Lindung yang sudah hilang karna merupakan wewenang dan tugas BPKH.

3) Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)

Sebagaimana program kehutanan lainnya, Program ini juga merupakan program terakhir yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bintan sebelum pengalihan kewenangan ke pemerintah provinsi Kepri, program ini dilaksanakan melalui Bidang Kehutanan dengan kegiatan pokok antara lain sebagai berikut melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.154.215.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.136.725.800,- atau 88,66%. Outcome Meningkatnya fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembinaan dan Bimbingan Badan Usaha / Kelompok Perorangan yang berada di DAS

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.000.000 dan realisasi sebesar Rp.78.371.600 atau 87.08%. *output* kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan bimbingan badan usaha/kelompok/ perorangan yang berada di DAS, sehingga meningkatnya pemantauan usaha kehutanan dan tertib peredaran hasil hutan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain Pembinaan dan bimbingan badan usaha / kelompok / perorangan yang bergerak di bidang Kehutanan, Sosialisasi peraturan dan himbauan kepada masyarakat dengan pengadaan sosialisasi di kawasan hutan lindung dan hutan mangrove.

(2) **Pengelolaan Pelestarian dan Pemanfaatan Mangrove Berbasis Masyarakat**

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.215.000 dan realisasi sebesar Rp.58.354.200 atau 90.87%. *output* kegiatan ini adalah pelatihan pengelolaan pelestarian dan pemanfaatan mangrove. Keluaran atau hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pelestarian mangrove dan pemanfaatan mangrove. Kegiatan pokoknya adalah Pelatihan Pengelolaan Pelestarian dan Pemanfaatan Mangrove sebanyak 30 Orang.

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Kehutanan** adalah sebagai berikut :

- 1) **Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat 63,62%;**
- 2) **Kerusakan Kawasan Hutan 26,26%.**

b. Permasalahan dan Solusi

Pengetahuan masyarakat terhadap peranan dan manfaat Daerah Aliran Sungai masih minim dan terbatas sehingga diperlukan sosialisasi peranan dan manfaat Daerah Aliran Sungai perlu ditingkatkan.

4.2.5. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Urusan energi dan sumberdaya mineral tidak lagi menjadi kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) tingkat Kabupaten/kota. Urusan ini sudah diambil alih oleh pihak provinsi yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintahan provinsi. Penyerahan kewenangan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya dipertegas lagi dengan keluarnya surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SE/2015 dan surat edaran Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI Nomor 4.E/20/DjB/2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara. Demikian pula dengan Kabupaten Bintan yang sudah menindak lanjuti kebijakan pusat ini tersebut. Selanjutnya OPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan, tidak lagi menangani urusan ini dan dilikwidasi. Sementara itu untuk pelaporan kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan tahun anggaran 2016 masih menjadi tanggung jawab dinas terkait.

Pencapaian indikator kinerja daerah pada penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral yang dilaporkan masih menggunakan indikator RPJMD 2010-2015 adalah sebagai berikut :

1. Pertambangan tanpa izin;

Pertambangan yang tanpa izin dari tahun ketahun cenderung menurun namun masih ada saja masyarakat yang melakukan penambangan tanpa izin. Hal ini bisa dilihat dari data yang ada, dimana pada tahun 2015 tercatat 23 pertambangan tanpa izin sedangkan pada ditahun 2016 tercatat 14 penambangan liar yang mayoritasnya tambang rakyat yang dikelola oleh masyarakat setempat.

2. Rasio ketersediaan daya listrik

Pencapaian indikator ini untuk tahun 2016 sebesar 96,78%, telah melampaui target 2015 yang tercatat sebesar 96,50%, hal ini terjadi karena perkembangan dan penambahan sarana dan Prasarana oleh PLN untuk masyarakat Kabupaten

Bintan melalui Pembangunan Jaringan SUTM dan SITR yang terus ditingkatkan, sehingga kebutuhan akan daya listrik di masyarakat semakin tercukupi.

3. **Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik;**

Dalam tahun 2016 target persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 65% dengan realisasi sebesar 83,00%, angka ini meningkat dibanding tahun 2015 dengan capaian 77,33%. Peningkatan ini disebabkan oleh :

- a. Program Satker Lides PLN melaksanakan pembangunan Jaringan listrik ke Pelosok-pelosok Bintan.
- b. Beberapa rumah masyarakat yang tidak dapat terjangkau oleh listrik desa maupun PLN dibantu dengan listrik tenaga surya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1) Program Pembinaan Usaha Pertambangan Umum dan Sumberdaya Mineral

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pertambangan Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.387.956.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.379.927.940,- atau 92,22%. *Outcome* dari program ini Meningkatnya Pembinaan Usaha Pertambangan Umum Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Inventarisasi Penataan Lahan Bekas Tambang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.130.948.400,- realisasi anggaran sebesar Rp.126.592.122,- atau 96,67%. *Output* dari Kegiatan ini adalah Tersedianya data Pengelolaan Lahan Bekas Tambang di Kabupaten Bintan sebanyak 33 IUP Dokumen. Sehingga tercapainya Peningkatan Pendataan Lahan Bekas Tambang di Kabupaten Bintan. Terkait

dengan kegiatan ini telah di adanya Dokumen Data Pengelolaan Lahan Bekas Tambang sebanyak 33 IUP di Kabupaten Bintan

(2) **Evaluasi Kegiatan Dana Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (DPPM)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127.008.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.125.610.948,- atau 98,90%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Evaluasi Kegiatan Dana Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (DPPM) untuk 6 perusahaan tambang kepada masyarakat disekitar wilayah tambang yang ada di Kabupaten Bintan sehingga terwujudnya Pelaksanaan Dana Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (DPPM), di 6 Perusahaan yakni PT.Bintang Cahaya Terang, PT.Wahana Karya Suksesindo Utama, PT.Lobindo Nusa Persada, PT.Tri Panorama Setia, PT.Mitra Investindo, PT.Bintan Nusa Multi. Terkait kegiatan ini telah dilaksanakan program Evaluasi Kegiatan Dana Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat (DPPM) yang diharapkan dapat membantu pihak perusahaan dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat agar tepat sasaran dan sejalan dengan program pemerintah sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Pada tahun 2016 Dana Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (DPPM) yang menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan, merupakan program unggulan sebagaimana Visi dan Misi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bintan guna terciptanya manusia yang siap bersaing dalam sektor-sektor pembangunan dan perekonomian Kabupaten Bintan di masa yang akan datang. Program DPPM diarahkan kepada bidang pendidikan yakni bantuan beasiswa terhadap siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang Diploma / Perguruan Tinggi melalui

dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan. Untuk bantuan beasiswa melalui tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan tahun 2016 jumlahnya telah mencapai Rp.2.908.836.310,- yang merupakan program DPPM dari perusahaan.

Pembagian DPPM dapat dibagi menjadi dua wilayah untuk masyarakat yang terkena dampak yaitu:

1. Ring I adalah masyarakat yang ada diwilayah blok penambangan (1– 2 km) dan mendapat 70% dari keseluruhan DPPM yang tersedia;
2. Ring II adalah masyarakat yang ada di sekitar wilayah penambangan yang terkena dampak tidak langsung (> 2 km) dan mendapat sekitar 30% dari keseluruhan DPPM yang tersedia.

Pencairan DPPM dapat diajukan oleh pihak Perusahaan dan masyarakat melalui Lurah atau Kades/BPD di Kelurahan atau desa setempat dikoordinir oleh Camat kepada perusahaan pertambangan dan dapat dicairkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Cq.Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan. Perusahaan yang telah melaksanakan program DPPM pada tahun 2016.

(3) Inventarisasi Data dan Dokumen Perizinan Kegiatan Pertambangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.130.000.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.127.724.870,- atau 98,25%. Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya Rekapitulasi Data dan Dokumen Perizinan Kegiatan Usaha Pertambangan. Sehingga tercapainya Inventarisasi Data dan Dokumen Perizinan Pertambangan untuk 33 IUP di Kabupaten Bintan.

2) Program Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pertambangan Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.83.653.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.77.713.900,- atau 92,90%. Outcome dari program ini Pendataan monitoring dan evaluasi Distribusi Minyak dan Gas di seluruh wilayah Kabupaten Bintan

a. Program Pelaksanaan

Pendataan Monitoring dan Evaluasi Distribusi Minyak dan Gas

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.83.653.600,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.77.713.900,- atau 74,46%. Output dari kegiatan ini adalah Evaluasi Distribusi Minyak dan Gas sehingga terkendalinya Pendistribusian Minyak dan Gas di Kabupaten Bintan, kegiatan ini dimaksudkan untuk pembinaan terhadap para pelaku di bidang Minyak dan Gas Bumi termasuk masalah jalur Distribusinya sehingga dapat langsung dinikmati oleh masyarakat dan tetap terjaga kestabilan naik harga maupun ketersediaannya bahan bakar minyak ditengah-tengah masyarakat.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Keberadaan Kios yang tidak diatur dalam perundang-undangan berpotensi menambah tingkat “kehilangan” sejumlah BBM bersubsidi, karna penyebarannya serta konsumennya cukup banyak dan tidak terdata.
- b. Belum adanya sistem rayonisasi penyaluran BBM subsidi oleh 1 Agen penyalur minyak solar (APMS) ke Kios-kios;

- c. Jadwal pengambilan BBM subsidi di APMS oleh konsumen tidak diatur dengan baik;
- d. Data tentang jumlah Konsumen berdasarkan kelompok dan jumlah pemakaian BBM tidak akurat;

2) **Solusi**

- a. Untuk pengaturan / pengurangan jumlah kios melalui peraturan Bupati dengan pengaturan persyaratan teknis lingkungan pada bangunan penyimpanan BBM;
- b. Perlunya penetapan rayonisasi untuk pendistribusian BBM subsidi ke kios-kios oleh APMS;
- c. Perlunya pengaturan jadwal pengambilan BBM subsidi oleh konsumen pada APMS yang di buat oleh APMS berdasarkan kelompoknya;
- d. Pendataan jumlah konsumen BBM subsidi sesuai yang diatur dalam peraturan BPH Migas No. 5/2012;
- e. Pemanfaatan kuota BBM pada AMSTN di Kab. Bintan
- f. Melakukan pengawasan bersama dengan instansi terkait dan aparat keamanan.

3) **Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pertambangan Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.2.514.133.233,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.318.532.520,- atau 92,22%. Outcome dari program ini Meningkatnya Pembinaan bidang kelistrikan.

(1) **Pengembangan Listrik Desa**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.426.133.233,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.400.266.400,- atau 93,93%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik Perdesaan di Kabupaten Bintan, terkait kegiatan ini untuk membantu daerah-daerah yang belum teraliri listrik PLN dikarenakan keterbatasan daya, maka Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Program Pengembangan Listrik Perdesaan telah merealisasikan pembangunan listrik desa di beberapa lokasi yang belum terjangkau oleh Listrik PLN. Sepanjang Tahun 2016, dimana persentase rumah tangga pengguna listrik (Termasuk Sosial, Bisnis, Publik) sampai dengan 2016 semakin bertambah hal ini dilihat dari pelaksanaan paket pekerjaan berikut :

1. Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Listrik KP. Sekuning Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.14.780.000,- atau 100 %;
2. Pengawasan Teknis Pembangunan Jaringan Listrik KP. Sekuning Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,-realisasi anggaran sebesar Rp.19.717.000,- atau 100%;
3. Pembangunan Jaringan Listrik KP. Sekuning Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,- (1 Paket) realisasi anggaran sebesar Rp.288.000.000,- atau 100 %;

(2) Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelistrikan,

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.190.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.054.543.600,- atau 88,62 %. *Output* Kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan listrik (jaringan) bagi aparaturnya dan masyarakat melalui pelaksanaan paket pekerjaan :

1. Perencanaan Teknis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat untuk mendukung Operasional Kantor Kecamatan Tambelan di Tambelan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.29.720.000,- atau 99,07% ;
2. Pengawasan Teknis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat untuk mendukung Operasional Kantor Kecamatan Tambelan di Tambelan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.39.132.000,- atau 97,83% ;
3. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat untuk mendukung Operasional Kantor Kecamatan Tambelan di Tambelan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 198.110.000,- atau 99,06 % ;
4. Perencanaan Teknis Pemasangan Jaringan Listrik dan Penyambungan Daya Listrik Pabrik Es Tanjung Uban di Kec. Bintang Utara alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 24.420.000,- atau 97,68 %;
5. Pemasangan Instalasi Listrik dan Penyambungan Daya Listrik Posyandu RT.01/RW.11 Kp. Baru Keke Kelurahan Kijang Kota Kec. Bintang Timur alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.9.561.000,- atau 95,61%;

6. Pemasangan Jaringan Listrik dan Penyambungan Daya Listrik Gedung Induk dan Gedung Rawat Inap Puskesmas Mantang Kecamatan Mantang alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.38.865.000,- atau 97,16%;
7. Pemasangan Instalasi Listrik dan Penyambungan Daya Listrik SDN 010,SDN 011,SDN 013 Kec.Teluk Bintan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.48.783.000,- atau 48,78%;
8. Pemasangan Instalasi Listrik dan Penyambungan Daya Listrik Polindes Kelurahan Toapaya Asri Kec.Toapaya alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.14.552.000,- atau 72,76 %;
9. Pemasangan Instalasi Listrik dan Penyambungan Daya Listrik PKBM Masyarakat Kp.Sidoharjo di Kelurahan Kawal Kec. Gunung Kijang alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.9.725.000,- atau 97,25 %;
10. Pemasangan Instalasi Listrik dan Penyambungan Daya Listrik Sekolah satu atap SDN 005 dan SMPN 27 di Galang Batang Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.38.800.000,- atau 97,00 %;
11. Pemasangan Instalasi Listrik dan Penyambungan Daya Listrik Gedung Workshop Karang Taruna di Kelurahan Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.15.967.000,- atau 79,84 %;
12. Pemasangan Instalasi Listrik dan Penyambungan Daya Listrik Posyandu Tanjung Permai dan Posyandu Tanjung Emas di Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala

- Lobam alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 15.360.000,- atau 76,80 % ;
13. Pemasangan Instalasi Listrik dan Penyambungan Daya Listrik Gedung SMK Negeri 4 Bintan di Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam alokasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 44.354.000,- atau 98,56 % ;
 14. Penambahan Daya Listrik Pabrik Es Berakit Kecamatan Teluk Sebong alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 198.930.000,- atau 99,47 %;
 15. Pemasangan Instalasi Listrik dan Penyambungan Daya Listrik Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Bintan di Kelurahan Kijag Kota Kecamatan Bintan Timur alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 198.690.000,- atau 99,35 % ;

(3) **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.898.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.863.722.520,- atau 98,18 %. *Output* Kegiatan ini adalah memenuhi sarana dan prasarana kelistrikan yang memenuhi standart ketenagalistrikan melalui pelaksanaan paket pekerjaan :

1. Pemeliharaan Jaringan Listrik di Kabupaten Bintan (3 Paket) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.148.092.000,- atau 98,73%;
2. Pengadaan Bahan Jaringan Instalasi Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.49.485.000,- atau 98,97 % ;

Sasaran strategis **Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan** masih mengacu pada Renja SKPD dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011–2015 adalah : Meningkatkan kapasitas Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. Untuk menentukan tingkat keberhasilan dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator program, antara lain :

A) Program pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan di tahun 2016 terdapat peningkatan dan target maupun realisasi di lapangan sehingga memberikan capaian menyangkut pemerintahan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Bintan menunjukan hasil yang diharapkan.

1) Rumah tangga Pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik) di Kabupaten Bintan dalam tahun 2016 target rumah tangga pengguna listrik sebanyak 16.718 rumah tangga dengan pencapaian realisasi sebanyak 31.469 rumah tangga. Peningkatan ini disebabkan oleh:

- a. Penambahan Jaringan TM (Tegangan Menengah) dan TR (Tegangan Rendah) dari PLN di wilayah Kabupaten Bintan.
- b. Pertumbuhan masyarakat maupun pembangunan sarana dan Prasarana di Kabupaten Bintan.

Catatan :

Bahwa untuk Rumah Tangga Pengguna Listrik (Termasuk Sosial, Bisnis, Publik) dari Tahun 2015 s/d 2016 kebutuhan listrik semakin bertambah dikarenakan penduduk yang ada di Kabupaten Bintan semakin meningkat baik itu rumah tangga, sosial, bisnis maupun Publik.

2) Jumlah Genset / KVA di Kabupaten Bintan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan dalam tahun 2016 target rumah tangga pengguna listrik sebanyak 116/7.005 Genset dengan pencapaian realisasi sebanyak 80/6.070. Pengadaan penambahan mesin Genset tidak dialokasikan lagi dikarenakan hampir seluruh lokasi / wilayah di Kabupaten Bintan yang

semula menggunakan genset telah tersambung dengan PLN. Sedangkan wilayah yang tidak terjangkau oleh listrik saja yang masih menggunakan genset, Khususnya daerah hinterland atau pulau-pulau.

3) Total Panjang Jaringan SUTM

No.	Indikator Pencapaian	Tahun	Target	Capaian	Ket
1	Total Panjang Jaringan SUTM	2015	43.800	38.780	%
2		2016	43.800	40.770	%

4) Rasio Elektrifikasi listrik Desa

a. Dimana terjadinya peningkatan sosial ekonomi masyarakat dalam kelangsungan hidup sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan listrik itu sendiri, terutama jumlah pertambahan penduduk dibanding dengan pertambahan masyarakat dalam tahun 2016 target **Rasio Elektrifikasi listrik Desa** sebesar 81% listrik Desa dengan pencapaian realisasi mencapai 98,07% Listrik Desa.

b. Dengan penambahan fasilitas oleh PLN untuk SUTM tertentu yang dibangun menjadi rasio elektrifikasi listrik desa semakin berkurang karena masyarakat beralih dari listrik desa ke listrik PLN.

Di Kabuapten Bintan **rasio elektrifikasi** pada tahun 2016 sudah mencapai 98,07% yang artinya mengalami kenaikan 16,60 % dari tahun 2015, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.48 : Rasio Elektrifikasi Listrik Desa di Kab. Bintan Tahun 2016

No.	Sumber Daya	Pelanggan	Rasio Elektrifikasi
1.	Listrik Perdesaan	1.505	3,70 %
2.	PLN	31.447	77,33 %

3.	PLTS / SHS	179	0,44 %
4.	Rumah Tangga Belum Berlistrik	6.263	15,40 %

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun 2016

5) Jumlah Unit Genset / KVA

Target Pemerintah Kabupaten Bintan untuk Tahun 2016 sebanyak 116/7.005 unit genset, tetapi dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan peningkatan serta penambahan sarana dan prasarana kelistrikan untuk masyarakat Kabupaten Bintan melalui Pembangunan Jaringan SUTM dan SITR mengakibatkan pengurangan manfaat genset, sehingga pemerintah Kabupaten Bintan tidak menambah unit genset pada tahun 2016, karena masyarakat pengguna listrik desa sebagian sudah beralih ke listrik PLN.

B) Program Pembinaan Usaha Pertambangan Umum dan Sumber Daya Mineral.

1) Reklamasi Lahan Pertambangan

Target Pemerintah di tahun 2016 dalam mereklamasikan lahan bekas tambang yaitu seluas 10.639 Hektar, tercapai sebesar 3.412,61 Ha, target tersebut tidak bisa tercapai karena lahan yang sudah di reklamasi tersebut ditambang kembali oleh pihak perusahaan dengan alasan masih mempunyai Deposit atau potensi untuk ditambang.

No.	Indikator Pencapaian	Tahun	Target	Capaian	Ket
1.	Reklamasi Lahan Pertambangan	2015	10.639	3.412,612	Ha
2.		2016	10.639	3.412.612	Ha

2) **Perda Tentang Pemanfaatan Air Bawah Tanah**

Sampai tahun 2016 Perda tentang Pemanfaatan Air Bawah Tanah Belum ada Perdanya dikarenakan dalam pengelolaan pemanfaatan Air bawah Tanah di laksanakan oleh pihak provinsi.

3) **Persentase Pelanggaran Perda tentang Pembatasan Pemanfaatan air bawah tanah**

Dalam hal ini pengelolaannya masih dalam pengawasan pihak provinsi sedangkan izin dikeluarkan oleh badan BPMPD Kabupaten Bintan. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan tidak melaksanakan fungsi pengawasan maupun mengeluarkan izin dimaksud

4) **Perusahaan Pertambangan yang diaudit**

Sampai dengan tahun 2016 yang beroperasi 0 Perusahaan atau sudah tidak ada lagi perusahaan yang beroperasi. Hal ini disebabkan dihentikannya aktifitas pertambangan khususnya bauksit baik untuk penjualannya maupun produksinya sejak diberlakukannya Undang-undang 23 Tahun 2014 perihal Pemerintah Daerah. Oleh karena kegiatan audit atas perusahaan tambangpun dihentikan

5) **Jumlah Kios, Agen, Pangkalan, Pengecer Solar/ Bensin/Minyak tanah yang dibina dan diawasi.**

Distribusi BBM dan Gas oleh Pertamina terutama di Kabupaten Bintan untuk tahun 2016 dalam jumlah kuota yang sama, sehingga tidak ada penambahan jumlah kios, agen, dan pengecer ,yang disesuaikan dengan jumlah kuota BBM yang ditetapkan oleh Pertamina.

No.	Indikator Pencapaian	Tahun	Target	Capaian	Ket
1.	Jumlah Kios,Agen, Pangkalan, Pengecer	2015	274	327	Unit
2.	Solar/ Bensin/Minyak tanah yang dibina dan diawasi.	2016	274	327	Unit

6) Rasio Elektrifikasi

Di Kabupaten Bintan rasio elektrifikasi pada tahun 2016 sudah mencapai 98,07% yang artinya mengalami kenaikan 5,93 % dari 81,40% pada tahun 2015, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.49 : Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Bintan Tahun 2016

No.	Sumber Daya	Pelanggan	Rasio Elektrifikasi
1.	Listrik Perdesaan	1.505	3,70 %
2.	PLN	31.447	77,33 %
3.	PLTS / SHS	179	0,44 %
4.	Rumah Tangga Belum Berlistrik	6.263	15,40 %

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun 2016

Tabel 4.50 : Neraca Listrik Kabupaten Bintan Tahun 2016

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Produksi	646.038.867
2.	Daya Terpasang (KW)	189.217
3.	Daya Mampu (KW)	132.157
4.	Beban Puncak (KW)	132.310
5.	Surplus/Defisit (KW)	(153)

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun 2016

C) Program Pengembangan Listrik Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

1) Gambaran Umum Kelistrikan Kabupaten Bintan

Secara nasional, rasio elektrifikasi di tanah air pada per Desember tahun 2016 sebesar 98,07%, jadi tinggal 2 % masyarakat Indonesia yang

belum berlistrik. Untuk rumah tangga kira-kira 12,5 juta rumah tangga yang belum berlistrik yang tersebar merata diseluruh Indonesia.

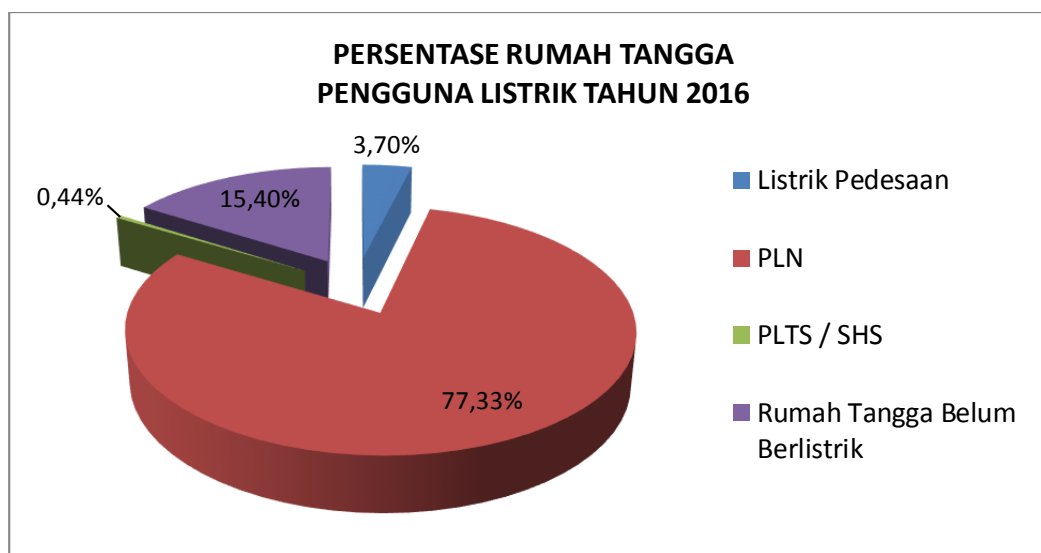
Di Kabupaten Bintang sendiri rasio elektrifikasi pada tahun 2016 baru mencapai 98,07%, yang artinya hanya mengalami kenaikan sebesar 1,16% dari 74,33% pada tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.51 : Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

NO	SUMBER DAYA	PELANGGAN	RE (%)
1.	Listrik Pedesaan	1.505	3,70%
2.	PLN	31.447	77,33%
3.	PLTS / SHS	179	0,44%
4.	Rumah Tangga Belum Berlistrik	6.263	15,40%
JUMLAH RUMAH TANGGA		40.668	

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintang Tahun 2016

Grafik 4.13 : Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Tahun 2016



Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintang Tahun 2016

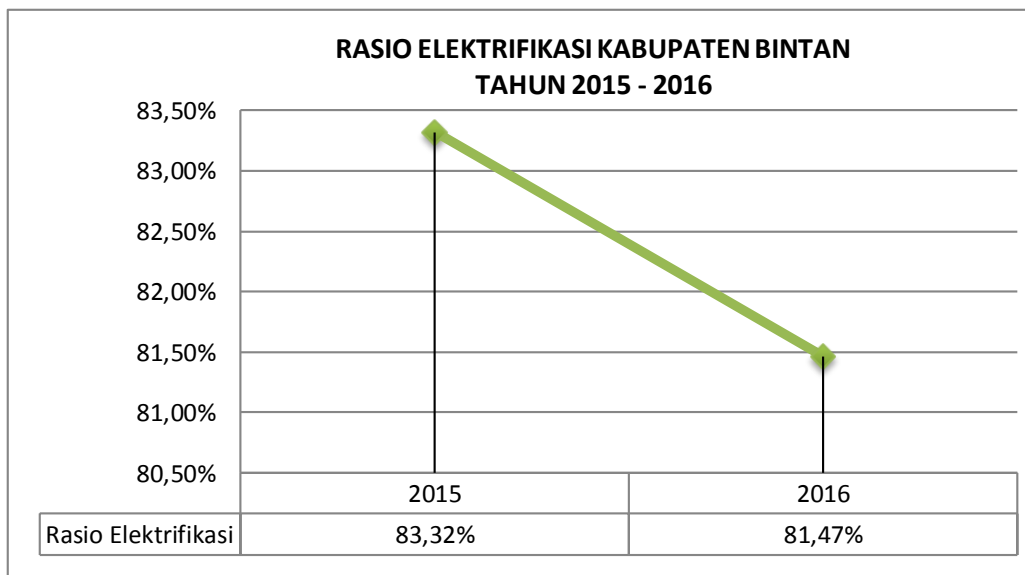
Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat masih ada desa-desa di Kabupaten Bintan yang belum mendapat listrik yaitu sebesar 15,40% atau \pm 6.263 rumah tangga belum berlistrik.

2) Program Pengembangan Listrik Pedesaan

Untuk membantu daerah-daerah yang belum teraliri listrik PLN dikarenakan keterbatasan daya, maka Pemerintah Kabupaten Bintan melalui program pengembangan listrik pedesaan telah merealisasikan pembangunan listrik desa di beberapa lokasi yang belum terjangkau oleh listrik PLN. Sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Bintan telah merealisasikan sebanyak 76 lokasi yang tersebar di Kabupaten Bintan dan pulau-pulau terpencil.

Rata-rata kenaikan **Rasio listrik desa** dari tahun 2015 sampai tahun 2016 di Kabupaten Bintan mencapai 5,93 %. Pada tahun 2015, rasio listrik desa hanya mencapai 75,54 %. Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya untuk meningkatkan rasio listrik desa tersebut. Hingga pada tahun 2016, rasio listrik desa berdasarkan target yang direncanakan telah mencapai 81,47 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 4.14 : Rasio Elektrifikasi Kabupaten Bintan Tahun 2015 - 2016



Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun 2016

4.2.6. URUSAN INDUSTRI

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Industri** adalah sebagai berikut : **Persentase IKM bersertifikasi mutu produk**, pada tahun 2016 mencapai **40%**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan melalui 5 (lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.628.792.760,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.601.725.950,- atau 88,57%. *Outcome* Meningkatnya Kualitas, Kuantitas IKM dan Mutu Produk IKM serta Pertumbuhan IKM Baru.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Promosi dan Partisipasi Pameran Produk IKM Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.194.810.000,- dan terealisasi sebesar Rp.187.308.800,- atau 96,15%. Hasil kegiatan ini adalah para IKM turut serta dalam kegiatan pameran yang dilaksanakan di Malaysia dan Batam untuk mempromosikan produk-produk unggulan pada ajang tersebut;
2. **Kegiatan Pendampingan Pengembangan Produksi dan Promosi Produk IKM** Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.128.359.000,- (98,74%). Hasil kegiatan ini adalah tersedianya tenaga pendamping sebanyak 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk memberikan pendampingan kepada pelaku produksi pangan industri rumah tangga;

3. **Kegiatan Dukungan Operasional dan Partisipasi pada Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda)** dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.156.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.141.417.650,- atau 90,65%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya dukungan untuk operasional Dekranasda Kabupaten Bintan dan terlaksananya promosi hasil kerajinan yang dilaksanakan oleh Dekranasda Kabupaten Bintan yang mana pada tahun 2016 kegiatan pameran dilaksanakan di Kecamatan Bintan Timur dan Kota Tanjungpinang;
4. Kegiatan Penyediaan Bantuan Mesin dan Peralatan IKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.420.100,- dan terealisasi sebesar Rp.13.378.900,- atau 99,69%. Hasil kegiatan ini tidak tercapai dikarenakan adanya peraturan tentang pemberian hibah;
5. Kegiatan Pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM) dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.134.562.760,- dan terealisasi sebesar Rp.131.261.600,- atau 97,55%. Hasil kegiatan ini adalah pelatihan gugus kendali mutu bagi para IKM untuk 20 (dua puluh) orang pengelola IKM sehingga pengetahuan tentang gugus kendali mutu para IKM tersebut meningkat;

Pembangunan bidang industri memiliki potensi yang sangat sentral. Dalam rangka mengantisipasi perdagangan global, usaha industri harus dikembangkan mengarah kepada terciptanya hasil produksi yang memiliki keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar. Disisi lain pengembangan industri harus berbasis pada pemanfaatan potensi sumber-sumber daya daerah termasuk hasil produksi sector primer, sumberdaya alam, teknologi maju dan tepat guna, serta berwawasan lingkungan. Pembinaan diutamakan kepada

pengembangan usaha industri berskala rumah tangga dan kecil yang dalam kenyataannya dapat menyerap tenaga yang cukup besar. Dalam rangka mengefektifkan pengembangan perlu dikembangkan klaster-klaster industri dan pola kemitraan usaha. Pengembangan komoditas diarahkan pada mempertahankan komoditas unggulan yang ada, pengeseran komoditas unggulan menjadi andalan. Dalam rangka mendukung iklim usaha yang kondusif, secara bertahap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) harus dilaksanakan secara konsekuen.

Tabel 4.52: Jumlah Ikm Aktif Di Kabupaten Bintan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Industri	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Tenaga Kerja
1	Teluk Bintan	28	32,340,000	90
2	Seri Kuala Lobam	50	75,460,000	118
3	Bintan Utara	59	21,836,000	215
4	Teluk Sebong	22	32,436,000	80
5	Bintan Timur	83	718,750,000	272
6	Bintan Pesisir	18	63,602,000	67
7	Mantang	30	106,722,000	62
8	Gunung Kijang	46	245,784,000	192
9	Toapaya	23	69,818,400	155
10	Tambelan	12	58,282,000	24
2016		371	1,971,000,000	1275
2015		469	2,525,030,400	1254

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2017 (diolah)

a. Permasalahan dan Solusi

3) Permasalahan

- a. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk;
- b. Terbatasnya penguasaan teknologi serta
- c. Kurangnya pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja.

4) Permasalahan

- a. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan bagi para IKM untuk meningkatkan pengetahuan tentang manajemen usaha yang baik;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi yang mendorong pemahaman dan manfaat legalitas, standarisasi dan sertifikasi produk.

4.2.7. URUSAN PERDAGANGAN

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Perdagangan** adalah sebagai berikut :

- 1) **Persentase tertib ukur terhadap Ukuran Takaran Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP)**, merupakan indikator baru sampai dengan tahun 2016 data tersebut belum tersedia pada **Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan**
- 2) **Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat**; makanan pokok adalah makanan yang menjadi gizi dasar. Makanan pokok biasanya tidak menyediakan keseluruhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, oleh karenanya biasanya makanan pokok dilengkapi dengan lauk pauk untuk mencukupkan kebutuhan nutrisi seseorang dan mencegah kekurangan gizi. Untuk standar di Indonesia dikenal sebagai 9 (Sembilan) Bahan Pokok atau sering disingkat **Sembako** adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat menurut keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998. Kesembilan bahan itu adalah: Beras, Sagu, dan Jagung, Gula pasir, Sayur-sayuran dan Buah-buahan, Daging Sapi, Ayam, dan Ikan Minyak goreng dan Margarin, Susu, Telur, Minyak Tanah atau gas ELPIJI, Garam berIodium dan berNatrium untuk wilayah Kabupaten Bintan ketersediaan barang kebutuhan pokok seperti khususnya 9 Bahan Pokok telah mencapai 100%.
- 3) **Persentase Fasilitas Pasar yang Memadai**, walaupun Pemerintah Kabupaten Bintan telah memiliki Pasar yang dikelola namun untuk data terkait fasilitas Pasar masih belum dimiliki. Hingga tahun 2016 belum tersedia data terkait pasar tersebut.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) **Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan** melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.628.792.760,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.601.725.950,- atau 88,57%. *Outcome* Meningkatnya Kualitas, Kuantitas IKM dan Mutu Produk IKM serta Pertumbuhan IKM Baru.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

(1) **Monitoring dan Pengamanan Barang Kebutuhan Pokok**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.266.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp.264.916.800,- (99,44%). Output dari kegiatan ini terdiri dari :

- a. Pelaksanaan Operasi Pasar (Pasar Murah Sembako) pada saat hari besar keagamaan seperti bulan Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan secara serentak di 10 (sepuluh) Kecamatan Kabupaten Bintan pada bulan Juni 2016.
- b. Kegiatan pengawasan bahan-bahan pokok antara lain monitoring harga dan pemantauan kesediaan barang/stok yang dilaksanakan secara periodik dan berkala di 9 (sembilan) Kecamatan Kabupaten Bintan.

(2) **Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.128.800.000,- realisasi sebesar Rp.127.280.875,- atau 98,82%. Terlaksananya pengawasan barang dan jasa antara lain:

- a. Berstandar SNI label berbahasa indonesia;
- b. Elektronik, petunjuk penggunaan manual dan jaminan garansi (barang elektronik);

- c. Pencantuman masa kadaluwarsa khusus makanan dan minuman, kosmetika dan obat-obatan;
- d. Pengawasan pendistribusian barang meliputi pengawasan barang yang diatur tata niaganya dan barang dalam pengawasan seperti miras, pupuk bersubsidi, gula rafinasi, gas dan bbm bersubsidi;
- e. Pengawasan barang yang dilarang beredar meliputi pengawasan barang berbahaya. Seperti zat pengawet boraks, pc ball (bahan untuk blasting (industri perkapalan) dan barang yang menyangkut K3. Keselamatan dan kesehatan;
- f. Pengawasan barang yang dilarang ekspor dan impor;
- g. Pengawasan Perizinan dan Pergudangan.

Pengawasan jasa meliputi :

- 1) Pengawasan cara menjual;
- 2) Pengawasan Iklan;
- 3) Pengawasan potongan harga (diskon);
- 4) Pembayaran barang dan jasa dengan Rupiah.

Dari tahun 2011 terkait dengan pengawasan Barang dan jasa berlabel SNI Wajib sudah dilaksanakan pengawasan untuk 9 Kecamatan dengan dengan jenis barang sebanyak 93 jenis, hingga tahun 2015 meningkat menjadi 112 barang. Sedangkan untuk yang tidak wajib SNI telah mencapai 8.000 jenis.

Untuk pengawasan barang yang dilarang impor meliputi barang-barang yang dipergunakan untuk kebutuhan pasar domestik baik konsumen langsung maupun tidak langsung seperti elektronik, garmen, makanan dan minuman, mainan anak-anak, sepatu dan alas kaki. Serta larangan impor untuk barang bekas.

Untuk pengawasan barang yang dilarang ekspor meliputi hasil alam yang tidak dapat diperbaharui contoh bahan tambang dan barang-

barang lain yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dalam negeri. Instabilitas ekonomi sosial dan budaya serta politik berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

(3) **Persiapan Pembentukan UPTD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.287.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp.281.182.617,- atau 97,77%. Kegiatan ini dilandaskan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan kemetrologian yang semula dilaksanakan oleh Provinsi dilimpahkan kembali ke Kab/Kota wilayah masing-masing.

(4) **Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,- realisasi sebesar Rp.296.529.620,- (98,84%). Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan Persiapan Pembentukan UPTD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai pemenuhan fasilitas/ kelengkapan Laboratorium UPT Metrologi Kabupaten Bintan.

a. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Ruang lingkup perdagangan yang cukup luas dan banyak permasalahan yang dihadapi serta anggaran yang minim sehingga masalah yang dihadapi cukup rumit dan kompleks.
- b. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan bersertifikasi terutama dalam hal kelancaran kegiatan-kegiatan bidang Perdagangan yang diatur dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

2) Solusi

- a. Penambahan anggaran guna terciptanya keseimbangan antara input dan output yang dihasilkan.
- b. Penambahan sumber daya manusia yang terlatih dan bersertifikasi dalam menunjang kegiatan pelayanan teknis maupun non-teknis yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang Perdagangan.

The background of the page features a series of overlapping, wavy, translucent blue and white bands that create a sense of movement and depth. These bands curve from the bottom left towards the top right, framing the central text.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Selain itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan, memang tidak dimungkinkan semua wewenang Pemerintah didesentralisasi dan diotonomkan sekaligus kepada daerah.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergi antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN dengan program.

5.1. Dasar Hukum

Dasar hukum atau peraturan yang digunakan secara umum dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan tugas pembantuan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah; dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
14. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
17. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
18. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
19. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
20. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
21. Permendes No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa
22. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa
23. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa
24. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan,dan Pembubaran BUMDes
25. Permendes No.21/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2016
26. PMK Nomor 257/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Penundaan dan atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi ADD.
27. PMK Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

5.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan azas tugas pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan, yaitu :

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- b. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
- c. Kementerian Pekerjaan Umum RI
- d. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI

5.3. Instansi Penerima Tugas

Adapun organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bintan yang melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah pada tahun anggaran 2016, yaitu :

5.3.1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan

5.3.1.1 Bidang Budidaya

a. Dasar Hukum

SP DIPA-032.04.4.329060/2016, tanggal 7 Desember 2015 diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Perikanan Budidaya dengan sumber dana berasal dari TP-APBN 2016.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Perikanan Budidaya.

c. Nama Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Program dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, dengan pagu anggaran Rp.392.910.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.383.219.400,- (97,53%) dan realisasi fisik mencapai 100% yang dipergunakan untuk :

- 1) Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya
- 2) Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
- 3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya

d. Jumlah Anggaran sebesar Rp. 392.910.000,-

e. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya.

5.3.1.2 Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi

a. Dasar Hukum

SP DIPA-032.07.4.329119/2016 diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan sumber dana berasal dari TP-APBN 2016.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan sumber dana berasal dari TP-APBN 2016.

c. Program dan Kegiatan

Program ***Coral Triangle Initiation (Coremap CTI)***

Program dilaksanakan oleh **Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan**, dengan pagu anggaran Rp.5.496.560.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.5.434.529.650,- (99,05%) dan

realisasi fisik mencapai 100% yang dipergunakan untuk :

- 1) Dukungan Monitoring Biofisik dan Sosek di KKPD Kabupaten Bintan
- 2) Penataan batas dan pengadaan tanda batas KKPD Bintan
- 3) Penyusunan bisnis plan pemanfaatan kawasan (wisata bahari atau budidaya)
- 4) Analisis daya dukung pemanfaatan perikanan berkelanjutan di KKPD Kabupaten Bintan
- 5) Dukungan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah
- 6) Perencanaan dan Pengawasan Sarana Monitoring untuk POKMASWAS di KKPD Kabupaten Bintan
- 7) Perencanaan, pengawasan, UKL dan UPL pembangunan sarana kantor UPT KKPD Kabupaten Bintan
- 8) Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gerbang Memasuki Kawasan Konservasi
- 9) Perencanaan dan Pengawasan Pembuatan Font Area KKPD Bintan
- 10) Pelatihan dan penguatan pokmas dalam bidang konservasi dan pengelolaan kawasan (monitoring, pengawasan, dll)
- 11) Penyediaan Sarana Monitoring untuk POKMASWAS di KKPD Kabupaten Bintan
- 12) Sosialisasi dan publikasi penyadaran masyarakat tentang konservasi dan pengelolaan pesisir
- 13) Pelatihan pengembangan ekonomi masyarakat tentang

pengelolaan wisata bahari di KKPD Bintan

- 14) Pemantauan rutin ekosistem pesisir oleh pengelola KKPD bersama pokmas 10 kali setahun
- 15) Pembuatan Ponton Labuh Apung Untuk Menunjang Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Bintan.
- 16) Pengadaan Peralatan untuk Selam Monitoring dan Survey Biofisik Menunjang Pengelolaan KKPD Kabupaten Bintan
- 17) Pembuatan Kapal Motor Fiber untuk Pokmas Pengelola Wisata Diving di KKPD Kabupaten Bintan
- 18) Pendampingan Kegiatan Konservasi Jenis (Dugong, Penyu, Kuda Laut)
- 19) Kunjungan Lapang PIU dan Perwakilan LPSPK Kabupaten Bintan ke KKPD Lain
- 20) Pendamping Implementasi Coremap-CTI TA. 2016
- 21) Pengadaan Mesin dan Kelengkapan Tambahan Kapal Multipurpose
- 22) Pengadaan Kelengkapan Pokmaswas
- 23) Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan LPSTK Berbadan Hukum
- 24) Pengadaan Camera Underwater dan Komputer untuk Monitoring dan Survey Biofisik KKPD Kabupaten Bintan
- 25) Pengadaan Peralatan Uji Kualitas Air dan kelengkapannya untuk Pemantauan Ekosistem Pesisir di KKPD Kabupaten Bintan
- 26) Pengadaan Peralatan Survey Monitoring untuk Kegiatan

Konservasi Jenis (Dugong, Penyu, Kuda Laut)

27) Pembangunan Sarana Pengolahan Kerupuk Ikan di Desa Malang Rapat

28) Pembangunan Gerbang Memasuki Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kabupaten Bintan

29) Pembuatan Font Area KKPD Bintan

d. Jumlah Anggaran sebesar Rp. 5.496.560.000,-

e. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya.

5.3.2 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan

a. Dasar Hukum

DIPA Nomor SP DIPA-026.04.4.329120/2016 Tanggal 17 November 2015.

Revisi I : SP DIPA-026.04.4.329120/2016 Tanggal 3 Agustus 2016

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan sumber dana berasal dari APBN.

c. Program dan Kegiatan

Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Padat Karya Infrastruktur I (RM)
- 2) Padat Karya Infrastruktur II (RM)
- 3) Padat Karya Infrastruktur III (RM)

- 4) Penciptaan Wirausaha Muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pendampingan I (RM)
- 5) Penciptaan Wirausaha Muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pendampingan II (RM)
- 6) Penciptaan Wirausaha Muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pendampingan III (RM)
- 7) Penciptaan Wirausaha Muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pendampingan IV (RM)
- 8) Penciptaan Wirausaha Muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pendampingan V (RM)
- 9) Penciptaan Wirausaha Muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pendampingan I (PNBP)
- 10) Penciptaan Wirausaha Muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pendampingan II (PNBP)
- 11) Penciptaan Wirausaha Muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pendampingan III (PNBP)
- 12) Administrasi Kegiatan

Dalam pelaksanaan anggaran tersebut digunakan antara lain untuk :

- 1) **Kegiatan Padat Karya Infrastruktur I (RM)** dilaksanakan di Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan pada tanggal 15 Februari sd. 08 Maret 2016 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 88 orang. Kegiatan berupa pembuatan dan semenisasi jalan desa.
- 2) **Kegiatan Padat Karya Infrastruktur II (RM)** dilaksanakan di Kelurahan Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur pada tanggal 17 Maret sd. 09 April 2016 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 88 orang. Kegiatan yang dilakukan berupa pembuatan dan semenisasi

jalan desa.

- 3) **Kegiatan Padat Karya Infrastruktur III (RM)** dilaksanakan di Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang pada tanggal 14 April sd. 07 Mei 2016 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 88 orang. Kegiatan yang dilakukan berupa pembuatan dan semenisasi jalan desa.
- 4) **Penciptaan Wirausaha Muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pendampingan I (RM)** dilaksanakan di Kecamatan Bintan Timur pada tanggal 16-18 Mei 2016. Jumlah peserta sebanyak 20 (duapuluh) orang. Kegiatan berupa pembekalan sebanyak 28 JPL (jam pelajaran).
- 5) **Penciptaan Wirausaha Muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pendampingan II (RM)** dilaksanakan di Kecamatan Gunung Kijang pada tanggal 23-25 Mei 2016. Jumlah peserta sebanyak 20 (duapuluh) orang. Kegiatan berupa pembekalan sebanyak 28 JPL (jam pelajaran).
- 6) **Penciptaan Wirausaha Muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pendampingan III (RM)** dilaksanakan di Kecamatan Bintan Timur pada tanggal 26-28 Mei 2016. Jumlah peserta sebanyak 20 (duapuluh) orang. Kegiatan berupa pembekalan sebanyak 28 JPL (jam pelajaran).
- 7) **Penciptaan Wirausaha Muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pendampingan IV (RM)** dilaksanakan di Kecamatan Seri Kuala Lobam pada tanggal 1-3 Juni 2016. Jumlah peserta sebanyak 20 (duapuluh) orang. Kegiatan berupa pembekalan sebanyak 28 JPL (jam pelajaran).
- 8) **Penciptaan Wirausaha Muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pendampingan V (RM)** dilaksanakan di

Kecamatan Bintan Utara pada tanggal 7-9 September 2016. Jumlah peserta sebanyak 20 (duapuluh) orang. Kegiatan berupa pembekalan sebanyak 28 JPL (jam pelajaran).

9) **Penciptaan Wirausaha Muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pendampingan I (PNBP)** dilaksanakan di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya pada tanggal 22-24 Agustus 2016. Jumlah peserta sebanyak 20 (duapuluh) orang. Kegiatan berupa pembekalan sebanyak 28 JPL (jam pelajaran).

10) **Penciptaan Wirausaha Muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pendampingan II (PNBP)** dilaksanakan di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan pada tanggal 22-24 Agustus 2016. Jumlah peserta sebanyak 20 (duapuluh) orang. Kegiatan berupa pembekalan sebanyak 28 JPL (jam pelajaran).

11) **Penciptaan Wirausaha Muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pendampingan III (PNBP)** dilaksanakan di Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya pada tanggal 28-30 September 2016. Jumlah peserta sebanyak 20 (duapuluh) orang. Kegiatan berupa pembekalan sebanyak 28 JPL (jam pelajaran).

12) Administrasi Kegiatan

d. Jumlah Anggaran sebesar Rp. 1.766.123.000,-

e. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

- a. Personil masih terbatas baik dari kualitas maupun kuantitas.
- b. Sulitnya mengidentifikasi potensi wilayah/daerah setempat dikarenakan letak dan kondisi geografis.
- c. Letak geografis Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau yang berakibat tingginya biaya transportasi petugas dalam

melaksanakan kegiatan, sementara alokasi dana untuk transportasi tidak memadai.

2) Solusi :

- a. Memberdayakan semaksimal mungkin personil yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan membuat pembagian kerja yang jelas dan melibatkan unsur masyarakat.
- b. Penetapan lokasi lebih diprioritaskan kepada daerah yang jumlah penganggur/setengah penganggur lebih banyak di desa yang berada di wilayah Kabupaten Bintan.
- c. Memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah/wilayah setempat untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan bagi penduduk setempat.

5.3.3 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara

a. Dasar Hukum

DIPA Nomor SP DIPA-010.04.4.320143/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Dalam Negeri Republik dengan sumber dana berasal dari APBN.

c. Program dan Kegiatan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara dilaksanakan dengan realisasi fisik mencapai 100% dan kondisi sarana mencukupi, dengan Paket Pekerjaan Pembangunan Mess Aparatur Perbatasan di Kecamatan Tambelan dan Kantor Desa Mentebung di Kecamatan Tambelan.

d. Jumlah Anggaran

Pagu yang diterima sebesar Rp.1.600.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.592.037.341,00 atau 99,50%.

e. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya.

2) Program Bina Administrasi Kewilayahan

a. Dasar Hukum

SP DIPA-010.04.4.320143/2016 tanggal 07 Desember 2015.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Dalam Negeri RI melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

c. Program dan Kegiatan

Program Bina Administrasi Kewilayahan dengan **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara.**

(1) Perencanaan Teknis

Perencanaan Teknis di kegiatan ini yaitu perencanaan untuk Pembangunan Mess Aparatur Perbatasan di Kecamatan Tambelan dan Pembangunan Kantor Desa Mentebung di Kecamatan Tambelan. Yang mana untuk perencanaan teknis ini dengan nilai Pagu Rp.74.597.000,00 atau 4,66% dari anggaran belanja sebesar Rp.1.600.000.000,00 dengan realisasi Perencanaan Teknis sebesar Rp.73.865.000,00 atau 4,62%.

(2) Pengawasan Teknis

Pengawasan Teknis di kegiatan ini yaitu pengawasan untuk Pembangunan Mess Aparatur Perbatasan di Kecamatan Tambelan dan Pembangunan Kantor Desa Mentebung di Kecamatan Tambelan. Yang mana untuk Pengawasan Teknis ini dengan nilai Pagu Rp.60.255.000,00 atau 3,77% dari anggaran belanja sebesar Rp.1.600.000.000,00 dengan realisasi Pengawasan Teknis sebesar Rp.59.235.000,00 atau 3,70%.

(3) Pembangunan Mess Aparatur Perbatasan di Kecamatan Tambelan

Pembangunan Mess Aparatur Perbatasan di Kecamatan Tambelan ini terlaksana dengan baik. Yang mana untuk Pelaksanaan Konstruksi ini dengan nilai Pagu Rp.800.000.000,00 atau 50% dari anggaran belanja sebesar Rp.1.600.000.000,00 dengan realisasi Pembangunan sebesar Rp.789.260.500,00 atau 49,89%.

(4) Pembangunan Kantor Desa Mentebung di Kecamatan Tambelan

Pembangunan Kantor Desa Mentebung di Kecamatan Tambelan ini terlaksana dengan baik. Yang mana untuk Pelaksanaan Konstruksi ini dengan nilai Pagu Rp. 525.000.000,00 atau 32,81% dari anggaran belanja sebesar Rp. 1.600.000.000,00 dengan realisasi Pembangunan sebesar Rp. 523.783.000,00 atau 32,74%.

Sesuai dengan Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2016 yang diterima, Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan adalah Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-010.04.4.320143/2016 tanggal 07 Desember 2015.

d. Jumlah Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, dengan Pagu yang diterima sebesar Rp.1.600.000.000,-

e. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ditemukan permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaannya.

5.3.4 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan

a. Dasar Hukum

SP DIPA.010.08.4.320150/2016, tanggal 07 Nopember 2015

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Dalam Negeri RI melalui Ditjen Administrasi Kependudukan

c. Anggaran

Realisasi keuangan sebesar Rp.580.445.275,- atau 88.84%, dari anggaran belanja sebesar Rp.653.353.000,- dengan realisasi fisik mencapai 100%, yang dipergunakan untuk belanja barang dan jasa.

d. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan.

Sesuai dengan Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2016 yang diterima, Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan adalah : **Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

Program tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA.010.08.4.320150/2016, tanggal 07 Nopember 2015 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, dengan Pagu yang diterima sebesar Rp.653.353.000.- Pada Tahun Anggaran 2016 tidak terdapatnya anggaran belanja pegawai, dan belanja modal sedangkan untuk belanja barang mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 88.84%, hal ini disebabkan meningkatnya pagu anggaran dari Instansi pemberi Tugas Pembantuan.

5.3.5 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan

a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi tugas pembantuan di Kabupaten Bintan dalam Tahun Anggaran 2016 adalah:

- 1) Pemerintah Pusat, melalui Kementrian Keuangan dan Kementerian Desa
- 2) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

b. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya (TA. 2016)

- 1) Program yang diterima oleh BPMPKB tahun 2016 dari Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi adalah Program pengembangan Sumber daya Alam Kegiatan pembangunan Cool Storage di desa Malang Rapat sebanyak 1 unit dengan kapasitas 2,8 ton. Pagu anggaran sekitar Rp.1,700.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.1.353.767.000, dari APBN itu untuk satu paket proyek pembangunan konstruksi cold storage, berikut kelengkapan alat-alat di dalamnya. Seperti cold storage atau gudang beku, ada anterum atau ruang antara, lalu ada pula 'Air Blast Freezer'. Dilengkapi pula

ruang pengolahan, ruang kantor, serta ruang ganti atau ruang istirahat untuk karyawan Bangunan ini sudah selesai dibangun

2) Transfer Dana Desa dari APBN sebesar Rp. 24.261.077.000,-

Yang terbagi kepada 36 desa, dengan rincian dana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 tahun 2015 tentang Tatacara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

Tabel 5.1 pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa
1	Gunung Kijang	565.640.000	99.713.649	665.353.649
2	Malang Rapat	565.640.000	115.415.878	681.055.878
3	Teluk Bakau	565.640.000	112.906.835	678.546.835
4	Lancang Kuning	565.640.000	91.006.920	656.646.920
5	Bintan Buyu	565.640.000	87.215.781	652.855.781
6	Pangkil	565.640.000	79.442.373	645.082.373
7	Penaga	565.640.000	122.060.667	687.700.667
8	Pengujan	565.640.000	87.203.925	652.843.925
9	Tembeling	565.640.000	102.669.742	668.309.742
10	Batu Lepuk	565.640.000	114.938.198	680.578.198
11	Kampung Hilir	565.640.000	139.398.842	705.038.842
12	Kampung Melayu	565.640.000	97.910.080	663.550.080
13	Pulau Mentebung	565.640.000	76.289.127	641.929.127
14	Pulau Pinang	565.640.000	64.822.927	630.462.927
15	Kukup	565.640.000	109.751.987	675.391.987
16	Pengikik	565.640.000	81.022.301	646.662.301
17	Berakit	565.640.000	202.475.576	768.115.576
18	Ekang Anculai	565.640.000	70.371.434	636.011.434
19	Pengudang	565.640.000	163.017.053	728.657.053

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa
20	Sebong Lagoi	565.640.000	143.749.800	709.389.800
21	Sebong Pereh	565.640.000	133.041.648	698.681.648
22	Sri Bintan	565.640.000	122.337.840	687.977.840
23	Toapaya	565.640.000	73.555.537	639.195.537
24	Toapaya Utara	565.640.000	78.023.768	643.663.768
25	Toapaya Selatan	565.640.000	178.009.506	743.649.506
26	Mantang Baru	565.640.000	70.387.943	636.027.943
27	Mantang Besar	565.640.000	64.957.137	630.597.137
28	Mantang Lama	565.640.000	50.581.452	616.221.452
29	Dendun	565.640.000	95.573.267	661.213.267
30	Kelong	565.640.000	143.860.308	709.500.308
31	Mapur	565.640.000	68.956.239	634.596.239
32	Numbing	565.640.000	212.237.611	777.877.611
33	Air Gelubi	565.640.000	73.879.907	639.519.907
34	Busung	565.640.000	65.558.150	631.198.150
35	Teluk Sasah	565.640.000	193.930.639	759.570.639
36	Kuala Sempang	565.640.000	111.762.954	677.402.954
	Total	20.363.040.000	3.898.037.000	24.261.077.000

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan 2017

Penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN sudah tersalur 100% dengan 2 tahap yaitu 60% dan 40%. Sedangkan untuk penggunaan dana sudah 78.04% atau sebesar Rp.18.934.379.487,-

c. Sumber dan Jumlah Anggaran

- 1) Sumber dari APBN Rp. 20.363.040.000,-
- 2) Sumber dari APBD Sebelum Perubahan Rp. 41.378.579.399,-,
Setelah APBD Perubahan Rp. 38.482.079.399,-

Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Bintan Sumber dari APBD Sebelum Perubahan Rp. 41.378.579.399,-, Setelah APBD Perubahan Rp. 38.482.079.399,-

Secara Umum Pembagian Dana Desa baik dari sumber APBN maupun APBD dibagi penggunaannya untuk 4 Bidang.

1. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, untuk kegiatan operasional kantor dan kegiatan yang menunjang sarana dan prasarana Kepegawaian dan Kantor Desa.
2. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:
 - a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
 - e) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
3. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
 - a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan;

- b) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c) pembinaan kerukunan umat beragama
- d) pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e) pembinaan lembaga adat;
- f) pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
- g) kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

4. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat,** Prioritas penggunaan Dana Desa 2016 di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

- a) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;
- e) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan

Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;

- f) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h) Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

d. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini antara lain:

1. Kebijakan dari 3 menteri dalam mengatur desa hampir setiap tahun ada aturan baru,
2. Pemerintah desa belum memahami aturan tentang tupoksi mesa
3. Pengetahuan kades terhadap pengelolaan keuangan desa masih rendah.
4. Perangkat desa kurang memahami terhadap pengelolaan keuangan desa.
5. Aplikasi desa masih belum optimal

Solusi dari permasalahan tersebut diatas adalah pembekalan dan pelatihan kades dan kepala desa kerjasama dengan BPKP Kepulauan Riau.

Tabel 5.2 Realisasi Sumber Pendanaan Tugas Pembantuan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016

No	BA	Kode Satker	Nama Satker	Pagu	Realisasi	*Blokir	Realisasi (%)
1	010	320143	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BINTAN	1.600.000.000	1.592.037.341	-	99,50
2	010	320150	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BINTAN	653.353.000	580.445.275	42.525.000	95,35
3	032	329060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BINTAN	500.000.000	383.219.400	107.090.000	98,06
4	032	329119	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BINTAN	5.496.560.000	5.254.004.000	-	95,59
5	026	329120	DINAS TENAGA KERJA KAB. BINTAN	1.766.123.000	1.763.212.000	-	99,84

Sumber : Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bintan Tahun 2017

The background of the page features a series of overlapping, wavy, translucent blue and white bands that create a sense of movement and depth, particularly on the left side.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

a. Kebijakan dan Kegiatan

Pelaksanaan Kerja sama dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa kerja sama daerah adalah kesepakatan antar gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain dan/atau gubernur atau bupati/walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Peraturan Pemerintah tersebut juga menyebutkan bahwa pihak ketiga adalah departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan hukum milik daerah, atau yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Kebijakan kerjasama Kabupaten Bintan dengan pihak ketiga juga dilakukan dalam rangka pencapaian **misi ketiga** RPJMD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2016–2021 yakni Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (***good governance***), dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga juga merupakan salah satu upaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sama dengan prinsip yang dianut dalam kerja sama antar daerah, yaitu: efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional

dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan beberapa bentuk kerjasama antar pemerintah maupun penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memory of understanding (MOU)*) antara lain :

- (1) Pada tanggal 29 juni 2016, Pemerintah Polandia menawarkan peluang kerjasama terhadap pengembangan investasi dan perdagangan pengembangan di bidang penerbangan, kelautan, pariwisata dan bidang kesehatan dari Pemerintahan Polandia yang diwakili oleh Mr.Romuald Morawski, Konselor Pertama, Bidang Perdagangan dan Investasi dari Kedutaan Republik Polandia yang menemui Bupati Bintan H.Apri Sujadi, S.Sos di Bintan Expo Centre.
- (2) Pada tanggal 16 April 2016 bertempat di Auditorium Said Hotel telah dilaksanakan penandatanganan MOU antara PT.Tirtamadu, PT.Bintan Condong, Baltekomdik Provinsi Kepri, Dinas Pertanian Bintan, serta Alumni SMK Negeri 3 Bintan untuk Program Petani Muda. Kegiatan ini disejalankan dengan Pelepasan Siswa-Siswi Kelas XII angkatan Ke-2 SMK Negeri 3 Bintan, Tahun Pelajaran 2015/2016 kali ini mengangkat Tema **"Get On Your Struggle to Teach the Bright Future" (Teruskan Perjuanganmu Untuk Mencapai Masa Depan Yang Cerah)**. Hal ini merupakan trobosan baru dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah berbasis Agrobisnis ini, diantaranya akan bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bintan. Selanjutnya direncanakan pula program yang seperti agribisnis tanaman pangan dan program lingkungan bekerjasama dengan alumni, yaitu penanaman 5000 bibit cabe, perakitan komputer dan Laptop, serta program teknik gambar bangunan, tahun 2016 juga akan bekerja sama dengan para developer. Diharapkan setelah MOU antara SMA Negeri 3 dengan,

PT.Tirtamadu, PT. Bintang Condong, Baltekomdik Provinsi Kepri, Dinas Pertanian Bintang, Alumni SMK Negeri 3 Bintang sebagai Petani Muda, semoga dapat bekerja semaksimal mungkin untuk kemajuan Kabupaten Bintang.

c. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program

6.2. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

a. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam Pasal 363 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan: (a) Daerah lain; (b). pihak ketiga; dan/atau (c). lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah. Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama termaksud, maka kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas antar daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik

yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui instansi vertikal misalnya dalam bentuk koordinasi lain dengan instansi vertikal berada di daerah diantaranya adalah kerjasama antara Bappeda Kabupaten Bintan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan dalam rangka pengolahan, analisis data indikator makro dan statistik daerah. Terkait dengan Tramtibmas Pemda Kabupaten Bintan juga bekerjasama dengan Kepolisian, TNI, Kejari, Badan Intelijen Negara, Badan Pertanahan Nasional. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2016 adalah terlaksananya pengolahan, analisis data dan statistik daerah, terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- (1) **Kodim 0315 Bintan** bersama Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan penandatanganan MOU tentang **Pembinaan Wawasan Kebangsaan di wilayah Kodim Bintan**, yang dilaksanakan di koramil 02 Kecamatan Bintan Timur tanggal 7 Maret 2016. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Bintan, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Kapolsek Bintan Timur, perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN), Camat Bintan Pesisir dan Kades Numbing kegiatan yang bertema **Peduli dan Istarikan alam Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga**, Kodim 0315 Bintan juga mengadakan Ekspedisi Gurindam Sakti yang meliputi kegiatan Bansos, Jambanisasi, Karya Bakti, Penyuluhan Pangan. Wawasan Kebangsaan sangat perlu kita berikan kepada masyarakat karena sangat sejalan dengan program pemerintah pusat yaitu revolusi mental. Pemerintah daerah dalam hal ini Pemda Bintan sangat memberikan support penuh untuk kegiatan **Wawasan Kebangsaan** dan akan berpartisipasi aktif dalam mensukseskan

Bupati Bintan. Kegiatan yang dilaksanakan selama empat hari ini meliputi tiga wilayah, Kota Tanjungpinang, kabupaten Bintan yang dipusatkan di dua titik yaitu Pulau Numbing dan Gunung Bintan Dan Di Lingga. Kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan persuasif kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan agar tidak mudah terpengaruh terhadap gejala aliran-aliran radikal yang dapat memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Pemerintah Kabupaten Bintan telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan GADA PRATAMA untuk Masyarakat Kabupaten Bintan kerjasama Direktorat Binmas Polda Kepri dengan Pemkab Bintan yang telah dilaksanakan mulai tanggal 10 Maret 2016 selama 10 hari. Kegiatan ini dilaksanakan Hermes Hotel Kecamatan Gunung Kijang. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta didik. OPD Kabupaten Bintan yang terlibat dalam pelatihan ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan. Dukungan anggaran untuk kegiatan ini dari APBD Kab. Bintan dan pelatih/instruktur dari Polda kepri dan Polres Bintan
- (3) Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun 2016 bekerjasama dengan BPS (Badan Pusat Statistik).
- (4) Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Bintan
- (5) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
- (6) Sosialisasi Peraturan terkait Aktivitas tentang Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing
- (7) Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan orang Asing, NGO dan Lembaga Asing
- (8) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
- (9) Fasilitasi Penanganan Keamanan dalam rangka pengamanan Event - Event internasional Kabupaten Bintan

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten Bintan (Bappeda) dengan instansi vertikal.
- 2) Upaya-upaya / solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya melalui peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal terkait dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan.

6.3. Pembinaan Batas Wilayah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh **Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan**

a. Kebijakan dan Kegiatan

Pembinaan Batas wilayah dilaksanakan oleh **Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan Sekretris Daerah Kabupaten Bintan** yang merupakan Sub SKPD yang dibentuk dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan sejak tahun 2014. Bagian Perbatasan melaksanakan kegiatan ditunjuk langsung oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum Badan atau Dinas yang mengurus masalah perbatasan di bentuk oleh Kabupaten Kota. Kegiatan ini lebih mengarah kepada Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan di Perbatasan baik di Perbatasan Negara tetangga maupun Perbatasan Kabupaten/Kota disekitar Kabupaten Bintan dengan 4 lokasi prioritas (4 Kecamatan).

b. Realisasi Pelaksanaan dan Kegiatan

- 1) **Program Penataan Dan Pembinaan Pemerintahan Umum Dan Daerah Bawahan**

Program ini dilaksanakan oleh **Bagian Pemerintahan dan Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten**

Bintan melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.929.240.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.903.103.914,- atau 97,19%. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Penataan Daerah Otonomi Wilayah dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

(1) **Penetapan Kampung Tua Di Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan Rp.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.90.351.385,- atau 90,35% dengan hasil terbentuknya wilayah kampung tua Kab. Bintan. yaitu Bukit Batu (Teluk Bintan), Pasar Kijang (Bintan Timur) dan Kampung Mentigi (Bintan Utara).

(1) **Temu Pemuda Perbatasan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.165.800.000,- dan realisasi sebesar Rp.165.274.902,- atau 99,68% dengan hasil terwujudnya pemuda perbatasan yang mandiri, inovatif dan cinta NKRI

(2) **Pembinaan Dana DAK Desa**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.144.800.000,- dan realisasi sebesar Rp.138.074.142,- atau 95,36% dengan hasil terbinanya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dana alokasi khusus se Kab. Bintan

(3) **Pengelolaan Wilayah Perbatasan Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran yang dialokasikan Rp.183.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.181.363.407,- atau 99,11% dengan hasil tercapainya program kegiatan kementrian/lembaga dan provinsi di wilayah perbatasan Kab. Bintan

(4) **Monitoring Evaluasi Wilayah Perbatasan Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran yang dialokasikan Rp.72.675.000,- dan realisasi sebesar Rp.72.276.816,- atau 99,45% dengan hasil terwujudnya Monitoring Evaluasi Wilayah Perbatasan Kabupaten Bintan

(5) **Pemeliharaan Tanda Batas Negara di Kabupaten Bintan**

Kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran yang

dialokasikan Rp.70.525.000,- dan realisasi sebesar Rp.70.241.433,- atau 99,60% dengan hasil terpeliharanya Tanda Batas Negara di Kabupaten Bintan

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Belum ada penilaian LPPD untuk Tahun 2016
- b. Umumnya kondisi lahan yang ada diwilayah perbatasan ketersediaan lahan untuk dijadikan kegiatan fisik infrastruktur belum jelas statusnya, sehingga dalam melaksanakan perencanaan ditahap awal perlu dilakukan secara matang untuk menentukan lokasi titik kegiatan dimaksud.
- c. Untuk kegiatan temu pemuda perbatasan, dari 50 peserta pelatihan hanya sebagian kecil dari pemuda wilayah kecamatan perbatasan yang memiliki potensi dan kreatifitas dalam mengembangkan diri.

2) Solusi

- a. Dalam penyusunan LPPD dibutuhkan komitmen bersama untuk tercapainya LPPD Kabupaten Bintan yang lebih baik serta data-data pendukung berdasarkan keadaan real dilapangan dengan harapan agar LPPD Bintan dapat mempertahankan kedalam peringkat 10 besar tingkat nasional.
- b. Agar menjadi perhatian Pemerintah Daerah khususnya Kecamatan yang berada diwilayah perbatasan perlu dilakukannya koordinasi antara Pihak kecamatan dengan masyarakat setempat dalam hal menentukan lokasi lahan yang pasit agar tidak terjadi tumpang tindih dan permasalahan dikemudian hari.
- c. Dalam rangka meningkatkan potensi pemuda diwilayah perbatasan pelaksanaan temu pemuda perbatasan diharapkan terus berjalan sehingga mampu menampung pemuda yang memiliki potensi dan kemampuan dalam mengembangkan diri sehingga tercipta generasi muda yang lebih kreatif, produktif dan maju, sehingga dapat meningkatkan perekonomian diwilayahnya.

6.4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

a. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Kita patut bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bahwa daerah Kabupaten Bintan tidak termasuk wilayah yang berpotensi mengalami bencana-bencana besar dan masif, seperti Gempa Bumi, Tsunami, Kekeringan, atau Air Bah. Namun kita sebaiknya harus tetap memiliki kewaspadaan tinggi terhadap potensi bencana yang timbul. Berdasarkan kejadian maupun sejarah di Kabupaten Bintan, beberapa potensi bencana yang ada seperti Angin Puting Beliung, Kebakaran Hutan/Belukar/Lahan Perkebunan dan Kekeringan akibat kemarau, asih dalam batas status regional artinya tidak berdampak luas dan masih bisa diatasi ataupun ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi serta mengantisipasi segala potensi bencana yang ada.

b. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Pada tahun 2016 anggaran yang telah dialokasikan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan sebesar Rp.7.578.671.861,-, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.4.496.017.225,- dengan realisasi sebesar Rp.4.219.761.861,- (93,86%) dan Belanja Langsung sebesar Rp 3.082.654.636,- dengan realisasi sebesar Rp.3.033.993.298,- (98,42%). Realisasi anggaran 2016 sampai dengan akhir bulan Desember 2016 mencapai Rp.7.253.755.159,- (95,71%). Sisa anggaran sebesar Rp.324.916.702,- (4,29%) dikembalikan ke Kas Negara.

c. Program dan Kegiatan

1) Program Penanggulangan Bencana

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan** melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.452.041.850,- dan realisasi anggaran

sebesar Rp.445.916.170,- atau 98.64%. *Outcome* program ini adalah meningkatnya kemampuan dalam penanganan bencana kebakaran.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

(1) **Monitoring Daerah Bencana dan Rawan Bencana,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Rp.71.000.000; Realisasi Anggaran sebesar Rp.70.767.000,- Atau 99.67% *Output* dari kegiatan ini adalah Tercapainya Pengurangan Resiko Terhadap Bencana Alam di Kabupaten Bintan. kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pertemuan atau arahan dengan Intasi Terkait, Kepala Desa dan Masyarakat setempat.

(2) **Peningkatan Sumber Ekonomi Alternatif Bagi Masyarakat Nelayan yang Terkena Bencana,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Rp.114.600.000; Realisasi Anggaran Sebesar Rp.114.332.280; Atau 99,77%. *Output* dari kegiatan ini adalah Tercapainya Pengurangan Resiko Terhadap Bencana Alam di Kabupaten Bintan kepada 30 nelayan.

(3) **Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran**

Kegiatan ini dilaksanakan Dengan Anggaran Rp.86.441.850,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp.84.511.540,- Atau 97,77 %. *Ouput* dari kegiatan ini adalah Telaksananya Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Kejadian Kebakaran yang diikuti peserta sebanyak 32 peserta.

(4) **Penanganan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Rp.180.000.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp.176.305.350,- atau 97.95%. *ouput* dari kegiatan ini adalah Meningkatnya tingkat Wakyu (*Respon Time*) Daerah atau Wilayah dalam Menangani Kebakaran dengan cakupan 20% lokasi kebakaran.

Tabel 6.1 : Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bintan Tahun 2016

NO.	TANGGAL / JAM		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN / DESA	JENIS BENCANA
1	01 Jan 2016	Pkl. 15.30	Bintan Utara	Tg. Uban Utara	Angai Ribut
2	08 Jan 2016	Pkl. 16.00	Toapaya	Jl. Tg. Uban Km. 20 Gesek	Kebakaran semak belukar dan kebon masyarakat
3	10 Jan 2016	Pkl. 16.00	Bintan Utara	Jl. Taman sari gg. Palam kel. Tg. Uban Selatan	Kebakaran hutan semak belukar
4	12 Jan 2016	Pkl. 11.00	Gunung Kijang	Jl. Galang Batang	Kebakaran hutan semak belukar
5	12 Jan 2016	Pkl. 15.00	Seri Kuala Lobam	Jl. Raya Busung kebon lima	Kebakaran hutan semak belukar
6	13 Jan 2016	Pkl. 13.00	Seri Kuala Lobam	Jl. Raya Busung kebon lima	Kebakaran semak belukar kebon
7	24 Jan 2016	Pkl. 20.00	Bintan Timur	Jl. Musi Kp. Banjar Kel. Sei Lekop	Kebakaran hutan semak belukar
8	25 Jan 2016	Pkl. 15.40	Bintan Timur	Jl. Lengkuas Bt.20 Kel.Gunung Lengkuas	Kebakaran hutan semak belukar
9	29 Jan 2016	Pkl. 16.20	Teluk Bintan	Bintan Buyu	Kebakaran hutan semak belukar
10	30 Jan 2016	Pkl. 11.40	Teluk Bintan	Jl. Lintas Barat Desa Bintan Bekapur	Kebakaran semak belukar dan kebon masyarakat
11	30 Jan 2016	Pkl. 18.10	Toapaya	Jl. Tg. Uban Km. 25 Toapaya	Kebakaran hutan semak belukar
12	31 Jan 2016	Pkl. 18.45	Bintan Utara	Jl. Taman Sari Bumi MoroKel. Tg. Uban Utara	Kebakaran hutan lindung
13	01 Feb 2016	Pkl. 11.00	Bintan Timur	Jl. Lengkuas Bt. 20 Kel. Gunung	Kebakaran hutan semak belukar

NO.	TANGGAL / JAM		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN / DESA	JENIS BENCANA
				Lengkuas	
14	06 Feb 2016	Pkl. 11.00	Gunung Kijang	Pulau Pucung Desa Malang Rapat	Banjir air pasang laut atau banjir rop yg disertai gelombang tinggi
15	06 Feb 2016	Pkl. 11.00	Bintan Utara	Kp. Mentigi tg. Uban kt	Banjir rop serta gelombang tinggi
16	08 Feb 2016	Pkl. 11.00	Bintan Timur	Kel. Kijang Kota Rt.03 Rw.16 Gg. Bawal	Banjir Rop. Dan airpasang
17	08 Feb 2016	Pkl. 12.00	Bintan Timur	Kel. Kijang Kota Rt. 02 Rw.17 Kp. Kolam	Banjir Rop. Dan airpasang
18	08 Feb 2016	Pkl. 18.00	Teluk Sebong	Sebong Pereh	Kebakaran semak belukar
19	13 Feb 2016	Pkl. 20.00	Bintan Timur	Jl. Wacopek Kel. Gunung Lengkuas	Kebakaran hutan semak belukar
20	17 Feb 2016	Pkl. 20.00	Teluk Sebong	Jl. Batin Kundang Sebong pereh	Kebakaran semak belukar
21	21 Feb 2016	Pkl. 15.45	Gunung Kijang	Pulau Pucung Desa Malang Rapat	Tenggelam di laut 3 Orang meninggal
22	25 Feb 2016	Pkl. 15.30	Bintan Timur	Kp. Wacopek Rt.2 Rw.4 Kel.Sei Enam Darat	Banjir
23	29 Feb 2016	Pkl. 10.00	Seri Kuala Lobam	Perum Tanjung Permai	Kebakaran semak belukar
24	29 Feb 2016	Pkl. 20.20	Toapaya	Jl. Lintas Barat Km.16 Toapaya	Kebakaran semak belukar
25	01 Mar 2016	Pkl. 15.00	Bintan Utara	Jl. Mekar Sari Gg. Mahoni Kel. Tg. Uban Timur	Kebakaran semak belukar
26	03 Mar 2016	Pkl. 14.10	Toapaya	Jl. Tg. Uban lama Kp. Sanglai Toapaya	Kebakaran semak belukar

NO.	TANGGAL / JAM		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN / DESA	JENIS BENCANA
27	05 Mar 2016	Pkl. 10.23	Seri Kuala Loba	Kampung BCI Kel. Teluk Lobam	Kebakaran gudang penyimpanan PT.BCI (Bintan Cipta Industri)
28	12 Mar 2016	Pkl. 15.20	Toapaya	Kp. Simpang Desa Toapaya Selatan	Kebakaran semak belukar
29	12 Mar 2016	Pkl. 18.10	Gunung Kijang	Jl. Wisata Bahari Desa Mengkurus Tl. Bakau	Kebakaran semak belukar
30	14 Mar 2016	Pkl. 10.45	Bintan Timur	Jl. Korindo Kp. Jawa Kel. Sei Lekop	Kebakaran Rumah
31	14 Mar 2016	Pkl. 12.30	Bintan Utara	Kp. Sakera Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran semak belukar
32	14 Mar 2016	Pkl. 14.00	Bintan Utara	Jl. Manggar Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran semak belukar
33	14 Mar 2016	Pkl. 16.30	Seri Kuala Lobam	Jl. Raya Busung	Kebakaran semak belukar
34	15 Mar 2016	Pkl. 16.00	Bintan Utara	Jl. Eka BhaktiKp. Baru Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran semak belukar
35	17 Mar 2016	Pkl. 15.30	Teluk Bintan	Belakang Ktr Bupati Bintan Desa Bintan Buyu	Kebakaran semak belukar
36	17 Mar 2016	Pkl. 19.00	Seri Kuala Lobam	Jl. Raya Busung Kebon Lima Busung	Kebakaran semak belukar
37	18 Mar 2016	Pkl. 10.00	Teluk Bintan	Jl. Lintas Barat Kp. Ladi Km. 36	Kebakaran semak belukar
38	18 Mar 2016	Pkl. 13.35	Toapaya	Jl. Tg. Uban Lama Km. 20 Simpang Gesek	Kebakaran semak belukar
39	19 Mar 2016	Pkl. 13.30	Bintan Timur	Jl. Nusantara Km.18 Kel. Gunung Lengkuas	Kebakaran semak belukar dan kebun
40	19 Mar 2016	Pkl. 14.00	Bintan Utara	Jl. Taaman Sari Bumi	Kebakaran semak

NO.	TANGGAL / JAM		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN / DESA	JENIS BENCANA
				Moro Kel. Tg. Uban Utara	belukar
41	21 Mar 2016	Pkl. 11.30	Seri Kuala Lobam	Kp. Simpang Center Desa Kuala Simpang	Kebakaran semak belukar
42	24 Mar 2016	Pkl. 20.05	Gunung Kijang	Jl. Wisata Bahari depan Resort Kabana	Kebakaran semak belukar
43	24 Mar 2016	Pkl. 19.50	Teluk Sebong	Jl. Flamboyan Prum 10 Sebong Pereh	Kebakaran semak belukar
44	24 Mar 2016	Pkl. 20.30	Gunung Kijang	Jl. Wisata Bahari Simpang Pemakaman Umum	Kebakaran semak belukar
45	24 Mar 2016	Pkl. 23.00	Bintan Utara	Kp. Bukit Senyum Desa Lancang Kuning	Kebakaran semak belukar
46	25 Mar 2016	Pkl. 13.30	Bintan Utara	Jl. Taman Sari Bumi Moro Kel. Tg. Uban Timur	Kebakaran semak belukar
47	25 Mar 2016	Pkl. 14.00	Bintan Utara	Jl. Bukit Senyum Desa Lancang Kuning	Kebakaran semak belukar
48	25 Mar 2016	Pkl. 17.30	Teluk Sebong	Jl. Segiling Kp. Kerabat Desa Seri Bintan	Kebakaran semak belukar
49	26 Mar 2016	Pkl. 11.30	Bintan Utara	Jl. Eka Bhakti Kp. Baru Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran semak belukar
50	26 Mar 2016	Pkl. 14.20	Toapaya	Jl. Tg. Uban Lama Km. 38 Cikolek	Kebakaran semak belukar
51	28 Mar 2016	Pkl. 11.30	Gunung Kijang	Jl. Kalang Batang Kp. Banjar Rt.01 Rw.01 Desa Gunung Kijang	Kebakaran semak belukar
52	28 Mar 2016	Pkl. 13.20	Bintan Utara	Jl. Bedikari Kp. Suka Damai Kel. Tg. Uban Timur	Kebakaran semak belukar

NO.	TANGGAL / JAM		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN / DESA	JENIS BENCANA
53	28 Mar 2016	Pkl. 14.40	Bintan Utara	Komp. TNI AL Uban	Kebakaran semak belukar
54	29 Mar 2016	Pkl. 12.00	Teluk Sebong	Kampung Segiling Desa Seri Bintan	Kebakaran semak belukar
55	29 Mar 2016	Pkl. 16.50	Gunung Kijang	Jl. Galang Batang	Kebakaran semak belukar
56	29 Mar 2016	Pkl. 16.00	Bintan Utara	Perum Telaga Surya Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran semak belukar
57	30 Mar 2016	Pkl. 10.30	Seri Kuala Lobam	Jl. Raya Busung Kel. Teluk Lobam	Kebakaran semak belukar
58	30 Mar 2016	Pkl. 12.00	Bintan Utara	Pasar Baru Kel. Tg. Uban Selatan	Kebakaran semak belukar
59	30 Mar 2016	Pkl. 14.10	Toapaya	Jl. Gesek Km. 18 Metras	Kebakaran semak belukar
60	31 Mar 2016	Pkl. 12.00	Bintan Utara	Dusun Jago Desa Lancang Kuning	Kebakaran semak belukar
61	31 Mar 2016	Pkl. 13.30	Teluk Bintan	Desa Penaga	Kebakaran semak belukar dan 1 Unit Rumah
62	31 Mar 2016	Pkl. 13.20	Toapaya	Jl. Tirta Madu	Kebakaran semak belukar
63	31 Mar 2016	Pkl. 16.00	Seri Kuala Lobam	Jl. Raya Busung Kel. Teluk Lobam	Kebakaran semak belukar
64	31 Mar 2016	Pkl. 17.00	Bintan Utara	Jl. Berdikari Kel. Tg. Uban Timur	Kebakaran semak belukar
65	01 Apr 2016	Pkl. 14.55	Toapaya	Jl. Lintas Barat Km. 16 Belakang Greja	Kebakaran semak belukar
66	02 Apr 2016	Pkl. 12.00	Bintan Utara	Sei Jeram Desa Lancang Kuning	Kebakaran Hutan belukar
67	03 Apr 2016	Pkl. 14.10	Bintan Utara	Jl. Dusun Jago Desa Lancang Kuning	Kebakaran semak belukar

NO.	TANGGAL / JAM		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN / DESA	JENIS BENCANA
68	03 Apr 2016	Pkl. 06.00	Bintan Utara	Jl. Manggar Kp. Bugis Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran semak belukar
69	03 Apr 2016	Pkl. 19.00	Bintan Timur	Jl. Korindo Kp. Jawa Kel. Sungai Lekop	Kebakaran semak belukar
70	04 Apr 2016	Pkl. 14.55	Teluk Bintan	Jl. Tg. Uban Lama Km. 49 Bukit Arjuna	Kebakaran semak belukar
71	04 Apr 2016	Pkl. 17.20	Toapaya	Jl. Trta Madu	Kebakaran semak belukar
72	05 Apr 2016	Pkl. 20.00	Teluk Sebong	Km. 77 Desa Sebong Pereh	Kebakaran semak belukar
73	06 Apr 2016	Pkl. 13.30	Bintan Utara	Jl. Mekar Sari Gg. Kel. Tg, Uban Timur	Kebakaran semak belukar
74	08 Apr 2016	Pkl. 13.50	Bintan Timur	Km. 20 SPBU Sei Lekop	Kebakaran mobil Panter
75	07 Apr 2016	Pkl. 10.00	Teluk Binta	Jl. Lintas Barat Desa Bintan Buyu	Kebakaran rumah penduduk
76	07 Apr 2016	Pkl. 11.15	Gunung Kijang	Jl. Wisata Bahari Malang Rapat	Kebakaran semak belukar
77	08 Apr 2016	Pkl. 16.00	Teluk Sebong	Kp. Segiling Desa Sri Bintan	Kebakaran semak belukar
78	08 Apr 2016	Pkl. 18.00	Seri Kuala Lobam	Jl. Raya Busung Kebon Lima	Kebakaran semak belukar
79	08 Apr 2016	Pkl. 09.00	Bintan Utara	Jl. Eka Bhakti Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran semak belukar
80	10 Apr 2016	Pkl. 12.55	Toapaya	Kp. Simpang Km. 16 Desa Toapaya Selatan	Kebakaran semak belukar
81	13 Apr 2016	Pkl. 15.00	Teluk Sebong	Desa Sungai kecil	Kebakaran semak belukar
82	15 Apr 2016	Pkl. 15.30	Toapaya	Jl. Tg. Uban Lama Simpang Lome Km.	Kebakaran semak belukar

NO.	TANGGAL / JAM		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN / DESA	JENIS BENCANA
				44	
83	21 Apr 2016	Pkl. 11.00	Teluk Sebong	Jl. Tg. Pinang Tg. Uban KM. 53	Kebakaran semak belukar dan lahan gambut
84	21 Apr 2016	Pkl. 15.30	Toapaya	Jl. Tg. Uban Lama Simpang Lome Km. 44	Kebakaran semak belukar
85	22 Apr 2016	Pkl. 12.00	Teluk Sebong	Jl. Tg. Pinang Tg. Uban KM. 53	Kebakaran semak belukar
86	03 Mei 2016	Pkl. 18.50	Teluk Bintan	Jl. Tg. Pinang Tg. Uban KM. 42 belakang Dinas Kesehatan Kab. Bintan	Kebakaran semak belukar
87	08 Mei 2016	Pkl. 15.00	Bintan Utara	Jl. Mekar Sari Kel. Tg. Uban Timur	Kebakaran semak belukar
88	09 Mei 2016	Pkl. 14.00	Teluk Sebong	Dusun Teluk Asah Desa Berakit	Kebakaran semak belukar
89	10 Mei 2016	Pkl. 15.00	Teluk Sebong	Berakit	Kebakaran semak belukar
90	18 Mei 2016	Pkl. 16.30	Mantang	Desa Dendun RT.05 Rw. 02	Kebakaran 2 Unit Rumah
91	24 Mei 2016	Pkl. 19.00	Bintan Utara	Jl. Parenrengi Kel. Tg. Uban Selatan	Kebakaran semak belukar
92	11 Jun 2016	Pkl. 08.00	Bintan Utara	Jl. Permaisuri Tanjung Uban Kota	Warung Makan Tertimpa Pohon Akibat Angi Kencang
93	17 Jun 2016	Pkl. 12.00	Bintan Timur	Kel. Sei Enam Rt. 02 Rw. 04	Banjir
94	17 Jun 2016	Pkl. 12.00	Bintan Timur	Kp. Pisang RT.2 Rw.7	Banjir
95	03 Jul 2016	Pkl. 11.00	Bintan Utara	Jl. Indunsuri Kel. Tg. Uban Selatan	Kebakaran Semak Belukar

NO.	TANGGAL / JAM		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN / DESA	JENIS BENCANA
96	03 Jul 2016	Pkl. 14.25	Bintan Utara	Jl. Merdeka Kel. Tg. Uban Kota	Kebakaran Kamar dan GudangToko Bahagia
97	03 Jul 2016	Pkl. 16.30	Seri Kuala Lobam	Jl. Raya Burung	Kebakaran semak belukar
98	04 Jul 2016	Pkl. 13.30	Bintan Utara	Jl. Berdikari Kel. Tg. Uban Timur	Kebakaran semak belukar
99	04 Jul 2016	Pkl. 22.05	Bintan Utara	Jl. Nipah Kel. Tanjung Uban Kota	Kebakaran Tabung Gas 3 Kg
100	04 Jul 2016	Pkl. 22.05	Teluk Sebong	Perum View Garden Desa Sebong Pereh	Kebakaran Alat Berat
101	05 Jul 2016	Pkl. 15.30	Bintan Utara	Bukit Lababa Kp. Baru Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran semak belukar
102	05 Jul 2016	Pkl. 20.30	Bintan Utara	Jl. Manggar Kp. Bugis Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran semak belukar
103	12 Jul 2016	Pkl. 21.00	Teluk Sebong	Berakit	Kebakaran semak belukar
104	27 Jul 2016	Pkl. 14.35	Gunung Kijang	Jl. Pantai Trikora Km. 40 Desa Mengkurus	Kebakaran semak belukar
105	27 Jul 2016	Pkl. 11.00	Teluk Bintan	Bukit Batu Rt. 03 Rw. 05 Desa Bintan Buyu	Angin Kencang Mengakibatkan pohon tumbang menimpa rumah warga
106	10 Agt 2016	Pkl. 11.00	Bintan Utara	Jl. Pareng rengi Kel. Tg. Uban Selatan	Kebakaran semak belukar
107	11 Agt 2016	Pkl. 22.30	Bintan Utara	Jl. R.E Martadinata Kel. Tg. Uban Kota	Angin Putting Beliung dan Hujan lebat
108	16 Agt 2016	Pkl. 00.45	Bintan Timur	Pasar Berdikari Kijang Kel. Kijang Kota	Kebakaran Ruko
109	16 Agt 2016	Pkl. 11.45	Toapaya	Jl. Tg. Uban Lama Km. 38 Kangboi	Kebakaran semak belukar

NO.	TANGGAL / JAM		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN / DESA	JENIS BENCANA
110	17 Agt 2016	Pkl. 20.00	Bintan Timur	Jl. Wacopek Kel. Gunung Lengkuas	Kebakaran kebun dan semak belukar
111	18 Agt 2016	Pkl. 14.00	Teluk Bintan	Tembeling	Kebakaran semak belukar
112	20 Agt 2016	Pkl. 14.00	Bintan Utara	Jl. Sakera Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran semak belukar
113	25 Agt 2016	Pkl. 17.00	Bintan Timur	Kp. Kuala Lumpur RT.03 RW.06 Kel. Kijang Kota	Angin Kencang
114	29 Agt 2016	Pkl. 13.00	Bintan Utara	Jl. Permaisuri Tg. Uban	Kebakaran Kebun
115	04 Sept 2016	Pkl. 22.20	Seri Kuala Lobam	Jl. Raya Busung	Kebakaran semak belukar
116	10 Sept 2016	Pkl. 07.20	Bintan Utara	Jl. Permaisuri Tg. Uban	Kebakaran Tabung Gas 3 Kg
117	10 Sept 2016	Pkl. 11.30	Bintan Timur	Jl. Nusantara Km. 23 Kel. Sei Lekop	Kebakaran semak belukar
118	16 Sept 2016	Pkl. 21.30	Gunung Kijang	Teluk Bakau	Kebakaran semak belukar
119	29 Sept 2016	Pkl. 15.30	Bintan Timur	Jl. Nusantara Km. 23 Kel. Gunung Lengkuas	Kebakaran semak belukar
120	29 Sept 2016	Pkl. 18.30	Seri Kuala Lobam	Kp. Suka Damai Teluk Sasah	Kebakaran Kebun Warga
121	07 Okt 2016	Pkl. 20.00	Bintan Pesisir	Desa Kelong	Kebakaran Rumah Penduduk
122	15 Okt 2016	Pkl. 15.56	Toapaya	Jl. Gesek Km. 18 Gg. Tobong	Kebakaran semak belukar
123	16 Okt 2016	Pkl. 19.20	Bintan Utara	Desa Lancang Kuning	Angin Putting Beliung
124	16 Okt 2016	Pkl. 19.20	Bintan Utara	Kel. Tg. Uban Selatan	Angin Putting Beliung
125	18 Okt 2016	Pkl. 10.40	Teluk Bintan	Tembeling	Kebakaran semak

NO.	TANGGAL / JAM		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN / DESA	JENIS BENCANA
					belukar
126	19 Okt 2016	Pkl. 11.30	Bintan Utara	Jl. Permaisuri Kel. Tg. Uban Selatan	Banjir Akibat Hujan Deras
127	24 Okt 2016	Pkl. 15.00	Bintan Pesisir	Desa Air Kelubi RT. 1 RW. 1	Rumah Ambruk akibat angin kencang dan hujan lebat
128	25 Okt 2016	Pkl. 17.40	Toapaya	Jl. Tg. Uban Km. 16 Desa Toapaya Selatan	Pohon Tumbang akibat hujan lebat dan angin kencang menimpa rumah warga
129	29 Okt 2016	Pkl. 12.00	Teluk Bintan	Desa Tembeling	Pohon tumbang akibat angin kencang
130	04 Nov 2016	Pkl. 12.00	Bintan Utara	Perum Bumi Sijori Indah Blok A No. 13 Kel.Tg. Uban Selatan	Pohon Tumbang akibat tanah longsor
131	14 Nov 2016	Pkl. 15.55	Bintan Utara	Perum. Bintang lima Kel. Tg. Uban Selatan	Angin kencang mengakibatkan rumah warga tertimpa pohon akasia
132	14 Nov 2016	Pkl. 06.00	Bintan Utara	Perum. Alamanda Kel. Tg. Uban Selatan	Banjir akibat hujan lebat
133	17 Nov 2016	Pkl. 15.30	Bintan Utara	Jl. Mekar Sari Kel. Tg. Uban Timur	Kebakaran semak belukar
134	25 Nov 2016	Pkl. 14.00	Seri Kuala Lobam	Kawasan Industr Lobam Kel. Teluk Lobam	Kebakaran semak belukar
135	01 Des 2016	Pkl. 16.30	Toapaya	Jl. Tirta Madu	Kebakaran semak belukar
136	02 Des 2016	Pkl. 15.45	Toapaya	Jl. Gesek Km. 19	Kebakaran semak belukar
137	02 Des 2016	Pkl. 19.50	Toapaya	Jl. Tirta Madu	Kebakaran semak

NO.	TANGGAL / JAM		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN / DESA	JENIS BENCANA
					belukar
138	06 Des 2016	Pkl. 15.15	Teluk Bintan	Tembeling	Kebakaran semak belukar
139	08 Des 2016	Pkl. 13.55	Toapaya	Jl. Tirta Madu	Kebakaran semak belukar
140	12 Des 2016	Pkl. 11.40	Teluk Bintan	Ceruk Ijuk	Kebakaran semak belukar
141	14 Des 2016	Pkl. 14.00	Teluk Bintan	Selat Bintai RT. 1 RW. 2 Desa Pengujan	Angin kencang mengakibatkan rumah warga tertimpa pohon kelapa
142	21 Des 2016	Pkl. 13.30	Bintan Utara	Jl. Sekera depan SMU N 5 Bintan Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran semak belukar
143	22 Des 2016	Pkl. 06.00	Bintan Utara	Kp. Sekera Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran semak belukar

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017

2) Program Mitigasi Bencana

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan** melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.803.352.100,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.799.222.100,- atau 98.64%. *Outcome* program ini adalah meningkatnya kemampuan dalam penanganan bencana kebakaran.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

(1) **Pelatihan Penanggulangan Bencana Keselamatan di Laut/Pantai**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp.142.606.400,- Realisasi Anggaran Rp.142.490.100,- atau 99.92, % Output dari kegiatan ini adalah Telaksananya Penanganan dan Penanggulangan Bencana Keselamatan Di laut/Pantai oleh Tim Reaksi Cepat (TRC)

menargetkan tersedianya 20 orang Tim Reaksi Tepat (TRC), yaitu petugas yang terlatih dalam penanggulangan bencana keselamatan di laut/pantai. Hasil yang diharapkan dari Kegiatan ini adalah Terciptanya Kondisi Keamana dan Keselamatan Dilaut/Pantai yang Kondusif Bagi Pengunjung/ Masyarakat

(2) Forum Koordinasi Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp.79.145.700,- Realisasi Anggaran Rp.76.721.600,- atau 96.94 % ouput dari kegiatan ini adalah Tersedianya Personil yang tangguh terhadap penanggulangan Bencana.

(3) Pembangunan Bangunan Pelindung dan Peremajaan Pantai

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp.581.600.000,- Realisasi Anggaran Rp. 580.010.400,- atau 99,73 % Output dari Kegiatan ini adalah Telaksananya Pengamanan Abrosi pantai di wilayah Kecamatan Tersebut.

d. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bencana adalah sebagai berikut.

1) Permasalahan

Berdasarkan permasalahan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Bintan dimasa yang akan datang serta sumberdaya yang tersedia, maka beberapa isu strategis yang terkait dengan bidang kebencanaan dalam wilayah Kabupaten Bintan adalah

- a. Belum adanya perencanaan bersama yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana antar lembaga-lembaga terkait. Dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana belum dilaksanakan terintegrasi satu dengan yang lainnya, masing-masing lembaga menyusun sendiri-sendiri sehingga seringkali tumpang tindih dan tidak efektif dalam

penanganan bencana dan penggangguannya masih tersebar di SKPD.

- b. Belum memadainya peraturan kebencanaan sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana; Sebagai SKPD yang baru terbentuk pada tahun 2012, maka peraturan teknis dan operasional kebencanaan untuk implementasi di lapangan belum tersedia sehingga masih menggunakan peraturan umum yang belum tentu sesuai dengan kondisi di Kabupaten Bintan.
- c. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait dalam penanggulangan bencana di daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan yang berfungsi sebagai kordinator dalam penanganan penanggulangan bencana belum berperan secara optimal mengingat keterbatasan yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.

2) Solusi

- a. Perlu adanya perencanaan bersama yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana antar lembaga-lembaga terkait. Dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana hendaknya dilaksanakan secara terintegrasi satu dengan yang lain (tidak tumpang tindih) sehingga efektif dalam penanganan bencana dan penggangguannya;
- b. Perlu peraturan teknis dan operasional kebencanaan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanganan kebencanaan yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Bintan;
- c. Mengingat BPBD berfungsi sebagai koordinator, maka perlu optimalisasi koordinasi antar lembaga terkait dan peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana agar dapat berperan secara optimal. Penanganan bencana mesti ditujukan pada aspek manajemen bencana secara keseluruhan

6.5. Pengelolaan Kawasan Khusus

Kabupaten Bintan merupakan 1 dari 4 wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas di Indonesia bersama Batam, Karimun dan Sabang di Nangroe Aceh Darussalam, berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2007 dan peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2011. Adapun kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan ***Free Trade Zone Bintan*** adalah sebagai berikut :

1. Bintan Bagian Utara seluas 58,750 hektar diperuntukkan sebagai kegiatan pariwisata, industri, pertanian dan perdagangan.
2. Industri Maritim Bintan Timur, seluas 812 hektar diperuntukkan sebagai kegiatan industri maritim dan perdagangan.
3. Industri Galang Batang, seluas 1.775 hektar diperuntukkan sebagai kegiatan industri modern pendukung industry, perdagangan dan resort.
4. Pulau Anak Lobam, seluas 678 hektar

Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Dewan Kawasan PBPB Bintan nomor : 1 tahun 2008 tanggal 23 Agt 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Bintan/ Wilayah Kabupaten Bintan dan Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Badan Pengusahaan Kawasan) dibentuk sebagai manejer yang menjalankan seluruh fungsi manajemen dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Berdasarkan pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dinyatakan bahwa tugas Badan Pengusahaan Kawasan adalah melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dengan demikian ada 3 tugas dan wewenang badan perusahaan yaitu pengelolaan, pengembangan dan pembangunan.

a. Dasar Hukum

- 1) UU No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- 2) UU No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2007 menjadi Undang –Undang;
- 3) PP No. 46, 47 dan 48 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun;
- 4) Keputusan Presiden No. 9, 10 dan 11 Tahun 2007 tentang Dewan Kawasan KPBPB Batam, Bintan dan Karimun;
- 5) Keputusan Ketua Dewan Kawasan tentang Badan Pengusahaan KPBPB Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang;
- 6) Kep. Menhub No. 25 Tahun 2009 tentang Penetapan Pelabuhan Bebas pada KPBPB Batam, Bintan dan Karimun;
- 7) PP No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai KPBPB;
- 8) Selanjutnya dibentuk Badan Pengusahaan Kawasan Bintan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan dengan Nomor : Kpts / 04 / DK / VIII / 2008 tanggal 23 Agustus 2008;
- 9) Dokumen SK tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan bintan wilayah Kabupaten Bintan;
- 10) Keputusan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 Tanggal 20 Agustus 2007 Tentang KPBPB Bintan;
- 11) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 Tanggal 7 Mei 2008 Tentang Badan Pengusahaan KPBPB BintanKeputusan Ketua Dewan KPBPB Bintan Nomor :

KPTS/04/DK/AVII/2008 Tanggal 23 Agustus 2008 Tentang Penetapan Personel BP KPBPB Bintan;

- 12) Peraturan Ketua Dewan Kawasan PBPB Bintan Nomor : 01 Tahun 2008 Tanggal 23 Agustus 2008 tentang BP KPBPB Bintan;
- 13) Keputusan Ketua Dewan KPBPB Bintan Nomor : KPTS/02/DK/III/2009 Tanggal 30 maret 2009 Tentang Penetapan Personel BP KPBPB Bintan Wilayah Kabupaten Bintan dan Tanjungpinang;
- 14) Keputusan Ketua Dewan KPBPB BBK Nomor : KPTS.10/DK/II/2010 Tanggal 5 Februari 2010 Tentang Tata Kerja Dewan Kawasan;
- 15) Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kab.Bintan Nomor : KPTS 001/BPK-WB/II/2009 Tanggal 18 Februari 2009 Tentang Penunjukan Pejabat pada bidang-bidang BPKBPB Bintan Wilayah Kabupaten Bintan;
- 16) Keputusan Bupati Bintan Nomor : 126/I/2016 10 Januari 2016 Tentang Penunjukan Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai Personil pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016
- 17) Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kab.Bintan Nomor : KPTS 003/BPK-WB/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016 Tentang Penunjukan Personil dan Uraian Tugas pada BPK Bintan Wilayah Kabupaten Bintan;

b. Program dan Kegiatan

Adapun Kegiatan jangka pendek dan menengah yang telah dilaksanakan adalah

- 1) Inventarisasi seluruh wilayah yang termasuk dalam kawasan FTZ (Bintan Bagian Utara, Anak Lobam, Galang Batang dan Maritim Bintan Timur) sehingga diketahui luasan wilayah yang belum termanfaatkan. Untuk saat ini inventarisasi lahan, sudah

dilaksanakan pada dua kawasan yaitu Kawasan FTZ Galang Batang dan Kawasan FTZ Industri Maritim Bintan Timur

- 2) Melakukan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kawasan Industri Maritim Bintan Timur
- 3) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan PBPB Bintan
- 4) DED Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sei-Kolak Kijang
- 5) Menyusun Tata Ruang untuk Kawasan FTZ Galang Batang
- 6) Membuat titik-titik batas sementara kawasan yang termasuk dalam wilayah FTZ
- 7) Sosialisasi kepada dunia usaha / investor dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Baleho disetiap kawasan dengan ukuran yang memadai)
- 8) Melengkapi fasilitas-fasilitas pelabuhan yang belum memadai pada pelabuhan resmi (exit dan entry point) pada kawasan FTZ
- 9) Menyusun Tata Ruang untuk Kawasan FTZ Galang Batang.

Pada BP Bintan Wilayah Kabupaten Bintan telah memiliki aset berupa Jalan yakni di Jalan Korindo Kijang sepanjang 13,7 Km Kecamatan Bintan Timur dan Jalan Ekan Penaga sepanjang 2,825 Km di Kecamatan Teluk Bintan sehingga total keseluruhan adalah 16,52 Km.

c. Perkembangan Investasi

Adanya pengurangan data perusahaan pada PMA hingga Desember 2016 adalah adanya beberapa perusahaan yang melakukan relokasi dari kawasan Bintan, adanya verifikasi terkait perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bintan serta adanya pembatalan surat pendaftaran penanaman modal. Sedangkan pada PMDN hingga Desember 2016, adanya penambahan perusahaan sebanyak 30 PMDN. Sampai saat ini masih ada verifikasi perusahaan yang belum diakomodir oleh BP Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, data tersebut didapatkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI yang selama ini menangani sejumlah izin Perusahaan Modal Asing (PMA). Dengan hal tersebut maka

terjadi penambahan perusahaan yang cukup signifikan di kawasan FTZ Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.

Investasi yang masuk di kawasan FTZ Bintan wilayah Kabupaten Bintan dari Januari sampai dengan Desember 2016 adalah 117 PMA dengan realisasi investasi sebesar US\$ 789.476 dengan membutuhkan Tenaga Kerja Indonesia adalah 11.585 Orang. Sedangkan pada PMDN, Investasi yang masuk di kawasan FTZ Bintan wilayah Kabupaten Bintan dari Januari sampai dengan Desember 2016 adalah 47 PMDN dengan realisasi investasi sebesar Rp. 475.257.923.685 dengan membutuhkan Tenaga Kerja Indonesia adalah 9.221 Orang.

d. Perkembangan Pelaksanaan Kawasan FTZ BP Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan 2016

d.1 Infrastruktur

No	Fasilitas	Kebutuhan	Kapasitas Tersedia
1	Listrik		<ul style="list-style-type: none"> - PT. Capital Turbine Indonesia (2 x 15 MW) - Interkoneksi Batam – Bintan (150 KV) - PT. PLN Indonesia (64 MW (+33MW 2016)) - PT. BRC Lagoi (6,1 MV) - PT. BIIE Lobam (21 MW)
2	Air		<ul style="list-style-type: none"> - Lobam (7.500 m3/hari) - Lagoi (5.000m3/hari)
3	Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Menuju Kawasan Tanah Merah Kec. Teluk Bintan (2.500 m x 7 m) - Menuju PT. Bai Galang Batang (1.000 m x 	<ul style="list-style-type: none"> - Inner Ring Road (41 km) - Outer Ring Road (40 km) - Lintas Barat (51 km) - Lintas barat – timur (15 km) <p>BP Kawasan Bintan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ekanag Penaga (2,875 km)

		9m)	- Korindo (13,7 km) - Capital Turbin (3 km) - PT. Bai (1 km)
4	Pelabuhan Laut		2 buah (Sri Udana, Bandar Bintan Telani)
5	Pelabuhan Udara		-

Sumber: Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan 2017

d.2 Pelayanan Perizinan

No	Uraian	Periode Januari – Juni 2016	Periode Desember 2016
1.	Izin Usaha	6	12
2.	API - P	40	40
	API - U	15	15
3.	Persetujuan Pemasukan Barang	34	60
4.	Persetujuan Pengeluaran Barang	8	6
5.	Persetujuan Pemasukan Barang Melalui Hand Carry	13	27
6.	Persetujuan Pengeluaran Barang Melalui Hand Carry	20	20
7.	Persetujuan Pemasukan Barang Sementara	-	-
8.	Persetujuan Pengeluaran Barang Sementara	-	-
9.	Persetujuan Pemasukan Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru	1	1
10.	Rekomendasi Bongkar Barang Diluar Pelabuhan yang Ditunjuk	6	10
11.	Rekomendasi Muat Barang Diluar Pelabuhan yang Ditunjuk	8	10
12.	Persetujuan Pemasukan Barang Produk	21	20

	Tertentu		
13.	Persetujuan Re – Ekspor Barang	11	18
	Jumlah Perizinan yang telah diterbitkan	183	221

Sumber: Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan 2017

d.3 Perkembangan Jumlah Investasi

NO	URAIAN	NILAI INVESTASI					
		Tahun 2015		Januari – Juni 2016		Desember 2016	
		PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA (US\$)	PMDN
1	Rencana Investasi	921.260.000	565.867.654.031	1.756.491.542	1.231.449.956.566	642.847	Rp.702.946.000.000
2	Realisasi Investasi	810.538.000	211.980.000.000	916.749.699	1.457.589.688.831	789.476	Rp. 475.257.923.685

Sumber: Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan 2017

d.4 Perkembangan Investasi

Tahun	Jumlah Perusahaan PMA/PMDN	Tenaga Kerja				Jumlah Investasi	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
		TKI	TKA	TKI	TKA		
2015	158 (PMA)	10.911	61	7.702	146	921.260 US\$	810.538 US\$
	17 (PMDN)	429	-	1.095	-	Rp.565.867.654.031	Rp. 211.980.000.000
2016	117 PMA	4.142	-	11.585	371	642.847 US\$	789.476 US\$
	47 PMDN	2.742	3	9.221	6	Rp.702.946.000.000	Rp. 475.257.923.685

Sumber: Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan 2017

d.4 Jumlah Wisatawan Mancanegara

Uraian	Periode	
	Tahun 2015	Desember 2016
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	312.979	455.878

Sumber: Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan 2017

d.5 Data Pemasukan Kendaraan Bermotor

No	Importir	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Periode Desember 2016
	-	-	-

Sumber: Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan 2017

d.6 Data Penerbitan Angka Pengenal Importir

Jumlah Angka Pengenal Importir Yang Diterbitkan	
Tahun 2015	Desember 2016
55	API-P (31) API-U (7)

Sumber: Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan 2017

d.7 Data Pemasukan Minuman Beralkohol

No	Importir	Jumlah Pemasukan Berdasarkan Golongan					
		Tahun 2015 (Liter)			Desember 2016 (Liter)		
		A	B	C	A	B	C
1	PT. Tirta Anugrah Sukses	102.783,8	31.402,9	16.038,65	52.442	4.434	1.21,40
2	PT. Pantja Artha Niaga	0	31,25	59,5	3,4	22,5	1,5
	Total						

Sumber: Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan 2017

d.8 Kegiatan Badan Pengusahaan

NO	JENIS KEGIATAN	TEMPAT	TANGGAL
1.	Seminar Sektor Infrastruktur	Hotel Borobudur, Jakarta	24 Agustus 2016
2.	Promosi Investasi Business Summit Indonesia Fair 2016	Perth, Australia	10 s/d 14 November 2016
3.	JWG	Singapura	29 November 2016
4.	Pembangunan Jalan menuju Capital Turbin Indonesia	Galang Batang	Desember 2016
5.	Pembangunan Jalan Menuju PT. BAI	Galang Batang	Desember 2016
6.	Overlay / Peningkatan Jalan	Korindo - Kawal	November 2016

Sumber: Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan 2017

d.9 PT. Bintan Alumina Indonesia

- 1) Merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Asing (PMA) yang berlokasi di Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan
- 2) Perusahaan bergerak dibidang Pengolahan dan Pemurnian Bijih Bouksit. Luas Lahan : 500 Ha (berdasarkan Izin Prinsip).
- 3) Rencana Investasi Perusahaan di Kabupaten Bintan Sebesar Rp.7 Triliun Rupiah dengan Rencana Investasi awal sebesar 1 Triliun Rupiah (Izin Prinsip).
- 4) Rencana penggunaan tenaga kerja sebanyak 4.000 orang. Progres pembangunan Perusahaan perusahaan sedang dalam pengurusan kelengkapan perizinan dan land clearing
- 5) Pada tahun 2017, akan adanya pembahasan terkait Kawasan PT. BAI dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dimana akan lebih memudahkan stabilitas pelaksanaan dan pengembangan investasi di kawasan tersebut.

• Rencana Proyek

- 1) Pembangunan PLTU(3 X 25 MW) secara bertahap dengan total kapasitas 2700 MW;
- 2) Membangun fasilitas pemurnian/smelter Alumina yang secara bertahap ditingkatkan kapasitas produksinyasehingga mencapai total produksi sebesar 2,1 juta ton/tahun;
- 3) Membangun fasilitas produksi aluminium elektrolit (INGOT), yang secara bertahap ditingkatkan kapasitas produksinyasehingga mencapai total produksi sebesar 1 juta ton/tahun;
- 4) Pembangunanfasilitas produksi karbon anoda dengan kapasitas 530,000 ton karbon anoda;
- 5) pembangunan pelabuhan khusus (TUKS) dengan kapasitas 20 juta ton/tahun (50.000 dwt)
- 6) Pembangunanfasilitas gas dengan kapasitas 160,000 kubik;
- 7) Pembangunan zona perumahan dengan peruntukan 20 ribu orang

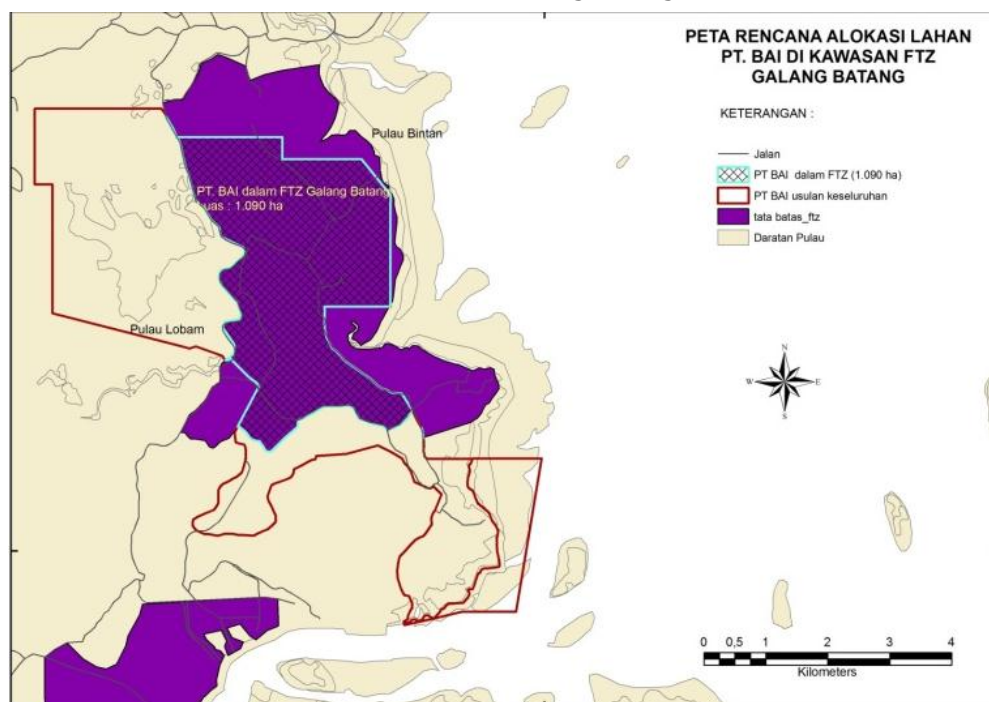
- **Bentukan Lahan Bangunan**

Luasan rencana kegiatan terpadu tahap I dan II meliputi site plan unit-unit kegiatan utama, yaitu :

Pabrik Pembuatan Alumunium yang terdiri dari :

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| a) Refinery Alumina | = 70,88 ha |
| b) Smelter Alumunium | = 181,27 ha |
| c) Tempat penimbunan red mud | = 163,05 ha |
| PLTU | = 219,28 ha |
| TUKS | = 175,87 ha |
| d) Reservoir (di luar tapak proyek) | = 166 ha |
| e) Kantor dan Perumahan | = 98,65 ha |

Gambar 6.1. Peta Rencana Alokasi Lahan PT. BAI di Kawasan FTZ Galang Batang



Sumber : Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan 2017

d.10 PT. SUN RESORT

- 1) Merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Asing (PMA) dengan Negara asal China
- 2) Lokasi Proyek di Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan
- 3) Perusahaan bergerak dibidang Wisata Agro dan Jasa Akomodasi (cottage)
- 4) Luas Lahan :
 - ✓ Wisata Agro : 4 Ha
 - ✓ Jasa Akomodasi (cottage/Hotel) : 2 Ha
- 5) Rencana Awal Investasi Perusahaan di Rp. 19,5 Miliar
- 6) Rencana penggunaan tenaga kerja sebanyak 85 orang.
- 7) Progres pembangunan Perusahaan perusahaan sedang dalam pengurusan kelengkapan perizinan dan *land clearing*

Disamping itu, BP Bintan wilayah KabupatenBintan telah memperoleh nota kesepahaman nomor 54.bp. bintan / vii / 2013 nomor : pr.02/3/10/pi-13 tanggal 23 juli 2013, hal tersebut dalam rangka melakukan kerjasama pengembangan pelabuhan sei kolak kijang dengan PT. Pelabuhan Indonesia I (persero)

Pihak PT. Pelindo I (Persero) telah mempelajari dan menganalisa data dimaksud dan PT. Pelindo I (Persero) telah mengeluarkan beberapa rekomendasi terhadap poin-poin yang layak untuk dikerjasamakan

- Perpanjangan Perkuatan Dermaga
- Pembangunan gedung untuk Container
- Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Pelabuhan
- Penambahan / Perluasan lapangan untuk Penumpukan Container
- Penyediaan alat bongkar muat untuk menaikkan dan menurunkan
- Penyediaan Head Truck (Kepala Truk)
- Penyediaan alat untuk menaikkan danmenurunkan Container

Permasalahan Khusus yang dihadapi oleh BP Kawasan adalah :

1. Kejelasan Status Kelembagaan agar Prosesnya agar segera dipercepat. Untuk diketahui BP Bintang dibentuk sejak Tahun 2007 dengan PP No. 47 Tahun 2007. Namun kelembagaannya belum ditetapkan.
2. Pengembangan Wilayah FTZ Bintang Kawasan industri PT. Bai, Kawasan Sun Resort

**Identifikasi Potensi Dan Permasalahan Strategis Dan Tindak Lanjut
Peran Bp Kawasan Bintang Wilayah Kabupaten Bintang**

Lingkungan Strategis Internal : Kelembagaan		
Potensi	Permasalahan	Tindak Lanjut
Pola Kelembagaan Yang Fleksibel	Belum adanya status kelembagaan BP Kawasan Bintang Wilayah Kabupaten Bintang.	Mendorong Ditetapkannya Status Kelembagaan BP Kawasan Bintang Wilayah Kabupaten Bintang.
Adaya Ruang Manajemen SDM Profesional	Belum Adanya Kebijakan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia BP Kawasan Bintang Wilayah Kabupaten Bintang.	Menetapkan Manajemen Sumber Daya Manusia BP Kawasan Bintang Wilayah Kabupaten Bintang.
Dibolehkannya Rekrutmen Pegawai Profesional Non PNS	Belum ada Rekrutmen Pegawai Profesional Non PNS Yang Memadai.	Melakukan Rekrutmen Pegawai Profesional Non PNS
Pola Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Yang Terstandarisasi.	Belum Adanya Standar Operasi Prosedur Sebagai Pedoman	Menyusun Standar Prosedur Operasi Pelaksanaan Pekerjaan

	Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Pelayanan.	dan Pemberian Pelayanan.
Lingkungan Strategis Eksternal : Kewenangan		
Kewenangan Yang Luas	Belum adanya dukungan anggaran.	Melakukan advokasi anggaran dan Pelimpahan Wewenang.
	Belum adanya Rincian Pelimpahan Wewenang	
Keleluasaan Melakukan Pengelolaan	Kapasitas SDM yang Belum Mendukung.	Peningkatan Kualitas SDM.
Kesadaran Perlunya Pola Pengusahaan Yang Mudah dan Efisien.	Komunikasi Dengan Berbagai Pihak Belum Dilakukan Secara Maksimal	Komunikasi Untuk Mendorong adanya Terciptanya Pelayanan Yang Terpadu dan Mudah.
Identifikasi Potensi Dan Permasalahan Strategis Dan Tindak Lanjut Peran Bp Kawasan Bintang Wilayah Kabupaten Bintang		
Lingkungan Strategis Internal : Infrastruktur		
Sudah Tersedia Beberapa Infrastruktur Pendukung	Belum Adanya Kerjasama dan Jaringan Antar Para Pihak.	Menjalin Kerjasama Dengan Para Pihak.
Meningkatnya Kebutuhan Pelayanan Kawasan FTZ.	Belum Adanya Strategi Menangkap Peluang Dengan Menyiapkan Infrastruktur.	Menyiapkan Insfrastruktur Sesuai Dengan Peluang.
Identifikasi Potensi Dan Permasalahan Strategis Dan Tindak Lanjut Peran Bp Kawasan Bintang Wilayah Kabupaten Bintang		
Lingkungan Strategis Eksternal : Perdagangan Bebas		
Volume Perdagangan Antar Negara Meningkat	Kesiapan sarana dan prasarana, kebijakan dan	Mempersiapkan sarana, prasarana, kebijakan

	manajemen belum memadai.	dan manajemen.
Kejenuhan Daya Tampung Pelabuhan di Sekitar Selat Malaka.	Daya Tarik dan Promosi kawasan belum Maksimal.	Melakukan promosi dan kerjasama dengan para pelaku bisnis internasional.

Sumber : Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan 2017

6.6. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Gangguan yang Terjadi

Kondisi keamanan dan ketenteraman serta ketertiban di Kabupaten Bintan selama tahun 2016 berjalan normal dan kondusif. Tidak ada terjadi gangguan yang bersifat anarkis, separatis, dan konflik berbasis SARA serta gangguan keamanan lainnya. Kondisi ini sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat berjalan secara dinamis.

b. SKPD yang menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menangani ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Bintan adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No.6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat serta penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. Jumlah Pegawai dan Kualifikasi

Berdasarkan Perda Kabupaten Bintan No.6 tahun 2012 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Bintan dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tabel 6.2 : Jumlah Pegawai pada SATPOL PP Kabupaten Bintan Tahun 2016

No.	Status Pegawai dan Golongan	Jumlah Pegawai
1	PNS Golongan IV/d	-
2	PNS Golongan IV/c	1
3	PNS Golongan IV/b	2
4	PNS Golongan IV/a	2
5	PNS Golongan III/d	9
6	PNS Golongan III/c	1
7	PNS Golongan III/b	0
8	PNS Golongan III/a	12
9	PNS Golongan II/d	2
10	PNS Golongan II/c	68
11	PNS Golongan II/b	42
12	PNS Golongan II/a	18
13	PNS Golongan I/d	1
14	PNS Golongan I/c	5
15	PNS Golongan I/b	1
16	PNS Golongan I/a	1
17	Pegawai Tidak Tetap/Honorar	14
Jumlah		179

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bintan 2017

Dari seluruh PNS tersebut terdapat 3 orang pejabat eselon yang telah menyelesaikan Diklat PPNS Pamong Praja.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2016 total pagu anggaran kegiatan teknis (belanja langsung) setelah perubahan Belanja Tidak Langsung dialokasikan

sebesar Rp.12.332.552.400,- dengan realisasi sebesar Rp.11.499.700.765 atau (93,25%), sedangkan Belanja Langsung alokasi anggaran sebesar Rp.2.699.114.050,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.643.036.200 (97,92%) Namun secara keseluruhan realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%.

e. Penanggulangan dan Kendalanya

Pada tahun 2016 terjadi beberapa kali peristiwa gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban. Namun peristiwa tersebut belum bersifat SARA, anarkis, dan separatis. Gangguan dimaksud lebih dominan yang bersifat demonstrasi/ unjuk rasa atau penyampaian aspirasi. Dalam penanggulangannya Satpol PP bertindak melakukan pengamanan dan berperan mendukung tugas Polri. Dalam pengamanan tersebut Satpol PP mengedepankan pendekatan persuasif sehingga demonstrasi/unjuk rasa berjalan damai dan tidak ada kendala dalam penanggulangannya.

f. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.590.542.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.586.961.700 atau 99,33%. *Outcome* program ini adalah meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

a. Pelaksanaan Program

(1) **Pengawasan dan Operasi Kantrantibum**, Pengawasan dan Operasi Kantrantibum dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.440.460.000,- dengan realisasi sebesar Rp.440.323.200,- (99,97%). *Output* dari kegiatan ini adalah

terlaksananya pengawasan dan operasional kantrantibum. Patroli menggunakan kendaraan dinas roda empat maupun kendaraan dinas roda dua dalam rangka mengawasi dan memantau kondisi ketertiban masyarakat umum dilakukan oleh kelompok patroli yang meliputi seluruh kawasan Kabupaten Bintan dengan sasaran pada kawasan perkotaan (pasar dan pertokoan), fasilitas umum (taman kota, akau, pelabuhan, tempat keramaian lainnya), maupun sekitar jalan raya/umum serta tempat tertentu yang dirasa perlu dan berpotensi adanya gangguan. Operasi ini dengan melibatkan anggota Satpol PP yang berada di kantor/markas besar dan anggota di kecamatan, dengan prioritas pada tempat tujuan kegiatan masyarakat yang berpotensi terciptanya gangguan ketertiban umum.

- (2) **Penertiban dan Pengamanan Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten Bintan**, Penertiban dan Pengamanan Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten Bintan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp.23.635.000,- (89,53%). *Output* dari kegiatan ini adalah terciptanya ketertiban dan keamanan acara **STQ (Seleksi Tilawatil Qur'an)** Tingkat Kabupaten Bintan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kondisi ketertiban acara agar pelaksanaan kegiatan STQ berjalan dengan lancar dan sukses. Penertiban dan pengamanan dimulai sejak tahap persiapan, pada saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, termasuk pula saat pawai taaruf oleh seluruh kontingen kecamatan. Pelaksanaan STQ pada tanggal 2 s/d 5 Mei 2016 bertempat di Kecamatan Bintan Timur (di lapangan relief Antam, Kijang). Pengamanan dilaksanakan dengan melibatkan anggota Satpol PP dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian sejak H-2 sampai dengan H+1 terutama pada kondisi yang berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan STQ.

(3) **Pengamanan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Acara**

Penting, Pengamanan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Acara Penting dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.101.150.000,- dan realisasi sebesar Rp.101.048.500,- (99,90%). *Output* dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan Pemerintah Daerah dengan aman dan terkendali. Pengamanan acara/kegiatan dengan melibatkan anggota Satpol pada saat adanya kunjungan pejabat negara/daerah serta pada saat penyelenggaraan acara penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sasaran dari pengamanan terhadap pejabat negara maupun pejabat daerah pada adalah pejabat pusat dan pejabat daerah serta pejabat luar negeri yang melakukan kunjungan ke wilayah Kabupaten Bintan (sebagai tempat tujuan), antara lain : Menteri Sosial, anggota DPR RI, pejabat Kementerian Kehutanan, Dubes negara asing. Pejabat daerah antara Gubernur dan Wagub Prov. Kepulauan Riau, Bupati Bintan, Wakil Bupati Bintan, pejabat Kemenag, pejabat Kanwil Hukum dan HAM, dan Anggota DPRD Kab. Bintan dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja ke lapangan. Sedangkan acara penting yang menjadi sasaran kegiatan pengamanan ini antara lain mencakup Tour de Bintan, Pesta Rakyat Bintan, Rapat paripurna DPRD, Pawai Adipura, Pelantikan Kades, Peringatan hari sumpah pemuda, takbir keliling, dan lainnya.

(4) **Pengamanan Kontingen pada STQ Tingkat Provinsi;**

Pengamanan Kontingen pada STQ Tingkat Provinsi dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.532.000,- dan realisasi sebesar Rp.21.955.000,- (97,44%). *Output* dari kegiatan ini adalah terciptanya ketertiban dan keamanan acara STQ. Hal ini dimaksudkan terlaksananya pengamanan terhadap kontingen/ rombongan Kabupaten Bintan dalam rangka mengikuti STQ Tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang ke VII Tahun 2016 yang diselenggarakan di Tanjungpinang (lokasi gedung daerah) pada

tanggal 20 s/d 28 Mei 2016. Pengamanan dilaksanakan dengan melibatkan anggota Satpol PP dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian sejak persiapan keberangkatan dari Kabupaten Bintan, pada saat perjalanan, pada pelaksanaan STQ, hingga kepulangan rombongan kembali ke Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Kurangnya pengawasan Perda oleh SKPD Teknis
- b. Kurangnya penguasaan/pemahaman Perda oleh petugas Pol PP.
- c. Uniform personil kurang lengkap dan terkesan kurang seragam.
- d. Ketepatan waktu yang kurang akurat saat apel dan pengamanan.
- e. Titik kumpul personil yang tidak terfokus karena domisili personil yang terpencar.

2) Solusi

- a. Perlunya instruksi dari Kepala Daerah kepada SKPD teknis untuk memperketat pengawasan dan koordinasi dengan Satpol PP.
- b. Perlunya bimtek hukum dan sosialisasi Perda oleh SKPD teknis.
- c. Pengadaan uniform baru (PDH dan PDL)
- d. Peningkatan disiplin personil
- e. Pembangunan kompi khusus Satpol yang berintegrasi di dalamnya perkantoran, rumah dinas, barak, fasilitas latihan, gudang peralatan, dan sebagainya.

2) Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas POL PP

Program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.559.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.530.031.700,- atau 94,77%. Capaian program ini adalah meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan pengembangan kapasitas Polisi Pamong Praja.

a. Pelaksanaan Program

- (1) **Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.** Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 306.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 277.020.100,- atau 90,53%. Output kegiatan ini adalah terlaksana-nya pengawasan pelaksanaan Perda. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap aktivitas masyarakat perorangan maupun badan usaha terkait dengan ketaatan mereka dalam memenuhi ketentuan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, antara lain legislasi perizinan, lokasi usaha, maupun dampak usaha terhadap masyarakat lain. Pengawasan dilakukan dengan cara patroli menggunakan kendaraan dinas dengan sasaran pada tempat usaha dan tempat umum, dengan membentuk kelompok kerja yang melibatkan anggota Satpol PP dan aparat/petugas instansi terkait seperti petugas kecamatan, dan petugas pada dinas/instansi teknis.
- (2) **Pembinaan Jasmani dan Profesionalisme Aparatur,** Pembinaan Jasmani dan Profesionalisme Aparatur dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 142.800.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 142.585.000,- atau 99,85%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan jasmani aparatur Satpol PP Kabupaten Bintan. Pembinaan bertujuan untuk melatih fisik/jasmani para anggota Satpol PP agar mampu menghadapi gangguan pada berbagai situasi, baik secara perorangan maupun berkelompok sehingga lebih profesional dan sesuai dengan protap yang ditentukan dalam menangani dan berhadapan

dengan kelompok masyarakat dalam rangka menjalankan tugas-tugas di lapangan. Bentuk latihan antara lain mencakup baris berbaris, pencak silat, dan penanganan demo, dengan lokasi di wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan.

- (3) **Pelatihan KORSIK**, Pelatihan Korsik dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.110.426.600,- atau 99,93%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan Korsik yang terdiri dari 1 grup sebanyak 20 orang. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan para anggota Satpol PP yang terlibat pada Korsik sehingga lebih terlatih sebagai pengiring musik pada upacara resmi yang diadakan oleh pemerintah daerah. Keikutsertaan Korsik pada upacara resmi Tahun 2016 antara lain pada upacara peringatan hari Kemerdekaan RI.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Masih terdapat produk hukum yang tidak memiliki sanksi dan bertentangan dengan produk hukum yang lain.
- b. Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam penegakan Perda dan Perbup.
- c. Kurangnya PPNS Satpol PP.

2) Solusi

- a. Dalam penyusunan Perda selayaknya lebih memperhatikan produk hukum yang telah ada dan dapat melibatkan Satpol PP dalam setiap pembahasan.
- b. Membentuk tim pengawasan gabungan dengan SKPD terkait dan melakukan rapat evaluasi secara rutin.
- c. Penambahan jumlah PPNS melalui Diklat PPNS.

3) Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.186.050.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.183.626.301,- atau 98,68%. *Outcome* program ini adalah meningkatnya potensi ketahanan dan perlindungan masyarakat.

a. Pelaksanaan Program

Pengendalian Keamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.186.050.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.183.626.301,- atau 98,68%. Output kegiatan ini adalah keamanan lingkungan yang terkendali. Pelaksanaan pembinaan dilakukan terhadap petugas poskamling di tingkat kelurahan/desa agar dapat bertindak secara tepat dan benar dalam melakukan tugas pengamanan lingkungan, serta memberikan bantuan pada 65 unit poskamling berupa peralatan kelengkapan jaga seperti pentungan, senter cas, jas hujan, plang nama pos, cat, dan papan jadwal.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Masih ada wilayah yang belum memiliki poskamling
- b. Ketersediaan lahan yang terbatas dalam pembangunan poskamling

2) Solusi

- a. Bantuan pembangunan poskamling oleh Pemda dan atau swadaya masyarakat.

6.7. Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya yang dilaksanakan oleh daerah

▪ E-Procurement

Untuk menanggulangi resiko tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, Pemerintah Republik Indonesia membangun sistem pengadaan dengan metode pengadaan secara elektronik atau *e-procurement*. Inisiasi dari *e-Procurement* dimulai dengan implementasi *e-government procurement* (EGP) di Indonesia melalui regulasi Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 (Keppres 80/2003) yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara eksplisit Keppres 80/2003 mengizinkan proses pengadaan melalui *e-procurement*. Beberapa instansi mulai mengembangkan sistem EGP masing-masing. Sistem Pengadaan *e-Procurement* Nasional yang diberi nama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sendiri dimulai pada tahun 2006-2008. Sistem ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa - Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Melalui LPSE di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah. Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah *e-tendering* yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*). Perkembangan LPSE di daerah (provinsi/kabupaten/kota) jauh lebih cepat dibandingkan pemerintah pusat karena melakukan pendirian dengan inisiatif sendiri.

Pelaksanaan LPSE di Kabupaten Bintan telah diberlakukan sejak Tahun 2011. Dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 (Inpres 17/2011) pada 19 Desember 2011 yang ditujukan kepada Pimpinan Kementerian /Lembaga /Daerah/ dan Institusi lainnya telah mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagai bagian dari Strategi Pencegahan KKN. Salah satu rencana aksi sebagai bagian Strategi Pencegahan tersebut adalah **"Pelaksanaan transparansi proses Pengadaan Publik Pemerintah."** Sasaran Inpres 17/2011 adalah APBD tahun 2012 berupa porsi 40% belanja Pemda (Prov./ Kab/ Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/ jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau terdekat.

Sampai dengan tahun 2016 dengan penerapan e-procurement Kabupaten Bintan telah melakukan penghematan APBD yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Pada tahun 2014 tercatat penghematan mencapai 9,47 milyar lebih. Dan pada tahun 2015 penghematan dapat dilakukan sebesar 6,45 milyar lebih sedangkan pada tahun 2016 penghematan meningkat menjadi 11,48 milyar lebih. Hal ini tentunya merupakan prestasi kinerja pemerintahan yang tentunya melibatkan peran serta *stake holder* dalam mewujudkan *clean governance*.

Tabel 6.3 Data Efisiensi Pelelangan/Seleksi Melalui Lpse Kabupaten Bintan

No	Tahun Anggaran	Total Paket	Pagu Anggaran	HPS	Selisih Hps Terhadap Pagu Anggaran	Harga Penawaran Terkoreksi	Selisih Terhadap Pagu Anggaran	Selisih Terhadap HPS
1	2014	219	199.379.478.255	199.081.262.163	298.216.092	189.902.841.008	9.476.637.247	9.178.421.155
2	2015	165	173.242.056.231	172.096.085.544	1.145.970.687	166.790.599.997	6.451.456.234	5.305.485.547
3	2016	194	213.775.877.500	209.648.697.703	4.127.179.797	202.290.315.920	11.485.561.580	7.358.381.783
JUMLAH		578	586.397.411.986	580.826.045.410	5.571.366.576	558.983.756.925	27.413.655.061	21.842.288.485

Sumber : Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan 2017

The background of the page features a series of overlapping, wavy, translucent blue and white bands that create a sense of depth and movement, flowing from the bottom left towards the top right.

BAB VII

P E N U T U P

BAB VII

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun 2016 bermakna penting dan strategis bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bintan yang berkelanjutan, dan menjadi media komunikasi pertanggungjawaban kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Bintan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bintan pada Tahun 2016 telah mewujudkan sinergitas dan harmonisasi antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, peran dan partisipasi komunitas masyarakat dan pelaku usaha serta para akademisi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Berbagai capaian kinerja telah diraih dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bintan pada Tahun 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan beberapa indikator kinerja pembangunan daerah, sebagai berikut : **(1) Indikator Kesejahteraan Masyarakat, (2) Indikator Pelayanan Umum, dan (3) Indikator Daya Saing Daerah, serta (4) Posisi Kinerja Kabupaten Bintan dalam Konstelasi Nasional.**

(1) Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bintan rata-rata tahun 2010 - 2015 adalah sebesar 1.56% per tahun, sedangkan pada tahun 2016 LPP Kabupaten Bintan diestimasi sebesar 1,02% menurun bila dibanding tahun 2015 yaitu 1,26% yang diperkirakan berbanding lurus dengan meningkatnya capaian kegiatan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bintan. Angka ini menunjukkan program pengendalian pertumbuhan penduduk berjalan cukup efektif. Dilain pihak dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan, kondisi penduduk Kabupaten Bintan menjadi potensi dan tantangan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah mencapai

keberhasilan dalam pembangunan. Selain itu, capaian keberhasilan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bintan diwujudkan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan pada tahun 2016 IPM Kabupaten Bintan diestimasi 72,34 poin meningkat dari tahun 2015 yaitu 71,92 poin. Keberhasilan dalam peningkatan IPM Kabupaten Bintan ditopang oleh keberhasilan dalam pencapaian Dari hasil evaluasi kinerja Wajib Belajar Dikdas 9 tahun serta berdasarkan estimasi BP3D Kabupaten Bintan diketahui bahwa tahun 2015 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD yaitu 98,98% meningkat menjadi 99,28% pada tahun 2016. Artinya pada tahun 2016 ada sebanyak 99,28% penduduk yang berusia 7-12 tahun telah tertampung di SD. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan SD pada tahun 2015 yaitu 107,52 menjadi 107,15% pada tahun 2016. Hal ini membuktikan bahwa jumlah murid SD yang dapat ditampung pada sekolah-sekolah SD yang ada sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, namun demikian masih banyak murid SD yang berumur kurang atau melebihi usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan SD. Untuk APK jenjang SMP/MTs tahun 2015 adalah 95,70% sedangkan pada tahun 2016 yaitu 98,24%. Untuk APM SMP/MTs pada tahun 2015 yaitu 87,96% sedangkan 2015 yaitu 94,42%.

Jika dilihat berdasarkan komponennya, peningkatan capaian angka IPM Kabupaten Bintan semakin baik. Menurut data hasil olahan BP3D Kabupaten Bintan pada tahun 2015 harapan lama sekolah 11,97 tahun diestimasi meningkat menjadi 12,16 tahun pada tahun 2016. Sedangkan rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia diatas 25 tahun di Kabupaten Bintan pada tahun 2015 yaitu 8,36 tahun dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 8,42 hal ini menunjukkan penurunan angka *drop out* dari tahun ke tahun sehingga mampu menunjang pencapaian rata-rata lama sekolah yang terus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator pembangunan pembangunan yang menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan pada Tahun 2016, antara lain:

pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 5,30%; pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar Rp.12,48 triliun; Pengendalian jumlah penduduk miskin dimana prosentase penduduk miskin 5,90%; dan pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 6,98%. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Bintan mengacu pada IHK Kota Tanjungpinang dimana secara umum pada tahun 2016 IHK Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu dari 2,46% meningkat menjadi 3,06%. Dari tujuh komponen pembentuk inflasi tiga diantaranya mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu komponen bahan makanan, makanan jadi dan sandang. Komponen sandang mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu -2,47%. inflasi yang terjadi pada tahun 2016 tergolong terkendali, hal ini merupakan salah satu bukti nyata kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam usaha pengendalian harga pasar dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

(2) Indikator Pelayanan Umum

Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tata pemerintahan daerah melalui pengembangan sistem manajemen pemerintahan yang peduli terhadap kualitas pelayanan masyarakat dan menerapkan prinsip-prinsip penatausahaan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (**good governance**).

Pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam penyelenggaraan pembangunan tata pemerintahan daerah pada Tahun 2016, berdasarkan spirit di atas ditunjukkan dalam pencapaian Indikator Pelayanan Umum yang dibangun oleh 3 (tiga) komponen dasar, yaitu : **partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi.**

Pertama, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Bintan berupaya untuk melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan Kabupaten Bintan yang ditandai dengan adanya dukungan dan keterlibatan yang nyata dari unsur-unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha dan

komunitas masyarakat di Kabupaten Bintan. Dukungan dan keterlibatan unsur-unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bintan dari ruang lingkup pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan Kabupaten Bintan. Dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan partisipasi masyarakat telah diwadahi melalui penyelenggaraan **Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah)** secara berjenjang dalam wujud musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkatan desa/kelurahan, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Kegiatan tersebut telah memberikan tempat bagi komunitas atau kelompok masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan kebutuhan dalam rencana pembangunan di tingkat desa/kelurahan.

Gambaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bintan melalui perwujudan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Kabupaten Bintan pada Tahun 2016 tercermin melalui tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Bintan dalam penyelenggaraan MUSRENBANG di Kabupaten Bintan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan dinilai cukup berhasil dengan tingkat partisipasi masyarakat yang mencapai 100%. Demikian pula dengan jumlah kehadiran masyarakat desa dalam setiap musyawarah desa dari undangan yang disebar. Jumlah inisiatif penyampaian usulan program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat cukup banyak dan variatif (tidak terfokus pada pembangunan fisik saja) serta Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan.

Kedua, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Bintan berupaya untuk menyelenggarakan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan yang taat dan patuh terhadap semua ketentuan peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Selanjutnya, dengan didukung oleh sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi komputer dan SDM pengelola keuangan daerah yang profesional, maka semakin mewujudkan akuntabilitas pemerintahan di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terutama dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan kondisi yang tersebut, maka pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bintan telah mendapatkan opini **"Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"** dari BPK RI selama yang kelima kalinya berturut-turut. Aspek penilaian tersebut meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kemampuan penyusunan laporan keuangan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Ketiga, dalam rangka meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Bintan berupaya untuk mengimplementasikan **Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), SIMONEV** pada Pemerintah Kabupaten Bintan berbasis komputer dengan melibatkan seluruh SKPD di seluruh Kabupaten Bintan. Implementasi SIPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan tersebut juga dalam rangka memenuhi ketentuan tentang Penyelenggaraan Informasi Pembangunan Daerah kepada masyarakat dan stakeholders pembangunan di Kabupaten Bintan, berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bintan dengan upaya yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mendapatkan respon yang positif dari stakeholders pembangunan Kabupaten Bintan yang terkait.

(3) Aspek Pelayanan Dasar

Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur. Pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penyelenggaraan

pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada Tahun 2016, ditunjukkan dalam pencapaian beberapa keberhasilan, sebagai berikut.

Pertama, melalui bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di seluruh Kabupaten Bintan melalui pemenuhan alokasi pendanaan pendidikan lebih dari 20% dari total APBD Pemerintah Kabupaten Bintan sesuai dengan ketentuan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang digunakan berbagai peruntukan penting dan mendasar, yaitu : (1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi sekolah TK dan SD SMP/MTs negeri maupun swasta. (2) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Sedangkan untuk BOSDA untuk tahun 2016 tidak diberikan dikarenakan adanya efisiensi anggaran pemerintah Kabupaten Bintan.

Capaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan dicerminkan dari pencapaian dari hasil evaluasi kinerja Wajib Belajar Dikdas 9 tahun serta berdasarkan estimasi BP3D Kabupaten Bintan sebagaimana yang dijelaskan pada BAB I serta BAB IV Urusan Pendidikan.

Kedua, melalui bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di seluruh Kabupaten Bintan yaitu melalui Peningkatan kualitas kesehatan khususnya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB) telah dilakukan melalui (1) Pengkajian seluruh kasus kematian maternal oleh Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) dengan dokter Spesialis Obstetri Gyneocology; (2) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K); (3) Meningkatkan kompetensi bidan dalam memberikan Asuhan Kebidanan melalui pendidikan dan pelatihan serta seminar; (4) Pemberian Makanan Tambahan ibu hamil berupa biskuit dan susu ibu hamil; (5) Revitalisasi Posyandu dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan Posyandu.

Dalam perspektif peningkatan derajat kesehatan ibu dan bayi secara bertahap terus menjadi prioritas. Begitu pula dengan penanganan status gizi pada balita dari waktu ke waktu terus dilaksanakan dengan tidak mengabaikan program-program lain yang bersentuhan langsung dengan perbaikan derajat kesehatan.

Pada tahun 2016 cakupan pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat tidak mampu Kabupaten Bintan sebesar 4.782 kunjungan dan jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 4.420 Jiwa.

Disamping itu keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mensukseskan Program Keluarga Berencana ditunjukkan dengan cakupan peserta KB aktif yang mencapai 82%, angka ini telah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 65%.

Capaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan dicerminkan dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari sebesar 69,99 tahun pada tahun 2015 menjadi 70,01 tahun pada tahun 2016. Meskipun terjadi peningkatan indeks kesehatan, namun tampaknya masih diperlukan upaya yang bersifat komprehensif dan lintas sektoral agar perbaikan derajat kesehatan yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya angka harapan hidup dan terus menurunnya angka kematian ibu dan bayi secara baik dapat terwujud dimasa mendatang.

Ketiga, melalui pembangunan infrastruktur yang merupakan kegiatan Bidang Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan. Upaya tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan di bidang infrastruktur jalan, pada tahun 2016 telah dilaksanakan peningkatan kualitas jalan, rehabilitasi jalan, pembangunan dan rehabilitasi jembatan serta pemeliharaan jalan. Melalui kegiatan tersebut telah terealisasi jalan sepanjang 33,34 KM. Sampai dengan tahun 2016 telah dicapai tingkat

kemantapan jalan sebesar 82,17 persen dari total panjang jalan yang dapat dilalui sepanjang 833,57 Km.

Infrastruktur air bersih juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bintan yaitu melalui pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah pesisir Bintan. Pada tahun 2016, 15 unit SPAM IKK di Kabupaten Bintan telah ditingkatkan, dioptimalisasi dan dikembangkan dengan total 801 sambungan rumah, sehingga meningkatkan jumlah sambungan rumah terpasang dari 5.712 sambungan rumah pada tahun 2015 menjadi 6.513 sambungan rumah pada tahun 2016.

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup sehat Pemerintah telah membangun Infrastruktur Sanitasi Berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga pada tahun 2016 sebanyak 115.742 orang masyarakat Kabupaten Bintan atau 80,3% telah memiliki akses sanitasi layak.

Sementara itu untuk **Urusan Penataan Ruang** diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai kawasan perdagangan bebas industri, pariwisata, kelautan dan perikanan melalui optimasi pemanfaatan ruang yang terintegrasi serta memperhatikan daya dukung lingkungan. Maka diperlukan upaya penyelarasan kebijakan **Penataan Ruang** baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan penataan ruang kepala daerah dibantu oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Sebagai tindak lanjut pada tahun 2016 Pemerintah Daerah telah melakukan Peninjauan Kembali Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan, hal ini berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa pada pasal 16 ayat satu bahwa rencana tata ruang dapat ditinjau kembali. Pada tahun 2016 **tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang** di Kabupaten Bintan mencapai 87,62 persen.

(4) Aspek Daya Saing Daerah

Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan daya saing daerah dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keunggulan Kabupaten Bintan, melalui berbagai langkah antara lain: (1) Meningkatkan infrastruktur jalan (2) Meningkatkan Jaringan Transportasi antar Pulau (3) Optimalisasi Pemanfaatan Ruang (4) Memangkas birokrasi perizinan (5) Menarik investor serta melakukan promosi di tingkat nasional maupun internasional (2) Menyelenggarakan even-even olahraga bertaraf internasional (3) mendorong penciptaan tenaga kerja terampil, menciptakan lingkungan yang kondusif dan menyediakan pasar kerja bekerjasama dengan PMDN maupun PMA (4) menarik aktivitas inovasi dan ilmu pengetahuan melalui kompetisi dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Capaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam peningkatan daya saing daerah ditunjukkan dengan Meningkatnya Persentase tingkat kemandirian jalan (Mantap Sempurna) mencapai 1.442 Km; Jumlah Pulau yang tercakupi jaringan Transportasi sebanyak 8 Pulau; Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang mencapai 87,62%; Lama proses perijinan yang berdurasi 3-14 hari serta Jumlah jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata mencapai 37 Perusahaan. Sedangkan realisasi investasi di Kabupaten Bintan pada Tahun 2016 dengan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US\$962.049; nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp.475,25 milyar rupiah; Capaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam peningkatan daya saing daerah ditopang oleh kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi guna tersampainya informasi potensi investasi Kabupaten Bintan calon investor di dalam maupun luar negeri, opinion makers dan stakeholders lainnya untuk meningkatkan minat investasi di Kabupaten Bintan.

Di samping itu, dalam rangka peningkatan daya saing daerah telah pula diwujudkan berbagai Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan, di antaranya:

Inovasi di bidang Pelayanan Publik meliputi :

- a. Pengembangan Sistem e-Musrenbang Kabupaten Bintan (e-planning) dan pengembangan lanjutan simonev dalam rangka monitoring, evaluasi, dan perencanaan tahunan pembangunan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. Penerapan e-Procurement atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional. Pada Tahun 2016 LPSE Kabupaten Bintan telah melaksanakan 194 pelelangan paket pekerjaan dengan penghematan mencapai 11,48 milyar lebih.

(5) Posisi Kabupaten Bintan Dalam Konstelasi Nasional

Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menempatkan posisi Kabupaten Bintan dalam konstelasi nasional secara signifikan, strategis dan penting untuk mencerminkan tentang kemajuan dan keunggulan Kabupaten Bintan terhadap Kabupaten/Kota lain di Indonesia. Penempatan posisi Kabupaten Bintan dalam konstelasi nasional secara signifikan, strategis dan penting dipetakan berdasarkan capaian kinerja pembangunan dan raihan berbagai prestasi atau penghargaan pada tingkatan nasional.

1) Kinerja pembangunan

Kinerja pembangunan Kabupaten Bintan dapat digambarkan pula dalam konstelasi Nasional adalah sebagai berikut Sektor pariwisata Bintan telah menyumbang sebesar Rp103 miliar, atau 58 persen dari PAD tahun 2016 yang besarnya Rp178 miliar dengan jumlah kunjungan turis asing 300 ribu per tahun, dengan begitu diharapkan pariwisata Bintan dapat menjadi percontohan secara Nasional.

2) Penghargaan Tingkat Nasional

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Bintan selama Tahun 2016 ditunjukkan dengan diperolehnya prestasi dan penghargaan Tingkat Nasional yaitu terhitung sejak 17 Februari 2016 atau lebih kurang 10 bulan sejak **Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos** dan **Wakil Bupati Bintan Drs.H.Dalmasri Syam,MM** dilantik Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan berhasil mengukir Anugerah Prestisius Tingkat Nasional di berbagai bidang kategori dan 1 Anugerah Tingkat Nasional oleh PKK Kabupaten Bintan, selanjutnya anugerah di Tingkat Provinsi Kepri dalam berbagai kegiatan serta 2 Anugerah yang diukir oleh **Dekranasda** dan PKK Kabupaten Bintan. Penghargaan lain yang diterima antara lain :

- 1) Tanggal 26 April 2016, bertempat di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos menerima **Awards 10 Besar Kinerja Terbaik se Indonesia atas Penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**
- 2) Tanggal 30 Mei 2016, bertempat di Kantor BKPM RI Jakarta Pusat, Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos menerima **Anugerah Investment Awards 10 Besar Terbaik Bidang Investasi se Indonesia.**
- 3) Tanggal 22 Juli 2016, bertempat di Istana Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak , Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos menerima **Piala Adipura Buana dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.**
- 4) Tanggal 20 September 2016, bertempat di Istana Negara Jakarta , Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos dan Wakil Bupati Bintan Drs. H. Dalmasri Syam, MM di undang ke Istana Negara oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla guna menerima **Anugerah atas prestasi Laporan Keuangan WTP ke 5 kalinya berturut-turut.**

- 5) Tanggal 12 November 2016, bertempat di Jakarta, PKK Kabupaten Bintan kembali mengharumkan nama **Kabupaten Bintan atas raihan Juara III Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional.**
- 6) Tanggal 08 Desember 2016, bertempat di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos menerima **Penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H.Laoly sebagai Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia.**
- 7) Tanggal 21 Desember 2016, bertempat di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, Bupati Bintan H.Apri Sujadi, S.Sos menerima **Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Utama Tahun 2016** dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prof. Yohana Susana Yembise serta disaksikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan beberapa Menteri Kabinet Kerja.

Sedangkan Penghargaan untuk Tk.Provinsi Kepulauan Riau tercatat :

- 8) Tanggal 28 Mei 2016, bertempat di Gedung Daerah Kota Tanjungpinang, Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun menyatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan meraih **Juara Harapan I MTQ, Juara I Pawai Ta'aruf MTQ dan Juara I Stand Pameran MTQ Terbaik pada pagelaran MTQ Provinsi Kepri ke 6 Tahun 2016.**
- 9) Tanggal 09 Juni 2016, bertempat di Kantor BPK Provinsi Kepri-Kota Batam, Bupati Bintan H.Apri Sujadi,S.Sos didampingi Wakil Bupati Bintan Drs.H.Dalmasri Syam,MM menerima Penghargaan **WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.**
- 10) Tanggal 17 Juli 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan meraih **Juara Penyaji Terbaik II dan Juara I Penata Busana dan Rias pada Pagelaran Seni dan Budaya Parade Tari Daerah Provinsi Kepri Tahun 2016.**

- 11) Tanggal 08 September 2016, bertempat di Gedung Aula Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ketua PKK Kabupaten Bintan Hj. Deby Apri Sujadi menerima Piala **Juara Umum Lomba Masak Serba Ikan Tk Provinsi Kepri 2016** dari Pembina PKK Provinsi Kepri Hj. Noorlizah Nurdin Basirun.
- 12) Tanggal 11 Oktober 2016, bertempat di Hotel CK Kota Tanjungpinang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan melalui Radio Bintan 96.5 FM meraih **KPID Awards 2016** atas partisipasi dan peranan Pemerintah Daerah terhadap Lembaga Penyiaran Publik.
- 13) Tanggal 29 Oktober 2016, bertempat di Gedung Dang Merdu Pekanbaru, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan meraih **Bank Riau Kepri Awards 2016 atas Komitmen Menumbuh Kembangkan UMKM bagi masyarakat Kabupaten Bintan.**
- 14) Tanggal 31 oktober 2016, Ketua Dekranasda Kabupaten Bintan Hj. Deby Apri Sujadi untuk pertama kalinya berhasil mengantarkan Dekranasda Kabupaten Bintan meraih Penghargaan sebagai **Juara I Kerajinan Tangan dan Stand Terbaik se Provinsi Kepri pada event Pagelaran Kepri Expo 2016.**

Tantangan dan permasalahan yang terjadi selama kurun waktu 2016, merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus untuk diselesaikan, sehingga di masa mendatang perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Bintan dapat lebih berkualitas yang sekaligus merupakan *Lesson Learned* bagi berbagai pihak sebagai upaya cepat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan **Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera Melalui Pencapaian Bintan Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan).**

Berdasarkan capaian dan tantangan pelaksanaan pembangunan Tahun 2016, untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2017, diperlukan hal penting sebagai berikut :

- a. Mewujudkan hasil pembangunan yang dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, maka pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran agar dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sehingga menghindari kondisi menumpuknya tagihan pembayaran pekerjaan pada akhir Triwulan IV.
- b. Pentingnya meningkatkan koordinasi yang efektif, antar OPD/Bagian dan Pemerintah pada Tingkat Kecamatan serta Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Diperlukan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.
- d. Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta menekan Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah Desa/Kelurahan.